



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 7
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	
Target Kinerja APBD.....	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan	II - 18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	II - 32
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
BAB IV Kebijakan Akuntansi.....	IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 58
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	V - 1
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	V - 1
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	V - 1
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer.....	V - 86
5.1.3 Transfer	V - 162

5.1.4	Pembiayaan Daerah	V	-	164
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	V	-	167
5.3	Laporan Operasional.....	V	-	169
5.3.1	Kegiatan Operasional.....	V	-	170
5.3.2	Kegiatan Non Operasional.....	V	-	225
5.3.3	Pos Luar Biasa.....	V	-	225
5.3.4	Surplus - LO.....	V	-	226
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	V	-	226
5.5	Neraca	V	-	229
5.5.1	Aset.....	V	-	229
5.5.2	Kewajiban.....	V	-	491
5.5.3	Ekuitas.....	V	-	524
5.6	Laporan Arus Kas.....	V	-	524
5.6.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	V	-	524
5.6.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	V	-	531
5.6.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	V	-	534
5.6.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	V	-	535
5.6.5	Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	V	-	541
5.6.6	Koreksi Saldo Awal BOS.....	V	-	542
5.6.7	Kenaikan (Penurunan) Kas.....	V	-	542
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan			
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi.....	VI	-	1
6.2	Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok.....	VI	-	2
6.3	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional.....	VI	-	4
6.4	Kerjasama Antar Daerah.....	VI	-	11
6.5	Kerjasama Luar Negeri.....	VI	-	19
6.6	Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	VI	-	23
6.7	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA).....	VI	-	23
6.8	Penyelenggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.....	VI	-	27
BAB VII	Penutup.....	VII	-	1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2018	II - 3
2.	Tabel 2.2	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2018	II - 4
3.	Tabel 2.3	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang Tahun 2018	II - 7
4.	Tabel 2.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 12
5.	Tabel 2.5	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 13
6.	Tabel 2.6	PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 (Milyar Rupiah)	II - 16
7.	Tabel 2.7	PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	II - 17
8.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	III - 4
9.	Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 2
10.	Tabel 5.2	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 3
11.	Tabel 5.3	Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2014 S/D 31 Desember 2018	V - 6
12.	Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 27
13.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018	V - 28
14.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018	V - 38
15.	Tabel 5.7	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018	V - 48
16.	Tabel 5.8	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018	V - 52
17.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 53
18.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018	V - 54

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
19.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018	V - 56
20.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2018	V - 58
21.	Tabel 5.13	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	V - 67
22.	Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT-BTO) Tahun Anggaran 2018	V - 70
22.	Tabel 5.15	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2018	V - 73
23.	Tabel 5.16	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 80
24.	Tabel 5.17	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018	V - 88
25.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018	V - 120
26.	Tabel 5.19	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 161
27.	Tabel 5.20	Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2018	V - 171
28.	Tabel 5.21	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 172
29.	Tabel 5.22	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 173
30.	Tabel 5.23	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 186
31.	Tabel 5.24	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	V - 187
32.	Tabel 5.25	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2018	V - 188
33.	Tabel 5.26	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2018	V - 190
34.	Tabel 5.27	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2018	V - 191
35.	Tabel 5.28	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018	V - 192
36.	Tabel 5.29	Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2018	V - 195

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
37.	Tabel 5.30	Reakpitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 213
38.	Tabel 5.31	Kas Daerah Per 31 Desember 2018 dan Tahun Anggaran 2017	V - 231
39.	Tabel 5.32	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2018	V - 271
40.	Tabel 5.33	Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 272
41.	Tabel 5.34	Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Puloagung Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 274
42.	Tabel 5.35	Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 275
43.	Tabel 5.36	Perhitungan Piutang Bunga Deposito pada Bank Per 31 Desember 2018	V - 289
44.	Tabel 5.37	Perhitungan Akrua Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2018	V - 290
45.	Tabel 5.38	Perhitungan Akrua Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2017	V - 290
46.	Tabel 5.39	Daftar Nilai Piutang Kewajiban Konfensi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2018	V - 300
47.	Tabel 5.40	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2017	V - 319
48.	Tabel 5.41	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2018	V - 319
49.	Tabel 5.42	Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2018	V - 321
50.	Tabel 5.43	Mutasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2018	V - 322
51.	Tabel 5.44	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2018	V - 322
52.	Tabel 5.45	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 325
53.	Tabel 5.46	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 346
54.	Tabel 5.47	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 441
55.	Tabel 5.48	Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 442

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
56.	Tabel 5.49	Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 444
57.	Tabel 5.50	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 455
58.	Tabel 5.51	Rincian Reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan	V - 489
59.	Tabel 5.52	Kewajiban Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 491
60.	Tabel 5.53	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 492
61.	Tabel 5.54	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 492
62.	Tabel 5.55	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 494
63.	Tabel 5.56	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 494
64.	Tabel 5.57	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 495
65.	Tabel 5.58	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD tiga terbesar Per 31 Desember 2018	V - 495
66.	Tabel 5.59	Perhitungan Utang Bunga (Akrual) Per 31 Desember 2018	V - 497
67.	Tabel 5.60	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 498
68.	Tabel 5.61	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 501
69.	Tabel 5.62	Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 509
70.	Tabel 5.63	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember Tahun 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 513
71.	Tabel 5.64	Utang Belanja Barang Jasa BLUD, RSUD, dan RSKD Per 31 Desember Tahun 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 513
72.	Tabel 5.65	Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 518
73.	Tabel 5.66	Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 525
74.	Tabel 5.67	Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 532
75.	Tabel 5.68	Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017	V - 535

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
76.	Tabel 5.69	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018	V - 538
77.	Tabel 6.1	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Per 31 Desember 2018	VI - 29
78.	Tabel 6.2	Nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2018	VI - 30

DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Keterangan	Halaman
1.	Grafik 2.1	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2012-2018	II - 5
2.	Grafik 2.2	Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2017 – 2018	II - 6
3.	Grafik 2.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2012-2018	II - 8
4.	Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2018 (Persen)	II - 9
5.	Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Bulan Desember 2017 dan Januari – Desember 2018	II - 11
6.	Grafik 2.6	PDRB - Harga Berlaku Tahun 2018 (Triliun Rupiah)	II - 12
7.	Grafik 2.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Juta Rupiah)	II - 14
8.	Grafik 2.8	PDRB – Harga Konstan Tahun 2018 (Triliun Rupiah)	II - 15
9.	Grafik 2.9	Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2013-2018	II - 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas Bos Di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 dan 2017
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018
Lampiran	4	Rekapitulasi Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018
Lampiran	5	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018
Lampiran	6	Daftar <i>Stock Opname</i> Persediaan di SKPD per 31 Desember 2018
Lampiran	7	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah per 31 Desember 2018
Lampiran	9	Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2018
Lampiran	10	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018
Lampiran	11	Daftar Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD per 31 Desember 2018
Lampiran	12	Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2018
Lampiran	13	Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2018
Lampiran	14	Pendapatan Diterima di muka atas Hasil Lelang Titik Reklame per 31 Desember 2018
Lampiran	15	Daftar Utang Pegawai, Daftar Utang Belanja di SKPD dan Daftar Utang Belanja di BLUD Pada Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018
Lampiran	16	Monitoring Penyelesaian Pekerjaan Fisik Yang Melewati Tahun 2018
Lampiran	17	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2018
Lampiran	18	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (RUGI) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018
Lampiran	19	Data Penerimaan Aset KLB/KDB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2018

Lampiran	20	Data Pengeluaran Aset KLB/KDB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2018
Lampiran	21	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018
Lampiran	22	Daftar Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2018
Lampiran	23	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Yang Beratas Nama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Per 31 Desember 2018
Lampiran	24	Daftar Aset Yang Telah Berakhir Perjanjian Kerja Sama Dan Disajikan Sebagai Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan Per 31 Desember 2018



BAB I

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
29. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
30. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 Dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen

neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.



BAB II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2018 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Produk DKI Jakarta

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun nilai ekspor yang melalui wilayah kepabeanan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 telah mencapai 54.502,18 juta US \$.

Sedangkan ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta.

Pada tahun 2018, nilai ekspor produk DKI Jakarta mencapai 9.945,12 juta US\$ dan paling banyak diekspor ke negara Singapura sebesar 1.508,38 juta US\$, diikuti Philippines sebesar 967,23 juta US\$ dan United States sebesar 833,29 juta US\$. Selengkapnya ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2018

NEGARA TUJUAN		NILAI FOB (JUTA US\$)
1	Philippines	967.23
2	Singapore	1,508.38
3	Thailand	649.79
4	Malaysia	714.01
5	Vietnam	611.41
6	Hongkong	452.84
7	India	233.76
8	China	765.48
9	Japan	489.74
10	Taiwan	166.66
11	Australia	220.00
12	United States	833.29
Total 12 Negara		7,612.60
Lainnya		2,332.52
Total		9,945.12

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Sedangkan berdasarkan golongan barang, pada tahun 2018 perusahaan yang berada di DKI Jakarta paling banyak mengekspor komoditas Pakaian Jadi Bukan Rajutan sebesar 2.288,54 juta US\$, diikuti Bahan Bakar Mineral sebesar 1.734,97 juta US\$ dan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik sebesar 859,03 juta US\$. Selengkapnya nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2018

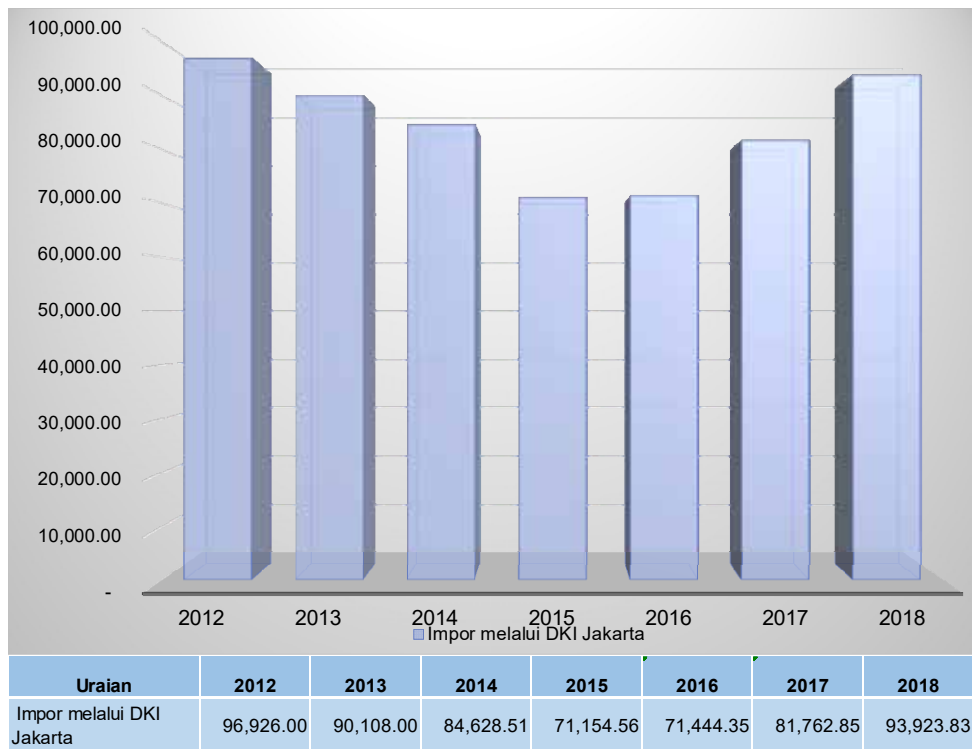
GOLONGAN BARANG		NILAI FOB (JUTA US\$)
1	Kendaraan dan Bagiannya	228.08
2	Perhiasan/Permata	341.80
3	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	859.03
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	2,288.54
5	Ikan dan Udang	440.42
6	Mesin/Peralatan Listrik	665.92
7	Barang-barang Rajutan	382.15
8	Bahan Bakar Mineral	1,734.97
9	Sabun dan Preparat Pembersih	232.54
10	Tembaga	318.90
Total 10 Komoditi		7,492.34
Lainnya		2,452.78
Total Ekspor Produk DKI Jakarta		9,945.12

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

2) Impor

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri. Adapun nilai impor yang melalui kepabeanan DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 93.923,83 juta US \$. Selama tahun 2012-2018, impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut.

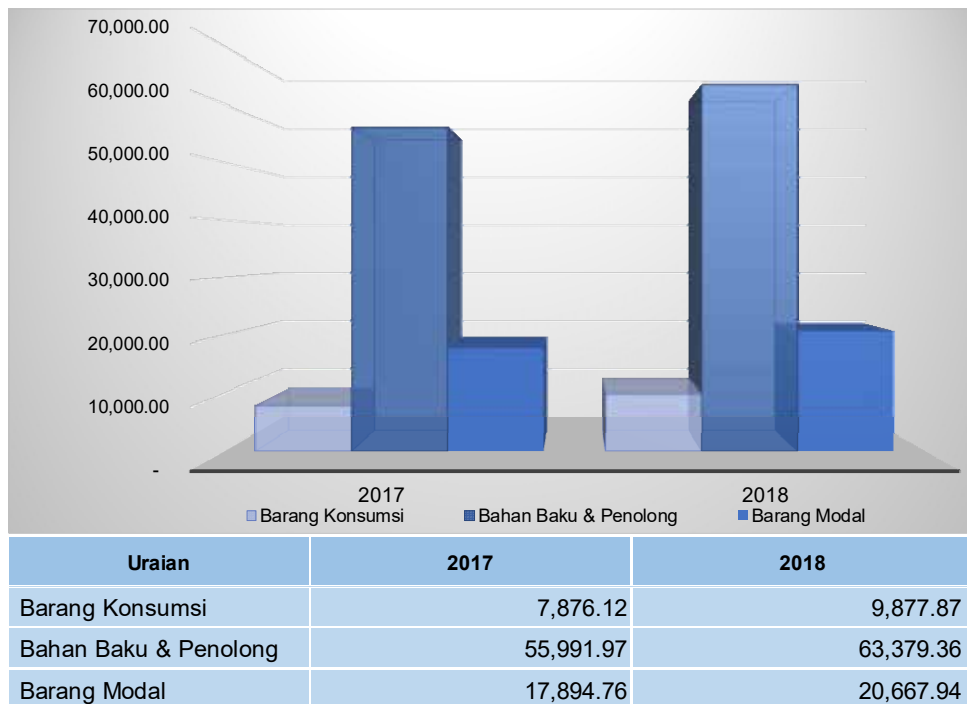
Grafik 2.1
Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau *Broad Economic Category* pada tahun 2018, dari seluruh nilai impor DKI Jakarta sebanyak 67,48%nya didominasi oleh impor golongan penggunaan barang bahan baku dan penolong, disusul impor golongan penggunaan barang modal sebanyak 22,00% dan 10,52% golongan penggunaan barang konsumsi. Selengkapnya impor melalui DKI Jakarta menurut golongan penggunaan barang dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Garafik 2.2
Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang
Tahun 2017 – 2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Sedangkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang *Harmonized System* (HS) pada tahun 2018, Karet dan Barang dari Karet mendominasi impor DKI Jakarta sebesar 17.520,30 juta US\$, diikuti Bahan Kimia Organik sebesar 14.151,28 juta US\$ dan Besi dan Baja sebesar 7.101,55 juta US\$ sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

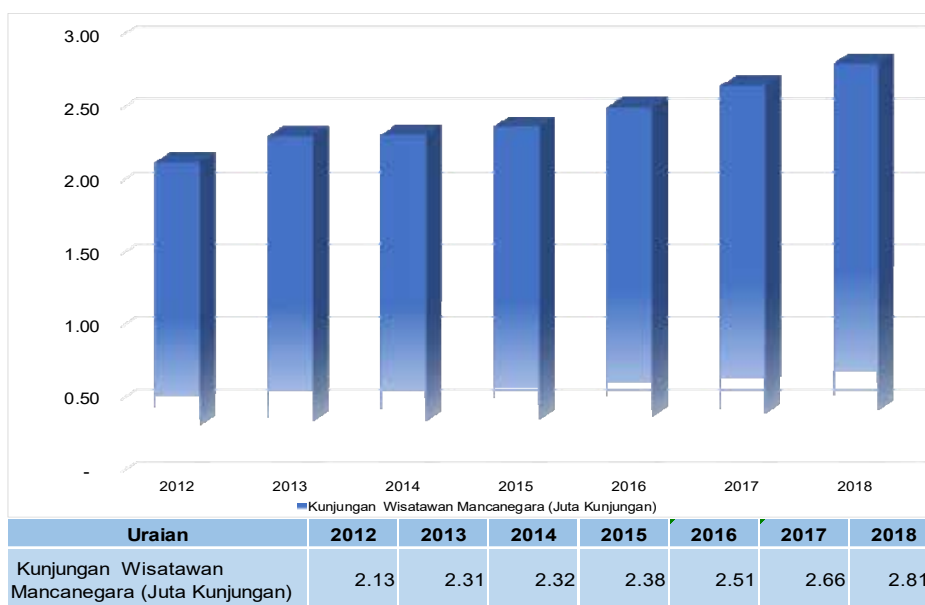
Tabel 2.3
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang Tahun 2018

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US\$)
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	2,518.60
2	Mesin/Peralatan Listrik	1,678.02
3	Plastik dan Barang dari Plastik	5,238.75
4	Kendaraan dan Bagiannya	1,558.70
5	Besi dan Baja	7,101.55
6	Bahan Kimia Organik	14,151.28
7	Karet dan Barang dari Karet	17,520.30
8	Perangkat Optik	2,427.44
9	Benda-benda dari Besi dan Baja	5,847.40
10	Tembaga	1,174.91
Total 10 Komoditi		59,216.95
Lainnya		34,706.88
Total Impor Melalui DKI Jakarta		93,923.83

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat kunjungan pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat perbelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu, inisiatif dan upaya berbagai kalangan untuk menyelenggarakan *event* tetap berskala internasional, seperti *Jakarta International Java Jazz*, *Indonesia Fashion Week*, *Jakarta Fashion and Food Festival* dan *event* internasional lainnya menjadi alasan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jakarta.

Jumlah wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 2,81 juta kunjungan. Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta selama tahun 2012 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut.

Grafik 2.3**Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2012-2018**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 2.599,17 triliun rupiah dengan PDRB perkapita pertahun sebesar 248,31 juta rupiah atau 17,44 ribu US\$. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 tumbuh sebesar 6,17% berada diatas nasional yang tumbuh sebesar 5,17%. Perekonomian Jakarta tahun 2018 sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,22%. Walaupun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,05%, tingkat pertumbuhan Jakarta tetap berada diatas 6% yang mencerminkan tetap terjaganya perekonomian Jakarta. Perlambatan tersebut salah satunya karena melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disebabkan oleh perlambatan pada investasi bangunan seiring dengan pembangunan infrastruktur Jakarta yang rata – rata hampir rampung.

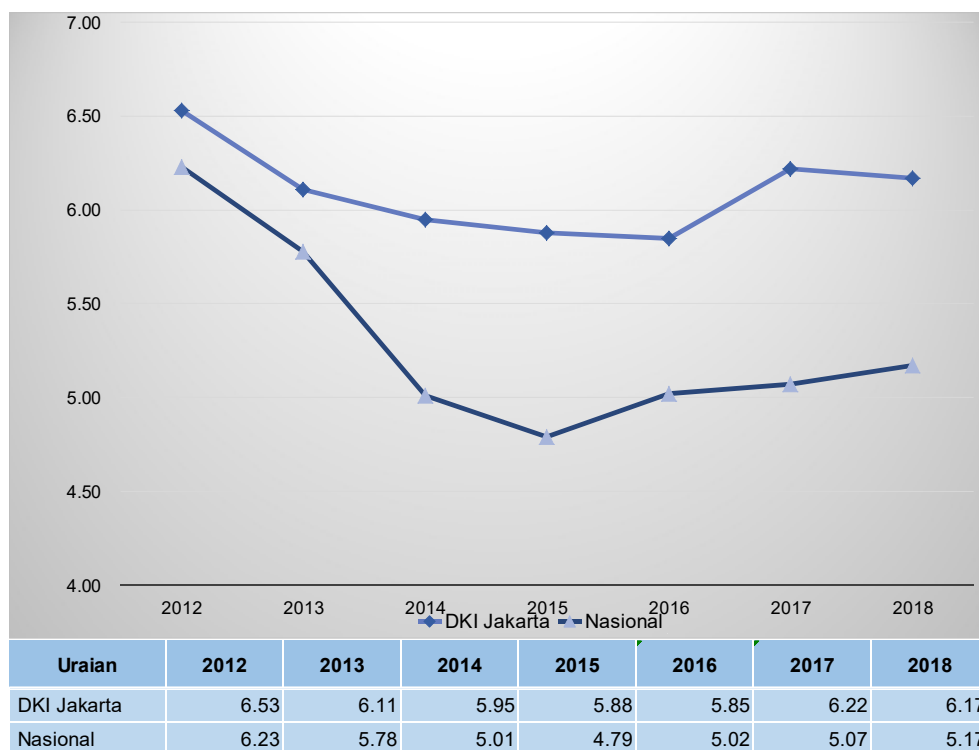
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 16,45%. Pertumbuhan tersebut disebabkan peningkatan dana pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018. Selanjutnya diikuti pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang

melayani Rumah Tangga sebesar 8,34% dan diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2019 sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 8,20% sedangkan Komponen Impor sebagai faktor pengoreksi pertumbuhan Jakarta tumbuh sebesar 10,34% yang disebabkan meningkatnya impor barang seiring dengan berlangsungnya pembangunan infrastruktur. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 3,50%.

Struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 60,52%; diikuti oleh Komponen Ekspor sebesar 39,46%; dan Komponen PMTB sebesar 38,96%. Komponen Impor mengoreksi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 57,15%.

Grafik 2.4

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

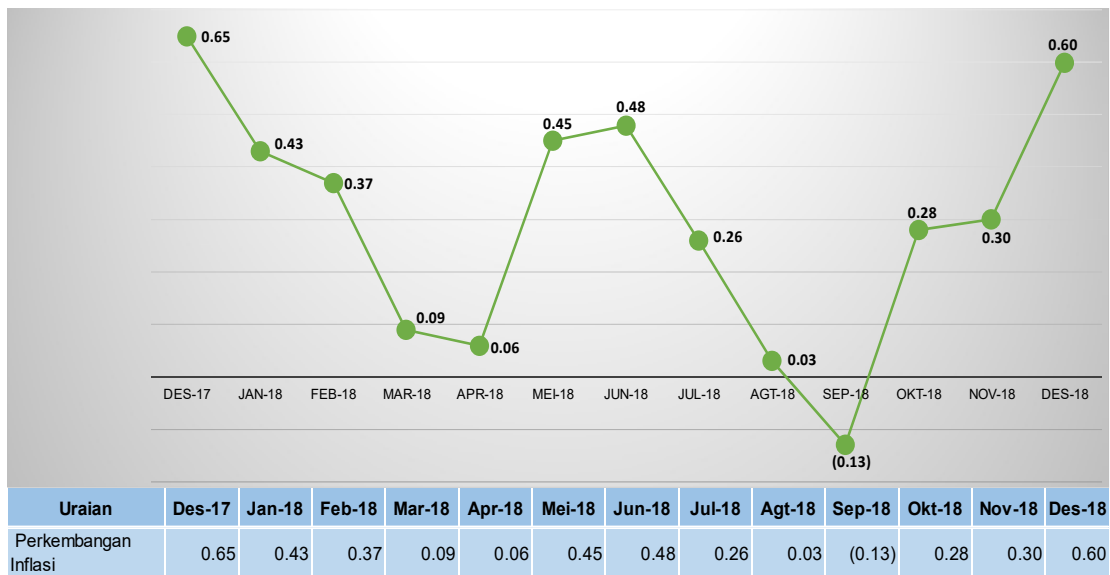
Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas menjadi lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,34%, diikuti oleh Administrasi Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,65%. Informasi dan Komunikasi masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,02%.

Struktur perekonomian Jakarta Tahun 2018 didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi peranan sebesar 16,93%; diikuti oleh Industri pengolahan sebesar 13,15%; dan Konstruksi sebesar 12,11%. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi memberikan peranan hanya sebesar 0,35% terhadap perekonomian Jakarta

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2018 sebesar 3,27% menurun sebesar 0,45% dibanding inflasi tahun 2017. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,60% dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September 2018 sebesar -0,13%. Inflasi di bulan Desember 2018 disebabkan oleh naiknya angkutan udara yang disebabkan kenaikan harga tiket pesawat akibat adanya libur Natal dan Tahun Baru, telur ayam ras dan daging ayam ras (0,06%). Deflasi di bulan September 2018 disebabkan oleh turunnya harga komoditi daging ayam ras, angkutan udara dan cabai merah.

Grafik 2.5**Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Bulan Desember 2017 dan Januari – Desember 2018**

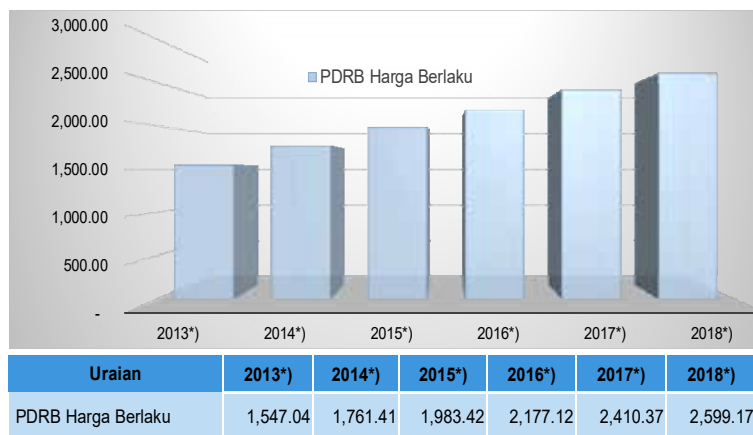
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

Laju inflasi tertinggi DKI Jakarta pada tahun 2018 terjadi pada komoditi makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 4,96%; diikuti komoditi bahan makanan sebesar 4,72%; dan komoditi sandang sebesar 4,63%.

d. Struktur Ekonomi

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2018, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.599,17 triliun rupiah. Berdasarkan Grafik 2.6 diketahui bahwa PDRB atas dasar harga pada tahun 2018 sebesar 188,80 (1,83%) dari tahun 2017 (2.410,37 triliun rupiah).

Grafik 2.6**PDRB - Harga Berlaku Tahun 2018 (Triliun Rupiah)**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 74,03% PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 25,64% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,34% dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.4**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%) 2018*)
	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)	
Pertanian	1.62	1.71	1.87	1.99	2.06	2.13	0.08%
Pertambangan dan Penggalian	4.29	4.54	5.03	5.18	5.75	6.59	0.25%
Industri Pengolahan	209.78	239.60	274.49	295.04	323.93	341.72	13.15%
Listrik Gas dan Air Bersih	5.75	6.29	6.78	7.13	8.29	10.04	0.39%
Konstruksi	210.65	234.18	261.07	280.43	308.84	314.63	12.11%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	340.87	397.03	436.20	468.08	526.17	564.40	21.71%
Pengangkutan dan Komunikasi	160.07	183.23	206.91	233.56	267.50	298.78	11.50%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	367.62	413.59	719.35	805.84	876.34	959.18	36.90%
Jasa-jasa	246.40	281.23	71.72	79.87	91.51	101.69	3.91%
Produk Domestik Regional Bruto	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.39	2,599.16	100.00%
PDRB Tanpa Migas	1,542.75	1,756.87	1,978.39	2,171.94	2,404.64	2,592.57	99.75%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2018 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 60,52%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 59,60%. Kontribusi terbesar kedua ada pada investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 38,96%, melambat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,18%. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen perubahan inventori yang hanya 1,89% selama tahun 2018.

Tabel 2.5
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018
(Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun					
	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	943.85	1,069.51	1,157.94	1,277.89	1,436.52	1,572.97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	26.81	35.40	35.72	41.31	47.74	52.88
Pengeluaran Konsumsi	211.85	220.74	240.12	256.31	305.25	371.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	683.50	725.06	808.55	854.18	944.35	1,012.72
Perubahan Inventori	3.69	3.49	5.56	17.86	42.63	49.00
Ekspor Barang dan Jasa	272.13	298.31	329.76	330.15	895.52	1,025.62
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	964.20	1,164.99	951.76	924.44	1,261.64	1,485.52
Net Ekspor Antar Daerah	369.44	573.89	357.53	323.87		
Produk Domestik Regional Bruto	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.37	2,599.19

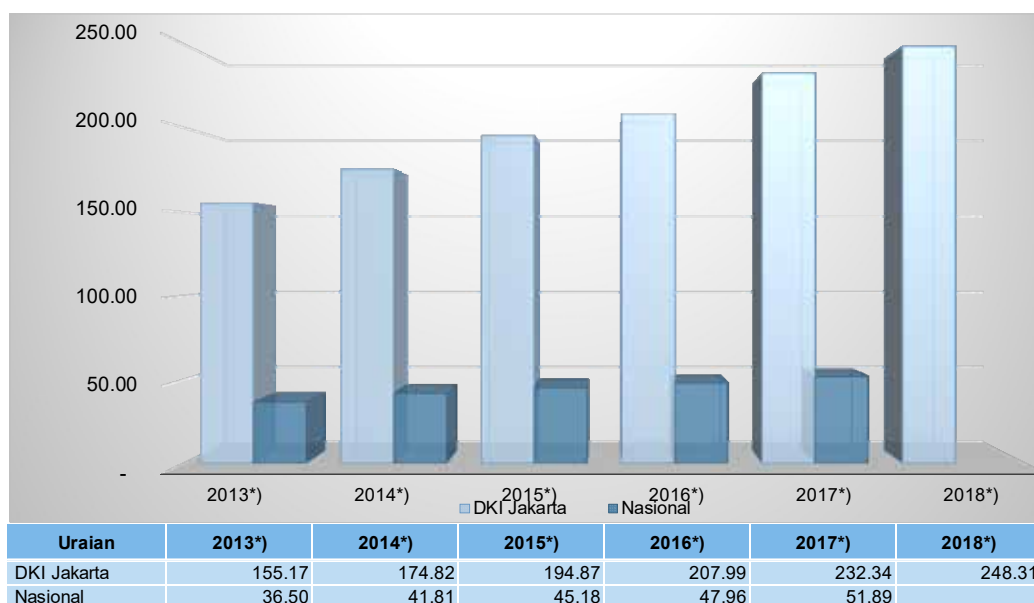
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam hal ini penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Grafik 2.7 menunjukkan adanya kenaikan pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 (232,34 juta rupiah per kapita) ke tahun 2018 (248,31 juta rupiah per kapita) yakni sebesar 15,97 juta rupiah per kapita (6,87%).

Grafik 2.7

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 (Juta Rupiah)



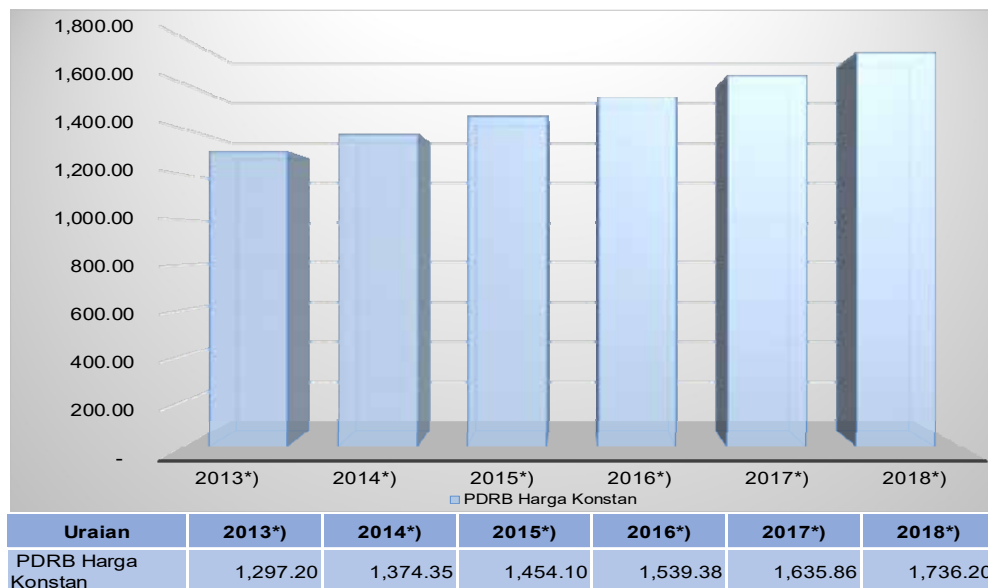
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

5) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 (1.736,20 triliun rupiah) mengalami peningkatan sebesar 100,34 triliun rupiah (6,3%) dari tahun 2017 (1.635,86 triliun rupiah).

Grafik 2.8

PDRB – Harga Konstan Tahun 2018 (Triliun Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

6) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,06% diberikan oleh sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 5,82% diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,30% dengan laju pertumbuhan 6,25% dan sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,26% dengan laju pertumbuhan 8,99%. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1% seperti, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalan dan sektor listrik-gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang dari 0,1%.

Tabel 2.6

**PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018
(Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha	Nilai (Triliun Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2017	Sumber Pertumbuhan (%)
	2016*)	2017*)	2018*)		
Pertanian	1.39	1.39	1.39	0.00%	0.00%
Pertambangan dan Penggalian	2.91	2.92	2.94	0.68%	0.00%
Industri Pengolahan	193.61	207.99	219.74	5.65%	0.72%
Listrik Gas dan Air Bersih	4.57	5.03	5.98	18.89%	0.06%
Konstruksi	198.49	209.00	215.89	3.30%	0.42%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	322.62	340.56	361.84	6.25%	1.30%
Pengangkutan dan Komunikasi	207.49	229.72	250.38	8.99%	1.26%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	552.21	578.11	611.74	5.82%	2.06%
Jasa-jasa	56.10	61.13	66.29	8.44%	0.32%
Produk Domestik Regional Bruto	1,539.38	1,635.85	1,736.19	6.13%	6.13%
PDRB Tanpa Migas	1,536.47	1,632.93	1,733.25	6.14%	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

7) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,07%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen Perubahan Inventori yang tumbuh sebesar 149,26%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 14,79% dan Impor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 10,29%. Sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 4,50%.

Tabel 2.7

**PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018
(Miliar Rupiah)**

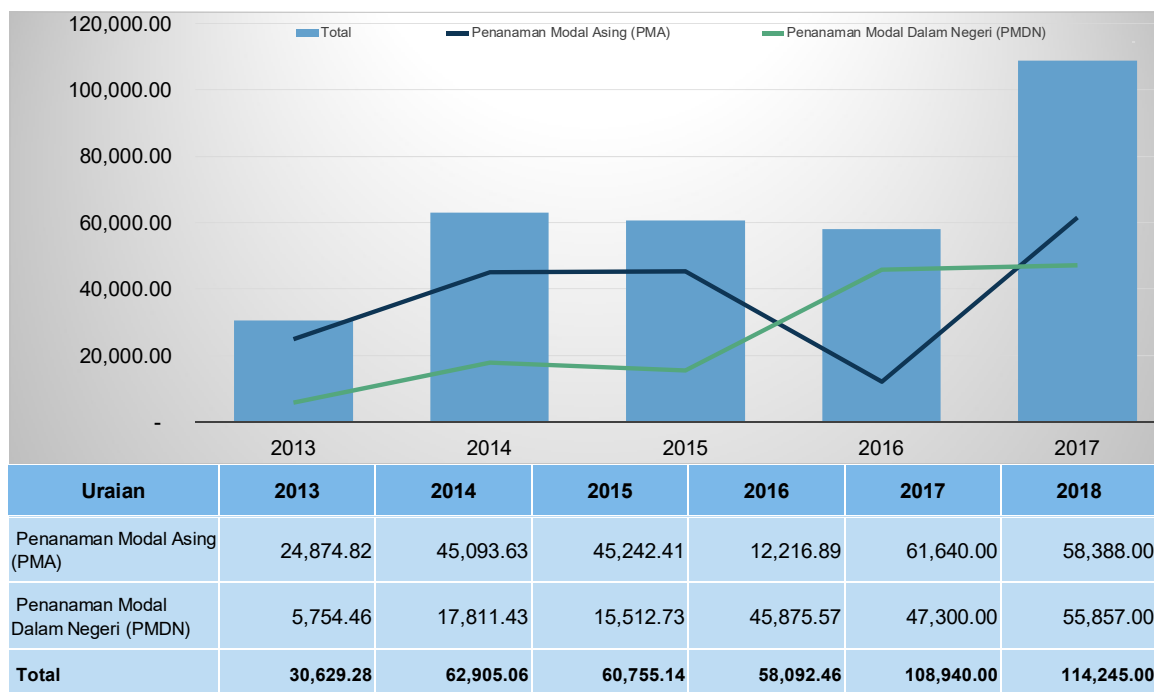
Pengeluaran	Tahun (Triliun Rp)			Pertumbuhan (%)		
	2016*)	2017*)	2018*)	2016*)	2017*)	2018*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	897.53	948.41	1,006.12	5.25%	5.67%	6.08%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30.20	33.93	36.57	-4.65%	12.37%	7.78%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	183.89	185.17	212.55	3.82%	0.70%	14.79%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	664.86	705.98	737.73	2.54%	6.19%	4.50%
Perubahan Inventori	9.25	12.20	30.41	96.56%	31.89%	149.26%
Ekspor Barang dan Jasa	226.78	588.92	637.85	-1.11%	159.68%	8.31%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	705.09	838.76	925.04	-10.95%	18.96%	10.29%
Net Ekspor Antar Daerah	231.97	16.58		-24.34%	-92.85%	-100.00%
Produk Domestik Regional Bruto	1,539.38	1,652.43	1,736.19	5.89%	7.34%	5.07%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

8) Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 58,388 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 55,857 triliun rupiah. Berdasarkan grafik 2.9 diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PMA dari tahun 2017 dimana pada tahun tersebut PMA mencapai 61,640 triliun rupiah. Menariknya PMDN naik dari tahun 2017 yang hanya mencapai 47,300 triliun rupiah.

Grafik 2.9
Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2013-2018



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2019

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

16. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2017-2022 dan RKPD tahun 2018. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.1 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- a. Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- b. Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan *drive thru* dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru

1.2 Peningkatan *Law Enforcement*

- a. Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

1.3 Intensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi *online sistem* terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

- b. Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- c. Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- d. Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- e. Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.
- f. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok
- g. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi dan pemungutan pajak daerah
- h. Membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online
- i. Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
- j. Melakukan pendataan, penyisiran dan pemeriksaan terhadap objek atau subjek pajak daerah
- k. Melakukan cleansing data piutang pajak daerah

1.4 Ekstensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi penerapan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% direncanakan menjadi 30%
- b. Melakukan perluasan basis Pajak Daerah:
 - Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
 - Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan

- Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED
- Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar
- Optimalisasi pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp200 juta/tahun
- Melakukan perubahan dasar pengenaan pajak reklame dan penyesuaian tarif Kelas Jalan

1.5 Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- a. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- c. Memaksimalkan dan menyempurnakan pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

1.6 Peningkatan *Law Enforcement*

- a. Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- b. Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.
- c. Menegakkan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti penertiban parkir liar dan kios-kios penunggak pembayaran retribusi daerah.

1.7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

- a. Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi Daerah.
- b. Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 2.1 Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2.2 Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- 2.3 Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD), dan lain-lain.
- 2.4 Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- 2.5 Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 2.6 Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.

3. Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

- 5.1 Pemberlakuan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor baru sebesar 15%.

- 5.2 Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4% menjadi 6% untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.
- 5.3 Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% menjadi 30%.
- 5.4 Meningkatkan Tarif Pajak Hiburan terhadap jenis hiburan tertentu sebesar 35% untuk jenis hiburan malam dan sejenisnya, sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 75% untuk jenis hiburan tertentu.
- 5.5 Melakukan pemungutan pajak daerah dengan peningkatan online sistem wajib pajak bekerjasama dengan bank BRI dengan mengimplementasikan *Cash Management System* (CMS) terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.
- 5.6 Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pemberlakuan perubahan dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame berjalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan.
- 5.7 Menerapkan penyelenggaraan reklame dengan teknologi LED, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dan menata ruang kota Jakarta menjadi lebih indah dalam penempatan reklame.
- 5.8 Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan *on-street parking* menjadi *off-street parking* dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
- 5.9 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
- 5.10 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah

sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

5.11 Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.

5.12 Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan

5.13 Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar

ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan di bawah ini:

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- 2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJPD 2005-2025

Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005- 2025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria:

- 1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025.
- 2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan

kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA.

- 3) Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- 4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
- 6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- 7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada pelayanan dasar:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) Sosial

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:

- 1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah..
- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Manusia

Melalui Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Terlaksananya pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas yang diikuti sebanyak 144 orang dan lansia potensial sebanyak 70 orang
- 2) Terlaksananya pelayanan Day Care bagi Penyandang Disabilitas Mental Pada Unit Informasi Dan Layanan Sosial (UILS) Rumah Kita selama setahun
- 3) Terlaksananya penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik berupa Hearing Aid sebanyak 75 unit, kursi roda sebanyak 200 unit, tongkat kaki tiga sebanyak 113 unit, tongkat netra sebanyak 20 unit, kruk sebanyak 10 unit dan tongkat walker sebanyak 46 unit
- 4) Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi 3.310 Warga Binaan Sosial (WBS) di seluruh Panti Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Terlaksananya pemulangan sebanyak 851 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke daerah asal
- 6) Terlaksananya penanganan PMKS jalanan melalui Tim Reaksi 'Cepat di 5 wilayah Kota Administrasi dalam mengoordinasikan dan mengawasi 284 titik rawan PMKS
- 7) Terjaganya titik rawan PMKS Jalanan di Jakarta dengan menjangkau sebanyak 745 PMKS di Jakarta Barat dan 2.048 PMKS di Jakarta Timur
- 8) Terlaksananya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak panti dalam bentuk Klastering Pola Pengasuhan dan Telaahan tentang

Tumbuh Kembang Anak Panti dengan Melihat pada Pengembangan Konsep Dirinya

- 9) Terlaksananya penyediaan tenaga pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Panti Sosial di DKI Jakarta sebanyak 227 orang
- 10) Terlaksananya Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial dan Kesenian Warga Binaan Sosial (WBS) melalui 11 kegiatan yang diikuti sebanyak 100 WBS. Kegiatan – kegiatan tersebut adalah Marawis, Tenis Meja, Bola Voli, Pencak Silat, Marching Band, Musik Band, Bimbingan Belajar Bahasa Inggris SMP dan SMK, Bimbingan dan Pelatihan Kesenian, Bimbingan Sosial, Bimbingan agama dan Bimbingan Psikologi
- 11) Terlaksananya apresiasi dan kreativitas seni bagi PMKS Anak di wilayah Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 150 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 150 peserta dan Jakarta Pusat sebanyak 200 peserta
- 12) Terlaksananya lomba kreatifitas seni Warga Binaan Sosial (WBS) dalam rangka Hari Anak Nasional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 200 peserta

b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

- 1) Terlaksananya Rehab Total Gedung SKKT Klender, Kelapa Gading Timur, Pegangsaan Dua, Sukapura dan Semper Barat
- 2) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Ciracas, Gedung Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Duren Sawit dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2 Cipayung
- 3) Terlaksananya Rehab Ringan Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Ciganjur, Cipedak, Petukangan Utara, Pejaten Barat, Guntur, Kramat Jati, Malaka Jaya, Cakung Timur dan Jatinegara Kaum

- 4) Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor dan panti sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana seluruh panti sosial di lingkungan Provinsi DKI Jakarta berupa penyediaan 2 unit mesin cuci, pompa air, 2 unit Portable Sound System, 2 unit Laptop, dinamic microphone, kulkas, pembelian gerobak, exhaust fan, frezer sayuran, lemari locker, dispenser stand, dan lain – lain
- 6) Terlaksananya pengembangan teknologi sistem data dan informasi kesejahteraan sosial dalam bentuk pembelian alat, pembuatan kajian dan pengembangan aplikasi
- 7) Tersedianya alat kebersihan untuk 25 SKKT di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 8) Tersedianya alat kebersihan gedung SKKT di 12 lokasi gedung LK3

c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rusun dan RPTRA dengan peserta berasal dari Kepulauan Seribu (60 Orang), Jakarta Barat (8 Kecamatan), Jakarta Timur (48 RPTRA), di sekolah Jakarta Timur (6 Sekolah) dan Jakarta Pusat (400 Orang)
- 2) Terlaksananya pembentukan dan pengembangan pos pengaduan di RPTRA Jakarta Selatan (2 Pos), Jakarta Timur (2 Lokasi), Jakarta Barat (150 orang), Rusun Tanah Tinggi dan RPTRA Harapan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembentukan Percontohan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah di Provinsi DKI Jakarta (677 orang), Jakarta Barat (6 Sekolah), Jakarta Utara (6 Sekolah), Kepulauan Seribu (40 Orang) dan Jakarta Selatan (200 Orang)
- 4) Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
- 5) Terlaksananya Pengasuhan terhadap keluarga yang memiliki anak usia sekolah tidak bersekolah di Provinsi DKI Jakarta (1.050 orang), Jakarta Barat (150 orang), Jakarta Timur (300 orang), Jakarta Utara

(600 orang), Kepulauan Seribu (6 kelurahan), dan Jakarta Selatan (200 orang)

- 6) Terlaksananya penguatan gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi DKI Jakarta (1.769 orang), Jakarta Timur (180 orang), Jakarta Utara (100 orang), Kepulauan Seribu (6 Kelurahan), Jakarta Pusat (100 orang), Jakarta Barat (100 orang), dan Jakarta Selatan (60 orang)
- 7) Terlaksananya Training Healing yang diikuti sebanyak 80 orang

d. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Terlaksananya Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kepulauan Seribu yang diikuti sebanyak 60 orang dan Jakarta Selatan
- 2) Terlaksananya Advokasi Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 50 orang, Jakarta Barat sebanyak 60 orang, Jakarta Utara sebanyak 120 orang, Jakarta Timur sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 100 orang
- 3) Terlaksananya pendampingan penyusunan draft Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 12 SKPD
- 4) Terlaksananya penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 870 orang

e. Program Pengelolaan Risiko Bencana

- 1) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan relawan serta potensi masyarakat lainnya sebanyak 2.000 peserta
- 2) Terlaksananya pembinaan kelurahan tangguh bencana di 20 kelurahan
- 3) Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan simulasi sekolah/ madrasah aman dari bencana serta penyediaan perlengkapannya di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 30 sekolah
- 4) Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini bencana dalam bentuk Belanja Modal Automatic Weather Monitoring System sebanyak 25 unit

- 5) Tersusunnya pergub tentang Standar Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Tingkat Provinsi DKI Jakarta

f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- 1) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN) dalam rangka mewujudkan pendidikan PAUD yang berkualitas (1 Paket)
- 2) Terlaksananya pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Taman Penitipan Anak (TPA) Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 paket, Jakarta Selatan sebanyak 18 paket, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat sebanyak 6 paket, Jakarta Pusat sebanyak 1 paket
- 3) Terlaksananya apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Kota
- 4) Terlaksananya penyelenggaraan Festival PAUD di RPTRA dan Rusunawa dalam bentuk Lomba Mewarnai untuk siswa PAUD di RPTRA Johar Berseri, RPTRA Rasela Indah, RPTRA Rawa Indah, RPTA Pulo Gundul, RPTRA Rustanti, RPTRA Pandawa, RPTRA Kampung Budaya, RPTRA Bandar Kemayoran, RPTRA Harapan Muliya, RPTRA Mardani Asri, RPTRA Kampung Benda, RPTRA Beringin
- 5) Terselenggaranya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) dalam bentuk kegiatan pencapaian kompetensi bakat motorik dan intelegensi anak PAUD di Jakarta Selatan, Jakarta Barat (1.000 orang), Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu (300 orang)
- 6) Terselenggaranya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Siswa PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 sekaligus menyelenggarakan Lomba Mewarnai, Mendongeng, Berceloteh untuk siswa PAUD dan menghasilkan Juara 1, 2 dan 3 di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya Hari Aksara Internasional (HAI) ke-53 Tahun 2018 dan Expo Program PAUD dan Dikmas sebanyak 1.000 orang

g. Program Wajib Belajar 12 Tahun

- 1) Terlaksananya penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SDN/SDLBN untuk sebanyak 631.237 peserta didik
- 2) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN) di 23 sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMAN) di 19 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen di 46 sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) di 24 sekolah
- 3) Terlaksananya Program Pendidikan Kesetaraan Paket A di PKBM Negeri di 7 sekolah, Paket B di PKBM Negeri di 10 sekolah, Paket C di PKBM Negeri di 9 sekolah, Paket A, B dan C diikuti sebanyak 27.000 Orang

h. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- 1) Terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) Jenjang SDLB sebanyak 830 siswa, Jenjang SMALB sebanyak 322 siswa, Jenjang SMPLB sebanyak 317 siswa dan Jenjang TKLB sebanyak 6 siswa
- 2) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di 7 Lokasi
- 3) Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 192 siswa
- 4) Terlaksananya Pemusatan Latihan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 siswa dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 siswa
- 5) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dalam bentuk kegiatan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD

- 6) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi sebanyak 7 cabang lomba dan terpilihnya para pemenang lomba untuk diusulkan ke tingkat provinsi sebagai perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus/Layanan Khusus Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 8) Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 168 siswa, Lomba Keterampilan Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kota Menuju Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 160 siswa dan Lomba Literasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 100 siswa
- 9) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Sekolah Inklusi dalam bentuk Serifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Pendidikan Jasmani & Bimbingan Konseling

i. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- 1) Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk SMP Tingkat Kota bertempat di SMAN 78 Jakarta yang diikuti sebanyak 275 siswa
- 2) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional bagi SMA Mata Pelajaran Astronomi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Kebumian, Komputer, Matematika, Kimia dan Biologi sebanyak 945 siswa, SMP menuju tingkat Nasional Mata Pelajaran Matematika, IPA dan IPS sebanyak 315 siswa dan SD sebanyak 66 siswa
- 3) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi
- 4) Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMA dan SD

- 5) Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota di SMAN 78, untuk SD Tingkat Kota diikuti sebanyak 160 Siswa, SMP Tingkat Kota diikuti sebanyak 250 siswa, SMK/SMA Tingkat Kota diikuti 390 peserta
- 6) Terlaksananya Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Siswa SD Menuju Tingkat Nasional sebanyak 12 siswa, bagi Siswa SMK sebanyak 14 siswa
- 7) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi selama 2 hari yaitu 17 dan 18 April 2018 dengan 5 cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari 16 nomor pertandingan
- 8) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional bagi Siswa SD sebanyak 132 siswa, SMP sebanyak 176 siswa, SMA sebanyak 176 siswa dan SMK sebanyak 400 siswa
- 9) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMK
- 10) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi menuju Tingkat Provinsi untuk mata lomba Karate, Pencak Silat, Bulutangkis, Atletik dan Renang
- 11) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi siswa SD Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan 12 Cabang Lomba
- 12) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Pendidikan SMP sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 13) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam 2 hari yaitu 06 dan 07 Februari 2018 dengan 5 cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari 14 nomor pertandingan

- 14)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan 5 cabang lomba
- 15)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara
- 16)Terlaksananya Pemusatan Latihan Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI) bagi Siswa SMA Menuju Tingkat Nasional sebanyak 12 siswa
- 17)Terlaksananya Pengiriman Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa SD Tingkat Nasional sebanyak 6 siswa dan bagi Siswa SMK Tingkat Provinsi sebanyak 14 siswa
- 18)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bagi Siswa SMA Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 132 siswa, SMK sebanyak 128 Siswa, SMP sebanyak 143 siswa dan SD sebanyak 66 siswa
- 19)Terlaksananya Seleksi FLS2N bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi
- 20)Terlaksananya Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN) Siswa Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Menuju Tingkat Provinsi
- 21)Terlaksananya Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP Tingkat Kota sebanyak 210 siswa
- 22)Terlaksananya Seleksi Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi sebanyak 3 cabang lomba sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 23)Terlaksananya Seleksi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Asing SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan hasil terpilihnya perwakilan peserta debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk Tingkat Provinsi
- 24)Terlaksananya Seleksi dan Lomba Budaya Mutu SD Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional yang diikuti sebanyak 33 Sekolah

- 25)Terlaksananya Seleksi Apresiasi Sastra Siswa (ASS) SD Tingkat Kota menuju Provinsi dalam bentuk kegiatan seleksi bidang seni dan sastra olah raga di sekolah Jenjang SD
- 26)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Apresiasi Sastra Siswa SD Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional terpilih sebanyak 5 siswa sebagai perwakilan provinsi
- 27)Terlaksananya Seleksi Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) bagi siswa SMP dan SMA Tingkat Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 28)Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bagi siswa SMK ke Tingkat Nasional sebanyak 53 siswa
- 29)Terlaksananya Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Jenjang SMK Tingkat Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke Tingkat Provinsi
- 30)Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bagi Siswa SMK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 400 siswa
- 31)Terlaksananya Seleksi Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 32)Terlaksananya Seleksi LOMOJARI Siswa SMP Terbuka Tingkat Kota/Kabupaten Menuju Tingkat Provinsi dengan peserta 13 orang dari masing-masing SMP Terbuka (8 SMP Terbuka)
- 33)Terlaksananya Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Kecantikan Kulit, Kecantikan Rambut, Patiiserie, Pemasaran, Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, Multimedia, TKJ, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif dalam bentuk Uji Kompetensi Sertifikasi Peserta didik
- 34)Terlaksananya Ujian Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M BD) SD/MI/SDLB yang diikuti sebanyak 152.640 orang
- 35)Tersusunnya kisi-kisi penulisan butir soal ujian sekolah Jenjang SD dan PLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB) oleh sebanyak 264 orang serta penyusunan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum

2013 Berbasis SKKKNI (Standar Kompetensi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia)

- 36) Tersusunnya soal Try Out dan Ujian Sekolah untuk jenjang SMA oleh sebanyak 66 guru dan jenjang SMP sebanyak 52 guru
- 37) Tersusunnya kisi-kisi Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah SMA dilaksanakan oleh sebanyak 66 guru dan Sekolah SMP dilaksanakan oleh sebanyak 52 guru
- 38) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perwakilan peserta untuk Tingkat Provinsi
- 39) Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) menuju Tingkat Nasional Jenjang SMA sebanyak 134 siswa, Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Menuju Tingkat Nasional Jenjang SMA sebanyak 153 siswa dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat wilayah selama 2 hari dengan 9 cabang lomba
- 40) Terlaksananya Seleksi Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 41) Terlaksananya Seleksi Kawah Kepemimpinan SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

j. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) Terlaksananya pemberdayaan guru kelas XII yang mengajar Mata Pelajaran Ujian Nasional yaitu 9 Mata Pelajaran
- 2) Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK Tingkat Kota pada tanggal 23 dan 25 April 2018 bertempat di Ruang MH Thamrin dengan rincian mata pelajaran, yaitu PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Umum, Sejarah Indonesia, PJOK, PKWU, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah, Ekonomi, Sosial, Geografi, BSI, Sastra Inggris dan Antropologi
- 3) Terlaksananya pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP sebanyak 200 guru

- 4) Terlaksananya pemberdayaan mutu MGMP SMP Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat dengan peserta terdiri dari Guru SMPN/SMPS dengan rincian mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,, Matematika, IPA, IPS, PKn, Seni Budaya, Penjasorkes, Tata Boga dan TIK
- 5) Terlaksananya pemilihan guru berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas jenjang TK, SD, SMP, SMA SMK dan SLB yang berprestasi Tingkat Kota/Kabupaten
- 7) Terlaksananya pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan dalam bentuk usulan kenaikan pangkat, sertifikasi induksi guru pemula dan SK pengangkatan pertama dalam jabatan guru
- 8) Terlaksananya peningkatan mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Produktif (9 Mata Pelajaran) dalam rangka penguatan kewirausahaan SMK
- 9) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru bagi Kepala Bagian Tata Usaha tingkat SMA dan SMK Negeri serta Tenaga Administrasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 10)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Adminisrasi Perkantoran dan Akuntansi dalam bentuk sertifikasi kompetensi dari BNSP untuk guru kejuruan
- 11)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru bagi Kepala Satlak SMP Negeri dan Tenaga Administrasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 12)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Bidang Pariwisata dalam bentuk Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk guru kejuruan
- 13)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Bidang Sosial dan Kepribadian dalam bentuk Seritifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Penjas & BK

- 14)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Bidang Sosial dan Kepribadian sebanyak 150 orang
- 15)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka bagi Guru SD sebanyak 300 orang
- 16)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan bagi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka untuk Guru SMA sebanyak 150 orang, Guru SMK sebanyak 150 orang, Guru SMP sebanyak 150 orang dan Kepala Sekolah SMA sebanyak 30 orang
- 17)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan dengan peserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprasdik SMK sebanyak 30 orang
- 18)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis melalui pelatihan dengan peserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprasdik SMP sebanyak 72 orang
- 19)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Kepala Sekolah TK dan SD sebanyak 120 orang
- 20)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis model-model Pembelajar Berbasis Multimedia dalam bentuk Serifikasi bidang P4TK Penjas & BK
- 21)Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD C
- 22)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pemasaran realisasi melalui Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk Guru Kejuruan
- 23)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pembelajar Moda Tatap Muka melalui pelatihan bagi Guru PLB sebanyak 60 orang
- 24)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pembelajar SMA, SMK, SMP dan SD Moda Tatap Muka dalam bentuk Serifikasi Guru Pembelajar dari P4TK Penjas & BK

- 25)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengawas TK, SD, SMP SMA dan SMK dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan dari LPMP
- 26)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam bentuk pelatihan dengan peserta sebanyak 93 orang
- 27)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pengembang Skema Sertifikasi dalam bentuk Sertifikasi Pelatihan Kompetensi untuk Asesor Kompetensi
- 28)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru sebagai Asesor Kompetensi, Metodologi, Penerapan Dokumen QMS, dan Penyusun Mater Uji Kompetensi
- 29)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Tata Usaha SMP, SMA, SMK melalui pelatihan dengan peserta sebanyak 119 orang
- 30)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Teknik Bidang Keahlian TIK, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif dalam bentuk Sertifikasi Kompetensi dari BNSP untuk Guru Kejuruan
- 31)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana SMA sebanyak 30 orang, SMK sebanyak 30 orang dan SMP sebanyak 72 orang
- 32)Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Wakil Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK dalam bentuk Sertifikat Pelatihan dari LPMP

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- 1) Terlaksananya rehab berat gedung sekolah untuk alih fungsi TK di 8 lokasi
- 2) Terlaksananya rehab berat gedung SDN di 35 lokasi
- 3) Terlaksananya rehab berat gedung SMAN/SMKN di 6 lokasi
- 4) Terlaksananya rehab berat gedung SMPN di 12 lokasi

I. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- 1) Terlaksananya pembiayaan premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dengan anggaran sebesar Rp1,58 triliun untuk 5.732.908 peserta PBI
- 2) Terlaksananya pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan anggaran sebesar Rp100 Miliar untuk layanan kesehatan yang tidak termasuk kedalam program JKN

m. Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- 1) Terlaksananya Advokasi dan Pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan peserta sebanyak 75 orang dalam 10 angkatan
- 2) Terlaksananya pengembangan wawasan fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan
- 3) Terlaksananya pengembangan wawasan bagi petugas kebugaran dengan peserta sebanyak 50 orang dalam 2 angkatan
- 4) Terlaksananya pengembangan wawasan petugas kesehatan lingkungan tentang Higiene Sanitasi Pangan (HSP) dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan

n. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

- 1) Terlaksananya layanan kesehatan dalam bentuk dukungan kesehatan lapangan pada pengamanan unjuk rasa, even olahraga dan bencana
- 2) Terlaksananya Piket Siaga Pusat Pengendalian dan Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) Tingkat Kota/Kabupaten
- 3) Terlaksananya Piket Siaga 24 jam Pusat Pengendalian dan Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) Tingkat Provinsi
- 4) Terlaksananya Pengembangan Wawasan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Layanan Kesehatan dengan peserta sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan

- 5) Terpilihnya pemenang inovasi dan produktivitas bidang kesehatan di Tingkat Provinsi
- 6) Terpilihnya pemenang puskesmas berprestasi Tingkat Provinsi
- 7) Terlaksananya layanan kesehatan di RSUD Cipayung
- 8) Terlaksananya layanan kesehatan di RSUD Kebayoran Lama
- 9) Terlaksananya layanan kesehatan di event Asian Games dan Asian Para Games dengan dukungan petugas sebanyak 1.274 orang

o. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

- 1) Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Tuan Rumah ASIAN Games XVIII/2018 mulai dari persiapan Torch Relay pembukaan, pelaksanaan, penutupan dan pasca pelaksanaan di Jakarta
- 2) Terlaksananya Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun dalam bentuk cabang Olahraga Bola voli, Futsal dan Tenis Meja bagi putri/putri kategori SD, SMP dan SMA
- 3) Terlaksananya 5 kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4) Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta berupa 5 macam permainan yaitu enggrang, tropah panjang, tarik tambang, hadang dan dagongan dengan peserta sebanyak 488 orang serta pengiriman ke tingkat provinsi sebanyak 78 orang
- 5) Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 5 kali kejuaraan dan pengiriman ke tingkat Provinsi sebanyak 4 kali
- 6) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta dengan peserta sebanyak 18.930 orang terdiri dari 5 Provinsi dan 8 cabang olahraga yang dilombakan
- 7) Terlaksananya pengiriman Tim DKI Jakarta ke Beijing Football Competition dan menjadi juara, sekaligus mendapatkan gelar pemain terbaik, top scorer, dan pelatih terbaik

- 8) Terlaksananya Jakarta Sister City Badminton Tournament yang diikuti oleh 3 kota, yaitu : Bangkok, Seoul dan Beijing, serta daerah sekitar DKI Jakarta dengan hasil Tim DKI Jakarta menjadi Juara
- 9) Terlaksananya Kejuaraan Atletik dan Renang Pelajar Bulanan Tingkat Kota dengan peserta 2.139 orang
- 10) Terlaksananya Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 2.000 pelajar dengan tujuan untuk mendapatkan bibit atlet
- 11) Terlaksananya Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Tingkat Kota sebanyak 12 kali yang diikuti oleh 750 peserta dan mengirimkan 100 atlet ke Tingkat Provinsi
- 12) Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 3.340 orang dalam rangka mendapatkan bibit atlet
- 13) Terlaksananya Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 100 orang terdiri dari pelatih PPOP, pelatih SC pelatih pembina olahraga UNJ dan BAPOPSI
- 14) Terlaksananya Pelatihan Sepak Bola dalam rangka Sister City Jakarta - Berlin yang diikuti oleh 1.000 orang peserta
- 15) Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kontingen Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
- 16) Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Olahraga Pondok Bambu berupa terbangunannya Fasilitas olahraga Lapangan Futsal, Basket, Tennis, Outdoor Fitnes, dan Area Bermain serta rehabilitasi Gedung Olahraga Voli Indoor
- 17) Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Remaja di 4 kecamatan (Cilandak, Matraman, Pademangan dan Pancoran) dengan fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp, toilet, tempat duduk, guidance block)
- 18) Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Asia Junior Sports Exchange Games

- 19)Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) II Tahun 2018 di Solo, Jawa Tengah dengan hasil meraih 12 medali emas, 15 medali perak dan 6 medali perunggu, serta meloloskan seluruh cabang olahraga pada POPNAS XV tahun 2019 di Papua
- 20)Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepabola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo International Youth Football dengan hasil Tim DKI Jakarta mendapatkan peringkat ke 11 dari 24 negara sister city yang mengikuti kompetisi tersebut
- 21)Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dengan jumlah awal atlet yang dibina sebanyak ±1.600 atlet, pelatih dan asisten pelatih
- 22)Terlaksananya Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebanyak 171 orang atlet mahasiswa, 19 orang pelatih dan 23 orang asisten pelatih Provinsi DKI Jakarta serta Tim 15 orang SC, 13 orang Masseur, 1 orang Dokter dan 5 orang Tim Monitoring Pada Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- 23)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Permainan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam cabang olahraga Basket, Futsal, Sepaktakraw, Tenis Meja, Tenis lapangan, Voli, Catur dan Badminton
- 24)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk POPPROV dan POMPROV untuk cabang olahraga Basket, Futsal, Sepaktakraw, Tenis Meja, Tenis lapangan, Voli, Catur dan Badminton
- 25)Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PPLM untuk cabang olahraga Judo, Kareta, Pencak Silat, Kempo, Taekwondo, Tenis Meja, Catur, Atletik, Panahan, Peatanque, Renang, dan Voli Pasir
- 26)Terlaksananya Pengadaan Peralatan Olahraga untuk POPWIL, SOINA, ISO, ASEAN Deaf Games 2018 untuk cabang olahraga

Sepakbola, Tenis Meja, Silat, Bulutangkis, Basket, Takraw, Atletik, Voli, Tenis Lapangan, Boccia,

- 27)Terlaksananya Pemberian Penghargaan Atlet dan Pelatih Asal DKI Jakarta yang Berprestasi pada Asian Games dan Asian Para Games 2018 sebanyak 75 orang, terdiri dari 11 orang atlet peraih medali emas,13 atlet peraih perak, 22 orang atlet peraih perunggu, 10 orang pelatih peraih emas, 11 orang pelatih peraih perak, 7 orang pelatih peraih perunggu dan 1 orang pelatih peraih perak, dan 253 orang atlet non medali
- 28)Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Pelatih dan Atlet Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2018 sebanyak 139 orang
- 29)Terlaksananya Pengiriman Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada Uji Coba Latihan dan Kejuaraan Nasional Tahun 2018 dengan perolehan medali sebanyak 27 Medali Emas, 35 Medali Perak dan 42 Medali Perunggu
- 30)Terlaksananya Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan – kejuaraan Internasional sebagai berikut :
- 31)5th Asia Pacific Deaf Badminton Championship Kuala Lumpur Malaysia 2018 dengan perolehan medali sebanyak 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu
- 32)Para Table Tennis Copa Tango 2018 dengan perolehan medali sebanyak 5 emas dan 3 perak dan 2 perunggu
- 33)Para Table Tennis Spanish Open 2018 dengan perolehan medali sebanyak 5 emas, 2 perak dan 2 perunggu
- 34)5th APTBF Bowling Championship Tahun 2018 di Manila-Philipina 2018 dengan perolehan medali sebanyak 1 emas dan 5 perunggu
- 35)Terlaksananya Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional ke-8 Special Olympics Indonesia tahun 2018 di Riau dengan perolehan medali sebanyak 17 emas, 10 perak, dan 14 perunggu serta kejuaraan 1st Java Bali United 5 A-Side Football Tournament 2018 di Semarang dengan hasil menjadi juara pertama

36)Terlaksananya Asian Para Games 2018 di Jakarta dengan sukses, aman dan meningkatnya kerjasama antara panitia pelaksana dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

37)Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Serbaguna Raden Inten

p. Program Penanganan Fakir Miskin

- 1) Terlaksananya pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin dengan jumlah pendamping sebanyak 160 orang (1 orang mendampingi 50 UEP atau 5 KUBE)
- 2) Terlaksananya pembekalan pengetahuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang akan exit program dengan peserta sebanyak 50 Orang
- 3) Terlaksananya edukasi perilaku finansial bagi keluarga miskin penerima UEP/KUBE kepada 100 orang peserta
- 4) Terlaksananya pemberian bantuan kemandirian kepada 120 usaha ekonomi produktif (UEP) bagi eks warga binaan sosial (WBS) panti sosial
- 5) Terlaksananya pembinaan dan Pemantapan Pendamping PKH dan Operator PKH sebanyak 100 orang
- 6) Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin Non PKH dalam bentuk pelatihan tata boga di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 75 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 75 peserta, Jakarta Timur sebanyak 140 peserta, Jakarta Utara sebanyak 500 peserta dan Jakarta Pusat
- 7) Terlaksananya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha ekonomi produktif untuk keluarga miskin dalam bentuk pelatihan tata boga yang diikuti sebanyak 140 peserta, pelatihan craft sebanyak 70 peserta, pelatihan menjahit sebanyak 70 peserta dan pelatihan potong rambut sebanyak 70 peserta
- 8) Terlaksananya pelatihan keterampilan dan pemberian paket bantuan peralatan usaha ekonomi produktif kepada remaja di daerah rawan konflik berupa pelatihan AC yang diikuti sebanyak 40 peserta dan pelatihan steam motor sebanyak 11 peserta

2. Pembangunan Ekonomi & Infrastruktur

Melalui Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

- 1) Terlaksananya pendampingan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 310 produk IKM dan pendaftaran merek sebanyak 320 produk IKM
- 2) Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) dan dokumen Pengembangan Industri Kreatif
- 3) Terlaksananya pendampingan desain kemasan produk industri sebanyak 520 produk IKM
- 4) Terciptanya wirausaha baru sebanyak 320 orang
- 5) Terlaksananya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat rusun di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 75 peserta dan Jakarta Pusat sebanyak 40 peserta
- 6) Terlaksananya bimbingan teknis menjahit, fashion, mengolah makanan dan minuman serta service HP yang diikuti sebanyak 5.120 wirausaha baru di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara
- 7) Terlaksananya pelatihan kerajinan Kain Perca (Quilting) yang diikuti sebanyak 50 Industri Kecil Menengah di 2 lokasi RPTRA
- 8) Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat rumah susun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk pembinaan Industri Kecil Menengah yang diikuti sebanyak 1.600 peserta
- 9) Terlaksananya pelatihan kerajinan Quilting yang diikuti sebanyak 30 peserta

b. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Terfasilitasinya 60 akta pendirian koperasi wirausaha dan sekolah negeri

d. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

- 1) Terlaksananya pengadaan 362 etalase yang diserahkan kepada para PKL binaan sebagai bentuk bantuan sosial untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha
- 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan kewirausahaan melalui pelatihan softskill bagi calon wirausaha baru di 5 kota dan 1 kabupaten administrasi yang diikuti oleh sebanyak 31.949 peserta
- 3) Terlaksananya pembangunan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berlokasi di Jakarta Timur (Jl. Raya Centex Ciracas dan Jl. Raya TPU Pondok Ranggon Cipayung), Jakarta Pusat (Jl. Johar Baru) dan Jakarta Utara (Blok A Lantai 3 Lokasi Binaan Lorong 103 Permai)
- 4) Terlaksananya penyiapan sarana dan prasarana PKL dalam bentuk pembangunan kios di Loksem Tegal Alur sebanyak 53 kios, Loksem Tomang Utara sebanyak 93 kios, Loksem Jl. Hadiah RW 01 sebanyak 21 kios dan Loksem Sisi Selatan dan Utara Pasar Kopro sebanyak 56 kios
- 5) Terlaksananya Kegiatan Bazar di 5 Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta untuk para wirausaha baru/ naik kelas di tingkat kecamatan sebanyak 64 kegiatan dan tingkat kota sebanyak 20 kegiatan
- 6) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana warung di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 314 buah etalase kaca dan 537 rak besi
- 7) Terlaksananya perbaikan kios di Jl. Kesenian (JP 27) sebanyak 29 Kios pedagang seluas 1.019 m²; di JP 37 dan JP 38 Poncol

sebanyak 137 Kios pedagang seluas 870 m²; di Jl. Martimbang (JS 23) sebanyak 12 kios pedagang kuliner seluas 113,2 m²; dan di Gg. Kober RT 001/02 (JS40) sebanyak 42 kios pedagang non kuliner dengan luas 124,8 m²

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1) Tersedianya Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) berbasis web untuk menyimpan dan mengakses berbagai informasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu di 152 lokasi dalam 1 tahun dengan 44.131 sampel, sampel positif bahan kimia sebanyak 134 sampel, negatif 43.996 sampel
- 3) Tersedianya data pendukung (data stok, pasokan, ekspor, impor, produksi, tercecer, penggunaan untuk industri, bibit, dan lain – lain) dan 1 Neraca Bahan Makanan (NBM) beras, ikan, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak, buah dan sayur, gula dan susu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- 4) Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian di DKI Jakarta melalui :
 - a) pengadaan bahan dan alat sarana produksi di 6 Balai Penyuluhan Pertanian
 - b) Terselenggaranya penyuluh pertanian melalui penyusunan program penyuluh pertanian
 - c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluh pertanian
 - d) Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian serta peningkatan motivasi kinerja oleh Motivator Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia Pertanian kepada sebanyak penyuluh PNS 69 orang dan penyuluh THL 14 orang
- 5) Terlaksananya Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melalui formasi nilai PPH Masyarakat di DKI Jakarta sebanyak 2 kali pertemuan dengan jumlah peserta 100 orang, narasumber berasal dari MWA dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi DKI

Jakarta dengan hasil capaian pada Pola Pangan Harapan adalah sebesar skor PPH sebesar 84,3

f. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

- 1) Tersusunnya naskah akademis Rencana Zonasi Rinci wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZRWP3K)
- 2) Terlaksananya Penyelesaian Pematangan Lahan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke seluas 16.000 m²
- 3) Terlaksananya Sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operation Procedures* (SSOP) bagi pembina mutu daerah di seluruh Kota/Kabupaten pada tanggal 1-2 Agustus 2018
- 4) Tersusunnya dokumen analisis Pembangunan Sentra Perikanan yang bersinergi dengan pembangunan tanggul laut
- 5) Tersedianya data update kondisi ekosistem bawah laut 5 gugusan pulau di Kepulauan Seribu
- 6) Terbangunnya Tanggul/ Sheet pile arah laut di muara angke sepanjang 45 m arah laut sebelah utara pasar grosir di kawasan pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke

g. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan pertanian perkotaan kepada warga Rusun Jatinegara Kaum, Marunda, Daan Mogot, Cakung Barat, Rawa Bebek, Pulo Gebang
- 2) Terdistribusinya barang-barang pertanian perkotaan ke Rusun, RPTRA, Sekolah, Poktan, dan Kantor
- 3) Terlaksananya pengadaan mesin bajak roda empat sebanyak 1 unit untuk kegiatan pertanian di lahan kosong/tidur, dan lokasi lainnya. Dengan prioritas pertama di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Desa Ciangir, Legok, Tangerang, Banten
- 4) Tersedianya 6 unit mobil pengendalian HPR untuk mendukung operasional pengendalian penularan rabies di DKI Jakarta

- 5) Terselenggaranya Pengawasan Kesehatan Hewan cabang olah raga equestrian ASIAN Games XVIII di Jakarta Equestrian Park Pulomas
- 6) Terbangunnya 1 unit IPAL Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang ada di Rawa Lele Jakarta Timur
- 7) Terlaksananya Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) pada 46 titik di Jakarta Pusat, 30 titik di Jakarta Utara, 30 titik di Jakarta Barat, 120 orang di Jakarta Selatan, dan 50 titik di Jakarta Timur

h. Program Pengendalian Banjir

- 1) Terlaksananya pembangunan infrastruktur prasarana kali/sungai di bidang aliran Barat yakni Kali Grogol (4600 meter), Kali Sekretaris (632 meter) dan Mookervart (500 meter)
- 2) Terlaksananya pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur melalui pembangunan Sheet Pile Kali Ciliwung Juanda - Veteran (641,5 meter), Cofferdam luar batang, Kali Asin serta infrastruktur prasaranan kali/sungai bidang Sungai dan pantai sistem aliran timur (Kali Sentiong : sepanjang 1.618 meter) dan perbaikan kolam olakan di Waduk Pluit (1 Unit) dan turap kali Krukut Kel. Glodok (31,7 meter)
- 3) Terlaksananya pengadaan tanah sungai/saluran dengan output pembayaran pelepasan hak pengadaan tanah normalisasi di 4 kali yakni Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur, Kel. Tanjung Barat, Kel. Bukit Duri, Kel. Gedong, Kel. Balekambang, Kel. Kampung Melayu, Kel. Cililitan, Kel. Cawang), Kali Sunter (Kel. Lubang Buaya, Kel. Pondok Bambu), Kali Pesanggrahan (Kel. Bintaro, Kali Tegal Amba Kel. Pondok Bambu, Pembangunan JEDI di Kali Tegal Alur, Pembangunan tanggul pantai di Kel. Kamal Muara), dan Kali Baru (Kel. Tengah, Saluran Jati Kramat Kel. Pondok Kelapa)
- 4) Terlaksananya pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya di 4 lokasi yakni di Jakarta Timur (Embung Sejuk dengan volume 8.000 m³ dan Cakung Timur dengan volume 84.063 m³), Jakarta Selatan (Waduk Aselih Kel. Cipedak Kec.

Jagakarsa dan Pagar Waduk Sigura-Gura Kec. Pancoran panjang saluran 265,8 m), sistem aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta (pembangunan hanggar Waduk Jagakarsa, perapihan tanah sekitar hanggar Waduk Jagakarsa, pembuatan saringan inlet dan outlet Waduk Jagakarsa, pemadatan tanah untuk jalan sekitar Waduk Jagakarsa dan penghijauan Waduk Jagakarsa), dan sistem aliran Timur Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 lokasi (Waduk Pekayon, Waduk Giri Kencana, Waduk Kaja, Waduk Kampung Rambutan 1, Waduk Kampung Rambutan 2 dan Waduk Pondok Rangan)

- 5) Terlaksananya pengadaan tanah waduk/situ/embung dalam bentuk pembayaran pelepasan hak pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Brigif Kel. Cipedak, Situ Mangga Bolong Kel. Srengseng Sawah, Waduk Cimanggis Kel. Cibubur, Waduk Pondok Rangan III Kel. Cilangkap, Waduk Jl. Rawa Malang Kel. Semper Timur, Embung Jl. Mandor Iren Kel. Sunter Jaya, Embung Jl. Kampung Kandang Kel. Semper Barat dan Embung di Jl. Raya Cakung Cilincing Kel. Cakung Timur
- 6) Terbangunnya tanggul pengaman pantai sistem aliran Barat (sepanjang 106 m) dan Timur (sepanjang 993,95 m)
- 7) Terbangunnya tanggul dan pemecah gelombang di 6 (enam) pulau yakni Pulau Harapan (447 m), Pulau Kelapa (300 m), Pulau Kelapa Dua (130 m), Pulau Pramuka (426 m), Pulau Tidung (tanggul pemecah gelombang sepanjang 750 m dan tanggul laut sepanjang 490 m), Pulau Untung Jawa (pemecah gelombang sepanjang 500 m dan tanggul laut sepanjang 450 m)

i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) di 3 Pulau yakni di Pulau Kelapa Dua (0,25 liter/detik), Pulau Pramuka (1,5 liter/detik) dan Pulau Panggang (3 liter/ detik)

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah di Pulau Lancang (2 Zona dengan jumlah total 300 sambungan rumah) dan Jakarta Barat (Komplek Damkar Joglo Kecamatan Kembangan)

k. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Terlaksananya pengadaan alat angkut kebersihan gerobak motor sebanyak 500 buah
- 2) Terlaksananya peningkatan TPS ramah lingkungan di 4 (empat) wilayah yakni di Kota Administrasi Jakarta Barat (2 lokasi: Dipo Hanura & Dipo RW 02 Duri Kosambi), Jakarta Pusat (6 lokasi: Dipo Kebon Kelapa Kec. Gambir, Dipo PAM Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Dipo PLN Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Dipo Satpel LH Kec. Gambir, TPS Gelora Bung Karno, dan TPS PPKK Kemayoran), Jakarta Selatan (2 lokasi: Dipo KKN Kecamatan Pesanggrahan dan Dipo Tebet), dan Jakarta Timur (14 Lokasi)
- 3) Terlaksananya pembinaan Bank Sampah di 5 wilayah Kota Administrasi
- 4) Terlaksananya pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah Berbasis Android
- 5) Terlaksananya penyediaan sarana dan kelengkapan bank sampah berupa sarana bank sampah disumber (57 unit), timbangan gantung (75 unit); kantong plastik packing (5.000 lembar), cetak buku (2.000 buku); mesin pencacah (13 unit), karung (10.000 buah) dan buku tabungan (485 rekening)
- 6) Terlaksananya pembangunan Bank Sampah di Satuan Pelaksana Kec. Tanah Abang (2 Lokasi : RW 01 dan RW 04 Kel. Petamburan) dan Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat (Lokasi :Jl. Rawasari Selatan)
- 7) Terlaksananya pengadaan Truck Compactor (8 unit 15 m³, 28 unit 6 m³) dan Wheel Loader (8 unit)

l. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

- 1) Terlaksananya Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi melibatkan 209 Petugas TNI/Polri dan 1.567 Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
- 2) Terlaksananya Pengendalian dan Pemanduan Lalu Lintas Event Olahraga Internasional 2018 event Asian Games 2018 selama 18 Hari dan Asian Para Games 2018 selama 10 Hari
- 3) Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Operasional/Pemanduan 250 cc sebanyak 177 unit, Sepeda Motor Operasional/Pemanduan Sedang sebanyak 34 unit, Sepeda Motor Operasional/Pemanduan Besar sebanyak 2 unit, Mobil Patroli sebanyak 45 unit, Mobil operasional sebanyak 4 Unit, Derek sebanyak 10 unit
- 4) Terbangunnya Jalur Khusus Event Olahraga Internasional 201 berupa terpasangnya 150 unit Rambu RPPJ, 150 unit rambu lalin, road barrier 500 unit, 5.126 m² marka putih, 9.962 m² marka merah, dan tersedianya 1.000 buah traffic cone
- 5) Terbangunnya Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway yaitu rambu tiang sebanyak 210 unit, rambu lalin sebanyak 50 unit, rambu portable sebanyak 50 unit, rambu Cremona sebanyak 50 unit, rambu standar sebanyak 455 unit, rambu RPPJ sebanyak 55 unit
- 6) Terbangunnya pagar pengaman lalu lintas di 3 Lokasi, pembangunan rambu ZOSS di 5 lokasi, pembangunan Guardrail di 3 Lokasi, pembangunan marka merah di 7 Lokasi, pembangunan ZOSS di 2 Lokasi, pengecatan Speed Trap ZOSS di 1 Lokasi dan pengecatan Speed Trap dan Speed Trap ZOSS di 41 Lokasi

m. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- 1) Terbangunnya simpang tidak sebidang Cipinang Lontar Jakarta Timur dan Bintaro Permai - Rel KA (Fly Over Bintaro Permai - Rel KA Jakarta Selatan
- 2) Terbangunnya FO Pancoran Jakarta Selatan
- 3) Terbangunnya UP Kartini Jakarta Selatan, UP Mampang – Kuningan, dan UP Matraman – Salemba

n. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 5 wilayah yakni di Jakarta Timur (Hotmix di 29 lokasi (140.037,64 m²) dan pekerjaan Beton di 4 lokasi (2.509,62 m²), Jakarta Pusat (Hotmix di 20 lokasi (103.620,08 m²), dan pekerjaan beton di 2 lokasi (1.712 m²), Jakarta Utara (Hotmix di 13 lokasi (79.873,37 m²) dan pekerjaan beton di 7 lokasi (8.931.2 m²), Jakarta Barat (Hotmix di 34 lokasi (141.237,96 m²) dan pekerjaan beton di 4 lokasi (4.259,12 m²) dan Jakarta Selatan (Hotmix di 23 lokasi (110.861,64 m²), dan Pekerjaan Beton di 3 lokasi (1.611,92 m²) dimana masing-masing wilayah dilengkapi dengan marka jalan
- 2) Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi DKI Jakarta (Hotmix di 54 lokasi seluas 233.306,83 m² beserta marka jalan dan pemeliharaan expansion join di 25 lokasi sepanjang 1.081,7 m)

o. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

- 1) Terlaksananya survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway serta angkutan umum lainnya
- 2) Tersedianya transportasi bagi atlet dan official serta wasit dan tamu VIP guna mendukung pelaksanaan Asian Games XXVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan

p. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

- 1) Terbangunnya tanggul di Pelabuhan Penumpang Muara Angke sepanjang 134 m
- 2) Terlaksananya peningkatan dermaga Pulau Sebir dalam bentuk pekerjaan tanggul pemancangan Sheet Pile 203 m, Pekerjaan Dermaga dan Kanopi 20 m x 2 m
- 3) Terlaksananya pembangunan tanggul dan dermaga sisi Timur Pulau Pramuka dalam bentuk pekerjaan tanggul pemancangan Sheet Pile 420 m serta pekerjaan pos jaga 6 m x 7 m

q. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum dan pemberian sertifikasi kepada 750 orang peserta diklat pengemudi angkutan umum
- 2) Terbangunnya Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway dalam bentuk pemasangan Guardrail Jakarta Barat di Rawa Bengkel, Jakarta Selatan sebanyak 119 unit, Jakarta Timur sebanyak 98 unit, Jakarta Utara sebanyak 200 unit, Pagar Pengaman Jalan sebanyak 138 unit, Pelican Crossing di 2 lokasi, RPPJ di 10 lokasi, Rambu Hollow di 27 Lokasi, dan Rambu Tiang F. di 10 Lokasi

r. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

- 1) Tersedianya lahan untuk pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di 9 lokasi yaitu di Kel. Pulo Gebang dan Kel. Pengilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur (2.704 m²); Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara (1.020 m²), Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (45.947 m²); Kp Kandang Sapi Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (Lanjutan) (9.719 m²); Jl. Daan Mogot Km.18 Kel. Kalideres Kec. Cengkareng Jakarta Barat (46.827 m²); Jl. Inspeksi Cakung Drain Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara (49.982 m²); Jl. Bojong Indah Kel. Rawabuaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat (18.868 m²), Kp. Kongsil Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara (5.748 m²), Jl. Margasatwa Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (19.866,60 m²).
- 2) Terbangunnya rumah susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 tower, 12 lantai, 346 unit).
- 3) Revitalisasi rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 tower, 17 lantai, 394 unit)
- 4) Terbangunnya rumah susun Kelurahan Pengadegan (1 tower, 16 lantai, 188 unit)
- 5) Terbangunnya rumah susun lokasi binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4 dan Tower 5 (3 Tower, 16 lantai, 420 unit)

- 6) Terbangunnya rumah susun lokasi binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 Tower, 7 lantai, 95 unit)

s. Program Peningkatan Penanaman Modal

- 1) Terlaksananya penyusunan 5 jenis regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Terlaksananya pengendalian penanaman modal sebanyak 5 laporan
- 3) Terlaksananya promosi penanaman modal sebanyak 10 kali

t. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Terlaksananya 4 kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Terlaksananya penelitian dan uji fisik terhadap permohonan perizinan dan non perizinan sebanyak 4 rumpun
- 3) Terlaksananya pengembangan call center serta komunikasi masyarakat
- 4) Terlaksananya pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada 300 orang

u. Program Penataan Ruang

- 1) Tersusunnya peta operasional di atas peta struktur existing di 42 kecamatan dan 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.
- 2) Tersusunnya peta 3 lokasi daerah terbangun yang berubah yakni di ruas rencana tol Cibitung Cilincing, tol akses Priok dan Pulau Lancang melalui pemetaan dengan menggunakan teknologi UAP.
- 3) Tersusunnya peta penggunaan lahan dan batas administrasi di 5 wilayah Kota Administrasi dan sebagian Kabupaten Kepulauan Seribu melalui peta tematik
- 4) Tersusunnya peta dasar struktur kota eksisting di DKI Jakarta dengan pembuatan peta dasar DKI Jakarta Koordinat UTM
- 5) Terlaksananya sebanyak 434 pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan lokasi/penyegelan.
- 6) Terlaksananya penyidikan pelanggaran tata ruang sebanyak 16 penyidikan

- 7) Terlaksananya 5 kali pelaksanaan sidang yustisi terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada
- 8) Tersusunnya laporan hasil kajian rencana pemanfaatan ruang pada koridor yang dilalui sarana angkutan umum massal berbasis rel di DKI Jakarta
- 9) Terbitnya buku laporan hasil kajian mengenai pemanfaatan KDB rendah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 10) Terbitnya buku laporan kajian mengenai PRK Kawasan pembangunan terpadu Muara Angke
- 11) Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Jakarta City Planning Gallery (JCPG).
- 12) Terlaksananya pengembangan sistem informasi ruang, bangunan gedung Pemda dan Pertanahan yang terdiri dari pengembangan pada beberapa sistem (pengawasan dan penertiban; informasi dokumen manajemen sistem; GIS Tata Ruang Jakarta, GIS Jakarta Satu; sistem informasi Perizinan SIPPT, IMB, KRK; informasi monitoring kewajiban sumur resapan; aplikasi pendataan dasawisma; monitoring dasawisma; pendataan aset gedung pemda; aset ruang terbuka hijau; informasi PK RDTR dan informasi PTSL)
- 13) Tersusunnya dokumen kajian dan rancangan peraturan gubernur tentang tata bangunan, penataan kampung kumuh dan insentif disinsentif.

3. Pengembangan Integritas Aparatur

Melalui Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

- 1) Terlaksananya uji kompetensi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.930 pegawai
- 2) Terlaksananya proses kenaikan pangkat terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.907 SK Kenaikan Pangkat
- 3) Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai sebanyak 252 Nama Jabatan
- 4) Tersusunya Sistem Talent Pool
- 5) Terlaksananya pengembangan dan Pengelolaan sebanyak 3 Sistem Informasi Kepegawaian
- 6) Terlaksananya evaluasi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 7) Terlaksananya 154 seleksi mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD
- 8) Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)
- 9) Terlaksananya rekrutmen CPNS Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebanyak 3.048 peserta lulus Seleksi Akhir CPNS dan masuk proses pemberkasan dari total formasi sebesar 3.244 peserta

b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

- 1) Terselenggaranya 4 kegiatan hari besar keagamaan Islam, 2 kegiatan hari besar keagamaan Kristen, 2 kegiatan hari besar keagamaan Budha dan 2 kegiatan hari besar keagamaan Hindu
- 2) Terlaksananya kegiatan Solidaritas Aparatur KORPRI
- 3) Terselenggaranya kegiatan PORSENIBUD Anggota KORPRI
- 4) Terlaksananya Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta

c. Program Pengembangan Kompetensi SDM

- 1) Terlaksananya diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Aktual yang diikuti sebanyak 150 peserta
- 2) Terlaksananya diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diikuti sebanyak 90 peserta

- 3) Terlaksananya diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi yang diikuti sebanyak 450 peserta
- 4) Terlaksananya diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diikuti sebanyak 150 peserta
- 5) Terlaksananya diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 6) Terlaksananya diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Learning) yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 7) Terlaksananya diklat Kereta Api Perkotaan yang diikuti sebanyak 90 peserta
- 8) Terlaksananya diklat Dasar Kereta Api Perkotaan yang diikuti sebanyak 60 peserta
- 9) Terlaksananya diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas yang diikuti sebanyak 300 peserta
- 10) Terlaksananya diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2) yang diikuti sebanyak 2.520 peserta
- 11) Terlaksananya pengiriman pegawai tugas belajar sebanyak 101 orang
- 12) Terlaksananya pengiriman kediklatan sebanyak 177 orang
- 13) Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi kepada 800 peserta
- 14) Tersusunnya sebanyak 4 Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi
- 15) Terlaksananya penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015
- 16) Terlaksananya Knowledge Management sebanyak 5 Rumpun
- 17) Terlaksananya akreditasi Kediklatan sebanyak 4 Jenis Diklat
- 18) Terlaksananya pengembangan e-Learning sebanyak 5 Jenis Diklat
- 19) Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi BPSDM selama 12 bulan
- 20) Terlaksananya penyusunan Modul Diklat sebanyak 18 modul
- 21) Terlaksananya penyusunan Kurikulum Diklat sebanyak 3 Kurikulum
- 22) Tersusunnya Analisa Kesenjangan Kompetensi

23)Terlaksananya kerjasama kediklatan yang diikuti sebanyak 750 orang

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- 1) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).
- 2) Tersusunnya Dokumen RKPD.
- 3) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem e-Musrenbang.
- 4) Tersusunnya 6 dokumen Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan.
- 5) Tersusunnya dokumen Draft Revisi RTRW 2030.
- 6) Tersusunnya Perda RPJMD 2017 – 2022
- 7) Terlaksananya Pengembangan Sistem Knowledge Management Bappeda.
- 8) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem e-THIS.
- 9) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.
- 10)Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJALI).
- 11)Terlaksananya Diklat Internship Integrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-Rotterdam) yang diikuti sebanyak 10 orang.
- 12)Tersusunnya Draft Rumusan Evaluasi Dokumen RPJPD 2002-2025.

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Terlaksananya pemutakhiran Data Keluarga sebanyak 18.412 data
- 2) Terlaksananya pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir) sebanyak 3.150.000 set Blanko KK, 800.600 lembar blanko akta, 20.600 buku register akta dan 1.000.000 keping blanko KIA
- 3) Terlaksananya pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 88 kali di lima

wilayah Kota Administrasi Jakarta dan 8 kali di Kabupaten Kepulauan Seribu

- 4) Terlaksananya pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebanyak 885 data Perekaman WBS, 95 dokumen Penerbitan Akta Lahir, 65 dokumen KIA dan 1.807 perekaman KTP elektronik
- 5) Terlaksananya Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing sebanyak 22 kali kegiatan, yaitu: 9 kali Perkantoran/ Perusahaan, 11 kali Apartement/ Permukiman, 2 kali Gedung Sekolah. Total hasil pendataan adalah sebanyak 946 Orang Asing yang berkewajiban memiliki dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- 6) Terlaksananya Bina Kependudukan (Biduk) yang dilakukan di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten di DKI Jakarta dengan hasil pelayanan sebanyak 3.993 penerbitan SKDS, 181 pendistribusian SKDS, 147 penerbitan akte kelahiran, 10 pendistribusian Akta Kelahiran, 20 Pemohon Akta Kelahiran, 68 perekaman e-KTP, 467 pendistribusian e-KTP, 87 pemohon cetak e-KTP, 3.490 Pemohon KIA, 906 pendistribusian KIA dan 94 orang WNA yang berhasil didata

f. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

- 1) Terlaksananya Pemindahtanganan Bangunan/Gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara lelang sebanyak 148 Lokasi,
- 2) Terlaksananya pemindahtanganan melalui penjualan KDO yang diusulkan oleh SKPD pengguna sebanyak 91 kendaraan scrap dan 50 kendaraan satuan melalui 4 kali lelang
- 3) Terlaksananya Pengasuransian barang milik daerah berupa gedung/bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diasuransikan BMD Gedung/Bangunan sebanyak 1.902 unit, dan BMD Aset bergerak/KDO sebanyak 1.102 unit berdasarkan permohonan dari SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- 4) Terbitnya sertifikat tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 23 bidang dan dalam proses sebanyak 137 bidang.
- 5) Terlaksananya Digitalisasi aset daerah sebanyak 2.963 Dokumen sertifikat Tanah atas nama Pemda DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut di wilayah Jakarta Pusat 461 dokumen, Jakarta Utara 456 dokumen, Jakarta Barat 677 dokumen, Jakarta Selatan 652 dokumen, Jakarta Timur 645 dokumen, dan Kep. Seribu 72 dokumen.
- 6) Tercatatnya seluruh Aset Daerah dalam KIB pada 725 SKPD/UKPD
- 7) Terlaksananya pembangunan sistem penatausahaan aset terintegrasi antara lain: Buku Aset, E-Rekon, Sensus Aset dan Forum SKPD
- 8) Terpasangnya papan nama aset di 440 titik dengan rincian Jakarta Pusat 40 titik, Jakarta Utara 100 titik, Jakarta Barat 100 titik, Jakarta Selatan 50 titik, Jakarta Timur 100 titik dan Kepulauan Seribu 50 titik.
- 9) Terlaksananya penghapusan barang inventaris di Jakarta Pusat pada Sudin Sumber Daya Air, Jakarta Utara pada 11 UKPD, Jakarta Barat pada 22 UKPD, Jakarta Selatan sebanyak 1.680 barang, Jakarta Timur pada seluruh UKPD dan Kepulauan Seribu pada 7 UKPD
- 10) Terlaksananya Pemagaran tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 lokasi di Jakarta Pusat, 10 lokasi di Jakarta Utara, 2 lokasi di Jakarta Barat, 2 lokasi di Jakarta Selatan, dan 5 lokasi di Jakarta Timur

g. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

- 1) Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Samsat Keliling sebanyak 10 Kendaraan Samsat Keliling
- 2) Terlaksananya Kegiatan Razia Gabungan Door to Door di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten administrasi sebanyak 30 kali pelaksanaan.
- 3) Terlaksananya Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan di Wilayah Kota Administrasi

Jakarta Barat sebanyak 20.000 surat, Jakarta Selatan sebanyak 27.850 surat, Jakarta Pusat sebanyak 20.288 surat, Jakarta Timur sebanyak 26.432 surat, Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 20.400 surat

- 4) Terlaksananya Pelayanan Pajak di Gerai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Jakarta Pusat di Gerai Thamrin City, Jakarta Utara di Mal Artha Gading dan Jakarta Barat di Gerai Mall Taman Palem
- 5) Terpasangnya Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD Tanjung Priok (12 objek), Penjaringan (8 objek), Pademangan (28 objek), Koja (10 objek), Kelapa Gading (6 objek), Cilincing (4 objek), Pulo gadung (9 objek), Pasar Rebo (17 objek), Matraman (8 objek), Makasar (88 objek), Kramat Jati (40 objek), Jatinegara (30 objek), Duren Sawit (6 objek), Ciracas (41 objek), Cipayung (60 objek), Cakung (75 objek), Tebet (10 objek), Setiabudi (24 objek), Pesanggrahan (22 objek), Pasar Minggu (33 objek), Pancoran (23 objek), Mampang Prapatan (10 objek), Kebayoran Lama (21 objek), Kebayoran Baru (21 objek), Jagakarsa (18 objek), Cengkareng (18 objek), Grogol Petamburan (13 objek), Kalideres (20 objek), Kebon Jeruk (37 objek), Kembangan (9 objek), Palmerah (9 objek), Taman Sari (2 objek), Tambora (9 objek), Cempaka Putih (40 objek), Gambir (20 objek), Johar Baru (20 objek), Kemayoran (23 objek), Menteng (25 objek), Sawah Besar (80 objek), Tanah Abang (30 objek), Senen (15 objek), Cilandak (18 objek) dan Kepulauan Seribu (2 objek)
- 6) Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 20 sistem Pajak Daerah
- 7) Terlaksananya Implementasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah dalam bentuk Database Security sebanyak 20 sistem

h. Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Terlaksananya sosialisasi taat pajak, Perpres No. 16/2018, manajemen resiko, penginputan PJLP dengan peserta ±400 Orang
- 2) Tersedianya laporan kajian lembaga pembiayaan PPKD

- 3) Tersusunnya Peraturan Gubernur hibah bansos dan pedoman penyelesaian pekerjaan akhir tahun 2018
- 4) Terlaksananya sosialisasi SIMPAD yang menyediakan fasilitas pembayaran melalui Bank DKI kepada SKPD/UKPD pemungut retribusi
- 5) Terlaksananya bimbingan teknis kepada 720 SKPD/UKPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
- 6) Tersusunnya LKPD unAudited 2017 hasil review Inspektorat yang akan diberikan ke BPK RI
- 7) Tersusunnya LKPD Interim TA 2018
- 8) Tersusunnya LKPD Audited 2017 dan Opini BPK RI atas LKPD
- 9) Terlaksananya Monev RBA, realisasi BLUD per triwulan 83 BLUD, dan fasilitasi penerapan kebijakan BLUD
- 10) Terlaksananya sosialisasi mekanisme penganggaran sesuai Permendagri No. 38/2018 dan Perpres No. 16/2018 oleh Kemendagri dan LKPP kepada 93 SKPD/UKPD, 82 SKPD/UKPD, 104 SKPD/UKPD, 104 SKPD/UKPD dan 92 SKPD/UKPD
- 11) Implementasi dan Pendampingan Sistem Informasi Belanja PPKD dengan penjelasan bahwa kegiatan ini merupakan ART/Operasional UPDI.
- 12) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu sebagai berikut :
- 13) eHibahbansos (ehibahbansosdki.jakarta.go.id)
- 14) eSubsidi (esubsidi.jakarta.go.id)
- 15) eBankeu (ebankeu.jakarta.go.id)
- 16) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Daerah yaitu ePembiayaan (epembiayaan.jakarta.go.id)
- 17) Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :
- 18) Simpad (Sub menu UMKM) (simpad.jakarta.go.id)
- 19) Simpad (Sub menu BLUD) (simpad.jakarta.go.id)
- 20) Terlaksananya pengembangan dan integrasi antar subsistem Pengelolaan keuangan dengan sistem pelaporan keuangan SIPKD

yaitu Simpad (pemisahan aplikasi antara BPKD dengan BPRD) (simpad.jakarta.go.id)

21) Terlaksananya penataan SIPKD terhadap perubahan kebijakan keuangan dalam bentuk pembelian sever

22) Terlaksananya pengembangan sistem informasi penganggaran yaitu eBelanja pegawai (ebelanjapegawai.jakarta.go.id)

i. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

1) Terlaksananya pengembangan sistem pengadaan barang/jasa sebanyak 5 Modul yaitu e-order, elangv. 1.1, e-forum, perencanaan dan manajemen kontrak

2) Terlaksananya peningkatan dan Pembinaan SDM pengadaan pada SKPD/UKPD sebanyak 1.140 Orang dalam 6 kegiatan kompetensi dan 5 kegiatan FGD

j. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1) Terlaksananya pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah Jakarta dengan dikeluarkannya 60 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2) Terlaksannya pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (TLHP BPK) berupa 15 Laporan

3) Peningkatan kinerja dan kualitas tugas-tugas Pengawasan berupa terbentuknya dan dikembangkannya Sistem Pengawasan SI INSAN dan SIPADU.

4) Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Tingkat Provinsi dan wilayah kota/kabupaten berupa Sosialisasi kepada SKPD selama 12 bulan.

5) Terlaksananya Sertifikasi Profesi Pengawasan kepada 10 orang.

6) Terlaksananya Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor kepada 13 orang.

7) Terlaksananya Sertifikat Jabatan Fungsional P2UPD kepada 3 orang.

k. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

- 1) Tersusunnya 20 Peraturan Gubernur, 3 Instruksi Gubernur, 1 Keputusan Gubernur dan 10 Rancangan Peraturan Gubernur
- 2) Pengumuman Nilai indeks RB pada awal Maret 2019 dan Indeks RB pada Tahun 2017 sebesar 68,47
- 3) Tersusunnya Rencana Strategis Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022
- 4) Terlaksananya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada SKPD/UKPD dalam bentuk 1 unit kerja mendapatkan predikat WBK Nasional Tahun 2018
- 5) Tersusunnya 5 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Peralatan kerja teknis pada Perangkat Daerah, 3 Instruksi Gubernur tentang Penataan/ Penempatan/ Perpindahan Ruang Kerja/ Kantor, 3 Rancangan Peraturan Gubernur, Kajian tentang Standarisasi Ruang Pelayanan Publik pada Kelurahan, Kajian tentang Pakaian Dinas; dan terlaksananya pendampingan penyusunan SOP pada PD/UKPD sebanyak 300 SOP
- 6) Tersusunnya 2 Laporan SPM pada Perangkat Daerah (semester I dan II)
- 7) Tersusunnya 50 buah standar pelayanan pada PD/UKPD dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan
- 8) Tersusunnya 9 peraturan gubernur mengenai formasi jabatan fungsional.

l. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Regulasi Produk Hukum Daerah yang Harmonis sebesar 100%

m. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

- 1) Terlaksananya penyediaan peralatan dan pendukung operasional JSC berupa bandwidth 300 Mbps Lokal/50 Mbps Internasional, DRC Cloud, BCP, Software Data Quality, perpanjangan License Software Big Data/Security/Analytic Tools/Google Maps API Premier
- 2) Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan Data Center (pengadaan AC, perpanjangan garansi perangkat PAC, pemeliharaan perangkat Fire Suppression Systems, perpanjangan garansi perangkat monitoring system, perpanjangan garansi perangkat UPS + Battery, perpanjangan garansi panel elektrikal, DAN Data Center Cleaning, harddisk server, software Cpanel, Pengadaan OS Server, Pengadaan TV untuk Network Operating Center dan perangkat manageable jaringan)
- 3) Terlaksananya pekerjaan Sewa Disaster Recovery Center (DRC) beserta fasilitas pendukung berupa Biaya Sewa Power AC (100 KVA), Working Space Dedicated (1 Lot), Ruang Operator Dedicated, Dedicated CCTV, Sewa link backhaul DRC-Data Center Balaikota dan Sewa tempat DRC Colocation (Sewa space (8x1,2x2,4 m2) termasuk link bandwidth Internet
- 4) Terbentuknya jaringan komputer/telekomunikasi antar kantor operasional maupun pelayanan masyarakat yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Gedung Balaikota DKI Jakarta
- 5) Tersusunnya pembuatan pedoman Project Manajemen dan draft Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait perencanaan dan pengadaan layanan e-Government yang terdiri atas kebijakan:
 - 6) Tata Kelola TIK.
 - 7) Siklus hidup pengembangan sistem (SDLC)
 - 8) Evaluasi Pasca Implementasi Sistem Informasi
 - 9) Manajemen Penjaminan Mutu
 - 10)Manajemen Tingkat Layanan (Service Level Managemen)
 - 11)Pertukaran Data Elektronik

n. Program Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya hasil Inventarisasi Kebutuhan Riset dan Sinkronisasi Hasil Riset dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan

4. Kota Lestari

Melalui Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Terlaksananya pemantauan pada kualitas lingkungan air tanah sebanyak 267 titik (2 periode); lingkungan air sungai sebanyak 90 titik (4 periode); lingkungan air situ/waduk sebanyak 40 titik (2 periode), lingkungan perairan laut dan muara teluk Jakarta (23 titik di perairan laut; muara pada 11 titik; serta kondisi pasang dan surut sebanyak 2 periode); udara dan tingkat kebisingan sebanyak 25 titik lokasi (2 periode)); lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang SPA Sunter dan TPS di DKI Jakarta sebanyak 25 titik (2 periode); serta lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebanyak 81 kali (36 sample).
- 2) Terciptanya sistem aplikasi e-uji emisi untuk menguji emisi kendaran bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Terlaksananya pengukuran kualitas udara tepi jalan dan kinerja lalu lintas pada 2.585 kendaraan
- 4) Terlaksananya Program Kampung Iklim (Proklam) di 185 RW, beberapa diantaranya dilaksanakan di RW 04 Lenteng Agung, RW 02 Setiabudi, RW 09 Lenteng Agung dan RW 04 Gandaria Selatan.
- 5) Terolahnya limbah B3 cair sebanyak 1.000 liter dan limbah B3 padat 15.000 kg.
- 6) Terlaksananya pengadaan alat angkut limbah B3 truk box sebanyak 61 unit.

- 7) Terlaksananya pembangunan TPS Limbah B3 skala kota dan sarana penunjangnya di bangun pada 4 lokasi yakni di Asrama DLH Lenteng Agung, Asrama DLH Bambu Larangan, Asrama DLH Ciracas, dan Asrama DLH Sunter namun hanya dua lokasi yang bangunannya bisa difungsikan, Lenteng Agung dan Bambu Larang dan 2 lokasi jadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan). Sementara itu, pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan sarana penunjangnya sebanyak 5 unit lokasi (namun progress pekerjaan tidak mencapai 100%, dari 5 unit TPS Limbah B3 yang terbangun, hanya 4 unit yang dapat difungsikan (Lokasi : DIPO RW 08 Kebon Jeruk, DIPO PTB Duren Sawit, DIPO Rawa Kerbau dan Kantor Dinas LH Prov. DKI Jakarta) dan 1 unit tidak dapat difungsikan karena atap belum terpasang seluruhnya (Lokasi : Asrama Dinas LH Semper Barat).
- 8) Program Pengelolaan Hutan
- 9) Terlaksananya pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau hutan di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 10) Terlaksananya pembangunan ruang terbuka hijau hutan seluas 13.000 m² di Hutan Kota Cipayung, 70.000 m² di Hutan Kota Sangga Buana, 13.000 m² di Hutan Kota Ciracas, 8.689 m² di RTH Jl. Aseli Jakarta Selatan, 8.920 m² di RTH Jl. H. Ipin Jakarta Selatan
- 11) Terlaksananya pembangunan pagar ruang terbuka hijau hutan di RTH Jl. Duren, RTH Jl. Setu Raya, RTH Jl. PPA dan RTH Jl. Jagakarsa Raya
- 12) Terlaksananya pembinaan saka wana bhakti di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 13) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau Hutan di 28 lokasi seluas 167.527 m²

b. Program Pengelolaan Pertamanan

- 1) Terlaksananya penataan kebun bibit di wilayah DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau taman di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- 3) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di wilayah DKI Jakarta
- 4) Terlaksananya pemeliharaan kebun bibit dan tanaman dekorasi
- 5) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terlaksananya pembangunan ruang terbuka hijau taman seluas 2.011 m² di RTH Taman Jl. Gunung Balong 2, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 2.289 m² di RTH Taman Jl. Madrasah Bawah, Bintaro, Jakarta Selatan, 6.050 m² di RTH Taman Jl. Penggilingan Baru, 3.003 m² di RTH Taman Jl. SMU 99, Cibubur, Jakarta Timur, 2.180 m² di RTH Taman Jl. Assakinahn, Kebagusan, Jakarta Selatan, 4.550 m² di RTH Taman Jl. Lapangan Tembak, Kelapa 2 Wetan, Jakarta Timur dan 1.492 m² di RTH Taman Jl. Swakarsa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur
- 7) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau taman di 60 lokasi seluas 256.268 m²

c. Program Pengelolaan Pemakaman

- 1) Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau makam di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau makam di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 3) Terlaksananya pengadaan tanah ruang terbuka hijau makam di 18 lokasi seluas 48.216 m²

d. Program Penataan Kawasan Permukiman

- 1) Tersusunnya dokumen Community Action Plan (masterplan) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman TA 2018 dan DED untuk 5 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Kelurahan Kota Bambu Utara (RW 07), Kelurahan Kapuk (RW 01, RW 03, RW 04, RW 07, RW 12, RW 16), Kelurahan Kebon Jeruk (RW 04, RW 05), Kelurahan Kedaung Kaliangke (RW 01, RW 02, RW 03, RW 06, RW 07, RW 08), Kelurahan Pinangsia (RW 02, RW 06). Selanjutnya di kawasan Jakarta Pusat terdiri dari Kelurahan

Galur (RW 06 , RW 07) dan Kelurahan Duri Pulo (RW 012). Kemudian di kawasan Jakarta Selatan terdiri dari Kelurahan Keramat Pela (RW 02, RW 09, RW 10), Kelurahan Tegal Parang (RW 03, RW 06), dan Kelurahan Bukit Duri (RW 11, RW 12). Sementara itu, untuk dikawasan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Kelurahan Cakung Barat (RW 07), Kelurahan Pisangan Timur (RW 5, RW 15), Kelurahan Kampung Melayu (RW 02, RW 03, RW 04, RW 07, RW 08), Kelurahan Klender (RW 01, RW 03, RW 10), dan Kelurahan Cipinang Besar Utara (RW 2, RW 3, RW 7, RW 12) serta Kawasan Jakarta Utara terdiri dari Kelurahan Penjaringan (RW. 01, 02, 04, 07, 08, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017), Kelurahan Tugu Utara (RW 06, 08, 013, 018), Kelurahan Kalibaru (RW 01, 04, 06, 07, 010, 012, 013, 015), Kelurahan Ancol (RW 01, 02, 04, 05, 08) dan Kelurahan Pluit (RW 022).

- 2) Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan utilitas (penataan kawasan pemukiman terpadu) di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Keramat (RW 09) Kecamatan Kebayoran Baru (berupa peningkatan jalan lingkungan 384 m, Vertical Garden 17 Unit, Bak Bunga 4 Unit, Saluran U-Ditch 63 m, Sumur Resapan 14 Titik, Peninggian dan Perkerasan Jalan 45,8 m, Pembuatan Tiang PJU 5 Titik), dan RW 10, (Peninggian jalan 10 cm 54 m³ dan Perkerasan Jalan 585,56 m², Pembuatan U-ditch 204 m), Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara (Jalan Lingkungan, MCK Umum, Resapan, Saluran Air dan Rumah Komposting) dan Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung (Jalan Lingkungan, Resapan, Saluran Air dan Rumah Komposting).
- 3) Terbangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (2 lokasi; Pulau Sebir dan Pulau Kelapa Dua) dan di 4 (empat) kota yaitu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (dokumen perencanaan), Kota Administrasi Jakarta Pusat (dokumen perencanaan), Kota Administrasi Jakarta Selatan (5 lokasi; Jl. Inspeksi Kali Grogol Rt.01

RW 05 Kel. Grogol Utara Kec.Kebayoran Lama, Komplek Tanjung Mas Raya Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa, Komplek Asrama Dinas Lingkungan Hidup, Jl. Camat Gabun RW 09 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Aselih RT.10 RW 01 Kel.Cipedak Kec. Jagakarsa, dan Komplek Perumahan Lebak Indah RT 10 RW 07 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Timur (RPTRA Bunga Rampai dilahan seluas 1.623 m², RPTRA Rusunami Beriman dilahan seluas 1.534 m², RPTRA Utakase dilahan seluas 886 m², RPTRA Dahlia dilahan seluas 867 m² dan RPTRA Garuda dilahan seluas 4.892 m²), Kota Administrasi Jakarta Utara (10 lokasi : Rumah Susun Marunda Blok A, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok B, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok C, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; Rumah Susun Marunda Blok D, Kel. Marunda, Kec. Cilincing; RW 04 Kel. Marunda, Kec. Cilincing; RT 016 / RW 01 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing; Pura Dalem, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing; RW 016 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading; Jl. Janur Elok VII, RW 011 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading dan Jl. Danau Sunter 6, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok)

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

- 1) Terlaksananya Musrenbang pada 6 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 6 Kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 6 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 31 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 31 kelurahan.
- 7) Terselenggaranya ketertiban umum pada 31 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 31 kelurahan.

- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 31 kelurahan.
- 10)Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 31 Kelurahan.
- 11)Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 31 kelurahan.
- 12)Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 31 kelurahan.
- 13)Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 31 kelurahan.
- 14)Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 31 kelurahan.
- 15)Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 31 kelurahan.
- 16)Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 31 kelurahan.

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 8 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 8 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 8 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 8 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 56 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 56 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 56 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 56 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 56 kelurahan.
- 10)Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 56 kelurahan.

- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 56 kelurahan.
- 12) Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 56 kelurahan.
- 13) Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 56 kelurahan.
- 14) Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 56 kelurahan.
- 15) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 56 kelurahan.
- 16) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 56 kelurahan.

g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 8 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 8 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 8 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 8 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 44 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 44 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 44 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 44 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 44 kelurahan.
- 10) Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 44 kelurahan.
- 11) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 44 kelurahan.

- 12)Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 44 kelurahan.
- 13)Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 44 kelurahan.
- 14)Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 44 kelurahan.
- 15)Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 44 kelurahan.
- 16)Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 44 kelurahan.

h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 10 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 10 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 10 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 10 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 65 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 65 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 65 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 65 kelurahan.
- 10)Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 65 kelurahan.
- 11)Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 65 kelurahan.
- 12)Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 65 kelurahan.

- 13)Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 65 kelurahan.
- 14)Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 65 kelurahan.
- 15)Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 65 kelurahan.
- 16)Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.

i. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 10 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 10 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 10 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 10 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 65 Kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 65 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 65 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 65 kelurahan.
- 10)Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 65 kelurahan.
- 11)Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 65 kelurahan.
- 12)Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 65 kelurahan.
- 13)Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 65 kelurahan.
- 14)Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 65 kelurahan.

- 15)Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 65 kelurahan.
- 16)Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 65 kelurahan.

j. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- 1) Terselenggaranya Musrenbang pada 2 kecamatan.
- 2) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 2 kecamatan.
- 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 2 kecamatan.
- 4) Terwujudnya ketertiban umum pada 2 kecamatan.
- 5) Terlaksananya peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK pada 6 kelurahan.
- 6) Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kelurahan.
- 7) Terwujudnya ketertiban umum pada 6 kelurahan.
- 8) Terlaksananya penanganan bencana pada 6 kelurahan.
- 9) Terselenggaranya Musrenbang pada 6 kelurahan.
- 10)Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) pada 6 kelurahan
- 11)Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada 6 kelurahan.
- 12)Terlaksananya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada 6 kelurahan.
- 13)Terlaksananya pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada 6 kelurahan.
- 14)Terlaksananya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 6 kelurahan.
- 15)Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan pada 6 kelurahan.
- 16)Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat pada 6 kelurahan.

5. Simpul Kemajuan

Melalui Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- 1) Terlaksananya 5 kegiatan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan jumlah peserta sebanyak 450 peserta dari kalangan anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, partai politik dan lain – lain
- 2) Terlaksananya Peningkatan Wawasan kebangsaan (PPWK) dalam bentuk rapat koordinasi dan sosialisasi selama 12 Bulan yang diikuti sebanyak 550 orang dari kalangan anggota PPWK, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan generasi muda
- 3) Terlaksananya 9 kegiatan Dialog Interaktif Membangun Karakter Anak Bangsa yang Berjiwa Pancasila.yang diikuti sebanyak 990 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa
- 4) Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) selama 12 bulan yang diikuti sebanyak 450 orang
- 5) Terlaksananya 3 kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran.yang diikuti oleh 330 orang dari kalangan pelajar dan generasi muda

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata selama 12 bulan
- 2) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada sebanyak 5.561 Industri Pariwisata

c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Terpilihnya 15 pasang Abang dan Nene dari setiap perwakilan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai duta pariwisata

- 2) Terlaksananya pemberdayaan Abang dan None selama tahun 2018 sebanyak 992 pasang
- 3) Terlaksananya Pameran Museum Seni Dalam Rangka Menyemarakkan Asian Games 2018 dengan penampilan dari 4 grup musik dan 1 grup tari, dengan Jumlah pengunjung domestik sebanyak 53.236, pengunjung mancanegara sebanyak 2.578 orang, serta official dan delegasi sebanyak 633 orang
- 4) Terlaksananya Festival Tempo Doeloe di kotatua dalam rangka menggali nilai sejarah budaya dan memperkenalkan serta meningkatkan kotatua sebagai destinasi wisata dan hiburan kepada masyarakat
- 5) Terlaksananya Festival Kuliner Djadoel dengan menampilkan sebanyak 20 jenis kuliner dan musik jaman dulu Jakarta untuk masyarakat umum di kawasan kotatua

d. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

- 1) Terselenggaranya apresiasi kompetisi seni para pelajar (TK, SD, SLTP dan SLTA) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan jumlah peserta sebanyak 10.257 orang
- 2) Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Jakarta 2018 dengan terpilih 18 pasangan Abang None
- 3) Terlaksananya pergelaran kesenian untuk mendukung event lokal di masyarakat dan partisipasi pada event Tingkat Provinsi
- 4) Terselenggaranya 100 pergelaran kesenian, terdiri dari: 5 Group Tari (Tanpa Musik hidup), 5 Group Tari (Live Musik Hidup), 10 Honorarium Grup musik Grade D, 10 Musik Tradisional Group Gambang Kromong Profesional, 10 Band, 5 Grup musik Tradisional (Group Orkes Melayu), 35 Musik Orgent Tunggal, 5 Musik Gambus, 5 Sambrah Profesional, 5 Musik Hadroh, 5 Kesenian Ondel-ondel Profesional
- 5) Terlaksananya kegiatan weekend @kotatua dengan menampilkan komunitas seni untuk meningkatkan jumlah pengunjung, mendukung kegiatan Asian Games dan Asian Para Games

- 6) Terlaksananya 19 Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih dan 15 pementasan Wayang Orang Bharata
- 7) Terlaksananya Gebyar Taman Ismail Marzuki

e. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

- 1) Terlaksananya Festival Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dalam rangka sosialisasi dan apresiasi kepada masyarakat ± 2.000 pengunjung
- 2) Terselenggaranya pembelian/pembebasan rumah peninggalan Pahlawan Revolusi MT Haryono yang merupakan Bangunan Cagar Budaya Golongan A
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan Pemugaran Gedung Museum Bahari dan Jembatan Kota Intan
- 4) Terlaksananya Konservasi Patung/Monumen di ruang publik sebanyak 4 patung yaitu:
- 5) Patung Pemuda Membangun di Taman Bunderan Senayan (1) patung
- 6) Patung Jendral Sudirman jalan Sudirman Jakarta (1) patung
- 7) Patung Perjuangan Jatinegara (2) patung
- 8) Terlaksananya Konservasi Koleksi Museum terdiri dari Museum Bahari 128, Museum Wayang 414, Museum Tekstil 64, Museum Seni Rupa dan Keramik 1.105, Museum Sejarah Jakarta 39, Pusat Kesenian Jakarta 71, Museum Prasasti 35 dengan jumlah Kegiatan Konservasi Koleksi Museum 20 kali kegiatan. dengan material kulit, logam dan kertas dengan jumlah koleksi yang dikonservasi 1.860
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Museum Kesejarahan Jakarta dengan kegiatan Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Pembuatan Ruangan Laktasi di Museum Sejarah Jakarta dan Museum Prasasti, Pembuatan Sarana Difabilitas di Museum Sejarah Jakarta, Pekerjaan Fumigasi, Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Coating Batu Alam Kantor Atas, Pekerjaan Lantai Kayu (Lt 2, Perpustakaan Zona C,

Lantai Menara), Pengecatan Dinding Museum Bagian Luar, Museum Sejarah Jakarta

10) Terlaksananya Pemugaran Makam Belanda Pulau Onrust dan Pemugaran Bangunan di Pulau Cipir

f. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

- 1) Terlaksananya Perawatan terhadap koleksi museum yang bersifat preventif dan kuratif
- 2) Tersedianya buku inventarisasi koleksi untuk 4 Museum (Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang'45, Museum MH Thamrin dan Museum Prasasti)
- 3) Terlaksananya perbaikan air mancur dan sarana penyiraman dengan revitalisasi air mancur sisi barat kawasan Monas
- 4) Terlaksananya peningkatan fasilitas pengunjung sebanyak 5 kereta wisata listrik, 4 mobil patroli listrik, pos keamanan portable dan 8 unit gate e-ticketing
- 5) Terlaksananya penataan Ruang Agung sebanyak 2 set unit alat pemadam kebaran portable dan perbaikan batu alam RA.
- 6) Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kebaharian

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp21.013.424.987.891,00 dengan total penyerapan sebesar Rp18.840.672.891.975,00 atau 89,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 5) Program Wajib Belajar 12 Tahun
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 6) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp10.014.402.268.523,00 dengan total penyerapan sebesar Rp8.640.311.363.188,00 atau 86,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a) Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan / Laboratorium
 - b) Penyediaan Peralatan Kesehatan
 - c) Penyediaan Obat dan Vaksin
 - d) Penyimpanan dan Pendistribusian Obat ARV
 - e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- 3) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan, antara lain:

- 1) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a) Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan / Laboratorium di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Terlaksananya Penyediaan Obat dan Vaksin di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - d) Terlaksananya Penyimpanan Obat ARV di Dinas Kesehatan dan didistribusikan ke seluruh puskesmas kecamatan.
 - e) Terlaksananya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp8.549.403.820.818,00 dengan total penyerapan sebesar Rp6.367.335.176.264,00 atau 74,48%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Banjir
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

6) Program Penataan Ruang

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

- a) Perencanaan Rumah Dinas Ketua Dewan DPRD di kawasan Cagar Budaya
- b) Perencanaan bangunan suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat
- c) Perencanaan Gudang Satpol PP
- d) Perencanaan Gedung Pos Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
- e) Perencanaan renovasi Rumah Dinas Sekda
- f) Perencanaan Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya utara
- g) Perencanaan Lapas Pondok Bambu
- h) Penyelesaian Pembangunan Gedung PMI Jakarta Timur
- i) Penyelesaian Pembangunan Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta
- j) Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- k) Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- l) Lanjutan Pembangunan Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara
- m) Lanjutan Pembangunan Asrama Perwira dan Bintara serta Prasarana Pendukung Sekolah Polisi Wanita
- n) Lanjutan Pembangunan Kantor UPPD Penjaringan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan, antara lain:

1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

- a) Tersusunnya perencanaan rumah dinas Ketua Dewan DPRD (kawasan Cagar Budaya), gudang Satpol PP, gedung Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Rumah Dinas Sekda DKI Jakarta, gudang dan posko Suku Dinas Perindustrian

dan Energi Jakarta Barat (Meruya Utara) dan Lapas Pondok Bambu yang terdiri dari Gambar, RAB, RKS, Bq, dan laporan struktur

- b) Tersusunnya perencanaan bangunan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat
- c) Terbangunnya bangunan gedung PMI Jakarta Timur (1 unit; 90 %), bangunan gedung KONI Provinsi DKI Jakarta (1 unit; 100 %), gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta (1 unit; 90 %), gedung Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (1 unit; 90 %), gedung Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara (1 unit; 90 %), gedung Asrama Perwira dan Bintara serta Prasarana Pendukung Sekolah Polisi Wanita (1 unit; 100%), dan gedung Kantor UPPD Penjaringan (1 unit; 100%)

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.902.112.756.777,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.468.133.870.652,00 atau 85,05%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Penataan Kawasan Permukiman
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

5. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.425.850.063.909,00

dengan total penyerapan sebesar Rp2.177.836.221.235,00 atau 89,78%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a) Peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
 - b) Penyediaan Sarana Pendukung Pemulihan Fisik Pasca Bencana
 - c) Penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - d) Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung Serta Manajemen dan Siswa Yayasan / Sekolah Penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - e) Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
 - f) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
- 2) Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Pembangunan Hidran Mandiri (Pilot Project)
 - b) Penyediaan dan pemasangan mesin dan tangki BBM 2 Jenis (Solar dan Pertamina) Kantor Dinas Gulkarmat
 - c) Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 m
 - d) Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Penyelenggaraan Asian Games 2018
 - e) Gladi Operasi Penyelamatan pada Kecelakaan Lalu lintas
- 3) Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
 - a) Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada
- 4) Program Pengelolaan Risiko Bencana

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 5) Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Diklat *Fire Rescue*
 - b) Diklat SCUBA
 - c) Diklat Damkar Tk. I Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran
 - d) Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
 - e) Diklat Medical First Responder
- 6) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
 - a) Pembinaan dan Simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Pada Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa
 - b) Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media
 - c) Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran
- 7) Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a) Penyelenggaraan Penertiban bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
 - b) Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Hiburan dan rekreasi Bersama Tim Terpadu Pada Hari-hari Besar Keagamaan
 - c) Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat
 - d) Penindakan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan
 - e) Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat , antara lain:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a) Terlaksananya peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) sebanyak 300 orang relawan

- b) Terlaksananya penyediaan sarana Pendukung Pemulihan Fisik Pasca Bencana untuk 5.000 orang
 - c) Terlaksananya penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sebanyak 5 komponen
 - d) Terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung Serta Manajemen dan Siswa Yayasan / Sekolah Penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 gedung
 - e) Terlaksananya review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
- a) Terlaksananya peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 kali kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dengan jumlah peserta 150 orang per kegiatan
 - b) Terselenggaranya Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada di lima Kota Administrasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Terselenggaranya persidangan oleh Satpol PP wilayah Jakarta Barat sebanyak 12 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 503 orang dan denda pelanggaran sebesar Rp75.165.000,00 yang disetorkan kepada kas Daerah
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Pusat sebanyak 12 Kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 735 orang dan denda perkara Rp307.481.000,00 yang disetor ke Kas Negara
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Selatan sebanyak 6 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 297 orang dan denda perkara sebesar Rp57.021.000 yang disetorkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan

- Terselenggaranya Sidang Yustisi oleh Satpol PP wilayah Jakarta Timur sebanyak 16 kali sidang dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 358 orang dan denda perkara sebesar RP47.322.000
 - Terselenggaranya Sidang Yustisi sebanyak 12 kali oleh Satpol PP wilayah Jakarta Utara dengan total pelanggar yang mengikuti persidangan sebanyak 480 orang dan denda perkara sebesar Rp88.628.000 yang disetorkan oleh Pengadilan Jakarta Utara
- 3) Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- a) Terlaksananya Diklat *Fire Rescue* yang diikuti sebanyak 90 peserta.
 - b) Terlaksananya Diklat SCUBA yang diikuti sebanyak 60 peserta.
 - c) Terlaksananya Diklat Damkar Tingkat I Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran yang diikuti sebanyak 630 opeserta.
 - d) Terlaksananya Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang diikuti sebanyak 30 peserta.
 - e) Terlaksananya Diklat Medical First Responder yang diikuti sebanyak 90 peserta.
- 4) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
- a) Terlaksananya Pembinaan dan Simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Pada Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa di 17 lokasi Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa.
 - b) Terlaksananya Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media selama 12 bulan.
 - c) Terlaksananya Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran pada 80 lokasi
- 5) Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- a) Terlaksananya 3.122 kegiatan Penertiban bagi Pelanggar

Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- b) Terlaksananya 3 rangkaian kegiatan Wastib tempat usaha hiburan dan Rekreasi pada hari-hari besar keagamaan
- c) Terlaksananya 42 kegiatan yang masing-masing kegiatan diikuti sebanyak 100 orang
- d) Terlaksananya 2 kegiatan penyegelan tempat usaha
- e) Terlaksananya kegiatan Wasdal TU dengan peninjauan ke lokasi bersama tim terpadu sebanyak 3 tempat usaha oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 83 kali pengawasan oleh Satpol PP Jakarta Barat, 122 Tempat Usaha oleh Satpol PP Jakarta Pusat, 163 tempat usaha oleh Satpol PP Jakarta Selatan, 24 kali pengawasan oleh Satpol PP Jakarta Timur dan 26 tempat usaha oleh Satpol PP Jakarta Utara

6. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp740.856.401.010,00 dengan total penyerapan sebesar Rp666.823.805.841,00 atau 90,01%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi
 - b) Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan

dan Restorasi Sosial Sejak Dini

- c) Pemberian Penghargaan Kepada Janda Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
 - d) Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota
 - e) Penguatan Jejaring Dan Kemitraan LK3 Di Rumah Susun/RPTRA
 - f) Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota
 - g) Penguatan Jejaring dan Kemitraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Rusun/RPTRA
- 5) Program Perlindungan Sosial
- a) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi
 - b) Penyediaan *Buffer Stock* Penanggulangan Bencana
 - c) Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) bagi Korban Bencana
 - d) Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal
 - e) Pengadaan Peralatan Dapur Umum
 - f) Penyelenggaraan Dapur Umum bagi Korban Bencana
 - g) Pelayanan Sosial Orang Terlantar
 - h) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Kota
 - i) Pelatihan Keterampilan bagi Remaja di Lokasi Rawan Konflik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Terlaksananya pemberian Penghargaan kepada 2 orang Janda Pahlawan (Rp1.650.000 selama 13 Bulan), 58 orang Keluarga Pahlawan (Rp1.430.000 selama 13 Bulan), 8 orang Perintis Kemerdekaan (Rp825.000 selama 13 Bulan) dan 78 orang Janda Perintis Kemerdekaan (Rp550.000 selama 13 Bulan)
 - b) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lembaga

Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 18 Karang Taruna dan 18 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Kemudian terpilih 2 lembaga (1 Karang Taruna dan 1 LKS) sebagai perwakilan provinsi pada kompetisi tingkat nasional dengan hasil kompetisi adalah LKS Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 Nasional

- c) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial tingkat kota yang diikuti sebanyak 28 Karang Taruna dan 28 LKS dengan memberikan hadiah lomba berupa trophy dan berupa uang untuk juara 1, 2 dan 3
- d) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 18 orang Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kemudian terpilih 2 orang (1 PSM dan 1 TKSK) sebagai perwakilan provinsi pada kompetisi tingkat nasional dengan hasil kompetisi adalah PSM Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 Nasional dan TKSK Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 5 Nasional
- e) Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 18 orang PSM dan 18 TKSK dengan memberikan hadiah lomba berupa trophy dan berupa uang untuk juara 1, 2 dan 3
- f) Terlaksananya Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (KKKRS) Sejak Dini dalam bentuk penyampaian informasi KKKRS dengan media leaflet sebanyak 1.000 leaflet untuk anak sekolah yang disampaikan melalui sekolah - sekolah SD Swasta dan Negeri di DKI Jakarta
- g) Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring kemitraan LK3 di 10 lokasi RPTRA wilayah Jakarta Timur, 10 lokasi RPTRA wilayah Jakarta Selatan dan lingkungan Rumah Susun wilayah Jakarta Utara
- h) Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring dan kemitraan LK3 di

rumah susun/RPTRA dalam bentuk pelaksanaan bimbingan/konseling Keluarga oleh tenaga profesional di 9 lokasi rumah susun/RPTRA wilayah Jakarta Pusat

b. Program Perlindungan Sosial

- a) Tersedianya makanan siap saji yang diberikan kepada 102.094 korban bencana
- b) Terlaksananya kegiatan siaga bencana/piket siaga bencana di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah petugas sebanyak 24 orang. Respon time penanganan korban bencana kurang dari 2,5 jam sehingga penanganan pelayanan sosial lebih cepat
- c) Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Tingkat Kota dalam bentuk penyelenggaraan piket siaga bencana, penghimpunan informasi tentang bencana, penyelenggaraan operasional dapur umum dilokasi bencana, pemberian bantuan makan siap saji bagi korban yang terdampak bencana dan tersedianya data bencana dan bantuan.
- d) Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi remaja di lokasi rawan konflik di Jakarta Selatan sebanyak 30 orang yang dilatih keterampilan montir motor dan diberikan peralatan kerja dan di Jakarta Timur sebanyak 100 orang melalui pelatihan keterampilan montir sepeda motor.
- e) Terlaksananya pelayanan sosial orang terlantar sebanyak 63 orang
- f) Terlaksananya pemulangan orang terlantar ke daerah asal sebanyak 3.440 orang
- g) Tersedianya peralatan dapur umum yang memadai dan layak fungsi untuk setiap kejadian bencana
- h) Terlaksananya kegiatan pemberian Buffer Stock kepada 8.970 KK atau 36.447 jiwa untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi korban bencana.
- i) Tersedianya tempat penampungan sementara bagi korban bencana berupa tenda dapur pengungsi, matras gulung dan

tenda gulung

7. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Tenaga Kerja, telah dialokasikan APBD sebesar Rp335.057.326.790,00 dengan total penyerapan sebesar Rp304.485.095.723,00 atau 90,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dialokasikan APBD sebesar Rp255.657.253.332,00 dengan total penyerapan sebesar Rp233.590.706.331,00 atau 91,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

2) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah.

9. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.218.438.764.509,00 dengan total penyerapan sebesar Rp829.621.769.856,00 atau 68,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

10. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp121.618.108.588,00 dengan total penyerapan sebesar Rp93.278.851.917,00 atau 76,70%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penyiapan Akuisisi Tanah

- a) Pelatihan pengukuran
- b) Pelatihan GIS
- c) Bimbingan teknis pengadaan tanah
- d) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Penataan ruang. di Provinsi DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan, antara lain:

1) Program Penyiapan Akuisisi Tanah

- a) Terlaksananya peningkatan kompetensi di bidang pengukuran sebanyak 20 orang pegawai
- b) Terlaksananya peningkatan kompetensi di bidang GIS sebanyak 20 orang pegawai
- c) Terlaksananya peningkatan kompetensi berupa bimbingan teknis pengadaan tanah sebanyak 20 orang pegawai
- d) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Penataan ruang di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pekayon dan Kalisari.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.337.393.756.716,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.897.513.854.973,00 atau 81,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp337.044.892.186,00 dengan total penyerapan sebesar Rp291.363.231.179,00 atau 86,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD sebesar Rp22.171.828.799,00 dengan total penyerapan sebesar Rp20.257.249.586,00 atau 91,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Gebyar RPTRA Tingkat Kota
 - b) Orientasi Pemutakhiran SIM PKK
 - c) Orientasi Analisa SIM PKK
 - d) Orientasi Pendamping Pengelola PKK dan Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan
 - e) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja I
 - f) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja II
 - g) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja III

- h) Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja IV
- i) Pelaksanaan Orientasi Pendamping Pengelola Pokja I-IV dan Sekretariat
- j) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kemiskinan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- k) Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- l) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPK Provinsi DKI Jakarta
- m) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TP.PKK Kota
- n) Pelaksanaan Rekrutmen Pengelola RPTRA
- o) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (termasuk PKK, LMK, Posyantek)
- p) Pelatihan Pengelola RPTRA
- q) Pembekalan Kader Poktan PKK dengan Mitra di RPTRA
- r) Pembekalan Pemutahiran SIM PKK
- s) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja I Tingkat Kota
- t) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja II Tingkat Kota
- u) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja III Tingkat Kota
- v) Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja IV Tingkat Kota
- w) Pemeliharaan sarana dan Prasarana RPTRA
- x) Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) di RPTRA dan Lingkungan Sekitar Melalui Pembekalan Ketrampilan bagi Pengelola RPTRA dan Kader POKTAN/PKK
- y) Pemetaan dan pengenalan terhadap kebutuhan alat TTG di RPTRA
- z) Pemetaan Sosial RPTRA
- aa) Pendampingan Pengelola Pokja I s.d. IV dan Sekretariat
- bb) Penggalangan Gelar Kreativitas 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan RPTRA
- cc) Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi
- dd) Penggerakan Posyantek dalam Pengelolaan Sampah di RPTRA
- ee) Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan

Keluarga Tingkat Kota/Kab

- ff) Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat Provinsi
- gg) Penguatan Kunjungan Kerja TP PKK
- hh) Peningkatan Kualitas Kader PKK sebagai Kader Mandiri
- ii) Peningkatan Pelayanan Masyarakat di RPTRA Melalui Pembekalan Ketrampilan
- jj) Peningkatan Prestasi Kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten
- kk) Peningkatan prestasi kader PKK melalui 10 program Pokok PKK tingkat kota
- ll) Peningkatan Prestasi Kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota dan Kecamatan
- mm) Peningkatan Prestasi PKK Tingkat Nasional
- nn) Penyedia Sarana RPTRA
- oo) Penyelenggaraan Rakerda Penanggulangan kemiskinan
- pp) Penyelenggaraan Rakor PKK.TingkatKota
- qq) Penyelenggaraan Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota
- rr) Pertemuan Rutin Forum TKPK Tingkat Kota
- ss) Pertemuan Rutin TP PKK Tingkat Kota
- tt) Rakor PKK Tingkat Provinsi
- uu) Supervisi Monitoring Evaluasi Pengelola Poktan PKK
- vv) Temu kemitraan kader poktan PKK di RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , antara lain:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Terlaksananya Gebyar RPTRA Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 225 orang
 - b) Terlaksananya Orientasi Pemutakhiran SIM PKK yang diikuti sebanyak 89 orang
 - c) Terlaksananya Orientasi Analisa SIM PKK di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 754 orang

- d) Terlaksananya Pengelola PKK dan Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan yang diikuti sebanyak 500 Orang
- e) Terlaksananya Orientasi Pendampingan Pengelola Pokja I yang diikuti sebanyak 89 Orang, Pokja II sebanyak 89 Orang, Pokja III sebanyak 89 Orang, dan Pokja IV sebanyak 89 Orang
- f) Terlaksananya Rekrutmen Pengelola RPTRA di 46 lokasi
- g) Terlaksananya Pembekalan Kader Poktan PKK dengan Mitra di RPTRA pada 8 Kecamatan
- h) Terlaksananya Pembekalan Pemutahiran SIM PKK Kepulauan Seribu (50 Orang), Jakarta Barat (8 Kecamatan), Jakarta Selatan (300 orang) dan Jakarta Timur (160 Orang)
- i) Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Prestasi Kegiatan Pokja I Tingkat Kota sebanyak 100 orang, Pokja II Tingkat Kota sebanyak 150 orang, Pokja III Tingkat Kota sebanyak 100 orang dan Pokja IV Tingkat Kota sebanyak 100 orang
- j) Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (12 Bulan), Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja (1 Tahun), Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja (1 Tahun), Pemeliharaan sarana dan Prasarana RPTRA (43 Lokasi) dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RPTRA (16 RPTRA)
- k) Terlaksananya Pemenuhanan Indikator Kota Layak Anak (KLA) di RPTRA dan Lingkungan Sekitar Provinsi DKI Jakarta (46 lokasi), Jakarta Barat (8 kematan), Jakarta Utara (100 orang), Kepulauan Seribu (7 RPTRA) dan Jakarta Timur (1.520 orang)
- l) Terlaksananya Pemetaan dan pengenalan terhadap kebutuhan alat TTG di RPTRA (10 Kecamatan)
- m) Terlaksananya Pendampingan Pengelola Pokja I s.d. IV dan Sekretariat oleh sebanyak 500 pendamping
- n) Terlaksananya Penggalangan Gelar Kreativitas 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan RPTRA (644 orang), Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi (1 kegiatan)

- o) Terlaksananya Posyantek dalam Pengelolaan Sampah di RPTRA (200 Orang)
- p) Terlaksananya pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) selama 12 bulan
- q) Terlaksananya penguatan kelembagaan PKK dalam mensejahterakan keluarga Tingkat Kota/Kab di Jakarta Barat (9 Orang), Jakarta Pusat (9 Orang), Jakarta Selatan (20 Orang), Jakarta Timur (9 Orang), Jakarta Utara (12 Bulan), Kepulauan Seribu (9 Orang) dan Provinsi DKI Jakarta (12 Bulan)
- r) Terlaksananya penguatan kunjungan kerja TP PKK (345 Orang) dan penguatan pengelola RPTRA Tingkat Kota (372 Orang)
- s) Terlaksananya peningkatan kualitas kader PKK sebagai Kader Mandiri di Jakarta Selatan (100 Orang) dan Jakarta Timur (100 Orang)
- t) Terlaksananya peningkatan pelayanan masyarakat di RPTRA melalui pembekalan ketrampilan (300 Orang)
- u) Terlaksananya peningkatan prestasi kader PKK melalui 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota di Jakarta Barat (8 Kecamatan), Kepulauan Seribu (6 Kelurahan), Jakarta Pusat (4 Kegiatan), Jakarta Timur (10 Kecamatan) dan Tingkat Nasional (1 Kegiatan)
- v) Terlaksananya penyediaan sarana prasarana RPTRA (27 RPTRA dan 2 Pos Pengaduan)
- w) Terlaksananya Rakerda penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan rakor PKK Tk Kota, dan penyelenggaraan rapat kerja penanggulangan kemiskinan Tk Kota
- x) Terlaksananya pertemuan forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat (100 Orang), pertemuan rutin forum TKPK Tingkat Kota (1.620 Orang) dan Pertemuan Rutin TP PKK Tingkat Kota
- y) Terlaksananya rakor PKK Tingkat Provinsi
- z) Terlaksananya temu kemitraan kader poktan PKK di RPTRA yang diikuti sebanyak 300 Orang

14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dialokasikan APBD sebesar Rp22.874.190.331,00 dengan total penyerapan sebesar Rp21.981.159.057,00 atau 96,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Penduduk
 - a) Akselerasi pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) dan Pus Mupar di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b) Gebyar Program KKBPK pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota
 - c) Jejaring penyiapan peralihan pelayanan KB era JKN dalam menghadapi Total Coverage 2019 dengan faskes Tingkat Kota
 - d) Pelaksanaan model solusi strategis dampak kependudukan di rusun/ RPTRA/ Kampung KB Tingkat Provinsi
 - e) Pelaksanaan Orientasi Sistem Pendataan Keluarga Berbasis T
 - f) Pelayanan KB gratis melalui mobil unit pelayanan KB Tingkat Kota
 - g) Pelayanan KB gratis Melalui Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus Tingkat Kota
 - h) Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan
 - i) Pembekalan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) (Pembekalan Program Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, PPKS bagi Pengelola dan Pelaksana Program)
 - j) Pembekalan Kesehatan Reproduksi Pada PUS MUPAR bagi Pengelola RPTRA
 - k) Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska

Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

- l) Pembekalan Pencegahan Penularan HIV/AIDS bagi Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun
- m) Pemutakhiran Road Map *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk
- n) Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
- o) Pengadaan Formulir Program Keluarga Berencana
- p) Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- q) Penggalangan Program KKBPK pada Hari keluarga Nasional Tingkat Kota
- r) Penggalangan Program KKBPK Pada Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota
- s) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Kota dan Kecamatan
- t) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Provinsi
- u) Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus
- v) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi
- w) Peningkatan Pemahaman Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Pendidik Tingkat Kota
- x) Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana
- y) Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri (BPM)
- z) Penyelenggaraan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB ERA JKN Dalam Menghadapi Total Coverage 2019 Dengan Faskes Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- aa) TNI Manunggal KB Kesehatan Tk Kabupaten

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , antara lain:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Terlaksananya Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) Dan Pus Mupar Di Bidanpraktek Mandiri (BPM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 100 orang
- c. Terlaksananya Gebyar Program KKBPK pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 150 orang
- d. Terlaksananya Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB era JKN dalam Menghadapi Total Coverage 2019 dengan Faskes Tingkat Kota sebanyak 317 Orang
- e. Terlaksananya model solusi strategis dampak kependudukan di rusun/ RPTRA/ Kampung KB Tingkat Provinsi
- f. Terlaksananya Pelayanan KB gratis selama 12 bulan dengan jumlah peserta KB sebanyak 1.600 Orang di Jakarta Timur
- g. Terlaksananya Pelayanan KB Melalui Mobil unit Keliling di Provinsi DKI Jakarta (12 bulan), di Jakarta Barat (112 kali), di Jakarta Selatan (10 Kecamatan), dan di Jakarta Timur (3600 Orang)
- h. Terlaksananya Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 421 orang
- i. Terlaksananya Pembekalan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 300 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 10 Kegiatan, Jakarta Utara sebanyak 78 Orang dan Jakarta Timur sebanyak 400 orang
- j. Terlaksananya Pembekalan Kesehatan Reproduksi Pada PUS MUPAR bagi Pengelola RPTRA yang diikuti sebanyak 180 orang

- k. Terlaksananya Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 564 orang
- l. Terlaksananya Pembekalan Pencegahan Penularan HIV/AIDS bagi Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun sebanyak 24 Kegiatan
- m. Terlaksananya Pemutakhiran Road Map Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
- n. Terlaksananya Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pengadaan Formulir Program KB sebanyak 40.000 Lembar dan Pengadaan Formulir Program Keluarga Berencana sebanyak 6 Jenis Formulir
- o. Terlaksananya Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 200 Orang
- p. Terlaksananya Penggalangan Program KKBPK pada Hari keluarga Nasional Tingkat Kota di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 500 orang, Jakarta Barat sebanyak 300 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 500 Orang, dan Jakarta Timur sebanyak 300 Orang
- q. Terlaksananya Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan di Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 1.800 orang, Jakarta Pusat sebanyak 2.500 Orang, Jakarta Selatan sebanyak 10 Lokasi, Jakarta Utara sebanyak 6 Kecamatan, Jakarta Timur sebanyak 10 Kecamatan dan Kepulauan Seribu sebanyak 345 Orang
- r. Terlaksananya Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan Sasaran Khusus yang dilakukan di 10 kecamatan
- s. Terlaksananya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pemahaman Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Pendidik Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 100 Orang, Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program

Keluarga Berencana sebanyak 70 orang, Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana sebanyak 100 Orang dan Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana sebanyak 150 orang

- t. Terlaksananya Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang diikuti sebanyak 110 orang
- u. Terlaksananya Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB ERA JKN Dalam Menghadapi Total Coverage 2019 Dengan Faskes di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 130 orang
- v. Tersusunya Renstra 2018 – 2022

15. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp4.822.789.011.408,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.444.702.617.895,00 atau 71,43%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp383.432.835.224,00 dengan total penyerapan sebesar Rp317.060.885.930,00 atau 82,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
 - a) Pengelolaan Respon Opini Publik
 - b) Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi
 - c) Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID Provinsi DKI Jakarta
 - d) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - e) Pengelolaan Layanan SMS Blast Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
 - a) Terlaksananya pengelolaan 8 Kanal Pengaduan Warga sejumlah 103.973 Laporan dengan Rata-Rata Penyelesaian 89,68%; terlaksananya 8 survey lapangan di 50 titik Rawan Ketertiban Umum dan Rekomendasi Pemasangan CCTV; Observasi 50 Titik Jembatan Penyebrangan Orang (JPO); Observasi Aliran Sungai, Saluran PHB dan Drainase; Observasi 250 Titik *Hydrant*, Observasi Trotoar di Sekitar Venue Asian Games 2018; Observasi 35 Titik Rawan Ketertiban Umum dan Rekomendasi Pemasangan CCTV; dan Observasi wilayah Fase I dan Observasi wilayah Fase II

- b) Terlaksananya pelayanan, pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID; permohonan informasi publik sudah terlayani sebesar 90%; dan terselenggaranya Bimtek Pengelolaan info publik melalui PPID kepada 362 Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- c) Terlaksananya pengelolaan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berita jakarta dalam bentuk berita teks bahasa Indonesia, Inggris, Video dan Foto
- d) Terlaksananya pengelolaan layanan SMS Blast untuk internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp230.630.697.809,00 dengan total penyerapan sebesar Rp200.484.378.866,00 atau 86,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

18. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp798.268.176.970,00 dengan total penyerapan sebesar Rp721.004.625.088,00 atau 90,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan Penanaman Modal
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp787.302.118.864,00 dengan total penyerapan sebesar Rp626.017.921.024,00 atau 79,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah.
- 2) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
 - a) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Tingkat Kota
 - b) Lomba Gudep Pramuka Tergiat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c) Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota
 - d) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional
 - e) Pelaksanaan Ajang Interaksi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - f) Pelaksanaan Ajang Kreativitas Pemuda Kota dan Pengiriman ke Provinsi
 - g) Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) DKI Jakarta
 - h) Pelaksanaan Jambore Pemuda Wilayah (JPW) Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
 - i) Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - j) Pelaksanaan Latihan Gabungan Anggota PMR Mula, Madya, Wira Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - k) Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi
 - l) Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat

Provinsi

- m) Pelaksanaan Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- n) Pelaksanaan Lomba Regu Prestasi Kepramukaan Tingkat Kota
- o) Pelaksanaan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- p) Pelaksanaan Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
- q) Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Paskibra Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- r) Pelaksanaan Pesantren Kilat bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
- s) Pelaksanaan Rembug Organisasi Pemuda Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- t) Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kota
- u) Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
- v) Pelaksanaan Seleksi Panca Lomba PMR Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
- w) Pelaksanaan Temu Karya Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- x) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda DKI Jakarta
- y) Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula, Madya, Wira DKI Jakarta
- z) Pelatihan Penyelenggaraan Event bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
- aa) Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional
- bb) Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Kota
- cc) Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
- dd) Pengiriman Pemuda Pelopor Kota ke Tingkat Provinsi
- ee) Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional

- ff) Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Kota ke Tingkat Provinsi
- gg) Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke Tingkat Nasional
- hh) Perlombaan Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi
- ii) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
- jj) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Kota Ke Tingkat Provinsi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain:

- 1) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
 - a) Terlaksananya Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Kota di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 50 orang, Jakarta Selatan sebanyak 100 orang, Jakarta Barat sebanyak 100 orang dan Jakarta Utara sebanyak 100 orang.
 - b) Terlaksananya Lomba Gudep Pramuka Tergiat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 256 peserta
 - c) Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional yang diikuti sebanyak 15 orang
 - d) Terlaksananya Ajang Interaksi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 80 Orang
 - e) Terlaksananya Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta Timur yang diikuti sebanyak 500 orang, Jakarta Barat sebanyak 238 orang, Jakarta Pusat sebanyak 184 orang, Jakarta Utara sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 200 orang
 - f) Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 300 orang
 - g) Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Kota Jakarta Barat sebanyak 90 orang, Jakarta

Pusat sebanyak 80 orang, Jakarta Timur sebanyak 100 orang, Jakarta Utara sebanyak 100 orang dan Jakarta Selatan sebanyak 100 orang

- h) Terlaksananya Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) yang diikuti sebanyak 90 orang
- i) Terlaksananya Kegiatan Latihan Gabungan Anggota PMR Mula, Madya, Wira Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 150 Orang
- j) Terlaksananya Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 44 Gudep, Jakarta Utara diikuti 18 Gudep, Jakarta selatan diikuti 30 Gudep dan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 Gudep
- k) Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 45 sekolah
- l) Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi di Jakarta Selatan yang diikuti sebanyak 30 institusi, Jakarta Barat sebanyak 144 orang, Jakarta Utara sebanyak 18 institusi dan Jakarta Pusat sebanyak 60 institusi.
- m) Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Kepramukaan Tingkat Kota di Jakarta Utara yang diikuti sebanyak 12 regu putra dan 12 regu putri, Jakarta Pusat sebanyak 256 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 320 peserta dan Jakarta Timur diikuti semua anggota pramuka
- n) Terlaksananya Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi di Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 612 peserta, Jakarta Selatan sebanyak 1.020 peserta, Jakarta Barat sebanyak 816 peserta, Jakarta Timur diikuti oleh siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Jakarta Utara sebanyak 123 peserta
- o) Terlaksananya Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris - Berbaris (PBB) Tingkat Provinsi yang diikuti

sebanyak 612 peserta.

- p) Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta dari 5 bidang lomba yang diikuti sebanyak 300 orang
- q) Terlaksananya Seleksi Panca Lomba PMR Tingkat Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 120 orang, Jakarta Pusat sebanyak 54 orang, Jakarta Utara sebanyak 18 grup, dan Jakarta Selatan sebanyak 180 orang
- r) Terlaksananya Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 250 orang.
- s) Terlaksananya Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kota Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 800 orang, Jakarta Pusat sebanyak 500 orang, Jakarta selatan sebanyak 1500 orang, Jakarta Timur sebanyak 1 peserta, Jakarta Utara sebanyak 600 orang
- t) Terlaksananya Temu Karya Pemuda Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 120 orang
- u) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 200 orang
- v) Terlaksananya Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula, Madya dan Wira DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 90 orang
- w) Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Event bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diikuti sebanyak 100 orang.
- x) Terlaksananya Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 orang Paskibraka terbina dan terlatih
- y) Terlaksananya Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 20 orang, Jakarta Pusat sebanyak 20 orang, Jakarta Selatan sebanyak 70 orang, Jakarta Timur diikuti oleh Paskibraka Kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara sebanyak 20 orang
- z) Terlaksananya Pemusatan Latihan dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 54 orang

- aa) Terlaksananya Pemusatan Latihan dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota di Jakarta Barat yang diikuti sebanyak 30 orang, Jakarta Pusat sebanyak 44 orang, Jakarta Selatan sebanyak 70 orang, Jakarta Timur sebanyak 70 orang dan Jakarta Utara sebanyak 40 orang
- bb) Terlaksananya Pengiriman Pemuda Pelopor Kota ke Tingkat Provinsi di Jakarta Barat yang dihadiri sebanyak 75 orang, Jakarta Pusat sebanyak 80 orang, Jakarta Selatan sebanyak 75 orang dan Jakarta Utara sebanyak 60 orang
- cc) Terlaksananya Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang diikuti sebanyak 292 orang
- dd) Terlaksananya Perlombaan Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota yang diikuti sebanyak 24 Gudep
- ee) Terpilihnya 4 orang perwakilan delegasi Provinsi DKI Jakarta untuk program AISEP, SSEAYP dan IKEYP dari 82 peserta yang mengikuti seleksi
- ff) Terlaksananya Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Kota Ke Tingkat Provinsi yang dihadiri sebanyak 224 orang

20. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.917.794.962,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral
 - b) Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Sektoral
 - c) Pembinaan Statistik Sektoral
 - d) Penyelenggaraan Konsultasi Regional PDRB 2018 Se-Jawa Bali NTB dan NTT

- e) Pelaksanaan Survei Kebijakan Publik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik, antara lain:

- 1) Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
 - a) Terlaksananya operasional pengelolaan statistik dalam bentuk terkumpulnya sebanyak 218 data kebutuhan dasar, tersusunnya buku saku statistik sektoral 2017, tersusunnya buku infografis statistik sektoral 2017, tersusunnya informasi/artikel statistik pada portal statistik sektoral dan terlaksananya 3 survei statistik secara swakelola.
 - b) Terlaksananya pengadaan 1 unit server dan 1 unit storage serta terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sistem informasi statistik dan portal statistik sektoral.
 - c) Terlaksananya 6 kali pembinaan statistik sektoral untuk peningkatan kompetensi statistik internal Diskominfotik dan PD terkait.
 - d) Terlaksananya Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara di Jakarta.
 - e) Terlaksananya 2 Survei Kebijakan Publik yaitu survei kepuasan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan survei evaluasi program OK OTrip (Jak Lingko)

21. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Persandian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp188.400.000,00 dengan total penyerapan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Persandian , antara lain:

- 1) Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
Tersedianya Jaringan Komunikasi Data yang Aman

22. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp494.491.463.992,00 dengan total penyerapan sebesar Rp450.715.306.553,00 atau 91,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

23. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp176.857.269.211,00 dengan total penyerapan sebesar Rp156.522.808.198,00 atau 88,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
 - a) Lanjutan Rehab Total Gedung Sudin Pusip Jakarta Timur
 - b) Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling
 - c) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum
 - d) Layanan Pelaksanaan Kegiatan Asian Games dan Asian Paragames Tahun 2018
 - e) Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
 - a) Terelesaiskannya pelaksanaan rehab total Gedung Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur
 - b) Tersedianya mobil perpustakaan keliling sebanyak 15 unit
 - c) Terselenggaranya pelayanan perpustakaan umum selama 1 tahun dengan jumlah pengunjung perpustakaan stasioner sebanyak 199.242 orang
 - d) Tersedianya reading corner pada venue Asian Games dan Asian Paragames tahun 2018 di 20 lokasi
 - e) Tersedianya pengadaan buku umum sebanyak 20.900 eksemplar untuk Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp37.781.371.164,00 dengan total penyerapan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana Gedung Depo Arsip Pulomas
 - b) Pengadaan Boks dan Map Arsip SKPD/UKPD
 - c) Pembinaan Pengelolaan Kearsipan bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat
 - d) Pemeliharaan dan Pengolahan Arsip

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - a) Tersedianya sarpras Gedung Depo Arsip Pulomas sebanyak 9 jenis

- b) Tersedianya boks dan map arsip sebanyak 283.820 buah (map arsip 183.820 buah dan 100.000 boks arsip) untuk kebutuhan 1 tahun
- c) Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelola kearsipan bagi Perangkat Daerah, Swasta dan Masyarakat selama 1 tahun
- d) Terpelihara dan terolahnya arsip sebanyak 6.171 boks dan pengendalian hama dan fumigasi arsip di 5 depo.

25. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp118.175.042.315,00 dengan total penyerapan sebesar Rp100.342.518.847,00 atau 84,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

26. Urusan Pariwisata

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp194.145.534.477,00 dengan total penyerapan sebesar Rp153.618.966.091,00 atau 79,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 3) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

27. Urusan Pertanian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp87.408.344.080,00 dengan total penyerapan sebesar Rp71.001.783.759,00 atau 81,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

28. Urusan Kehutanan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.435.570.030.665,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.165.976.831.217,00 atau 92,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Hutan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 2) Program Pengelolaan Pertamanan

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

- 3) Program Pengelolaan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.261.490.090.013,00 dengan total penyerapan sebesar Rp962.745.258.358,00 atau 76,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Konservasi Air Tanah Dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
 - a) Pemantauan Penurunan Tanah melalui pengukuran GPS Geodetik
 - b) Pembangunan Sumur Resapan
 - c) Pemeliharaan Sumur Pantau
 - d) Pembangunan Sumur Pantau
 - e) Pembangunan database air tanah
 - f) Pengadaan meter air dan material pendukung pemanfaatan air tanah
 - g) Pengembangan sistem data informasi geologi dan air tanah
 - h) Pelaksanaan audit penggunaan air tanah
- 2) Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan
 - a) Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabel Laut Tahap III di Kepulauan Seribu
 - b) Kajian Teknis Tarif Listrik pada Kawasan Terbatas dan Pemegang IUPTL
 - c) Pemeriksaan Kelaikan Operasi Genset Milik Pemda
 - d) Pelaksanaan audit energi pada gedung Pemda
 - e) Penyediaan Bahan Bakar PLTD Sebra
 - f) Pemeliharaan PLTD
- 3) Program Peningkatan Pencahayaan Kota
 - a) Pembayaran rekening PJU
 - b) Pengadaan Armatur Pencahayaan Kota
 - c) Pembayaran Biaya Penyambungan Daya Listrik Tingkat Provinsi
 - d) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan RE. Martadinata
 - e) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Laksda Yos Sudarso
 - f) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Pedestrian di 5 wilayah kota administrasi
 - g) Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Akses Rusun

Pesakih

- h) Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
- i) Penanganan Limbah Pencahayaan Kota
- j) Pengadaan peralatan kerja pencahayaan Kota
- k) Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota
- l) Pengadaan Tiang dan Stang Ornament Pencahayaan Kota
- m) Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota
- n) Pengadaan material pendukung pencahayaan kota
- o) Pengadaan Material Konstruksi Pencahayaan Kota
- p) Pengadaan Panel Pencahayaan Kota
- q) Pengadaan Komponen Lampu Pencahayaan Kota
- r) Pemeliharaan High Mast Pole (HMP)
- s) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
- t) Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT
- u) Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan
- v) Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
- w) Pemeliharaan Neonsign Bentangan
- x) Pembangunan Pencahayaan Kota Pada Jalan Inspeksi/Bantaran Kali

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

- 1) Program Konservasi Air Tanah Dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
 - a) Terpublikasikannya peta zona penurunan tanah di wilayah DKI Jakarta melalui pengukuran GPS Geodetik
 - b) Terbangunnya sumur resapan sebanyak 140 titik.
 - c) Terbangunnya 5 sumur pantau dengan kedalaman 200 meter (Kecamatan Makassar, Kebayoran Baru, Senen, Kelapa Gading dan Kelurahan Tegal Alur) dan pemeliharaan sumur pantau sebanyak 11 titik.
 - d) Tersusunnya database pelanggan air tanah
 - e) Tercapainya pengadaan meter air (1-3 inch) sebanyak 1.245 unit

- dan material pendukung pemanfaatannya
- f) Terciptanya sistem data informasi geologi dan air tanah
 - g) Terlaksananya audit penggunaan air tanah gedung Pemda DKI Jakarta
- 2) Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan
- a) Terlaksananya Pemeriksaan kelayakan operasi genset milik pemda dalam bentuk sertifikasi layak operasi sebanyak 100 genset
 - b) Terlaksananya audit energi di 10 gedung Pemda
 - c) Tersedianya bahan bakar PLTD Sebra selama satu tahun
 - d) Terlaksananya Pemeliharaan PLTD berserta suku cadangnya
- 3) Program Peningkatan Pencahayaan Kota
- a) Terlaksananya pembayaran rekening selama 12 bulan
 - b) Terlaksananya pengadaan armatur pencahayaan kota lampu LED dengan smart system sebanyak 57.101 unit
 - c) Terlaksananya pembayaran biaya penyambungan daya listrik tingkat provinsi dengan daya listrik selama 12 bulan
 - d) Terlaksananya peningkatan kualitas pencahayaan kota pada PJU di Jl. RE. Martadinata 171 titik, Laksda Yos Sudarso dengan PJU di Jl Laksda Yos Sudarso sebanyak 114 titik, pedestrian di 5 wilayah kota sebanyak 200 titik, dan akses Rusun Pesakih sebanyak 100 titik.
 - e) Tersedianya material pendukung pencahayaan kota berupa gembok, kerangkeng panel, magnetic contactor, surge protection device dan time switch)
 - f) Tertanganinya limbah pencahayaan yang mengandung limbah B3
 - g) Tersedianya peralatan kerja (24 jenis) pencahayaan Kota berupa mesin potong rumput, kompresor listrik, kunci pas, lampu hias (132 buah neon box, mayang 39 buah dan colybrate (25 meter) untuk mendukung ASIAN GAMES), tiang dan stang ornament 50 tiang beton untuk pengembangan JTR, kabel NYY (1.200 meter)

- dan material pendukung (kabel NYFGBY 4x6 (1.000 meter), compresion joint, fuse, isolasi band, mcb, schoen kabel, service wedge clamp), material konstruksi, pondasi tiang tanam (200 unit), pondasi panel (50 unit) dan pondasi tiang beton (50 titik)
- h) Tersedianya 24 jenis peralatan kerja dan 17 jenis material pendukung untuk pemeliharaan lampu PJU di wilayah Jakarta Barat
 - i) Tersedianya 5 jenis kabel (total 100.200 meter), tiang dan stang ornamen (500 buah) tiang tanam (11.000 unit Box Lengkap dengan MCB; 100 unit Phb Induk; dan 19 unit Phb) untuk PJU wilayah Jakarta Barat
 - j) Tersedianya material konstruksi untuk 5 jenis pondasi (total 620 unit) dan lampu hias untuk wilayah Jakarta Barat
 - k) Terpasangnya neon box sebanyak 100 titik pada lokasi Slipi-Latumenten (70 titik), Jl Tomang Raya (10 titik), Jl. Kyai Tapa (20 titik) dalam rangka Asian Games XVIII
 - l) Terlaksananya pengadaan komponen lampu pencahayaan Kota sebanyak 500 buah dengan rincian ballast; 500 buah Capacitor Mc; dan 250 buah lampu mc untuk pemeliharaan lampu PJU di wilayah Jakarta Barat
 - m) Terpeliharanya High Mast Pole (HMP) sebanyak 7 item untuk wilayah Jakarta Barat, 3 lokasi di Jakarta Selatan yaitu terminal Pasar Minggu, perempatan Pancoran dan Terminal Blok M, dan 2 item di Jakarta Utara
 - n) Terlaksananya Peningkatan Kualitas pencahayaan kota pembangunan pada 175 titik PJU di halaman gedung kantor pemerintah, 350 titik PJU di Jln Inspeksi Kali dan 350 unit pondasi PJU di Jln Inspeksi Kali di wilayah Jakarta Barat
 - o) Terlaksananya Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT sebanyak 4.245 titik yang tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
 - p) Terlaksananya Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan sebanyak 5.531 titik yang tersebar di

wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

- q) Tersedianya lampu hias sebanyak 300 buah neon box untuk pemasangan pada lokasi Jl. Asia-Afrika, Jl. Gerbang Pemuda, Jl Sudirman-Dukuh Atas
- r) Tersedianya Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota sebanyak 980 buah
- s) Tersedianya Panel Pencahayaan Kota sebanyak 2.090 buah
- t) Tersedianya Peralatan Kerja Pencahayaan Kota sebanyak 14 jenis
- u) Terpeliharanya ucapan bentangan neonsign mengikuti event-event wilayah dan nasional
- v) Terlaksananya Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan antara lain : Bundle Protection Set, Compression Jint LVTC 70+Heatsink, Fuse, NH Fuse,
- w) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Untuk Mendukung Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pencahayaan Kota, meliputi : Helm Safety, Safety Belt, Lampu Senter LED Police T6, Head Lamp, Sarung Tangan Kulit, Jas Hujan, Kacamata Las, Senter Lampu Lalu Lintas, Tang Jepit, Tang Potong, Tang Kupas, dll
- x) Terlaksananya Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota contohnya : Kabel NYFGBY 4x25mm², Kabel NYFGBY 4x50mm², Kabel NYY 3x2,5mm², Kabel Twisted 3x70+50mm², Kabel Twisted 4x16mm²
- y) Tersedianya Tiang Tanam Press Bottle (18 meter) dan Stang Ornament 2" (8,5 Meter) untuk menunjang pemeliharaan pencahayaan kota
- z) Tersedianya tiang tanam press Bottle sebanyak 70 buah dan stang ornamen sebanyak 730 buah untuk menunjang sarana dan prasarana pembangunan
- aa) Terlaksananya Pengadaan Panel sebanyak 100 buah
- bb) Terlaksananya Perapihan pondasi akibat pembangunan LRT, MRT di Jakarta Selatan dan penggantian pondasi panel induk di

Jakarta Selatan sebanyak 177 unit

- cc) Terlaksananya Pengadaan lampu hias untuk event Asian Games, HUT RI, HUT DKI, Lebaran Betawi, Pameran Flora Fauna, Natal dan Tahun Baru
- dd) Terlaksananya Pemasangan neon box di beberapa lokasi sebagai berikut:
 - 5 lokasi wilayah Jakarta Selatan yaitu Jl. Metro Pondok Indah (30 titik), Jl. Patimura (15 titik), Jl. Prapanca (10 titik), Jl. Gatot Subroto (15 titik) Jl. Rasuna Said (15 titik)
 - 3 lokasi wilayah Jakarta Pusat yaitu Jl. Yos Sudarso (60 titik), Jl. Perintis Kemerdekaan (40 titik), Jl. Gunung Sahari (25 titik)
 - 2 lokasi wilayah Jakarta Utara yaitu Jl. RE Martadinata (50 titik), Danau Sunter Selatan (25 titik) dan pemasangan lampu hias sakura sebanyak 40 buah dari walikota Jakut s.d Danau Sunter)
- ee) Tersedianya Material Konstruksi untuk menunjang sarana dan prasarana pembangunan pencahayaan kota sebanyak 100 Unit Pondasi Induk tinggi 1 M, 50 Unit Pondasi PHB Pembagi, 201 Unit Pondasi Tiang Tanam (HSPK), 1 unit pondasi PHB 100 cm dan 1 unit pondasi Pembagi PHB Natrium 100 cm
- ff) Terlaksananya Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan untuk mendukung Asian Games pada lokasi Kawasan Halim, Jatinegara, Jl. Balap Sepeda dan Jl. Sumarno
- gg) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi/ Bantaran Kali sebanyak 100 unit
- hh) Terlaksananya Pengadaan Panel Pencahayaan Kota berupa Panel Induk sebanyak 150 unit, Panel Pembagi sebanyak 80 Unit dan Box MCB sebanyak 24.000 unit
- ii) Tersedianya material pendukung untuk penunjang kelengkapan kerja pencahayaan kota sebanyak 19 jenis
- jj) Tersedianya peralatan kerja untuk mendukung sarana dan prasarana pekerjaan pencahayaan kota sebanyak 32 jenis
- kk) Tersedianya kabel untuk menunjang sarana dan prasarana

pembangunan pencahayaan kota sebanyak 6 jenis

30. Urusan Perdagangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp38.689.158.024,00 dengan total penyerapan sebesar Rp36.647.381.432,00 atau 94,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan

- a) Pameran Promosi Dalam Kota
- b) Pengadaan Alat Test Uji Cepat
- c) Pengawasan Produk SNI Wajib
- d) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perdagangan, antara lain:

1) Program pengawasan dan pelayanan perdagangan

- a) Terlaksananya fasilitasi sebanyak 20 UKM untuk berpartisipasi pada Pameran Promosi Dalam Kota
- b) Terlaksananya Pengadaan Alat Test Uji Cepat berupa erlenmeyer, rak tabung sentrifuse, tabung reaksi, rapid tes uji formalin, tes uji metanil yellow, alat teskit norak, alat teskit rodamin, dan Aquades
- c) Terlaksananya Pengawasan Produk SNI wajib sebanyak 6 (enam) kali di Mall Kelapa Gading, ITC Cempaka Mas, Transmart Cempaka Putih, Hero Mall Taman Anggrek, UD. Vitara Kalideres, CV. Anugerah Kapuk Muara
- d) Tersedianya pengadaan produk pada Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen

31. Urusan Perindustrian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp40.076.437.028,00 dengan total penyerapan sebesar Rp32.803.244.867,00 atau 81,85%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan dan Pengembangan Industri
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana pengawasan Industri
 - b) Peningkatan Pengawasan Industri
 - c) Peningkatan Kualitas Produk Tahu Tempe
 - d) pengadaan Alat Laboratorium dan penunjangnya
 - e) Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perindustrian , antara lain:

- 1) Program Pengawasan Dan Pengendalian Industri
 - a) Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Industri dalam bentuk Pengadaan Test Kit Boraks, Test Kit Formalin, Test Kit Rhodami, Test Kit Methanil Yellow (Masing-Masing 20 Set) Dan Alat Uji Kandungan Babi (12 Set)
 - b) Terawasinya Aktivitas Industri Di Provinsi Dki Jakarta
 - c) Meningkatnya Kualitas Produk Tahu Tempe
 - d) Tersedianya 10 Alat Laboratorium dan 71 Jenis Bahan Penunjangnya
 - e) Terlaksananya Pemeliharaan Dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Sebanyak 25 Unit

32. Urusan Perencanaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp121.866.238.802,00 dengan total penyerapan sebesar Rp113.714.652.125,00 atau 93,31%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

33. Urusan Keuangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Keuangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp4.429.597.434.745,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.273.720.323.645,00 atau 28,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keuangan , antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
Terlaksananya Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf sebanyak 410 perjalanan

34. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp288.393.539.917,00 dengan total penyerapan sebesar Rp261.730.749.637,00 atau 90,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan Kompetensi SDM
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

35. Urusan Penelitian Dan Pengembangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.481.007.800,00 dengan total penyerapan sebesar Rp70.400.000,00 atau 2,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

36. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp148.607.226.903,00 dengan total penyerapan sebesar Rp135.116.497.225,00 atau 90,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi
- b) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
- c) Monitoring Pemilu Tahun 2019
- d) Peningkatan Kemitraan Pemerintah Kota dengan Partai Politik
- e) Peningkatan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik , antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Terlaksananya Kemitraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota dengan Partai Politik
 - b) Terlaksananya Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi
 - c) Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
 - d) Terlaksananya Monitoring Pemilu Tahun 2019
 - e) Terlaksananya Posko Monitoring Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara

37. Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.747.552.453.470,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.554.241.925.056,00 atau 88,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Sipil dan Arsitektur)
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)
 - c) Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta ke-491 Tahun 2018 (Provinsi)
 - d) Penyediaan Peralatan Audio Visual di Ruang Rapat Pimpinan
 - e) Pengadaan Aplikasi Penjadwalan Berdasarkan Elektronik
 - f) Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Komplek Balaikota
 - g) BKO Pengamanan Komplek Balaikota Lintas Sektoral (TNI/POLRI)
 - h) Pengamanan Kantor Balaikota dalam Mengantisipasi Aksi unjuk Rasa
 - i) Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - j) Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Jaringan Air dan Telekomunikasi
 - k) Penyelenggaraan Acara-Acara Seremonial Pimpinan
 - l) Penyediaan Sarana Prasarana Kelengkapan Kerumahtanggan Daerah Ruang Rapat Terpadu
- 2) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
 - a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
 - 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Penyusunan Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan
 - 4) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 5) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
 - 6) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

- 7) Program Peningkatan Bantuan - Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
 - a) Pengurusan Perkara di Pengadilan
 - b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan
 - c) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
 - d) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
 - e) Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - a) Pelaksanaan Reses DPRD
 - b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - c) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
 - d) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
 - e) Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - g) Pembuatan sistem Informasi e-Reses
 - h) Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - i) Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - j) Kunjungan kerja Sister City dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 9) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
 - a) Pelaksanaan Tugas Koordinator Bantuan Keuangan dan Hibah
 - b) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama
 - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
 - d) Rapat kerja Gubernur Anggota APPSI

- 10) Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
 - a) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
 - b) Peningkatan Fasilitas Korps Diplomatik
 - c) Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Event dan Organisasi Internasional
- 11) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 12) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
 - a) Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - c) Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Perekonomian
- 13) Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - a) Penyusunan KPI BUMD
 - b) Pendampingan Dalam Rangka Evaluasi Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban BUMD
 - c) Evaluasi proyek penugasan kepada BUMD
 - d) Pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus BUMD
 - e) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - f) Penyediaan Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal daerah
 - g) Implementasi Sistem Informasi BUMD
- 14) Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan , antara lain:

- 1) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
 - a) Terpeliharanya fisik bangunan rumah dinas pimpinan dan fisik bangunan Gedung Kompleks Balai Kota DKI Jakarta selama 12 bulan.
 - b) Terselenggaranya HUT Kota Jakarta ke-491 Tahun 2018.
 - c) Tersedianya Peralatan Audio Visual di Ruang Rapat Pimpinan

berupa tersedianya Mic Conference Ruang TPUT dan Proyektor Balai Agung.

- d) Tersedianya Aplikasi Penjadwalan Berdasarkan Elektronik berupa tersedianya komputer untuk mendukung aplikasi e-pesan ruangan dan Digital Display untuk aplikasi e-pesan ruangan, yang beroperasi dan dimanfaatkan sejak bulan Oktober tahun 2018.
 - e) Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Komplek Balaikota sebanyak 18 unit.
 - f) Tersedianya BKO Pengamanan Komplek Balaikota Lintas Sektoral TNI/POLRI sebanyak 14 orang.
 - g) Terlaksananya Pengamanan Kantor Balaikota dalam Mengantisipasi Aksi unjuk Rasa berupa tersedianya Peyediaan Makanan dan minuman bagi petugas pengamanan dari TNI/POLRI dalam mangantisipasi aksi unjuk rasa/demonstrasi di lingkungan Balaikota DKI Jakarta.
 - h) Terpeliharanya AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta sebanyak 5 unit chiller dan pengadaan suku cadangnya.
 - i) Terpeliharanya Jaringan Air dan Telekomunikasi yang dikerjakan oleh PJLP sejumlah 42 orang.
 - j) Tersedianya sarana dan prasarana acara seremonial pimpinan selama 1 (satu) tahun anggaran (TA 2018) sebanyak 107 acara.
 - k) Tersedianya Sarana Prasarana Kelengkapan Kerumahtanggan Daerah Ruang Rapat Terpadu berupa tersedianya prasarana dan sarana acara seremonial (meja, kursi, karpet, sound system, komputer, proyekor dan TV) untuk mendukung kelancaran acara.
- 2) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
- a) Terselenggaranya jamuan acara resmi provinsi DKI Jakarta sebanyak 967 jamuan acara
 - b) Terfasilitasinya penerimaan/pelayanan tamu provinsi DKI Jakarta sebanyak 614 layanan

- 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Tersusunnya Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan
- 4) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
- 5) Program Peningkatan Bantuan - Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
 - a) Terselenggaranya Pengurusan Perkara di Pengadilan dengan%tase Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak 100 %
 - b) Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan%tase Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak 100%
 - c) Terselenggaranya Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum dengan%tase Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM sebanyak 100 % dengan Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 31 Kelurahan
 - d) Terselenggaranya Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan%tase peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara sebanyak 100 %
 - e) Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna dengan%tase Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM sebanyak 64% dengan penambahan sejumlah 41 Kelompok Kadarkum terbina
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - a) Terlaksananya 3 kegiatan Reses DPRD
 - b) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - c) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
 - d) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan yang diikuti sebanyak 106 orang

- e) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - f) Terlaksananya 12 kegiatan Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - g) Terlaksananya Pembuatan sistem Informasi e-Reses
 - h) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - i) Terlaksananya 12 agenda Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - j) Terlaksananya Kunjungan kerja Sister City dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
- a) Terlaksananya tugas koordinator bantuan keuangan dan hibah dalam bentuk surat rekomendasi bantuan keuangan dan hibah sebanyak 8 rekomendasi bantuan keuangan (Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Lombok Timur, Kab Lombok Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah) dan 3 rekomendasi hibah (MIPI, MPU dan BKSP Jabodetabekjur)
 - b) Terfasilitasinya penyusunan 1 KB dan 1 PKS dengan Provinsi/Kabupaten lain, 3 KB, 4 PKS dan 1 Add PKS dengan Pemda Bodetabekjur, 12 KB, 58 PKS dan 3 Add PKS dengan Lembaga/Badan
 - c) Terlaksananya monev PKS terkait pelaksanaan kerja sama bidang transmigrasi di 2 lokasi, monev pelaksanaan kerja sama perkotaan di 9 Kab/Kota Bodetabekjur dan monev PKS dengan Lembaga/Badan yang berakibat penambahan pendapatan atau aset
 - d) Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Gubernur Anggota APPSI selama 3 hari

- 8) Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
 - a) Terciptanya hubungan kerjasama sister City dengan 7 Kota Sister City dengan baik
 - b) Terfasilitasinya Korps Diplomatik dan Organisasi Internasional yang berada di Jakarta sebanyak 120 mitra kerjasama
 - c) Jakarta ikut berpartisipasi pada 26 Event Internasional yang diselenggarakan dari 12 Organisasi Internasional
- 9) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
 - a) Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Strategis di 48 pasar yang terpantau pada Info Pangan Jakarta
 - b) Terlaksananya Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - c) Tersedianya Kajian Aktivitas Bidang Perekonomian
- 10) Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
 - a) Tersusunnya KPI Pengurus BUMD dan KPI BUMD pada 13 BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - b) Terlaksananya pendampingan dalam rangka evaluasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 13 BUMD
 - c) Terlaksananya evaluasi 11 proyek penugasan pada 6 BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - d) Terlaksananya seleksi calon pengurus BUMD yang diikuti sebanyak 88 orang
 - e) Tersusunnya 5 rapergub terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD
 - f) Tersedianya analisis investasi untuk PMD pada APBD Murni 2019 dan APBD Perubahan Tahun 2018, serta analisis divestasi Perusahaan patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 - g) Terpeliharanya Sistem Informasi BUMD selama 12 bulan

38. Urusan Kewilayahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi

Untuk Urusan Kewilayahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp5.147.813.162.191,00 dengan total penyerapan sebesar Rp4.752.979.002.720,00 atau 92,33%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - a) Rehab Sedang Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
 - b) Rehab Sedang Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
 - c) Pengadaan Kapal Dinas Kecamatan dan Kelurahan
 - d) Rehab sedang kantor lurah rehab gedung kantor lurah Pulau Untung Jawa
 - e) Pembangunan Rumah Dinas Camat Kepulauan Seribu Utara
- 2) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi
 - b) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima
 - c) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 3) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a) Rehab Total Rumah Dinas Lurah Serdang
 - b) Rehab Total Kantor Lurah Kramat
 - c) Rehab Total Rumah Dinas Lurah Petamburan
 - d) Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran
 - e) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 4) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
 - b) Pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan
 - c) Pembangunan Kantor Lurah Karet
 - d) Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak
 - e) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 5) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
 - b) Rehab Sedang Kantor Lurah Pinang Ranti
 - c) Rehab Sedang Kantor Lurah Duku
 - d) Rehab Sedang Kantor Lurah Ceger

- e) Rehab Total Kantor Lurah Kampung Melayu
 - f) Rehab Total Kantor Lurah Balimester
 - g) Rehab Total Kantor Lurah Kayu Manis
 - h) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Rangon
 - i) Rehab Total Kantor Lurah Balekambang
 - j) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogadung
 - k) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
 - l) Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogebang
 - m) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten
- 6) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
- a) Rehab Total Kantor Camat Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b) Rehab Total Kantor Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Rehab Total Kantor Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara
 - d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Adm Jakarta Utara
 - e) Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara
- 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 9) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah
- 10) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

11) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Sudah dijelaskan pada Program Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kewilayahan, antara lain:

1) Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

a) Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor Kecamatan Seribu Utara

b) Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor Kecamatan Seribu Utara

c) Tersedianya 4 unit kapal dinas kecamatan dan kelurahan

d) Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Lurah Pulau Untung Jawa

e) Terbangunnya rumah dinas Camat Seribu Utara

2) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat

a) Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi

b) Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima

c) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.

d) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten.

3) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat

a) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Serdang

b) Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kramat

c) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Petamburan

d) Terlaksananya Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran

e) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten selama 12 Bulan.

f) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten

- 4) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten selama 12 Bulan.
 - b) Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan
 - c) Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Karet
 - d) Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak
 - e) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten
- 5) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a) Terjalannya Komunikasi antara Ulama dan Umaro (dilaksanakannya semacam pembinaan terhadap ulama dan umaro yang dilaksanakan setiap triwulan)
 - b) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Pinang Ranti
 - c) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Dukuh
 - d) Terlaksananya Kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah Ceger
 - e) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Kampung Melayu
 - f) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Balimester
 - g) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Kayu Manis
 - h) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Pondok Ranggon
 - i) Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Kantor Lurah Balekambang
 - j) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogadung
 - k) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
 - l) Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Pulogebang
 - m) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.

- 6) Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
- a) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Terlaksananya rehabilitasi Kantor Camat Kelapa Gading Kota Adm Jakarta Utara
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara sebanyak 5 kali
 - e) Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 12 Bulan.
 - f) Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Utara.



BAB III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 belum mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.809.931.722.844,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp61.235.824.747.633,00 (93,05%), atau tidak mencapai target sebesar Rp4.574.106.975.211,00 (6,95%).

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp64.823.887.369.820,00, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.588.062.622.187,00 atau 5,53%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 (81,78%) atau tidak diserap sebesar Rp13.683.691.409.056,00 (18,22 %).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat Rp51.066.081.379.887,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 naik sebesar Rp10.381.977.240.070,00 atau 20,33% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.235.824.747.633,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.410.139.851.157,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit sebesar Rp174.315.103.524,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp13.165.774.968.318,00, Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp3.619.441.859.550,00, penerimaan pengembalian penyertaan modal daerah sebesar Rp650.000.000.000,00, dan penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp314.382.669,00. Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.435.403.144.101,00 atau 99,90%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.505.956.957.296,00 atau 91,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.168.407.590.164,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp76.817.812.254,00,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2018 sebesar Rp7.416.877.590.164,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.395.509.521.612,00 atau 99,71%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang pada anggaran tahun 2018 tercatat Rp33.630.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 atau 100%.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp9.755.082.722.776,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Audited)	Δ%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.823.887.369.820
1.1	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.901.488.807.743
1.2	Pendapatan Transfer	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
2	BELANJA & TRANSFER	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887
2.1	Belanja Operasi	54.334.845.424.970	46.943.334.200.855	86,40	39.660.198.435.607
2.2	Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
2.3	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
Surplus/Defisit		(9,283,899,537,369)	(174.297.103.524)	~	13.757.805.989.933
3	PEMBIAYAAN	9.283.899.537.369	9.929.446.186.805		(591.823.862.400)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.452.307.127.533	17.435.403.144.101	99,90	8.711.817.362.299
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.168.407.590.164	7.505.956.957.296	91,89	9.303.641.224.699
4	SiLPA		9.755.131.083.281		13.165.982.127.533
	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		(66.360.505)		
	SiLPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian		9.755.064.722.776		



BAB IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 724 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 724 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada

tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat :

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Renovasi			
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomtabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai

habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2019 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.

- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar

kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang

yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
c	Diragukan	50 %	50 %		50 %
d	Macet	100 %	100 %		100 %

- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak

dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian per jenis saldonya menurut
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan

nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal

kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar :

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan

- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada

tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;
 - f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan ,	

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi

terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah :
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam

jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti

aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

I. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan

sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai. Apabila tidak

dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang

berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim

tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra

komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.

- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu ;

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan

Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah

kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi
- Kewajiban kontinjensi merupakan :
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

- b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.809.931.722.844,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 Rp61.235.824.747.633,00 atau 93,05% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.327.136.602.811,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp17.855.177.072.924,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp53.511.071.898,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.901.488.807.743
2	Pendapatan Transfer	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
Jumlah		65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.823.887.369.820

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp37.538.912.327.312,00 atau 98,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp38.125.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target sebesar Rp586.087.672.688,00 atau 1,54%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.038.130.061.136,00 atau

2,84% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.500.782.266.176,00.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44	8.005.898.498.574
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104,91	5.027.240.287.850
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.200.000.000.000	1.244.763.661.522	103,73	1.153.231.799.802
4	Pajak Air Tanah	145.000.000.000	106.497.711.318	73,45	96.679.543.773
5	Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69	1.559.516.918.042
6	Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16	2.752.068.115.536
7	Pajak Hiburan	900.000.000.000	833.684.983.302	92,63	755.379.514.979
8	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.014.794.778.877	88,24	964.653.743.479
9	Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	787.107.000.016	95,41	754.469.006.056
10	Pajak Parkir	550.000.000.000	512.750.980.634	93,23	484.833.460.923
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	78,48	6.757.424.793.475
12	Pajak Rokok	555.000.000.000	632.293.885.585	113,93	582.734.593.614
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	104,62	7.606.651.990.073
	JUMLAH	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46	36.500.782.266.176

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

- 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.553.632.204.643,00 atau 102,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.350.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp547.733.706.069,00 atau 6,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.005.898.498.574,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2018 dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB:

- a) Penagihan secara *door to door* untuk kendaraan bermotor (KBm) diatas Rp1 Milyar dengan target 1.353 KBm, telah tersampaikan 1.143 KBm, dan sudah melakukan pembayaran adalah 624 KBm dengan realisasi pembayaran Rp29.682.212.610,00
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi PKB pada tahap I (Juli s.d Agustus) dan tahap II (November s.d Desember)

- c) Razia gabungan pengesahan STNK bersama dengan Dirlantas Polda sebanyak 40 kali di tahun 2018. Tercatat 1.071 KBm langsung membayar ke Samsat dan lokasi razia gabungan dengan realisasi penerimaan PKB dari razia gabungan Rp2.002.579.600,00
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2018 Razia Bersama atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya
- e) Penyampaian surat himbauan, teguran dan panggilan secara atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor
Periode 1 Januari 2014 S/D 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1399	226.725.600	3423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1958	82.737.400	2245	203.587.000	1026	170.825.000	3957	338.462.800	10092	917.437.900
9	SEPEDA MOTOR	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.992.000	15.605	73.715.212.600
TOTAL		349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.350.625.602.850,00 atau 104,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp323.385.315,00 atau 6,43% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.027.240.287.850,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan BBN-KB dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BBN-KB :

- a) *Update* data KBm atas Kendaraan Baru dan mutasi KBm antar daerah;
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi BBN-KB pada tahap I (Juli s.d Agustus) dan tahap II (November s.d Desember);
- c) Penagihan *door to door* untuk KBm diatas Rp1 Milyar menambah penerimaan BBN-KB dari 16 KBm dengan realisasi penerimaan Rp380.450.500,00;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2018.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.244.763.661.522,00 atau 103,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp91.531.861.720,00 atau 7,94% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.153.231.799.802,00.

Faktor Pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan adalah :

- a) Ektensifikasi melalui pendataan Objek Pajak (OP) baru;
- b) Himbauan perbaikan setoran masa.
- c) Koordinasi intensif dengan penyedia PBB-KB.

4. Pajak Pemanfaatan Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan

f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp106.497.711.318,00 atau 73,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp145.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.818.167.545,00 atau 10,16% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp96.679.543.773,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Adanya keterbatasan petugas pencatat meter air;
- b) Masih terdapat meter air yang tidak berfungsi/belum terpasang;
- c) Adanya pemanfaatan air tanah ilegal yang tidak terdeteksi.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Melakukan survey, monitoring dan pemeriksaan oleh Tim Terpadu;
- b) Ekstensifikasi melalui kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.745.809.882.074,00 atau 102,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp186.292.964.032,00 atau 11,95% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.559.516.918.042,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hotel :

- a) Adanya peningkatan hunian kamar hotel bintang yang sebelumnya 63,25% pada tahun 2017 menjadi 66,74% pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 3,5% berdasarkan data BPS. Hal ini didorong karena adanya acara Asian Games 2018 dimana Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggaraan acara tersebut;
- b) Pertumbuhan objek Pajak Hotel Tahun 2018 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017, khususnya jenis Rumah Kost yang meningkat dari sebelumnya sebanyak 240 ditahun 2017 meningkat menjadi 589 rumah kost pada tahun 2018 ;
- c) Pelaksanaan Intruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kegiatan Pendataan, Analisis Setoran Masa dan Pemeriksaan;
- d) Penegakan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara :
 - 1) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak Hotel sebanyak 108 obyek dengan realisasi Rp3.758.237.627;
 - 2) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Paksa, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 13 obyek dengan realisasi Rp 1.747.707.570,00.

6. Pajak Restoran

Pajak Retoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp3.154.969.088.300,00 atau 100,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp402.900.972.764,00 atau 14,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.752.068.115.536,00

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Restoran :

- a) Adanya pertumbuhan objek Pajak Restoran yang cukup signifikan, dimana sebelumnya 1.418 OP pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.779 OP pada tahun 2018;
- b) Pelaksanaan Intruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kegiatan Pendataan, Analisis Setoran Masa dan Pemeriksaan;
- c) Penegakan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara :
 - 1) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak Restoran 256 obyek dengan realisasi Rp9.413.819.226,00;

- 2) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 87 obyek dengan realisasi Rp5.616.633.567,00.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif

Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp833.684.983.302,00 atau 92,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp78.305.468.323,00 atau 10,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp755.379.514.979,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2018 belum optimal, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Adanya penutupan beberapa objek pajak hiburan malam yang memiliki omzet cukup besar seperti Alexis, Diskotik Exotic, Sense Karaoke, Old City;
- b) Adanya razia pemakaian/konsumsi obat terlarang yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta di tempat hiburan malam, sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan penerimaan pajak dari objek pajak hiburan malam.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2018 dilakukan *law enforcement* melalui kegiatan penagihan dengan cara:

- a) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak 46 obyek pajak hiburan dengan realisasi Rp1.077.704.881,00;
- b) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 89 obyek dengan realisasi Rp1.712.360.216,00.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan

- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.014.794.778.877,00 atau 88,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp50.141.035.398,00 atau 5,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp964.653.743.479,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2018 antara lain:

- a) Ketidakpastian penerbitan perijinan reklame di Dinas PM-PTSP;
- b) Belum updatenya data Reklame Belum Daftar Ulang (BDU) sehingga data tidak akurat; dan
- c) Revisi Pergub 148 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame belum selesai sehingga menghambat perijinan.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Pemungutan Reklame tidak berijin dengan memungut pajak reklame atas periode yang sudah tayang (*Back date*); dan
- b) Pemungutan atas Reklame BDU.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp787.107.000.016,00 atau 95,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp825.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.637.993.960,00 atau 4,33% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp754.469.006.056,00.

Dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum optimal, hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk mendapatkan data jumlah pelanggan sebagai salah satu dokumen pelengkap pelaporan SPTPD dan sebagai sarana perhitungan potensi riil.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan PT. PLN Persero bersama Korsupgah KPK RI; dan
- b) Melakukan himbauan perbaikan setoran masa.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp512.750.980.634,00 atau 93,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.917.519.711,00 atau 5,76% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp484.833.460.923,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Parkir antara lain sebagai berikut :

- a) Perhitungan Target Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018 telah memperhitungkan usulan kenaikan tarif parkir pada Raperda, namun sampai dengan akhir tahun 2018 Raperda tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Pertumbuhan objek Pajak Parkir Tahun 2018 tidak optimum, dari sebelumnya 106 OP Parkir di tahun 2017 hanya menjadi 114 OP Parkir di tahun 2018 dimana pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya Wajib Pajak Baru melainkan pergantian Nama Manajemen atau perubahan nama pengelola parkir.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2018 dengan cara meningkatkan *law enforcement* pada kegiatan penagihan dengan cara :

- a) Penempelan plang, segel dan stiker kepada para penunggak Pajak 14 obyek pajak parkir dengan realisasi Rp251.403.760,00; dan
- b) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Proses Surat Pajak, Supervisi KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat pemberitahuan penagihan dengan surat paksa kepada 4 obyek dengan realisasi Rp620.000.000,00.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama

orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.708.906.353.021,00 atau 78,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.048.518.440.454,00 atau

30,32% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.757.424.793.475,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan BPHTB tahun 2018 antara lain:

- a) Masih banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Belum adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Pengenaan BPHTB Terhadap PPJB dan Pertelaan;
- c) Adanya penghindaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- d) Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya); dan
- e) Penurunan pembelian/pembangunan apartemen sebagai imbas dari Peraturan Pemerintah Pusat terkait dengan PPnBM.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a) Melakukan himbauan percepatan untuk proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) bagi perusahaan pengembang bangunan *strata title*; dan
- b) Melakukan himbauan percepatan pembayaran BPHTB yang telah dipungut oleh perusahaan pengembang bangunan *strata title*.

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp632.293.885.585,00 atau 113,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp555.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49.559.291.971,00 atau 8,50% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2017 sebesar Rp582.734.593.614,00.

Faktor Pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Rokok melalui optimalisasi penerimaan melalui koordinasi dengan DJPK dan BPJS Kesehatan.

13. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

- f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.893.076.195.170,00 atau 104,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.286.424.205.097,00 atau 16,91% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.606.651.990.073,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) penyampaian Surat Himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan perlunasan atau pembayaran tunggakan PBB;
- b) Pemasangan Plang/Stiker terhadap penunggak pajak; dan
- c) Program Pembebasan Sanksi Administrasi yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Nopember s.d 31 Desember 2018.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 semula ditargetkan Rp689.900.500.000,00 setelah perubahan target tersebut turun sebesar Rp18.410.500.000,00 atau 2,67% menjadi sebesar Rp671.490.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp578.555.603.994,00 atau 86,16%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp92.934.396.006,00 atau 13,84%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp624.137.343.759,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp45.581.739.765,00 atau 7,30%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tergambar pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	102.114.000.000	123.576.306.288	121,02	120.603.321.070
II	Retribusi Jasa Usaha	150.626.000.000	153.805.132.448	102,11	162.998.706.234
III	Retribusi Perizinan Tertentu	418.750.000.000	301.174.165.258	71,92	340.535.316.455
Jumlah		671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	624.137.343.759

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 semula ditetapkan sebesar Rp107.832.000.000,00 turun menjadi sebesar Rp102.114.000.000,00 atau 5,30% pada perubahan anggaran Tahun 2018. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp123.576.306.288,00 atau 121,02%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp21.462.306.288,00 atau 21,02%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat Rp120.603.321.070,00 terlihat penerimaan

Retribusi Jasa Umum di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.972.985.218,00 atau 2,47%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	42.150.000.000	44.098.319.220	104,62	39.219.802.900
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	900.000.000	372.975.000	41,44	484.896.342
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.500.000.000	12.271.026.000	163,61	13.850.573.500
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	185.000.000	182.125.000	98,45	150.000.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.549.000.000	1.413.335.279	91,24	1.059.131.001
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.850.000.000	44.423.444.506	165,45	45.976.074.642
7	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	16.630.000.000	13.085.346.533	78,69	12.226.707.733
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	242.452.750	~	168.506.952
9	Retribusi Pelayanan Pasar	6.350.000.000	7.487.282.000	117,91	7.467.628.000
Jumlah		102.114.000.000	123.576.306.288	121,02	120.603.321.070

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu,

perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp42.150.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp44.098.319.220,00 atau 104,62% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target sebesar Rp1.948.319.220,00 atau 4,62%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp39.219.802.900,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.878.516.320,00 atau 12,44%.

Jika dilihat dari target Pendapatan dengan penerimaan Tahun Anggaran 2018, melebihi target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya :

- 1) Pemilik kendaraan wajib uji mulai sadar untuk taat/tertib melakukan uji KIR dengan adanya sosialisasi dari asosiasi angkutan;
- 2) Adanya *booking online* untuk pendaftaran KIR dan adanya sistem *Drive Thru* membuat durasi pengujian menjadi lebih singkat sehingga mendorong pemilik kendaraan melakukan uji KIR; dan
- 3) Pertumbuhan Kendaraan Baru di Provinsi DKI Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp372.975.000,00 atau 41,44% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp527.025.000,00 atau 58,56%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp484.896.342,00, maka penerimaan tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp111.921.342,00 atau 23,08%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp12.271.026.000,00 atau 163,61% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target sebesar Rp4.771.026.000,00 atau 63,61%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.850.573.500,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.579.547.500,00 atau 11,40%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;

- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp185.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp182.125.000,00 atau 98,45% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak mencapai target sebesar Rp2.875.000,00 atau 1,55%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp150.000.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp32.125.000,00 atau 21,42%.

Realisasi tersebut di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana

yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.549.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.413.335.279,00 atau 91,24% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp135.664.721,00 atau 8,76%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.059.131.001,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp354.204.278,00 atau 33,44%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain karena permohonan rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp26.850.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp44.423.444.506,00 atau 165,45% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp17.573.444.506,00 atau 65,45%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium baru yang mengajukan permohonan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp45.976.074.642,00, maka penerimaan tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp1.552.630.136,00 atau 3,38%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp16.630.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp13.085.346.533,00 atau 78,69% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.544.653.467,00 atau 21,31%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.226.707.733,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp858.638.800,00 atau 7,02%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang

sebagian besar diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis, Retribusi Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana, dan Lain – lain Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang baru dibentuk.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2018 tidak targetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp242.452.750,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp168.506.952,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp73.945.798,00 atau 43,88%.

i. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp6.350.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai Rp7.487.282.000,00 atau 117,91% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melebihi target sebesar Rp1.137.282.000,00 atau 17,91%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.467.628.000,00 maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp19.654.000,00 atau 0,26%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp150.626.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp153.805.132.448,00 atau 102,11%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp3.179.132.448,00 atau 2,11%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp162.998.706.234,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.193.573.786,00 atau 5,64%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.926.000.000	111.982.409.116	100,95	121.574.596.759
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.375.000.000	28.668.356.906	108,70	27.266.687.388
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	570.000.000	664.602.150	116,60	762.672.500
4	Retribusi Potong Hewan	0	61.875	-	1.200.428.100
5	Retribusi Jasa Terminal	6.355.000.000	6.306.187.901	99,23	5.752.962.487
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.350.000.000	1.495.418.500	110,77	1.224.097.000
7	Retribusi Penyeberangan di Air	500.000.000	222.170.000	44,43	362.900.000
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.550.000.000	4.465.926.000	98,15	4.854.362.000
	Jumlah	150.626.000.000	153.805.132.448	102,11	162.998.706.234

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp110.926.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp111.982.409.116,00 atau 100,95% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.056.409.116,00 atau 0,95%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp121.574.596.759,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.592.187.643,00 atau 7,89%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;
- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta

berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp26.375.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp28.668.356.906,00 atau 108,70% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.293.356.906,00 atau 8,70%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observarium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp27.266.687.388,00 maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.401.669.518,00 atau 5,14%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti *Google/ Street view* serta bekerjasama dengan media komunitas

pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp570.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp664.602.150,00 atau 116,60% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp94.602.150,00 atau 16,60%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp762.672.500,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp98.070.350,00 atau 12,86%.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong/Unggas dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan, karena per 1 September 2017 rumah potong hewan telah menjadi BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Realisasi retribusi potong hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp61.875,00 yang merupakan pelunasan Piutang Tahun 2017.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.200.428.100,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.200.366.225,00 atau 99,99%.

e. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp6.355.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp6.306.187.901,00 atau 99,23% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp48.812.099,00 atau sebesar 0,77%.

Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang mana tarif retribusi mengalami penurunan;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan

retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.

Terdapat beberapa Kios maupun Locket yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp5.752.962.487,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp553.225.414,00 atau 9,62%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal;
dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.495.418.500,00 atau 110,77% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp145.418.500,00 atau 10,77%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.224.097.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp271.321.500,00 atau 22,17%.

Kenaikan realisasi retribusi ini disebabkan meningkatnya kuantitas kapal yang berlabuh dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dikelola, dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan.

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp222.170.000,00 atau 44,43% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp277.830.000,00 atau sebesar 55,57%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp362.900.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp140.730.000,00 atau 38,78%.

Kendala Yang dihadapi oleh UP APK Dinas Perhubungan dalam mencapai target antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak semua kapal siap untuk berlayar karena kapal dalam perawatan/ masih dalam pengurusan surat-surat kapal; dan
- 2) Keadaan cuaca yang buruk mengakibatkan kapal tidak dapat berlayar.

h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.550.000.000,00 dalam anggaran -perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp4.465.926.000,00 atau 98,15% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp84.074.000,00 atau sebesar 1,85%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp4.854.362.000,00, maka penerimaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp388.436.000,00 atau 8,00%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp418.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp301.174.165.258,00 atau 71,92%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp117.575.834.742,00 atau 28,08%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp340.535.316.455,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp39.361.151.197,00 atau 11,56 %.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Trayek	1.750.000.000	667.025.000	38,12	665.574.000
2	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	12.947.866.648
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000.000	227.605.405.163	65,03	260.577.585.414
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	65.000.000.000	70.714.235.095	108,79	64.584.290.393
5	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.000.000.000	2.187.500.000	109,38	1.760.000.000
	Jumlah	418.750.000.000	301.174.165.258	71,92	340.535.316.455

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp667.025.000,00 atau 38,12%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp1.082.975.000,00 atau 61,88%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp665.574.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp1.451.000,00 atau 0,22%.

b. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp12.947.866.648,00, terlihat mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar Rp12.947.866.648,00 atau 100%.

Penurunan Realisasi atas Retribusi Izin Gangguan dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal tersebut mulai berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas No.16/SE/2017 Tentang Penyesuaian Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang gangguan yang berlaku mulai 2 Mei 2017.

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp350.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp227.605.405.163,00 atau 65,03%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp122.394.594.837,00 atau 34,97%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp260.577.585.414,00, maka retribusi ini di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp32.972.180.251,00 atau 12,65%.

d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp65.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp70.714.235.095,00 atau 108,79%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp5.714.235.095,00 atau 8,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp64.584.290.393,00, retribusi ini di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6.129.944.702,00 atau 9,49%.

e. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp2.187.500.000,00 atau 109,38%, dengan

demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp187.500.000,00 atau 9,38%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.760.000.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp427.500.000,00 atau 24,29%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018, ditetapkan sebesar Rp 592.740.014.202,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp592.956.276.353,00 atau 100,04%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut melebihi target sebesar Rp216.262.151,00 atau 0,04%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp489.478.684.673,00, terlihat pendapatan di tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp103.477.591.680,00 atau 21,14%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	102.885.398.299,00	103.103.721.171,00	100,21	115.812.977.501,00
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	489.854.615.903,00	489.852.555.182,00	100,00	373.665.707.172,00
Jumlah		592.740.014.202,00	592.956.276.353,00	100,04	489.478.684.673,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp102.885.398.299,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp103.103.721.171,00 atau 100,21%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp115.812.977.501,00 maka terlihat pendapatan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp12.709.256.330,00 atau 10,97%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PDAM Jaya	0,00	0,00	-	22.810.000.000,00
2	PD Dharma Jaya	2.033.671.651,00	2.251.994.563,00	110,74	250.000.000,00
3	PD Pasar Jaya	37.407.235.648,00	37.407.235.608,00	100,00	36.386.532.925,00
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	47.774.672.040,00	47.774.672.040,00	100,00	42.038.356.242,00
5	PD PAL Jaya	15.669.818.960,00	15.669.818.960,00	100,00	14.328.088.334,00
Jumlah		102.885.398.299,00	103.103.721.171,00	100,21	115.812.977.501,00

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp22.810.000.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat terdapat target bagian laba PDAM Jaya dikarenakan PDAM Jaya dibebaskan dari kewajiban

menyetorkan bagian laba bersihnya sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta (PAM Jaya) Tahun Buku 2017.

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp489.854.615.903,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 Rp489.852.555.182,00 atau 99,9996%, dengan demikian penyertaan modal tidak mencapai target sebesar Rp2.060.721,00 atau 0,0004%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp373.665.707.172,00, terlihat pendapatan di tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp116.186.848.011,00 atau 31,09%.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2018 dapat di lihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10

Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT. Pembangunan Jaya	30.400.000.000,00	30.400.000.000,00	100,000%	28.800.000.000,00
2	PT. Food Station Cipinang	5.032.786.787,00	5.032.786.787,00	100,000%	3.704.354.140,00
3	PT. J.I.E.P	12.884.249.518,00	12.884.249.518,00	100,000%	11.010.621.272,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
4	PT. Delta Jakarta, Tbk	54.652.182.000,00	54.652.182.000,00	100,000%	37.836.126.000,00
5	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	59.903.999.948,00	59.903.999.948,00	100,000%	35.711.999.969,00
6	PT. Kawasan Berikat Nusantara	10.947.297.020,00	10.947.297.020,00	100,000%	7.426.454.446,00
7	PT Cemani Toka	1.821.164.800,00	1.821.164.800,00	100,000%	759.828.160,00
8	PT. Asuransi Bangun Askrida	4.193.318.807,00	4.193.318.807,00	100,000%	4.572.152.980,00
9	PT. Jakarta Propertindo	95.151.815.356,00	95.149.754.635,00	99,998%	49.167.537.185,00
10	PT. Bank DKI Jakarta	213.605.061.635,00	213.605.061.635,00	100,000%	193.488.397.170,00
11	PT. Jakarta Tourinsindo	0,00	0,00	-	0,00
12	PT. Jakarta International Expo	0,00	0,00	-	525.000.000,00
13	PT. Transportasi Jakarta	0,00	0,00	-	0,00
14	PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta	1.262.740.032,00	1.262.740.032,00	100,000%	663.235.850,00
Jumlah		489.854.615.903,00	489.852.555.182,00	99,999%	373.665.707.172,00

Realisasi pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT Jakarta International Expo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp525.000.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat terdapat target bagian laba PT Jakarta International Expo dikarenakan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017 PT Jakarta International Expo baru selesai di bulan April 2019, sehingga belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian laba perusahaan.

Di Tahun 2018 tidak dianggarkan pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT Jakarta Tourinsindo dikarenakan PT Jakarta Tourinsindo mengalami kerugian. Sedangkan alasan tidak dianggarkan pendapatan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) pada PT. Transportasi Jakarta di Tahun 2018 adalah sampai dengan saat ini Laporan Keuangan PT. Transportasi Jakarta belum selesai di audit karena belum selesainya inbreng aset PT. Transportasi Jakarta sehingga

belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian laba perusahaan.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.960.847.844.642,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp4.616.712.395.152,00 atau 93,06%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp344.135.449.490,00 atau 6,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp6.287.090.513.135,00 terlihat pendapatan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.670.378.117.983,00 atau 26,57%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.11

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	197.502.000.000	25.299.005.844	12,81	193.544.953.251
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	450.000.000.000	349.854.873.045	77,75	729.232.885.826
3	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	45.010.000.000	51.257.146.349	113,88	49.252.464.697
4	Hasil Lelang Titik Reklame	25.000.000.000	-	-	-
5	Klaim Asuransi Aset	1.000.000.000	50.000.000	5,00	343.291.403
6	Jasa Giro	160.000.000.000	169.225.058.708	105,77	179.499.507.085

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
7	Pendapatan Bunga	700.000.000.000	809.935.247.644	115,71	807.272.253.870
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	107.700.000.000	41.233.324.292	38,29	35.344.555.982
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.300.000.000	1.652.059.248	9,03	1.396.711.354
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.570.000.000	4.869.882.433	87,43	5.092.807.514
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	2.487.520.434.736	2.480.030.816.969	99,70	3.097.529.693.068
12	Hasil Tagih Eks BPPN	-	-	-	424.465.747
13	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	4.550.000.000	11.090.689.414	243,75	7.669.362.715
14	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	75.000.000.000	27.963.526.014	37,28	22.152.601.925
15	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	4.459.946.585	4.070.844.087	91,28	50.285.281.442
16	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	12.500.000.000	11.271.572.127	90,17	10.477.339.105
17	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	110.000.000.000	54.904.367.739	49,91	438.499.976
18	Pendapatan Lain-lain	-	34.975.276.097	-	419.945.454.898
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.076.000.000	53.102.581.874	527,02	20.972.361.672
20	Pendapatan Sanksi Pajak	545.214.463.321	363.654.759.897	66,70	406.854.841.178
21	Pendapatan Denda Retribusi	745.000.000	19.697.324.067	2.643,94	212.841.949.240
22	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	700.000.000	102.574.039.306	14.653,43	36.519.231.186
Jumlah		4.960.847.844.642	4.616.712.395.152	93,06	6.287.090.513.134

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp197.502.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp25.299.005.844,00 atau 12,81%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp172.202.994.156,00 atau 87,19%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran

2017 yang tercatat sebesar Rp193.544.953.251,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp168.245.947.407,00 atau 89,63%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2018 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	186.392.000.000	9.700.000.000	5,20	177.692.000.000
2	Penjualan Brandgang	2.960.000.000	2.076.000.000	70,14	-
3	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	139.955.700	279,91	309.812.400
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	50.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.000.000.000	9.870.046.275	164,50	9.618.848.986
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000	12.062.060	24,12	-
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	2.000.000.000	3.500.941.809	175,05	5.924.291.865
Jumlah		197.502.000.000	25.299.005.844	12,81	193.544.953.251

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi atas Rekomendasi HGB diatas HPL Tanah Eks Kota Praja merupakan rekomendasi atas Perolehan/Peralihan/ Penjaminan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan dan Permohonan Hak diatas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja. Sesuai Pergub Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pergub Nomor 239 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu hak atas bidang tanah hak pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pergub ini terdapat penurunan tarif, sehingga pemilik lahan/tanah tersebut membayar dengan kesadaran karena saat ini tarif perhitungan lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 juga termasuk hasil penerimaan atas Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/ Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002, kewajiban Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp450.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp349.854.873.045,00 atau 77,75%, yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL sebesar Rp156.607.419.381,00 dan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah sebesar Rp193.247.453.664,00. Dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp100.145.126.955,00 atau 22,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp729.232.885.826,00. Penerimaan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp379.378.021.781,00 atau 52,02%.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp45.010.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp51.257.146.349,00 atau 113,88%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp51.257.146.349,00 di antaranya yaitu:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp35.719.784.555,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp15.526.861.794,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp10.500.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2017 sebesar Rp49.252.464.697,00. Realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.004.681.652,00 atau 4,07%.

Kenaikan realisasi atas Hasil Sewa Aset Daerah dikarenakan penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang menyatakan penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan lelang, mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama dalam hal pembatasan ukuran luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 atau 5,00%.

Apabila realisasi Klaim Asuransi Aset tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2017 sebesar Rp343.291.403,00. Realisasi di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp293.291.403,00 atau 85,44%.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp169.225.058.708,00 atau 105,77%, dengan demikian realisasi Jasa Giro melebihi target sebesar Rp9.225.058.708,00 atau 5,77%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp169.225.058.708,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp166.650.776.753,00;
- 2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp2.574.281.955,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp179.499.507.085,00, terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.274.448.377,00 atau 5,72%.

7. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp700.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp809.935.247.644,00 atau 115,71%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp109.935.247.644,00 atau 15,71%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp807.272.253.870,00, terlihat realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.662.993.773,00 atau 0,33%.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.41/1996 Tanggal 15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan /pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penerima Pendapatan Bunga Deposito, termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Pada Tahun 2017, PT Bank DKI selaku Bank Penyimpan Dana Deposito Pemprov DKI Jakarta melakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar Rp1.139.726.016,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Atas kesalahan tersebut PT Bank DKI telah mengembalikan penerimaan tersebut ke Kas Daerah dan meminta proses restitusi/pengembalian tersebut kepada Direktorat Djendral Pajak.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp76.817.812.254,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp107.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.233.324.292,00 atau 38,29%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp66.466.675.708,00 atau 61,71%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp1.358.124.005,00;
- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp16.799.080,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp39.858.401.207,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp6.519.936.248,00; dan
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp33.338.464.959,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp35.344.555.982,00, maka di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.888.768.310,00 atau 16,66%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp18.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.652.059.248,00 atau 9,03%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp16.647.940.752,00 atau 90,97%.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.396.711.354,00, maka di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp255.347.894,00 atau 18,28%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp5.570.000.000,00. Realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.869.882.433,00 atau 87,43%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp4.869.882.433,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp130.254.150,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp4.546.419.925,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp193.208.358,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp5.092.807.514,00 maka di Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp222.925.081,00 atau 4,38%.

11. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Salah satu dampak perubahan ini terlihat dalam kodefikasi dan klasifikasi akun Pendapatan BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2016 akun Pendapatan BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan BLUD sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat BLUD yang baru dibentuk yang merupakan bagian dan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu BLUD RSUD Kebayoran Baru, BLUD RSUD Jati Padang dan BLUD RSU Adhyaksa.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp2.487.520.434.736,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.480.030.816.969,00 atau 99,70%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp7.489.617.767,00 atau 0,30%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp3.097.529.693.068,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp617.498.876.100,00 atau 19,94%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 tersaji pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.428.649.694.240	2.468.623.873.944	101,65	3.032.024.447.415
2	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	41.679.164.976	11.406.898.025	27,37	46.001.873.250
3	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	17.191.575.520	45.000	0,00	19.503.372.403
Jumlah		2.487.520.434.736	2.480.030.816.969	99,70	3.097.529.693.068

Pada realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah tidak termasuk komponen Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2018 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00.

12. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2018 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018. Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp424.465.747,00.

13. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2018 ditargetkan

Rp4.550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.090.689.414,00 atau 243,75%.

Realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun sebesar Rp11.090.689.414,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Pembayaran air rusun sewa sebesar Rp6.620.722.253,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pembayaran Listrik Rusun Sewa sebesar Rp4.469.967.161,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI.

Apabila realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp7.669.362.715,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.421.326.699,00 atau 44,61%.

14. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp27.963.526.014,00 atau 37,28%, dengan demikian realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp47.036.473.986,00 atau 67,72%.

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut diperoleh dari:

- a. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Aset Pemda sebesar Rp332.162.911,00;

b. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp27.631.363.103,00.

Apabila realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp22.152.601.925,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.810.924.089,00 atau 26,23%.

15. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp4.459.946.585,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.070.844.087,00 atau 91,28%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp389.102.498,00 atau 8,72%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp50.285.281.442,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp46.214.437.355,00 atau 91,90%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	321.000.000	321.000.000	100,00	321.000.000
2	PT Duta Pertiwi	290.400.000	290.400.000	100,00	290.400.000
3	PT Kempas Indah Indonesia	170.000.000	-	-	-
4	PT Bakrie Investindo	180.000.000	180.000.000	100,00	180.000.000
5	PT Dharma Alumas Sakti	219.817.226	219.817.226	100,00	219.817.226
6	PT Jaya Real Propertindo	165.000.000	165.000.000	100,00	154.000.000
7	PT Duta Masa Nusa	500.000.000	-	-	1.000.000.000
8	PT Perwita Margasakti	82.000.000	82.000.000	100,00	82.000.000
9	PT Wahana Cipta Sejahtera	-	155.000.000	-	-
10	PT Pesona Marga Mandiri	326.095.000	326.095.000	100,00	296.450.000
11	PT Metropolitan Kencana Tbk.	893.000.000	893.000.000	100,00	850.000.000
12	PT Gama Investa Lestari	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000
13	PT Fajar Setia Mandiri	85.000.000	270.000.000	317,65	185.000.000
14	Yayasan Patmos	107.179.440	107.179.441	100,00	97.435.855
15	Yayasan Katholik Mardi Luhur	36.602.500	-	-	-
16	Yayasan Tiara Kasih	22.500.000	-	-	22.500.000
17	Yayasan Tunas Muda	81.367.258	81.367.259	100,00	170.443.760
18	Yayasan Pelatihan E dan P	103.568.136	103.568.136	100,00	94.152.851
19	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	161.417.025	161.417.025	100,00	146.742.750
20	PT Grand Indonesia	655.000.000	655.000.000	100,00	555.000.000
21	Hasil Kerja sama Aset Daerah Lain-lain	-	-	-	45.560.339.000
Jumlah		4.459.946.585	4.070.844.087	91,28	50.285.281.442

16. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.271.572.127,00 atau 90,17%, dengan demikian realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah di tahun 2018 tidak mencapai target sebesar Rp1.228.427.873,00 atau 9,83%.

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

Apabila realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah tersebut dibandingkan dengan realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp10.477.339.105,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp794.233.022,00 atau 7,58%.

17. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp110.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp54.904.367.739,00 atau 49,91%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target sebesar Rp55.095.632.261,00 atau 50,09%.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut diperoleh dari:

- a. Pelanggaran Ketertiban sebesar Rp150.400.000,00;

- b. Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp54.643.767.739,00; dan
- c. Pelanggaran atas Penggunaan Alat Meter Air sebesar Rp110.200.000,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp438.499.976,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp54.465.867.763,00 atau 12.420,95%.

Kenaikan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Denda Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan karena adanya optimalisasi sinergisitas pengawasan dengan instansi terkait.

18. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp34.975.276.097,00. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Apabila realisasi Pendapatan Lain-Lain tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp419.945.454.898,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp384.970.178.801,00 atau 91,67%.

19. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp53.102.581.874,00 atau 527,02%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melebihi target sebesar Rp43.026.581.874,00 atau 427,02%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp20.972.361.672,00, terlihat realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp32.130.220.202,00 atau 153,20%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada tabel 5.15.

Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	515.358.117	1.030,72	8.319.611.686
2	Bidang Kesehatan	10.000.000	10.947.710.265	109.477,10	1.383.934.159
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	40.159.824.995	401,60	10.319.125.619
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	363.169.052	-	239.613.275
5	Bidang Penataan Ruang	15.000.000	355.816.755	2.372,11	19.446.633
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.000.000	34.543.867	3.454,39	121.614.004
7	Bidang Perhubungan	-	433.064.076	-	291.957.270
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	284.042.624	-	270.347.832
9	Bidang Pertanahan	-	9.052.123	-	6.711.194
JUMLAH		10.076.000.000	53.102.581.874	527,02	20.972.361.672

20. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp545.214.463.321,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp363.654.759.897,00 atau 66,70%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp181.559.703.424,00 atau 33,30%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp406.854.841.178,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp43.200.081.281,00 atau 10,62%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp184.112.125.219,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp162.451.064.489,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp21.661.060.730,00.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.803.285.978,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.803.285.978,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp1.634.890.120,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp1.005.507.478,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp629.382.642,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp3.270.427.562,00 yang terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp2.977.265.464,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp224.384.870,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp68.777.228,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp18.394.125.052,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp15.570.555.554,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp1.991.508.429,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp832.061.069,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp10.508.590.685,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp9.788.501.646,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp474.319.509,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp245.769.530,00.
- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp47.053.887.642,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp8.845.749.621,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp38.208.138.021,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp1.268.760.989,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp1.216.636.654,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp46.991.033,00;

- 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp5.133.302,00;
- i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.994.591,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.043.150.226,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp6.407.880.535,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp279.386.457,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp355.883.234,00;
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp88.563.521.833,00 dan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp127.165.984.838,00.

21. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp745.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp19.697.324.067,00 atau 2.643,94%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2018 melebihi target sebesar Rp18.952.324.067,00 atau 2.543,94%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp864.776.771,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.265.813.815,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp16.566.733.481,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp212.841.949.240,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp193.144.625.173,00 atau 90,75%.

22. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp102.574.039.306,00 atau 14.653,43%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2018 melebihi target sebesar Rp101.874.039.306,00 atau 14.553,43%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp1.649.864.552,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp1.522.996.488,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp126.868.064,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp100.695.087.251,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp100.685.712.101,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp9.375.150,00;
- c. Denda Keterlambatan Rusun Sewa Beli sebesar Rp229.087.503,00.

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran

2017 yang tercatat sebesar Rp36.519.231.186,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp66.054.808.120,00 atau 180,88%.

Saldo Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp43.327.136.602.811,00 belum termasuk:

1. pendapatan yang belum divalidasi pada rekening penampungan penerimaan daerah sebesar Rp35.340.343.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	10816170093	9.873.040,00	Escrow SIMPAD Balaikota
2.	11116080311	1.376.976.641,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Pusat
3.	20116127367	22.766.000,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Utara
4.	40416009981	119.201.000,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Selatan
5.	50316023265	42.944.360,00	Escrow SIMPAD Wilayah Jakarta Timur
6.	10816170948	22.998.018.850,00	Escrow Pajak Daerah
7.	10816170956	6.244.371.299,00	Escrow Pajak Daerah
8.	11092213239	175.000,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi
9.	11192213237	10.000,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi
10.	90092219672	19.965.582,00	Simpanan Sementara (SS) PBB via ATM
11.	30016044818	1.000.000,00	Simpanan Sementara (SS) UP Museum Seni Dinas Pariwisata penampungan saldo Top Up Jack Card
12.	50316002004	55.319.960,00	Simpanan Sementara (SS) PPKB Provinsi DKI Jakarta penampungan Biaya KIR
13.	12216025927	12.072.000,00	Simpanan Sementara (SS) Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan penampungan Autodebit Pembayaran Sewa Kios
14.	50316023265	42.944.360,00	Simpanan Sementara (SS) Retribusi SIMPAD Jakarta Timur
15.	14092213672	4.728.990,00	S.S. PKB SAMSAT UTARA
16.	50592213661	58.871.800,00	S.S. PKB SAMSAT TIMUR / POLDA
17.	14092219891	288.957.500,00	SS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
18.	1040022062017	969.799.449,00	SS Penampungan Pajak – Bank Mandiri
19.	-	2.954.689.508,00	SS Penampungan Pajak – PT POS Indonesia
20.	001901001755302	7.535.678,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
21.	6000686867	101.654.211,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
22.	10816170948	7.703.945,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
23.	800034831300	764.396,00	Rek. SS Penerimaan Pajak
	Jumlah	35.340.343.569,00	

2. Penerimaan pendapatan atas Taman Hiburan Lokasari (ex. BP THR Lokasari) yang dikelola oleh BPAD per 31 Desember 2018 senilai Rp10.053.539.027,70 yang ada di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 115-00-0706155-1 atas nama Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp21.401.857.864.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp17.855.177.072.924,00 atau 83,43%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
1.1	Bagi Hasil Pajak	18.105.337.484.000	15.026.197.590.222	82,99	16.605.608.520.001
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	59.746.462.000	64.657.549.974	108,22	118.364.374.359
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	18.045.591.022.000	14.961.540.040.248	82,91	16.487.244.145.642
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	159.891.125.000	183.375.491.488	114,69	241.880.930.262
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	115.992.480
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	5.748.409
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	-	-	7.819.551
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	942.932.000	701.234.520	74,37	525.422.890
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	90.836.894.000	130.238.555.574	143,38	120.622.764.037
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	68.111.299.000	52.435.701.394	76,99	120.603.182.895
1.3	Dana Alokasi Khusus	3.136.629.255.000	2.645.603.991.214	84,35	2.121.801.939.666

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp18.105.337.484.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp15.026.197.590.222,00 atau 82,99%, dengan demikian tahun 2018 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak melampaui target sebesar Rp3.079.139.893.778,00 atau 17,01%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2017 yang tercatat

Rp16.605.608.520.001,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2018 turun sebesar Rp1.579.410.929.779,00 atau 9,51%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp59.746.462.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai sebesar Rp64.657.549.974,00 atau 108,22% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp59.425.408.741,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp1.996.883.263,00; dan
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp3.235.257.970,00.

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi melebihi target sebesar Rp4.911.087.974,00 atau 8,22%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp118.364.374.359,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2018 turun sebesar Rp53.706.824.385,00 atau 45,37%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp18.045.591.022.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp14.961.540.040.248,00 atau 82,91%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp13.823.072.512.712,00; dan

- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.138.467.527.536,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tidak mencapai target sebesar Rp3.084.050.981.752,00 atau 17,09%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp16.487.244.145.642,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2018 turun sebesar Rp1.525.704.105.394,00 atau 9,25%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan;
- 3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan; dan
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp159.891.125.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp183.375.491.488,00 atau 114,69%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp701.234.520,00;

- b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp130.238.555.574,00; dan
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp52.435.701.394,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2018 melampaui target sebesar Rp23.484.366.488,00 atau 14,69%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp241.880.930.262,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2018 turun sebesar Rp58.505.438.774,00 atau 24,19%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima;
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah; dan

- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa perhitungan alokasi dana tahun berjalan memperhitungkan sisa dana di Kas Daerah atas penyaluran dana tahun sebelumnya.

Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2017 Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilakukan berbasis kinerja untuk seluruh bidang Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diukur atas penyerapan dan capaian output. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2018, Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.136.629.255.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00 atau 84,35%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.477.814.720.000,00;
- b. Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp69.800.777.353,00;
- c. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.054.721.532.261,00;
- d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp22.612.918.000,00;
- e. Dana Akreditasi Puskesmas sebesar Rp18.792.000.000,00; dan
- f. Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM sebesar Rp1.862.043.600,00.

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tidak mencapai target sebesar Rp491.025.263.786,00 atau 15,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.121.801.939.666,00 realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2018 naik sebesar Rp523.802.051.548,00 atau 24,69%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp57.996.000.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp53.511.071.898,00 atau 92,27%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.228.000.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp41.283.071.898,00.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp1.953.107.172.148,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp11.650.920.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp1.941.456.252.148,00.

Pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja merupakan kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa

penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga sesuai Perjanjian Hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, maka penerimaan hibah PT Jasa Raharja dianggarkan pada akun Pendapatan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Pendapatan LRA tersebut tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

- a. Pendapatan penerimaan aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)–LO sebesar Rp310.789.170.241,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.3;
- b. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp10.513.889.040.191,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.2; dan
- c. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang sebesar Rp394.437.627.923,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

5.1.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 atau 81,78%, sehingga sisa anggaran di tahun 2018 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp13.683.709.409.056,00 atau 18,22%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp51.066.081.379.887,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi di tahun 2018 sebesar Rp10.344.040.471.270,00 atau 20,26%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 tergambar pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	54.334.845.424.970	46.943.316.200.855	86,40	39.660.198.435.607
1	Belanja Pegawai	23.520.650.861.578	21.852.416.650.509	92,91	20.245.514.324.792
2	Belanja Barang dan Jasa	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
3	Belanja Bunga	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
4	Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
5	Belanja Hibah	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
6	Belanja Bantuan Sosial	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14	3.202.680.640.000
II	Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
1	Belanja Tanah	6.612.669.058.425	5.493.373.929.929	83,07	1.291.846.953.545
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.034.263.620.851	2.503.550.334.498	82,51	1.934.885.465.301
3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.730.610.014.327	3.787.773.213.370	80,07	5.837.362.392.365
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.878.376.382.111	2.195.927.869.729	76,29	1.974.059.648.125
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	182.157.854.496	137.982.740.117	75,75	7.568.774.290
III	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
1	Belanja Tak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
IV	Transfer	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	359.166.525.000	340.952.047.100	94,93	342.488.546.000
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.320.987.200	5.320.986.000	100,00	1.632.592.120
Jumlah (I,II, III, dan IV)		75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Rp54.334.845.424.970,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp46.943.316.200.855,00 atau 86,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.391.529.224.115,00 atau 13,60%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp23.520.650.861.578,00 . Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 atau 92,91%, dengan demikian sisa

anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.668.234.211.069,00 atau 7,09%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp17.002.460.440.052,00, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp1.741.478.420.936,00 dan Belanja Penghasilan Lainnya sebesar Rp1.293.264.750.175,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp20.479.877.008.398,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.919.780.405.273,00 atau 82,62%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.560.096.603.125,00 atau 17,38%. Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp240.698.489.480,00 sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 serta terdapat jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID senilai Rp30.392.455.567,00 yang dicatat sebagai beban barang dibayar di muka kepada PT. Pertamina.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp6.453.360.773.500,00 diantaranya adalah Belanja Jasa

Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp962.761.911.714,00.

- 2) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.355.448.610.158,00 diantaranya Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga sebesar Rp195.664.777.764,00.
- 3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.532.434.300.732,00 diantaranya adalah Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp312.136.540.188,00.
- 4) Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp1.460.085.166.700,00 diantaranya adalah Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp381.075.869.420,00.
- 5) Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp1.452.646.605.546,00 di antaranya adalah Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.416.512.615.000,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp51.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp44.048.569.889,00 atau 86,37% yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp6.951.430.111,00 atau 13,63%.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.210.500.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.640.949.492.360,00 atau 62,72%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.569.550.507.640,00 atau 37,28% dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Bidang Transportasi

Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada PT Trans Jakarta sebesar Rp3.325.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.121.589.296.860 atau 63,81%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.203.410.703.140 atau 36,19% disebabkan oleh program OK-Otrip (Jak Lingko) belum berjalan optimal sehingga alokasi biaya/beban operator yang diperuntukkan bagi masing-masing operator program OK-Otrip (Jak Lingko) belum terealisasi secara optimal.

2) Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp885.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp519.360.195.500 atau 58,65%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp366.139.804.500,00 atau 41,35% disebabkan oleh adanya peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang melakukan pencairan subsidi secara tunai dan bukan dalam bentuk pembelian bahan pangan.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian

Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.889.296.992.994,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.422.151.030.238,00 atau 75,27%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp467.145.962.756,00 atau 24,73%. Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp57.901.207.916,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.079.487.320.994	774.171.120.402	71,72
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.750.000.000	5.250.000.000	44,68
3	Belanja Hibah Dana BOS	703.260.872.000	571.806.960.000	81,31
4	Belanja Hibah BOP PAUD	94.798.800.000	70.922.949.836	74,81
	Jumlah	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27

Realisasi belanja hibah Dana BOS termasuk didalamnya realisasi dana BOS kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2018 yang masih berada di rekening *Escrow* per 31 Desember 2018 senilai Rp26.052.920.000,00 yang terdiri dari :

- 1) Rekening nomor 103-12-00341-8 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SD/SDLB senilai Rp5.730.080.000,00;
- 2) Rekening nomor 103-12-00342-6 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMP/SMPLB senilai Rp2.497.000.000,00;
- 3) Rekening nomor 103-12-00339-6 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMA senilai Rp5.444.040.000,00; dan
- 4) Rekening nomor 103-12-00340-0 a.n Dinas Pendidikan BOS untuk SMK senilai Rp12.381.800.000,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.183.520.562.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.063.970.052.586,00 atau 97,14%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp119.550.509.414,00 atau 2,86 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp100.318.152.586,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp3.898.584.400.000,00 termasuk didalamnya dana KJP Plus Tahun Anggaran 2018 yang masih tersimpan di rekening *escrow* per 31 Desember 2018

sebesar Rp5.890.500.000,00 karena belum didistribusikan ke rekening penerima.

3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp62.946.000.000,00 termasuk didalamnya dana KJMU Tahun Anggaran 2018 yang masih tersimpan di rekening *escrow* per 31 Desember 2018 sebesar Rp54.000.000,00 ke rekening penerima.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.121.500.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp17.438.076.930.210,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.118.608.087.643,00 atau 80,96%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.319.468.842.567,00 atau 19,04%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp6.612.669.058.425,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.493.373.929.929,00 atau 83,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.119.295.128.496,00 atau 16,93%.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD di antaranya adalah :

- 1) Pembebasan Tanah Sarana Umum Taman dan Hutan pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar

Rp1.950.000.000.000,00 terealisasi sebesar 1.945.371.872.000,00 atau 99,76%;

- 2) Pembebasan Tanah Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp1.559.035.642.164,00 terealisasi sebesar Rp1.421.691.460.000,00 atau 91,19%;
- 3) Pembebasan Tanah Jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp799.757.180.380,00 terealisasi sebesar Rp791.467.937.109,00 atau 98,96%;
- 4) Pembebasan Tanah Waduk pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp528.715.217.547,00 terealisasi sebesar Rp456.651.442.585,00 atau 86,37%; dan
- 5) Pembebasan Tanah Saluran Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp853.394.789.334,00 terealisasi sebesar 452.897.131.485,00 atau 53,07%.

Dari realisasi Belanja Modal tanah tersebut terdapat belanja sebesar Rp24.834.000,00 sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Tanah.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp3.034.263.620.851,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 atau 82,51% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp530.713.286.353,00 atau 17,49%. Jenis belanja untuk peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp317.563.069.045,00. Realisasinya adalah sebesar Rp277.490.411.669,00 atau 87,38%, Belanja

Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp76.192.579.200,00, terealisasi sebesar Rp70.302.154.000,00 atau 92,27%;
 - b) Pengadaan Kendaraan Dump Truk pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp37.356.862.690,00 terealisasi sebesar Rp35.090.470.360,00 atau 93,93%;
 - c) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Unit pengelola sampah terpadu dianggarkan sebesar Rp24.200.000.000,00, terealisasi sebesar Rp15.550.059.375,00 atau 64,26%;
 - d) Pengadaan Buldozer pada Unit pengelola sampah terpadu dianggarkan sebesar Rp19.193.625.000,00 terealisasi sebesar Rp17.920.576.300,00 atau 93,37%.; dan
 - e) Pengadaan Shovel Loader pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp16.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.968.000.000,00 atau 71,58%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp847.458.374.153,00. Realisasinya adalah sebesar Rp715.785.282.916,00 atau 84,46%. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Ambulans pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dianggarkan sebesar Rp86.786.392.470,00 terealisasi sebesar Rp82.609.353.283,00 atau 95,19%;
 - b) Pengadaan Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa pada Dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dianggarkan sebesar Rp123.720.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.673.000.000,00 atau 65,21%;

- c) Pengadaan Kendaraan Pick Up pada Satuan polisi pamong praja dianggarkan sebesar Rp88.270.026.075,00 terealisasi sebesar Rp73.752.657.000,00 atau 83,55%;
- d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp76.973.737.002,00 terealisasi sebesar Rp70.268.969.960,00 atau 91,29%; dan
- e) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp41.208.000.000,00 terealisasi sebesar Rp40.848.000.000,00 atau 99,13%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp5.643.338.833,00. Realisasinya adalah sebesar Rp4.750.623.400,00 atau 84,18%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Direksi Keet pada Unit pelaksana kebersihan badan air dianggarkan sebesar Rp2.156.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.156.195.800,00 atau 100%;
- b) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.489.252.875,00 dan terealisasi sebesar Rp1.144.500.000,00 atau 76,85%;
- c) Pengadaan Kontainer pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp662.640.000,00 terealisasi sebesar Rp649.660.000,00 atau 98,04%;
- d) Pengadaan Sepeda pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar

Rp330.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp196.075.000,00 atau 59,42%; dan

e) Pengadaan Direksi Keet pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp196.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.200.000,00 atau 96,52%.

4) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp41.317.500.620,00. Realisasinya adalah sebesar Rp32.786.831.825,00 atau 79,35%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Speed Boat pada Unit pengelola angkutan perairan dan kepelabuhanan dianggarkan sebesar Rp22.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.831.876.000,00 atau 98,74%;

b) Pengadaan Speed Boat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp10.937.035.120,00 terealisasi sebesar Rp9.419.680.600,00 atau 86,13%; dan

c) Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp1.913.565.500,00 terealisasi sebesar Rp1.535.275.225,00 atau 80,23%.

5) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp1.061.920.464,00. Realisasinya adalah sebesar Rp425.720.000,00 atau 40,09 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor pada SKPD sebagai berikut :

a) Pengadaan Perahu Karet pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp237.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.320.000,00 atau 83,89%;

- b) Pengadaan Perahu Rakit pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dianggarkan sebesar Rp147.820.464,00 dan terealisasi sebesar Rp145.000.000,00 atau 98,09%; dan
 - c) Pengadaan Perahu Barang pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dianggarkan sebesar Rp82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.400.000,00 atau 98,67%.
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp31.437.653.693,00. Realisasinya adalah sebesar Rp26.904.663.144,00 atau 85,58%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Mesin Las pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp15.944.775.000,00 terealisasi sebesar Rp14.672.009.000,00 atau 92,02%;
- b) Pengadaan Mesin Praktikum pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp7.581.750.000,00 terealisasi sebesar Rp6.582.620.000,00 atau 86,82%;
- c) Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik di antaranya pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp4.202.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.626.023.500,00 atau 86,29%;
- d) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Pusat pelatihan kerja daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp312.158.000,00 terealisasi sebesar Rp305.897.500,00 atau 97,99%; dan
- e) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Pusat pelatihan kerja pengembangan industri dianggarkan sebesar Rp272.347.400,00 terealisasi sebesar Rp260.949.080,00 atau 95,81%.

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dianggarkan sebesar Rp4.960.109.543,00. Realisasinya adalah sebesar Rp3.826.330.619,00 atau 77,14%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Mesin Bajak pada Pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman dianggarkan sebesar Rp472.879.000,00 dan terealisasi sebesar Rp429.130.000,00 atau 90,75%;

b) Pengadaan Mesin Bajak pada Dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dianggarkan sebesar Rp352.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp326.620.000,00 atau 92,79%;

c) Pengadaan Alat Pertamanan pada Suku dinas kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp532.117.635,00 dan terealisasi sebesar Rp308.550.000,00 atau 57,99%;

d) Pengadaan Alat Peternakan pada Pusat budidaya dan konservasi laut dianggarkan sebesar Rp325.476.690,00 dan terealisasi sebesar Rp264.950.000,00 atau 81,40 %; dan

e) Pengadaan Alat Pertamanan pada Dinas kehutanan dianggarkan sebesar Rp248.512.000,00 dan terealisasi sebesar Rp195.800.000,00 atau 78,79%.

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp33.010.812.758,00. Realisasinya adalah sebesar Rp21.366.981.063,00 atau 64,73%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Papan Visual/Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dianggarkan sebesar Rp13.849.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.895.280.000,00 atau 78,67%;

- b) Pengadaan Papan Visual/Elektronik pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp3.644.465.000,00 terealisasi sebesar Rp2.362.635.000,00 atau 64,83%;
 - c) Pengadaan Mesin Absensi pada Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp1.364.163.075,00 dan terealisasi masing-masing sebesar Rp1.228.200.000,00 dan atau 90,03%;
 - d) Pengadaan Mesin Hitung pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp660.000.000,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp528.000.000,00 dan atau 80%; dan
 - e) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp349.800.000,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp339.000.000,00 dan atau 96,91%.
- 9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp151.206.074.067,00. Realisasinya adalah sebesar Rp116.083.099.255,00 atau 76,77%
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp11.217.289.105,00 dan terealisasi sebesar Rp9.627.254.038,00 atau 85,83%;
 - b) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp8.853.291.982,00 dan terealisasi sebesar Rp7.286.401.738,00 atau 82,30%;

- c) Pengadaan Alat Pendingin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp8.410.105.000,00 terealisasi sebesar Rp6.767.570.000,00 atau 80,47%;
 - d) Pengadaan Alat Pendingin pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp7.647.200.000,00 terealisasi sebesar Rp6.660.400.000,00 atau 87,10%; dan
 - e) Pengadaan Rak Besi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp15.087.643.670,00 terealisasi sebesar Rp5.510.919.480,00 atau 36,53%.
- 10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp288.145.290.427,00. Realisasinya adalah sebesar Rp242.311.478.191,00 atau 84,09%
- Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Komputer/PC pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp36.498.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.958.896.000,00 atau 82,08%;
 - b) Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp31.095.410.759,00 dan terealisasi sebesar Rp24.263.066.235,00 atau 78,03%;
 - c) Pengadaan Komputer Mainframe pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp22.193.772.480,00 dan terealisasi sebesar Rp19.196.089.000,00 atau 86,49%;
 - d) Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp18.175.942.868,00 dan terealisasi sebesar Rp17.388.181.700,00 atau 95,67%; dan
 - e) Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar

Rp13.605.494.781,00 dan terealisasi sebesar Rp12.180.431.831,00 atau 89,53%.

11) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp194.725.220.487,00. Realisasinya adalah sebesar Rp146.010.868.004,00 atau 74,98%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan kursi belajar pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp47.674.346.155,00 dan terealisasi sebesar Rp39.720.552.960,00 atau 83,32%;
- b) Pengadaan meja belajar pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp40.185.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.508.654.400,00 atau 85,87%;
- c) Pengadaan Alat-alat dapur pada RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp2.783.072.771,00 dan terealisasi sebesar Rp2.548.497.600 atau 91,57%;
- d) Pengadaan meja kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp2.636.781.294,00 dan terealisasi sebesar Rp2.252.877.900,00 atau 85,44%; dan
- e) Pengadaan kursi kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp2.595.660.793,00 dan terealisasi sebesar Rp1.990.829.400,00 atau 76,70%.

12) Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dianggarkan sebesar Rp45.602.890.761,00. Realisasinya adalah sebesar Rp34.137.064.395,00 atau 74,86%

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan CCTV pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp1.450.315.185,00 dan terealisasi sebesar Rp1.375.280.800,00 atau 94,83%;

- b) Pengadaan sound system pada Biro Umum dianggarkan sebesar Rp1.128.061.696,00 dan terealisasi sebesar Rp1.041.473.300,00 atau 92,32%;
 - c) Pengadaan peralatan studio visual pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp1.209.871.273,00 dan terealisasi sebesar Rp975.931.000,00 atau 80,66%;
 - d) Pengadaan CCTV pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp991.015.850,00 dan terealisasi sebesar Rp807.310.250,00 atau 81,46%; dan
 - e) Pengadaan OHP/Infocus/LCD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dianggarkan sebesar Rp997.385.406,00 dan terealisasi sebesar Rp696.689.200,00 atau 69,85%.
- 13) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp43.061.618.764,00. Realisasinya adalah sebesar Rp40.654.469.234,00 atau 94,41%
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan peralatan pemancar UHF pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp29.433.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.897.000.000,00 atau 98,18%;
 - b) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp5.012.587.224,00 dan terealisasi sebesar Rp4.578.970.000,00 atau 91,35%.
 - c) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada RSUD Kojak Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.141.159.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 87,63%;
 - d) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar

Rp728.547.435,00 dan terealisasi sebesar Rp561.263.000,00 atau 77,04%; dan

- e) Pengadaan jaringan teknologi informasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp392.004.800,00 dan terealisasi sebesar Rp390.050.000,00 atau 99,50%.

- 14) Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp29.165.939.510,00. Realisasinya adalah sebesar Rp25.493.253.000,00 atau 87,41%

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dianggarkan sebesar Rp9.193.005.195,00 dan terealisasi sebesar Rp8.823.540.000,00 atau 95,98%;
- b) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Metrologi dianggarkan sebesar Rp5.415.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.317.433.000,00 atau 98,18%;
- c) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dianggarkan sebesar Rp5.566.350.790,00 dan terealisasi sebesar Rp4.360.000.000,00 atau 78,33%;
- d) Pengadaan alat ukur pemetaan pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dianggarkan sebesar Rp3.575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.305.555.000,00 atau 92,46%; dan
- e) Pengadaan alat ukur universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung dianggarkan sebesar Rp735.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp681.835.000,00 atau 92,72%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp458.799.351.705,00. Realisasinya adalah sebesar Rp352.200.286.495,00 atau 76,77%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada RSUD Budhi Asih dianggarkan sebesar Rp23.369.749.425,00 dan terealisasi sebesar Rp21.002.203.220,00 atau 89,87%;

b) Pengadaan alat-alat kamar operasi pada RSUD Koja dianggarkan sebesar Rp18.659.586.279,00 dan terealisasi sebesar Rp16.586.013.246,00 atau 88,89%;

c) Pengadaan Alat-alat ruang HCU/ICCU pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp18.199.890.531,00 dan terealisasi sebesar Rp16.326.798.511,00 atau 89,71%;

d) Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp20.186.609.731,00 dan terealisasi sebesar Rp16.212.657.732,00 atau 80,31%; dan

e) Pengadaan alat-alat ruang kamar pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp19.992.570.574,00 dan terealisasi sebesar Rp15.990.125.979,00 atau 79,98%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp78.930.961.372,00. Realisasinya adalah sebesar Rp63.351.508.042,00 atau 80,26%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan alat-alat laboratorium pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dianggarkan sebesar Rp17.128.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.516.898.000,00 atau 84,75%;

- b) Pengadaan alat-alat uji laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah dianggarkan sebesar Rp11.581.630.130,00 dan terealisasi sebesar Rp10.507.759.400,00 atau 90,73%;
 - c) Pengadaan alat-alat laboratorium pada Pusat produksi, inspeksi dan sertifikasi hasil perikanan dianggarkan sebesar Rp3.192.889.150,00 dan terealisasi sebesar Rp3.057.450.000,00 atau 95,76%;
 - d) Pengadaan alat-alat uji laboratorium pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dianggarkan sebesar Rp3.348.700.036,00 dan terealisasi sebesar Rp2.572.400.000,00 atau 76,82%; dan
 - e) Pengadaan alat-alat laboratorium pada RSUD Tarakan dianggarkan sebesar Rp3.435.395.182,00 dan terealisasi sebesar Rp2.439.852.939,00 atau 71,02%.
- 17) Belanja Modal Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp2.486.958.100,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.541.738.000,00 atau 61,99%
- Belanja Modal Pengadaan Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan detektor logam pada Biro Umum dianggarkan sebesar Rp2.129.040.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.272.700.000,00 atau 59,78%;
 - b) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Terpadu Terminal Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp185.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.180.000,00 atau 96,92%;
 - c) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dianggarkan sebesar Rp96.558.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.000.000,00 atau 56,96%; dan
 - d) Pengadaan detektor logam pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman dianggarkan sebesar

Rp51.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.858.000,00 atau 65,77%.

- 18) Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp284.518.476.961,00. Realisasinya adalah sebesar Rp198.801.156.715,00 atau 69,87%

Belanja Modal BLUD di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal BLUD pada Taman Margasatwa Ragunan dianggarkan sebesar Rp38.898.391.741,00 dan terealisasi sebesar Rp24.918.533.216,00 atau 64,06%;
- b) Belanja Modal BLUD pada RSUD Tugu Koja dianggarkan sebesar Rp8.988.180.621,00 dan terealisasi sebesar Rp8.847.636.217,00 atau 98,44%;
- c) Belanja Modal BLUD pada Puskesmas Kecamatan Kalideres dianggarkan sebesar Rp6.827.652.400,00 dan terealisasi sebesar Rp5.925.955.269,00 atau 86,79%;
- d) Belanja Modal BLUD pada RSUD Jagakarsa dianggarkan sebesar Rp6.624.765.778,00 dan terealisasi sebesar Rp4.905.578.101,00 atau 74,05%;
dan
- e) Belanja Modal BLUD pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dianggarkan sebesar Rp6.232.613.123,00 dan terealisasi sebesar Rp6.037.162.372,00 atau 96,86%.

- 19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp175.168.059.588,00 dengan realisasinya sebesar Rp199.628.568.531,00. Belanja Modal tersebut merupakan belanja yang berasal dari dana BOS (DAK Non Fisik Pemerintah Pusat). Tingginya realisasi anggaran tersebut sebagai dampak perubahan kebijakan belanja. Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang semula sisa Dana BOS di sekolah harus dikembalikan ke Kas Daerah, pada tahun 2018 berubah

menjadi tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan menjadi Silpa di sekolah dan dapat digunakan untuk kegiatan tahun berikutnya. Dengan perubahan kebijakan tersebut maka sisa Dana BOS tahun 2017 senilai Rp62.659.228.773,00 menjadi Silpa sekolah dan menjadi sumber dana untuk penambahan belanja tahun 2018. Penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2017 sebagai sumber dana belanja Tahun Anggaran 2018 tersebut seluruhnya sudah telah dianggarkan dalam RKAS masing-masing sekolah namun masih dalam masa transisi sistem RKAS masih belum terintegrasi dengan sistem E-budgeting.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Provinsi DKI Jakarta tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp153.079.747.227,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp436.473.750,00 sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.730.610.014.327,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 atau 80,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp942.836.800.957,00 atau 19,93%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya:

- 1) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.786.901.397.184,00 terealisasi sebesar Rp1.639.917.552.103,00 atau 91,77%;

- 2) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp632.449.797.667,00 terealisasi sebesar Rp511.296.109.283,00 atau 80,84%;
- 3) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp393.521.950.860,00 terealisasi sebesar Rp321.315.511.067,00 atau 81,65%;
- 4) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada RSUD Cengkareng dianggarkan sebesar Rp200.717.895.098,00 terealisasi sebesar Rp175.922.106.180,00 atau 87,65%;
dan
- 5) Pengadaan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp160.074.531.295,00 terealisasi sebesar Rp160.074.531.295,00 atau 100%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp7.913.335.835,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menambah nilai aset Gedung dan Bangunan dan terdapat belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp1.050.688.509,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.878.376.382.111,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.195.927.869.729,00 atau 76,29% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp682.448.512.382,00 atau 23,71%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan listrik dianggarkan sebesar Rp1.448.122.026,00. Realisasinya adalah sebesar Rp614.205.000,00 atau 42,41%.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan listrik di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.705.000,00 atau 35,05%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp336.681.356,00 dan terealisasi sebesar Rp202.785.000,00 atau 60,23%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp163.900.000,00 atau 99,33%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dianggarkan sebesar Rp70.785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp64.900.000,00 atau 91,69%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp25.872.990,00 dan terealisasi sebesar Rp24.915.000,00 atau 96,30%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dianggarkan sebesar Rp1.375.008.857.266,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.272.949.766.897,00 atau 92,58%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp418.610.594.765,00 dan terealisasi sebesar Rp382.588.618.416,00 atau 91,39%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp395.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp382.960.648.946,00 atau 96,95%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp99.964.350.575,00 dan terealisasi sebesar Rp96.898.997.795,00 atau 96,93%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp93.662.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.490.312.415,00 atau 94,48%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Underpass pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp69.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.450.965.000,00 atau 94,11%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dianggarkan sebesar Rp1.276.383.995.110,00. Realisasinya adalah sebesar Rp795.694.245.292,00 atau 62,34%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp255.431.904.089,00 dan terealisasi sebesar Rp203.966.117.600,00 atau 79,85%.
- b) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat dianggarkan

sebesar Rp158.921.089.528,00 dan terealisasi sebesar Rp108.775.111.328,00 atau 68,45%.

- c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp143.430.268.001,00 dan terealisasi sebesar Rp119.931.792.297,00 atau 83,62%.
 - d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp92.605.259.680,00 dan terealisasi sebesar Rp79.417.941.146,00 atau 85,76%.
 - e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Sudin Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp47.109.495.790,00 dan terealisasi sebesar Rp43.576.093.797,00 atau 92,50%.
- 4) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dianggarkan sebesar Rp 122.879.914.575,00. Realisasinya Rp59.293.228.633,00 adalah sebesar atau 48,25%.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp68.303.604.400,00 dan terealisasi sebesar Rp12.344.875.000,00 atau 18,07%.
- b) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di atas air pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp47.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.047.694.701,00 atau 95,44%.
- c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di atas air pada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp5.000.135.789,00 dan terealisasi sebesar Rp176.998.800,00 atau 3,54%.
- d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang pada Unit pengelola sampah terpadu

dianggarkan sebesar Rp1.574.142.020,00 dan terealisasi sebesar Rp1.446.983.600,00 atau 91,92%.

e) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang pada Unit pengelola terminal angkutan jalan dianggarkan sebesar Rp294.131.222,00 dan terealisasi sebesar Rp245.293.730,00 atau 83,40%.

5) Belanja Modal Pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota dianggarkan sebesar Rp102.655.493.134,00. Realisasinya Rp67.376.423.907,00 adalah sebesar atau 65,63%.

Belanja Modal Pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp27.909.571.712,00 dan terealisasi sebesar Rp19.103.898.667,00 atau 68,45%.

b) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Energi dianggarkan sebesar Rp16.854.276.196,00 dan terealisasi sebesar Rp12.596.236.070,00 atau 74,74%.

c) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp13.897.611.309,00 dan terealisasi sebesar Rp10.346.641.210,00 atau 74,45%.

d) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp10.504.065.346,00 dan terealisasi sebesar Rp6.983.252.313,00 atau 66,48%.

e) Belanja Modal Pengadaan lampu penerangan sarana dan prasarana pada Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Barat dianggarkan sebesar

Rp7.943.847.075,00 dan terealisasi sebesar Rp6.233.300.544,00 atau 78,47%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat belanja sebesar Rp3.854.773.463,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp182.157.854.496,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp137.982.740.117,00 atau 75,75% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp44.175.114.379,00 atau 24,25%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan dianggarkan sebesar Rp9.429.263.584,00. Realisasinya adalah sebesar Rp6.480.036.012,00 atau 68,72%.

Realisasi belanja modal pengadaan buku/kepuustakaan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp4.070.008.360,00 dan terealisasi sebesar Rp2.611.704.948,00 atau 64,17%.
- b) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.254.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.049.185.490,00 atau 83,63%.
- c) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Selatan

dianggarkan sebesar Rp1.034.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.005.196.740,00 atau 97,21%.

d) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp697.372.500,00 dan terealisasi sebesar Rp694.359.026,00 atau 99,57%.

e) Belanja Modal Pengadaan buku umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp509.293.400,00 dan terealisasi sebesar Rp476.872.815,00 atau 93,63%.

2) Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp443.630.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp418.770.000,00 atau 94,40%.

Realisasi belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian/kebudayaan di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Unit pengelola pusat pelatihan seni budaya dianggarkan sebesar Rp255.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.454.000,00 atau 91,67%.

b) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dianggarkan sebesar Rp114.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.180.000,00 atau 99,43%.

c) Belanja Modal Pengadaan pakaian adat nusantara pada Unit pengelola pusat pelatihan seni budaya dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.410.000,00 atau 92,40%.

d) Belanja Modal Pengadaan barang kerajinan seni pada Unit pengelola museum seni dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.450.000,00 atau 97,50%.

e) Belanja Modal Pengadaan alat musik kesenian pada Panti sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah

dianggarkan sebesar Rp18.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.469.000,00 atau 98,76%.

- 3) Belanja Modal Pengadaan Tanaman dianggarkan sebesar Rp851.860.955,00. Realisasinya adalah sebesar Rp766.290.800,00 atau 89,95%.

Realisasi belanja modal pengadaan tanaman di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan tanaman pada Sudin Kehutanan Kota Jakarta Utara sebesar Rp739.014.100,00 dan terealisasi sebesar Rp700.346.900,00 atau 94,77%.

b) Belanja Modal Pengadaan tanaman pada Sudin Kehutanan Kota Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp105.099.357,00 dan terealisasi sebesar Rp65.943.900,00 atau 62,74%.

- 4) Belanja Modal Pengadaan Alat dan Sarana Olahraga dianggarkan sebesar Rp430.930.775,00. Realisasinya adalah sebesar Rp421.820.300,00 atau 97,89%.

Realisasi belanja modal pengadaan Alat dan Sarana Olahraga di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga air pada Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp411.179.175,00 dan terealisasi sebesar Rp402.270.000,00 atau 97,83%.

b) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga lapangan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp15.516.600,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau 99,25%.

c) Belanja Modal Pengadaan alat olahraga fitness pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp4.235.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.150.300,00 atau 98,00%.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp171.002.169.182,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp129.895.823.005,00 atau 75,96%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah terdapat senilai Rp135.141.089.582,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.956.421.392.833,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.924.529.559,00 atau 0,07% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.954.496.863.274,00 atau 99,93%. Realisasi tersebut merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan restitusi pajak dan retribusi yang telah dipungut pada tahun sebelumnya.

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018, digambarkan pada tabel 5.18 berikut ini.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	58.030.965.559.783	48.795.412.316.178	84,09	49.526.279.680.718
1.	Pendidikan	21.013.424.987.891	18.840.672.891.975	89,66	16.140.647.745.866
2.	Kesehatan	10.014.402.268.523	8.640.311.363.188	86,28	7.766.476.525.697
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.549.403.820.818	6.367.335.176.264	74,48	6.251.219.723.086
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.902.112.756.777	2.468.133.870.652	85,05	3.766.877.781.943
5.	Penataan Ruang	0	0	0	205.704.099.469
6.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.425.850.063.909	2.177.836.221.235	89,78	0
7	Sosial	740.856.401.010	666.823.805.841	90,01	473.043.405.251
8.	Tenaga Kerja	335.057.326.790	304.485.095.723	90,88	251.418.594.300
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	255.657.253.332	233.590.706.331	91,37	17.960.231.542

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
10.	Pangan	1.218.438.764.509	829.621.769.856	68,09	0
11.	Pertanahan	121.618.108.588	93.278.851.917	76,70	336.840.000
12.	Lingkungan Hidup	2.337.393.756.716	1.897.513.854.973	81,18	1.499.854.750.118
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	337.044.892.186	291.363.231.179	86,45	228.629.365.749
14.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	22.171.828.799	20.257.249.586	91,36	239.673.160.666
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0	0	0	16.029.350.468
16.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	22.874.190.331	21.981.159.057	96,10	0
17.	Perhubungan	4.822.789.011.408	3.444.702.617.895	71,43	2.117.358.269.196
18.	Komunikasi dan Informatika	383.432.835.224	317.060.885.930	82,69	237.522.866.804
19.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	230.630.697.809	200.484.378.866	86,93	165.497.448.416
20.	Penanaman Modal	798.268.176.970	721.004.625.088	90,32	21.809.285.749
21.	Kepemudaan dan Olahraga	787.302.118.864	626.017.921.024	79,51	428.458.009.264
22.	Statistik	2.917.794.962	1.687.471.850	57,83	220.454.050
23.	Persandian	188.400.000	138.410.000	73,47	0
24.	Kebudayaan	494.491.463.992	450.715.306.553	91,15	402.189.801.442
25.	Perpustakaan	176.857.269.211	156.522.808.198	88,50	106.464.374.978
26.	Kearsipan	37.781.371.164	23.872.642.997	63,19	27.668.228.225
II	URUSAN PILIHAN	5.175.554.636.602	4.523.135.984.571	87,39	1.539.801.699.169
1.	Kelautan dan Perikanan	118.175.042.315	100.342.518.847	84,91	288.375.508.928
2.	Pariwisata	194.145.534.477	153.618.966.091	79,13	11.050.048.617
3.	Pertanian	87.408.344.080	71.001.783.759	81,23	27.292.463.468
4.	Kehutanan	3.435.570.030.665	3.165.976.831.217	92,15	146.726.800
5.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.261.490.090.013	962.745.258.358	76,32	1.109.698.183.794
6.	Perdagangan	38.689.158.024	36.647.381.432	94,72	8.918.380.577
7.	Perindustrian	40.076.437.028	32.803.244.867	81,85	0
III	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.739.497.901.637	3.338.594.547.688	49,54	0
1.	Perencanaan	121.866.238.802	113.714.652.125	93,31	0
2.	Kuangan	4.429.597.434.745	1.273.720.323.645	28,75	0
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	288.393.539.917	261.730.749.637	90,75	0
4.	Penelitian dan Pengembangan	3.481.007.800	70.400.000	2,02	0
5.	Kesatuan Bangsa dan Politik	148.607.226.903	135.116.497.225	90,92	0

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
6.	Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peratutan PerUndang-Undangan	1.747.552.453.470	1.554.241.925.056	88,94	0
IV	KEWILAYAHAN	5.147.813.162.191	4.752.979.002.720	92,33	0
1.	Kewilayahan	5.147.813.162.191	4.752.979.002.720	92,33	0
Jumlah (I, II, III dan IV)		75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

I. Belanja Daerah Urusan Wajib

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.013.424.987.891,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.840.672.891.975,00 atau 89,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.659.464.197.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.112.966.482.553,00 atau 79,45%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.370.930.717.038,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.048.458.242.843,00 atau 86,40%.

3) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp1.048.877.525.709,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp971.699.149.837,00 atau 92,64%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp317.856.203.454,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp253.580.899.118,00 atau 79,78%.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.725.146.088,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.291.150.993,00 atau 76,39 %.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.014.402.268.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.640.311.363.188,00 atau 86,28 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.320.444.928.223,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.744.072.702.384,00 atau 82,64%.

2) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp1.690.090.196.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.457.729.461.000,00 atau 86,25%.

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.501.981.697.388 00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.142.830.323.989,00 atau 76,09%.

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.482.356.261.677,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.358.919.934.443,00 atau 91,67%.

5) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Untuk Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.596.884.355,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.794.521.191,00 atau 74,50%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.549.403.820.818,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.367.335.176.264,00 atau 74,48%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Banjir

Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.960.193.783.332,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp2.429.369.818.691,00 atau 61,34%.

- 2) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.239.863.531.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.074.036.377.772,00 atau 92,60%.
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.153.206.262.828,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.003.602.470.021,00 atau 87,03%.
- 4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp234.208.529.132,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp124.188.718.379,00 atau 53,02%.
- 5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penatausahaan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan Penatausahaan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp130.842.873.301,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp105.742.806.688,00 atau 80,82%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.902.112.756.777,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.468.133.870.652,00 atau 85,05%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan dan pemeliharaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.394.436.869.196,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.099.851.628.561,00 atau 87,70%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp210.371.731.328,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp155.666.635.881,00 atau 74,00%.

3) Program Penataan Kawasan Permukiman

Untuk Program Penataan Kawasan Permukiman, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.205.815.636,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.084.730.028,00 atau 49,64%.

4) Program Pelayanan Penghuni rumah Susun

Untuk Program Pelayanan Penghuni rumah Susun, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.124.343.293,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.163.058.225,00 atau 59,50%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.160.391.324,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp982.152.035,00 atau 45,46%.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2018 tidak ada penganggaran maupun realisasi dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat realisasi sebesar Rp205.704.099.469,00.

6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.425.850.063.909,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.177.836.221.235,00 atau 89,78 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk Program Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp368.187.829.098,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp275.605.169.930,00 atau 74,85 %.

2) Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp259.183.622.457,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp197.093.574.010,00 atau 76,04%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.020.135.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.800.735.912,00 atau 76,76%.

- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.194.715.723,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.581.028.808,00 atau 69,45 %.

- 5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.720.242.054,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.024.720.772,00 atau 56,73%.

7. Urusan Sosial

- a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp740.856.401.010,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp666.823.805.841,00 atau 90,01%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp202.239.440.016,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp178.206.091.666,00 atau 88,12%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64.075.400.077,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp55.414.101.474,00 atau 86,48%.

3) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana kesejahteraan Sosial

Untuk Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana kesejahteraan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp47.343.800.522,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.048.728.621,00 atau 71,92%.

4) Program Penanganan Fakir Miskin

Untuk Program Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.847.228.690,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.117.642.597,00 atau 65,22 %.

5) Program Perlindungan Sosial

Untuk Program Perlindungan Sosial, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.200.974.275,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.820.399.970,00 atau 82,39%.

8. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp335.057.326.790,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp304.485.095.723,00 atau 90,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp89.115.028.512,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp75.633.690.503, 00 atau 84,87%.

2) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.157.731.805,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.931.409.220,00 atau 81,37 %.

3) Program Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan

Untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.320.705.770,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.192.532.030,00 atau 90,30%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Tenaga Kerja

Untuk Pengelolaan Kendaraan Operasional Tenaga Kerja, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp941.796.703,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp714.554.956,00 atau 75,87%.

- 5) Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis
Untuk Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp781.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp777.400.000,00 atau 99,54%.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp255.657.253.332,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp233.590.706.331,00 atau 91,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.737.945.075,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp5.529.478.195,00 atau 96,37%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.126.360.939,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp3.874.978.357,00 atau 93,91%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp962.207.318,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp825.378.598,00 atau 85,78%.

4) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp145.205.000,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp139.477.409,00 atau 96,06%.

10. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pangan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.218.438.764.509,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp829.621.769.856,00 atau 68,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp59.320.383.958,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.402.749.444,00 atau 86,65%.

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp45.509.351.247,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.742.651.310,00 atau 87,33%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan, pada tahun 2018 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp2.021.750.304,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.612.486.670,00 atau 79,76%.

11. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.618.108.588,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp93.278.851.917,00 atau 76,70%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain Program Penyiapan Akuisisi Tanah

Untuk Program Penyiapan Akuisisi Tanah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp896.276.088,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp809.260.000,00 atau 90,29%.

12. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.337.393.756.716,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.897.513.854.973,00 atau 81,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.670.473.674.741,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.377.054.197.655,00 atau 82,43%.

2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp191.008.610.930,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.257.385.109,00 atau 60,86%.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.330.972.575,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.741.018.261,00 atau 73,56%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp95.285.849.470,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.534.952.791,00 atau 65,63%.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp337.044.892.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp291.363.231.179,00 atau 86,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp107.817.819.266,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.379.105.142,00 atau 83,83%.

- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.641.103.587,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.865.818.810,00 atau 89,18%.
- 3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.318.672.333,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.067.503.359,00 atau 46,04%.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.171.828.799,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.257.249.586,00 atau 91,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.653.191.475,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.796.186.418,00 atau 93,23%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun

2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.198.726.404,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.157.346.491,00 atau 88,68%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp319.910.920,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp303.716.677,00 atau 94,94%.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2018 tidak dialokasikan anggaran ataupun realisasinya berbeda dengan tahun 2017 terdapat realisasi sebesar Rp16.029.350.468,00.

16. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.874.190.331,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.981.159.057,00 atau 96,10%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Penduduk

Untuk Program Pengendalian Penduduk, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.389.156.979,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.327.236.124,00 atau 99,54 %.

- 2) Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Untuk Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.750.094.307,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.146.542.799,00 atau 92,21%.
- 3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.734.939.045,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.507.380.134,00 atau 86,88%

17. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.822.789.011.408,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.444.702.617.895,00 atau 71,43%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Untuk Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp304.889.635.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp261.918.993.296,00 atau 85,91%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp266.263.943.224,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp196.405.335.825,00 atau 73,76%.

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Untuk Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.672.782.536,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.196.584.201,00 atau 91,55%.

4) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan

Untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp125.403.198.128,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp107.058.107.905,00 atau 85,37%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp76.908.701.595,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.768.130.179,00 atau 86,81%.

18. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp383.432.835.224,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp317.060.885.930,00 atau 82,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Untuk Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp204.898.878.487,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp166.784.958.992,00 atau 81,40%.

2) Program Komunikasi dan Informasi Publik

Untuk Program Komunikasi dan Informasi Publik, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp58.279.269.656,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp45.360.386.916,00 atau 77,83%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.468.653.192,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.750.340.014,00 atau 79,29%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp631.816.099,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp302.503.541,00 atau 47,88%.

19. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp230.630.697.809,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp200.484.378.866,00 atau 86,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan UKM, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp85.536.201.420,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.872.562.081,00 atau 82,86%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp13.098.271.527,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.233.805.645,00 atau 85,77%.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.036.051.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.890.641.920,00 atau 92,86%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp480.787.373,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp355.352.244,00 atau 73,91%.

20. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp798.268.176.970,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp721.004.625.088,00 atau 90,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.520.239.691,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.587.444.430,00 atau 75,16 %.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.247.475.933,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp108.301.607.720,00 atau 90,07 %.

3) Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.066.886.596,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.537.284.585,00 atau 50,05%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.882.190.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.249.468.937,00 atau 78,05%.

21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp787.302.118.864,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp626.017.921.024,00 atau 79,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp479.852.184.643,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp373.985.035.054,00 atau 77,94%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp129.913.602.313,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.823.235.682,00 atau 75,30%.

3) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Untuk Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.254.853.767,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.571.016.959,00 atau 87,94%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp586.406.191,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp398.135.015,00 atau 67,89%.

22. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.917.794.962,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengembangan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.917.794.962,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.687.471.850,00 atau 57,83%.

23. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Persandian pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp188.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu, Program Persandian dan Pengamanan informasi, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp188.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.410.000,00 atau 73,47%.

24. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp494.491.463.992,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp450.715.306.553,00 atau 91,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.800.960.696,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.012.690.293,00 atau 90,57%.

2) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

Untuk Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.085.168.899,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.939.328.494,00 atau 94,86%.

3) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya

Untuk Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp80.913.316.547,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.438.675.884,00 atau 87,05%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan

Untuk Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.911.360.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.373.641.654,00 atau 35,12%.

25. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar

Rp176.857.269.211,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp156.522.808.198,00 atau 88,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Untuk Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp63.461.569.145,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.112.423.264,00 atau 85,27%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemerintah, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.043.595.462,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.324.872.362,00 atau 81,58%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.124.043.604,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp918.309.112,00 atau 81,70%.

26. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2018 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.781.371.164,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan, pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp37.781.371.164,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp23.872.642.997,00 atau 63,19%.

II. Belanja Daerah Urusan Pilihan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp118.175.042.315,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.342.518.847,00 atau 84,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.750.146.698,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp84.874.898.454,00 atau 84,24%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.109.404.695,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.194.912.278,00 atau 88,81%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp315.490.922,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp272.708.115,00 atau 86,44%.

2. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp194.145.534.477,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp153.618.966.091,00 atau 79,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Untuk Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp83.283.521.290,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp60.242.641.053,00 atau 72,33%.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp62.497.479.352,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.364.919.757,00 atau 82,19%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.889.012.227,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.139.243.335,00 atau 90,83%.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp6.317.805.994,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.158.064.205,00 atau 65,82%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp742.715.614,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp299.097.741,00 atau 40,27%.

3. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.408.344.080,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.001.783.759,00 atau 81,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah :

1) Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp72.547.641.316,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.936.072.889,00 atau 78,48%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian.

Untuk program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian telah dialokasikan anggaran Rp14.271.084.716,00 terealisasi sebesar Rp13.701.541.365,00 atau 96,01%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Urusan Pertanian.

Untuk program Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Urusan Pertanian telah dialokasikan anggaran

Rp589.618.048,00 terealisasi sebesar Rp364.169.505,00 atau 61,76%.

4. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.435.570.030.665,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.165.976.831.217,00 atau 92,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Pertamanan

Untuk Program Pengelolaan Pertamanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.486.664.554.815,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.426.655.035.067,00 atau 95,96%.

2) Program Pengelolaan Hutan

Untuk Program Pengelolaan Hutan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp754.388.632.366,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp723.718.623.482,00 atau 95,93%.

3) Program Pengelolaan Pemakaman

Untuk Program Pengelolaan Pemakaman, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp541.907.894.338,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp489.892.839.371,00 atau 90,40%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp154.090.983.076,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.438.354.298,00 atau 73,62%.

5) Program Konservasi Satwa

Untuk Program Konservasi Satwa, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp134.907.807.511,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.551.825.614,00 atau 67,12%.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.261.490.090.013,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp962.745.258.358,00 atau 76,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Untuk Program Peningkatan Pencahayaan Kota, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.059.428.284.004,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp790.309.717.721,00 atau 74,60%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp56.713.545.970,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.565.398.540,00 atau 85,63%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp19.813.853.059,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.699.084.897,00 atau 74,19%.

4) Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah

Untuk Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.071.827.759,00 terealisasi sebesar Rp8.976.426.404,00 atau 59,56%.

5) Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan

Untuk Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.268.889.221,00 terealisasi sebesar Rp6.762.507.400,00 atau 65,85%.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perdagangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp38.689.158.024,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp36.647.381.432,00 atau 94,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.021.909.553,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.941.175.903,00 atau 96,14%.

2) Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

Untuk Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp10.667.248.471,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.706.205.529,00 atau 90,99%.

7. Urusan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perindustrian pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.076.437.028,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.803.244.867,00 atau 81,85%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.242.301.618,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.097.540.896,00 atau 85,93%.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.233.643.245,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.806.091.597,00 atau 78,39%.

3) Program Pengawasan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Industri, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.104.486.755,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.115.988.370,00 atau 75,46%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp289.645.410,00 terealisasi sebesar Rp161.997.476,00 atau 55,93%.

III. Belanja Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.866.238.802,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.714.652.125,00 atau 93,31%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.769.422.552,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.474.747.446,00 atau 85,57%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Peningkatan dan Pengelolaan kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.463.891.886,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.232.481.705,00 atau 80,95%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp392.395.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp202.720.648,00 atau 51,66%.

2. Urusan Keuangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.429.597.434.745,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.273.720.323.645,00 atau 28,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.841.727.334,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp87.421.999.214,00 atau 83,38%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.581.438.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp81.644.998.880,00 atau 78,82%.

3) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

Untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.927.435.356,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.401.856.951,00 atau 62,85%.

4) Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Untuk Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.700.843.904,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.753.369.155,00 atau 74,65%.

5) Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.585.470.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.351.423.410,00 atau 99,57%.

3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp288.393.539.917,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp261.730.749.637,00 atau 90.75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Kompetensi SDM

Untuk Program Pengembangan Kompetensi SDM, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.585.487.640,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.699.317.815 atau 83,77%.

2) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Untuk Program Peningkatan Kapasitas KORPRI, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.758.808.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.799.315.135,00 atau 83,34%.

3) Program Pengelolaan, pembinaan dan Pengembangan ASN

Untuk Program Pengelolaan, pembinaan dan Pengembangan ASN, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.962.357.981,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.067.067.390,00 atau 90,01%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.972.104.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.867.802.713,00 atau 86,15%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.976.214.556,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.219.764.256,00 atau 87,34%.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp229.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.400.000,00 atau 2,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu, untuk Program Urusan Penelitian dan Pengembangan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp229.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.400.000,00 atau 30,68%.

5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp148.607.226.903,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.116.497.225,00 atau 90,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.237.004.464,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.875.032.660,00 atau 96,34%.

2) Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Untuk Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.705.241.096,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.980.193.000,00 atau 96,94%.

3) Program Peningkatan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Peningkatan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.283.584.033,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.818.085.601,00 atau 85,82%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp147.754.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.378.322,00 atau 34,10%.

6. Urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.747.552.453.470,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.554.241.925.056,00 atau 88,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp244.741.828.845,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp192.371.069.592,00 atau 78,60%

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.480.869.417,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.682.747.249,00 atau 79,79%.

3) Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Untuk Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.094.753.802,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.672.427.117,00 atau 88,63%.

- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.489.060.602,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.485.603.661,00 atau 86,02%.
- 5) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Untuk Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.001.516.621,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.276.608.565,00 atau 79,31%.

IV. Belanja Daerah Urusan Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.147.813.162.191,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.752.979.002.720,00 atau 92,33%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp649.068.805.233,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 621.524.844.329,00 atau 95,76%.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp561.547.837.549,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp532.998.783.179,00 atau 94,92%.
- 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp531.935.459.529,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp502.579.817.010,00 atau 94,48%.
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp431.335.932.554,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp399.228.914.809,00 atau 92,56%.
- 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp393.570.600.045,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp365.110.608.050,00 atau 92,77%.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, disajikan pada tabel 5.19.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.081.435.869.027	27.726.289.282.350	81,35	23.737.494.610.673
I	BELANJA PEGAWAI	20.426.209.409.000	19.206.972.574.618	94,03	17.624.763.816.112
	1.Gaji dan Tunjangan	18.092.224.654.000	17.002.460.440.052	93,98	15.490.209.497.025
	2.Tambahan Penghasilan PNS	64.327.007.000	63.819.821.356	99,21	31.325.730.828
	3.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	114.844.138.000	113.112.394.579	98,49	65.679.271.025
	4.Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	521.967.087.000	457.278.613.456	87,61	478.814.195.985
	5.Biaya Kematian Pegawai	0	0	0,00	224.305.800
	6.Biaya Guru NIP 15	70.500.000.000	62.183.500.000	88,20	38.172.225.000
	7.Belanja Penghasilan Lainnya	1.335.329.981.000	1.293.264.750.175	96,85	1.313.055.345.449
	8.Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	227.016.542.000	214.853.055.000	94,64	207.283.245.000
II	BELANJA BUNGA	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
	Bunga Utang Pinjaman	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
III	BELANJA SUBSIDI	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
IV	BELANJA HIBAH	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
	1.Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.079.487.320.994	774.171.120.402	71,72	365.090.358.913
	2.Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.750.000.000	5.250.000.000	44,68	8.779.790.000
	3.Belanja Hibah Dana BOS	703.260.872.000	571.806.960.000	81,31	561.080.080.000
	4.Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	94.798.800.000	70.922.949.836	74,81	177.128.124.000

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
V	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14	3.202.680.640.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.221.500.000	2.121.500.000	95,50	2.140.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	104.544.000.000	100.318.152.586	95,96	
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.975.271.062.000	3.898.584.400.000	98,07	3.174.521.640.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	101.484.000.000	62.946.000.000	62,03	26.019.000.000
VI	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00	0
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	299.166.525.000	280.952.047.100	93,91	342.488.546.000
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.320.987.200	5.320.986.000	100,00	1.632.592.120
VII	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
	Belanja Tidak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
	BELANJA LANGSUNG	41.012.395.391.186	33.683.832.568.807	82,13	27.328.586.769.214
I	BELANJA PEGAWAI	3.094.441.452.578	2.645.444.075.891	85,49	2.620.750.508.680
	1. Honorarium Non PNS	1.906.283.999.149	1.741.478.420.936	91,35	1.659.626.827.989
	2. Biaya Pegawai BOS/Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	-	19.197.195.082
	3. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	15.061.940.000	9.564.868.450	63,50	3.215.114.697
	4. Belanja Pegawai BLUD	1.085.583.121.790	820.539.043.302	75,59	938.711.370.912
	5. Belanja Pegawai BOS	87.512.391.639	73.861.743.203	84,40	-
II	BELANJA BARANG DAN JASA	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
III	BELANJA MODAL	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
	Jumlah	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887

5.1.3 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp364.487.512.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 atau 95,00%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp18.214.479.100,00 atau 5,00%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 diberikan kepada:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bekasi	194.800.781.100
2.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	8.107.960.000
3.	Pemerintah Kota Bogor	10.000.000.000
4.	Pemerintah Kabupaten Bogor	13.297.740.000
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	10.000.000.000
6.	Pemerintah Kota Depok	25.545.566.000
7.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	19.200.000.000
8.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	60.000.000.000
Jumlah		340.952.047.100

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2, Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	247.340.400
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	312.190.800
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	509.280.000
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	1.478.211.600
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4, Jakarta 10310	451.465.200
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	710.966.400
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta 13220	433.114.800

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	207.340.800
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun, Jakarta Timur 13220	428.407.200
10.	DPW Partai Persatuan Pembangunan Jl. I Gusti Ngurah Rai No.164, RT.10/RW.13, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13470	542.668.800
Jumlah		5.320.986.000

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.435.403.144.101,00. Nilai tersebut diperoleh dari :
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp13.165.982.127.533,00 dan pada tahun 2018 terdapat koreksi SiLPA APBD (SiLPA BOS) sebesar Rp335.225.651,00 sehingga SiLPA Tahun Anggaran 2017 setelah koreksi adalah Rp13.165.646.901.882,00;
 - b. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp3.619.441.859.550,00 untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang akan dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta;
 - c. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp650.000.000.000,00 merupakan penerimaan pembiayaan atas pengembalian penyertaan modal daerah dari PT Jakarta Propertindo berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1731 Tahun 2018 tentang Pengurangan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo yang sebelumnya direncanakan untuk mengakuisisi saham Palyja pada Tahun

2013 yang tidak dilakukan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017;

- d. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp314.382.669,00 merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2018.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp7.505.956.957.296,00 terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	76.817.812.254,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	7.395.509.521.612,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp	33.629.623.430,00
Jumlah	Rp	7.505.956.957.296,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp76.817.812.254,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2018, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.395.509.521.612,00 merupakan penyertaan modal kepada:

- 1) PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp935.997.229.164,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan Proyek Kelapa Village hunian DP 0 Rupiah, penyediaan lahan untuk pembangunan rusunami hunian program DP 0 Rupiah, pembangunan proyek Lebak Bulus dan untuk tertib

administrasi, perlu ditetapkan pencairannya dengan Keputusan Gubernur.

- 2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebesar Rp166.668.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1849 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan dan pembiayaan pasar perkulakan serta pasar buku di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) PT Food Station Tjipinang sebesar Rp85.500.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1931 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PT Food Station Tjipinang tahun 2018 diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan beras di DKI Jakarta.
- 4) PD PAL Jaya sebesar Rp235.219.361.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1850 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan jaringan pipa air limbah dan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) serta pembangunan mini komunal, interceptor dan jaringan pipa di Kawasan Kali Item.
- 5) PD Dharma Jaya sebesar Rp79.400.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1848 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pengadaan daging sapi bersubsidi dan pengadaan ternak sapi.
- 6) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.232.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1932 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut

diberikan untuk pembiayaan lanjutan Pembangunan Venue Velodrome dan LRT Prasarana Fase I koridor Kelapa Gading-Velodrome.

- 7) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp3.660.724.931.448,00
Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional perusahaan, Penerusan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41.283.071.898,00 dan Penerimaan Pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (Ileak Bulus – Bundaran HI) sebesar Rp3.619.441.859.550,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Tahun 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2017	13.165.982.127.533,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	(13.165.982.127.533,00)
Subtotal	0,00
Pendapatan	61.235.824.747.633,00
Belanja	(61.410.121.851.157,00)
Defisit	(174.297.103.524,00)
Penerimaan Pembiayaan	17.435.403.144.101,00
Pengeluaran Pembiayaan	(7.505.956.957.296,00)
Pembiayaan Netto	9.929.446.186.805,00
SiLPA Tahun 2018 sebelum penyesuaian	9.755.149.083.281,00
Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(66.360.505,00)
SAL per 31 Desember 2018	9.755.082.722.776,00

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416,00, dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		9.756.644.970.273,00
SiLPA		9.755.082.722.776,00
Selisih		1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00	
Utang PPN Pusat	400.305.087,00	
Utang Asuransi	83.384.735,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K		1.147.321.416,00
Uang Titipan		10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan		
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706,00)
Pembulatan		(3,00)
Total		1.562.247.497,00

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1. Kas di kas Daerah	Rp9.037.618.101.920,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp2.152.479.146,00
3. Pendapatan yang Belum Disetor	Rp882.416.775,00
4. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp1.235.155.437,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp104.230.521.571,00
6. Kas di BLUD	Rp608.739.367.218,00
7. Piutang Pengembalian Kelebihan	Rp224.680.706,00
8. Pembayaran kepada Pihak Ketiga	
8. Pembulatan	Rp3,00
Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyailketerkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2018, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp19.975.604.346.494,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp75.512.211.076.582,00 dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp55.190.343.696.988,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan

pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp75.512.211.076.582,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp57.224.081.346.814,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp17.840.249.581.447,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp447.890.148.321,00

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.20 berikut ini.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	57.224.081.346.814,00	62.743.521.761.347,00
2.	Pendapatan Transfer	17.840.249.581.447,00	14.764.015.178.729,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	447.890.148.321,00	2.497.228.429.258,00
Jumlah		75.512.221.075.582,00	80.004.765.369.334,00

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp57.224.081.346.814,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 5.21 dibawah ini.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	37.869.523.288.157,00	36.993.767.605.109,00
2.	Retribusi Daerah-LO	600.652.382.495,00	638.522.364.164,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.349.649.931.704,00	2.747.365.676.149,00
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	16.404.255.744.458,00	22.363.866.115.925,00
Jumlah		57.224.081.346.814,00	62.743.521.761.347,00

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp62.743.521.761.347,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.519.440.414.533,00 atau 8,80%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.869.523.288.157,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.993.767.605.109,00 terjadi kenaikan sebesar Rp875.755.683.048,00 atau 2,37%. formula pendapatan pajak daerah LO menggunakan pendekatan ketetapan yaitu:

Pendapatan Pajak Daerah (LRA) + Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 + Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2017 – Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017 – Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018

Lebih rinci mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.22 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2017	Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.057.799.627.506,00	8.543.445.462.473,00	485.645.834.967,00	6,03
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.027.240.287.850,00	5.350.383.095.840,00	323.142.807.990,00	6,43
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.153.059.065.851,00	1.242.270.572.669,00	89.211.506.818,00	7,74
4	Pajak Air Tanah	99.949.788.632,00	105.926.065.400,00	5.976.276.768,00	5,98
5	Pajak Hotel	1.559.276.730.185,00	1.750.745.943.657,00	191.469.213.472,00	12,28
6	Pajak Restoran	2.753.947.684.404,00	3.147.389.472.507,00	393.441.788.103,00	14,29
7	Pajak Hiburan	757.371.096.241,00	830.890.831.192,00	73.519.734.951,00	9,71
8	Pajak Reklame	993.562.068.954,00	719.496.304.969,00	(274.065.763.985,00)	(27,58)
9	Pajak Penerangan Jalan	754.392.494.249,00	787.107.000.016,00	32.714.505.767,00	4,34
10	Pajak Parkir	486.556.221.556,00	511.229.235.567,00	24.673.014.011,00	5,07
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.292.893.702.125,00	4.716.264.998.268,00	(1.576.628.703.857,00)	(25,05)
12	Pajak Rokok	582.734.593.614,00	632.293.885.585,00	49.559.291.971,00	8,50
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.474.984.243.942,00	9.532.080.420.014,00	1.057.096.176.072,00	12,47
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		36.993.767.605.109	37.869.523.288.157	875.755.683.048	40,19

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.543.445.462.473,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.057.799.627.506,00, terjadi kenaikan sebesar Rp485.645.834.967,00 atau 6,03%. Rincian atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PKB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	8.553.632.204.643,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	120.778.375.616,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(130.965.117.786,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - LO		8.543.445.462.473,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2018 tetapi BDU sebanyak 2.687.145 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp3.315.628.535.900,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2018

REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG													
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA													
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR													
PERIODE 1 JANUARI 2014 S.D 31 DESEMBER 2018													
NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1.399	226.725.600	3.423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1.958	82.737.400	2.245	203.587.000	1.026	170.825.000	3.957	338.462.800	10.092	917.437.900
9	S E P E D A M O T O R	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.992.000	15.605	73.715.212.600
TOTAL		349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900
KET: KONDISI DATA PER 31 DESEMBER 2018													

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.350.383.095.840,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.027.240.287.850,00, terjadi kenaikan sebesar Rp323.142.807.990,00 atau 6,43%. Rincian atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN BBN KB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	5.350.625.602.850,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(242.507.010,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN BBN KB - LO		5.350.383.095.840,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.242.270.572.669,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.153.059.065.851,00, terjadi kenaikan sebesar Rp89.211.506.818,00 atau 7,74%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PBB KB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.244.763.661.522,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	498.611.602,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(2.991.700.455,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	
PENDAPATAN PBB KB - LO		1.242.270.572.669,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp105.926.065.400,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp99.949.788.632,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.976.276.768,00 atau 5,98%. Rincian atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAT - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	106.497.711.318,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	572.877.502.335,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(571.558.080.553,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(1.891.067.700,00)
PENDAPATAN PAT - LO		105.926.065.400,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.750.745.943.657,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.559.276.730.185,00, terjadi kenaikan sebesar Rp191.469.213.472,00 atau 12,28%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK HOTEL - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.745.809.882.074,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	33.190.873.113,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(28.252.114.684,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(2.696.846,00)
PENDAPATAN PAJAK HOTEL - LO		1.750.745.943.657,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.147.389.472.507,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.753.947.684.404,00, terjadi kenaikan sebesar Rp393.441.788.103,00 atau 14,29%. Rincian atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK RESTORAN - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	3.154.969.088.300,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	114.195.001.685,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(121.552.232.321,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(222.385.157,00)
PENDAPATAN PAJAK RESTORAN - LO		3.147.389.472.507,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31

Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp830.890.831.192,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp757.371.096.241,00 terjadi kenaikan sebesar Rp73.519.734.951,00 atau 9,71%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK HIBURAN - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	833.684.983.302,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	63.250.120.719,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(65.634.052.500,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(410.220.329,00)
PENDAPATAN PAJAK HIBURAN - LO		830.890.831.192,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp719.496.304.969,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp993.562.068.954,00 terjadi penurunan sebesar

Rp274.065.763.985,00 atau 27,58%. Rincian atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK REKLAME - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	1.014.794.778.877,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	517.740.620.967,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(503.074.271.677,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(309.964.823.198,00)
PENDAPATAN PAJAK REKLAME - LO		719.496.304.969,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Kompensasi merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp787.107.000.016,00. Apabila dibandingkan dengan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp754.392.494.249,00, terjadi kenaikan sebesar Rp32.714.505.767,00 atau 4,34%. Rincian atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PPJ - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	787.107.000.016,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	-
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	-
PENDAPATAN PAJAK PENERANGAN JALAN - LO		787.107.000.016,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp511.229.235.567,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp486.556.221.556,00 terjadi kenaikan sebesar Rp24.673.014.011,00 atau 5,07%. Rincian atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK PARKIR - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	512.750.980.634,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	13.138.036.049,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(14.659.781.113,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(3,00)
PENDAPATAN PAJAK PARKIR - LO		511.229.235.567,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.716.264.998.268,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.292.893.702.125,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.576.628.703.857,00 atau 25,05%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND BPHTB - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	4.708.906.353.021,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	61.633.149.480,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	483.596.000.000,00
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(54.274.504.233,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(483.596.000.000,00)
PENDAPATAN BPHTB - LO		4.716.264.998.268,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

Pendapatan diterima dimuka merupakan kelebihan penerimaan setoran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan diperhitungkan atau dikompensasi dengan periode atau masa pajak berikutnya.

I) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp632.293.885.585,00 Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp582.734.593.614,00 terjadi kenaikan sebesar Rp49.559.291.971,00 atau 8,50%. Rincian atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PAJAK ROKOK - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	632.293.885.585,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	-
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	-
PENDAPATAN PAJAK ROKOK - LO		632.293.885.585,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan LRA tahun 2018 ditambah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 (Saldo akhir piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2017 dikurangi dengan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017 (Saldo awal piutang pajak daerah) dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.532.080.420.014,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.474.984.243.942,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.057.096.176.072,00 atau 12,47%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PEND PBB P2 - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	8.893.076.195.170,00
2	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2018	7.546.420.987.419,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2017	-
4	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2017	(6.823.426.402.184,00)
5	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Des 2018	(83.990.360.391,00)
PENDAPATAN PBB P2 - LO		9.532.080.420.014,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Retur atas penerimaan tahun 2018 merupakan Retur Bank DKI di tahun 2018 atas penerimaan tahun 2018.

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terbit tahun 2018 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2018.

Kompensasi dan Pemindahbukuan pembayaran pajak daerah merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran SPPT tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp600.652.382.495,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp638.522.364.164,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp37.869.981.669,00 atau 6,30%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tergambar pada tabel 5.23.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2018	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2017
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum-LO	126.301.158.741,00	123.856.967.337,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	161.558.540.182,00	176.593.178.698,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	312.792.683.572,00	338.072.218.129,00
Jumlah		600.652.382.495,00	638.522.364.164,00

Penurunan Retribusi Daerah – LO sebesar 5,93% selaras dengan penurunan Retribusi Daerah – LRA sebesar 7,30%. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

- 1) Perubahan kebijakan mengenai retribusi daerah yang tidak dipungut lagi
- 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana sehingga tidak ada realisasi penerimaan di tahun berjalan

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka

tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2018	578.555.603.994,00
2	Piutang Retribusi 2018	102.162.148.291,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	129.350.690,00
	Penambahan 2018	698.990.159.172,00
6	Piutang Retribusi 2017	78.363.442.831,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	18.399.517.095,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	211.760.450,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	1.363.056.301,00
	Pengurangan 2018	98.337.776.677,00
	Jumlah	600.652.382.495,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp126.301.158.741,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp123.856.967.337,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.444.191.404,00 atau 1,94%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Umum - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2018	123.576.306.288,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2018	9.484.774.212,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
	Penambahan 2018	151.204.136.697,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum 2017	7.056.595.016,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	17.809.096.940,00

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2018
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	25.366.000,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	11.920.000,00
	Pengurangan 2018	24.902.977.956,00
	Jumlah	126.301.158.741,00

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp161.558.540.182,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp176.593.178.698,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp15.034.638.516,00 atau 9,31%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Usaha - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Usaha – LRA tahun 2018 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2018	153.805.132.448,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2018	56.803.813.534,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	129.350.690,00
	Penambahan 2018	210.738.296.672,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2017	48.309.778.260,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	590.420.155,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	186.394.450,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	93.163.625,00
	Pengurangan 2018	49.179.756.490,00
	Jumlah	161.558.540.182,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp312.792.683.572,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp338.072.218.129,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp25.279.534.557,00 atau 8,08%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2018. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasidengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2018 ditambah dengan

realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.27 sebagai berikut:

Tabel 5.27

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO TA 2018
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2018	301.174.165.258,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2018	35.873.560.545,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2018	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
	Penambahan 2018	337.047.725.803,00
6	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2017	22.997.069.555,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
8	Pendapatan Belum Disetor 2017	0,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	1.257.972.676,00
	Pengurangan 2018	24.255.042.231,00
	Jumlah	312.792.683.572,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.349.649.931.704,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 digambarkan pada tabel 5.28.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.947.297.020,00
2	PT Cemani Toka	1.821.164.800,00
3	PT Asuransi Bangun Askrida	4.193.318.807,00
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.332.688.151.077
Jumlah		2.349.649.931.704

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2018 sebesar Rp10.947.297.020,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 07 tanggal 8 Mei 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat

Nusantara atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp10.947.297.020. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2018 sebesar Rp1.821.164.800,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 02 tanggal 2 Juli 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Cemani Toka atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp1.821.164.800. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 3 Agustus 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2018 sebesar Rp4.193.318.807,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 5 tanggal 3 Mei 2018, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2017 adalah sebesar Rp4.193.318.807,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.332.688.151.077,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2018 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2018	Jumlah
1	PD Dharma Jaya	100%	13,573,292,813.00	-	13,573,292,813.00
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	100%	136,268,843,482.00	2,081,263,775.00	138,350,107,257.00
3	PD Pasar Jaya	100%	95,410,632,247.00	-	95,410,632,247.00
4	PD PAL Jaya	100%	43,862,650,931.00	2,665,177,359.00	46,527,828,290.00
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	38.80%	415,113,033,975.00	-	415,113,033,975.00
6	PT Food Station Tjipinang	99.84%	30,230,110,071.00	1,432,277.00	30,231,542,348.00
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50.00%	58,114,120,210.00	-	58,114,120,210.00
8	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26.25%	88,754,217,800.00	2,509,775,340.00	91,263,993,140.00
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72.00%	160,837,332,109.00	-	160,837,332,109.00
10	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	99.99%	22,122,170,744.00	443,580,634.00	22,565,751,378.00
11	PT Bank DKI Jakarta	99.98%	800,126,391,044.00	108,384,812,532.00	908,511,203,576.00
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99.99%	-	1,213,254,507.00	1,213,254,507.00
13	PT Transportasi Jakarta	99.36%	342,339,169,058.00	-	342,339,169,058.00
14	PT Penjamin Kredit Daerah	98.75%	8,620,907,481.00	15,982,688.00	8,636,890,169.00
	JUMLAH		2,215,372,871,965.00	117,315,279,112.00	2,332,688,151,077.00

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD–LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp16.404.255.744.458,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018, digambarkan pada tabel 5.29.

Tabel 5.29
Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2018	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2017	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.076.000.000	-	2.076.000.000	-
b	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	516.632.395.885	799.694.002.773	(283.061.606.888)	-35,40
c	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	42.577.718.462	26.326.630.704	16.251.087.758	61,73
d	Hasil Lelang Titik Reklame	-	2.579.550.000	(2.579.550.000)	-100,00
e	Klaim Asuransi Aset	50.000.000	343.291.403	(293.291.403)	-85,44
f	Jasa Giro	169.218.079.456	179.509.837.783	(10.291.758.327)	-5,73
g	Pendapatan Bunga	813.873.632.037	805.784.446.009	8.089.186.028	1,00
h	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	41.124.774.292	35.562.380.195	5.562.394.097	15,64
i	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.652.059.248	1.396.711.354	255.347.894	18,28
j	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	10.109.952.585.387	16.372.673.038.695	(6.262.720.453.308)	-38,25
k	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	4.869.882.433	9.844.263.110	(4.974.380.677)	-50,53
l	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	2.625.080.481.147	2.383.552.267.843	241.528.213.304	10,13
m	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	11.153.969.094	7.669.362.715	3.484.606.379	100,00
N	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	28.877.440.403	22.236.594.925	6.640.845.478	100,00
o	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	4.405.975.172	7.542.286.049	(3.136.310.877)	-41,58
p	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	10.238.278.051	10.539.526.274	(301.248.223)	-2,86
q	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	54.904.367.739	438.499.976	54.465.867.763	100,00
r	Pendapatan Lain-lain	200.026.171.624	213.899.632.088	(13.873.460.464)	-6,49
s	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	53.102.581.874	20.972.361.672	32.130.220.202	153,20
t	Pendapatan Sanksi Pajak	1.078.299.285.842	943.112.476.370	135.186.809.472	14,33
u	Pendapatan Denda Retribusi	28.501.020.997	215.129.021.645	(186.628.000.648)	-86,75
v	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	40.724.836.219	12.698.511.813	28.026.324.406	220,71
w	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	566.914.209.097	292.361.422.529	274.552.786.568	93,91
	Jumlah	16.404.255.744.458	22.363.866.115.925	(5.959.610.371.467)	-26,65

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp22.363.866.115.925,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.959.610.371.467 atau 26,65%. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2018, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.076.000.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp00,00, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp2.076.000.000,00, atau 100,00%, pendapatan tersebut merupakan hasil penjualan Brandgang.

b. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga–LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp516.632.395.885,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp799.694.002.773,00 dimana pada CaLK Tahun 2017 nilai tersebut dicatat pada Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), maka terjadi penurunan sebesar Rp521.034.419.427,00 atau 35,40%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan

LO maka Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	349.854.873.045,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	280.089.700.841,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	280.089.700.841,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	113.312.178.001,00
6	Koreksi Kurang Catat Lainnya	-
7	Pengurangan 2018	113.312.178.001,00
Jumlah (1+4-7)		516.632.395.885,00

c. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO merupakan pendapatan atas hasil sewa asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp42.577.718.462,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp26.326.630.704,00, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp16.251.087.758,00 atau 61,73%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	51.257.146.349,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	20.575.244.008,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	50.961.304.665,00
4	Penambahan 2018	71.536.548.673,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	20.524.241.484,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	59.691.735.076,00
7	Pengurangan 2018	80.215.976.560,00
Jumlah (1+4-7)		42.577.718.462,00

d. Hasil Lelang Titik Reklame – LO

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO diakui berdasarkan nilai Surat Perintah Setor atas hasil lelang titik reklame.

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.579.550.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.579.550.000,00 atau 100,00%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Hasil Lelang Titik Reklame – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	-
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	6.978.900.000,00
4	Penambahan 2018	6.978.900.000,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	6.978.900.000,00
7	Pengurangan 2018	6.978.900.000,00
Jumlah (1+4-7)		0,00

e. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi asset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp50.000.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp343.291.403,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp293.291.403,00 atau 85,44%.

f. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatandana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2018.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp169.218.079.456,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp179.509.837.783,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.291.758.327,00 atau 5,73%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Jasa Giro – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	169.225.058.708,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	6.979.252
6	Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2018	0,00
7	Koreksi kurang Catat Lainnya	0,00
8	Pengurangan 2018	6.979.252
Jumlah (1+4-8)		169.218.079.456,00

g. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatandana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2018 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp813.873.632.037,00, jika dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp 805.784.446.009,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.089.186.028,00 atau 1%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Bunga-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	809.935.247.643,51
2	Piutang Per 31 Des 2018	22.068.268.485,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
4	Penambahan 2018	22.068.268.485,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	18.129.884.092,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
7	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka	0
8	Pengurangan 2018	18.129.884.092,00
Jumlah (1+4-8)		813.873.632.037,00

h. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2018.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.124.774.292,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp35.562.380.195,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.562.394.097,00 atau 15,64%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi- LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	41.233.324.291,52
2	Piutang Per 31 Des 2018	16.966.387.096,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-
4	Penambahan 2018	16.966.387.096,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	17.074.937.096,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
7	Pengurangan 2018	17.074.937.096
Jumlah (1+4-7)		41.124.774.291,52

i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.652.059.248,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp1.396.711.354,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 255.347.894 atau 18,28%.

j. Perolehan Aset Lainnya yang Sah – LO

Perolehan Aset Lainnya yang Sah LO mencakup penerimaan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO, Aset Fasos Fasum – LO, dan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO dari pihak ketiga.

1) Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO

Pendapatan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO tahun 2018 sebesar Rp10.553.000.000,00.

2) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.513.889.040.191,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp16.372.673.038.695,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.858.783.998.504,00 atau 35,78%.

3) Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.914.209.097,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp292.361.422.529,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp274.552.786.568,00 atau 93,91 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	-
2	Pendapatan non LRA	255.932.424.917
3	Piutang Per 31 Des 2018	2.357.689.856.034,00
4	Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	0,00
5	Penyelesaian Piutang KLB/KDB	583.567.717.492,00

No	Uraian	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO
6	Penambahan	3.197.189.998.443,00
7	Piutang Per 31 Desember 2018	2.630.275.789.346,00
8	Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	0,00
9	Pengurangan	2.630.275.789.346,00
Jumlah (1+6-9)		566.914.209.097,00

k. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.869.882.433,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp9.844.263.110,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.974.380.677,00 atau 50,53%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	4.869.882.433,24
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	-
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
7	Pengurangan 2018	0,00
Jumlah (1+4-7)		4.869.882.433,24

l. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.625.080.481.147,00, jika dibandingkan dengan realisasi

Pendapatandari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp2.383.552.267.843,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp241.528.213.304,00 atau 10,13%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	2.480.030.816.968,69
2	Piutang Per 31 Des 2018	630.231.231.124,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	4.480.948.754,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	62.932.171.508,00
5	Transfer Keluar Piutang Tahun 2018 ke SKPD Lain	4.700.594.000,00
6	Penambahan 2018	702.344.945.386,00
7	Pendapatan BLUD yang Belum Disahkan per 31 Desember 2018	0,00
8	Piutang Per 31 Desember 2017	513.209.835.958,00
9	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	4.858.501.815,00
10	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	34.526.349.435,00
11	Koreksi Kurang Lainnya	0,00
12	Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	4.700.594.000,00
13	Pengurangan 2018	557.295.281.208,00
Jumlah (1+6-13)		2.625.080.481.146,69

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan

tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2016 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's.

m. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.405.975.172,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp7.542.286.049,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.136.310.877,00 atau 41,58%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	4.070.844.087,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	49.456.389.986,00
	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
4	Penambahan 2018	49.456.389.986,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	49.121.258.901,00
7	Pengurangan 2018	49.121.258.901,00
Jumlah (1+4-7)		4.405.975.172,00

n. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan

atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2018.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.238.278.051,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp10.539.526.274,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp301.248.223,00 atau 2,86%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2018	11.271.572.127,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0
4	Penambahan 2018	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	1.033.294.076,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0
7	Pengurangan 2018	1.033.294.076,00
Jumlah (1+4-7)		10.238.278.051,00

o. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp53.102.581.874,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp20.972.361.672,00

maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.130.220.202,00 atau 153,20%.

p. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPKDB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.078.299.285.842,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp943.112.476.370,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp135.186.809.472,00 atau 14,33%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Sanksi Pajak – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Sanksi Pajak – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	363.654.759.897,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	906.938.992.628,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	472.041.946.042
4	Penambahan 2018	1.378.980.938.670,00
5	Piutang Per 31 Desember 2017	664.336.412.725,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0
7	Pengurangan 2018	664.336.412.725,00
Jumlah (1+4-7)		1.078.299.285.842,00

q. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusidi hitung dari jatuh tempo sejak SKRD ditetapkan.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.501.020.997,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar

Rp215.129.021.645,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp186.628.000.648,00 atau 86,75%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Retribusi – LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Denda Retribusi - LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2018	19.697.324.067,00
2	Piutang Per 31 Des 2018	16.599.820.113,00
3	Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018	0,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	0,00
5	Penambahan	16.599.820.113,00
6	Piutang Per 31 Desember 2017	7.251.875.868,00
7	Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017	36.195.537
	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	508.051.778
8	Pengurangan	7.796.123.183,00
Jumlah (1+5-8)		28.501.020.997,00

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp17.840.249.581.447,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp14.764.015.178.729,00 maka naik sebesar Rp3.076.234.402.718,00 atau 20,84%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2018 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer–LRA ditambah Piutang Tahun 2018 serta pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018, Piutang Tahun 2017, rincian digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan -LRA Tahun 2018	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2017	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2018	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2018	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2018	Nilai Pendapatan- LO per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3-4+5+6-7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	17.855.177.072.924	2.291.576.829.949	348.081.544.427	2.250.946.397.380	322.378.603.335	17.840.249.581.447
1.1	Bagi Hasil Pajak	15.026.197.590.222	2.253.644.677.181	383.092.209.106	2.193.108.210.440	322.378.603.335	15.026.374.729.252
a	Pajak Bumi dan Bangunan	64.657.549.974	1.406.606.467	1.406.606.467	177.139.030	0	64.834.689.004
b	Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 (WOPDN) dan PPh pasal 21)	14.961.540.040.248	2.252.238.070.714	381.685.602.639	2.192.931.071.410	322.378.603.335	14.961.540.040.28
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	183.375.491.488	37.932.152.768	(35.010.664.679)	57.838.186.940	0	168.270.860.981
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	0	(22.048.169)	22.048.169	0	0
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	0	(69.142)	69.142	0	0
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	0	(73.279)	73.279	0	0
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	701.234.520	0	(99.237.107)	99.237.107	0	701.234.520
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	130.238.555.574	0	(49.964.488.561)	39.617.650.148	0	119.891.717.161
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	52.435.701.394	37.932.152.768	15.075.251.579	18.099.109.095	0	47.677.909.300
1.3	Dana Alokasi Khusus	2.645.603.991.214	0	0	0	0	2.645.603.991.214

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.250.946.397.380,00, hal ini tertuang dalam penjelasan CaLK pada akun Piutang Dana Transfer.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp447.890.148.321,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp41.283.071.898,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp12.228.000.000,00;
3. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp64.076.485.471,00; dan

4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp330.302.590.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Penerima	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	293.355.040.312
2	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	9.167.300
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	58.391.355
4	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	114.273.830
5	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	37.616.755
6	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	125.096.895
7	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	203.912.500
8	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	1.440.759.936
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	942.066.048
10	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	1.155.958.174
11	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	698.203.605
12	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	333.571.920
13	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	517.310.825
14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	370.427.802
15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	271.572.678
16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	660.884.235
17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	748.685.850
18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	398.720.245
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	531.877.995
20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	122.921.535
21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	10.604.880
22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO)	Obat-obatan	40.128.000
23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	118.532.040
24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	3.495.000
25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	581.780.430
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	481.306.320
27	Sudin Kesehatan - Jakpus	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM)	Obat-obatan	320.597.166
28	Sudin Kesehatan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	430.511.588
29	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	RSPI Sulianto Saroso	Obat-obatan	102.000
30	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan	14.775.000
31	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat Kontrasepsi	13.156.956.733
32	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	13.047.342.000
	Jumlah Hibah Persediaan			330.302.590.952

Pendapatan tersebut tidak termasuk pendapatan hibah dalam bentuk jasa. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani 14 PKS CSR dalam bentuk jasa sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal PKS	Nama Perusahaan	Bentuk CSR	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Nomor 1170/-072.26 dan Nomor 34.SP.II.2018 Tanggal 09 Februari 2018	PD Dharma Jaya	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu	s.d 31 desember 2018
2	Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PKS/DIR/III/2018 dan Nomor 1169/-1.846 Tanggal 02 Maret 2018	PT Bank DKI	Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang berbasis Teknologi Perbankan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2019
3	Perjanjian Kerjasama Nomor 1287/-1.856, Nomor 971/-1.856.12, Nomor 1702/-1.856, Nomor 484/-1.856.12, Nomor 1422/-1.856.1, Nomor 991/-1.846.5, Nomor 056/PKS/DD.Corsec-Legal/V/2018 dan Nomor 122/PER/ACT-DKI/V/2018 Tanggal 15 Mei 2018	Yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama dengan Masyarakat di Provinsi Darerah Khusus Ibukota Jakarta	2 bulan
4	Perjanjian Kerjasama Nomor 2045/-071.3 dan Nomor 008/EXT-MKT/PSI/VII/18 Tanggal 31 Juli 2018	PT. Propan Raya I.C.C.	Program Penataan Kawasan Kota Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Bulan
5	Perjanjian Kerjasama Nomor 4036/-1.853.124 dan Nomor 027/bbi-event/07.08/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	Yayasan Belantara Budaya Indonesia	Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara Kolosal Pada Cara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018	1 Bulan
6	Perjanjian Kerjasama Nomor 020.OP/PKS/LGL-AW/GC.VII/2018 dan Nomor 3612/-072.25 Tanggal 02 Juli 2018	PT. Artisan Wahyu (Gandaria City)	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City dan Sekitarnya	5 Tahun
7	Perjanjian Kerjasama Nomor 1850/-072 dan Nomor PK-049/CSL-LN/DKI/V/18 Tanggal 02 Mei 2018	PT. Link Net, Tbk	Penyelenggaraan Siaran dan Isi Siaran Balai Kota Channel	1 Tahun
8	Perjanjian Kerjasama Nomor 841/-1.795.221 dan Nomor 253/YDS/L/IX/18 Tanggal 20 September 2018	Yayasan Dharma Suci	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan 3, Pluit Mas, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Dministrasi Jakarta Utara	5 Tahun
9	Perjanjian Kerjasama Nomor 16134/-072 dan Nomor SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PK S/X/2018/430 Tanggal 04 Oktober 2018	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
10	Perjanjian Kerjasama Nomor 16135/-072 dan Nomor SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PK S/X/2018/430 Tanggal 04 Oktober 2018	PT. Midi Utama Indonesia. Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun

No	Nomor dan Tanggal PKS	Nama Perusahaan	Bentuk CSR	Jangka Waktu
11	Perjanjian Kerjasama Nomor 21612/-072 dan Nomor 02/PK/PP.PERSI/XII/ 2018 Tanggal 19 Desember 2019	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air di Sekolah Dasar	1 Tahun
12	Perjanjian Kerjasama Nomor 002/Dir-PJA/X/2018 dan Nomor 4106/-072 Tanggal 10 Oktober 2018	PT. Pembangunan Jaya Ancol	Penanganan Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Penyediaan Saranan dan Prasarana di Taman Impian Jaya Ancol	1 Tahun
13	Perjanjian Kerjasama Nomor 8509/-072 dan Nomor 14/SK/PPT.WJ&S/VI/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Perhimpunan Purnakaryawan Timah Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra Putri/Cucu Kandung, Karyawan/Pensiunan Timah Dengan Sekolah-sekolah Negeri yang berdomisili Di wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru/Cilandak	1 Tahun
14	Perjanjian Kerjasama Nomor 8503/-072 dan Nomor SPERJAM/51/V/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma	Penyelenggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra Putri Prajurit dan PNS TNI AU Dengan Sekolah-sekolah Negeri yang berdomisili Di wilayah Pangkalan TNI Au Halim Perdanakusuma	1 Tahun

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan,

Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2018 dan 2017 digambarkan pada tabel 5.30.

Tabel 5.30
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total Beban 2018	Total Beban 2017
Beban Operasi		55.190.343.696.988,00	47.187.863.334.031,00
1	Beban Pegawai	21.790.265.451.084,00	20.030.162.330.291,00
2	Beban Persediaan	3.443.868.813.944,00	2.577.052.681.914,00
3	Beban Barang	1.974.450.282.534,00	1.520.283.869.623,00
4	Beban Jasa	9.275.206.639.240,00	6.853.460.595.172,00
5	Beban Pemeliharaan	2.253.167.445.490,00	1.966.112.890.870,00
6	Beban Perjalanan Dinas	186.127.713.360,00	79.453.113.003,00
7	Beban Bunga	44.419.036.090,00	43.546.891.819,00
8	Beban Subsidi	2.699.074.197.860,00	1.426.198.754.150,00
9	Beban Hibah	1.515.880.172.060,00	1.124.653.370.578,00
10	Beban Bantuan Sosial	4.070.194.452.506,00	3.202.680.640.000,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.282.078.057.209,00	6.049.676.338.670,00
12	Beban Penyisihan Piutang	73.960.652.919,00	1.580.674.532.436,00
13	Beban Lain-lain	581.650.782.692,00	733.907.325.505,00
Beban Transfer		346.273.033.100,00	344.121.138.120,00
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	340.952.047.100,00	342.488.546.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.320.986.000,00	1.632.592.120,00
Jumlah Beban		55.536.616.730.088,00	47.531.984.472.151,00

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2018 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya antara lain utang tahun anggaran 2018 dan 2017, belanja dibayar dimuka tahun 2018 dan 2017, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2017, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi serta kapitalisasi belanja ke aset tetap.

Beban operasi tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp55.190.343.696.988,00 dan Rp47.187.863.334.031,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp21.790.265.451.084,00 dan Rp20.030.162.330.291,00. Beban Pegawai di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai 2018 tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.360.676.209.950,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.884.179.723.021,00, Satpol PP sebesar Rp939.633.953.816,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp700.166.177.955,00 dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp598.297.420.517,00.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp3.443.868.813.944,00 dan Rp2.577.052.681.914,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan pakai habis selama tahun 2018.

Nilai Beban persediaan tahun anggaran 2018 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2018.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya yaitu berdasarkan nilai utang pihak ketiga tahun 2018 dan 2017, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke persediaan, reklasifikasi belanja non persediaan ke persediaan dan lebih/kurang catat persediaan awal.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD RSUD Koja sebesar Rp135.636.573.123,00, RSUD Cengkareng sebesar Rp120.488.209.523,00, BLUD RSUD Budhi Asih Rp87.363.571.133,00, BLUD RSUD Pasar Rebo sebesar Rp86.198.292.442,00, BLUD RSUD Tarakan sebesar Rp51.647.299.157,00 dan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat sebesar Rp44.655.267.580,00.

c. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.974.450.282.534,00 dan Rp1.520.283.869.623,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan setelah dikurangi dengan belanja barang dibayar dimuka. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp630.490.840.504,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp68.582.326.918,00, BLUD RS Tarakan sebesar Rp46.292.136.721,00, BLUD RS Cengkareng sebesar Rp33.966.287.952,00, dan BLUD RSUD Pasar Minggu sebesar Rp26.441.303.063,00. Beban barang tahun anggaran 2018 dan 2017 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban barang non-BLUD	1.429.186.015.811,00	1.007.940.657.006,00
2	Beban barang BLUD	545.264.266.723,00	512.343.212.617,00
Total		1.974.450.282.534,00	1.520.283.869.623,00

Dalam beban barang non-BLUD tersebut termasuk barang ekstrakomtabel pada beberapa SKPD di antaranya berupa kursi rapat pada Sekretariat DPRD senilai Rp71.060.000,00.

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp9.275.206.639.240,00 dan Rp6.853.460.595.172,00. Beban jasa di antaranya terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultasi, dan beban sewa. Beban Jasa tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.460.701.897.243,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp942.432.582.546,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp338.529.998.567,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp325.679.386.158,00 dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp155.570.079.283,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp2.253.167.445.490,00 dan Rp1.966.112.890.870,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp258.660.258.047,00, Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp239.627.737.034,00, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan sebesar Rp126.986.638.368, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp106.884.835.463,00 dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp83.462.502.810,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp186.127.713.360,00 dan Rp79.453.113.003,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp91.591.195.272,00, Biro Administrasi Sekretariat Daerah

sebesar Rp56.388.604.209,00, Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp17.100.209.590,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp5.612.000.000,00 dan Inspektorat sebesar Rp2.575.500.000,00.

g. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp44.419.036.090,00 dan Rp43.546.891.819,00 terdapat di PPKD. Beban bunga merupakan beban sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

h. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp2.699.074.197.860,00 dan Rp1.426.198.754.150,00 terdapat pada PPKD. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2018 dan 2017. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	PT Transjakarta	2.121.589.296.860,00	1.238.414.774.150,00
2	PD Dharma Jaya	252.233.315.000,00	180.746.370.000,00
3	PT Food Tjipinang Station	325.251.586.000,00	7.037.610.000,00
Total		2.699.074.197.860,00	1.426.198.754.150,00

i. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.515.880.172.060,00 dan Rp1.124.653.370.578,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	661.413.315.016,00	365.090.358.913,00
2	Kelompok/Anggota Masyarakat	5.250.000.000,00	8.779.790.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	136.050.320.000,00	127.563.200.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/S ATAP Swasta	119.030.600.000,00	122.370.800.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	79.498.360.000,00	82.115.040.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	237.227.680.000,00	229.031.040.000,00
7	Belanja Hibah BOP Madrasah Ibtidaiyah Negeri	8.848.338.023,00	9.774.864.000,00
8	Belanja Hibah BOP Madrasah Tsanawiyah Negeri	33.745.069.007,00	36.350.820.000,00
9	Belanja Hibah BOP Madrasah Aliyah Negeri	70.164.398.356,00	74.411.040.000,00
10	Belanja Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70.922.949.836,00	56.591.400.000,00
11	Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	1.245.162.259,00	12.575.017.665,00
12	Hibah selain aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	6.451.043.990,00	-
13	Belanja barang jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	86.032.935.573,00	-
Total		1.515.880.172.060,00	1.124.653.370.578,00

Penganggaran dan pembayaran hibah dana BOS sebagai Belanja Langsung oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan belanja hibah oleh PPKD.

Terkait mekanisme penyaluran Dana BOS pada setiap sekolah dimulai dari pemberian dana hibah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada BUD, dilanjutkan dengan pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) berdasarkan data Dapodik sebagai dasar pengajuan Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan (SP-TUP). Setelah disetujui oleh BPKD, Dinas Pendidikan

membuat SPP dan SPM TUP untuk kemudian diterbitkan SP2D BOS dan dana dicairkan ke rekening masing-masing sekolah melalui *Cash Management System* Bank DKI. Saldo dana BOS akhir Tahun tersimpan di rekening sekolah.

j. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp4.070.194.452.506,00 dan Rp3.202.680.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Bantuan Sosial pada PPKD	4.063.970.052.586	3.202.680.640.000
2	Beban Bantuan Sosial pada SKPD	6.224.399.920	-
Total		4.070.194.452.506	3.174.521.640.000

Beban bantuan sosial pada SKPD antara lain terdapat di Sudin Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Jakarta Timur sebesar Rp1.105.808.000 dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp885.940.000,00 berupa etalase dan meja display untuk fasilitas sarana dagang PKL dan pengembangan UMKM di Jakarta.

Beban bantuan sosial pada PPKD terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.121.500.000,00	2.140.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	100.318.152.586,00	-
3	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.898.584.400.000,00	3.174.521.640.000,00

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
4	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	62.946.000.000,00	26.019.000.000,00
Total		4.063.970.052.586,00	3.202.680.640.000,00

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang diberikan kepada individu/siswa/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

k. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp7.282.078.057.209,00 dan Rp6.049.676.338.670,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Penyusutan	7.246.499.406.563,00	6.009.944.297.996,00
2	Beban Amortisasi	35.578.650.646,00	39.732.040.674,00
Total		7.282.078.057.209,00	6.049.676.338.670,00

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.246.499.406.563,00 dan Rp6.009.944.297.966,00 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Peralatan dan Mesin	3.209.251.548.843,00	2.662.847.647.001,00
2	Gedung dan Bangunan	1.596.280.446.901,00	1.230.580.691.782,00
3	Jaringan. Irigasi. dan Jaringan	2.121.433.994.203,00	1.972.709.946.852,00
4	Aset Tetap Lainnya	195.188.120.028,00	34.624.497.335,00
5	Aset Lainnya	124.345.296.588,00	109.181.515.026,00
Total		7.247.811.661.885,00	6.099.944.297.996,00

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp951.784.835.128,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp358.017.247.301,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp344.447.553.422,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp247.769.810.948,00, Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp190.781.394.073,00 dan Sudin Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp148.221.735.669,00.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp35.578.650.646,00 dan Rp39.732.040.674,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Oracle, Operating System Windows*, dan hak paten. Beban Amortisasi tersebut antara lain terdapat

di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp9.070.326.871,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.590.280.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.096.265.584,00, BLUD RSUD Koja sebesar Rp594.148.300,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp408.692.000,00.

I. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp73.960.652.919,00 dan Rp1.580.674.532.436,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut di antaranya terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 16.908.874.228,00, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sebesar Rp 11.082.949.311,00 dan RSUD Koja sebesar Rp5.193.714.719,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp581.650.782.692,00 dan Rp733.907.325.505,00. Beban lain-lain tahun 2018 salah satunya merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp514.998.358.845,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2018 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee*. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2018	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	PD Dharma Jaya	0.00	1.016.835.812,00	1.016.835.812,00
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	0.00	1,00	1,00
3	PD Pasar Jaya	0.00	27.334.171.522,00	27.334.171.522,00
4	PD PAL Jaya	0.00	13.747.529.384,00	13.747.529.384,00
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	0.00	2.353.389.453,00	2.353.389.453,00
6	PT Food Station Tjipinang	0.00	1.297.956.959,00	1.298.839.700,00

No.	Nama	Rugi Tahun 2018	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0.00	22.027.839,00	22.027.839,00
8	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	0.00	2.710.361.952,00	2.710.361.952,00
9	PT Jakarta Propertindo	0.00	1.798.032,00	1.798.032,00
10	PT Bank DKI Jakarta	0.00	311.898.596.523,00	311.898.596.523,00
11	PT Jakarta Tourisindo	15.356.140.004,00	0.00	15.356.140.004,00
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta	138.708.232.336,00	241.736.019,00	138.949.968.355,00
13	PT Penjamin Kredit Daerah	0.00	309.583.009,00	309.583.009,00
	Jumlah	154.064.372.340,00	360.933.986.505,00	514.998.358.845,00

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. termasuk kepada partai politik. sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp346.273.033.100,00 dan Rp344.121.138.120,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	340.952.047.100,00	342.488.546.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.320.986.000,00	1.632.592.120,00
Total		346.273.033.100,00	344.121.138.120,00

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp340.952.047.100,00 diberikan kepada:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	60.000.000.000,00
2.	Pemerintah Kabupaten Bogor	13.297.740.000,00
3.	Pemerintah Kota Bekasi	194.800.781.100,00
4.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	8.107.960.000,00
5.	Pemerintah Kota Bogor	10.000.000.000,00
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	10.000.000.000,00
7.	Pemerintah Kota Depok	25.545.566.000,00
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	19.200.000.000,00
Jumlah		340.952.047.100,00

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.320.986.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2. Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	247.340.400,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	312.190.800,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	509.280.000,00
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	1.478.211.600,00
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4. Jakarta 10310	451.465.200,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	710.966.400,00
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun. Jakarta 13220	433.114.800,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	207.340.800,00
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun. Jakarta Timur 13220	428.407.200,00
10.	DPW Partai Persatuan Pembangunan Jl. I Gusti Ngurah Rai No.164. RT.10/RW.13. Klender. Duren Sawit. Jakarta Timur. 13470	542.668.800,00
Jumlah		5.320.986.000,00

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2017 Rp177.692.000.000,00 merupakan surplus yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT. Pada tahun 2018 Surplus Non Operasional adalah sebesar Rp19.953.940.039,00 yang merupakan surplus atas penjualan aset tetap yang dihapus berupa tanah, peralatan dan mesin dan aset rusak berat.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2017 sebesar Rp43.584.121.074,00 merupakan defisit yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2018 Defisit Non Operasional adalah sebesar Rp8.159.968.367,00 yang merupakan penjualan aset tetap yang dihapus berupa gedung dan bangunan.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2018 sebesar negatif Rp1.002.079.618,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.002.079.618,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.002.079.618,00 dan Rp16.270.940.046,00. Beban Luar Biasa tahun 2018 merupakan beban atas restitusi pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Saldo Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2017 adalah Rp1.731.477.832,00 dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga atas restitusi pajak dan retribusi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.924.529.559,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.2.1.1.3. Saldo Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2018 adalah Rp809.027.891,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.2.1.6.b.

5.3.4 Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.975.604.346.494,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	75.512.221.076.582,00	
Beban	(55.190.343.696.988,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		19.975.604.346.494,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		11.793.971.672,00
Pos Luar Biasa		<u>(1.002.079.618,00)</u>
Surplus – LO		19.986.396.238.548,00

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2018. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp486.443.850.019.158,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah Rp461.922.919.162.697,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.534.534.617.913,00, yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp10.743.329.019.572,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp94.595.347.482,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.5.1.1.5 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat Piutang Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp36.650.455.780,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp7.858.975.444,00;
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp50.085.916.258,00
- 2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp46.232.880.646,00.
- 3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi sebesar Rp14.347.879.942,00, terdiri dari:
 - a. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Permanen Rp14.347.741.747,00
 - b. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir Rp12.000,00
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen atas Penyisihan Dana Bergulir Rp126.195,00
- 4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp5.441.904.172.295 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3.
- 5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp4.583.025.220.614,00 terdiri dari:
 - (a).Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp4.536.221.152.339,00;
 - (b).Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp46.804.068.275,00
- 6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal utang tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp2.220.038.341,00.
- 7) Penambahan ekuitas atas koreksi lain-lain sebesar Rp561.003.480.252,00, yang terdiri dari:

- a. Koreksi atas penyisihan piutang yang telah terbayar sebesar Rp222.121.819.198,00;
- b. Koreksi kurang catat pendapatan tahun sebelumnya Rp527.200.000,00
- c. Koreksi Uang Muka Kerja (UMK) BLUD Rp889.670,00
- d. Koreksi lebih catat penyisihan pendapatan diterima di muka tahun 2017 sebesar Rp336.068.720.000,00
- e. Koreksi atas penyisihan dana bergulir karena pelunasan tahun 2018 sebesar Rp1.191.005.614,00
- f. Setoran Kas Pembubaran BLUD tahun 2017 sebesar Rp1.093.845.770,00

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.208.794.401.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp625.907.842.842,00 terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Piutang Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp549.292.102.818,00;
 - b. Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp812.882.674,00.
 - c. Koreksi atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp14.000.000,00
 - d. Koreksi atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp75.788.857.350,00
- 2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp712.143.911,00.
- 3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp4.305.598.330.777, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp4.241.678.902.408,00
 - b. Koreksi Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp63.919.428.369,00.

- 4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp945.003.741.560,00.
- 5) Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban atas utang tahun 2017 sebesar Rp3.757.475.422,00
- 6) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp327.985.273.811,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp 11.000.000,00;
 - b. Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp1.093.845.770,00;
 - c. Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp322.378.603.335,00;
 - d. Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2017 Rp2.887.379.944,00.
 - e. Koreksi kurang catat Pendapatan Pajak - LO Rp752.200.000,00
 - f. Koreksi Saldo Awal BOS Rp335.225.651,00;
 - g. Koreksi atas selisih kurs belum teralisasi untuk saldo rekening vallas antara kurs nilai tengah BI per 31 Desember 2018 Rp527.019.111,00.

3. Surplus/Defisit – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.986.396.238.548,00.

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.040.179.468.660,00,00 dan Rp12.412.915.459.306,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Kas Daerah	9.037.618.101.920,00	12.402.525.459.503,00
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	408.887.594,00	0,00
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	465.213.876,00
4	Kas dari Jaminan Bank Garansi	2.152.479.146,00	9.924.785.927,00
Jumlah		9.040.179.468.660,00	12.412.915.459.306,00

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 4 (empat) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.037.618.101.920,00 dan Rp12.402.525.459.503,00 tersaji pada tabel 5.31.

Tabel 5.31

Kas Daerah

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Rekening Bank	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-01575-9)	2.013.068.658.079,00	1.443.853.095.932,00
2	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	1.495.890.428,00	0,00
3	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	172.873.458.057,00	166.998.143.810,00
4	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	75.227.930.709,00	66.178.859.403,00
5	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	44.508.614.130,00	86.699.376.185,00
6	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	144.809.678.965,00	221.550.772.869,00
7	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	77.094.286.966,00	108.808.642.345,00
8	Bank DKI (Rek. 108-02-01605-4)	328.758.722.767,00	629.055.701.113,00
9	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	20.210.480.932,00	17.084.185.527,00
10	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	36.372.453.721,00	1.464.984.311.707,00
11	Bank DKI (Rek. 108-02-71575-1)	135.885.950.960,00	36.407.531.415,00
12	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	53.358.518.083,00	0,00
13	Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3)	62.592.500,00	0,00
14	Bank DKI (Rek. 201-02-21575-7)	394.733.481,00	0,00
15	Bank DKI (Rek. 303-02-51575-3)	7.820.000,00	0,00
16	Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3)	734.764.592,00	0,00
17	Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6)	10.147.120,00	0,00
18	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	41.135.631.281,00	1.754.945.500.366,00
19	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	99.620.980.032,00	96.006.803.259,00
20	BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8)	16.916.222.669,00	173.148.975.762,00
21	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	11.071.845.847,00	414.468.811.937,00
22	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	44.762.307.166,00	133.899.808.377,00
23	BTN (Rek. 00014-01-30-001756-6)	64.236.413.435,00	333.434.939.496,00
24	Deposito Bank DKI (150692)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
25	Deposito Bank DKI (101495)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
26	Deposito Bank DKI (101672)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00

No	Rekening Bank	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
27	Deposito Bank DKI (101676)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
28	Deposito Bank DKI (70228-560-877)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
29	Deposito Bank DKI (118 7601)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
30	Deposito Bank DKI (118 7781)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
31	Deposito Bank DKI (70128-102-293)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
32	Deposito Bank DKI (108-25-03397-4)	0,00	500.000.000.000,00
33	Deposito Bank DKI (70128-102-528)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
34	Deposito Bank DKI (101-25-121981)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
35	Deposito Bank DKI (108-25-03613-2)	500.000.000.000,00	0,00
36	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	220.000.000.000,00	220.000.000.000,00
37	Deposito Bank BRI (0019-01-015203-40-2)	0,00	400.000.000.000,00
38	Deposito Bank BRI (0019-01-016212-40-4)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
39	Deposito Bank BRI (0019-01-016395-40-6)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
40	Deposito Bank BRI (0019-01-017168-40-4)	0,00	400.000.000.000,00
41	Deposito Bank BRI (0019-01-017659-40-5)	300.000.000.000,00	0,00
42	Deposito Bank BRI (0019-01-017736-40-1)	200.000.000.000,00	0,00
43	Deposito Bank BRI (0019-01-017918-40-1)	200.000.000.000,00	0,00
44	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
45	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00
46	Deposito Bank Mandiri (103-02-0517686-6)	0,00	100.000.000.000,00
47	Deposito Bank Mandiri (103-02-0520106-0)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
48	Deposito Bank Mandiri (103-02-0541807-8)	200.000.000.000,00	0,00
49	Deposito Bank BTN (00014-01-40-023870-3)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
50	Deposito Bank BTN (00014-01-40-027994-5)	100.000.000.000,00	0,00
51	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029127-2)	100.000.000.000,00	0,00
52	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029375-3)	100.000.000.000,00	0,00
53	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029414-9)	100.000.000.000,00	0,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	9.037.618.101.920,00	12.402.525.459.503,00

Saldo kas per 31 Desember 2018 pada Kas di Kas Daerah termasuk pengembalian belanja Tahun Anggaran 2018 yang diterima Kas Daerah di Tahun 2019 sebesar Rp54.568.575.776,00 pada 5 (lima) wilayah dengan rincian rekening sebagai berikut:

No	Rekening Bank	Nilai (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	53.358.518.083,00
2	Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3)	62.592.500,00
3	Bank DKI (Rek. 201-02-21575-7)	394.733.481,00
4	Bank DKI (Rek. 303-02-51575-3)	7.820.000,00
5	Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3)	734.764.592,00
6	Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6)	10.147.120,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	54.568.575.776,00

Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.037.618.101.920,00 terdapat pengeluaran dari Kas Daerah ke rekening penampungan pengeluaran yang merupakan belanja yang sudah dipertanggungjawabkan, namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*) sebesar Rp180.495.508.306,80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
1	10892213997	36.457.161.980,00	SS retur SP2D
2	11092213042	5.092.700,00	SS Gaji Pemda Jatibaru
3	40492200093	22.067.940,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
4	11192200097	573.276.779,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
5	50392200091	5.435.760,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
6	10892200097	338.476.219,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
7	10892213288	254.008.492,00	SS Pembayaran Pajak Pihak Ketiga
8	10892213024	6.025.071,00	SS Gaji Pemda DKI
9	13992200097	18.500.000,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
10	20092213025	600,00	SS Gaji Pemda DKI
11	30392200099	20.000,00	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
12	10892254286	104.954.451,00	SS Gaji Pemda DKI
13	10892200208	81.031.056.047,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
14	10892200216	1.045.745.637,00	SS retur LLG SKN
15	11192200208	10.292.521.042,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
16	30392200200	1.380.942.465,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
17	40492200204	2.073.610.914,00	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
18	10192253495	89.838.398,00	SS KJP Tahun 2013-2014
19	10116001642	66.868.434,00	SS KJP Tahun 2015
20	10116760161	9.402.355,00	SS KJP Tahun 2016
21	10116092826	728.197.126,00	SS KJP Tahun 2017
22	10316003579	963.309.934,00	BOP Paud
23	10312003400	12.381.800.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMK
24	10312003396	5.444.040.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMA

No	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
25	10312003426	2.497.000.000,00	Dinas Pendidikan BOS SMP/SMPLB
26	10312003418	5.730.080.000,00	Dinas Pendidikan BOS SD/SDLB
27	10116093407	5.890.500.000,00	Dana Kartu Jakarta Pintar Tahun 2018
28	10116093423	54.000.000,00	Dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 2018
29	10316004062	9.908.314.819,00	Guru Pemda DKI
30	10316004079	15.537.200,00	Dana Kegiatan dan Honor PTT
31	10316004061	1.268.529.782,00	Sertifikasi dan Non Sertifikasi Bank DKI
32	630003152	255.131.157,00	Dana Sertifikasi Bank BNI
33	9910000008269	89.139.589,80	Dana Sertifikasi Bank Mandiri
34	019301001417994	575.037.193,00	Dana Sertifikasi Bank BRI
35	10316003552	919.886.222,00	KJMU
	Jumlah	180.495.508.306,80	

Selain itu, saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.037.618.101.920,00 tidak termasuk giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.397.311.145,00 dan lebih setor penerimaan daerah sebesar Rp2.895.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D		NAMA PIHAK KE-3	NAMA SKPD	JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL VALIDASI			
I. Giro belum dicairkan oleh Pihak Ketiga atas Nomor Rekening 10802016054					
1	11952	9-Nov-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	5.029.254,00
2	13298	4-Dec-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	5.029.254,00
3	15565	20-Dec-18	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Sumber Daya Air	2.052.676,00
4	16721	26-Dec-18	PT. Multicom Persada International	Dinas Sumber Daya Air	21.276.000,00
5	16073	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	875.835,00
6	16074	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	4.577.350,00
7	16075	21-Dec-18	EPS-BPJSTK	BPSDM	5.860.568,00
8	16775	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	22.439.700,00
9	17001	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	18.699.750,00
10	17000	26-Dec-18	PT. Istana Kreasi Indah Cipta	Dinas Cipta Karya	22.439.700,00
11	17959	31-Dec-18	Aristiawan Dputrantosh	Dinas Bina Marga	19.563.750,00

NO	SP2D		NAMA PIHAK KE-3	NAMA SKPD	JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL VALIDASI			
12	18084	31-Dec-18	Muhayar.R.M.	Dinas Bina Marga	1.789.806.560,00
13	18088	31-Dec-18	Ir. Muhayar	Dinas Bina Marga	3.109.549.600,00
14	18137	31-Dec-18	M.Kosasih	Dinas Sumber Daya Air	636.838.000,00
15	18156	31-Dec-18	Resti Nugraha Dwiananda	Dinas Sumber Daya Air	720.326.000,00
16	18162	31-Dec-18	Nur Atifah	Dinas Sumber Daya Air	739.850.250,00
JUMLAH I					7.124.214.247,00
II. Giro belum dicairkan oleh Pihak Ketiga atas Nomor Rekening 50302316052					
1	16979	20-Jul-18	BRIVA P-I-K DKI JAYA	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulo Gadung	1.833.682,00
2	34239	15-Dec-18	PT. Daikin Airconditioning Indonesia	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	271.263.216,00
JUMLAH II					273.096.898,00
III. Lebih setor penerimaan daerah atas Nomor Rekening 10802015759					
1		31-Dec-18	SAMSAT Jakarta Barat		2.395.000,00
2		31-Dec-18	SIMPAD		500.000,00
JUMLAH III					2.895.000,00
JUMLAH I+II+III					7.400.206.145,00

b. Potongan PFK di PPKD yang Belum Disetor

Saldo Potongan Pajak dan Jamsostek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp408.887.594,00 dan Rp0,00, merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Potongan Pajak dan Jamsostek per 31 Desember 2018 sebesar Rp408.887.594,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PPH Pasal 4 ayat (2) di PPKD yang belum disetor	67.237.241,00
2.	PPN di PPKD yang belum disetor	336.186.209,00
3.	BPJS Ketenagakerjaan di PPKD yang belum disetor	5.464.144,00
Jumlah		408.887.594,00

c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp465.213.876,00. Saldo kas pada rekening yang terindikasi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya telah dipindahbukukan ke RKUD Nomor 10802615756 atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekening Bank DKI nomor 10803112537 atas nama Satgas Dinas Tenaga Kerja dengan saldo sebesar Rp170.278.387,00;
- b. Rekening Bank DKI nomor 10803119671 atas nama Proyek Pemb Rumah Susun dengan saldo sebesar Rp145.454.763,00; dan
- c. Rekening Bank DKI nomor 10816099607 atas nama Titipan Jaminan Pajak Reklame dengan saldo sebesar Rp149.480.726,00.

d. Kas dari Jaminan Bank Garansi

Saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.152.479.146,00 dan Rp9.924.785.927,00. Kas dari jaminan bank garansi merupakan setara kas dalam bentuk Bank Garansi atas pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdapat pada SKPD:

- a. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta barat sebesar Rp606.995.937,00;
- b. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur sebesar Rp222.310.819,00;
- c. BLUD RS Duren Sawit sebesar Rp653.352.390,00;

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.820.000,00.

Sedangkan saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2017 telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo kas di kas daerah tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp6.642.143.973,00 dan Rp6.392.636.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp862.254.860,00 dan Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai

kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp105.519.459.496,00 dan Rp73.503.590.091,00. Saldo kas per 31 Desember 2018 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi Sisa Belanja yang Belum Disetor sebesar Rp1.235.155.437,00, Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor sebesar Rp21.959.995,00, dan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS sebesar Rp104.262.344.064,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2018 tidak termasuk kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2018 tidak termasuk saldo kas yang masih ada di Rekening Bank Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.761.968.222,00 yang merupakan pengembalian belanja (*Retur Transfer*) pada

akhir tahun karena adanya salah mencantumkan nama/nomor rekening pihak ketiga pada saat transfer. Saldo kas tersebut sudah ditransfer ulang pada Bulan Januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara Sebesar Rp475.000,00;
2. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik. Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Sebesar Rp10.944.105,00;
3. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur Sebesar Rp1.639.141.649,00;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp3.635.000,00;
5. Suku Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Jakarta Utara Sebesar Rp0,05;
6. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Timur Sebesar Rp2.919.058,00;
7. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Sebesar Rp2.270.350,00;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebesar Rp30.970.750,00;
9. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp45.872.360,00;
10. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan Sebesar Rp250.000,00;
11. Inspektorat Sebesar Rp2.560.000,00;
12. Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat Sebesar Rp21.425.000,00; dan
13. Kelurahan Tanah Sereal Jakarta Barat Sebesar Rp1.504.950,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran1.

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp104.262.344.064,00 dan Rp62.659.228.773,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp104.262.344.064,00 terdiri dari sisa Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00, Utang PFK sebesar Rp31.822.493,00 dan saldo rekening sekolah *regrouping* yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp281.404.556,00.

Dari hasil rekonsiliasi bank per 31 Desember 2018, atas sisa Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00 termasuk pengembalian belanja Dana BOS TA 2018 yang disetor pada Tahun 2019 sebesar Rp180.113.875,00, selisih kas Rp3.208.584,00 pada 13 sekolah, dan tidak termasuk *Outstanding Check* atas belanja Dana BOS TA 2018 Rp10.655.800,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Dana BOS sebesar Rp103.949.117.015,00 tersaji pada lampiran 2.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp882.416.775,00 dan Rp247.955.987,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD sampai dengan akhir periode belum disetor ke BUD terdiri dari:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp481.459.500,00;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp169.945.680,00;
3. Dinas Perhubungan sebesar Rp99.473.500,00;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp83.418.000,00;
5. Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan sebesar Rp47.870.095,00; dan

6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp250.000,00.

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp610.063.625.342,00 dan Rp683.176.320.547,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Kas Tunai	962.871.296,00	2.056.626.103,00
2	Kas di Bank	607.776.495.922,00	679.564.476.030,00
3	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	88.654.855,00	492.742.777,00
4	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	1.147.321.416,00	990.536.051,00
5	Uang Titipan	10.361.262,00	10.361.262,00
6	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	77.920.591,00	61.578.324,00
	Jumlah	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00

Rincian Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 pada unit sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	24.759.248.748,00	42.691.055.000,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	1.106.734.645,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	48.624.734.096,00	32.353.639.005,00
4	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	527.994.103.199,00	604.031.520.221,00
5	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	1.201.902.527,00	1.061.471.697,00
6	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	7.483.636.772,00	1.931.899.979,00
	Jumlah	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat BLUD yang baru dibentuk yang merupakan bagian dan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu BLUD RSUD Kebayoran Baru, BLUD RSUD Jati Padang dan BLUD RSU Adhyaksa.

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp962.871.296,00 dan Rp2.056.626.103,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp607.776.495.922,00 dan Rp679.564.476.030,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut karena pengelolaannya bersifat khusus, maka pada akhir periode tahun anggaran 2018 tidak disetorkan ke kas daerah, untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perpajakan yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Pada Tahun 2017 UP Perpajakan memiliki deposito Bank DKI sebesar Rp25.000.000.000,00, selanjutnya pada tahun 2018 deposito tersebut dicairkan seluruhnya, sedangkan pada tahun 2018 terdapat penempatan deposito baru senilai Rp46.500.000.000.000,00 yang terdiri dari Dana Deposito di Bank BNI senilai Rp15.000.000.000.000,00, Dana Deposito di Bank BJB senilai Rp8.500.000.000.000,00 dan Dana Deposito di Bank DKI senilai Rp23.000.000.000.000,00.

Kas Tunai dan Kas di Bank yang ada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2017 senilai Rp1.106.734.645,00 merupakan kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 Januari 2018.

Pada Puskesmas Kecamatan Penjaringan terdapat kas tunai sebesar Rp10.684.000,00 terdiri dari kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp684.000,00 dan kas di pihak ketiga sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan uang jaminan berdasarkan perjanjian sewa menyewa gedung dengan jangka waktu sewa tanggal 14 Mei 2018 s.d 14 Mei 2019 untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya pada bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa.

Saldo Kas di bank tidak termasuk pembayaran pihak ketiga (*outstanding cheque*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saldo Kas di Bank RSUD Cengkareng per 31 Desember 2018 tidak termasuk nilai *Outstanding* Belanja sebesar Rp95.702.601,00 yang merupakan belanja pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang telah dicatat dibuku bendahara pengeluaran sebagai belanja namun uang belum keluar dari rekening operasional BLUD;
- 2) Saldo Kas di Bank Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan per 31 Desember 2018 tidak termasuk *Outstanding* Belanja sebesar Rp13.880.777,00 dengan rincian sebesar Rp13.625.415,00 merupakan Pembayaran ke BPJS kesehatan Tahun 2018 yang gagal transfer sehingga terjadi retur ke rekening operasional BLUD, telah dibayarkan kembali tanggal 3 Januari 2019 dan sebesar Rp255.362,00 merupakan retur biaya penjiilidan;
- 3) Saldo Kas di Bank RSUD Matraman per 31 Desember 2018 tidak termasuk kurang bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp5.549.723,00 yang telah dibayarkan tanggal 8 Januari 2019;
- 4) Saldo Kas di Bank RSUD Adhyaksa per 31 Desember 2018 tidak termasuk *outstanding* belanja sebesar Rp286.228.934,00 terdiri dari kekurangan Pembayaran

sebesar Rp44.399.634,00 merupakan pemeliharaan IT, Belanja Sound System PT Rafindo sebesar Rp17.603.570,00 dan kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Kejaksaan sebesar Rp26.796.064,00 dan sebesar Rp241.829.299,00 gagal tranfer pembayaran kepada pihak ketiga, atas *outstanding* tersebut telah dilakukan pembayaran 4 Januari 2019;

- 5) Saldo Kas Puskesmas Kecamatan Jaga karsa per 31 Desember 2018 tidak termasuk Uang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk tagihan Bulan Januari 2019 yang dibebankan kepada karyawan sebesar Rp49.565.709,00 dan telah dilakukan pembayaran tanggal 23 Januari 2019;
- 6) Saldo Kas di Bank RSUD Kepulauan Seribu per 31 Desember 2018 tidak termasuk kekurangan bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp9.000,00; dan
- 7) Saldo Kas di Bank RSUD Pasar Minggu per 31 Desember 2018 tidak termasuk kekurangan transfer ke PT Calmic sebesar Rp19.999,00, yang merupakan belanja tahun 2016 dan transfer ke PMI sebesar Rp15.000,00 yang merupakan belanja tahun 2018 yang telah dicatat di BKU sebagai belanja namun uang belum keluar dari rekening operasional BLUD.

Nilai Kas di Bank tidak termasuk kelebihan transfer dan kelebihan pencatatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) RSUD Pasar Minggu tidak termasuk kelebihan pencatatan penyeteran pajak sebesar Rp20,00 dan kelebihan transfer masuk atas pembatalan SPJ sebesar Rp345.000,00; dan
- 2) RSUD Sawah Besar per 31 Desember 2018 tidak termasuk kelebihan transfer PT Aswinabawa sebesar Rp20.000,00 dan kelebihan pengesahan SPM Nihil

kepada PT Pertamina sebesar Rp1,00. Telah dilakukan pengembalian tanggal 22 Maret 2019.

Selain itu Kas Tunai dan Kas di Bank pada RSUD Koja tidak termasuk selisih uang muka sebesar Rp18.087.119,00 (Rp27.107.322,00 – Rp9.020.203,00) dengan penjelasan sebesar Rp27.107.322,00 (Rp632.049.247,00 - Rp604.941.925,00) merupakan selisih uang muka di rekening uang muka per 31 Desember 2018 dengan uang muka yang disajikan di neraca 2018 dan sebesar Rp9.020.203,00 merupakan kelebihan setoran pajak TA 2017 dan disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran RSUD Koja.

b. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp88.654.855,00 dan Rp492.742.777,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir masa pelaporan.

c. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.147.321.416,00 dan Rp990.536.051,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	BLUD RS Koja	604.941.925,00	585.677.290,00
2	BLUD RS Tarakan	99.933.328,00	60.202.400,00
3	BLUD RS Cengkareng	355.554.775,00	236.768.771,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	75.091.388,00	69.156.153,00
5	BLUD RS Budhi Asih	6.000.000,00	27.731.437,00
6	BLUD RS Duren Sawit	5.800.000,00	11.000.000,00
	Jumlah	1.147.321.416,00	990.536.051,00

d. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank per 31 Desember 2018 yang ada di RSUD Pasar Minggu dengan nilai Rp1.046.437,00 dan di BLUD RS Koja dengan nilai Rp9.314.825,00 yang merupakan uang titipan pihak ketiga

e. Potongan Non Pajak yang Belum Disetor

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan sudah disetor pada Tahun 2019 yang ada di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo dengan nilai Rp8.636.357,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan BLUD Puskesmas Kec. Ciracas dengan nilai Rp7.368.044,00 untuk iuran BPJS Kesehatan, Rp61.916.190,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 3.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018 juga tidak termasuk Belanja yang belum disahkan. Belanja yang belum disahkan tersebut merupakan Belanja Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (BLUD UPK PPUMKMP).

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan- 31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00. Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416,00. dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas	9.756.644.970.273,00
SiLPA	9.755.082.722.776,00
Selisih	1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA	
Utang PFK	629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00
Utang PPN Pusat	400.305.087,00
Utang Asuransi	83.384.735,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.147.321.416,00
Uang Titipan	10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(224.680.706,00)
Pembulatan	(3,00)
Total	1.562.247.497,00

Dengan kata lain. SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1. Kas di kas Daerah	Rp9.037.618.101.920,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp2.152.479.146,00
3. Pendapatan yang Belum Disetor	Rp882.416.775,00
4. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp1.235.155.437,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp104.230.521.571,00
6. Kas di BLUD	Rp608.739.367.218,00

7.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
8.	Pembulatan	Rp3,00
	Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00

5.5.1.1.5 Piutang

5.5.1.1.5.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.043.723.278.985,00 dan Rp8.330.819.399.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	120.778.375.616	130.965.117.786
2.	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	242.507.010
3.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.611.602	2.991.700.455
4.	Piutang Pajak Air Tanah	572.877.502.335	572.309.739.813
5.	Piutang Pajak Hotel	33.190.873.113	28.620.071.963
6.	Piutang Pajak Restoran	114.195.001.685	121.840.536.826
7.	Piutang Pajak Hiburan	63.250.120.719	65.834.741.632
8.	Piutang Pajak Reklame	517.740.620.967	503.074.271.676
9.	Piutang Pajak Parkir	13.138.036.049	14.659.781.113
10.	Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	61.633.149.480	54.571.909.933
11.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.546.420.987.419	6.835.709.020.886
	Jumlah	9.043.723.278.985	8.330.819.399.093

Piutang Pajak sebesar Rp9.043.723.278.985,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPRD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	8.330.819.399.093,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2017	Rp	237.562.347.984,00
	Jurnal Koreksi atas lebih catat piutang	Rp	-14.188.634.578,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2018 (atas piutang 2017)	Rp	-778.438.476.477,00

	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-163.442.658.707,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-12.368.208.050,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-442.695.104.471,00
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	7.157.248.667.794,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	12.770.782.343.930,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	10.237.600.112.179,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-111.411.268.200,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-2.492.071.122,00
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2018	Rp	-532.804.278.238,00
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2018	Rp	1.886.474.614.191,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	9.043.723.278.985,00

Dari mutasi piutang diatas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun untuk jenis pajak seperti PKB, pembayaran piutang PKB tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam LRA dikarenakan terdapat komponen lain selain pembayaran SKP PKB dalam LRA yaitu pembayaran atas Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB. Sama halnya dengan BBN-KB yang secara mekanisme pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak akan langsung membayarkan senilai yang tertera dalam SKKP, sehingga tidak pernah terbit surat ketetapan pajak atas BBN-KB.

Terkait dengan jenis pajak *official assessment* lainnya seperti PAT, Pajak Reklame dan PBB-P2, jumlah pembayaran piutang yang ada dalam mutasi piutang tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan dalam laporan mutasi piutang pajak , jumlah pembayaran piutang pajak disesuaikan dengan nilai ketetapannya.

Dalam rangka menghasilkan data piutang pajak daerah yang valid dan akurat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya pembenahan administrasi pengelolaan piutang pajak daerah. Salah satu diantaranya melalui kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pencocokan/rekonsiliasi atas data yang piutang secara manual dengan data piutang pajak daerah yang terdapat dalam sistem. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya dualisme data saldo piutang pajak daerah versi laporan manual dan laporan sistem.

Adapun hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB berupa pengklasifikasian piutang menjadi 4 kategori :

1. Kategori 1

Data SKPD/SKPDKB antara data sistem dan manual sama sebanyak 155.887 SKPD/ SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp312.756.417.600,00;

2. Kategori 2

Data SKPD/SKPDKB memiliki nomor ketetapan yang sama namun berbeda nilai sebanyak 13.553 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp43.336.625.942,00;

3. Kategori 3

Data SKPD/SKPDKB yang tercatat dalam sistem namun tidak tercatat secara manual sebanyak 246.928 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp961.168.609.286,00

4. Kategori 4

Data SKPD/SKPDKB tercatat secara manual namun tidak tercatat dalam sistem sebanyak 16.641 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp223.193.895.882,00. Pada kategori ini terdapat beberapa data piutang pajak daerah yang tidak didukung oleh informasi yang lengkap seperti nomor ketetapan dan nama serta alamat wajib pajak, dll.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp120.778.375.616,00 dan Rp130.965.117.786,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	130.965.117.786
	Koreksi	Rp	-36.690.469.275
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	-8.299.941.950
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	85.974.706.561
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	953.908.326.077
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	- 919.104.657.022
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	34.803.669.055
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	120.778.375.616

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Koreksi atas saldo awal piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp36.690.469.275,00 dikarenakan adanya SKP PKB yang dibatalkan akibat Wajib Pajak tidak langsung melakukan pembayaran atas SKP tersebut sehingga SKP tersebut harus dibatalkan ketika Wajib Pajak kembali datang untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya.

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (resgistrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutangnyanya. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 2.687.145 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan

PKB sebesar Rp3,315,628,535.900,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang. Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 :

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR
PERIODE 1 JANUARI 2014 S.D 31 DESEMBER 2018**

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2014		JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.167	53.518.542.600	10.002	68.681.727.300	12.084	74.505.691.000	14.465	79.476.580.100	27.772	110.174.245.800	72.490	386.356.786.800
2	JEEP SEGALA MERK	1.930	24.943.119.300	2.457	31.891.404.600	3.606	43.611.033.400	5.178	58.681.803.600	16.070	103.912.271.400	29.241	263.039.632.300
3	MINI BUS, MICRO BUS	11.044	90.864.940.000	16.576	146.204.492.700	28.709	220.310.158.200	52.364	349.986.624.100	137.351	445.579.120.700	246.044	1.252.945.335.700
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.167	27.455.715.900	5.909	33.274.923.200	6.962	29.285.256.700	7.226	24.360.923.000	13.845	23.604.960.800	39.109	137.981.779.600
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.304	29.412.227.500	2.339	25.623.854.600	3.133	25.818.326.000	3.744	23.713.955.700	9.872	17.457.933.100	21.392	122.026.296.900
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.736	21.124.321.700	1.916	25.157.608.000	2.157	19.801.863.300	2.568	19.978.629.800	4.287	6.590.180.500	12.664	92.652.603.300
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	161	154.619.000	236	202.333.800	631	398.047.100	996	507.887.800	1.399	226.725.600	3.423	1.489.613.300
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	906	121.825.700	1.958	82.737.400	2.245	203.587.000	1.026	170.825.000	3.957	338.462.800	10.092	917.437.900
9	SEPEDA MOTOR	316.383	188.141.659.700	340.243	212.377.455.500	391.083	210.555.966.200	444.549	198.744.623.300	744.827	174.684.132.800	2.237.085	984.503.837.500
10	ALAT-ALAT BERAT	2.149	18.597.726.900	2.286	17.653.035.500	2.361	16.264.067.700	2.559	12.469.390.500	6.250	8.730.992.000	15.605	73.715.212.600
TOTAL		349.947	454.334.698.300	383.922	561.149.572.600	452.971	640.753.996.600	534.675	768.091.242.900	965.630	891.299.025.500	2.687.145	3.315.628.535.900
KET: KONDISI DATA PER 31 DESEMBER 2018													

Mutasi Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan 2017 sebesar Rp242.507.010,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	242.507.010,00
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	-
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	-
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		

	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	-

Koreksi atas saldo awal piutang Bea Balik Nama sebesar Rp242.507.010 dikarenakan adanya kesalahan dasar pengakuan piutang (notice).

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2018 sebesar Rp498.611.602,00 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.991.700.455,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	2.991.700.455,00
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(2.493.088.853,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	498.611.602,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	498.611.602,00

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.190.873.113,00 dan Rp28.620.071.963,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	28.620.071.963,00
	Jurnal Koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(367.957.279,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(668.371.781,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	27.583.742.903,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	12.692.842.155,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(7.085.711.945,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	5.607.130.210,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	33.190.873.113,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 94 SKPDKB Pajak Hotel dengan nilai Rp9.136.739.479,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp114.195.001.685,00 dan Rp121.840.536.826,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	121.840.536.826,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(288.304.505,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(15.328.982.523,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	106.223.249.798,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	50.314.583.813,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(42.342.831.926,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	7.971.751.887,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	114.195.001.685,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 999 SKPDKB Pajak Restoran dengan nilai Rp37.047.457.521,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp63.250.120.719,00 dan

Rp65.834.741.632,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	65.834.741.632,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(200.689.132,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(7.295.162.138,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	58.338.890.362,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	90.264.110.088,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(83.377.065.591,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(1.975.814.140,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	4.911.230.357,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	63.250.120.719,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 396 SKPDKB Pajak Hiburan dengan nilai Rp22.240.095.194,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp517.740.620.967,00 dan Rp503.074.271.676,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	503.074.271.676,00
	Koreksi	Rp	(117.801.950,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(86.890.637.719,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	(594.257.188,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(140.160.000,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	1.091.857.398,00
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	416.423.272.217,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	1.027.976.274.756,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(925.346.986.704,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(121.198.717,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(1.190.740.585,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	101.317.348.750,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	517.740.620.967,00

Dalam mutasi piutang pajak reklame terdapat koreksi atas saldo awal piutang pajak reklame sebesar Rp117.801.950,00 yang terdiri atas:

- a. Koreksi atas kelebihan pencatatan nilai ketetapan (double catat) senilai Rp14.600.000,00 (koreksi kurang piutang);
- b. Koreksi atas kekurangan pencatatan pembayaran senilai Rp11.437.500,00 (koreksi kurang piutang);
- c. Koreksi atas double pencatatan piutang untuk kategori 4 senilai Rp146.347.700,00 (koreksi kurang piutang); dan
- d. Koreksi atas kurang pencatatan ketetapan senilai Rp54.583.250,00 (koreksi tambah piutang).

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 7.426

SKPD Pajak Reklame dengan nilai Rp117.018.358.461,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp13.138.036.049,00 dan Rp14.659.781.113,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	14.659.781.113,00
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(1.978.506.179,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	12.681.274.934,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	2.709.643.692,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(2.252.882.577,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	-
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	456.761.115,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	13.138.036.049,00

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 26 SKPDKB Pajak Parkir Rp1.147.595.384,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp572.877.502.335,00 dan Rp572.309.739.813,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	572.309.739.813,00
	Koreksi	Rp	(1.065.353.878,00)
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(751.659.260,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(13.775.875.717,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(1.979.196,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	556.714.871.762,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	108.243.938.361,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(91.437.563.338,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(643.744.450,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	16.162.630.573,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	572.877.502.335,00

Dalam mutasi piutang pajak PAT terdapat koreksi atas saldo awal piutang pajak PAT sebesar Rp1.065.353.878,00 yang terdiri atas:

- Koreksi atas data yang telah dilakukan pembayaran dan pembatalan atas ketetapan sebesar Rp304.492,00 (koreksi kurang piutang)
- Koreksi atas double pencatatan pada data piutang tahun lalu sebesar Rp1.106.180.587,00 (koreksi kurang piutang)
- Koreksi atas kurang pencatatan nilai ketetapan sebesar Rp41.131.201,00 (koreksi tambah piutang)

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 7.239 SKPD Pajak Air Tanah dengan nilai Rp36.586.998.545,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.546.420.987.419,00 dan Rp6.835.709.020.886,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2017		
	Piutang per 31 Desember 2017	Rp	6.835.709.020.886,00
	Koreksi	Rp	275.475.311.347,00
	Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp	(12.282.618.702,00)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp	(641.700.598.717,00)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	(162.848.401.519,00)

	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(12.226.068.854,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(443.786.961.869,00)
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	5.838.339.682.572,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	10.517.374.613.647,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp	(8.166.517.189.132,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp	(109.314.255.343,00)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp	(657.586.087,00)
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	(532.804.278.238,00)
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	1.708.081.304.847,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	7.546.420.987.419,00

Dalam mutasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terdapat koreksi atas saldo awal piutang PBB-P2 sebesar Rp275.475.311.347,00 dikarenakan kurang catat atas ketetapan tahun 2017 (koreksi tambah piutang).

Dalam rangka penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual dan sebagai upaya untuk meminimalisir piutang PBB-P2 yang tidak tertagih karena ketidakakuratan penerbitan SPPT PBB-P2 khususnya terhadap piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak yang dilimpahkan per 01 Januari 2013, pada tanggal 28 Agustus 2015 dan perubahan atas Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil

Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2015 dilakukan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Camat serta para Lurah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun isi dalam instruksi tersebut, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah diminta untuk:

1. Mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam rangka terlaksananya pemutakhiran objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan cepat, benar dan akurat.
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Melaksanakan penyusunan panduan atau pedoman teknis pelaksanaan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) beserta petugas verifikasi lapangan dari Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka verifikasi Objek Pajak PBB-P2;
 - c. Menyiapkan data dan aplikasi objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak pada masing-masing UPPRD;
 - d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana

diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusbukuan piutang PBB-P2;

- f. Melakukan pemutakhiran data objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui proses penelitian dan pengecekan lapangan; dan
- g. Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Bidang Pengendalian setiap 2 (dua) minggu.

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp61.633.149.480,00 dan Rp54.571.909.933,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a. Mutasi Piutang Tahun 2017			
Piutang per 31 Desember 2017	Rp		54.571.909.933,00
Koreksi	Rp		203.168.750,00
Jurnal koreksi atas lebih catat piutang	Rp		(297.405.700,00)
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2018 atas Piutang 2017	Rp		(7.310.900,00)
Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp		-
Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp		-
Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp		-
Saldo Piutang Tahun 2017	Rp		54.470.362.083,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018			
Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp		7.298.011.341,00
Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2018)	Rp		(135.223.944,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2018)	Rp		-
Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2018	Rp		-

	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2018)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2018	Rp	7.162.787.397,00
c.	Piutang per 31 Desember 2018 (a+b)	Rp	61.633.149.480,00

Dalam mutasi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat koreksi atas saldo awal piutang BPHTB sebesar Rp203.168.750,00 dikarenakan kurang catat atas ketetapan pajak tahun 2017 (koreksi tambah piutang).

Dari hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah, sebanyak 461 SKPDKB BPHTB dengan nilai Rp16.651.280,00 yang masuk dalam kategori 4.

Mutasi Piutang Pajak Daerah tersaji pada lampiran 4.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.081.601.309.393,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp9.043.723.278.985,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.962.121.969.592,00.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
1	PKB	34.803.669.055,00	54.313.867.407,00	18.884.101.779,00	12.776.737.375,00	120.778.375.616,00
2	BBN-KB	00,00	00,00	00,00	00,00	-
3	PBB-KB	00,00	197.888.196,00	300.723.406,00	00,00	498.611.602,00
4	P A T	16.162.630.573,00	56.463.528.568,00	43.840.754.714,00	456.410.588.480,00	572.877.502.335,00
5	HOTEL	5.607.130.210,00	9.136.739.497,00	898.027.038,00	17.548.976.368,00	33.190.873.113,00
6	RESTORAN	7.971.751.887,00	45.305.069.613,00	4.262.034.604,00	56.656.145.581,00	114.195.001.685,00
7	HIBURAN	4.911.230.357,00	32.057.384.302,00	5.583.300.224,00	20.698.205.836,00	63.250.120.719,00
8	REKLAME	101.317.348.750,00	106.015.768.531,00	38.167.768.693,00	272.239.734.993,00	517.740.620.967,00

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
9	PPJ	00,00	00,00	00,00	00,00	-
10	PARKIR	456.761.115,00	3.579.706.965,00	265.936.575,00	8.835.631.394,00	13.138.036.049,00
11	BPHTB	7.162.787.397,00	31.459.473.063,00	5.136.189.038,00	17.874.699.982,00	61.633.149.480,00
12	ROKOK	00,00	00,00	00,00	00,00	-
13	PBB-P2	1.701.484.741.098,00	2.612.235.424.697,00	993.529.730.826,00	2.239.171.090.798,00	7.546.420.987.419,00
	TOTAL					
	PENYISIHAN	1.879.878.050.442,00	2.950.764.850.838,92,00	1.110.868.566.897,00	3.102.211.810.807,00	9.043.723.278.985,00
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	9.399.390.252,00	295.076.485.084,00	555.434.283.449,00	3.102.211.810.807,00	3.962.121.969.592,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar (X < 1 Tahun) (0,5%);
- Kualitas Kurang Lancar (1 < X < 2 Tahun) (10%);
- Kualitas Diragukan (2 < X < 5 Tahun) (50%);
- Kualitas Macet (X > 5 Tahun) (100%)

5.5.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp102.162.148.291,00 dan Rp78.363.442.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	9.484.774.212	7.056.595.016
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	56.803.813.534	48.309.778.260
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	35.873.560.545	22.997.069.555
	Jumlah	102.162.148.291	78.363.442.831

Pada tahun 2014 terdapat restrukturisasi organisasi diantaranya berupa penggabungan 2 SKPD yaitu Dinas Tata Ruang dengan Dinas Perizinan dan Penertiban Bangunan menjadi Dinas Penataan Kota yang kemudian di 2017 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan . Atas penggabungan tersebut maka saldo piutang retribusi di SKPD lama dipindahkan sebagai saldo piutang retribusi di SKPD baru.

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp9.484.774.212,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp6.717.732.000,00 berupa piutang atas Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Sementara Skala Mikro, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.670.679.759,00 berupa piutang atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 berupa retribusi biaya pemetaan dan penataan perpetakan periode 2008 sampai dengan 2014.

Piutang retribusi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 tersebut telah diklasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp56.803.813.534,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp42.299.142.792,00 yang terdiri dari piutang retribusi unit hunian dan tempat usaha rusun sewa sebesar Rp32.574.503.360,00, piutang tagihan air rusun sewa sebesar Rp8.197.310.358,00 dan piutang tagihan listrik rusun sewa sebesar Rp1.527.329.074,00, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp5.895.310.000,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Binaan Usaha Kecil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.915.785.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00 dan periode 2018 sebesar Rp6.400.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.977.859.100,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap, Dinas Perhubungan sebesar Rp876.932.100,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Mobil Derek, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp677.390.062,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan, dan Dinas Kehutanan sebesar Rp147.292.480,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian tempat penimbunan hasil hutan.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp35.873.560.545,00 terdapat di SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 yaitu Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan periode 2008 sampai dengan 2014 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp16.978.761.354,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp18.894.799.191,00 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tersebut telah dikelompokkan dalam Piutang Tak Tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp32.656.948.076,00 dan Rp22.437.571.335,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp69.505.200.215,00 dan Rp55.925.871.496,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar,

diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.32
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	5.205.698.606	4.082.680.884
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	42.788.155.853	32.593.442.925
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	21.511.345.756	19.249.747.687
	Jumlah	69.505.200.215	55.925.871.496

5.5.1.1.5.3 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp218.322.936,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PD Dharma Jaya Tahun 2017 telah disetorkan ke kas daerah oleh PD Dharma Jaya pada tanggal 5 Januari 2018 dan 30 Januari 2018.

5.5.1.1.5.4 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp628.907.874.124,00 dan Rp510.792.823.872,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	339.987.106.461	400.507.557.990
a.	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	7.584.465.509	4.922.814.099
b.	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	0	1.675.000
c.	Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan	721.254.452	721.254.452
d.	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
e.	Piutang BLUD Pengelola Kawasan PuloGadung	27.844.419.997	27.729.099.497
f.	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	303.536.750.490	366.743.874.929
g.	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	184.411.000	273.035.000
h.	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501	21.819.501
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	84.978.836.259	0
a.	Piutang BLUD RSUD Cengkareng	84.978.836.259	0
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	1.323.357.000	0
a.	Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	1.323.357.000	0
4	Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	202.618.574.404	110.285.265.882
a.	Piutang BLUD RSUD	202.604.974.404	110.184.870.782
b.	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	13.600.000	100.395.100
	Jumlah	628.907.874.124	510.792.823.872

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Akun Piutang BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp339.987.106.461,00 dan Rp400.507.557.990,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.584.465.509,00 dan Rp4.922.814.099,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

b) Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.675.000,00 di antaranya adalah piutang biaya pendidikan keperawatan.

c) Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

d) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp93.985.512,00 dan Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan

piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

e) Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp27.844.419.997,00 dan Rp27.729.099.497,00. Pada Tahun Anggaran 2017 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung dipindahkan ke akun Piutang Jasa Layanan Umum BLUD. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.421.701.000	2.306.380.500
2	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
3	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
4	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
5	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
6	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
7	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	27.844.419.997	27.729.099.497

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

f) Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp303.536.750.490,00 dan Rp366.743.874.929,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35

Piutang BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	27.036.566.545	60.975.792.500
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1.409.866.909	93.276.283.386
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	81.480.933.057	55.835.821.273
4	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	49.313.699.726	43.633.838.954
5	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	14.894.301.471	1.616.699.936
6	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	8.034.618.600	0
7	RSUD Kep. Seribu	0	446.629.200
8	RSUD Pasar Minggu	0	74.055.348.409
9	BLUD RSUK 5 wilayah kota administrasi	0	36.903.461.271
10	RSUD 5 wilayah kota administrasi	121.366.764.182	0
	Jumlah	303.536.750.490	366.743.874.929

Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebagian besar merupakan piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

g) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp184.411.000,00 dan

Rp273.035.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan dan piutang pelayanan ambulans gawat darurat.

h) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang sampai dengan 31 Desember 2018 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp84.978.836.259,00 dan Rp0,00. Saldo piutang tersebut berasal dari piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.323.357.000,00 dan Rp0,00. Saldo piutang tersebut berasal dari piutang pelayanan kesehatan ke ASN yang terdapat di Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

4) Piutang Pendapatan Operasional BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Operasional BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp202.618.574.404,00 dan Rp110.285.265.882,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp202.604.974.404,00 dan Rp110.184.870.782,00, di

antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

b) Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.600.000,00 dan Rp100.395.100,00.

Untuk Piutang BPJS, Dinas Kesehatan beserta UKPD dibawahnya telah melakukan proses rekonsiliasi dengan BPJS wilayah untuk mengkonfirmasi nilai piutang layanan kesehatan termasuk didalamnya klaim atas farmasi dan tindakan preventif pada RSUD dan Puskesmas.

Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2018 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2017 ditambah jumlah klaim layanan kesehatan periode 2018 berdasarkan Berita Acara verifikasi yang terbit di 2018 maupun Berita Acara verifikasi yang terbit sampai dengan 22 April 2019 dikurangi pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2018 dikurangi koreksi biaya administrasi, koreksi hasil audit internal di BPJS, dan tagihan yang tidak di klaim RSUD dan Puskesmas karena tidak memenuhi syarat selama 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
Saldo awal Piutang	24.391.234.685	996.400.000	25.387.634.685
Mutasi tambah :			
- Total hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	1.466.546.859.181	16.675.415.000	1.483.222.274.181
Mutasi Kurang :			
- Koreksi (Biaya Admin, Koreksi Audit oleh SPI BPJS, Tagihan yang dari awal tidak diklaimkan oleh RS karena tdk memenuhi syarat)	1.760.691.217	2.545.000	1.763.236.217
- Total Penerimaan Pembayaran dari BPJS (Hanya atas pelayanan selama 2018)	943.718.659.493	10.871.975.000	954.590.634.493
Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara per 31 Desember 2018	545.458.743.156	6.797.295.000	552.256.038.156

Namun, piutang BPJS per 31 Desember 2018 tersebut diatas belum termasuk jumlah layanan kesehatan periode 2018 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp1.514.548.047,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp39.489.940.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
- Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS	1.400.683.047	113.865.000	1.514.548.047
- klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS	38.835.341.465	654.599.000	39.489.940.465
Jumlah	40.236.024.512	768.464.000	41.004.488.512

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp573.836.215.220,00 dan Rp458.243.029.590,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp55.071.658.904,00 dan Rp52.549.794.282,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	33.167.029.775	39.340.352.487
a	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	39.031.717	24.613.571
b	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	0	8.375
c	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
d	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
e	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.687.321.402	26.621.234.990
f	Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	5.624.405.539	11.842.687.664
g	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	922.055	36.458.825
h	Penyisihan Piutang ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	109.098	109.098
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	424.894.181	0
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Cengkareng	424.894.181	0
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	6.616.785	0
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	6.616.785	0
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	21.473.118.163	13.209.441.795
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	21.473.050.163	13.208.939.819
b.	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	68.000	501.976
	Jumlah	55.071.658.904	52.549.794.282

5.5.1.1.5.5 Piutang Dana Transfer

Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.250.946.397.380,00 dan Rp2.291.576.829.949,00. Piutang Dana Transfer Tahun Anggaran 2018 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2012, 2015, 2016 dan 2017 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan.

Penetapan Piutang Dana Transfer diatur dalam PMK Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018

Selanjutnya, Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 yang belum diterima penyalurannya tersebut, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dana bagi hasil pajak oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan. yang akan diusulkan untuk dapat dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2019 dan disalurkan ke daerah.

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.193.108.210.440,00 dan Rp2.253.644.677.181,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	PBB Migas	-	1.361.231.884
2	Biaya Pemungutan PBB	-	45.374.583
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan ke Daerah	177.139.030	-
4	PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29	-	-
5	PPh Pasal 21	2.192.931.071.410	2.252.238.070.714
	Jumlah	2.193.108.210.440	2.253.644.677.181

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp57.838.186.940,00 dan Rp37.932.152.768,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	SDA IIUPH	22.048.169	-
2	Prov Sumber Daya Hutan PSDH	69.142	-
3	Sumber Daya Hutan Reboisasi	73.279	-
4	Pungutan Hasil Perikanan	99.237.107	-
5	Pertambangan Minyak Bumi	39.617.650.148	-
6	SDA Pertambangan Gas Bumi	18.099.109.095	37.932.152.768
	Jumlah	57.838.186.940	37.932.152.768

5.5.1.1.5.6 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.966.387.096,00 dan Rp17.074.937.096,00

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan terdapat 135 kasus dengan nilai sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00, dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 822 kasus sebesar Rp849.291.173.739,69 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp484.571.547.274,88,

sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp364.719.626.464,81.

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 659 kasus sebesar Rp53.969.568.865,40 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp18.707.037.013,40, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp35.262.531.852,00.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp5.388.542.321,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp16.966.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp11.577.844.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	-	10.777.084.642	2.878.951.300	13.656.035.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	-	10.777.084.642	6.189.302.454	16.966.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II)	-	-	5.388.542.321	6.189.302.454	11.577.844.775
	Sisa Nilai Piutang	-	-	5.388.542.321	-	5.388.542.321
	Koreksi atas Mutasi Pelunasan					54.275.000
	Beban Penyisihan 2018					6.460.618.037

5.5.1.1.5.7 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp Rp794.018.271,00 dan Rp971.534.331,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp135.340.650,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp794.018.271,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp658.677.621,00.

Adapun rincian Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Diragukan	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		50%	100%	
I	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	270.681.300,00	523.336.971,00	794.018.271,00
II	Penyisihan 2018	135.340.650,00	532.261.971,00	658.677.621,00
III	Piutang Netto (I-II)			135.340.650,00

5.5.1.1.5.8 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp20.575.244.008,00 dan Rp20.524.241.484,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
I	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	15.479.274.567	15.406.772.252,00
	Sewa Tanah	7.282.617.733,00	8.734.348.822,00
	Sewa Gedung	8.196.656.834,00	6.672.423.430,00
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Piutang Hasil lelang titik reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
III	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer /BOT)	1.921.812.396,00	1.921.645.729,00
	PT Jaya Real Propertindo	1.000.000,00	833.333,00
	Lain-Lain	1.920.812.396,00	1.920.812.396,00
IV	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate /BTO)	302.978.750,00	324.645.208,00
	PT Fajar Setia Mandiri	0,00	109.583.333,00
	Yayasan Katholik Mardi luhur	272.978.750,00	215.061.875,00
	Yayasan Tiara Kasih	30.000.000,00	0,00
Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		20.575.244.008	20.524.241.484,00

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO). Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk sewa dan BOT/BTO

sebesar Rp4.070.844.087,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.16, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp6.740.360.001,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.575.244.008,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp13.834.884.007,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	1.397.890.783,00	3.244.601.964,00	4.542.409.820,00	6.294.372.000,00	15.479.274.567,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	25.801.250,00	93.377.500,00	96.800.000,00	2.008.812.396,00	2.224.791.146,00
3	Piutang Titik Reklame	0,00	0,00	0,00	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	1.423.692.033,00	3.337.979.464,00	4.639.209.820,00	11.174.362.691,00	20.575.244.008,00
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	7.118.460,00	333.797.946,00	2.319.604.910,00	11.174.362.691,00	13.834.884.007,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	1.416.573.573,00	3.004.181.518,00	2.319.604.910,00	0,00	6.740.360.001,00

5.5.1.1.5.9 Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp26.492.055.147,00 dan Rp80.418.510.254,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – Sewa	19.262.972.008,00	18.274.307.390,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	7.229.083.139,00	62.144.202.865,00
	Jumlah Piutang Pemanfaatan Aset	26.492.055.147,00	80.418.510.254,00

Mutasi Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah tersaji dalam lampiran 5.

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp967.080.192,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.492.055.147,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih sebesar Rp25.524.974.955,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	61.655.762	153.004.706	931.700.284	18.116.611.256	19.262.972.008
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	29.428.424	157.406.235	262.462.875	6.779.785.605	7.229.083.139,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	91.084.186	310.410.941	1.194.163.159	24.896.396.861	26.492.055.147
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	455.421	31.041.094	597.081.580	24.896.396.861	25.524.974.955
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	90.628.765	279.369.847	597.081.580	0	967.080.192

5.5.1.1.5.10 Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 atas pokok piutang adalah sebesar Rp43.015.535.436,00.

Pada Tahun 2018 berdasarkan surat Grup Pengelola Aset Khusus PT Bank DKI Nomor 135/GPA/I/2019 tanggal 14 Januari 2018 perihal pelaporan Hasil Tagih Piutang Eks BPPN, disampaikan bahwa hasil tagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp594.337.723,00 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sehingga masih terdapat di Rekening sementara atas nama Bank DKI. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersurat kepada Bank DKI untuk mengkonfirmasi dan memerintahkan Bank DKI untuk menyetorkan Hasil Tagih Piutang Eks BPPN Tahun 2018 tersebut.

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa

atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Total hasil tagihan eks BPPN sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp164.283.775.864,00 terdiri dari setoran atas pokok piutang sebesar Rp162.493.531.136,00 dan setoran atas bunga piutang sebesar Rp1.790.244.728,00. Sampai dengan tahun 2018 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00.

5.5.1.1.5.11 Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp22.068.268.485,00 dan Rp18.129.884.092,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Bunga Deposito Pada Bank	18.150.027.398,00	14.794.452.053,00
2.	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.918.241.087,00	3.335.432.039,00
	Total	22.068.268.485,00	18.129.884.092,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Bunga Deposito adalah sebagai berikut:

1) Piutang Bunga Deposito Pada Bank

Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp18.150.027.398,00 dan 14.794.452.053,00. Rincian Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.150.027.398,00 dapat dilihat pada tabel 5.36 berikut:

Tabel 5.36
Perhitungan Piutang Bunga Deposito Pada Bank
Per 31 Desember 2018

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akruai		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
1	Bank DKI	013644/70201506922	4-Jan-19	27	hari	6,00%	150.000.000.000,00	665.753.425,00
2	Bank DKI	005413/70101014952	25-Jan-19	6	hari	6,00%	150.000.000.000,00	147.945.205,00
3	Bank DKI	016979/70101016722	11-Jan-19	20	hari	6,00%	200.000.000.000,00	657.534.247,00
4	Bank DKI	016988/70101016762	18-Jan-19	13	hari	6,00%	200.000.000.000,00	427.397.260,00
5	Bank DKI	018183/70228560877	10-Jan-19	21	hari	6,00%	500.000.000.000,00	1.726.027.397,00
6	Bank DKI	015264/1187601	16-Jan-19	15	hari	6,50%	200.000.000.000,00	534.246.575,00
7	Bank DKI	015265/1187781	16-Jan-19	15	hari	6,50%	200.000.000.000,00	534.246.575,00
8	Bank DKI	019351/70128-102-293	30-Jan-19	1	hari	6,00%	500.000.000.000,00	82.191.781,00
9	Bank DKI	020608/70128-102-528	29-Jan-19	2	hari	6,00%	200.000.000.000,00	65.753.425,00
10	Bank DKI	006533/101-25-121981	28-Jan-19	3	hari	6,50%	500.000.000.000,00	267.123.288,00
11	Bank DKI	014814/108-25-03613-2	10-Jan-19	21	hari	6,50%	500.000.000.000,00	1.869.863.014,00
12	Bank BRI	0019-01-011441-40-6	07-Jan-19	24	hari	7,20%	220.000.000.000,00	1.041.534.247,00
13	Bank BRI	0019-01-016212-40-4	16-Jan-19	15	hari	7,20%	100.000.000.000,00	295.890.411,00
14	Bank BRI	0019-01-016395-40-6	03-Jan-19	28	hari	7,20%	100.000.000.000,00	552.328.767,00
15	Bank BRI	0019-01-017659-40-5	15-Jan-19	16	hari	7,20%	300.000.000.000,00	946.849.315,00
16	Bank BRI	0019-01-017736-40-1	06-Jan-19	25	hari	7,20%	200.000.000.000,00	986.301.370,00
17	Bank BRI	0019-01-017918-40-1	11-Jan-19	20	hari	7,20%	200.000.000.000,00	789.041.096,00
18	Bank Mandiri	1030205037589	11-Jan-19	20	hari	7,30%	135.000.000.000,00	540.000.000,00
19	Bank Mandiri	103-02-0499348-5	04-Jan-19	27	hari	7,30%	100.000.000.000,00	540.000.000,00
20	Bank Mandiri	103-02-0520106-0	01-Jan-19	30	hari	7,30%	200.000.000.000,00	1.200.000.000,00
21	Bank Mandiri	103-02-0541807-8	01-Jan-19	30	hari	7,30%	200.000.000.000,00	1.200.000.000,00
22	Bank BTN	1401400238703	08-Jan-19	23	hari	7,30%	200.000.000.000,00	920.000.000,00
23	Bank BTN	00014-01-40-023870-3	08-Jan-19	23	hari	7,30%	100.000.000.000,00	460.000.000,00
24	Bank BTN	00014-01-40-029127-2	04-Jan-19	27	hari	7,30%	100.000.000.000,00	540.000.000,00
25	Bank BTN	00014-01-40-029375-3	01-Jan-19	30	hari	7,30%	100.000.000.000,00	600.000.000,00
26	Bank BTN	00014-01-40-029414-9	03-Jan-19	28	hari	7,30%	100.000.000.000,00	560.000.000,00
		JUMLAH					5.655.000.000.000,00	18.150.027.398,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Pada Bank tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2018, dimana seluruhnya telah

diterima di Januari 2019 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

2) Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.918.241.087,00 dan Rp3.335.432.039,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 5.37 dan 5.38 berikut.

Tabel 5.37

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-18	1.247.094.657,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-18	2.172.389.655,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-18	429.654.822,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-18	69.101.953,00
Jumlah						3.918.241.087,00

Tabel 5.38

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-17	1.070.999.089,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-17	1.848.310.822,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-17	362.586.297,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-17	53.535.831,00
Jumlah						3.335.432.039,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2018, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2019 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.5.1.1.5.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.562.316.277.005,00 dan Rp3.416.300.522.268,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	1.033.294.076,00
2.	Piutang Sanksi Pajak	906.938.992.628,00	664.336.412.725,00
3.	Piutang Denda Retribusi	16.599.738.513,00	7.251.875.868,00
4.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	280.089.700.841,00	113.312.178.001,00
5.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	997.907.389,00	83.993.000,00
6.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.357.689.856.034,00	2.630.275.789.346,00
7.	Piutang Jasa Giro Kas Daerah	0,00	6.979.252,00
Jumlah		3.562.316.195.405,00	3.416.300.522.268,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp1.033.294.076,00. Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan bagi hasil komisi dari asuransi tenaga kerja antara SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012. Atas saldo Piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut seluruhnya akan diterima di bulan berikutnya, sesuai tanggal jatuh temponya. Piutang ini sebelumnya diakui sebagai piutang bagi hasil premi. Hal itu dikarenakan perubahan kode rekening pendapatan di SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp906.938.992.628,00 dan Rp664.336.412.725,00.

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PIUTANG SANKSI PAJAK DAERAH		
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA		
PER 31 DESEMBER 2018		
	31-Dec-18	31-Dec-17
Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	26,800,423,534	10,648,329,120
Piutang Sanksi BBN-KB	-	-
Piutang Sanksi Pajak Air Tanah	29,259,284,655	23,488,502,554
Piutang Sanksi PBB-KB	8,689,928,935	7,370,595,009
Piutang Sanksi Pajak Hotel	86,591,878,272	55,008,763,688
Piutang Sanksi Pajak Restoran	404,806,973,997	331,918,966,248
Piutang Sanksi Pajak Hiburan	122,543,034,557	65,113,908,929
Piutang Sanksi Pajak Reklame	62,188,885,599	21,721,026,029
Piutang Sanksi PRJ	23,667,573,023	22,300,532,773
Piutang Sanksi Pajak Parkir	55,904,125,577	42,912,582,577
Piutang Sanksi Pajak Bumi Bangunan-P2	76,137,032,571	80,195,479,846
Piutang Sanksi Pajak BPH-ITB	10,349,851,908	3,657,725,952
Jumlah Piutang Sanksi Pajak	906,938,992,628	664,336,412,725
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih	(631,889,786,221)	(454,733,914,450)
Piutang Sanksi Yang Masih Dapat Direalisasikan Per 31 Desember 2017	275,049,206,407	209,602,498,275

Penyisihan Piutang Sanksi Pajak

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp275.049.206.407,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp906.938.992.628,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp631.889.786.221,00.

3) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.599.820.113,00 dan Rp7.251.875.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	1.066.800,00	
2	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	2.915.458,00	-
3	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	16.595.837.855,00	7.251.875.868,00
	Jumlah	16.599.820.113,00	7.251.875.868,00

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Piutang Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.066.800,00 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.915.458,00 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.833.858,00 dan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp81.600,00.

3) Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp16.595.837.855,00 terdapat di Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.219.396.745,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.825.119.081,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.915.409.943,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp635.912.086,00.

4) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp280.089.700.841,00 dan Rp113.312.178.001,00. Adapun Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga terdiri dari:

a. Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.348.346.830,00 dan Rp0,00.

Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/ perpanjangan dan/ atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/ tanggungan sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengenaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.

- b. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2002, kewajiban RSM dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Pada Tahun 2018 telah diterima penyetoran ke kas daerah atas 12 Pemegang SIPPT senilai Rp193.247.453.664,00 (CaLK 5.1.1.1.4 poin 2) sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp266.741.354.011,00 dan Rp113.312.178.001,00.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L. Saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.741.354.011,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp113.312.178.001,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2018 sebesar Rp346.676.629.674,00 dan dikurangi dengan penerimaan pembayaran selama Tahun 2018 sebesar Rp193.247.453.664,00.

Saldo Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.741.354.011,00 tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31 Desember 2018 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	PT. Lestari Kirana Persada	2015	-	2.937.992.400,00
2	PT Citra Mas Pentama	18 Desember 2015	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
3	PT Pardhika Wisti Sarana	06 Desember 2016	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
4	PT. Aryakencana Semesta	13 Januari 2017	32/-1.711.534	36.106.425.000,00
5	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	27 Januari 2017	27/-1.711.534	24.059.448.933,00
6	PT. Lintas Cipta Development	12 Juni 2017	614/-1.711.5	794.936.404,00
7	PT. Kode Sukses Sejahtera	21 Juli 2017	1717/-1.711.534	6.982.594.200,00
8	PT. Trimitra Multi Sukses Selaras	18 Mei 2018	486/-1.796.3	37.874.554.200,00
9	PT. Idola Tunggal	28 Desember 2018	1380/-1.711.5	32.484.365.760,00
10	PT. Nusaplaza Indah	28 Desember 2018	1383/-1.711.534	75.226.245.150,00
11	PT. Karya Graha Nusantara	28 Desember 2018	1381/-1.711.534	7.844.010.900,00
Jumlah				266.741.354.011,00

**Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun,
susun sederhana/murah (SP3L) Tak Tertagih**

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp236.495.480.945,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp266.741.354.011,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp30.245.873.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2018	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
1	PT. Lestari Kirana Persada	2.937.992.400,00			1.468.996.200		1.468.996.200	1.468.996.200
2	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064,00			16.388.915.532		16.388.915.532	16.388.915.532
3	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000,00			4.826.475.000		4.826.475.000	4.826.475.000
4	PT. Aryakencana Semesta	36.106.425.000,00		3.610.642.500			3.610.642.500	32.495.782.500
5	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933,00		2.405.944.893			2.405.944.893	21.653.504.040
6	PT. Lintas Cipta Development	794.936.404,00		79.493.640			79.493.640	715.442.764
7	PT. Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200,00		698.259.420			698.259.420	6.284.334.780
8	PT. Trimitra Multi Sukses Selaras	37.874.554.200,00	189.372.771				189.372.771	37.685.181.429
9	PT. Idola Tunggal	32.484.365.760,00	162.421.829				162.421.829	32.321.943.931

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2018	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
10	PT. Nusaplaza Indah	75.226.245.150,00	376.131.226				376.131.226	74.850.113.924
11	PT. Karyagraha Nusantara	7.844.010.900,00	39.220.055				39.220.055	7.804.790.845
Jumlah		266.741.354.011,00	767.145.880	6.794.340.454	22.684.386.732	0	30.245.873.066	236.495.480.945

Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 487 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kepgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1	Jakarta Pusat	20	119.360	19	78.981	6	42.789	45	241.129
2	Jakarta Utara	17	351.212	61	472.555	15	254.339	93	1.078.106
3	Jakarta Barat	29	808.790	69	564.816	12	475.348	110	1.848.953
4	Jakarta Selatan	51	320.557	87	320.348	17	142.151	155	783.056
5	Jakarta Timur	13	397.388	65	706.801	6	151.834	84	1.256.023
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
Jumlah		130	1.997.306	302	2.146.731	56	1.066.461	488*	5.210.498

Ket.: * terdapat 1 SIPPT yang memiliki kewajiban di dua wilayah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPR. Dari 487 potensi kewajiban terdapat 18 pemegang SIPPT/IPPR yang sedang dalam tahap akhir proses persetujuan konversi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang SIPPT	Jenis Kewajiban	Luas Efektif (m ²)	No dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPRS
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	RSM	60.560	Nomor 046/J.1/31/-1.711.32/2017 22 November 2017
2	PT Aruna Kirana q.q PT Madara Swarna	RSM	16.569	Nomor 049/5.7/31/-1.711.53/2016 9 Agustus 2016
3	PT Graha Jasa Ekatama	RSM	10.844	Nomor 044/5.7/31/-1.711.53/2017 18 Juli 2017
4	Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Merlina	SP3L	7.769	Nomor 2139/-1.711.534, 21 Oktober 2008
5	PT Bangun Inti Artha	SP3L	5.111	Nomor 035/5.7/31/-1.711.53/2016 30 Mei 2016

No	Pemegang SIPPT	Jenis Kewajiban	Luas Efektif (m ²)	No dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPRS
6	Palmerindo Properti	RSM	9.011	Nomor 041/5.7/31/-1.711.53/2017 6 Juli 2017
7	PT Propertyjava	SP3L	33.469	Nomor 1219/-1.711.534 18 September 2012
8	Ny. Weny Halim	SP3L	6.030	Nomor 008/5.7/31/- 1.711.534/2015 10 Nopember 2015
9	Dra. Chairani Cs	SP3L	20.584	Nomor 2171/-1.711.534 24 September 2007
10	Sdr. Siswati Setiabudi Cs	SP3L	5.738	Nomor 2865/-1.711.534 29 Nopember 2002
11	PT Samadista Karya	RSM	7.617	Nomor 052/5.7/31/-1.711.53/2016 22 Agustus 2016
12	Robert Sutanto Cs	SP3L	24.422	Nomor 1175/-1.711.534 14 Juni 2007
13	PT Trika Bumi Pertiwi	SP3L	15.705	No. 1386/-1.711.5 24 Mei 2004
14	PT Loka Mampang Indah Realty	RSM	13.321 8.966	No. 154/-1.711.534 13 Feb 2015
15	PT Mardhika Artha Upaya	SP3L	1.163	Nomor 1154/-1.711.534 6 September 2012
16	PT Menara sinar Terang dan Sdr Tedy Riang	RSM	16.565	Nomor 685/-1.711.534 14 Juli 2015
17	PT Almaron Perkasa	SP3L	60.798	Nomor 2757/-1.711.534 29 November 2018
18.	Jakarta International School	SP3L	74.441	Nomor 1010/-1.711.5 4 April 2001

5) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp997.907.389,00 dan Rp83.993.000,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame,

6) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.357.689.856.034,00 dan Rp2.630.275.789.346,00. Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39

Daftar Nilai Piutang Kewajiban Kompensasi Atas Pelampauan
Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Mitra Panca Persada, PT	31-Des-15	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	579.326.163.428,00	0	366.523.700.000,00	212.802.463.428,00
2	Mulia Karya Gemilang, PT	31-Mei-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	213.044.850.222,00		0	213.044.850.222,00
			RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot				
3	Sampoerna Land, PT	07-Jun-16	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot	723.112.978.629,00			712.720.463.309,00
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
			Penataan dan pengembangan Kota Tua				
4	Singa Propertindo Haryono, PT	12-Okt-16	Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co)	20.489.644.000,00	0	19.745.432.075,00	744.211.925,00
			Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara				
5	Putragaya Wahana, PT	16-Nov-16	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	240.741.181.770,00	0	-	240.741.181.770,00
6	Kepland Investama, PT	07-Des-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	551.410.069.808,00			551.410.069.808,00
			Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut)				
			Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke				
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	07-Des-16	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	9.459.555.840,00	0	0	9.459.555.840,00
8	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	29-Mar-17	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olah raga di Lapangan Banteng	8.945.280.000,00	103.276.557,00	9.048.556.557	-
9	Alfindo Mercu Estate, PT	13-Jun-17	Pembangunan faasilitas penunjang infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantargebang	4.525.987.158	89.337.382,00	4.615.324.540,00	-
10	Sinar Mas Teladan, PT	06-Okt-17	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	220.748.365.258	-	173.242.189.000	47.506.176.258,00
			Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII				
			Pembangunan Rusun diatas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai				
11	Suryaraya Investama, PT	06-Okt-17	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta	58.471.713.233	-		58.471.713.233,00
			Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot				
			Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng				
			Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo				
12	PT. Putragaya Wahana	07-Jun-18	Pembangunan Club House dan Fasilitas Olahraga Air di Stadion Internasional BMW	-	133.148.758.866,00	-	133.148.758.866,00
			Rehab Fasilitas Interior dan Perlengkapan Penunjang MPP di Jln Epicentrum Selatan Kav 22				
			Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga di Kp Sungai Kendal				
			Renovasi Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt 4, 5 dan 7 Beserta Peralatan Penunjang Kantor				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018
					PENAMBAHAN 2018	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
13	PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara	10-Agu-18	Perbaikan/ Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	-	148.566.108.250,00	-	148.566.108.250,00
14	PT. Surya Graha Pertiwi	16-Agu-18	Pembangunan Kolom Renang Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	-	29.074.303.125,00	-	29.074.303.125,00
	JUMLAH			2.630.275.789.346,00	310.981.784.180,00	583.567.717.492,00	2.357.689.856.034,00

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.357.689.856.034,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.630.275.789.346,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2018 sebesar Rp310.981.784.180,00 dan dikurangi dengan pemenuhan kewajiban selama Tahun 2018 sebesar Rp583.567.717.492,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, sejak tanggal 16 Agustus 2017, Piutang Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diserahkan dari Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada periode 2018 terdapat koreksi pengurangan piutang atas pemenuhan kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NO. BAST	BENTUK KOMPENSASI	NILAI PEMENUHAN KEWAJIBAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PT. Mitra Panca Persada	966/-1.795.12	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	366.523.700.000
2	PT. Sampoerna Land	2536/-076.9	Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU	10.392.515.320
3	PT. Singa Propertindo	4215/-1.711.513	Perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gd Jakarta UKM (Smesco)	13.717.453.448
		4215/-1.711.513	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	6.027.978.627
4	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	2001/076.24	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olahraga di Lapangan Banteng	9.048.556.557
5	PT. Alfindo Mercu Estate	4729/-1.824.151	Pembangunan fasilitas penunjang Infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantar Gebang	4.615.324.540
6	PT. Sinar Mas Teladan	2694/-1.785.1	Penataan Kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	70.991.043.000
		2855/-1.785.1	Pembagunan dan rehabilitasi fasilitas olahraga Venue Asian Games XVIII	62.888.682.672
		2988/-1.785.1	GOR Velodrome Rawamangun	39.362.463.328
		JUMLAH		583.567.717.492

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp2.345.901.406.754,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.357.689.856.034,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp11.788.449.280,00.

7) Piutang Jasa Giro Kas Daerah

Piutang Jasa Giro Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.979.252,00. Piutang Jasa Giro Tahun 2017 yang merupakan Jasa Giro Bulan Oktober Tahun 2017 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017 atas Rekening Bank DKI Nomor 108.02.71575.1 dalam bentuk

Valuta Asing, telah dibayarkan ke kas daerah pada tanggal 13 April 2018.

5.5.1.1.5.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp56.651.018.280,00 dan Rp56.184.831.210,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	224.680.706,00	224.680.706,00
2.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
3.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	9.690.000.000,00	9.690.000.000,00
4.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	42.317.197.574,00	41.851.010.504,00
Jumlah		56.651.018.280,00	56.184.831.210,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sama yaitu sebesar Rp224.680.706,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00.

2) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana

Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

3) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan

pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun.

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.690.000.000,00 belum ada perubahan dari saldo per 31 Desember 2017, hal tersebut disebabkan tidak ada pembayaran angsuran dari pihak ketiga, hal tersebut disebabkan PT. Putera Adi Karyajaya dan PT. Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT. Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Teknik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua.

Rincian bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan transjakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Angsuran Pokok	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran	Sisa Pokok Angsuran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT. Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000,00	12.198.580.000,00	
Pembatalan PT. Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000,00	Tuntutan Pengembalian UM
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000,00	11.623.880.000,00	

4) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp42.317.197.574,00 dan Rp41.851.010.504,00 (*lihat Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran*). Selama tahun 2018 terdapat mutasi penambahan dari akun tagihan penjualan angsuran atas nilai yang sudah jatuh tempo per 31 Desember 2018 Rp5.740.468.960,00, koreksi pencatatan Rp2.877.532.346,00 sementara untuk mutasi pengurangan karena pembayaran angsuran unit Rp3.138.972.068,00, pengurangan karena perpindahan kolektibilitas tagihan Rp424.006.903,00 dan pengurangan karena penjualan unit ke warga non program Rp949.699.347,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp40.974.262.159,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
1	Tambora III	78	0,00	0,00	0,00	2.012.059.132,00	2.012.059.132,00
2	Bendungan Hilir II	366	24.101.338 ,00	0,00	0,00	2.927.229.189,00	2.951.330.527,00
3	Jatibunder	29	0,00	0,00	0,00	244.528.641,00	244.528.641,00
4	Tanah Tinggi	368	0,00	0,00	0,00	2.042.042.923,00	2.042.042.923,00
5	Karet Tengsin I	92	0,00	0,00	0,00	430.606.770,00	430.606.770,00
6	Petamburan	513	2.079.660,00	0,00	0,00	15.050.653.870,00	15.052.733.530,00
7	Karet Tengsin II	150	129.643.776,00	671.145.752,00	1.167.717.177,00	10.551.600.554,00	12.520.107.259,00
8	Tebet Barat I	195	0,00	0,00	0,00	1.062.983.007,00	1.062.983.007,00
9	Tebet Barat II	89	0,00	0,00	0,00	666.125.771,00	666.125.771,00
10	Bidara Cina	622	0,00	0,00	0,00	5.334.680.014,00	5.334.680.014,00
Total		2.502	155.824.774,00	671.145.752,00	1.167.717.177,00	40.322.509.871,00	42.317.197.574,00
Penyisihan			779.124,00	67.114.575,00	583.858.589,00	40.322.509.871,00	40.974.262.159,00

5.5.1.1.6 Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp107.440.609.619,00 dan Rp106.904.784.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	107.440.609.619,00	106.886.674.160,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	-	18.110.330,00
Jumlah		107.440.609.619,00	106.904.784.490,00

Penjelasan secara lebih rinci atas Uang Muka tersebut adalah sebagai berikut :

1) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD sebesar Rp107.440.609.619,00, terdapat di Dinas Pendidikan sebesar

Rp553.935.459,00 merupakan uang muka pembangunan dan pengadaan di sekolah, dan Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, Uang muka tersebut merupakan hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000,00
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000,00
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000,00
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000,00
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800,00
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360,00
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000,00
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000,00
Jumlah				106.886.674.160,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 6 paket pengadaan bermasalah tersebut dimana Pemprov DKI sudah melakukan penyetoran UMK dan telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum dimana disebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

2) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD

Tidak terdapat Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD per 31 Desember 2018.

5.5.1.1.7 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp32.257.697.896,00 dan Rp31.398.896.486,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	30.392.455.567,00	15.016.317.715,00
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	1.865.242.329,00	16.382.578.771,00
Jumlah		32.257.697.896,00	31.398.896.486,00

1) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp30.392.455.567,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2018 masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina dan Shell Indonesia).

2) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp1.865.242.329,00 terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp1.143.992.329,00 merupakan asuransi *system gateway* pada area parkir milik Unit Pengelola Perparkiran dan asuransi kendaraan yang diparkir pada Unit Pengelola Perparkiran, Dinas Kehutanan sebesar Rp620.000.000,00 merupakan asuransi akibat bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar sebesar Rp101.250.000,00 merupakan sewa gedung dibayar dimuka.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT

diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum; dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 3.634 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.492 SIPPT Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.492 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 18.511.304 m². Dari jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahkan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m² . Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.066 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban

yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban dari pemegang SIPPT sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m². Seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual, penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan operasional. Sedangkan aset yang diterima dicatat sebagai Aset Tetap - Fasos Fasum dalam kelompok aset lainnya sepanjang belum diserahkan sebagai aset tupoksi di SKPD, sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.5.1.5.4.6.

Dengan diterimanya Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 426 SIPPT dengan luas 11.605.228 m², masih terdapat potensi penerimaan aset dari para pemegang SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2018 sebanyak 1.066 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Secara lebih rinci jumlah SIPPT yang terbit beserta jumlah kewajiban Fasos Fasum yang diserahkan dan yang belum diserahkan dari tahun 1971 sampai dengan 2018 disajikan sebagai berikut :

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF 1971-2018		BAST		Sisa Kewajiban	
		JUMLAH SIPPT	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah SIPPT BAST	Luas Lahan (m ²)	SIPPT	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8= 3- 5	9= 4-7
1	Jakarta Pusat	201	523.172	28	86.212	173	436.960
2	Jakarta Utara	250	5.254.517	100	2.720.125	150	2.534.392
3	Jakarta Barat	286	5.960.024	113	4.330.793	173	1.629.231
4	Jakarta Selatan	462	2.291.978	105	1.150.752	357	1.141.226
5	Jakarta Timur	276	3.630.110	77	3.151.933	199	478.177
6	Kepulauan Seribu	17	851.503	3	165.413	14	686.090
	Jumlah	1.492	18.511.304	426	11.605.228	1.066	6.906.076

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;
- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan
- d. Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, serta tingkat ketertagihannya yang belum pasti.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.8 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.288.312.191.186,00 dan Rp1.123.316.384.810,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2018 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	420.075.198.002,00	427.835.882.118,00
2	Persediaan Bahan/Material	521.477.597.517,00	421.715.740.286,00
3	Persediaan Barang Lainnya	346.759.395.667,00	273.764.762.406,00
Jumlah		1.288.312.191.186,00	1.123.316.384.810,00

Penjelasan lebih lanjut Nilai Persediaan Per 31 Desember 2018 antara lain sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp420.075.198.002,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp50.454.747.743,00, di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- b. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur sebesar Rp26.647.767.817,00, di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- c. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Barat sebesar Rp16.773.750.661,00 di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

2) Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan/Material sebesar Rp521.477.597.517,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp93.648.141.574,00, di antaranya merupakan persediaan obat-obatan dan vaksin;
- b. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp25.119.476.333,00, di antaranya merupakan persediaan berupa material konstruksi untuk pembangunan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp24.609.643.452,00, di antaranya merupakan persediaan berupa Alat Kontrasepsi dan Pil KB;

3) Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp346.759.395.667,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Bina Marga sebesar Rp90.439.535.753,00, merupakan pemeliharaan jalan di kompleks Instansi Vertikal yang belum diserahkan ke Instansi Vertikal;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp77.249.960.111,00, di antaranya merupakan

bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga antara lain Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim sebesar Rp26.130.817.650,00, Rehap Total Wisma Atlet Senopati/Kopassus sebesar Rp20.076.196.000,00, dan Rehabilitas Asrama AURI Halim Perdana Kusuma sebesar Rp12.343.224.100,00;

- c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp48.496.004.755,00, merupakan bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu di antaranya Pembangunan Gedung Asrama Perwira & Bintara Sepolwan sebesar Rp35.020.197.792,00, Pembangunan Kantor PMI Jakarta Selatan sebesar Rp7.241.324.000,00, dan Pembangunan Gedung Mess dan GOR Makoopsau I Lanud Halim Perdanakusuma sebesar Rp5.018.828.963,00.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari pihak luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp330.251.039.452,00, dengan rincian di antaranya sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp293.355.040.312,00 yang merupakan vaksin dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan;
- b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp13.156.956.733,00 yang merupakan alat kontrasepsi dan pil KB dari BKKBN;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13.047.342.000,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berupa blanko e-KTP; dan
- d. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan yang diterima Tahun 2018 diantaranya senilai Rp2.725.910.327,00 dengan rincian:

1. Kecamatan Cilincing Rp1.155.958.174,00;
2. Kecamatan Koja Rp942.066.048,00;
3. Kecamatan Kemayoran Rp37.616.755,00;
4. Kecamatan Menteng Rp58.391.355,00; dan
5. Kecamatan Pasar Minggu Rp531.877.995,00.

Dari jumlah persediaan tersebut termasuk persediaan slow moving sebesar Rp 40.337.114.362,00 yang terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.854.364.386,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp36.482.749.976,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2018 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp9.592.811.354,00. Di antaranya berupa obat-obatan, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.753.137.408,00;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.831.984.077,00; dan
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.391.396.444,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp2.836.332.781,00.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp6.357.758.242,00 dan telah diakui sebagai beban persediaan.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp51.958.283.137.470,00 dan Rp43.955.635.493.529,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan 2016.

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi DPPAPP.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp557.090.226.397,00, disajikan pada tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2017)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(1.542.832.382)	(338.554.532.458)	(340.097.364.840)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	-	-
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	434.808.750.696	122.281.475.701	557.090.226.397
VII	Saldo Kas dan Bank	-	861.718.256	861.718.256
VIII	Dana di Pemanfaat	427.150.913.165	121.419.757.445	548.570.670.610
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	427.150.913.165	122.281.475.701	549.432.388.866
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel 5.41 sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2018)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(1.857.215.051)	(338.554.532.458)	(340.411.747.509)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	12.000	12.000
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	434.494.368.027	122.281.487.701	556.775.855.728
VII	Saldo Kas dan Bank	-	1.050.289.716	1.050.289.716
VIII	Dana di Pemanfaat	426.836.530.496	121.231.197.985	548.067.728.481

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2018)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	426.836.530.496	122.281.487.701	549.118.018.197
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang DPPAPP) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di DPPAPP per 31 Desember 2018 sebesar Rp434.494.368.027,00. Dari nilai investasi sebesar Rp434.494.368.027,00 tersebut, tercatat sebesar Rp426.836.530.496,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum menjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi pada Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017 (Audited)	Mutasi Tahun 2018		Saldo Akhir 31 Des 2018
			Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1	Saldo Kas dan Bank	0	314.382.669	(314.382.669)	0
2	Dana di Pemanfaat	427.150.913.165	(314.382.669)	0	426.836.530.496
3	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	JUMLAH	434.808.750.696	0	(314.382.669)	434.494.368.027

Rincian dana di pemanfaat Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp434.808.750.696,00 tersaji pada tabel 5.42.

Tabel 5.42

Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK DPPAPP
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp 4.359.876.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp 43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp 8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp 330.750.097.244
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp 13.698.243.589
6	Data TidakLengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp 26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp 7.657.837.531
Jumlah		Rp 434.494.368.027

Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp122.281.475.701,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00 dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp11.314.522.622,00, dikurang Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp338.554.532.458,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.43. Dari nilai investasi sebesar Rp122.281.475.701.00 tersebut tercatat saldo kas dan bank sebesar Rp1.050.289.716 dan

sebesar Rp121.231.197.985,00 berada di pemanfaat. Mutasi Investasi pada UPT Dana Bergulir selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Mutasi Dana Bergulir
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017 Audited	Mutasi Tahun 2018		Saldo Akhir 31 Des 2018
			Koreksi	Pengembalian dari KJK	
1	Saldo Kas dan Bank	861.718.256		188.571.460	1.050.289.716
2	Dana di Pemanfaat:				
a	Dana di Pemanfaat (teridentifikasi)	122.182.819.880	(25.239.000)	(161.939.460)	121.995.641.420
b	Dana di Pemanfaat (tdk teridentifikasi)	(763.062.435)	25.251.000	(26.632.000)	(764.443.435)
	Total Dana di Pemanfaat	121.419.757.445	12.000	(188.571.460)	121.231.197.985
	JUMLAH (1+2)	122.281.475.701	12.000	-	122.281.487.701

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp555.601.184.047,00 sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.174.671.681,00.

Tabel 5.44

Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Lancar	Macet	(dalam rupiah) Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		0,50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	125.007.000	121.106.190.985,00	121.231.197.985
II	Penyisihan	625.035,00	121.106.190.985,00	121.106.816.020

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2018
		0,50%	100%	
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0	434.494.368.027	434.494.368.027
IV	Penyisihan	0	434.494.368.027	434.494.368.027
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih – Executing Agency (II + IV)	625.035	555.600.559.012	555.601.184.047

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp51.957.108.465.789,00 dan Rp43.955.337.582.988,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 7.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp51.662.604.510.789,00 dan Rp43.660.833.627.988,00. Dengan rincian dalam tabel 5.45 sebagai berikut:

Tabel 5.45
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2018 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2017 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0,00	0,00
2.	PD Dharma Jaya	100%	229.631.515.164,00	129.373.197.101,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	2.184.171.363.130,00	1.157.598.698.750,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	1.362.546.256.015,00	1.165.209.030.797,00
5.	PD PAL Jaya	100%	935.754.598.035,00	683.424.757.090,00
	Jumlah		4.712.103.732.344,00	3.135.605.683.738,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	3.262.014.864.094,00	2.879.655.219.572,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,98%	490.334.928.735,00	380.934.130.133,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate PuloGadung	50,00%	258.017.666.950,00	212.809.824.097,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	336.054.861.089,00	299.443.049.949,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.434.716.674.968,00	1.336.493.704.759,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,99%	16.513.489.079.860,00	15.004.074.881.149,00
7.	PT Ratax Armada	28,00%	0,00	0,00
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	8.584.493.260.686,00	8.201.485.715.268,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	438.963.931.154,00	454.320.071.158,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,99%	12.281.866.322.063,00	8.758.878.104.463,00
11.	PT Transportasi Jakarta	99,43%	2.942.053.533.862,00	2.595.702.155.846,00
12.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	408.495.654.984,00	401.431.087.856,00
	Jumlah		46.950.500.778.445,00	40.525.227.944.250,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		51.662.604.510.789,00	43.660.833.627.988,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Investasi pada PDAM Jaya disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM Jaya memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM Jaya Audited tahun 2018 menyajikan saldo awal negatif sebesar Rp509.895.626.937,00 dan penghasilan komprehensif sebesar

Rp199.933.859.215,00. Sehingga saldo ekuitas per 31 Desember 2018 PDAM Jaya negatif sebesar Rp309.961.767.722,00.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp129.373.197.101,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp100.258.318.063,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp10.335.532.689,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PD Dharma Jaya Audited 2017.
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 79.400.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Dharma Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1848 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya Tahun 2018 diberikan dalam rangka pengadaan daging sapi bersubsidi dan pengadaan ternak sapi serta untuk administrasi;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp13.573.292.813,00 yang merupakan pengumuman laba PD Dharma Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 2.033.671.627,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1602 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 1.016.835.812,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu dana sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp229.631.515.164,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.157.598.698.750,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.026.572.664.380,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 935.997.229.164,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah

pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan Proyek Kelapa Village hunian DP 0 Rupiah, penyediaan lahan untuk pembangunan rusunami hunian program DP 0 Rupiah, pembangunan proyek Lebak Bulus;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp136.268.843.482,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.081.263.775,00 untuk mengakui Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional yang timbul karena adanya penambahan ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa kewajiban imbalan kerja dan koreksi saldo laba Tahun 2018;
- d. Mutasi kurang sebesar Rp47.774.672.040,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. Mutasi kurang sebesar Rp1,00 yang merupakan pembulatan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.184.171.363.130,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.165.209.030.797,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp197.337.225.218,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp101,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan Audited PD Dharma Jaya 2018;
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp166.668.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1849 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan dan pembiayaan pasar perkulakan serta pasar buku di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp95.410.632.247,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga

diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp37.407.235.608,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp27.334.171.522,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu pembayaran cadangan DHT, jasa produksi dan pembinaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.362.546.256.015,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp683.424.757.090,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp252.329.840.945,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PD PAL Jaya Audited 2018.
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp 235.219.361.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan

Gubernur Nomor 1850 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2018. Adapun penyertaan modal kepada PD PAL Jaya tahun 2018 diberikan dalam rangka pembangunan jaringan pipa air limbah dan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) serta pembangunan mini komunal, interceptor dan jaringan pipa di Kawasan Kali Item;

- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp43.862.650.931,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.665.177.359,00 yang merupakan untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa bunga deposito, jasa giro dan koreksi cadangan umum;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp15.669.818.960,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1597 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp13.747.529.384,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan

Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial serta koreksi laba/rugi bersih komprehensif.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp935.754.598.035,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp2.879.655.219.572,00. Mutasi tambah tahun 2018 sebesar Rp382.359.644.522,00 yang terdiri dari:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp415.113.033.975,00 yang merupakan pengumuman laba 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang sebesar Rp30.400.000.000,00 merupakan dividen PT Pembangunan Jaya yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp3.262.014.864.094,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station

Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp380.934.130.133,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp109.400.798.602,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp85.500.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1931 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Food Station Tjipinang Tahun Anggaran 2018;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp30.230.110.071,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.432.277,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp5.032.786.787,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 34 tanggal 22 Maret 2018 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.297.956.959,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa tantiem pengurus dan bonus karyawan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp490.334.928.735,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp212.809.824.097,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp45.207.842.853,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp58.114.120.210,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang atas saldo investasi tahun 2018 sebesar Rp12.884.249.518,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate

Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 06 Tanggal 8 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp22.027.839,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp258.017.666.950,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp299.443.049.949,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp36.611.811.140,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp88.754.217.800,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai

Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.509.775.340,00 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Delta Djakarta Audited 2018;
- c. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp54.652.182.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 51 Tanggal 25 April 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 24 dan 31 Mei 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp336.054.861.089,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.336.493.704.759,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp98.222.970.209,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp160.837.332.109,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, dikalikan dengan persentase

- kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp59.903.999.948,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 21 Tanggal 14 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c. Mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.710.361.952,00 untuk mengakui adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.434.716.674.968,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp15.004.074.881.149,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.509.414.198.711,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.232.000.000.000,00 merupakan tambahan

penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1932 Tahun 2018 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2018. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka untuk pembiayaan lanjutan pembangunan Venue Velodrome;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp22.122.170.744,00 yang merupakan bagian laba dari PT Jakarta Propertindo 2018 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp443.580.634,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp95.149.754.635,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp650.000.000.000,00 yang merupakan penerimaan pengembalian penyertaan modal, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4 Pembiayaan Daerah;
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.798.032,00 yang merupakan penyesuaian hasil perhitungan

dividen menggunakan persentase kepemilikan dengan penyetoran dividen;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 16.513.489.079.860,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp8.201.485.715.268,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp383.007.545.418,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp800.126.391.044,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp108.384.534.843,00 untuk mengakui adanya penambahan ekuitas PT Bank DKI berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018 yaitu berupa pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti dan kenaikan dari revaluasi aset tetap, setelah pajak tangguhan;
- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp277.689,00 yang merupakan penyesuaian hasil perhitungan dividen menggunakan persentase kepemilikan dengan penyetoran dividen;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp213.605.061.635,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 95 tanggal 31 Mei 2018. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- e. Mutasi mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp311.898.596.523,00 untuk mengakui adanya pengurangan ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp8.584.493.260.686,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017 yaitu sebesar Rp454.320.071.158,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp15.356.140.004,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,35%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta

Tourisindo per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp438.963.931.154,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp8.758.878.104.463,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp3.522.988.217.600,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp3.660.724.931.448,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (lebak Bulus – Bundaran HI). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional;
- b. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp1.213.254.507,00 untuk mengakui adanya penambahan ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2018, yang merupakan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp138.708.232.336,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,9919%. Pengumuman rugi ini juga diakui

sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp241.736.019,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp12.281.866.322.063,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp2.595.702.155.846,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp346.351.378.016,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.012.208.958,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Unaudited 2018;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp342.339.169.058,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,43%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.942.053.533.862,00. Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta tersebut belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang masih dalam proses inbreng dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, saat ini tengah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Trans Jakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bis Trans Jakarta, halte Trans Jakarta, dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional dan perlengkapan/inventaris kantor. Adapun tujuan dari penilaian kembali aset adalah untuk menjamin keterandalan nilai aset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2017, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017, yaitu sebesar Rp401.431.087.856,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp7.064.567.128,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp8.620.907.481,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2018, dikalikan dengan persentase kepemilikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp15.982.688,00 yang merupakan penambahan ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berupa pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti-bersih pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp1.262.740.032,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp309.583.009,00 yang merupakan pengurang ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2018 berupa keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual dan keuntungan direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual-direklasifikasi ke laba rugi.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp408.495.654.984,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.46.

Tabel 5.46
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	5,99%	13.080.000.000,00	13.080.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
7.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta		0,00	0,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya			294.503.955.000,00	294.503.955.000,00

Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	324.292.891.946.299,00	298.499.135.884.947,00
2	Peralatan dan Mesin	26.134.914.404.283,00	23.984.923.949.031,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	38.173.300.197.016,00	31.214.105.901.427,00
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	44.158.554.876.581,00	40.403.967.992.805,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.627.233.353.138,00	1.676.564.224.112,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.853.184.803.674,00	5.456.879.960.908,00
	Jumlah	436.240.079.580.991,00	401.235.577.913.230,00

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersaji pada lampiran 8.

5.5.1.3.1 Catatan Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.429.773.331.764,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	5.493.373.929.929,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	352.800.000,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	546.660.390,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	88.913.015.000,00
5.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	1.381.329.160,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	1.413.885.000,00
7.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	19.320.448.740.743,00
8.	Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap	Rp	197.102.281.941,00
9.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	33.673.007.000,00
10.	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	580.770.326.797,00
11.	Kapitalisasi Dari Beban Jasa	Rp	30.325.544.804,00
12.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	4.816.123.000,00
13.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	676.655.688.000,00
	Jumlah	Rp	26.429.773.331.764,00

- a. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.493.373.929.929,00, diantaranya:
1. Pengadaan tanah untuk makam umum, hutan cagar alam dan taman sebesar Rp2.337.561.867.000,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 2. Pengadaan tanah untuk rumah susun sebesar Rp1.421.691.460.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 3. Pengadaan tanah untuk waduk dan saluran air sebesar Rp909.548.574.070,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Raya Bekasi (Kel. Cakung Barat dan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) sebesar Rp516.041.319.462,00, pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Seno – Jalan Mesjid Al-Makmur, Jakarta Selatan sebesar Rp99.849.601.500,00, pengadaan tanah untuk wilayah Jakarta Utara (pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Kompil Udin s/d Jalan Akordion, pembangunan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper dan pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur s/d Terminal Pulogadung) sebesar Rp69.891.572.327,00 pada Dinas Bina Marga.
- b. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta berupa hibah tanah untuk rumah dinas pada Kelurahan Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat dari PT Duta Pertiwi kepada Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan BAST No.1471/-077.7 tanggal 17

Desember 1992 dan BAST dari PPAD No. 27441/-076.11 tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp352.800.000,00.

- c. Penambahan aset tetap dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp546.660.390,00 terdapat pada Dinas Kehutanan berupa Tanah Sarana Umum Taman dan Tanah Makam di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- d. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp88.913.015.000,00 terdiri dari tanah untuk bangunan Museum pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI sebesar Rp79.365.000.000,00 dan tanah kosong pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.548.015.000,00.
- e. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi kelima Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp1.381.329.160,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp982.569.120,00 berupa waduk dan saluran air, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp211.290.040,00 berupa biaya inventarisasi pengadaan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp162.470.000,00 berupa biaya pematangan tanah dan turap Rusun Marunda dan Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp25.000.000,00 berupa biaya inventarisasi pengadaan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur
- f. Penambahan Aset Tetap dari Aset Belum Validasi terdapat pada Sudin Pendidikan II – Jakpus sebesar Rp 1.413.885.000,00 berupa lebih catat nilai NJOP tanah untuk kantor Suku Dinas.

g. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.320.448.740.743,00, terdiri dari:

1. Aset fasos fasum yang telah terbit SK Penggunaan/BAST yang telah diserahkan ke SKPD/UKPD sebesar Rp7.764.576.136.182,00; dan
2. Aset fasos fasum yang direklasifikasi kedalam Aset Tetap pada Pejabat Pengelola Aset Daerah berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian keberadaan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan sebesar Rp11.555.872.604.561,00 dengan rincian pada Lampiran 22.

h. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Kas Konsinyasi sebesar Rp197.102.281.941,00, terdiri dari :

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp123.086.155.462,00 diantaranya berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahterimakan ke warga di tahun 2018 untuk lokasi Proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp9.748.328.100,00 sesuai BAST Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Agustus 2018 dan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengadaan Kolam Retensi atau Polder di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara sebesar Rp27.626.000.000,00;
2. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp69.583.858.479,00 berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahterimakan ke warga di tahun 2018 untuk lokasi Kelurahan Cilindak Barat

sebesar Rp17.702.765.092,00, Kelurahan Cipete Selatan sebesar Rp14.858.742.410,00, Kelurahan Lebak Bulus sebesar Rp665.124.200,00 dan Kelurahan Pulo sebesar Rp14.821.304.000,00, sesuai Putusan Pengadilan No.11/Pdt.P/2016/PN.Jak.Sel. Tgl. 27 Desember 2016 dan No.12/Pdt.P/2016/PN.Jak.Sel. Tgl. 30 Desember 2016, Kelurahan Pulo Gebang sebesar Rp5.744.000.000,00, sesuai Putusan Pengadilan No. 04/Cons/2015/PN.Jkt.Tim Tgl. 29 September 2015 Kelurahan Rawa Terate sebesar Rp3.015.471.697,00 sesuai Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.P/Kons/2018/PN.Jkt.Tim Tgl. 28 September 2018 dan No. 19/Pdt.P/Kons/2018/PN.Jkt.Tim Tgl. 28 September 2018, Kelurahan Pegangsaan Dua sebesar Rp11.548.706.000,00 sesuai Putusan Pengadilan No.19/Pen.Kons/2018/PN.Jkt.Utr s.d No.28/Pen.Kons/2018/PN.Jkt.Utr dan Kelurahan Joglo Rp1.227.745.080,00 sesuai Putusan Pengadilan No. 01/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt. Tgl. 10 April 2017 dan No. 02/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt. Tgl. 16 Mei 2018; dan

3. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00 berupa uang titipan di pengadilan yang sudah diserahterimakan ke warga di tahun 2017 untuk lokasi akses pembangunan Toll JORR Terminal Pulo Gebang seluas 3.139 m².
- i. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.673.007.000,00 berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di

Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.

- j. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp580.770.326.797,00 terdiri tanah/lahan yang selesai dikerjasamakan atau habis masa sewanya diantaranya berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp720.383.297,00 dan Jl. Tongkol No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan jakarta utara sebesar Rp28.350.000.000,00, dengan rincian pada lampiran 24.
- k. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp30.325.544.804,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.475.000.000,00 berupa pembayaran ganti rugi kepada Yayasan Kartika atas sebidang tanah yang ditempati oleh SDN Duri Kepa 05/06 yang terletak di Jalan Mangga No. 14 Duri Kepa Jakarta Barat sesuai dengan Keputusan MA No.2337 K/PDT/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp368.159.000,00 berupa biaya perencanaan dan pengawasan atas tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp310.051.940,00 berupa biaya jasa konsultan perancangan dasar, perencanaan dan biaya penyusunan dokumen dan Dinas Sumber Daya Air

sebesar Rp125.173.400,00 berupa biaya penilaian tanah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp47.160.464,00 berupa biaya jasa appraisal atas kegiatan pembelian tanah MT. Haryono.

- I. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp4.816.123.000,00, di antaranya terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.587.000.000,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk lapangan sepakbola dan pada Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.229.119.000,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk kantor kelurahan.
- m. Penambahan aset tetap Tanah dari yang belum dicatat atau baru ditemukan sebesar Rp676.655.688.000,00, terdiri dari:
 1. Fasos Fasum untuk danau/situ, saluran air, Pasar, sekolah dan taman serta aset tetap tanah bangunan pendidikan dan latihan (sekolah), tanah kosong yang sudah diperuntukkan, tanah kampung serta tanah jalan di antaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Rp660.646.512.000,00;
 2. Tanah sarana pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp5.441.040.000,00;
 3. Tanah rumah dinas pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.626.250.000,00;
 4. Tanah eks gedung kantor kelurahan pada Kelurahan Glodok Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.460.611.000,00;

5. Tanah untuk kelurahan pada Kelurahan Menteng Dalam Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.714.796.000,00; dan

6. Tanah untuk taman pada Kelurahan Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp766.479.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp636.017.270.412,00,00 yang terdiri dari:

1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	197.107.203.266,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Rp	4.227.600,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Kas Konsinyasi	Rp	42.190.177.697,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	288.477.029.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	33.673.007.000,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	17.334.000,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	7.500.000,00
8	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	47.622.042.469,00
9	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	26.761.569.000,00
10	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah diakui	Rp	157.180.380,00
Jumlah		Rp	636.017.270.412,00

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp197.107.203.266,00 diantaranya terdapat pada PPAD sebesar Rp196.676.400.000,00 berupa tanah prasarana jalan di jalan kayu tinggi / Jalan tambun rengas Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur seluas 63.444 m², Dinas Kehutanan sebesar Rp385.663.666,00 berupa biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk hutan kota dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp45.139.600,00 berupa biaya appraisal kegiatan pembelian tanah milik Yayasan Satyagama SHGB No. 14250 eks HGB 775/C.Timur di atas HPL No.1/Cengkareng Timur yang berlokasi di Jalan Kamal

Raya 2A (Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat).

- b. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP terdapat pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp4.227.600,00 berupa biaya pengukuran atas pengadaan tanah untuk Saluran air dan Waduk.
- c. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai sebesar Rp288.477.029.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta diantaranya berupa Aset tetap tanah yang menjadi aset yang dipinjampakaikan salah satunya aset tanah yang terletak di Jl. Raden Inten 2 No.3 duren Sawit jakarta Timur sebesar Rp6.745.780.000,00.
- d. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp33.673.007.000,00 terdapat di Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.
- e. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp17.334.000,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.334.000,00 berupa biaya pelayanan konsinyasi atas pengadaan tanah untuk jalan tembus Jl. Sudirman – Jl. KH. Mas Mansyur serta tanah untuk jalan di Jl. Pegangsaan Dua dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp1.000.000,00 berupa uang muka.

- f. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan, terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.500.000,00 berupa pembelian materai untuk pengadaan Tanah Jaringan/Saluran.
- g. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Kesalahan pencatatan nilai sebesar Rp47.622.042.469,00, terdiri dari :
 - 1. Lebih catat nilai pengadaan tanah untuk bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.208.157.469,00;
 - 2. Lebih catat nilai NJOP atas aset Tanah Kantor Sudin pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrai Jakarta Pusat sebesar Rp1.413.885.000,00.
- h. Pengurangan aset tetap Tanah dari koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp26.761.569.000,00 diantaranya:
 - 1. Pencatatan ganda tanah sarana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.009.252.000,00;
 - 2. Kelebihan pencatatan perolehan tanah untuk rumah dinas BLUD Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.165.400.000,00; dan
 - 3. Kelebihan pencatatan nilai perolehan tanah untuk bangunan balai sidang pertemuan pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.380.000.000,00.
- i. Pengurangan aset tetap Tanah dari Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset telah diakui terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp157.180.380,00 antara lain berupa Underpass Salemba-Matraman, Underpass Kartini, Underpass Mampang-Kuningan, STS Bintaro Permai Rel KA, Jembatan Flyover serta biaya Notaris.

Selain nilai Tanah Tahun 2018 sebesar Rp324.292.891.946.299,00, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 34 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 8.409.321,00m2, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 23.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

2) Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.734.206.466.348,00 yang terdiri :

Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi			
1.	Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	2.503.550.334.498,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	2.474.426.840.163,00
	Penambahan dari Belanja BOS	Rp	29.852.455.335,00
	Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	(156.726.000,00)
	Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun 2017	Rp	(572.235.000,00)
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	47.299.184.703,00
3.	Hutang Pihak Ke – 3	Rp	20.028.024.219,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	77.579.645.122,00
5.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	849.642.382,00
6.	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	33.774.786.493,00

7.	Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp	137.571.500,00
8.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	19.318.905.663,00
9.	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	146.500.000,00
10.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	Rp	59.620.000,00
11.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	1.659.720.000,00
12.	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	15.014.292.597,00
13.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	8.036.843.056,00
14.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	7.087.159.804,00
15.	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	5.716.336.668,00
16.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	201.716.015,00
17.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	3.128.843.764,00
18.	Transfer Masuk Sebelum Tahun 2015	Rp	188.200.000,00
19.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	461.716.173,00
20.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	8.967.423.691,00
	Jumlah	Rp	2.753.206.466.348,00

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.474.426.840.163,00 dan Belanja BOS sebesar Rp29.852.455.335,00 pada Dinas Pendidikan setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp156.726.000,00 terdapat pada Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu berupa Belanja Mobil Derek sebesar Rp148.906.000,00 dan Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu berupa Aset Gasoline Jack Hammer Wacker Neuson BH 23 sebesar Rp7.820.000,00 dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun 2017 sebesar Rp572.235.000,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp516.000.000,00 di antaranya berupa Peralatan dan

Mesin Terdapat pula pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar sebesar Rp56.235.000,00 berupa Rotary Filling.

Penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.503.550.334.498,00 di antaranya :

1. Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp632.016.000,00, pengadaan Meja belajar sebesar Rp12.795.200.000,00, pengadaan Kursi belajar sebesar Rp14.727.680.000,00, pengadaan Kursi kerja sebesar Rp1.990.829.400,00, pengadaan Alat pendingin (AC) sekolah sebesar Rp6.660.400.000,00 dan pengadaan Dana BOS sebesar Rp199.636.545.828 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Pengadaan Crawler excavator sebesar Rp7.500.000.000,00, pengadaan Wheel excavator sebesar Rp11.972.882.000,00, pengadaan Dump truck sebesar Rp35.090.470.360,00, pengadaan Pick up sebesar Rp14.789.769.000,00, pengadaan mobil tangki sebesar Rp37.601.053.476,00, pengadaan Mobile Pump sebesar Rp40.848.000.000,00, pengadaan Macadan Roller sebesar Rp2.070.815.895,00, pengadaan Truck Loader + Attachment sebesar Rp6.263.043.160,00, pengadaan Truck + Attachment sebesar Rp5.059.849.169,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
3. Pengadaan Truck loader + attachment sebesar Rp11.968.000.000,00, pengadaan Pick Up sebesar Rp17.919.808.200,00, pengadaan Germor sebesar Rp24.642.534.000,00, pengadaan Sepeda motor sebesar Rp2.897.400.00,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;

4. Pengadaan Pick Up sebesar Rp73.752.657.000,00, pengadaan sepeda motor sebesar Rp12.045.150.000,00, pengadaan Personal Computer sebesar Rp3.161.750.000,00, pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. Pengadaan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp80.673.000.000,00, pengadaan pakaian panas sebesar Rp978.034.200,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp47.299.184.703,00, di antaranya :
1. Kapal motor sebesar Rp9.054.860.500,00 dari PT. Pelabuhan Indonesia II sesuai Akta Hibah No.2479/-1.823.63, Peralatan penangkap lumpur sampah (saringan sampah) sebesar Rp6.311.800.000,00 dari PT. Grand Indonesia sesuai Akta Hibah No.2478/-1.799.2;
 2. Mobil tangki pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.436.632.397,00 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Akualim – Unit Alkal sesuai Akta Hibah dan atau dokumen donasi No.BAST/PPLS/12/II/2018 dan No.19662/-1.774.151; dan
 3. Broadcasting Station (IP Radio) sebesar Rp2.906.554.452,00, Out Side Broad Cast Van Radio sebesar Rp1.569.683.500,00, Server sebesar Rp1.486.609.898,00, Broadcasting Station 5 lokasi sebesar Rp1.279.797.370,00, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sesuai Akta

Hibah dan atau dokumen donasi No.01/HIBAH-KS/D1/07/2017 dan No.BASTO./BNPB/2013.

c. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.028.024.219,00 di antaranya :

1. Stationary Water Pump sebesar Rp12.940.400.000,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan pembayaran Hutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018; dan
2. Mobil pengendalian HPR sebesar Rp2.387.584.800,00, Aksesoris kostum mobil pengendalian HPR sebesar Rp143.616.000,00, Display sebesar Rp101.090.000,00, Sound system sebesar Rp98.120.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan pembayaran Hutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018.

d. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp77.579.645.122,00 di antaranya :

1. Unit Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp20.148.416.200,00 berupa peralatan dan mesin lainnya, reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin dan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin;
2. Dinas Bina Marga sebesar Rp11.183.693.317,00 berupa Pompa lengkap dengan instalasinya sebesar Rp5.646.749.196,00, Genset lengkap dengan Switch Over dengan instalasi dan panelnya sebesar Rp2.571.727.157,00 merupakan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin;

3. Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.541.562.100,00 berupa Lift sebesar Rp1.744.000.000,00, AC Sentral sebesar Rp2.737.973.000,00, Pompa Airasil sebesar Rp1.198.125.000,00, Control Panel sebesar Rp2.680.652.000,00, Alat pengolah air limbah sebesar Rp437.500.000,00, merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp8.557.163.394,00 antara lain berupa Chiller sebesar Rp6.039.000.000,00, Lift sebesar Rp1.524.275.000,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin; dan
 5. Dinas Pendidikan sebesar Rp8.275.616.015,00 berupa Panel Induk sebesar Rp2.708.534.233,00, Panel Lantai sebesar Rp4.236.968.884,00, Pompa booster sebesar Rp343.095.121 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin.
- e. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp849.642.382,00, terdapat pada Kelurahan Pondok Rangan Jakarta Timur sebesar Rp358.649.804,00 berupa pompa kebakaran portable dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp315.435.078,00 antara lain berupa Mini Bus (Penumpang dibawah 14 orang) sebesar Rp201.695.078,00 dan Pick Up sebesar Rp113.740.000,00.
- f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi aset sesuai hasil inventarisasi sebesar Rp33.774.786.493,00 terdiri dari:

1. Peralatan dan mesin lain – lainnya seperti pada Sudin Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp29.044.115.109,00;
 2. Peralatan Mesin pada Sudin Pendidikan II – Jakpus sebesar Rp4.625.350.839,00, berupa Mini Bus sebesar Rp231.250.000,00, Lemari besi / metal sebesar Rp320.572.860,00, Meja rapat sebesar Rp117.851.662,00, AC Split sebesar Rp258.735.000,00, Notebook sebesar Rp351.742.400,00, CPU sebesar Rp151.900.000,00, Meja kerja pegawai non struktural sebesar Rp218.218.000,00, Meja tamu sebesar Rp108.248.400,00, Kursi kerja pegawai non struktural sebesar Rp98.620.280,00, Kursi rapat ruangan rapat staff sebesar Rp419.238.020,00, Proyektor + attachment sebesar Rp152.777.200,00; dan
 3. Peralatan dan Mesin pada Sudin Pendidikan II – Jaktim sebesar Rp105.320.545,00 antara lain berupa CPU sebesar Rp43.500.000,00, monitor sebesar Rp20.000.000,00.
- g. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi aset yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp137.571.500,00 terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp125.609.000,00 berupa Batang bamboo / besi sebesar Rp125.609.000,00 dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebesar Rp11.962.500,00 berupa Note book sebesar Rp11.962.500,00.
- h. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap

pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Fasos Fasum sebesar Rp19.318.905.663,00, terdiri dari:

1. Mobil Pemadam Kebakaran sesuai BAST No.3291/-076.961 dari PT. Pasaraya Toserjaya sebesar Rp1.118.000.001,00;
 2. Pompa sesuai BAST No. 3461/-1.792.3 dan No. 3833/-076.98 dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp15.950.905.662,00 dan Rp200.000.000,00; dan
 3. Mesin – Mesin Pengganti sesuai BAST No.2908/-1.795 dari PT. Metropolitan Kencana sebesar Rp2.050.000.000,00.
- i. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penyelesaian Aset KLB sebesar RP146.500.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah diantaranya berupa Alat Angkut Gondola sebesar Rp125.000.000,00, Kamera Video sebesar Rp15.000.000,00, Air Conditioning Unit sebesar Rp6.500.000,00 sesuai BAST No. 996/-1.795.12 dari PT. Mitra Panca Persada.
- j. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp59.620.000,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman sebesar Rp34.760.000,00 berupa *Software cont off line computer* sebesar Rp34.760.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp24.860.000,00 berupa *Software cont off line computer* sebesar Rp24.860.000,00.
- k. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.659.720.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.469.760.000,00 antara lain berupa Mini bus sebesar

Rp716.760.000,00 dan sedan sebesar Rp753.000.000,00.

l. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa 52 kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp15.014.292.597,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.

m. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp8.036.843.056,00 diantaranya:

1. Stamper sebesar Rp92.328.500,00, Batching plant Rp97.948.400,00, Portable water pump sebesar Rp154,790,800, Floating Work Shop sebesar Rp88.680.900,00, Kursi kerja pegawai non struktural sebesar Rp138.160.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
2. Lampu neon box sebesar Rp715.792.000,00, Mesin bor tangan sebesar Rp10.810.800,00, Stamper sebesar Rp12.069.200 pada Sudin Perindustrian dan Energi – Jakbar;
3. Ozone Transfer Standar sebesar Rp693.000.000,00 pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah; dan
4. Mesin gergaji sebesar Rp198.000.000,00, alat penghancur kertas sebesar Rp90.755.500.000,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

n. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp7.087.159.804,00 diantaranya:

1. Aplikasi Perizinan <http://pelayanan.jakarta.go.id> sebesar Rp2.043.460.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

2. Hammer sebesar Rp29.138.549,00, Mesin potong rumput sebesar Rp421.124.418,00, Gerobak dorong sebesar Rp190.520.000,00 pada Sudin Kehutanan – Jakarta Selatan; dan
 3. Camera video sebesar Rp100.897.500,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.
- o. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp5.716.336.668,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp5.029.867.342,00 antara lain berupa bangku tunggu sebesar Rp41.600.000,00, Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebesar Rp211.262.433,00 antara lain berupa Boneka resucitasi ane sebesar Rp90.846.800,00, Laryngoscope sebesar Rp19.250.000,00, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru – Jakpus sebesar Rp96.800.000,00 berupa kanopi sebesar Rp96.800.000,00.
- p. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp201.716.015,00 terdapat pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan sebesar Rp153.798.000,00 berupa Speed boat sebesar Rp153.798.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp44.000.000,00 antara lain berupa Belanja Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor - 2018 Mesin Poles sebesar Rp33,550,000,00 dan Belanja Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor (Handy Talky) 2018 sebesar Rp10.450.000,00.
- q. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp3.128.843.764,00 di antaranya terdapat pada Unit

Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas sebesar Rp1.970.920.160,00 antara lain berupa Belanja pemeliharaan lampu darat (Pembangunan penyebrangan orang 2018) sebesar Rp1.054.169.600,00 dan Belanja pemeliharaan lampu darat (Pembangunan lampu lalu lintas 2018) sebesar Rp481.184.000,00.

- r. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2015 sebesar Rp188.200.000,00 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Duren Sawit sebesar Rp188.200.000,00 berupa mobil ambulan (Kendaraan Dinas Operasional Minibus Penumpang) dikarenakan BAST penerimaan mobil ambulance tersebut dibawah tahun 2015.
- s. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai dari hasil inventarisasi sebesar Rp461.716.173,00,00 di antaranya Suku Badan Pengelola Keuangan Kota – Jaksel sebesar Rp329.630.956,00 berupa : P.C. unit (personal computer) sebanyak 9 Unit seharga Rp124.523.520, Stabilisator sebanyak 11 unit seharga Rp15.902.700,00, Modem sebanyak 6 unit seharga Rp72.600.000,00, dan Server sebanyak 1 unit seharga Rp42.722.900,00.
- t. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp8.967.423.691,00 di antaranya terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.997.870.260,00, Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.201.474.769,00 berupa peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp8.259.278,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp860.000.000,00 berupa Micro Bus sebesar Rp860.000.000,00 Sudin Perindustrian dan Energi – Jakbar sebesar Rp484.890.105,00 antara lain berupa Lampu hias

mayang sebesar Rp336.676.505,00, Jack hammer sebesar Rp47.500.000,00 dan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp239.943.000,00 antara lain berupa Mainan anak – anak sebesar Rp196.564.500,00, Rak tv sebesar Rp21.780.000,00, Karoseri mobil pakan buah dan sayur sebesar Rp13.200.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp603.216.011.096,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	12.133.384.075,00
2.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Dari Belanja Modal 2018)	Rp	436.473.750,00
3.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	4.890.134.827,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	9.573.633.092,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	4.900.641.863,00
6.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	3.152.904.682,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	285.167.959.050,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	16.646.183.154,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	15.014.292.597,00
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	100.855.773.110,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang – BLUD	Rp	5.161.557.737,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	19.190.000,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.573.068.845,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	45.470.157.535,00
13.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	30.555.740.679,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD	Rp	3.504.179.891,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Jasa	Rp	1.817.600,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	18.809.942.117,00
17.	Transfer keluar sebelum Tahun 2015	Rp	127.850.000,00
18.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	1.590.648.806,00
19.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	31.081.294.962,00

19.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	12.549.182.724,00
	Jumlah	Rp	603.216.011.096,00

a. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp12.133.384.075,00 diantaranya terdapat pada :

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.174.879.362,00 sesuai dengan SK Sekda Nomor 8 Tahun 2019 dan SK Sekda No.1 Tahun 2019 berupa Drum Truck, Pemadat Sampah, Sepeda Motor, Lemari Besi, Meja Tulis, Kursi Putar, Kursi Lipat, dan Meja Komputer;
2. Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.266.011.200,00 sesuai dengan SK Nomor 1068 Th.2014 berupa Bak Penampung/Kolam Ukur, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen;
3. Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp2.140.799.980,00 sesuai SK Penghapusan No 09 Tahun 2019 berupa Micro Bus Penumpang; dan
4. Akademi Keperawatan Jayakarta sebesar Rp1.877.217.055,00 sesuai dengan SK Nomor 1892 Tahun 2017, berupa V.S.W.R. Standing Review, Mesin Ketik Manual, Lemari Besi, Filling Besi, White Board, Overhead Projector, Lemari Kayu, Kursi Besi, Tempat Tidur Besi, Meja Tulis, Kursi Lipat, Meja Komputer, AC Central, Loudspeaker, Wirelles, Timbangan Orang, PC Unit, dan Printer.

b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Dari Belanja Modal 2018) sebesar Rp436.473.750,00 yaitu :

1. Alat Pemadam Portable pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

- Kota Administrasi Jakarta Timur yang diserahkan kepada RT/RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp339.000.000,00; dan
2. Perkakas Bengkel pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diserahkan kepada peserta Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sesuai BAST No 2281/2018 tanggal 20 April 2018 dan No. 2641/2018 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp97.473.750,00.
- c. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp4.890.134.827,00, diantaranya :
1. Alat Peluncur pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.976.891.888,00; dan
 2. Alat Pemadam Portable pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.162.284.012,00
- d. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp9.573.633.092,00 diantaranya :
1. Sudin Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.624.142.100,00 berupa Track Senda, Sepeda Statis, dan berupa peralatan mesin lainnya reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya;
 2. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jaksel sebesar Rp Rp1.550.000.000,00 berupa Bak Air reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan;

3. Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan – Jaktim sebesar Rp1.278.279.657,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PPIKM reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan; dan
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp937.084.500,00 berupa Bangunan Rumah Sakit, Dapur Gizi, Telephone (PABX) dan Push Button Control Panel reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan serta dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- e. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar aset tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp4.900.641.863,00 di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp1.960.178.416,00 di antaranya berupa Kandang Transport Jepit, satwa Parkit Holland, Opset Satwa Rangkong Badak dengan Kotak Kaca, Satwa Reeves Pheasant, Satwa Ring Necked Pheasant, Opset Satwa Macan dahan, Opset Satwa King Kobra dengan Kotak Kaca, Satwa Ayam Brahma, Opset Satwa Rusa Bawean, Satwa Parkit Australia, Rusa tutul, Satwa Manyar, Opset Satwa Trenggiling dengan Kotak Kaca, Satwa Kura-Kura Aldabra, Opset Satwa Kaka Tua Jambul Kuning, Sun conur, Bayan, Kasturi Raja dengan Kotak List Aluminium, Tenda Membran (Kuda Tunggang), Tenda Membran (Masuk Pejalan Kaki Timur), Tenda Membran (Loket Serba Guna), Tenda Membran (Masuk Pejalan Kaki Barat), Tenda Membran (Loket Motor Timur), Tenda Membran (Keluar Kendaraan Timur), Satwa Kura-kura sulcata, Pagar Pintu Elektrik (Gerbang Barat), Pintu Elektrik Kandang Gorila, Pintu Pagar Are Timur Karnivora Center (Pagar

Parkir Masjid Nurul Huda), Pintu Elektrik Simpanse, Rehab Pagar EYE Catcher, Pagar Pintu Elektrik Gerbang Timur.

- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi Belanja Modal 2018 ke KDP sebesar Rp3.152.904.682,00 pada Dinas Pendidikan berupa AC Split.
- g. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp285.167.959.050,00 di antaranya :
 - 1. Excavator sebesar Rp56.012.009.217,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
 - 2. Forklift, Semi Trailer, Mobil Tangki dan berupa aset peralatan mesin lainnya sebesar Rp48.281.504.414,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Handy Talky, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Peralatan Mesin lainnya sebesar Rp38.052.040.565,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- h. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.646.183.154,00 di antaranya :
 - 1. Perangkat Lunak Integrasi dan Management Data, Solarwinds Netflow Traffic Analyzer Module for NPM SLX, Solarwinds Network Performance Monitor SLX, Aplikasi perizinan pelayanan.jakarta.go.id sebesar Rp11.555.969.517,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Server dan Netware Interface External sebesar Rp2.970.741.500,00 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja Dinas Kesehatan; dan

3. Pemeliharaan Lisensi Arc GIS sebesar Rp991.116.500,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI.
- i. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi menjadi aset pinjam pakai sebesar Rp15.014.292.597,00 berupa 52 kendaraan bermotor roda empat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.
- j. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp100.855.773.110,00 di antaranya pada :
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp74.231.885.760,00 berupa Meubeulair, Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Thermometer dan Tensimeter;
 2. BLUD RS Tarakan Dinas Kesehatan sebesar Rp4.194.918.666,00 di antaranya berupa Tester UTP, Urinal Adult, Lampu Baca Radiologi, Nierbeken, Gunting Verban, Tensi Meter, Phisychians Examining Lamp, Bowl stand double, Metzenbaum 20 cm, Tissue 14,5 cm, Dress 18,5 cm, Crille wood 18 cm, Yankuer Subtube 31 cm, Kidney basin 200 x 95 x 40 mm, Peralatan dan Mesin lainnya;
 3. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.996.797.100,00 berupa Jaket Pemadam Kebakaran; dan
 4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.823.009.335,00 berupa Infusing Stand, Food Processor, dan Peralatan Mesin lainnya.
- k. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban

Barang – BLUD sebesar Rp5.161.557.737,00 di antaranya terdapat pada :

1. BLUD Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp518.320.170,00 di antaranya berupa Dvd External, Zulmand Instrument Trolley, Laser Pointer, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Pesawat Telephone, Handy Talky, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas – Jaktim sebesar Rp243.773.020,00 berupa Wheel Chair, Spirometer, dan Peralatan Mesin lainnya.
3. Puskesmas Kecamatan Cakung kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp354.995.439,00 di antaranya berupa Papan Visual, Papan Pengumuman, Timbangan Badan, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
4. Puskesmas Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp270.089.784,00 di antaranya berupa Kursi Besi / Metal, Meja Bayi, Kursi Lipat, Microphone, Stetoscope, Tensi Meter, Dental Cabinet, Wheel Chair, dan berupa Aset Peralatan Mesin lainnya.
5. BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp226.238.020,00 di antaranya berupa Kursi Lipat, Wireless, dan Aset Peralatan Mesin lainnya.
6. BLUD Puskesmas Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp221.307.669,00 di antaranya berupa D Link Modular Connector, Bed Screen, Regulator Oxygen, Kursi Roda, Pulse Oxymetri, Meja Tulis, TP Link, Camera cctv, dan Digital weight scale.

l. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp19.190.000,00 terdapat pada :

1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebesar Rp14.350.000,00 berupa *Portable Water Pump*.
2. Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah sebesar Rp3.520.000,00 berupa Pembelian Jasa Pemasangan Telepon Faximili dan Hand Set.
3. Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Rp1.320.000,00 di antaranya berupa Biaya Jasa.

m. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.573.068.845,00 terdapat pada :

1. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan sebesar Rp1.269.897.900,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Perbaikan pelapisan aspal dengan hotmix, Pemeliharaan Perbaikan kabel Toevoer, dan Pemeliharaan Perbaikan Jaringan Kabel PJU.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru Dinas Kesehatan sebesar Rp103.710.695,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Wallpaper, Vynil Ukuran 15,5m, Pemeliharaan Daun Pintu (50x90cm), Dan Pemeliharaan Daun Pintu (49x93cm).
3. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp102.590.400,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Lt.2 Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Pemeliharaan Back Drop + Logo Arena Bermain Lt.2 Puskesmas Kecamatan Kramat Jati,

Pemeliharaan Lemari Ka.Puskesmas Cat Warna Putih, dan Pemeliharaan Cctv Cawang Orett, Instalansi.

4. BLUD RS Cengkareng sebesar Rp91.300.000,00 di antaranya berupa Pengelolaan Project, Pengontrolan & Pengawasan Project Lt.6, setup dan konfigurasi perangkat jaringan core switch lt.6, Backup & dokumentasi Local area network, Backup & dokumentasi Local area network, Konsultasi Solusi jaringan data, Uji terima Agregate switch, dan Splicing.
 5. PSBI Bangun Daya 2 sebesar Rp4.249.850,00 di antaranya berupa Pemeliharaan Pipa cabang.
 6. Kelurahan Roa Malaka Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.320.000,00 berupa Pemeliharaan Cctv (adaptor DC 12 V Camera).
- n. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp45.470.157.535,00 di antaranya terdapat pada:
1. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.768.941.126,00 antara lain berupa Flashdisk, Antivirus, Pembayaran ATS Oracle CSI:19200158 Tuning & Diagnostic Pack, License cPanel, Pembayaran ATS Oracle MySQL.
 2. Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp9.618.344.038,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin lainnya.
 3. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakbar sebesar Rp5.371.109.315,00 di antaranya berupa Pakaian Pemadam Anak TK,

Safety Protective Axe, Safety Jacket And Pants, Fire Helmet HPS 7000, dan Fire Helmet

4. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.076.579.000,00 berupa Rescue Glove, Fire Suite, Fire Boot, dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran lainnya.
 5. Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.420.867.000,00 yaitu berupa aset Alat Ukur Meter Air.
 6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.603.822.100,00 yang di antaranya berupa Pipa Pemancar, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran lainnya.
- o. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp30.555.740.679,00 di antaranya terdapat pada:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp1.987.832.319,00 berupa Transportable Water Pomp, Filling Besi/Metal, Kursi Biasa/Karyawan, Meja Komputer, Hard Disk, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Tensi Meter, Tabung Oksigen, Resuscitator, serta Peralatan dan Mesin lainnya.
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.924.043.680,00 berupa Kursi Rapat, Bangku Tunggu, Bantal, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii, Handy Talky (Ht), Alat Ukur Kelurusan, Dan Lampu Pijar.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp1.514.791.129,00 berupa Gerobak Dorong, Rak-Rak Penyimpanan, Meja Kayu/Rotan, Kursi Bes/Metal, Kursi Tamu, Dispencer, Printer, Stetoscope, Tensi Meter, Waskom, Kom. Metal, Oxygen Regulator, Resuscitator For Adult, Ogxygen Monometer With Rergulator, serta aset peralatan dan mesin lainnya.
- p. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp3.504.179.891,00 di antaranya terdapat pada:
 1. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing – Jakut sebesar Rp625.475.219,00 berupa Stationary Water Pump, Tang, Lemari Penyimpanan, Papan Tulis, White Board, Rak Kayu, Lemari Kayu, Kursi Biasa/Karyawan, Kursi Lipat, Pesawat Telephone, Sterilisator, Tensi Meter, Waskom, Timbangan Bayi, Instrument Cabinet, Instrument Table, Tabung Oksigen, Bein, Cement Spatula, Burnisher, Excavator, Timbangan Orang Dewasa, Nebulizer, Serta Aset Peralatan Dan Mesin Lainnya.
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas – Jaktim sebesar Rp624.938.873,00 berupa Portable Generating Set, Brake Drum Lathe/Mesin Perata Tromol, Perkakas Bangku Kerja, Tool Kit Boks, Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bayi), Alat Pemadam/Portable, Keyboard, Sterilisator, Stetoscope, Tensi Meter, Waskom, Timbangan Badan, Timbangan Bayi, Treatment Cabinet, Senter, Minor Surgical Set, Dan Aset Peralatan Mesin Lainnya.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas sebesar Rp366.579.993,00 berupa Mesin Kompresor, Meja Makan, Kursi Lipat, Pesawat Telephone, Sterilisator, Instrument Dressing Table, Tensi Meter, Strether, Tabung Oksigen, Baby Bath Tub, Examination Table, Vacuum Exatractor, Reflek Hammer Stainless Steel, Dan Nebulizer.
 4. Puskesmas Kecamatan Tebet kota administrasi Jakarta selatan sebesar Rp245.237.763,00 antara lain berupa Kursi Rapat, Kipas Angin, Hard Disk, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Stetoscope, Tensi Meter, dan Timbangan Badan.
 5. Puskesmas Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp118.924.501,00 di antaranya Timbangan Meja Kapasitas 5 Kg, Sterilisator, Timbangan Bayi, Tabung Oksigen, Hand Piece Burs, Grac Cataract Knipe, Tensimeter Merkuri Complete, dan Optalmuscope.
- q. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Jasa terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru sebesar Rp1.817.600,00 berupa Aset Micropipette.
- r. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp18.809.942.117,00 di antaranya terdapat pada :
1. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jaksel sebesar Rp8.764.488.992,00 berupa Mesin Gunting Plat, Tool Kit Set, Pipa Pemancar, Topeng (Masker) Oxigen, Alat Pembantu Pemadam Kebakaran, Dan Filters Apparatus.

2. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.432.808.110,00 di antaranya berupa Pipa Pemancar, dan Topeng (Masker) Oxygen,
 3. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakarta sebesar Rp2.854.288.340,00 berupa Alat Peluncur, dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran.
 4. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jakarta sebesar Rp951.348.415,00 berupa Peralatan Mesin lainnya.
- s. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena adanya transfer aset sebelum tahun 2018 sebesar Rp127.850.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Barat berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah).
- t. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.590.648.806,00 di antaranya :
1. Koreksi saldo awal atas kesalahan akun Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.459.080.821,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Koreksi nilai kipas angin sebesar Rp54.945.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kecamatan Kalideres Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Koreksi nilai bangku tunggu Sebesar Rp42.116.960,00 pada Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Provinsi DKI Jakarta.
 4. Koreksi nilai aset Kursi Rapat sebesar Rp16.610.000,00 pada Pusat Pendidikan Dan

- Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
5. Koreksi nilai aset Peralatan Las Listrik sebesar Rp8.481.000,00 pada PSPP Khusnul Khotimah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Koreksi nilai Perangkat Lunak sebesar Rp54.945.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kalideres.
 7. Koreksi nilai berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp800.009,00 pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
 8. Koreksi nilai Aset Peralatan Mesin Lainnya sebesar Rp15.000,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- u. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena koreksi kesalahan pencatatan barang berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp31.081.294.962 di antaranya terdapat pada Sudin Pendidikan I – Jaksel berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.044.115.109,00 berupa Peralatan dan mesin lain – lainnya.
- v. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp12.549.182.724,00 di antaranya terdapat pada :
1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan sebesar Rp5.592.510.000,00 di antaranya berupa Peralatan dan Mesin.
 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.112.988.600,00 berupa Pick Up, Sound System,

Camera+Attachment, Proyektor +Attachment, Display, dan Slide Projector.

3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.266.185.000,00 berupa aset Bus Toilet Disabilitas.
4. RumahSakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp1.010.998.649,00 yang di antaranya adalah Lemari Kaca, Kursi Biasa/Karyawan, Tabung Oksigen, Speculum, Infusion Pump, Nierbekken Stainlis Steel, Washing Instrument, Lap Top, Printer, Timbangan Badan, Instrument Kabinet, Examination Lamp, Timbangan, dan Peralatan Mesin Lainnya.

3) Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.204.096.421.115,00 yang terdiri dari:

1	Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja	Rp	3.787.773.213.370,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	3.796.942.343.407,00
	Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	-9.169.130.037,00
2	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	13.631.050.112,00
3	Hutang Pihak Ke-3	Rp	361.291.458.954,00
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	289.783.522.860,00
5	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	3.935.565.383,00
6	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	4.551.121.234.113,00
7	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	651.920.000,00
8	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	25.970.445.637 ,00
9	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	318.649.049.962,00
10	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	153.625.157.742,00
11	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	3.491.540.000,00
12	Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	Rp	193.566.755.541,00

13	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	45.924.610.507,00
14	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	954.324.257,00
15	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	442.024.880,00
16	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	29.998.385.460,00
17	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp.	10.516.003.910,00
18	Transfer masuk sebelum Tahun 2015	Rp	2.930.928.600,00
19	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	117.236.854.505,00
20	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	292.602.375.322,00
Jumlah		Rp	10.204.096.421.115,00

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp3.796.942.343.407,00 setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp9.169.130.037,00 antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.511.608.008,00 berupa pengembalian klaim bank garansi bangunan gedung pendidikan permanen di 28 lokasi sekolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.820.000,00 berupa pembangunan gedung kantor permanen suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp653.352.390,00 berupa Pengembalian Sisa Belanja Langsung TA 2018, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaktim sebesar Rp222.310.819,00 berupa Pengembalian Bank Garansi Pembangunan RPTRA Bidara Cina, dan Pembangunan Pagar Rusun Tipar Cakung, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp92.038.820,00 berupa Gedung UPPD Penjaringan.

Penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2018 sebesar Rp3.787.773.213.370,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.961.233.063.170,00 berupa pembangunan

Rehab Total SDN Sunter Agung 09, Pembangunan BST SMKN 36 Marunda, Pembangunan Rehab Total SDN Tugu Utara 09, Pembangunan Rehab Total SDN Rawa Badak Selatan 03, Pembangunan Rehab Total Gedung Dinas Pendidikan di Jalan Gatot Soebroto Kav.40-44, dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp523.853.814.233,00 antara lain berupa pembangunan rumah susun Nagrak 1-5.

b. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.631.050.112,00 di antaranya terdiri dari:

1. Bangunan Gedung RPTRA pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.362.027.968,00 yang terdiri dari:

a) Bangunan Gedung RPTRA KKO Cilandak yang berasal dari PT. Wilmar Nabati Indonesia sesuai BAST Nomor 395 Tahun 2019 Tanggal 5 Maret 2019

b) Bangunan Gedung RPTRA Triputra Persada Hijau yang berasal dari PT Triputra Agro Persada sesuai BAST No. 6668/-077.923 tanggal 29 Desember 2017

c) Bangunan Gedung RPTRA Jaka Teratai yang berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia sesuai BAST No : 635/-077.923 tanggal 20 Februari 2018

d) Bangunan Gedung RPTRA MH Thamrin yang berasal dari PT Pendawa Properti Indonesia sesuai BAST No. 3686/-077.923 tanggal 12 September 2018.

2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp Rp6.295.882.644,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Bangunan Tempat ibadah dari PT. Bumi Serpong Damai sesuai 968/-0.76.11 tanggal 31 Januari 2018, Rumah pompa dari Warga Pulau Sabira sesuai BAST No. 4127/-076.56, Stasiun Listrik Tenaga Surya dari PT. Paiton Energy sesuai BAST No. 4479/-077.3 tanggal 13 Desember 2018 dan Gedung Serba Guna beserta sarana pelengkapanya dari PT. Pendawa Properti Indonesia sesuai BAST No. 4761/076.76 tanggal 31 Desember 2018.
 3. Bangunan Gedung Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp808.807.000,00 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai BAST Nomor B.12196/DJPT.0/ PL.430.S1/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015
- c. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp361.291.458.954,00 antara lain terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp267.520.340.877,00 berupa Penambahan HD 2018 (Fisik+Pengawasan) pada tahun anggaran 2017 dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp80.335.744.472,00 antara lain berupa gedung bangunan sekolah dan gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto pada tahun 2018.
- d. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp289.783.522.860,00 di antaranya terdapat pada :
1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp188.712.171.779,00 berupa Gedung

Kantor Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp104.695.262.167,00 dan Gedung Pusdiklat Dinas Pemadam Kebakaran Ciracas sebesar Rp44.638.801.000,00 hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan

2. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp61.569.697.571,00 berupa Rehabilitasi Bangunan Olahraga milik 8 UKPD, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.640.146.000,00 berupa Bangunan Rumah Pompa Penataran dan Cempaka Putih hasil Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp3.935.565.383,00 di antaranya terdapat pada:

1. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.694.073.416,00 antara lain berupa Pagar, Pintu Elektrik, Renov Ruang Rontgen dan Ruang Operasi hasil Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin; dan
2. BLUD Puskesmas Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp687.921.102,00 antara lain berupa Ruang TB PKL Balekambang, Canopy, Gazebo hasil Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin.

f. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp4.551.121.234.113,00 di antaranya terdapat pada:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.290.618.418.840,00 berupa pembangunan rusun nagrak tower 6-10 sebesar Rp417.920.059.189,00, pembangunan rusun rotoran

- IV sebesar Rp337.534.206.858,00, pembangunan rusun nagrak tower 11-14 sebesar Rp331.902.145.362,00;
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp680.245.946.370,00 antara lain berupa Gedung Sekolah SDN Petamburan 07, SMPN 93 gunung Sahari, SDN Pademangan Barat 10, SDN Warakas 01/02, SDN Pademangan Barat 11/14, SDN Sungai Bambu 05/06, SDN Lagoa 07/08; dan
 3. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp320.795.108.947,00 berupa Bangunan Rumah Sakit Cilincing.
- g. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp651.920.000,00 terdapat pada :
1. BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp445.200.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium; dan
 2. Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp206.720.000,00 berupa Gedung dan Bangunan.
- h. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi sebesar Rp25.970.445.637,00 terdapat pada :
1. Suku Dinas Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp25.892.093.637,00 berupa Lebih Catat Barang berdasarkan Surat Pernyataan Kasudin Pendidikan 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp78.352.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

- i. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum sebesar Rp318.649.049.962,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Fasos Fasum Provinsi DKI Jakarta antara lain:
1. Gedung dan bangunan kewajiban dari PT.Gading Orchard Rp113.590.702.750,00 sesuai BAST Nomor 1361/01.796.3 Tanggal 17 April 2018;
 2. Rumah Susun Sederhana 4 Blok - 340 unit dan Sarana Pelengkap Lainnya sebesar Rp36.813.000.000,00 dari PT Mandara Permai sesuai BAST No. 3906/-076.343 Tgl 07 November 2018; dan
 3. Gudang Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp969.945.000,00 yang berasal dari PT Coca Cola Indonesia sesuai BAST Nomor 1117/-1.824.24 Tanggal 14 Februari 2018.
- j. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp153.625.157.742,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Koefisien Lantai Bangunan Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa :
1. Revitalisasi Lapangan Banteng sebesar Rp70.991.043.000,00 yang berasal dari PT Sinar Mas Teladan sesuai BAST Nomor 3562/-076.543 Tanggal 10 Oktober 2018; dan
 2. Konstruksi Lapangan BMX Pulomas sebesar Rp27.056.578.000,00 yang berasal dari PT Sinar Mas Teladan sesuai BAST Nomor 2855/-1.785.1 Tanggal 08 Juli 2018.
- k. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.491.540.000,00 berupa Gudang Tertutup

Permanen yang terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- I. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap sebesar Rp193.566.755.541,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Gedung dan Bangunan.
- m. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Persediaan sebesar Rp45.924.610.507,00 terdapat pada :
 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp45.507.339.556,00 berupa Gedung KONI sebesar Rp36.802.042.582,00 dan Gedung PMI Jakarta sebesar Rp8.705.296.974,00; dan
 2. Sudin Pemuda dan Olahraga – Jakpus sebesar Rp417.270.951,00.
- n. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Barang sebesar Rp954.324.257,00 diantaranya terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berupa biaya perencanaan pembangunan gedung di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebesar Rp415.002.500,00.
- o. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Barang - BLUD sebesar Rp442.024.880,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu berupa Renovasi Ruang VVIP Lantai 5 Head Bed 7 Unit, CPG-Playset 039 (Tempat Mainan Anak).
- p. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Jasa sebesar Rp29.998.385.460,00 di antaranya terdapat pada:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp10.043.662.849,00 berupa uang perencanaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan gedung sekolah;
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.498.000.782,00 berupa perencanaan pembangunan Rusun Padat Karya Jakarta Utara sebesar Rp1.351.682.500, perencanaan pembangunan Rusun BLK Pasar Rebo Tower 3-4 sebesar Rp1.178.271.875,00 dan perencanaan pembangunan sarpras Rusun Blok Nagrak sebesar Rp400.688.750,00;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp2.748.196.536,00 berupa Pembayaran Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Baru;
 4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.566.604.975,00 berupa biaya pengawasan pembangunan rumah sakit dan puskesmas; dan
 5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.409.771.500,00 antara lain berupa kantor 226 m² kandang 1.316 m² R potong 43 M² sebesar Rp893.348.500,00, Bagunan utama, pagar dan musholah sebesar Rp272.910.000,00, dan Pembangunan tanggul/sheet pile arah laut Muara Angke sebesar Rp147.455.000,00.
- q. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.516.003.910,00 di antaranya terdapat pada:
1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp3.234.280.000,00 berupa rehabilitasi gedung UPI;
 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.546.048.000,00 berupa biaya perencanaan, pelaksanaan, serta

pengawasan pembangunan gedung kantor permanen;
dan

3. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.907.281.000,00 berupa Pos Petugas Keamanan Dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- r. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari kurang catat transfer masuk sebelum Tahun 2015 sebesar Rp2.930.928.600,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Gedung Puskesmas Kelurahan Susukan transfer dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Tahun 2011.
- s. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp117.236.854.505,00 di antaranya adalah:
 1. Koreksi saldo awal atas kurang catat Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp107.864.792.855,00; dan
 2. Koreksi saldo awal atas duplikasi jurnal koreksi reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.568.550.091,00.
- t. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp292.602.375.322,00 di antaranya terdapat pada:
 1. Dinas Perhubungan sebesar Rp206.466.499.060,00 antara lain berupa JPO, Rambu-rambu, dan halte;
 2. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.456.991.564,00 berupa Flat/Rumah Susun Permanen Blok A-D dan Blok H-M; dan

3. Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.526.680.000,00 antara lain berupa SMK 2 PKP - 4 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp5.996.611.111,00, SMA PKP - 3 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp4.934.600.000,00, SMK 1 PKP - 3 Lantai Hasil penilaian KJPP Karmanto sebesar Rp4.627.777.778,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.244.902.125.526,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	231.917.008.984,00
2.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2018	Rp	1.050.688.509,00
3.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	5.737.744.108,00
4.	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	729.749.913.962,00
5.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	1.218.344.475.399,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	53.919.376.006,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	Rp	7.272.882.416,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	111.169.536.441,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	56.678.102.450,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Beban Barang	Rp	3.442.174.453,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	935.000,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Beban Pemeliharaan	Rp	3.088.109.286,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Persediaan	Rp	1.382.117.096,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) Ke Beban Barang	Rp	7.247.074.403,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang - BLUD	Rp	20.470.000,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Jasa	Rp	175.434.600,00
17.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan	Rp	105.145.149,00
18.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi persediaan	Rp	112.736.605,00
19.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	181.025.139.503,00
20.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	71.262.304.967,00
21.	Pembayaran Utang belanja Modal yang aset telah diakui	Rp	561.200.756.189,00
	Jumlah	Rp	3.244.902.125.526,00

a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp231.917.008.984,00 diantaranya :

1. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Paket 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp62.544.686.215,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
2. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Paket 8, Gedung Pos Jaga Permanen dan Seni Pemanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.860.702.400,00, sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
3. Bangunan Tempat Ibadah permanen dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37.988.762.574,00, sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019
4. Penghapusan Rumah Negara Golongan III Type E Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp14.724.605.678,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019.
5. Penghapusan Rumah Susun Karang Anyar Blok A,B,C,dan D pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.719.040.000,00 sesuai SK Penghapusan No. 146/2019 Tanggal 29 Januari 2019.

b. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp1.050.688.509,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota

Administrasi Jakarta Pusat, sebesar Rp1.050.688.509,00 berupa Perbaikan gedung dan bangunan Lapangan Olahraga yang diserahkan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Pusat sesuai BAST Nomor 2053/1.857.6 Tgl 3 Desember 2018 dan BAST Nomor 2050/1.857.6 Tgl 3 Desember 2018.

c. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp5.737.744.108,00 yang terdiri atas :

1. Aset pada Pejabat Pengelola Aset Daerah senilai Rp5.071.000.000 berupa bangunan masjid yang diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai BAST Nomor 2 Tahun 2018 / No. 185/BWI-DKI/BA/X/2018 Tanggal 30 Juli 2018; dan
2. Aset pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp666.744.108,00 berupa bangunan oceanarium/ observatorium yang diserahkan kepada masyarakat di Pulau Sabira Kel. Pulau Harapan Kec. Seribu Utara sesuai BAST Nomor 2530/BASTB/XII/2017.

d. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp729.749.913.962,00 di antaranya :

1. Flat / Rumah Susun Permanen sebesar Rp271.588.333.059,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang direklas ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
2. Tanah untuk Bangunan Museum sebesar Rp79.365.000.000,00 direklas ke aset tetap Tanah,

Biaya jasa konsultasi perencanaan Museum Bahari sebesar Rp 647, 570.000,00, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pembuatan AMDAL di PPB untuk ijin IMB sebesar Rp386.210.000,00 dan Jasa Konsultan perencanaan sebesar Rp97.625.000,00 direklas ke aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

- e. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP sebesar Rp1.218.344.475.399,00 di antaranya:
 - 1. Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp943.571.416.522,00; dan
 - 2. Pembangunan gedung kantor Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp101.426.381.125,00.
- f. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp53.919.376.006,00 di antaranya :
 - 1. Flat / Rumah Susun Permanen Blok C, Block H, Block I, Block J, Blok K sebesar Rp44.644.145.240,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 2. Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen dan Gedung Asrama Permanen sebesar Rp6.519.360.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- g. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp7.272.882.416,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- h. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai sebesar Rp111.169.536.441,00 yang terdapat Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD)
- i. Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi menjadi aset kekayaan daerah yang disewakan sebesar Rp56.678.102.450,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sesuai dengan...
- j. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp3.442.174.453,00 antara lain terdapat pada SKPD:
 - 1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp865.359.000,00 berupa Pagar Pengaman Lalu Lintas sebesar Rp424.174.650,00 dan Guard Rail sebesar Rp441.184.350,00; dan
 - 2. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.027.994.000,00 berupa Cermin Lalu Lintas dan Rambu Lalu lintas .
- k. Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp935.000,00 terdapat pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah berupa Lem Karpas / Talang, Fiber Frog.
- l. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban pemeliharaan sebesar Rp3.088.109.286,00 antara lain Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Karang Taruna gedung sebesar Rp1.786.357.027,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.
- m. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Persediaan

sebesar Rp1.382.117.096,00 antara lain terdapat pada SKPD :

1. Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp389.194.299,00 berupa Kamper Samarinda Basah, Kawat Las, Besi Waremesh, Pavling Block, dan Kansteen Jepit;
 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp279.125.000,00 berupa Rambu Jalan Dinas Kehutanan sebesar Rp271.541.357,00 berupa Plaket Makam; dan
 3. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp198.583.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.
- n. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Barang sebesar Rp7.267.544.403,00 antara lain terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.382.669.371,00 antara lain berupa Guard Rail sebesar Rp1.027.994.000,00 Cermin Lalu Lintas sebesar Rp351.489.600,00 *Road Barrier Plastic* (MCB Plastik) sebesar Rp47.300.000,00 dan Rambu Penyebrangan sebesar Rp43.813.915,00.
- o. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp20.470.000,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- p. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Jasa sebesar Rp175.434.600,00 terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Kepulauan

Seribu sebesar Rp175.434.600,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.

q. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp105.145.149,00 terdapat pada :

1. Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakbar sebesar Rp44.601.892,00 antara lain berupa Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Kedoya Utara sebesar Rp14.216.751,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Meruya Utara sebesar Rp12.175.805,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA sebesar Rp8.741.480,00, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga RPTRA Krendang sebesar Rp7.173.949,00;
2. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp41.305.000,00 berupa Tugu / Tanda Batas Lain-lain; dan
3. Sudin Kehutanan – Jaktim sebesar Rp19.238.257,00. Merupakan perbaikan pagar existing Taman Lansia PIK.

r. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi persediaan sebesar Rp112.736.605,00 antara lain terdiri dari:

1. Marka Jalan sebesar Rp72.146.605,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kabel NYM 3X 2,5 mm dan MCB Standar PLN 10A Bangunan sebesar Rp40.590.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang.

- s. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi lebih catat nilai sebesar Rp181.025.139.503,00 di antaranya terdiri dari :
1. Bangunan gedung tempat kerja permanen Rp176.661.264.143,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Rehabilitasi untuk BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar sebesar Rp3.437.480.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- t. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi lebih catat barang sebesar Rp71.262.304.967,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.410.075.000,00 dan Sudin Pendidikan I – Jaksel sebesar Rp25.892.093.637,00.
- u. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal Yang Aset Telah diakui sebesar Rp561.200.756.189,00 antara lain :
1. Bangunan Tempat Ibadah Permanen dan Flat / Rumah Susun Permanen sebesar Rp380.556.443.590,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp138.960.743.526,00 merupakan pembayaran hutang pembangunan gedung sekolah tahun 2018.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.978.388.340.114,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	2.195.927.869.729,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	2.196.534.865.666,00

	Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	(606.995.937,00)
2.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	30.861.653.379,00
3.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	309.483.048.738,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	652.671.480,00
5.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	659.882.581.950,00
6.	Reklasifikasi Aset Fesos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	338.791.933.116,00
7.	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	366.377.200.000,00
8.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	99,00
9.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	7.140.248.623,00
10.	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	142.799.800,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	8.623.659.909,00
12.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	55.927.127.764,00
13.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1.459.080.830,00
14.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	3.118.464.697,00
Jumlah		Rp	3.978.388.340.114,00

n. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.195.927.869.729,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp2.196.534.865.666,00 setelah dikoreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp606.995.937,00 berupa Jaringan Penerangan Jalan Umum.

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp2.195.927.869.729,00 di antaranya :

1. Jalan Khusus Underpass, Jalan Khusus Perorangan di Jakarta Selatan, Jalan Provinsi Strategis di Jalan D.I Pandajitan dan Koridor 1 di Jalan Jendral Sudirman sebesar Rp914.104.204.463,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

2. Tanggul Pengaman Pantai NCICD Kali Blencong Bidang Altim, Tanggul banjir Pembangunan Sheet Pile Kali BGR (Boulevard Gading Raya) Bidang Altim, Tanggul banjir Pembangunan Sheet Pile Kali Grogol Bidang Albar sebesar Rp360.305.887.455,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI.
 3. Jalan Provinsi Lokal Trotoar Jl. Panjang Segmet I & Segment II Kec. Kebon Jeruk, Saluran Jl. Madrasah Kec. Cengkareng dan Trotoar Jl. Perjuangan Kec. Kebon Jeruk sebesar Rp 121.605.421.971,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- o. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Pihak Ke-3, sebesar Rp30.861.653.379,00 diantaranya :
1. Jembatan beton yang berasal dari utang Pemda atas Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.995.976.854,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong yang berasal dari utang Pemda atas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.865.676.525,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
- p. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp309.483.048.738,00 di antaranya :
1. Bangunan waduk Rorotan reklasifikasi dari Aset Tetap Fasos Fasum sebesar Rp196.676.400.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Jembatan Penyeberangan Orang reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp34.224.814.169,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

3. Bangunan Dermaga reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.901.141.693,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Seribu.
4. Tempat Pembuangan Sampah reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.023.760.100,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.
- q. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp652.671.480,00 antara lain :
 1. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil reklasifikasi dari Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp 181.771.480,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
 2. Mesin IPAL dari Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin sebesar Rp 177.100.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- r. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp659.882.581.950,00 di antaranya :
 1. Jalan khusus Underpass, Jembatan Beton sebesar Rp658.434.750.521,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Jalan Khusus Komplek sebesar Rp 1.447.831.429,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- s. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp338.791.933.116,00 terdapat pada Pejabat

Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta di antaranya :

1. Konstruksi marga jalan Jl. Kebon Kacang Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp38.536.000.000,00 sesuai BAST No.1914/-1.711.534 tanggal 5 September 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
2. Konstruksi jalan inspeksi kali Sentiong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebesar Rp25.105.555.577,00 sesuai BAST No.3389/-076.21 tanggal 27 September 2017 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
3. Konstruksi marga jalan di Jl. Widya Chandra VII Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp5.891.796.900,00 sesuai BAST No.3904/-076.343 tanggal 7 November 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
4. Kontruksi marga jalan di Jl. TB.Simatupang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp570.006.714,00 sesuai BAST No.3904/-076.343 tanggal 7 November 2018 yang diserahkan ke Dinas Bina Marga.
- t. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penyelesaian Aset KLB/KDB sebesar Rp366.377.200.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Jalan Khusus Simpang Susun Semanggi sesuai BAST No.966/-1.795.12 tanggal 31 Januari 2018 dari PT. Mitra Panca Persada.
- u. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp99,00 terdapat pada Sudin Perindustrian dan Energi – JAKSEL berupa Armature LED SS 200 W.

- v. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp7.140.248.623,00 diantaranya berupa :
1. Jembatan pada Jalan Khusus Flyover Perencanaan FO Bintaro Puspita, Latumenten dan Sunter Permai Martadinata sebesar Rp6.030.910.873,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang IPAL Cikoko, IPAL Rawajati 1 dan 2 sebesar Rp689.879.300,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. Tanggul Banjir Turap Batu Kali Waduk Sigura -Gura dan Saluran Taman Bibit sebesar Rp419.458.450,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- w. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD sebesar Rp142.799.800,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp142.799.800,00 berupa pembuatan IPAL.
- x. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp8.623.659.909,00 di antaranya :
1. Pembangunan SWRO Kelapa Dua Bidang Akualim Sebesar Rp4.120.409.305,00 pada Dinas Sumber Daya Air.
 2. Bangunan Dermaga sebesar Rp2.420.847.165,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- y. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp55.927.127.764,00 di antaranya :

1. Jalan Provinsi Lokal Kecamatan Kembangan dan Jalan Provinsi Lokal Kecamatan Kebon Jeruk sebesar Rp29.145.894.192,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. Pembangunan Turap Kali Ancol sebesar Rp8.693.463.684,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 3. Checkdam/Penahan Sadimen Dinding Penahan sebesar Rp 7.020.108.448,00 pada Unit Pengelola Sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 4. Tanggul banjir sal. Swadarma dan saluran Jl. Sakti sebesar Rp 6.266.035.600,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- z. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.459.080.830,00 di antaranya koreksi saldo awal dikarenakan kesalahan akun saat melakukan reklasifikasi sebesar Rp1.459.080.821,00 pada Sudin Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- aa. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp3.118.464.697,00 diantaranya :
1. kontruksi jalan di Kuningan Jakarta Selatan sebesar Rp2.479.377.953,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi air buangan Domestik Kapasitas Kecil IPAL sebesar Rp419.629.244,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
 3. Jaringan pada sekolah sebesar Rp219.457.500,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp223.801.456.338,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	2.767.500.000,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	88.190.717.440,00
3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	Rp	62.340.466.681,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	4.510.146.374,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pegawai	Rp	63.980.280,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	1.365.102.203,00
7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	Rp	428.865.000,00
8. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan	Rp	23.657.428,00
9. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp	1.973.168.552,00
10. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	24.373.197.815,00
11. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang - BLUD	Rp	25.300.000,00
12. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan	Rp	139.922.100,00
13. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	106.333.150,00
14. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	1.627.359.070,00
15. Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	35.865.740.245,00
Jumlah	Rp	223.801.456.338,00

a. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan SK Penghapusan Nomor 1068 Th.2014 berupa bak penampung/kolam ukur sebesar Rp 2.767.500.000,00 terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

b. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp88.190.717.440,00 di antaranya :

1. Terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp35.231.922.634,00 antara lain berupa :

a) Bangku Tunggu, AC Split, Lift, sebesar Rp11.183.693.317,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin.

- b) Gedung Pos Jaga Permanen, Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, sebesar Rp16.862.837.802,00 Reklasifikasi ke Aset tetap Gedung dan Bangunan.
 - c) Tanaman hias sebesar Rp1.154.480.642,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.
 - d) perencanaan pembangunan flyover Cakung, perencanaan pembangunan flyover Bintaro Puspita, perencanaan pembangunan flyover Tanjung Barat sebesar Rp6.030.910.873,00 Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin dan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 21.059.606.200,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
3. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuangan sebesar Rp12.640.146.000,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- c. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP sebesar Rp 62.340.466.681,00 diantaranya :
- 1. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/ Pembuangan dan Tanggul Banjir sebesar Rp45.876.036.359,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - 2. Jalan Provinsi Strategis di Jalan Sejajar Kanal Banjir Timur Segmen 2 TPST Dinas Kebersihan dan di Jalan Sejajar Kanal Banjir Timur Segmen 1 depan

- Rusun Rawa Bebek sebesar Rp10.211.462.000,00,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
3. tanggul banjir Kali Duri sebesar Rp6.252.968.322,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta .
- d. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp4.510.146.374,00 di antaranya :
1. Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp3.665.060.400,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 2. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran sebesar Rp 750.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 3. Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik sebesar Rp 95.085.974,00 pada Pusat kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- e. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pegawai berupa Upah Pegawai Bidang Alteng (pembangunan waduk) sebesar Rp63.980.280,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- f. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang sebesar Rp1.365.102.203,00 di antaranya :

1. Bollard dan Blind Tile, Tree Grate, Marka Jalan, dan Water Trap sebesar Rp1.300.748.535,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. Jalan Propinsi Kolektor di Jalan Papaya 2 sebesar Rp41.103.672,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
 3. Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPA) sebesar Rp21.709.996,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Administrasi Jakarta Barat.
- g. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa sebesar Rp428.865.000,00 di antaranya :
1. Biaya Jasa Penyelidikan Tanah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 266.860.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Biaya Jasa Penambahan daya listrik di SDN Jatinegara 10, SDN Klender 15, SDN Balimester 06, SMP 158, SMPN 232, SDN Klender 22, dan SMP 158 sebesar Rp157.705.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur.
- h. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp23.657.428,00 di diantaranya :
1. Pembuatan aspal TPU Kampung Kapuk sebesar Rp 16.024.500,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Pipa dan kran Pemadam Kebakaran sebesar Rp 5.885.028,00 pada PSBI Bangun Daya 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- i. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp1.973.168.552,00 di antaranya:
 1. bangunan waduk dan tanggul banjir sebesar Rp1.706.884.265,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 2. water moor dan bangunan tiang lampu taman sebesar Rp186.422.637,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Diffuser/pemecah angin dan Gerobak Dorong sebesar Rp65.054.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI.
- j. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp24.373.197.815,00 di antaranya :
 1. Jalan Kabupaten Kolektor dan Jalan Kabupaten Lokal sebesar Rp 16.459.293.193,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Jalan Propinsi Lokal sebesar Rp3.502.491.532,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Jalan Propinsi strategis propinsi sebesar Rp 3.079.028.054,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- k. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal

2018) ke Beban Barang - BLUD terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp25.300.000,00 berupa Instalasi Penangkal Petir Manual.

l. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp139.922.100,00 terdiri dari :

1. biaya pemeliharaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang sebesar Rp132.922.100,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil sebesar Rp7.000.000,00 pada Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

m. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp106.333.150,00 diantaranya :

1. Sumur dengan pompa sebesar Rp81.517.150,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
2. Sumur dengan Pompa sebesar Rp 13.860.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

n. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.627.359.070,00 diantaranya:

1. koreksi Lebih Catat Nilai KIB D berupa saluran air rumah susun sebesar Rp1.627.358.970,00 pada Suku

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Timur.

- o. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.865.740.245,00 antara lain berupa STS Cipinang Lontar, Fly Over, Underpass Kartini, Underpass Mampang-Kuningan, Underpass Matraman– Salemba.

5) Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp166.786.736.458,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	Rp	137.982.740.117,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	137.229.694.165,00
Belanja Modal Tahun 2018 (Penambahan dari Belanja BOS)	Rp	753.045.952,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	12.292.685.034,00
3. Hutang Pihak Ke-3	Rp	72.897.200,00
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	15.575.180.042,00
5. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	312.405.000,00
6. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	339.167.000,00
7. Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	5.390.000,00
8. Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	102.432.000,00
9. Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	85.140.000,00
10. Kapitalisasi dari beban Pemeliharaan	Rp	8.800.000,00
11. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	65,00
12. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	9.900.000,00
Jumlah	Rp.	166.786.736.458,00

- a. Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp137.982.740.117,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp137.229.694.165,00 setelah koreksi Penambahan dari

Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp753.045.952,00.

Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp137.982.740.117,00, di antaranya :

1. Buku-buku pengadaan dari Dana BOS sebesar Rp129.142.777.053,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan Buku berupa buku penunjang proses belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan, sebagai berikut;

No	Jenjang	Jumlah
1	SD/SDLBN	Rp 66.404.449.800
2	SMP/SMPLBN	Rp 35.888.510.010
3	SMA/SMALBN	Rp 19.598.018.705
4	SMK	Rp 7.251.798.538
	Jumlah	Rp 129.142.777.053

2. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp2.560.249.698,00 dan E-book sebesar Rp51.455.250,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

3. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.049.185.490,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- b. Penambahan aset tetap Lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.292.685.034,00, diantaranya pada:

1. Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.115.500.000,00 diantaranya berupa Jam Tangan H. benyamin Sueb sebesar Rp1.900.000.000,00, Kacamata H. benyamin Sueb

sebesar Rp1.500.000.000,00, Piala Citra H. Benyamin Sueb sebesar Rp2.000.000.000,00, dan Piala HUT ABRI Ke 26 - H. Benyamin Sueb sebesar Rp500.000.000,00 sesuai BAST Hibah No4344/-076.86 tanggal 12 Desember 2018.

2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp177.185.000,00 diantaranya berupa Ayunan Bangku RPTRA Triputra Persada Hijau sebesar Rp20.000.000,00, Perosotan RPTRA Triputra Persada Hijau sebesar Rp15.000.000,00, dan *Fitness Outdoor Elliptical Machine* RPTRA MH Thamrin sebesar Rp10.752.500,00 sesuai BAST Hibah No.6668/-077.923 tanggal 29 Desember 2017.
3. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp34,00 berupa Hewan Jalak Putih, Kakatua Pipi Merah, Kakatua Jambul Jingga, Jalak Bali, dan lainnya yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- c. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari hutang pihak Ke-3 berupa buku-buku sebesar Rp72.897.200,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp15.575.180.042,00, di antaranya:
 1. Pembangunan Sarana Umum Fasilitas Olahraga Halim Perdana Kusuma reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.851.250.870,00, Rehab Fasilitas Olahraga Komplek Pondok Bambu sebesar Rp3.494.995.200,00 reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Alat-alat olahraga seperti Chest Press, Abdominal, Treadmill, dan lainnya reklasifikasi dari KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.624.142.100,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 3. Pohon-pohon atau rumput reklasifikasi dari KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.183.554.326,00 dan peningkatan ruang server reklasifikasi dari KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.977.100,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- e. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp312.405.000,00, di antaranya :
1. Satwa Kura-kura Aldabra sebesar Rp36.800.000,00, Opset Satwa Macan Dahan sebesar Rp8.800.000,00 dan Satwa Kura-kura Sulcata sebesar Rp7.900.000,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Ondel-ondel sebesar Rp37.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan.
- f. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp339.167.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa gardu listrik.
- g. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp5.390.000,00 terdapat pada PSP Bhakti Kasih Dinas Sosial sebesar Rp5.390.000,00 berupa alat musik marawis.

- h. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp102.432.000,00 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berupa hewan kelinci.
- i. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp85.140.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu berupa lukisan motif bunga beserta bingkai sebesar Rp78.265.000,00 dan lukisan pemandangan sawah beserta bingkai sebesar Rp6.875.000,00.
- j. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp8.800.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa peralatan musik.
- k. Penambahan aset tetap lainnya dari koreksi kurang catat nilai sebesar Rp65,00 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa aset tetap lainnya.
- l. Penambahan aset tetap lainnya dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp9.900.000,00 terdapat pada Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa tanaman buah-buahan sebesar Rp5.000.000,00 dan tanaman toga sebesar Rp4.900.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp216.117.607.432,00 yang terdiri dari:

1. Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018)	Rp	11.422.500,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	76.961.311.468,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	97.292.899,00
4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	Rp	134.337.932.282,00

5.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	Rp.	803.157.300,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	Rp	1.560.280.558,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke beban Pemeliharaan	Rp	287.166.000,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	1.980.326.439,00
9.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	78.717.986,00
Jumlah		Rp.	216.117.607.432,00

a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) sebesar Rp11.422.500,00, terdiri atas:

1. RPTRA sebesar Rp6.747.500,00 pada Kelurahan Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan, BAST No724/2018 tanggal 3 Desember 2018.
2. Alat Tennis Meja sebesar Rp4.675.000,00 pada Kelurahan Pinangsia Kota Administrasi Jakarta Barat, BAST No274/077.3 tanggal,23 Oktober 2018.

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp76.961.311.468,00 di antaranya:

1. Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun, Pembangunan Lampu Stadion Sepakbola Kamal Muara, dan Gedung Futsal sebesar Rp 65.251.140.996,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga DKI Jakarta, ada pun rincian atas reklasifikasi sebagai berikut :

(a). Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp61.569.697.571,00

(b). Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB F (KDP) sebesar Rp3.681.443.425,00

2. Gedung kesenian di Jl. Moh.Kahfi reklasifikasi ke KIB F (KDP) sebesar Rp 6.515.781.200 pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 3. *Lighting Equipment* reklasifikasi ke KIB B Peralatan dan mesin pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 3.561.690.550,00.
- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp97.292.899,00, di antaranya:
1. Alat Musik/Band, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Volley, Alat Badminton sebesar Rp42.842.000,00 pada UKPD PSBL Harapan Sentosa 3 Dinas Sosial.
 2. Alat Selam sebesar Rp22.666.380,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 3. Alat Tennis sebesar Rp12.485.000,00 pada Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Beban Barang sebesar Rp134.337.932.282,00 di antaranya:
1. Buku – buku sekolah sebesar Rp129.968.720.205,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp 1.792.453.108,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.005.196.740,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan sebesar Rp803.157.300,00 di antaranya:
1. Tanaman rumput gajah dan rumput manila sebesar Rp700.346.900,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara.
 2. Besi pipa galvanized Diameter 1,5" dan Besi pipa hitam Diameter 2" sebesar Rp65.943.900,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- f. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang sebesar Rp1.560.280.558,00 di antaranya:
1. Alat Badminton, Permainan dan Olah Raga sebesar Rp 977.490.856,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Dinas Pemuda dan Olah Raga.
 2. Tumbuhan Tanaman Hias sebesar Rp497.831.281,00 Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Binatang berupa Kelinci sebanyak 75 ekor sebesar Rp22.481.250,00 Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
 4. Tanaman sebesar Rp 19.541.500,00 pada Kelurahan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat.
- g. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp287.166.000,00 terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Pemeliharaan Gedung dan Preon AC.

h. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan sebesar Rp1.980.326.439,00 diantara:

1. tanaman Pohon/Rumput sebesar Rp1.236.360.926,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Buku Bibliografi Katalog, Ensyclopedia, Kumpulan Karya Musik sebesar Rp719.909.813,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi jakarta Utara.

i. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp78.717.986,00 terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa hewan Banteng, Harimau, Rusa.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.942.420.523.862,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	509.881.653.106,00
2.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Rp	1.406.194.672.595,00
3.	Reklasifikasi Aset tetap – Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi aset tetap	Rp	13.100.000,00
4.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	26.331.098.160,00
5.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1,00
Jumlah		Rp.	1.942.420.523.862,00

a. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Antar Aset tetap sebesar Rp509.881.653.106,00 di antaranya:

1. Reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp271.633.472.659,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta diantaranya pembangunan rusun nagrak 1-5 sebesar Rp95.807.608.637,00, Pembangunan rusun kel penggilingan dan rusun pulo gebang sebesar Rp70.127.078.058,00, Pembangunan rusun JL Rorotan IV sebesar Rp30.222.223.442, Pembangunan rusun nagrak tower 11-14 sebesar Rp28.129.253.167,00, Pembangunan rusun nagrak tower 6-10 sebesar Rp 27.775.763.681,00, Pembangunan rusun penggilingan sebesar Rp3.916.644.398,00, Pembangunan rusun rawa bebek sebesar Rp190.306.862.
 2. Gedung rumah sakit reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.750.582.636,00 pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Pembangunan kantor Sudin Arsip Timur reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.642.841.120,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP sebesar Rp1.406.194.672.595,00 di antaranya:
1. Reklasifikasi dari belanja modal tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp954.235.929.175,00, diantaranya reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Gedung Dinas Pendidikan sebesar Rp185.950.490.000,00, reklas dari belanja modal

gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan saluran air Pembangunan gedung sekolah yang belum diselesaikan sebesar Rp61.630.398.940, reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Sekolah SDN Lagoa 01, 02 dan 05 sebesar Rp31.962.127.642,00, reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Rehab Total Gedung SDN Kali Baru 05 sebesar Rp26.908.009.665,00 dan Rehab Total Gedung SLBN Menteng Dalam 05 sebesar Rp23.286.399.368,00.

2. Pembangunan gedung baru Rumah Sakit reklasifikasi dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp101.426.381.125,00 pada BLUD Rumah Sakit Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Reklasifikasi dari belanja modal jalan, jembatan dan trotoar tahun 2018 sebesar Rp83.583.261.517,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 1 dan Pkt. 3) sebesar Rp18.434.770.000,00, Pek. Beton Cepat Keras (Peningk. Jalur Busway) sebesar Rp16.806.510.000,00, Hotmix Jl. Asia Afrika Cs (Peningkatan Jalan2 Strategis) sebesar Rp16.025.805.000,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jaktim Pkt 1 (Jl. Pulomas dan sekitarnya) sebesar Rp8.540.124.040,00 dan Paket 2 (Trotoar Jl. Pemuda dan Jl. Perintis Kemerdekaan) sebesar Rp8.253.294.669,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jaksel Pkt 1 (Peningkt. Saluran Jl. Sisingamangaraja, Jl. Panglima Polim Raya dan sekitarnya) sebesar Rp2.088.240.000,00, Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakbar Pkt 1 (Jl. Kalijodo dan sekitarnya) sebesar

Rp1.873.542.360,00, Jembatan Jl. Yos Sudarso (Marka – Peningkatan Jembatan) sebesar Rp701.250.000,00 dan Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakpus Pkt 4 (Kelengkapan prasarana trotoar) sebesar Rp648.263.448,00,

c. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp13.100.00,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.350.000,00 berupa honor pembangunan bangunan rehabilitasi dari kegiatan yang tidak dilanjutkan dan Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.750.000,00 berupa honor dari pembangunan bangunan rehabilitasi dari kegiatan yang tidak dilanjutkan.

d. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp26.331.098.160,00 di antaranya:

1. Biaya perencanaan dan pengawasan pada gedung Dinas Pendidikan dan beberapa biaya perencanaan, pengawasan dan ahli hukum gedung sekolah sebesar Rp9.520.979.646,00 pada Dinas Pendidikan.

2. Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebesar Rp2.915.993.590,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.

3. Pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.147.717.000,00, diantaranya Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan

Kumuh Kelurahan Kapuk Jakbar sebesar Rp532.510.000,00, Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kel. Kedaung Kali Angke Jakbar sebesar Rp514.503.000,00, Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kebon Jeruk Jakbar sebesar Rp408,298,000,00.

- e. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Koreksi kurang catat nilai sebesar Rp1,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.546.115.681.096,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	189.522.992.134,00
	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap		
2.	Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	5.327.788.416.081,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	Rp	332.264.375,00
4.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Rp	15.152.441.407,00
5.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	13.047.358.099,00
6.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	272.209.000,00
	Jumlah	Rp	5.546.115.681.096,00

- a. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp189.522.992.134,00 diantaranya:

- 1) Tambahan pembangunan progress fisik gedung BPMPKB reklasifikasi ke KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.712.171.779,00 pada

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Perencanaan CAP penataan kawasan Kelurahan Kramat Pela reklasifikasi ke KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp312.396.700,00 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - 3) Pembangunan Shelter Motor Rusun Cakung Barat reklasifikasi ke KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp249.431.705,00 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp5.327.788.416.081,00 di antaranya:
1. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.290.780.888.840,00, diantaranya Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 – 10 Jakarta Utara sebesar Rp417.920.059.189,00, Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Jakarta Utara sebesar Rp337.534.206.858,00 dan Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11 - 14 Jakarta Utara sebesar Rp331.902.145.362,00.
 2. Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp732.017.840.078,00, diantaranya Underpass Mampang – Kuningan sebesar Rp168.449.277.377,00, Fly over Pancoran sebesar Rp150.178.074.146,00 dan STS Cipinang Lontar sebesar Rp107.783.732.313,00.

3. Bangunan gedung sekolah sebanyak 47 buah sebesar Rp680.245.946.370,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 4. Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sebesar Rp362.826.580.288,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- c. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp332.264.375,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berupa biaya perencanaan dan pengawasan JPO yang akan ditetapkan statusnya pada majelis penetapan status aset.
- d. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) Menjadi Persediaan sebesar Rp15.152.441.407,00 terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berupa Gedung PMI Jakarta Selatan dan Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta.
- e. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp13.047.358.099,00 terdiri atas :
1. Nilai pembangunan yang belum diselesaikan sebesar Rp7.511.608.008,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 2. kesalahan pengambilan koreksi pada saat koreksi Audited sebesar Rp5.535.750.091,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- f. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar

Rp272.209.000,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Pulau Kelapa RW 04 dan Perencanaan X-1 Pemeliharaan dan Peningkatan Bidang Jalan, Jembatan dan Pengendali Banjir Tahun 2015.

5.5.1.3.2 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah

Dalam mengelola Aset Tetap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan penatausahaan yang sistematis dan berkelanjutan sehubungan dengan besarnya nilai dan kompleksitas Aset Tetap yang dimiliki. Salah satu upaya dalam memperbaiki penatausahaan Aset Tetap dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tindak lanjut temuan tentang penatausahaan Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, maka sesuai Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD/UKPD untuk data yang berakhir 31 Desember 2017. Data BMD yang berakhir 31 Desember 2017 sebanyak 1.615.531 item BMD dengan senilai Rp401.235.577.913.232,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ASET TETAP	TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI
1	Tanah	30.383	298.499.135.884.947
2	Peralatan dan Mesin	872.706	23.984.923.949.032
3	Gedung dan Bangunan	19.128	31.214.105.901.427
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.172	40.403.967.992.805

No.	ASET TETAP	TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI
5	Aset Tetap Lainnya	631.660	1.676.564.224.112
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	482	5.456.879.960.908
	TOTAL	1.615.531	401.235.577.913.232

kegiatan inventarisasi BMD pada SKPD/UKPD s.d Tanggal 31 Desember 2018 yaitu, jumlah item BMD yang tercatat pada KIB, dari 1.615.531 item BMD, sebanyak 1.534.703 item atau 95% telah diinventarisasi atau senilai Rp306.918.993.136.567,00 (76,49%) dari total BMD per 31 Desember 2017 (audited) sebesar Rp401.235.577.913.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

Progress penyelesaian kegiatan inventarisasi BMD pada SKPD/UKPD s.d 31 Desember 2018 yaitu, dari 1.615.531 item BMD senilai Rp401.235.577.913.232,00 yang tercatat pada KIB, sebanyak 1.534.703 (95%) item BMD atau senilai Rp306.918.993.136.567,00 (76,49%) telah diinventarisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ASET TETAP	TELAH INVENTARISASI		BELUM INVENTARISASI		TOTAL ASET	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
1	Tanah	21.658	235.197.727.723.101	8.725	63.301.408.161.846	30.383	298.499.135.884.947
2	Peralatan dan Mesin	836.952	17.363.772.129.313	35.754	6.621.151.819.719	872.706	23.984.923.949.032
3	Gedung dan Bangunan	12.740	19.731.983.698.197	6.388	11.482.122.203.230	19.128	31.214.105.901.427
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.111	30.196.310.603.272	28.061	10.207.657.389.533	61.172	40.403.967.992.805
5	Aset Tetap Lainnya	629.955	673.231.175.037	1.705	1.003.333.049.075	631.660	1.676.564.224.112
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287	3.755.967.807.647	195	1.700.912.153.261	482	5.456.879.960.908
	TOTAL	1.534.703	306.918.993.136.567	80.828	94.316.584.776.665	1.615.531	401.235.577.913.232

Berdasarkan Laporan Progress Hasil Inventarisasi BMD, terdapat BMD milik Pemprov DKI Jakarta dalam kondisi Aset Rusak Berat, Aset dikerjasamakan dengan Pihak Lain, dan kondisi pencatatan hasil inventarisasi lainnya. Pemprov DKI

Jakarta dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 belum melakukan koreksi atau penyesuaian atas hasil sementara inventarisasi sampai dengan 31 Desember 2018 dikarenakan inventarisasi BMD masih dilaksanakan s.d Juni 2019 dan terdapat tahapan inventarisasi yang belum selesai dilaksanakan.

Diantara upaya untuk menyelesaikan aset bermasalah atas hasil inventarisasi Pemprov DKI Jakarta membentuk Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan Instruksi Gubernur No.22 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Barang Milik Daerah Yang Tidak Diketahui Dan Ditemukan Fisiknya Melalui Majelis Penetapan Status Barang Daerah.

Tugas dari Majelis Penetapan Status Aset ini adalah menerima laporan permasalahan dan usulan tindak lanjut kegiatan inventarisasi BMD, menetapkan status aset atas BMD yang belum ditemukan, dan memberikan rekomendasi koreksi atas Laporan Keuangan berdasarkan keputusan sidang Majelis Penetapan Status Aset.

b. Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan Sistem Informasi Aset Terintegrasi (SIMASTER), beberapa submenu yang telah digunakan dalam SIMASTER adalah:

1. e-sensus
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan inventarisasi BMD.
2. Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi aset.

3. e-penghapusan
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan BMD
4. e-fasos fasum
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan Aset Fasos Fasum.
5. e-brandgang
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.
6. e-bank data asset
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan atau backup data asset mulai dari data kapwatan, data sensus 2003, sensus 2008, data SIA 2016.
7. e-dokumen
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan dokumen tanah dan kendaraan milik Pemprov DKI Jakarta dalam file (digitalisasi dokumen).

SIMASTER akan terus disempurnakan guna menyesuaikan dengan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantara penyempurnaan SIMASTER meliputi :

1. e-persediaan
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mencatat barang persediaan. Saat ini e-persediaan sedang dilakukan uji coba oleh SKPD/UKPD.
2. e-pemutakhiran data dan informasi
sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran kode barang, serta pemutakhiran data dan informasi barang.

3. e-KDO

sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan khusus Kendaraan Dinas Operasional.

4. e-Peta Bidang

sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui asset tanah, bangunan dan JIJ dalam peta bidang yang sudah terkoneksi dengan peta bidang yang ada dalam laman jakartasatu.

5. e-Simaks

sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui pemanfaatan dan kerjasama asset tanah dan bangunan.

6. e-RKBMD

sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menganalisa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

c. Aset Bersejarah

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap.

Pada tanggal 18 Januari 2018, terjadi peristiwa kebakaran gedung Museum Bahari. Atas aset gedung tersebut tidak dapat dilakukan penghapusan aset tersebut dan akan dilakukan revitalisasi aset, dikarenakan Museum Bahari merupakan aset bangunan cagar budaya. Upaya percepatan pembangunan Museum Bahari telah dilakukan di antaranya dengan adanya Tim Percepatan Penyelamatan Museum Bahari.

Pada tahun 2018, tim ini telah merumuskan tahapan pembangunan Museum Bahari berdasarkan penilaian dari ahli struktur bangunan dan tim arkeolog untuk memastikan pembangunan gedung aman dan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya.

d. Pengungkapan Lainnya

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu penyelesaian proses penilaian dan penerbitan Peraturan Daerah inbreng kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta akan menginbrengkan/menyerahkan aset BLUD Transjakarta sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta, setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Independen.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway

ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Perkara Aset Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Sampai Dengan Tahun 2018**

No	Perkara Pada Tingkat	Menang Inkracht	Kalah Inkracht	Masih Proses Perkara
1	Pengadilan Negeri	5	0	19
2	Pengadilan Tinggi	5	0	16
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	5	3	16
4	Mahkamah Agung (PK)	13	3	13
	JUMLAH	28	6	64

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam KIB. Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIPM Jaya dengan Nomor Sertifikat No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB. Sedangkan untuk asset tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun seluas 8.511 m2 yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini secara fisik masih dalam penguasaan pihak lain.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Permasalahan Tanah Maruya Selatan

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas + 78 ha milik Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Upaya hukum atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Upaya hukum Perlawanan (derden verzet) atas penetapan eksekusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010

yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

- Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan Kavling DKI seluas 248.162 m², di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m² dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m². Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan

putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan Kembali Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No. 2971 K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :

- a. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juli 2010.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali tersebut. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdapat Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang diajukan oleh Benny Himawan, dkk. (sebanyak 32 orang), warga Meruya Selatan yang tanahnya di klaim oleh PT Portanigra melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Tergugat II). Perkara tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saat ini sedang dalam proses kasasi.

(b). Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Sumber Waras

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 tersebut sudah termasuk Aset Tanah hasil Pembelian RS Sumber Waras pada TA 2014 senilai Rp755.689.550.000,00. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI untuk menyelesaikan permasalahan pembelian Lahan Sumber Waras antara lain, yaitu

1. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2017 tentang tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014, meminta Yayasan Kesehatan Sumber Waras segera memulihkan indikasi kerugian daerah dan menyetorkan minimal senilai Rp191.334.550.000,00
2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah mengirim surat Surat No. 11160/-1.93 tanggal 23 agustus 2017 kepada Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang isinya yaitu, meminta Yayasan Kesehatan

Sumber Waras untuk memulihkan indikasi kerugian negara dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua yayasan kesehatan sumber waras telah memberikan jawaban melalui surat no. 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal jawaban atas permintaan pemulihan indikasi kerugian daerah bahwa yayasan kesehatan sumber waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aset Gedung dan Bangunan dari dua pengembang sebagai penyerahan aset yang merupakan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. PT Muara Wisesa Samudera Pulau G, berupa Bangunan Rusunawa Daan Mogot senilai Rp89.655.700.000,00 dan;
2. PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I, berupa Pembangunan Rusunawa Muara Baru senilai Rp90.539.800.000,00.

Serah terima yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI dengan Pengembang dilakukan berdasarkan Persetujuan Prinsip Pemenuhan sebagian kewajiban tambahan kontribusi reklamasi Pantai Utara.

Berdasarkan Persetujuan Prinsip bahwa penyerahan aset yang dilakukan oleh dua Pengembang yaitu PT Muara Wisesa Samudera Pulau G dan PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I pada Tahun 2015 merupakan sebagian dari Tambahan Kontribusi Reklamasi diluar Kontribusi sebesar 5% (lima persen),

sedangkan kewajiban Tambahan Kontribusi Reklamasi secara keseluruhan akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur secara tersendiri.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses komunikasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan perda yang di antaranya mengatur mengenai besaran persentase kewajiban tambahan kontribusi, sehingga belum dapat memastikan nilai kewajiban tambahan kontribusi yang harus dibebankan kepada pengembang.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	324.292.891.946.299,00	-	324.292.891.946.299,00
Peralatan dan Mesin	26.134.914.404.283,00	(16.960.005.516.840,00)	9.174.908.887.443,00
Gedung dan Bangunan	38.173.300.197.016,00	(16.622.961.008.537,00)	21.550.339.188.479,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.158.554.876.581,00	(17.229.653.118.106,00)	26.928.901.758.475,00
Aset Tetap Lainnya	1.627.233.353.138,00	(620.146.359.568,00)	1.007.086.993.570,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.853.184.803.674,00	-	1.853.184.803.674,00
Jumlah	436.240.079.580.991,00	(51.432.766.003.051,00)	384.807.313.577.940,00

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai

pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.207.183.241.669,00. Selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp76.817.812.254,00,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.284.001.053.923,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2018 tersaji dalam tabel 5.47 sebagai berikut.

Tabel 5.47
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga Jun 2017	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo DCD 31 Des 2017	Pendapatan Bunga Deposito Dcd Sd Des Tahun 2018	Saldo DCD 31 Des 2018
1	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Des-18	329.191.299.049	20.954.508.380	350.145.807.429
2	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Des-18	674.633.449.959	42.943.223.329	717.576.673.288
3	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Des-18	151.250.284.028	9.594.854.644	160.845.138.672
4	Bank DKI Cp. Abd. Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Des-18	52.108.208.633	3.325.225.901	55.433.434.534
Jumlah						1.207.183.241.669	76.817.812.254	1.284.001.053.923

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp32.764.722.477.911,00 dan Rp42.164.362.692.472,00 dengan rincian dalam tabel 5.48 sebagai berikut:

Tabel 5.48
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017

ASET LAINNYA	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	6.236.787.982,00	11.425.215.959,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(456.154.101.747,00)	(436.569.854.252,00)
4. Aset Tidak Berwujud	268.396.464.046,00	250.497.917.582,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(231.061.175.510,00)	(194.675.014.902,00)
6. Aset Lain-Lain	29.568.121.758.935,00	38.443.034.317.729,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.556.050.520.646,00)	(2.408.055.628.942,00)
Jumlah Aset Lainnya	32.764.722.477.911,00	42.164.362.692.472,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori. yaitu :

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50M2 s.d 100 M2 yang

akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.

3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah dilokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemprov. DKI Jakarta.
4. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2018 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan di sajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.
5. Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 Rp11.425.215.959,00 yang selama tahun 2018 terdapat mutasi penambahan karena penjualan unit kepada warga non program Rp2.156.723.042,00 sehingga menjadi Rp13.581.939.001. Dari nilai tersebut terdapat mutasi pengurangan selama tahun 2018 karena pembayaran angsuran unit Rp1.583.469.569,00, Perpindahan ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran atas nilai yang sudah jatuh tempo Rp5.740.468.960,00 (*Lihat Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah*) dan koreksi pencatatan Rp21.212.490,00.

Tabel 5.49
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Rusun	31 Desember 2017	Penambahan karena penjualan unit ke Non Program	Pembayaran Angsuran Unit	Perpindahan ke Akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Koreksi Pencatatan	31 Desember 2018
1	Bendungan Hilir II	00,00	1.179.336.128,00	138.436.247,00	589.668.064,00		451.231.817,00
2	Petamburan	00,00	921.996.914,00	53.977.530,00	460.998.457,00	21.212.490,00	385.808.437,00
3	Karet Tengsin II	11.425.215.959,00	55.390.000,00	1.391.055.792,00	4.689.802.439,00		5.399.747.728,00
Total		11.425.215.959,00	2.156.723.042,00	1.583.469.569,00	5.740.468.960,00	21.212.490,00	6.236.787.982,00

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.165.233.264.851,00 dan Rp6.498.705.739.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.334.353.360.433,00	2.034.296.585.918,00
2	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	377.306.351.038,00	0,00
3	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	246.966.276.000,00	268.354.876.000,00
4	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.015.407.572.572,00	3.004.854.572.572,00
5	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.191.199.704.808,00	1.191.199.704.808,00
	Jumlah	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga berdasarkan hasil dari sensus aset kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan penerimaan aset tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Seluruh Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Aset yang disewakan, Aset yang dipinjam pakaikan, KSO, BOT dan BTO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 10.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahterimakan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan. Aset kekayaan Daerah yang dipinjamkaikan mencakup aset berupa bangunan. Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp 0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor

51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;

- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Mutasi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.982.292.006.010,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama Operasi (KSO)

Mutasi kurang Aset Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp21.388.600.000,00 karena terdapat pencatatan ganda dengan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kaliangke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

2. Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

Mutasi tambah Aset Bangun Guna Serah atau Build, Operate and Transfer/BOT sebesar Rp10.553.000.000,00 yaitu kewajiban dari PT. Duta Pertiwi. Penambahan tersebut terdiri dari Jembatan Penyeberangan yang

dilengkapi sarana pertokoan sebesar Rp10.026.000.000,00, Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp518.000.000,00 dan Shelter Bus sebesar Rp9.000.000,00

3. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Untuk tahun 2018, akun aset lain – lain yaitu aset kerjasama pihak ketiga lainnya dipecah menjadi dua yaitu aset yang disewakan dan aset yang dipinjam-pakaikan kepada pihak ketiga. Pembagian tersebut untuk dapat melihat jelas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disewakan dan dipinjam-pakaikan kepada pihak ketiga. Pengertian sewa adalah jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pihak yang melakukan penyewaan adalah pihak ketiga berupa badan hukum lainnya, swasta maupun perseorangan. Besaran nilai sewa adalah sesuai dengan tarif sewa yang berlaku dan diatur dalam ketentuan. Terdapat beberapa mutasi Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah dari reklas aset tetap sebesar Rp90,351,109,450.00 yang terdiri dari aset tetap tanah senilai Rp33.673.007.000,00 dan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp56.678.102.450,00. Salah satu Aset tersebut berupa berupa 3 bidang aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset tanah yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00. Untuk aset tetap gedung dan bangunan yaitu berupa gedung pendidikan permanen yang terletak di Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan

Ciracas Jakarta Timur oleh Yayasan STIKES PKP
senilai Rp56.678.102.450,00

- b. Terdapat mutasi kurang ke reklas aset tetap sebesar Rp790,294,334,935.00 yang terdiri dari aset tetap tanah senilai Rp580,770,326,797.00, aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp15,957,252,597.00 dan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp193,566,755,541.00. Aset tanah yang dimaksud diantaranya berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp720.383.297,00 dan Jl. Tongkol No. 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan jakarta utara sebesar Rp28.350.000.000,00. Untuk Aset tetap berupa peralatan mesin berupa kendaraan dinas operasional mobil Corolla Altis tahun 2010 sebesar Rp376.500.000,00. dan untuk aset tetap gedung dan bangunan diantaranya yang terletak di Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih sebesar Rp109.772.693,00 dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Pejaten Mas Kelurahan pasar Minggu kecamatan pasar minggu Jakarta Selatan senilai Rp63.256.700,00.

4. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Untuk tahun 2018, aset yang dipinjampakaikan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pihak yang melakukan pinjam pakai adalah antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Tidak ada tarif atau biaya. Terdapat beberapa mutasi Aset Kekayaan

Daerah Yang Dipinjamkaikan selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah reklas dari Aset Tetap menjadi aset Kekayaan daerah yang dipinjamkaikan sebesar Rp 415,603,818,038.00 diantaranya aset tetap tanah senilai Rp288,477,029,000.00, dan aset peralatan dan mesin senilai Rp 15,957,252,597.00 serta aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp111,169,536,441.00. Aset tetap tanah yang menjadi aset yang dipinjamkaikan salah satunya aset tanah yang terletak di Jl. Raden Inten 2 No.3 duren Sawit jakarta Timur sebesar Rp6.745.780.000,00. Salah satunya aset peralatan mesin berupa kendaraan dinas operasional dan Salah satu instansi yang melakukan pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Badan pengawas Pemilu yang meminjam mobil Corolla Altis tahun 2010 senilai Rp376.500.000,00. Dan salah satu Aset tetap gedung dan bangunan yang menjadi aset yang dipinjamkaikan salah satunya aset gedung bangunan yang terletak di jl. Ranco Indah kelurahan tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa jakarta selatan senilai Rp42.384.693.832,00
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp526.800.000,00 merupakan koreksi kurang catat aset yang dipinjamkaikan. Penambahan aset pinjam pakai berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 6 unit dengan rincian adalah minibus toyota kijang sebanyak 5 unit senilai Rp416.800.000,00 dan satu unit minibus mithsubishi kuda senilai Rp110.000.000,00. Aset tersebut berupa 3 buah aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai

Rp22.583.847.000, dan aset yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00.

- c. Terdapat mutasi kurang Rp377,306,351,038.00 diantaranya senilai aset tetap tanah senilai Rp254,804,022,000.00, aset tetap peralatan mesin senilai Rp14,824,332,597.00 dan aset tetap gedung dan bangunan Rp107,677,996,441.00. Salah satu Aset tanah tersebut berupa 3 buah aset tanah yang berlokasi di Jalan Industri nomor 9 Jakarta Pusat senilai Rp9.256.610.000, aset yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat senilai Rp22.583.847.000, dan aset yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM, 17 Klender Jakarta Timur senilai Rp1.832.550.000,00 Untuk aset peralatan dan mesin rincian aset tersebut berupa 10 unit kendaraan dinas operasional yang sudah selesai masa pinjam pakainya dan dikembalikan kepada Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp1.659.720.000,00.,Salah satu asetnya yaitu minibus Toyota avanza yang dikembalikan dari Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Aset tersebut senilai Rp189.960.000,00. Dan untuk aset gedung dan bangunan sebesar Rp3.491.540.000,00 salah satunya yaitu bangunan gudang tertutup permanen yang dipinjamkaikan PT PAL Jaya Bumi yang terletak di Jl. Raya Kepiting No. 5 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2017, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2018.

Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BOT	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BOT)	2.944.316.110.000,00	0,00	2.944.316.110.000,00
Gedung dan Bangunan (BOT)	60.547.462.572,00	59.987.212.572,00	560.250.000,00
Jalan Irigasi Jaringan (BOT)	10.544.000.000,00	527.200.000,00	10.016.800.000,00
Jumlah	3.015.407.572.572,00	60.514.412.572,00	2.954.893.160.000,00

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BTO	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BTO)	884.593.925.000,00	0,00	884.593.925.000,00
Gedung dan Bangunan (BTO)	306.605.779.808,00	211.638.189.626,00	94.967.590.186,00
Jumlah	1.191.199.704.808,00	211.638.189.626,00	979.561.515.186,00

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.027.723.975.502,00	00,00	1.027.723.975.502,00
Peralatan dan Mesin	264.985.000,00	217.495.000,00	47.490.000,00
Gedung dan Bangunan	306.340.489.931,00	143.469.514.181,00	162.870.975.750,00
Aset Tetap Lainnya	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00
Jumlah	1.334.353.360.433,00	143.687.009.181,00	1.190.666.351.252,00

Nilai Buku Aset yang dipinjamkaikan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjamkain	31 Desember 2018		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	254.804.022.000,00	0,00	254.804.022.000,00
Peralatan dan Mesin	14.824.332.597,00	13.745.684.200,00	28.570.016.803,00
Gedung dan Bangunan	107.677.996.441,00	26.975.585.549,00	81.109.269,00
Jumlah	377.306.351.038,00	40.314.490.372,00	336.991.860.666,00

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp268.396.464.046,00 dan Rp250.497.917.582,00.

Penambahan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.964.566.464,00 yang terdiri dari:

1.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	1.311.983.310,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	16.652.583.154,00
Jumlah		Rp	17.964.566.464,00

- a. Penambahan aset tak berwujud dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.311.983.310,00 merupakan Hibah BCA Pengembangan Sistem Panggilan Darurat 112 Tahun 2017 berupa perangkat lunak di antaranya Aplikasi Call Tracking System. Support Principle (Support Advantage). Verint Recording (Software dan Support Maintenance (inc. Upgrade).
- b. Penambahan aset tak berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.652.583.154,00 di antaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.555.969.517,00 berupa Modul APM F5 BIG-IP 5250V, Modul LTM F5 BIG-IP 5250V, Perangkat Lunak Integrasi dan Management Data, Solarwinds Netflow Traffic Analyzer Module for NPM SLX with 1 Year Maintenance, Solarwinds Network Performance Monitor SLX with 1 Year Maintenance, Aplikasi Perizinan <http://pelayanan.jakarta.go.id>, BLUD RS KOJA Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.970.741.500,00 berupa Software Server dan Netware Interface External, dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp991.116.500,00 berupa Lisensi Arc GIS.

Pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.020.000,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap	Rp	59.620.000,00
2.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	6.400.000,00
Jumlah		Rp	66.020.000,00

- a. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap pada BLUD Puskesmas Kecamatan Matraman – Jakarta Timur sebesar Rp 34.760.000,00 berupa perangkat lunak dan Rumah Sakit Umum Kecamatan Jagakarsa sebesar Rp24.860.000,00 berupa Software Cont Off-Line Computer.
- b. Pengurangan aset tak berwujud karena koreksi lebih catat nilai terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.400.000,00 berupa Sistem Persediaan Keuangan Dan Akuntansi.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa software, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2017, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2018.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Harga Perolehan	:	Rp268.396.464.046,00
Akumulasi Amortisasi	:	(Rp231.061.175.510,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2018	:	Rp37.335.288.536,00

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp27.012.071.238.289,00 dan Rp36.034.978.688.787,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.50.

Tabel 5.50
Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Lain-Lain	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
1. Aset Rusak Berat	1.294.264.292.791,00	1.029.033.534.463,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(533.878.015.618,00)	(236.354.535.362,00)
3. Aset Belum Validasi	0,00	61.159.117.130,00
4. Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya	12.004.597.604.538,00	12.203.999.757.024,00
5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(7.272.882.416,00)	(141.939.995.364,00)
6. Aset Tetap - Fasos Fasum	16.149.712.906.617,00	24.937.676.009.079,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.011.088.253.833,00)	(2.029.761.098.216,00)
8. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
9. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.622.602,00
10. Aset BP THR Lokasari	38.328.511.922,00	38.328.511.922,00
11. Kas Dikonsinyasikan	0,00	154.912.104.244,00

Aset Lain-Lain	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
12. Aset yang belum ditetapkan statusnya	10.200.000,00	135.809.000,00
13. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	14.132.460.000,00
14. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	63.418.859.750,00	0,00
15. Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(3.811.368.779,00)	0,00
Jumlah	27.012.071.238.289,00	36.034.978.688.787,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.294.264.292.791,00 dan Rp1.029.033.534.463,00. Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp343.694.774.329,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat.

Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat di antaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp56.013.389.217 salah satunya berupa excavator Eika unit Alkal, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp48.281.504.414,00 antara lain berupa semi trailer dan mobil tangki, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.644.145.240,00 antara lain berupa rumah susun permanen yang diusulkan untuk penghapusan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi

DKI Jakarta sebesar Rp38.052.040.565,00 antara lain berupa motor pompa portable viar/tohatshu.

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp78.464.016.001,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	75.244.877.518,00
2.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	1.501.562.382,00
3.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	1.717.576.101,00
	Jumlah	Rp	78.464.016.001,00

- a. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebesar Rp75.244.877.518,00 di antaranya terdapat pada BLUD RS Tarakan sebesar Rp18.629.074.863,00 berupa alat-alat medis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.772.061.648,00, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.626.869.565,00 berupa perlengkapan kerja dan Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp10.930.000.000,00 antara lain berupa kendaraan micro bus.
- b. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.501.562.382,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp445.200.000,00 berupa Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium, Kelurahan Pondok Rangun Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp358.649.804,00 berupa Pompa Kebakaran Portable dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp315.435.078,00 berupa Kendaraan Mini Bus.
- c. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp1.717.576.101,00 terdapat pada

Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp1.550.126.687,00 antara lain berupa aset yang terdapat pencatatan ganda terhadap barang di KIB D dan Aset Rusak Berat, Kelurahan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp69.096.270,00 berupa perlengkapan kerja, Kelurahan Petukangan Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp62.500.000,00 berupa perlengkapan kerja, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp35.834.000,00 berupa perlengkapan kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur sebesar Rp19.144 berupa perlengkapan kerja.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali, tidak dilakukan penyusutan atas Aset Tetap – Rusak Berat.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp533.878.015.618,00 merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Harga Perolehan	: Rp1.294.264.292.791,00
Akumulasi Penyusutan	: (Rp533.878.015.618,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2018	: (Rp760.386.277.173,00)

2) Aset Tetap - Belum Validasi

Saldo Aset Tetap - Belum Validasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan

Rp61.159.117.130,00. Pada Tahun 2018 atas aset belum validasi tersebut dilakukan penyesuaian karena setelah dilakukan inventarisasi telah tercatat sebagai aset sekolah.

3) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.004.471.995.538,00 dan Rp12.203.999.757.024,00. Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya antara lain terdapat pada:

a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp11.000.422.215.000,00 terdiri dari :

No	Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	Tanah Situ TMP Kalibata	146.250.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementerian Sosial
2	Tanah Situ Taman Ria Senayan	372.750.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
3	Tanah Situ Rawa TMII	18.420.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
4	Tanah Cakung Drain	498.042.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
5	Tanah Cengkareng Drain	304.760.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
6	Tanah Kali Grogol	139.503.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
7	Tanah Kali Ciliwung Gunung Sahari	154.791.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
8	Tanah Kali Sunter	1.284.192.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
9	Tanah Kali Sunter	1.367.129.400.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
10	Tanah Kali Krukut	1.194.562.500.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
11	Tanah Kali Item	5.514.828.000.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
12	Tanah Kali Pesanggrahan	5.194.315.000	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Dinas Kehutanan
Total		11.000.422.215.000	

b. Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp277.453.836.839,00 merupakan aset di lingkungan Dinas Perhubungan yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis

Penetapan Status Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/UKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	213.846.633.694,00
2	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	62.835.864.308,00
3	Sudin perhubungan – Jakarta Timur	508.596.000,00
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gadung	193.312.757,00
5	Sudin perhubungan – Jakarta Pusat	65.124.000,00
6	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	4.306.080,00
Total		277.453.836.839,00

c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.245.467.488,00 merupakan aset di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

2. Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang

mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp.200.000.000.000,00; 3)Lost Opportunity senilai Rp.500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp.800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m². Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

(a).Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

(b).Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor : 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs. :

a. Laporan Di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno,dkkdengan dugaan tindak pidana

- membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- b. Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
 - d. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
 - e. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.
3. Aset yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah dan akan diselesaikan dalam proses Majelis Penetapan Status

Barang Milik Daerah yang sebesar
Rp29.474.929.576,00.

4) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT, izin prinsip, dan fasos fasum kewajiban. Saldo aset fasos fasum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.149.712.906.617,00 dan Rp24.937.676.009.079,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember Tahun 2018	31 Desember Tahun 2017
1	Tanah	13.911.291.970.057	22.345.972.814.650
2	Peralatan dan Mesin	19.211.616.321	37.412.521.983
3	Gedung dan Bangunan	371.587.352.514	488.922.991.441
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.832.160.014.224	2.049.566.560.504
5	Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	15.801.120.501
Total		16.149.712.906.617	24.937.676.009.079

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada 31 Desember tahun 2018 adalah :

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	10.978.622.076.150	19.413.302.920.743
Peralatan dan Mesin	1.118.000.001	19.318.905.663
Gedung dan Bangunan	225.660.965.425	342.996.604.351
Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.195.953.615	396.602.499.895
Aset Tetap Lainnya	0	339.167.000
Total	11.384.596.995.191	20.172.560.097.652

Penjelasan atas rincian mutasi aset fasos fasum adalah sebagai berikut :

a) Fasos Fasum – Tanah

Saldo 31 Desember 2017 Audited Rp 22.345.972.814.650

Mutasi Tambah :

1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	10.117.945.645.150
2. Kurang Catat	Rp	860.676.431.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	10.978.622.076.150

Mutasi Kurang :

1. Pencatatan ganda	Rp	92.854.180.000
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	7.764.576.136.182
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	11.555.872.604.561
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	19.413.302.920.743
Jumlah Mutasi	Rp	(8.434.680.844.593)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	13.911.291.970.057

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp10.117.945.645.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
1	PT Satria Pusaka Permata Perkasa	Tanah Marga Jalan	A	339	M ²	2.360.457.000
2	PT Sinar Mas Teladan	Tanah Taman Kota/Lingkungan	A	584	M ²	9.591.032.000
		Tanah Jalur Hijau	A	1.460	M ²	23.977.580.000
		Tanah Prasarana Jalan	A	4.440	M ²	74.481.080.000
3	PT Duta Regency Karunia	Tanah Prasarana Jalan	A	1.063	M ²	30.880.125.000
		Tanah Taman Kota/Lingkungan	A	266	M ²	3.749.270.000
4	PT Prakarsa Semesta Alam	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5	M ²	114.329.964.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	1	M ²	30.625.602.000
5	PT Wiratara Prima	Tanah Terbuka Biru	A	20	M ²	734.100.000
6	PT Gandaria Permai (PT Dharmala Gandaria Permai)	Tanah Rencana Jalan	A	614	M ²	14.303.130.000
		Tanah Penyempurna Saluran Waduk	A	432	M ²	10.063.440.000
7	PT Wisma Purnayudha Putra dan PT Prabu Budi Mulia Q.Q. PT Kencana Graha Optima	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi	A	418	M ²	33.661.540.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	3.076	M ²	226.915.319.000
8	PT Shine Prime International Q.Q. PT Simprug Mahkota Indah	Tanah Prasarana Jalan	A	1.947	M ²	41.009.661.000
9	PT Tokyu Land Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	1.496	M ²	37.344.648.000
		Tanah Jalur Hijau	A	212	M ²	5.292.156.000
10	PT Grha Satu Enam Lima, Tbk.	Tanah Prasarana Jalan	A	193	M ²	3.117.915.000
11	Pt. Ngk Busi	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	202	M ²	930.210.000
12	PT Grasera Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	999	M ²	17.505.477.000
13	PT Modernland Realty	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	13.856	M ²	32.589.312.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	14.187	M ²	33.367.824.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	53.705	M ²	126.314.160.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	13.588	M ²	31.958.976.000
		Tanah Sarana Umum Kota (Suk)	A	11.698	M ²	27.513.696.000
14	Universitas Indraprasta PGRI	Tanah Prasarana Jalan	A	535	M ²	1.486.765.000
		Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	103	M ²	286.237.000
15	PT Mitra Sindo Makmur	Tanah Prasarana Jalan	A	63.444	M ²	196.676.400.000
		Tanah Jalur Hijau (H.4)	A	8.061	M ²	24.989.100.000
16	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	23.488	M ²	195.490.624.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	5.218	M ²	43.429.414.000
17	PT Bahana Tirta Adhiguna	Prasarana Pendidikan	A	285	M ²	2.172.555.000
		Jalur Hijau (H.4)	A	448	M ²	3.415.104.000
		Hijau Tegangan Tinggi (H.5)	A	3.767	M ²	28.715.841.000
		Hijau Tegangan Tinggi (H.5)	A	4.516	M ²	34.425.468.000
		Terbuka Biru (B.1)	A	274	M ²	2.088.702.000
		Prasarana Jalan	A	14.476	M ²	110.350.548.000
18	PT Hiba Utama dan PT Hiba	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	3.776	M ²	17.365.920.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.140	M ²	5.649.600.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Penyempurna Saluran air/waduk (Psw)	A	1.826	M ²	4.820.640.000
19	PT So Good Food	Tanah Prasarana Jalan	A	1.283	M ²	6.536.885.000
20	PT Kangar Consolidated Industries	Tanah Prasarana Jalan	A	1.064	M ²	10.262.280.000
21	PT Central Pondok Sejahtera	Lahan Rencana Penghijauan	A	3.071	M ²	6.682.496.000
22	PT Swadharma Primautama	Tanah peruntukan jalan	A	2.607	M ²	119.981.961.000
23	Yayasan Dana Pensiun Bri	Tanah Rencana Jalan	A	494	M ²	36.527.842.000
24	PT Mitra Panca Persada	Tanah Prasarana Jalan	A	394	M ²	37.658.520.000
25	PT Jakarta Realty	Tanah Marga jalan (Mjl)	A	8.910	M ²	95.007.330.000
		Tanah Marga drainase	A	950	M ²	10.129.850.000
26	PT Swadharma Kerry Satya	Tanah yang terkena rencana jalan	A	7.834	M ²	295.643.130.000
27	PT Estetika Binagriya	Tanah yang terkena rencana jalan	A	1.235	M ²	39.402.075.000
28	PT Caturmas Karsaudara	Tanah yang terkena rencana jalan	A	1.941	M ²	56.721.843.000
29	PT Trikarya Idea Sakti	Tanah prasarana jalan	A	180,43	M ²	3.744.824.650
30	PT Danmotors Vespa Indonesia/ PT Sumber Selatan Nusa	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.252	M ²	60.300.540.000
31	PT Indofica Housing	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5.599	M ²	117.931.737.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	954	M ²	20.094.102.000
32	PT Indofica Housing	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	28.758	M ²	479.971.020.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	2.410	M ²	40.222.900.000
33	PT Mitra Karya Sukses	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	1.195	M ²	21.958.125.000
		Tanah Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr)	A	530	M ²	9.738.750.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	772	M ²	14.185.500.000
34	PT Sunter Agung	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	36.169	M ²	761.827.647.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.778	M ²	58.513.014.000
35	PT Sunter Agung	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.217	M ²	114.237.375.000
36	PT Gading Orchard	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	A	8.007	M ²	90.519.135.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.683	M ²	41.636.315.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	1.114	M ²	12.593.770.000
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	44.394	M ²	501.874.170.000
37	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	804	M ²	19.255.800.000
38	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	66.005	M ²	222.766.875.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	20.684	M ²	69.808.500.000
		Tanah Penyempurna Hijau Umum/Taman (Phu/Pht)	A	48.438	M ²	163.478.250.000
39	PT Oyama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	771	M ²	15.069.195.000
40	PT Bangun Mandiri Pesona	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	8.610	M ²	181.352.430.000
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.136	M ²	44.990.568.000
41	PT Nusa Karya Kencana	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	11.631	M ²	166.823.433.000
		Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi (Ptt)	A	6.048	M ²	86.746.464.000
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	A	875	M ²	12.550.125.000
42	PT Mandiri Dipta Cipta	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	11.394	M ²	381.072.330.000
		Tanah Saluran (Psw)	A	4.630	M ²	154.850.350.000
43	PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	23.578	M ²	332.331.910.000
44	PT Summarecon Agung, Tbk Qq PT Nusa Kirana Real Estate	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	47.727	M ²	672.712.065.000
45	PT Summarecon Agung, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	25.890	M ²	249.709.050.000
46	PT Tawima Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	22.270	M ²	237.465.010.000
47	PT Tawima Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	35.880	M ²	382.588.440.000
48	PT Lautan Luas, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	5.387	M ²	31.045.281.000
49	PT Cipta Karya Bumi Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	6.578	M ²	200.353.054.000
50	PT Summarecon Agung, Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	A	315	M ²	8.298.045.000
51	PT Hustani Cipta Jaya	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.977	M ²	9.974.316.000
52	PT Summarecon Agung Tbk.	Tanah Pasar	A	2.179	M ²	21.016.455.000
53	PT Jgc Indonesia	Tanah Rencana Jalan	A	432	M ²	11.229.840.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
54	Prof. Dr. Ing. H. G.J. Habibie	Lahan Prasarana Jalan	A	144	M ²	2.988.720.000
55	PT Tcp Internusa	Tanah	A	6.545	M ²	262.618.125.000
56	H. Ali Mohammad	Lahan Prasarana Jalan	A	181	M ²	2.418.703.000
57	PT Linde Indonesia	Tanah	A	19.478	M ²	187.865.310.000
58	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	Tanah Matang	A	26.800	M ²	492.450.000.000
59	PT Mandara Permai	Tanah Ruang Terbuka Hijau	A	3.533	M ²	46.370.625.000
60	PT Antilope Madju Puri Indah	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.141	M ²	12.338.583.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	913	M ²	5.261.691.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	859	M ²	4.950.417.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.706	M ²	21.357.678.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	159	M ²	916.317.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	2.580	M ²	14.868.540.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	3.724	M ²	56.251.020.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	889	M ²	18.725.007.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	821	M ²	17.292.723.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	91	M ²	524.433.000
		Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	1.832	M ²	38.587.416.000
		Lahan Sisa Kewajiban Sarana Tempat Ibadah (Sti)	A	467	M ²	2.691.321.000
61	PT Menara Sinar Terang	Lahan Marga Jalan	A	75	M ²	475.725.000
62	PT Cakrawala Respati	Bangunan Suka Sosial Ibadah Berupa Vihara	A	490	M ²	2.591.142.000
63	PT Graha Hexindo	Lahan Marga Jalan	A	701	M ²	24.573.555.000
64	PT Wisma Calindra	Lahan Marga Jalan	A	96,30	M ²	3.375.796.500
65	PT Media Televisi Indonesia	Lahan Marga Jalan	A	539	M ²	3.031.875.000
		Lahan Marga Jalan	A	735	M ²	4.134.375.000
		Lahan Marga Jalan	A	52	M ²	292.500.000
66	PT Medialoka Daan Mogot	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	A	705	M ²	10.111.815.000
		Lahan Marga Jalan	A	5	M ²	71.715.000

No.	Pengembang	Peruntukan	KIB	Volume	Satuan	Nilai Rupiah
67	PT Mars Multi Mandri	Lahan Marga Jalan	A	140	M ²	389.060.000
		Lahan Marga Jalan	A	99	M ²	275.121.000
		Lahan Marga Jalan	A	229	M ²	636.391.000
68	PT Sedayu Sejahtera Abadi	Lahan Prasarana Jalan	A	915	M ²	4.213.575.000
	PT Sedayu Sejahtera Abadi	Lahan Prasarana Jalan	A	15.398	M ²	114.792.090.000
69	PT Serinco Djaja Marmer	Lahan Prasarana Jalan	A	348	M ²	3.638.340.000
70	PT Wahana Sentra Sejati	Lahan Marga Jalan	A	290	M ²	10.284.270.000
71	PT Harapan Global Niaga	Lahan Marga Jalan	A	91	M ²	282.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	103	M ²	319.300.000
		Lahan Marga Jalan	A	91	M ²	282.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	425	M ²	1.317.500.000
		Lahan Marga Jalan	A	1	M ²	3.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	361	M ²	1.119.100.000
		Lahan Marga Jalan	A	45	M ²	139.500.000
		Lahan Marga Jalan	A	22	M ²	68.200.000
		Lahan Marga Jalan	A	16	M ²	49.600.000
		Lahan Marga Jalan	A	23	M ²	71.300.000
72	Sentraland Cengkareng Perum Perumnas	Lahan Marga Jalan	A	3.629	M ²	10.084.991.000
73	PT United Can	Lahan Marga Jalan	A	13.247	M ²	98.756.385.000
74	PT Alfa Goldland Realty	Lahan Penyempurna Tegangan Tinggi	A	710	M ²	57.176.300.000
		Lahan Marga Jalan	A	1.740	M ²	140.122.200.000
75	PT Perdana Gapuraprima	Lahan Penyempurnaan Hijau Umum	A	2.152	M ²	16.043.160.000
		Lahan Marga Jalan	A	2.864	M ²	21.351.120.000
76	PT Century Textile Industries	Penyempurna Hijau Umum	A	9.946	M ²	37.247.770.000
		Lahan Rencana Kali	A	3.266	M ²	12.231.170.000
		Lahan Marga Jalan	A	1.134	M ²	4.246.830.000
		Lahan Karya Industri	A	614	M ²	2.299.430.000
		TOTAL				10.117.945.645.150

2) Kurang catat sebesar Rp860.676.431.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT. TCP Internusa	Tanah Sarana Pendidikan	A	3,264	M ²	4.158.336.000
2	PT. Tamara Green Garden	Lahan Marga Jalan	A	13,201	M ²	100.631.223.000
3	PT. Tamara Green Garden	Lahan Penyempurna Hijau Umum / Taman	A	8,743	M ²	66.647.889.000
4	PT. Metropolitan Kentjana	Tanah Kosong	A	1600	M ²	14.200.000.000
5	PT. Synthesis Karya Pratama	Tanah Suka Sosial Kesehatan	A	376	M ²	3.407.688.000
7	PT. United Mobil International	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	149	M ²	4.521.405.000
8	PT. AJB Bumiputera 1912 QQ PT. Bakrie Swasakti Utama	Sebagian Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	16487	M ²	661.540.875.000
9	PT. Tiara Sakti Mandiri	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	A	193	M ²	5.569.015.000
		TOTAL				860.676.431.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda sebesar Rp92.854.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencatatan ganda dengan Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Selatan berupa Tanah Masjid yang terletak di Jalan Belakang kavling Nomor 29,30,31 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan luas 1.336 M² sebesar Rp88.516.680.000,00
- b. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa Tanah Kosong yang terletak di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara seluas 4.000 M² sebesar Rp3.400.000.000,00
- c. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Kekayaan Daerah yang disewakan berupa Tanah Bangunan

Pendidikan dan Latihan (Sekolah) dengan luas 1.875 M² yang terletak di Komplek Perumahan Pulogebang Permai Jakarta Timur sebesar Rp937.500.000,00

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp7.764.576.136.182,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
1	Tanah	1399	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	13.035.906.000
2	Tanah	1494	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	27.841.053.000
3	Tanah	1297	Kelurahan Cakung Timur	873/2011	15-06-2011	7.889.547.000
4	Tanah		Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan	2073/-076.343	05/11/2018	4.158.336.000
5	Tanah	258	Kelurahan Duri Pulo	2744.1/-076.11	25-07-2018	352.800.000
6	Tanah	1011	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara	3260/-076.2	17-09-2018	2.836.317.000
7	Tanah		Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan	3348/-076.98	21-09-2018	14.200.000.000
8	Tanah	861	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	1.828.200.000
9	Tanah	1242	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	6.398.700.000
10	Tanah	1311	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	8.380.635.000
11	Tanah	967	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.438.985.000
12	Tanah	968	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.438.985.000
13	Tanah	1015	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.920.965.000
14	Tanah	1017	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	2.929.275.000
15	Tanah	1034	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.062.235.000
16	Tanah	1153	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	4.674.375.000
17	Tanah	1193	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	5.447.205.000
18	Tanah	1298	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	7.906.965.000
19	Tanah	1306	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	8.201.970.000
20	Tanah	1414	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	13.935.870.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
21	Tanah	807	Kecamatan Kembangan	3525/-076.1	10/08/2018	1.597.575.000
22	Tanah	223	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	297.600.000
23	Tanah	368	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	492.900.000
24	Tanah	591	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	861.800.000
25	Tanah	869	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	1.875.500.000
26	Tanah	870	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	1.875.500.000
27	Tanah	1095	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	3.871.900.000
28	Tanah	1417	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	14.501.085.000
29	Tanah	1054	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	3.293.938.000
30	Tanah	1543	Dinas Kehutanan	3657/-076.7	18-10-2018	61.578.594.000
31	Tanah	1525	Dinas Sumber Daya Air	3655/-076.7	18-10-2018	46.972.842.000
32	Tanah		Kelurahan Kuningan Timur	3913/-076.343	11/07/2018	262.618.125.000
33	Tanah	1118	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	4.149.268.182
34	Tanah		Dinas Sumber Daya Air	3829/-076.98	11/01/2018	2088702000
35	Tanah		Dinas Sumber Daya Air	3908/-076.343	11/07/2018	734100000
36	Tanah	1154	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	4.674.375.000
37	Tanah	1213	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	5.754.675.000
38	Tanah	1332	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	9.095.295.000
39	Tanah	1396	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	12.897.120.000
40	Tanah	1401	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	13.192.125.000
41	Tanah	1488	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	26.238.825.000
42	Tanah	1250	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	6.566.700.000
43	Tanah	1327	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	8.988.945.000
44	Tanah		Dinas Kehutanan	3832/-076.98	01-11-2018	3415104000
45	Tanah		Dinas Kehutanan	3832/-076.98	01-11-2018	34425468000
46	Tanah	1003	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	2.714.160.000
47	Tanah	1316	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	8.520.941.000
48	Tanah	1408	Dinas Pemuda dan Olahraga	1349/-077.36	08-03-2018	13.814.496.000
49	Tanah	894	Kelurahan Joglo	1386/-076.11	13-03-2018	1.973.546.000
50	Tanah	484	Puskesmas Kecamatan			684.900.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
			Cengkareng			
51	Tanah		Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	4236/-076.98	28-11-2018	3407688000
52	Tanah	1151	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	4.668.795.000
53	Tanah	282	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	379.390.000
54	Tanah	344	Dinas Bina Marga	3910/-076.343	07-11-2018	465.615.000
55	Tanah		Dinas Bina Marga	4232/-076.98	28-11-2018	36.527.842.000
56	Tanah		Dinas Bina Marga	4234/-076.98	28-11-2018	37.658.520.000
57	Tanah		Dinas Bina Marga	4229/-076.98	28-11-2018	17.505.477.000
58	Tanah		Dinas Bina Marga	4230/-076.98	28-11-2018	119.981.961.000
59	Tanah		Dinas Bina Marga	3834/-076.98	01-11-2018	110.350.548.000
60	Tanah		Dinas Bina Marga	3830/-076.98	01-11-2018	39.402.075.000
61	Tanah		Dinas Bina Marga	3830/-076.98	01-11-2018	295.643.130.000
62	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	37.344.648.000
63	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	41.009.661.000
64	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	14.303.130.000
65	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	2.360.457.000
66	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	74.481.080.000
67	Tanah		Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	30.880.125.000
68	Tanah	1554	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	71.282.190.000
69	Tanah	1035	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	3.066.525.000
70	Tanah	1569	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	101.237.640.000
71	Tanah	285	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	385.506.000
72	Tanah	544	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	790.000.000
73	Tanah	1479	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	24.075.800.000
74	Tanah	1515	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	40.558.077.000
75	Tanah	49	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	83.325.000
76	Tanah	1548	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	67.406.671.000
77	Tanah	1079	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	3.634.020.000
78	Tanah	94	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	135.945.000
79	Tanah	1553	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	71.252.892.000
80	Tanah	327	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	442.935.000
81	Tanah	1587	Dinas Bina Marga	3911/-076.343	07-11-2018	224.701.344.000

No.	Jenis Barang	No.SK Penggunaan	Keterangan			Harga (Rp)
			SKPD/UKPD Pengguna	BAST		
				Nomor	Tanggal	
82	Tanah	1507	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	34.448.350.000
83	Tanah	1405	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	13.541.031.000
84	Tanah	1567	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	97.776.882.000
85	Tanah		Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu	4682/-076	20-12-2018	492.450.000.000
86	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	60.300.540.000
87	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	117.931.737.000
88	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	479.971.020.000
89	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	21.958.125.000
90	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	761.827.647.000
91	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	114.237.375.000
92	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	501.874.170.000
93	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	19.255.800.000
94	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	222.766.875.000
95	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	15.069.195.000
96	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	181.352.430.000
97	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	166.823.433.000
98	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	381.072.330.000
99	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	332.331.910.000
100	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	672.712.065.000
101	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	249.709.050.000
102	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	237.465.010.000
102	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	382.588.440.000
103	Tanah		Dinas Bina Marga	4736/-1.711.52	27-12-2018	31.045.281.000
			TOTAL			7.764.576.136.182

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp11.555.872.604.561,00, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian

Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

b) Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	37.412.521.983
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	1.118.000.001
2. Kurang Catat		0
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	1.118.000.001
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	0
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	17.268.905.663
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	2.050.000.000
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	19.318.905.663
Jumlah Mutasi	Rp	(18.200.905.662)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	19.211.616.321

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp1.118.000.001,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOL	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Pasaraya Tosersajaya	1 Unit Mobil Damkar berikut kelengkapannya	B	1	Unit	1..118.000.001

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp17.268.905.663 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TYPE	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	3291/-076.961	17-09-2018	1.118.000.001
2	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	200.000.000
3	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang	Dinas Sumber Daya Air	3833/-076.98	11/01/2018	15.950.905.662
		Total			17.268.905.663

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp2.050.000.000, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

c) Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	488.922.991.441
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	216.282.665.425
2. Kurang Catat	Rp	9.378.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	225.660.965.425
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	24.347.554.389
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	200.737.964.007
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	117.911.085.955
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	342.996.604.351
Jumlah Mutasi	Rp	(117.335.638.926)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	371.587.352.515

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp216.282.665.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Rasuna Setiabudi Raya	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	C	126	M ²	48.500.000
2	PT Gading Orchard	Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	C	400	Unit	113.590.702.750
3	PT Swadaya Panduarta	Bangunan TK Negeri Koja 02	C	371.28	M ²	2.242.054.335
	PT Summarecon Agung Tbk.	Bangunan Pasar	C	2.196	M ²	11.825.363.340

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
4	PT Coca Cola Indonesia	Fasilitas Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima	C	1	Set	969.945.000
5	PT Agung Sedayu Propertindo	Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	C	320	Unit	87.606.100.000
		Total				216.282.665.425

2) Kurang catat sebesar Rp9.378.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT. Metropolitan Development	Bangunan Gedung Sarana Ibadah (Gereja)	C	2238	M ²	9.378.300.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda sebesar Rp24.347.554.389,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencatatan ganda dengan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Utara yang terletak di Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara berupa bangunan kantor dengan luas 20 September 2017 seluas 96 M² sebesar Rp35.634.293,00
- b. Pencatatan Ganda dengan Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Selatan yang terletak di Belakang Kavling Nomor 29, 30,31 dan 32 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berupa bangunan gedung tempat ibadah seluas 2.259 M² sebesar Rp22.195.532.587,00
- c. Pencatatan Ganda dengan KIB Aset Pemanfaatan yang terletak di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol

Kecamatan Pademangan Jakarta Utara berupa bangunan gedung seluas 2.549 M² sebesar Rp2.116.387.509,00

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp200.737.964.007,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Bangunan	BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	2730.1/-076.543	24-07-2018	2.428.422.424
2	Bangunan	BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	2730.1/-076.543	24-07-2018	3.448.349.170
3	Bangunan	Kelurahan Duri Pulo	2744.1/-076.11	25-07-2018	197.730.000
4	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	16.130.000
5	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	37.598.000
6	Bangunan	Dinas Kehutanan	3292/-076.1	17-09-2018	32.384.000
7	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	9.532.000
8	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	23.406.000
9	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	6.432.000
10	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	34.476.000
11	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	41.734.000
12	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	19.256.000
13	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.528.000
14	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	48.436.000
15	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	4.428.000
16	Bangunan	Dinas Kehutanan	3359/-076.1	21-09-2018	3.528.000
17	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3248/-076.543	09/12/2018	35.156.387.000
18	Bangunan	Dinas Kehutanan	3524/-076.1	10/08/2018	367.274.197

No	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
19	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	7.272.882.416
20	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3906/-076.343	11/07/2018	36.813.000.000
21	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	46.325.250
22	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	12.256.000
23	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	66.188.000
24	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	21.696.800
25	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	38.046.000
26	Bangunan	Dinas Kehutanan	3755/-076.98	26-10-2018	27.891.000
27	Flat / Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4235/-076.98	28-11-2018	113.590.702.750
28	Tempat Penjualan Sementara	Dinas Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	4489/-1.711.513	14-12-2018	969.945.000
			TOTAL		200.737.964.007

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp117.911.085.955,00, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

d) Fasos Fasum – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	2.049.566.560.504
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	178.542.729.615
2. Kurang Catat	Rp	653.224.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	179.195.953.615,00
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	57.810.566.779
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	25.770.045.233
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	313.021.887.883
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	396.602.499.895
Jumlah Mutasi	Rp	(217.406.546.280,00)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	1.832.160.014.224

Penjelasan atas Mutasi Tambah :

1) Penerimaan SIPPT Tahun 2018 sebesar Rp178.542.729.615,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Citratama Inti Persada	Konstruksi Marga Jalan	D	2.381	M ²	2.125.000.000
2	PT Prima Bangun Investama	Konstruksi Prasarana Jalan	D	30,15	M ²	15.000.000
3	PT Wiratara Prima	Konstruksi Terbuka Biru	D	20.50	M ³	209.000.000
4	PT Rasuna Setiabudi Raya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.040	M ²	3.482.200.000
5	PT Wisma Purnayudha Putra Dan PT Prabu Budi Mulia Q.Q. PT Kencana Graha Optima	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	3.214,93	M ²	4.156.000.000
6	PT Karyadeka Graha Lestari	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.271,76	M ²	1.959.000.000
7	PT Synthesis Karya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	7.932,89	M ²	6.588.300.000
8	PT Synthesis Karya	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	D	1.229,60	M ²	1.969.600.000
9	PT Synthesis Karya	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	D	928,90	M ²	6.801.500.000
10	PT Synthesis Karya	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	D	245,90	M ²	3.000.400.000
11	PT Mitra Sindo Makmur	Konstruksi Waduk Rorortan	D	152.769	M ²	67.648.014.000
12	PT Griyaceria Nusamekar	Konstruksi Prasarana Jalan	D	2.214	M ²	3.185.441.619

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
13	PT Jakarta Realty	Konstruksi Marga jalan	D	18.204	M ²	38.536.000.000
14	PT Jaladri Kartika Pakci	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	D	7.220	M ²	25.105.555.577
15	PT Jaladri Kartika Pakci	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	D	7.350	M ²	13.761.718.419
		TOTAL				178.542.729.615

2) Kurang catat sebesar Rp653.224.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	KIB	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1.	PT Tiara Sakti Mandiri	Konstruksi Jalan	D	101	M ²	653.224.000

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

1) Pencatatan ganda aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp57.810.566.779,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air berlokasi di Jalan Jend. Sudirman s.d. Jalan Gatot Subroto Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat berupa Konstruksi Box Culvert.

2) SK Penggunaan/BAST ke SKPD/UKPD sebesar Rp25.770.045.233,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
1	Bangunan Pembawa Irigasi Saluran Pasang	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	6.529.575.000
2	Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Gorong-Gorong	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	3481/-1.792.3	10/03/2018	459.085.000
3	Saluran	Dinas Sumber Daya Air	3908/-076.343	11/07/2018	209.000.000
4	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	4293/-076.98	28-11-2018	3.185.441.619
5	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	3.482.200.000

NO	JENIS BARANG	SKPD/UKPD PENGGUNA	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	HARGA (Rp)
6	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	1.959.000.000
7	Konstruksi Marga Jalan	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	2.125.000.000
8	Trotoal	Dinas Bina Marga	3905/-076.343	07-11-2018	15.000.000
9	Jalan Jalan	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	5.891.796.900
10	Lain-Lain	Dinas Bina Marga	3904/-076.343	07-11-2018	570.006.714
11	Lain-Lain	Dinas Bina Marga	3912/-076.343	07-11-2018	1.343.940.000
			TOTAL		25.770.045.233

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp313.021.887.883,00 merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

e) Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo 31 Desember 2017 Audited	Rp	15.801.120.501
Mutasi Tambah :		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2018	Rp	0
2. Kurang Catat		0
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang :		
1. Pencatatan ganda	Rp	0
2. SK Penggunaan/ BAST ke SKPD/UKPD	Rp	0
3. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	339.167.000
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	339.167.000
Jumlah Mutasi	(Rp	339.167.000)
Saldo 31 Desember 2018	Rp	15.461.953.501

Penjelasan atas Mutasi Kurang :

3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp339.167.000,00, merupakan Aset Fasos fasum

yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset fasos fasum sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.011.088.253.833,00 dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.209.570.464,00. Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018			31 Desember 2017
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	13.911.291.970.057		13.911.291.970.057	22.345.972.814.650
Peralatan dan Mesin	19.211.616.321	(14.441.616.301)	4.770.000.020	37.412.521.983
Gedung dan Bangunan	371.587.352.517	(330.341.066.423)	41.246.286.091	488.922.991.441
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.832.160.014.224	(1.650.843.617.618)	181.316.396.606	2.049.566.560.504
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	(15.461.953.491)	10	15.801.120.501
Jumlah	16.149.712.906.617	(2.011.088.253.833)	14.138.624.652.784	24.937.676.009.079

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Aset Daerah dan DPMTSP, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 3.634 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.492 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.492 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 18.511.304 m². Dari

jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahterimakan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 514 BAST dari 418 SIPPT dengan luas 11.605.228 m². Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.074 SIPPT seluas 6.906.076 m².

Atas SIPPT tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencatat sebagai piutang fasos fasum dalam neraca karena nilai kewajiban pengembang untuk menyerahkan Aset Tetap - Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi dengan andal serta belum dapat dipastikan waktu penyerahan Aset Tetap - Fasos Fasum oleh pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatan kewajiban pengembang dilakukan secara ekstrakomptabel.

Aset Tetap - Fasos Fasum diakui sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat penguasaan atas aset berpindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan nilainya dapat diukur secara andal yaitu berdasarkan BAST yang terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan kewajiban pemegang SIPPT untuk menyerahkan fasos fasum melalui inventarisasi seluruh dokumen SIPPT, PPK dan BAST fasos fasum, dan mengembangkan sistem informasi fasos fasum sebagai media pengendalian kewajiban fasos fasum. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penagihan kewajiban yang salah satunya diwujudkan dengan penerapan kebijakan penyerahan fasos fasum sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

5) Aset Lain-lain BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Batik Betawi	Rp240.230.000,00
2). Kapitalisasi atas belanja BLUD untuk kajian potensi Kawasan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2012	<u>Rp3.308.162.265,00</u>
Jumlah	<u>Rp3.548.392.265,00</u>

6) Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp108.622.602,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Unit Pengelola Perpustakaan. Mutasi tahun 2018 terdapat pengurangan Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya di Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp91.550,00. Sehingga saldo Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan

Statusnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.531.052,00.

7) Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2018 tidak mengalami pergerakan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp38.328.511.922,00. Nilai tersebut diakui berdasarkan Laporan Keuangan dalam Likuidasi BP THR Lokasari per 31 Juli 2017 hasil Laporan Auditor Independen. Adapun posisi aset bersih BP THR Lokasari sesuai dengan Laporan Keuangan tersebut tercatat sebesar Rp38.328.511.922,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	230.780.318,65
Piutang Usaha	53.973.420,00
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00
Jumlah Aset Lancar	305.282.718,65
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.076.338.604,13
JUMLAH ASET	38.381.621.322,78
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak (**)	53.109.401,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.109.401,00
JUMLAH KEWAJIBAN	53.109.401,00
Aset Bersih	
Ekuitas Pemda	11.493.020.189,00

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	28.195.530.575,02
Saldo Laba (Rugi)	(1.360.038.842,23)
Jumlah Aset Bersih	38.328.511.921,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	38.381.621.322,78

Pada posisi 31 Desember 2018 terdapat perubahan Nilai Kas dan Setara Kas Menjadi sebesar Rp10.053.539.027,70 terdiri dari kas yang bersumber dari pendapatan sewa Tahun 2018 sebesar Rp7.018.242.433,00 dan pendapatan jasa giro sebesar Rp98.027.266,14 serta kas yang bersumber dari pendapatan dibawah Tahun 2018 sebesar Rp2.937.269.328,56.

8) Kas Dikonsinyasikan

Pada tahun 2017 Kas Dikonsinyasikan diakui sebesar Rp154.912.104.244,00 atas perolehan aset tetap tanah pada SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang, namun uang dan dokumen kepemilikan atas aset tersebut masih dititipkan di Pengadilan Negeri DKI Jakarta dikarenakan adanya proses administrasi/proses hukum yang sedang berjalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengakuan Aset Tetap dilakukan saat aset diterima, atau hak kepemilikan telah diserahkan, atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan

sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka pada tahun 2018 telah dilakukan reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan sebesar Rp177.212.008.892,00 ke akun Aset Tetap Tanah sehingga saldo Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.51
Rincian Reklasifikasi Kas Dikonsinyasikan

No	SKPD	Saldo per 31 Des 2017	Mutasi Tambah dari Belanja Modal 2018	Mutasi Kurang	Total Nilai yang Direklasifikasi
1.	Dinas Bina Marga	Rp55.019.680.782	Rp14.564.177.698	Rp10.141.944.949	Rp59.441.913.530
2.	Dinas Sumber Daya Air	Rp95.460.155.462	Rp27.626.000.000	Rp9.748.328.100	Rp113.337.827.362
3.	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	Rp4.432.268.000	Rp0	Rp0	Rp4.432.268.000
Total		Rp154.912.104.244	Rp42.190.177.698	Rp19.890.273.049	Rp177.212.008.892

9) Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp10.200.000,00 dan Rp135.809.000,00. Aset tersebut terdapat di Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara berupa aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

10) Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp14.132.460.000,00 merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan atas nilai tuntutan pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal ini disebabkan PT. Putera Adi Karyajaya dan PT. Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT. Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Teknik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua.

11) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2018 yaitu sebesar Rp63.418.859.750,00, merupakan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya. Mutasi atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah aset koefisien lantai bangunan tahun 2018 sebesar Rp583.567.717.491,95. Rincian atas penambahan aset KLB/KDB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19.

Sedangkan untuk mutasi kurang sebesar Rp520.148.857.742,00. Rincian atas mutasi kurang aset KLB/KDB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah Rp63.418.859.750,00.

**Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar
Bangunan (KLB/KDB)**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB/KDB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB/KDB sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.811.368.779,00. Harga Perolehan aset KLB/KDB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018			31 Desember 2017
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	0	(0)	0	0
Peralatan dan Mesin	4.474.596.720	(864.155.628)	3.610.441.092	0
Gedung dan Bangunan	58.944.263.030	(2.947.213.151)	55.997.049.879	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(0)	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	(0)	0	0
Jumlah	63.418.859.750	(3.811.368.779,00)	59.607.490.971	0

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp6.458.589.188.882,00 dan Rp2.678.827.970.459,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.52.

Tabel 5.52

Kewajiban

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
JUMLAH		6.458.589.188.882,00	2.678.827.970.459,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.414.286.893.989,00 dan Rp1.220.337.911.684,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.53 berikut ini:

Tabel 5.53

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	871.316.728,00	1.087.521.579,00
2.	Utang Bunga Pinjaman	12.019.886.176,00	11.649.419.975,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.430,00	33.629.623.428,00
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00
3.	Utang Belanja	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00
4.	Utang jangka pendek lainnya	4.216.140.185,00	5.603.804.002,00
	Jumlah	1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp871.316.728,00 dan Rp1.087.521.579,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.54

Tabel 5.54

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	UTANG PFK PAJAK				
1.	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	242.071.200	5.981.817,00	242.071.200,00	48.380.500,00
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	31.289.717,00	0,00	71.703.607,00
3.	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0,00	638.551,00	0,00	179.025,00

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	17.739.733,00	0,00	57.171.690,00
5.	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0,00	20.262.273,00	0,00	90.000,00
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	1.595.174,00	0,00	32.274.931,00
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD	67.237.241,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	811.200,00	0,00	7.247.351,00
9.	Utang PPN di SPKD dan PPKD	336.186.209,00	26.899.847,00	0,00	2.535.000,00
10.	Utang PPN Dana BLUD	0,00	37.219.031,00	0,00	324.345.198,00
B.	UTANG ASURANSI				
11.	Utang BPJS Kesehatan	0,00	16.004.401,00	0,00	42.193.324,00
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	5.464.144,00	61.916.190,00	0,00	156.811.279,00
C.	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN				
13.	Utang PFK Lainnya	0,00	0,00	0,00	102.518.474,00
D.	UTANG JAMINAN				
14.	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	650.958.794,00	220.357.934,00	242.071.200,00	845.450.379,00
	Jumlah Utang PFK	871.316.728,00		1.087.521.579,00	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2018 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari :

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2018, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp645.494.650,00 dan Rp242.071.200,00. Dengan rincian di tabel 5.55.

Tabel 5.55
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	309.308.441,00	242.071.200,00
2.	Utang PPN Pusat	336.186.209,00	0,00
	Jumlah	645.494.650,00	242.071.200,00

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp53.782.488,00 dan Rp51.184.525,00 dengan rincian pada Tabel 5.56.

Tabel 5.56
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	5.981.817,00	48.380.500,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	638.551,00	179.025,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	20.262.273,00	90.000,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	26.899.847,00	2.535.000,00
	Jumlah	53.782.488,00	51.184.525,00

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp88.654.855,00 dan Rp492.742.777,00 dengan rincian pada Tabel 5.57.

Tabel 5.57

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	31.289.717,00	71.703.607,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	17.739.733,00	57.171.690,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	1.595.174,00	32.274.931,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	811.200,00	7.247.351,00
5.	Utang Pemotongan PPN	37.219.031,00	324.345.198,00
	Jumlah	88.654.855,00	492.742.777,00

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada BLUD RSUD Kepulauan Seribu Rp52.136.138,00, BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung Rp29.815.516,00 dan BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu Rp5.745.376,00 dengan rincian pada Tabel 5.58.

Tabel 5.58

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Pajak	BLUD RSUD Kepulauan Seribu (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	1.474.201,00	29.815.516,00	0,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	5.556.790,00	0,00	51.182,00

No.	Jenis Pajak	BLUD RSUD Kepulauan Seribu (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu (Rp)
3.	Utang Pemotongan PPH Pasal 23	577.403,00	0,00	101.271,00
4.	Utang Pemotongan PPH Pasal 4 (2)	811.200,00	0,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	43.716.544,00	0,00	5.592.923,00
	Jumlah	52.136.138,00	29.815.516,00	5.745.376,00

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp83.384.735,00 dan Rp199.004.603,00.

Pada tahun 2018 di BLUD Puskesmas Kec. Ciracas terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp7.368.044,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp61.916.190,00. BLUD Kec. Pasar Rebo terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp8.636.357,00 Sedangkan pada PPKD terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5.464.144,00.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 11.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.019.886.176,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas belanja bunga yang timbul utang jangka panjang-pinjaman JEDI dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–

1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.019.886.176,00 tersaji pada tabel 5.59.

Tabel 5.59
Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2018

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Hutang	Bunga Berjalan (Rp)	Hutang Bunga Akrual per 31 Des 18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)*(5)
1	SLA– 1247/DSMI/2012 (JEDI)	6 bulan	4 bulan	18.029.829.264	12.019.886.176
TOTAL					12.019.886.176

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.006.599.388.131,00 dan Rp614.526.979.500,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel 5.60.

Tabel 5.60
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	544.092.083.624,00	483.596.000.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	18.399.517.095,00	18.143.056.197,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	59.336.108.098,00	50.961.304.665,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	6.978.900.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	49.477.508.901,00	49.456.389.986,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.936.667.078,00	5.391.328.652,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	322.378.603.335,00	0,00
	Total	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00

1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp544.092.083.624,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya :

- a. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp303.833.452.529,13 atas reklame yang belum tertayang pada tahun 2019;
- b. Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp87.155.412.273,00;
- c. Kelebihan pembayaran sanksi pajak daerah sebesar Rp5.492.688.822,00;
- d. Sisa pembayaran BPHTB PT.KNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasi sebesar Rp147.610.530.000,00.

Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT. KNI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas

per 31 Desember 2017 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai diatas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A).

Sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, menunggu kajian hukum lebih lanjut mengenai aspek hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. KNI atas pemberian HGB dan Hak Pakai diatas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp18.399.517.095,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun; Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam serta retribusi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.

Kode Rekening	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2017	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2018
Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	2.322.694.311,00	1.993.442.670,00
Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	353.290.454,00	409.102.716,00
Perpanjangan Sewa Tanah Makam	15.467.071.433,00	15.406.551.553,00
Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	0,00	590.420.155,00
Jumlah	18.143.056.198,00	18.399.517.095,00

3) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp59.336.108.098,00 seperti tersaji pada lampiran 12.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda sebesar Rp6.978.900.000,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp49.477.508.901,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp5.936.667.078,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD dan Uang Muka dari Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung serta Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	604.941.925
2	BLUD RS Pasar Minggu	243.469.833
3	BLUD RS Tarakan	99.933.328
4	BLUD RS Cengkareng	355.554.775
5	BLUD RS Pasar Rebo	1.074.930.998
6	BLUD RS Budhi Asih	6.000.000
7	BLUD RS Duren Sawit	5.800.000
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	49.982.000
9	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.496.054.219
	Total	5.936.667.078,00

7) Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp322.378.603.335,00 dan Rp0,00 merupakan saldo lebih bayar

atas Dana Bagi Hasil Pajak- Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Tahun 2017 sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Tahun 2018.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp356.950.539.339,00 dan Rp553.840.563.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Rekening	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	167.856.472,00	67.212.365.973,00
2	Utang Belanja Persediaan	43.452.800,00	89.905.157,00
3	Utang Belanja Barang	625.118.970,00	1.927.799.264,00
4	Utang Belanja Jasa Non TALI	3.491.445.212,00	3.092.555.883,00
5	Utang Belanja TALI	411.606.160,00	1.179.207.351,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan	38.162.600.503,00	43.347.014.591,00
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas	2.037.180.799,00	00.00
8	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	5.813.920.000,00
9	Utang Belanja Modal Tanah	546.660.390,00	157.180.380,00
10	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.998.188.500,00	5.592.510.000,00
11	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.565.836.863,00	217.483.055.854,00
12	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.923.331.853,00	13.673.863.449,00
13	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72.897.200,00	0,00
14	Utang Belanja Pegawai BLUD	16.299.215.465,00	1.505.436.006,00

No	Rekening	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
15	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	173.536.586.092,00	108.770.619.299,00
16	Utang Belanja Modal BLUD	372.178.739,00	228.186.938,00
17	Utang Belanja Subsidi	78.408.840.500,00	20.284.135.000,00
18	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	11.287.542.821,00	63.482.808.055,00
	Jumlah	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp167.856.472,00 dan Rp67.212.365.973,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2018 merupakan utang gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2017 timbul karena adanya kekurangan pembayaran perhitungan TKD yang baru dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, gaji pegawai tidak tetap dan tunjangan pegawai tidak tetap.

Selain kekurangan TKD tahun 2015 Utang Belanja Pegawai juga terdiri dari tunjangan fungsional tahun 2017 yang belum dibayar, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) bulan Desember 2017 kepada PT. Taspen, selisih perubahan premi Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) Tahun 2017 kepada PT. Taspen berdasarkan PP No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, Tunjangan PPh bulan Desember 2017 dan Gaji PTT Bulan Desember 2017.

Utang belanja Pegawai di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp63.558.972,00;
- 2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Rp43.500.000,00;
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp35.631.000,00;
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 17.308.500,00;
- 5) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.092.000,00;

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 15.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp43.452.800,00 dan Rp89.905.157,00. Utang Belanja Persediaan merupakan pembelian barang habis pakai untuk operasional kantor, ATK, pembelian BBM, obat-obatan dan lain sebagainya. Utang belanja Persediaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 22.000.000,00 yang merupakan pengadaan dekorasi stand SKPD.
- 2) Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 21.452.800,00 yang merupakan pengadaan BBM.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam lampiran 15.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp625.118.970,00,00 dan Rp1.927.799.264,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah.
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp88.990.000,00 yang merupakan utang kepada Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan, Nazir dan Rekan.
 - 3) Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta sebesar Rp88.501,00 yang merupakan utang belanja minuman pegawai.
- Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.491.445.212,00 dan Rp3.092.555.883,00. Utang Belanja Jasa Non TALI di antaranya merupakan biaya kajian dan manajemen. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.677.584.256,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp1.992.991.831,00
 - b) Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp492.981.225,00
 - c) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp78.223.200,00
 - d) Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 73 Jakarta Timur sebesar Rp18.920.000,00
 - e) Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 65 Jakarta Timur sebesar Rp18.920.000,00
- 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp308.402.125,00 yang di antaranya terdiri atas :

- a) Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion) sebesar Rp50.000.000,00
 - b) Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan) sebesar Rp50.000.000,00
 - c) Pengadaan Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00
 - d) Pembangunan JPO Sentra Primer Timur sebesar Rp38.875.375,00
 - e) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK. Gub) sebesar Rp29.305.500,00
- 3) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp166.416.074,00 yang merupakan Utang BPJS Kesehatan
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.590.096,00 yang terdiri atas :
- a) Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng - Jakarta Barat sebesar Rp47.404.500,00
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Muara Baru, Kel, Penjaringan, Kec. Penjaringan- Jakarta Utara sebesar Rp37.686.000,00
 - c) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan sebesar Rp8.077.506,00
 - d) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot sebesar Rp4.411.463,00
 - e) Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara sebesar Rp2.010.627,00
- 5) Dinas Kehutanan sebesar Rp74.137.065,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim (Pengawasan).

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp411.606.160,00 dan Rp1.179.207.351,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2018 yang terbesar :

- 1) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp130.464.098,00
- 2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat sebesar Rp72.766.970,00
- 3) Kelurahan Pekojaan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp50.788.323,00
- 4) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp38.394.518,00
- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp36.000.000,00

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam lampiran 15.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp38.162.600.503,00 dan Rp43.347.014.591,00. Utang Belanja Pemeliharaan di antaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp29.816.231.674,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Pengadaan Suku Cadang Pompa (Sisa Tagihan) sebesar Rp5.964.994.743,00
 - b) Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara sebesar Rp5.386.951.703,00

- c) Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp1.617.103.500,00
 - d) Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp1.367.292.000,00
 - e) Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong sebesar Rp1.366.470.000,00
- 2) Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang terdiri atas :
- a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp2.001.723.660,00.
 - b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (jl. Tendea, johan baru4, johan baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1) sebesar Rp1.519.630.788,00.
 - c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00.
 - d) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan) sebesar Rp948.554.138,00
 - e) Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemoyoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan ,

lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya sebesar Rp640.171.977,00

- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.079.118.729,00 yang terdiri atas :
 - a) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan sebesar Rp635.725.723,00.
 - b) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot sebesar Rp287.234.750,00.
 - c) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara sebesar Rp156.158.256,00.
- 4) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (CNNP) sebesar Rp196.035.873,00.
 - b) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Ajinomoto) sebesar Rp194.307.993,00.
 - c) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Cempaka Mas) sebesar Rp166.624.029,00.
 - d) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 9,10,11,12 (Konsultasi) sebesar Rp 59.607.900,00
 - e) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 6,7,8 (Konsultasi) sebesar Rp58.719.000,00
 - f) Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 1,4,5 (Konsultasi) sebesar Rp65.010.000,00.
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp38.039.867,00 yang merupakan Pemeliharaan Gedung Rumah Susun.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam lampiran 15.

g. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.037.180.799,00 dan Rp0,00. Utang Belanja Perjalanan Dinas terdapat pada Biro

Administrasi Sekretariat Daerah yang merupakan uang harian dan transport peserta perjalanan dinas.

h. Utang Belanja Kepada Lembaga Medis di Luar Pemprov DKI

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS yang tercatat di Dinas Kesehatan.

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.813.920.000,00. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembayaran utang tersebut kepada PMI DKI Jakarta.

Rincian Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 5.62.

Tabel 5.62
Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	0,00	5.813.920.000,00
Jumlah		0,00	5.813.920.000,00

i. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp546.660.390,00 dan Rp157.180.380,00. Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 terdapat pada Dinas Kehutanan Rp546.660.390,00 merupakan biaya topografi dan patok sehubungan dengan adanya pengadaan tanah.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam lampiran 15.

j. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.998.188.500,00 dan Rp5.592.510.000,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp12.940.400.000,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan Pompa Mobile dan kelengkapannya.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp57.788.500,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan Hepa Filter.

k. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp217.483.055.854,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2018 terjadi penambahan sebesar Rp549.743.492.621,00 sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp767.226.548.475,00. Dari jumlah tersebut, utang yang sudah dibayarkan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp683.051.507.930,00 dan koreksi sebesar Rp72.609.203.681,00.

Nilai Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.565.836.864,00 atau turun sebesar Rp205.917.218.991,00 dari Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Kehutanan sebesar Rp5.535.750.091,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim.

- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.268.827.075,00 yang merupakan Rehab Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp3.389.152.892,00 yang merupakan Konstruksi pembangunan gedung A (RS.KOJA)
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp567.407.920,00 yang merupakan pembangunan konstruksi gedung rumah sakit.
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp328.615.555,00 yang merupakan :
 - a) Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Pinus Elok Rp265.436.726,00;
 - b) Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Cakung Barat Rp63.178.829,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

I. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.923.331.853,00 dan Rp13.673.863.449,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 di terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1)Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp6.865.676.525,00 yang merupakan pembangunan rumah pompa waduk Bojong dan saluran drainase anak Kali Ciliwung dan Kali Duri.
- 2)Dinas Kehutanan sebesar Rp57.655.328,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

m. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp72.897.200,00 dan Rp00,00. Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 terdapat pada Dinas Pendidikan yang merupakan pengadaan Buku Kurtilas Mata Pelajaran untuk siswa dan guru sebanyak 3.463 eksemplar untuk SMPN 230.

n. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp16.299.215.465,00 dan Rp1.505.436.006,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2018 terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp9.788.757.481,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp6.222.735.934,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp231.572.050,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebesar Rp41.400.000,00;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tebet sebesar Rp13.800.000,00;
- 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan Rp950.000,00.

o. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang

Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp173.536.586.092,00 dan Rp108.770.619.299,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.63
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	172.484.450.894,00	108.106.708.396,00
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	547.057.044,00	158.832.749,00
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	505.078.154,00
	Jumlah	173.536.586.092,00	108.770.619.299,00

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp172.484.450.894,00. dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.64
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	RSUD Pasar Rebo	44.464.883.939,00	23.352.089.972,00
2.	RSUD Koja	36.985.714.012,00	38.983.894.672,00
3.	RSUD Cengkareng	35.699.814.141,00	15.534.009.378,00
4.	RSUD Tarakan	25.778.962.043,00	0,00
5.	BLUD RS Budhi Asih	20.151.318.386,00	26.812.214.310,00
6.	RSUD Pasar Minggu	5.900.273.321,00	1.273.857.787,00
7.	RSUD Tugu Koja	1.184.743.612,00	950.902.900,00
8.	RSUD Kalideres	719.138.205,00	100.704.410,00
9.	RSUD Tanjung Priok	529.480.291,00	427.181.850,00
10.	RSUD Kebayoran Baru	292.291.602,00	0,00

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
11.	RSUD Jagakarsa	201.889.898,00	83.821.860,00
12.	RSUD Kemayoran	178.422.223,00	91.942.405,00
13.	RSKD Duren Sawit	170.283.524,00	0,00
14.	RSUD Tebet	95.575.000,00	206.370.357,00
15.	RSUD Johar Baru	47.481.555,00	109.338.559,00
16.	RSUD Pademangan	39.867.500,00	17.290.500,00
18.	RSUD Adhyaksa	23.619.551,00	0,00
19.	RSUD Kepulauan Seribu	12.500.030,00	103.004.740,00
20.	RSUD Kramatjati	2.485.000,00	2.880.000,00
21.	RSUD Sawah Besar	1.994.500,00	00,00
22.	RSUD Cempaka Putih	1.155.000,00	41.307.144,00
23.	RSUD Mampang Prapatan	1.108.500,00	0,00
24.	RSUD Tanah Abang	829.061,00	15.897.552,00
25.	RSUD Ciracas	620.000,00	0,00
	Jumlah	172.484.450.894,00	108.106.708.396,00

p. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian asset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp372.178.739,00 dan Rp228.186.938,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2018 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp98.980.938,00 yang di antaranya terdiri atas :
 - a. Pengadaan alat kesehatan timbangan bayi sebesar Rp25.772.938,00;
 - b. Pengadaan alat kesehatan THT sebesar Rp22.374.000,00;
 - c. Pengadaan alat kesehatan mikroskop Rp16.500.000,00.

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru sebesar Rp88.500.000,00 yang merupakan pengadaan monitor pasien;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebesar Rp87.462.683,00 yang merupakan pemeliharaan gedung;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran sebesar Rp86.248.000,00 yang merupakan pengadaan mesin antrian dan alat rumah tangga;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok sebesar Rp7.456.312,00 yang merupakan pengadaan alat kedokteran;
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Rp3.530.806 yang merupakan pengadaan jasa konsultan pengawasan (*supervision*).

q. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp78.408.840.500,00 dan Rp20.284.135.000,00. Utang belanja subsidi tahun 2018 tersebut terdiri merupakan tagihan pencairan subsidi pangan dari tanggal 21 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan sudah dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan SP2D Nomor 0000958/SP2D/II/2019 sebesar Rp44.262.867.500,00 ke PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan belanja subsidi pangan dan SP2D Nomor 0000957/SP2D/II/2019 sebesar Rp34.145.973.000,00 ke PD Dharma Jaya yang merupakan belanja subsidi pangan.

r. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp11.287.542.821,00 dan Rp63.482.808.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp7.836.498.705,00 yang merupakan utang remunerasi dan imbalan kinerja tahun 2018 kepada karyawan;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp3.450.934.116,00 yang merupakan pengadaan farmasi;

- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp110,000,00 yang merupakan pengadaan alat tulis kantor dan BBM kapal.

Nilai utang kepada pihak ketiga diatas tidak termasuk potensi utang atas pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan pada tahun 2019 yang akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2019. Pembayaran atas potensi utang tersebut dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018.

Sisa pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan di tahun 2019 di antaranya terdapat pada :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.481.352.417,00 yang di antaranya adalah :
 - a) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Kapuk Muara (pekerjaan kontruksi) dengan sisa progress pekerjaan 8,92% dengan nilai Rp 1.312.700.739,00;
 - b) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Daan Mogot (Pekerjaan Konstruksi) dengan sisa progress pekerjaan 0,95% dengan nilai Rp78.262.250,00;
 - c) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Flamboyan (Pekerjaan Konstruksi) dengan sisa progress pekerjaan 0,50% dengan nilai Rp71.378.733,00;
 - d) Pemeliharaan berkala Rumah Susun Kapuk Muara (pekerjaan pengawasan) dengan sisa progress pekerjaan 8,92% dengan nilai Rp16.901.777,00.
2. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebesar Rp7.687.434.950,00 yang merupakan kegiatan :

- a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang dengan sisa progress pekerjaan 65% senilai Rp7.526.881.700,00;
- b) Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang dengan sisa progress pekerjaan 65% senilai Rp160.553.250,00.

Rincian lebih lanjut potensi utang atas pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan pada tahun 2019 disajikan dalam lampiran 16.

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp4.216.140.185,00 dan Rp5.603.804.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.407.112.294,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Berikut rincian perhitungan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak :

No	Jenis Pajak	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Lalu	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Berjalan	Total Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	P A T	-	307,432.00	307,432.00
3	HOTEL	57,312,717.00	-	57,312,717.00
4	RESTORAN	694,056,263.40	413,519,158.00	1,107,575,421.40
5	HIBURAN	149,600,927.00	181,768,094.00	331,369,021.00
6	REKLAME	130,686,879.00	150,065,766.00	280,752,645.00
7	PPJ	-	-	-
8	PARKIR	724,127.00	-	724,127.00
9	PBB-P2	226,572,632.00	1,402,498,299.00	1,629,070,931.00
	Grand Total	1,258,953,545.40	2,148,158,749.00	3,407,112,294.40

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp809.027.891,00 dan Rp1.731.477.832,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat

pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya

Nilai Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp465.213.876,00. Saldo ini merupakan kontra akun dari Kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dijelaskan pada Calk 5.5.1.1.1. Kas di Kas Daerah.

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing - masing sebesar Rp5.044.302.294.893,00 dan Rp1.458.490.058.775,00. Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.65 berikut ini:

Tabel 5.65

Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
2.	Utang Luar Negeri	0	0
3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
	Jumlah	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.2.1 Utang Dalam Negeri

5.5.2.2.1.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.044.302.294.893,00 dan Rp1.458.490.058.775,00. Rincian

Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2018 dana pinjaman tersebut telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.430,00 sehingga saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2018 sebesar Rp420.875.242.149,00.

b. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI) sebesar Rp4.623.427.052.744,00,00.

Selain kewajiban tersebut diatas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan merujuk pada CaLK 5.5.1.3.

2. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992 Pemerintah DKI Jakarta

melakukan Kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas $\pm 144.240 \text{ m}^2$ untuk pembangunan perumahan. PT Dharma Winata Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24 Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 52/B/1994/PTTUN.JKT tanggal 29 Juli 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994 tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.

Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ atas nama PT Dharma Winata Karya.

Sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirim surat Nomor B-7418/O.1/Gs/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian terhadap PT Dharma Winata Karya. Dengan pokok surat merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk tim penilai.

Pada tahun 2017 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mencabut surat kuasa kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah atas nama PT Dharma Winata Karya tersebut. Hal ini berdasarkan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.2036/-1.87 tanggal 2 Oktober 2017 hal Pencabutan Surat Kuasa Khusus bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m² atas nama PT Dharma Winata Karya telah dicabut dan tidak berlaku.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari penyelesaian masalah ganti rugi tanah PT Dharma Winata Karya agar dilakukan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

3. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp. 4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas $\pm 2,4$ Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).
 - a. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan *aanmaning* (teguran) untuk melaksanakan putusan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melaksanakan putusan *class action* tersebut mengingat ada beberapa putusan yang secara teknis pelaksanaannya tidak

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

- b. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 187/-1.875 Hal Permohonan Penetapan Non-Executable dan telah dijawab oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tanggal 8 November 2018 Nomor W10.U1/17265/HT.11.2018 Hal Permohonan Penetapan Non Executable yang pada intinya permohonan Gubernur tidak dapat dikabulkan.
- c. Atas surat balasan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kepala Biro Hukum telah bersurat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Desember 2018 Nomor 340/-1.875 (terlampir) yang pada pokoknya agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- d. Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, bertempat di Ruang Sekretariat PPPSRS Rusun Petamburan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengundang SKPD/UKPD terkait dan Ketua RW 011 selaku PPPSRS di Rumah Susun Petamburan untuk menyampaikan pelaksanaan pendataan warga Rusun Petamburan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pendataan awal kepemilikan Warga Rusun Petamburan atas Unit Rusun Petamburan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 dan akan dilakukan secara bertahap serta setiap tahapannya akan dilaporkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

4. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT. Pesat Jaya Utama dan PT. Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT. Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PT. Pesat Jaya Utama No.001-R1/PJU/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT. Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT. Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan

PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp461.922.919.162.697,00 dan Rp486.440.914.168.833,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp61.169.223.669.891,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp47.291.315.106.064,00, sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.877.908.563.827,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	37.538.912.327.312,00	36.500.782.266.176,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	578.555.603.994,00	624.137.343.759,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592.956.276.353,00	489.478.684.673,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.591.394.389.308,00	5.254.402.717.473,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.026.197.590.222,00	16.605.608.520.001,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	183.375.491.488,00	241.880.930.262,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.645.603.991.214,00	2.121.801.939.666,00
h.	Penerimaan/Pendapatan Hibah	12.228.000.000,00	11.650.920.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	61.169.223.669.891,00	61.849.743.322.010,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pegawai	21.852.416.650.509,00	20.228.738.653.151,00
b.	Pembayaran Barang	16.919.581.747.823,00	13.619.323.926.878,00
c.	Pembayaran Bunga	44.048.569.889,00	31.897.471.844,00
d.	Pembayaran Subsidi	2.640.949.492.360,00	1.405.914.619.150,00

e.	Pembayaran Hibah	1.422.151.030.238,00	1.112.078.352.913,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.063.970.052.586,00	3.202.680.640.000,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	346.273.033.100,00	344.121.138.120,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	1.924.529.559,00	16.038.572.534,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	47.291.315.106.064,00	39.960.793.374.590,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	13.877.908.563.827,00	21.888.949.947.420,00

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp37.538.912.327.312,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.038.130.061.136,00 atau 2.84% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp36.500.782.266.176,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp578.555.603.994,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.581.739.765,00 atau 7,30% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp624.137.343.759,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp592.956.276.353,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp103.477.591.680,00 atau 21.14% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp489.478.684.673,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp4.591.394.389.308,00. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Tanah, Brandgang, Peralatan/perlengkapan Kantor, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya, juga pendapatan BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp663.008.328.165,00 atau 12,62% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp5.254.402.717.473,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp15.026.197.590.222,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.579.410.929.779,00 atau 9,51% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.605.608.520.001,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp183.375.491.488,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.505.438.774,00 atau 24,19% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp241.880.930.262,00. Rincian Penerimaan Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp523.802.051.548,00 atau 24,69% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 yang tercatat sebesar Rp2.121.801.939.666,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

h. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp12.228.000.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp11.650.920.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 naik sebesar Rp577.080.000,00 atau 4,95%. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2018.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00 tidak termasuk pengeluaran Belanja Pegawai BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.623.677.997.358,00 atau 8,03% jika

dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp20.228.738.653.151,00.

b. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp16.919.581.747.823,00 tidak termasuk pengeluaran Belanja Barang BLUD tahun 2018 yang belum disahkan. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.300.257.820.945,00 atau 24,23% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp13.619.323.926.878,00.

c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp44.048.569.889,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.151.098.045,00 atau 38,09% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp31.897.471.844,00.

d. Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar

Rp2.640.949.492.360,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah Rp1.405.914.619.150,00.

Arus Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.235.034.873.210,00 atau 87,85% dibandingkan dengan arus kas keluar belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.

e. Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.151.030.238,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp310.072.677.325,00 atau 27,88% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.112.078.352.913,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2018.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp4.063.970.052.586,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp861.289.412.586,00 atau 26,89% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp3.202.680.640.000,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.151.894.980,00 atau 0,63% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp344.121.138.120,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.924.529.559,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.114.042.975,00 atau 88,00% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.038.572.534,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap lainnya dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas

Aktivitas Investasi selama Tahun 2018 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel 5.67
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penjualan atas Tanah	9.700.000.000,00	177.692.000.000,00
b.	Penjualan atas Brandgang	2.076.000.000,00	0,00
c.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	3.652.959.569,00	309.812.400,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	9.870.046.275,00	9.618.848.986,00
e.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.924.291.865,00
f.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	314.382.669,00	0,00
g.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	650.000.000.000,00	1.542.832.382,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	675.613.388.513,00	195.087.785.633,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	76.817.812.254,00	79.391.502.822,00
b.	Perolehan Aset Tetap :	14.118.805.848.043,00	11.047.114.490.981,00
	Perolehan Tanah	5.493.373.929.929,00	1.291.846.953.545,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	2,499,084,055,489,00	1.927.676.771.109,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	3,791,472,176,299,00	5.842.951.356.392,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.196.580.541.209,00	1.980.017.414.295,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	138.295.145.117,00	4.621.995.640,00
c.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.734.784.590.164,00	6.261.993.464.820,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	17,930,408,250,461,00	17.388.499.458.623,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	(17,254,794,861,948,00)	(17.193.411.672.990,00)

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

a. Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset lainnya

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp25.299.005.844,00. Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan

pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 nilai Penjualan Aset Tetap sebesar Rp193.544.953.251,00.

b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Di tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen Rp314.382.669,00 berupa pengembalian pokok Dana Bergulir Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp1.542.832.382,00.

c. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah

Di tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp650.000.000.000,00.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp76.817.812.254,00. Nilai tersebut merupakan bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang diakui sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan).

Pembentukan dana cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.573.690.568,00 atau 3,24% dibandingkan yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp79.391.502.822,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat

menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp14.118.805.848.043,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.071.691.357.062,00 atau 27,81% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp11.047.114.490.981,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, dan Badan Pengelola (BP). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp6.261.993.464.820,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.734.784.590.164,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) PD Pembangunan Sarana Jaya	Rp	935.997.229.164,00
2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya	Rp	166.668.000.000,00
3) PT Food Station Tjipinang	Rp	85.500.000.000,00
4) PD PAL Jaya	Rp	235.219.361.000,00
5) PD Dharma Jaya	Rp	79.400.000.000,00
6) PT Jakarta Propertindo	Rp	2.232.000.000.000,00
Jumlah	Rp	3.734.784.590.164,00

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada Tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK :		
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	0,00	0,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	(33,629,623,430.00)	(16.814.811.715,00)

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.814.811.715,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2017)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2017) merupakan Sisa Kas di Bendahara SKPD/UKPD Tahun 2017 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp10.594.172.190,00.

b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2017)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2017) merupakan Sisa Kas di Bendahara Sekolah Tahun 2017 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2018 yaitu Rp62.659.228.773,00.

c. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2017

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda Rp223.410.652,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas pada rekening yang terindikasi dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya pada periode 31 Desember 2017 sebesar Rp465.213.876,00 dan nilai tersebut telah disetor pada Tahun 2018, sehingga pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 jumlah Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp0,00.

d. Setoran Kas Pembubaran BLUD

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2018 terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp31.408.040,00 yang merupakan Setoran Kas Pembubaran BLUD Akademi Perawat Jakarta. Pada periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.106.734.645,00 yang berasal dari setoran Kas Pembubaran BLUD UP Transjakarta

e. Setoran Tuntutan Perbendaharaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk Setoran Tuntutan Perbendaharaan berasal dari Unit Pengelola Parkir yang terdapat kelebihan catat sebesar Rp91.550.00 di kas tunai pada Pembukuan BLUD tahun 2016;

f. Penerimaan UMK BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Muka Kerja BLUD berasal dari RSUD Tarakan selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.000.000,00

g. Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.249.870.343,00.

h. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp3.669.421.941.551,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.69.

Tabel 5.69
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2018	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2018
1.	PPN	1.074.924.493.949,00	1.074.588.307.740,00
2.	PPh Pasal 21	1.640.400.687.695,00	1.640.400.687.695,00
3.	PPh Pasal 22	49.609.637.511,00	49.609.637.511,00
4.	PPh Pasal 23	19.556.568.752,00	19.556.568.752,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	227.607.348.775,00	227.540.111.534,00
6.	BPJS Kesehatan	215.152.572.154,00	215.152.572.154,00
7.	Tabungan Hari Tua	100.450.828.733,00	100.450.828.733,00
8.	Dana Pensiun	145.926.747.593,00	145.926.747.593,00
9.	Taperum	6.085.192.000,00	6.085.192.000,00
10.	BPJS Ketenagakerjaan	5.536.381.995,00	5.530.917.851,00
11.	PFK di BLUD	184.171.482.394	184.559.228.049
	Jumlah	3.669.421.941.551,00	3.669.400.799.612,00

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

a. Hasil Eksekusi Uang Jaminan

Pengeluaran atas Hasil Eksekusi Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.283.500,00.

b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun) merupakan Sisa Kas di Bendahara PD/UPD Tahun 2018 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.235.155.437,00.

c. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun)

Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun) merupakan Sisa Kas di Bendahara Sekolah Tahun 2018 yang disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2019 yaitu Rp104.223.650.664,00.

d. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun 2018

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda Rp223.410.652,00 yang disetor Tahun Anggaran 2018.

e. Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017 tercatat sebesar Rp465.213.876,00.

f. Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Kas Pembubaran BLUD Transjakarta berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp1.106.734.645,00 yang disetor ke Kas Daerah pada tahun 2018

g. Belanja Dibayar Dimuka (e-Money)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Belanja Dibayar Dimuka (e-Money) merupakan Kas di bank pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebesar Rp3.526.398.450,00 termasuk saldo ke e-money pada 31 Desember 2018 sebesar Rp897.050,00 dan diakui sebagai Belanja dibayar dimuka.

h. Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yang Belum Disetor TA 2018)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan SKPD yang diterima pada Tahun 2018 namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp882.416.775,00

i. Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor TA 2018

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor sebesar Rp6.870.907,00 yang berada direkening sekolah, dengan rincian sebagai berikut;

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 01 Pagi Jakarta	Rp 26,802.00
2	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 03 Pagi Jakarta	Rp 69,062.00
3	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 05 Pagi Jakarta	Rp 214,577.00
4	Sekolah Dasar Negeri Bukit Duri 11 Pagi Jakarta	Rp 23,318.00
5	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 01 Jakarta	Rp 64,352.00
6	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 02 Pagi Jakarta	Rp 102,682.00
7	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 05 Jakarta	Rp 12,702.00
8	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 08 Pagi Jakarta	Rp 93,647.00
9	Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 15 Pagi Jakarta	Rp 122,389.00
10	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 01 Jakarta	Rp 39,921.00
11	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 03 Jakarta	Rp 18,958.00
12	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 04 Jakarta	Rp 12,548.00
13	Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi Jakarta	Rp 7,240.00
14	Sekolah Dasar Negeri Jatinegara 09 Jakarta	Rp 28,300.00
15	Sekolah Dasar Negeri Jatinegara 10 Pagi Jakarta	Rp 23,212.00
16	Sekolah Dasar Negeri Karet Kuningan 03 Pagi Jakarta	Rp 34,900.00
17	Sekolah Dasar Negeri Lubang Buaya 06 Pagi Jakarta	Rp 42,762.00
18	Sekolah Dasar Negeri Manggarai 05 Pagi Jakarta	Rp 63,004.00
19	Sekolah Dasar Negeri Manggarai Selatan 01 Jakarta	Rp 12,126.00
20	Sekolah Dasar Negeri Manggarai Selatan 03 Jakarta	Rp 31,544.00
21	Sekolah Dasar Negeri Menteng Dalam 05 Pagi Jakarta	Rp 417,110.00
22	Sekolah Dasar Negeri Menteng Dalam 11 Pagi Jakarta	Rp 52,295.00
23	Sekolah Dasar Negeri Pasar Manggis 01 Pagi Jakarta	Rp 55,090.00
24	Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 03 Pagi Jakarta	Rp 7,767.00
25	Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 05 Jakarta	Rp 45,375.00
26	Sekolah Dasar Negeri Petukangan Utara 08 Jakarta	Rp 36,660.00
27	Sekolah Dasar Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta	Rp 15,820.00
28	Sekolah Dasar Negeri Pluit 05 Jakarta	Rp 41,584.00
29	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 02 Jakarta	Rp 106,633.00
30	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 13 Jakarta	Rp 190,514.00
31	Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 25 Pagi Jakarta	Rp 24,707.00
32	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 01 Pagi Jakarta	Rp 1,891.00
33	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 02 Petang Jakarta	Rp 7,752.00
34	Sekolah Dasar Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	Rp 11,100.00
35	Sekolah Dasar Negeri Tebet Timur 18 Pagi Jakarta	Rp 15,111.00
36	Sekolah Luar Biasa Negeri 6 Jakarta	Rp 41,906.00
37	Sekolah Menengah Atas Negeri 103 Jakarta	Rp 186,910.00
38	Sekolah Menengah Atas Negeri 69 Jakarta	Rp 212,975.00
39	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 23 Jakarta	Rp 40,682.00
40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta	Rp 624,211.00
41	Sekolah Menengah Pertama Negeri 145 Jakarta	Rp 14,787.00
42	Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Jakarta	Rp 96,135.00

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
43	Sekolah Menengah Pertama Negeri 155 Jakarta	Rp 84,300.00
44	Sekolah Menengah Pertama Negeri 168 Jakarta	Rp 173,657.00
45	Sekolah Menengah Pertama Negeri 213 Jakarta	Rp 347,374.00
46	Sekolah Menengah Pertama Negeri 236 Jakarta	Rp 18,417.00
47	Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Jakarta	Rp 247,365.00
48	Sekolah Menengah Pertama Negeri 256 Jakarta	Rp 227,730.00
49	Sekolah Menengah Pertama Negeri 284 Jakarta	Rp 50,245.00
50	Sekolah Menengah Pertama Negeri 57 Jakarta	Rp 22,240.00
51	Sekolah Menengah Pertama Negeri 58 Jakarta	Rp 15,690.00
52	Sekolah Menengah Pertama Negeri 73 Jakarta	Rp 224,375.00
	JUMLAH	Rp 6,870,907.00

j. Penyetoran Penutupan BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Penyetoran Penutupan BLUD berasal dari Akademi Perawat Jakarta yang sisa kas BLUD telah disetor ke kas daerah sebesar Rp31.408.040,00.

k. Koreksi Deposit Pasien

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Koreksi Deposit Pasien terdapat di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit atas uang muka pasien yang telah dilakukan pada tahun 2017 sebesar Rp11.000.000.00.

l. Pengembalian Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 arus kas keluar dari Pengembalian Deposit Pasien – BLUD merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah dikembalikan selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.082.084.978,00.

m. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp3.669.400.799.612,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.70.

5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

Penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi adalah sebesar Rp527.019.111,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian atas nilai

denda aset kerjasama yang disetor dalam mata uang dollar Amerika Serikat pada kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018.

5.6.6 Koreksi Saldo Awal BOS

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 terjadi koreksi kurang atas saldo awal BOS yang terdapat disekolah sebesar Rp335.225.651,00, dengan perhitungan sebagai berikut;

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pembayaran dengan menggunakan dana inklusi kemendikbudpar yang masuk ke rekening BOS (Saldo Awal)	Rp 20.000.000,00
2	Retur belanja 2017 dan dibayarkan kembali di tahun 2018 (Saldo Awal)	Rp 4.533.000,00
3	Kesalahan penarikan dana BOP; SPJ sudah dicatat dari dana BOP (Saldo Awal)	Rp 7.339.381,00
4	<i>Outstanding</i> (Saldo Awal)	Rp 292.073.893,00
5	Setoran jagir TA 2017 (Saldo Awal)	Rp 556.102,00
6	Kesalahan penyaluran dana BOS tahun 2018 (Saldo Awal)	Rp 10.723.275,00
	Total	Rp 335.225.651,00

5.6.7 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp3.445.848.685.850,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp12.412.915.459.306.00 dan saldo awal kas BLUD tahun 2018 sebesar Rp683.176.320.547.00, sehingga saldo Kas dan setara kas BLUD per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp9.650.243.094.002,00.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.756.644.970.273,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2018 sebesar

Rp9.755.082.722.776,00 dimana SiLPA tahun 2018 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp1.562.247.497,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK sebesar Rp629.245.528,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp1.147.321.416.00, dan Uang Titipan sebesar Rp10.361.262.00. Selain itu terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706.00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas	9.756.644.970.273,00
SiLPA	9.755.082.722.776,00
Selisih	1.562.247.497,00
Rincian Selisih SiLPA	
Utang PFK	629.245.528,00
Utang PPh Pusat	145.555.706,00
Utang PPN Pusat	400.305.087,00
Utang Asuransi	83.384.735,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.147.321.416,00
Uang Titipan	10.361.262,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(224.680.706,00)
Pembulatan	(3,00)
Total	1.562.247.497,00

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00 terdiri dari:

1.	Kas di kas Daerah	Rp9.037.618.101.920,00
2.	Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp2.152.479.146,00
3.	Pendapatan yang Belum Disetor	Rp882.416.775,00
4.	Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp1.235.155.437,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp104.230.521.571,00
6.	Kas di BLUD	Rp608.739.367.218,00
7.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
8.	Pembulatan	Rp3,00
	Jumlah	Rp9.755.082.722.776,00



BAB VI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah :

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1 .

6.2 Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat ;

- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;
- 26) Perpustakaan.

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Industri;
- 8) Ketransmigrasian.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;

- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu :

1) Visi;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari

sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergesaran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2) Misi;

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;

c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;

- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi :

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain :

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;

g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.4 Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/*sister cities* (kota di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

1) Kerjasama Antar Daerah/Kota

Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur) dalam bentuk;

a) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Bodetabekjur

Setiap tahun dialokasikan anggaran bantuan keuangan diantaranya untuk harmonisasi antar kawasan dan kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta (keterpaduan, keserasian dan keseimbangan), seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan lain sebagainya.

b) Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerjasama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerjasama BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

2) Kerjasama Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Se Jawa-Bali

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbang Reg) Jawa-Bali Tahun 2018 dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh 7 Provinsi se-Jawa-Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Tema Musrenbang Regional Jawa-Bali tahun ini adalah “Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia”. Selanjutnya, deklarasi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2020 bagi Provinsi di Jawa-Bali dan menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan strategis regional Jawa-Bali Tahun 2020.

3) Kerjasama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

Kerjasama antar pemerintah provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan sumber

daya non alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah, serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama.

4) Kerjasama Provinsi, Kabupaten/ Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi.

5) Keanggotaan Dalam APPSI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif sebagai anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta menjadi Tuan Rumah Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Anggota APPSI, dengan agenda Utama Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah.

Agenda utama terdiri dari : Pembukaan, Persidangan dan Pameran.

6) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, khususnya pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai salah satu alternatif inovasi konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan DKI Jakarta, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pihak ketiga dimaksud adalah kerja sama dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), PD/ PT/ BUMD/ BUMN, Lembaga/ Badan di dalam negeri yang berbadan hukum dan juga fasilitasi keanggotaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anggotaa sosiasi dalam organisasi APPSI dan APEKSI.

Selama Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan uraian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
1	Politkenik Keselamatan Transportasi Jalan		
2	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi	12 Bulan
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Penanganan Permasalahan Tanah dan Legalisasi Aset di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
4	Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	12 bulan
5	Yayasan Pengembangan Perkotaan dan Daerah (Urban and Regional Development Institute)	Peran Serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Provinsi DKI Jakarta	12 bulan
6	Asian Development Bank	Optimalisasi Keuangan Daerah	12 Bulan
7	Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta	Pengembangan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur	1 Tahun
8	PT. Novo Nordisk Indonesia	Pengelolaan Penyakit Diabetes Melalui Program Cities Changing Diabetes	1 Tahun
9	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Peningkatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Bagi Perusahaan Bidang Ekonomi Digital di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
11	Yayasan Pendidikan Robotik Indonesia	Edukasi Robotik Di Provinsi DKI Jakarta	12 Bulan
12	Kepolisian Polda Metro Jaya	Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12 Bulan

2. Perjanjian Kerja Sama

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
1.	BPJS Kesehatan	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 tahun (1 Januari 2018 - 31 Desember 2020)
2.	STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia	Pelayanan dan Kajian Keperawatan, PKL dan PKMD ahli teknologi Laboratorium Medik serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
3.	STIKES Medistra Indonesia	Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
4.	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	31 Desember 2018
5.	Akademi Keperawatan Royhan	Pelayanan dan Kajian Keperawatan serta Pengabdian Masyarakat	5 Tahun
6.	Politeknik Karya Husada Jakarta	Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat	5 tahun
7.	Universitas Trisakti	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	5 Tahun
8.	PD Dharma Jaya	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	31 Desember 2018
9.	PT Bank DKI	Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta	2 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2019
10.	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta	Jaminan Pelayanan Kesehatan Darah N.A.T	01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
11.	Yayasan Dompot Dhuafa dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama dengan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	2 bulan
12.	Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengembangan Bidang Perindustrian dan Energi	2 Tahun
13.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	5 tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
14.	Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (OK OCE)	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	5 Tahun
15.	Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Pengintegrasian Data Pertanahan	
16.	PT. ICI Paints Indonesia	Pengecatan Kampung Tematik Di Kawasan Kemayoran Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Menyambut Asian Games XVIII Tahun 2018	3 Bulan
17.	Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (OK OCE)	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	5 tahun
18.	Asian Development Bank	Optimalisasi Penerimaan Daerah	3 tahun
19.	Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Legalisasi Aset Tanah Masyarakat	3 Tahun
20.	PT. Propan Raya I.C.C.	Program Penataan Kawasan Kota Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Bulan
21.	PT. Paiton Energy	Supply Of Solar Electricity Power Stations, Recharging Station And Electric Motocycles	3 Tahun 6 Bulan
22.	PT. Berau Coal	Penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Bertenaga Surya	3 Tahun (14 Agustus 2018 Sampai 31 Oktober 2021)
23.	Yayasan Belantara Budaya Indonesia	Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara kolosal Pada Acara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018	1 Bulan
24.	PT. Artisan Wahyu (Gandaria City)	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City Dan Sekitarnya	5 Tahun
25.	Universitas Indonesia	Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Serta Pengabdian Masyarakat Untuk Program Studi Sarjana, Profesi dan Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia	
26.	PT. IAPMO Group Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
27.	PT. TUV NORD Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
28.	Lembaga Sertifikasi Produk PT. Global Inspeksi Sertifikasi	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
29.	PT. Carsurin	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
30.	Lembaga Sertifikasi Produk PT. Sertifikasi Produk Indonesia	Pelayanan Pengujian Produk	4 Tahun
31.	PT. Link Net, Tbk	Penyelenggaraan Saran dan Isi Siaran Balai Kota Channel	1 Tahun
32.	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Moestopo (Beragama)	Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat	3 Tahun
33.	Yayasan Dharma Suci	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan Tiga, Pluit Mas, kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	5 Tahun
34.	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta	2 Tahun
35.	Akademi Keperawatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta	Pelayanan dan Kajian Keperawatan Serta Pengabdian Masyarakat	3 Tahun
36.	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengemudi Angkutan Umum	1 Tahun
37.	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
38.	PT. Midi Utama Indonesia. Tbk	Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	3 Tahun
39.	PT. Jotun Indonesia	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
40.	PT. Bank DKI	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
41.	PT. ICI Paints Indonesia	Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Bulan
42.	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu Dan Sekitarnya	1 Tahun
43.	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air Di Sekolah Dasar	1 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
44.	PT. Pembangunan Jaya Ancol	Penanganan Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Nak Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Di Taman Impian Jaya Ancol	1 Tahun
45.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	Perluasan Cakupan Kepesertaan Dan Peningkatan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 Tahun
46.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	2 Tahun
47.	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	Pengoperasian, Pemeliharaan, Pelatihan Dan Alih Teknologi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
48.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	
49.	Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres)	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Anggota Dan Mantan Anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan SMAN 93 Jakarta	1 Tahun
50.	Komando Pasukan Khusus (Kopassus)	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit Dan PNS Kopassus Dengan SMAN 29, SMPN 103, SDN Baru 01 Pagi, SDN 02 Pagi, SDN Baru 07 Pagi, Dan SDN Cijantung 03 Pagi Yang Berdomisili Di Cijantung Jakarta Timur	1 Tahun
51.	Perhimpunan Purnakaryawan Timah Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri/Cucu Kandung Karyawan/Pensiunan Timah Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru Cilandak	1 Tahun
52.	Rukun Warga 005 Sukapura Cilincing Jakarta Utara	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri Warga RW 005 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Dengan SMP Negeri 289 Jakarta	1 Tahun
53.	Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma	Penyelenggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra/Putri Prajurit Dan TNI AU Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Pangkalan TNI AU Halim	1 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
		Perdanakusuma	
54.	PT. Bank DKI	Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	1 tahun
55.	PT. Bank DKI	Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	
56.	PT. Bank DKI	Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
57.	PT. Bank DKI	Penyaluran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SLB, SMP/SMPLB/SATAP, SMA/SMALB DAN SMK Swasta Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	1 Tahun
58.	Pangkalan Utama TNI AL III	Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI AL III Dengan SDN Kelapa Gading Barat 01 Yang Berdomisili Di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara	1 Tahun

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (Bagian Kerjasama Daerah)

6.5 Kerjasama Luar Negeri

A. Program Sister City

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 memiliki 21 *sister city/ state/ province* di seluruh dunia yakni Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kiev, Moscow, Al-Quds As Shareef, Pyongyang dan Budapest. Disamping itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 3 calon *sister city/ state/ province* yang masih dalam tahap *Letter of Intent* (LoI) yakni Shanghai, Gyeonggi dan Kairo. Adapun pada tahun 2018 ini terdapat 12 kota yang aktif melaksanakan program kerjasama yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South Wales, Bangkok, Moscow, New South Wales, Hanoi, Casablanca dan Kiev.

B. Keanggotaan Organisasi Internasional Di Tahun 2018

NO	NAMA ORGANISASI	RUANG LINGKUP	KEDUDUKAN JAKARTA
1	UCLG ASPAC (Pemerintah Daerah)	Pemerintah Daerah	1. Co President Seksi Asia Pacific (2004) 2. Co-President UCLG World Sustainable Mobility Community 3. Anggota World Council Members Periode 2016-2019 4. Co-President 21st Century Maritime Cooperation
2	C40 (Lingkungan Hidup)	Pemerintah Daerah	Anggota (2007)
3	CityNet (Manajemen Kependudukan dan Pemukiman)	Manajemen Kependudukan dan Pemukiman	Anggota (2009) Sebagai Climate Cluster Leader (2018-2020)
4	The World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) (e-Government)	E-Government	Anggota (2008) Vice President City (2017-2020)
5	Asian Network of Major Cities (ANMC 21)/Network for Crisis Management (NCM)	Manajemen Krisis, Lingkungan Dan Pengembangan Industri	Anggota (2000)
6	100 Resilient Cities	Pengembangan dan Strategi Ketahanan Kota	Anggota (2015)
7	ICLEI Indonesia	Komitmen dan Strategi Provinsi DKI Jakarta untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Anggota (2019)
8	Asia-Europe Meetings of Governors and Mayors	komunitas ASEM serta memastikan sinergi dalam kasus-kasus di mana kepentingan dan sasaran perkotaan saling tumpang tindih	Inisiator (2011) Anggota
9	Meeting of the Governors and Mayors of the ASEAN Capitals	Komunitas ASEAN 2015	Inisiator (2013) Anggota
10	Asian Mayors Founm (AMF)	pembangunan kota yang berkelanjutan	Anggota

NO	NAMA ORGANISASI	RUANG LINGKUP	KEDUDUKAN JAKARTA
11	Urban 20	Diplomasi kota membahas masalah ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan	Anggota
12	Tokyo Global Partners	Organisasi Promosi Pariwisata	Anggota
13	Organization of Islamic Capital and Cities (OICC)	Organisasi Perjalanan Wisata	Anggota
14	International Forum on Transforming Cities For Decent Work	Organisasi Perjalanan Wisata	Anggota
15	Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities (TPO)	Asosiasi Operator Golf	Salah satu pendiri (2002) Anggota Komite Transportasi
16	World Tourism Cities Federation (WTCF)	Organisasi Pariwisata	Salah satu pendiri (2012) Executive Committee
17	Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA)	Industri Pariwisata	Anggota (2001)
18	International Association of Golf Tour Operators (IAGTO)	Industri Pariwisata	Anggota (2010)
19	Pacific Asia Travel Association (PATA)	Promosi Pariwisata	Anggota (1999)
20	Destination International (DI) (Destination Marketing Association International/DMAI –dulu)		Anggota (1995)
21	The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)		Anggota (1995)
22	International Congress and Convention Association (ICCA)		Anggota (1995)
23	World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)		Anggota (1990)
24	South East Asian Zoo Association (SEAZA)		Anggota (1998)

C. Kerjasama Teknik Luar Negeri

No	Nama Forum atau Program	Lokasi	Organisasi	Bidang
1	Latihan Bersama di Fiji antara NFA dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta (2014)	Fiji	Kedubes Fiji dan NFA	Penanggulangan Kebakaran
2	Pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Timor Leste	Timor Leste	Penanggulangan Kebakaran
3	Komitmen dan Strategi Provinsi DKI Jakarta untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Seoul, Korea Selatan	ICLEI (2017)	Lingkungan Hidup
4	Demand Survey Form Knowledge Sharing Program (KSP) dengan tema "Support for Developing Bus System Improvement Strategies in Jakarta" terkait integrasi layanan transportasi publik di Jakarta	Seoul, Korea Selatan	Seoul Metropolitan Government	Transportasi
5	C40 Cities Climate Leadership Group	London, Inggris	C40	Lingkungan Hidup (perubahan iklim)
6	Jakarta Berketahanan (100RC Jakarta)	New York, Amerika	100 Resilient Cities	Ketahanan kota
7	Letter of Intent between Jakarta Capital City Government and the AEON Environmental Foundation on Mangrove Trees Planting in Jakarta (2018)	Jakarta	AEON Environmental Foundation	Lingkungan Hidup
8	Proyek Pembangunan Jakarta Recycle Center	Osaki, Jepang	JICA	Lingkungan Hidup
9	Kerjasama Teknik dengan Kota Kawasaki, Jepang untuk Pembangunan Tanpa Karbon	Kawasaki, Jepang	Joint Crediting Mechanism (JCM)	Lingkungan Hidup

6.6 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

6.7 Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai

kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.

Dasar Hukum Pembentukan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Dalam RPTRA setidaknya terdapat fasilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permainan edukatif *indoor* dan *outdoor* yang aman dan ramah anak;
- b. Olahraga dan kesehatan ibu anak seperti Posyandu, Ruang Laktasi, Konsultasi tumbuh kembang anak, lansia, dan sebagainya;
- c. Pendidikan masyarakat seperti BKB PAUD, Pojok Baca, Perpustakaan, Papan Informasi, Penerapan Jam Belajar, Panggung interaktif serta penyediaan sarana wifi/internet;
- d. Ruang Terbuka Hijau, mencakup taman yang indah, taman obat-obatan dan lain-lain;
- e. Kebersihan seperti tempat sampah terpilah dan sarana cuci tangan, toilet bersih, dan ramah anak.

Program dan kegiatan RPTRA terintegrasi dengan 10 program pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak meliputi :

- a . Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
- b . Gotong Royong,
- c . Pangan,
- d . Sandang,
- e . Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga,
- f . Pendidikan dan Keterampilan,
- g . Kesehatan,
- h . Pengembangan Kehidupan Berkoperasi,
- i . Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- j . Perencanaan Hidup Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK ini pada dasarnya bersinergi dengan 31 indikator pemenuhan hak-hak anak yang sekaligus menjadi dasar dalam upaya Jakarta Menuju Kota Layak Anak dengan RPTRA sebagai wadahnya.

Program Unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- a. Keluarga;
- b. BKB-PAUD;
- c. Hatinya PKK;
- d. Perkuatan Posyandu, dan;
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UP2K.

Kelima program inti dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi ruh dari seluruh aktivitas di RPTRA. Dengan adanya sinergi yang positif antara kegiatan di RPTRA dengan 10 Program Pokok PKK dan lima program unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta maka langkah menuju dan menjadi kota yang ramah serta layak untuk anak segera terwujud di wilayah DKI Jakarta. Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi DKI Jakarta memberikan penguatan SDM dalam pengelolaan RPTRA, mulai dari tingkat kelurahan, kota sampai dengan provinsi.

Dalam kelanjutannya, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait beserta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

menggandeng Perguruan Tinggi dan CSR perusahaan yang ada di DKI Jakarta menjadi satu tim terpadu untuk mendukung terwujudnya RPTRA baik secara fisik ataupun non fisik mulai dari penyediaan lokasi, kelengkapan, sarana prasarana, pembinaan SDM pengelola RPTRA sampai dengan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar melibatkan PKK Provinsi DKI Jakarta adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas, pada tahap awal dibangun dengan menggunakan dana CSR perusahaan di atas lahan aset pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional dan Pemeliharaan RPTRA menjadi domain dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat, berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian RPTRA menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

RPTRA dikelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis RPTRA dibentuk Pelaksanaan Kegiatan RPTRA. Kepengurusan RPTRA dilaksanakan secara kolegal. Artinya proses pengambilan keputusan dalam rapat pengurus diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat setelah mendengarkan seluruh pendapat pengurus. Kedepan, RPTRA akan diupayakan dibangun di setiap Kelurahan di

Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan bahwa RPTRA akan menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya anak, sehingga upaya pemenuhan hak-hak anak dapat dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 meresmikan 18 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebagaimana dalam lampiran 21.

6.8 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2018 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian. Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp1.184.790.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.180.116.171,00 atau 99,61%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Per 31 Desember 2018

No	Jumlah DIPA	Kementeria n / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5:6)
1	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.184.790.000	1.180.116.171	99,61
	1			1.184.790.000	1.180.116.171	99,61
Total Jumlah Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta				1.184.790.000	1.180.116.171	99,61

* Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2019

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2018 sebesar Rp104.364.352.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.341.130.431,00 atau 79,51%. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per Tanggal 31 Desember 2018

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Kementerian Dalam Negeri	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	179.134.000	165.982.240	92,66
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta		179.134.000	165.982.240	92,66
1	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	500.000.000	487.169.787	97,43
2	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	292.761.000	264.337.935	90,29
3	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	358.142.000	345.682.353	96,52
4	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	249.280.000	249.200.000	99,97
	4	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan		1.400.183.000	1.346.390.075	96,15
2	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.449.000.000	1.305.576.099	90,10
3	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	985.358.000	858.009.226	87,08
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian		4.042.858.000	3.735.298.973	92,39
	7	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta		5.443.041.000	5.081.689.048	93,36
1	1	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	1.088.733.000	822.793.748	75,57
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.088.733.000	822.793.748	75,57

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	1	Kementeria Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	542.609.000	353.370.200	65,12
3	1	Kementeria Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	284.323.000	282.909.500	99,50
	2	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan826.932.000			636.279.700	76,94
	3	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan1.915.665.000			1.459.073.448	76,17
1	1	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi	1.477.000.000	1.419.987.800	96,14
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta1.477.000.000			1.419.987.800	96,14
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.595.646.000	2.546.676.467	98,11
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta2.595.646.000			2.546.676.467	98,11
1	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	9.399.417.000	7.957.153.900	84,65
2	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	965.269.000	901.088.360	93,35
				291.466.000	253.004.000	86,80
3	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.175.033.000	976.535.100	83,10
4	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.241.025.000	1.944.579.500	86,77
5	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.332.338.000	2.169.079.193	93
6	1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.105.978.000	1.697.315.928	80,59
	6	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta18.510.526.000			15.898.755.981	85,89
1	1	Kementerian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.194.000	343.991.192	98,2

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		350.194.000	343.991.192	98,2
2	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.456.847.000	2.391.035.000	95
3	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	809.175.000	748.584.735	92,5
4	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	537.705.000	509.405.700	94,74
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan		3.803.727.000	3.649.025.435	95,93
	4	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta		4.153.921.000	3.993.016.627	96,12
1	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	193.442.000	192.782.000	99,66
2	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	1.555.842.000	1.482.458.500	95,28
3	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	4.412.547.000	4.400.185.000	99,72
4	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	8.615.096.000	8.564.584.000	99,41
5	1	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	1.500.390.000	1.480.360.000	98,67
	5	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta		16.277.317.000	16.120.369.500	99,04
1	1	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.985.000	75.924.906	99,92
				3.189.200.000	3.136.462.495	98,34

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta			3.265.185.000	3.212.387.401	98,38
1	1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.090.000.000	1.065.058.553	97,71	
				60.000.000	59.991.000	99,99	
				3.934.537.000	3.494.346.030	88,81	
				35.421.385.000	19.045.448.161	53,76	
	1	Jumlah Dana Dekonsententration dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional			40.505.922.000	23.664.843.744	58,42
2	1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.950.000.000	1.855.752.748	95,17	
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.950.000.000	1.855.752.748	95,17
	2	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta			42.455.922.000	25.520.596.492	60,11
1	1	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.480.000	253.901.150	85,06	
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta			298.480.000	253.901.150	85,06
1	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	5.696.121.000	5.539.449.277	97,25	
2	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	131.903.000	123.832.000	93,88	
3	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.366.930.000	1.351.838.000	98,90	
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta			7.194.954.000	7.015.119.277	97,50

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.044.633.000	653.575.000	62,57
		Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta			653.575.000	62,57
	36	Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta			83.341.130.431	79,51

* Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2019



BAB VII

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 724 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp65.809.931.722.844,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp61.235.824.747.633,00 atau 93,05%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.588.062.622.187,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 sebesar Rp64.823.887.369.820,00.

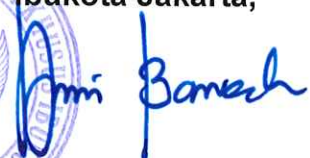
Di sisi lain anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp75.093.831.260.213,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp61.410.121.851.157,00 atau 81,78%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp13.683.709.409.056,00 atau 18,22%. Realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp10.344.040.471.270,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp51.066.081.379.887,00. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp61.235.824.747.633,00 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp61.410.121.851.157,00 maka pada Tahun Anggaran 2018 terjadi defisit sebesar Rp174.297.103.524,00. Defisit ini disebabkan realisasi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.452.307.127.533,00 dan terealisasi sebesar Rp17.435.403.144.101,00 atau 99,90%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.168.407.590.164,00 dan terealisasi sebesar Rp7.505.956.957.296,00 atau 91,89%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa di Tahun Anggaran 2018 terjadi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.929.446.186.805,00. Realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10.521.270.049.205,00 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu minus sebesar Rp591.823.862.400,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp9.755.082.722.776,00 yang berasal dari defisit sebesar Rp174.297.103.524,00, pembiayaan netto sebesar Rp9.929.446.186.805,00, dan penyesuaian pengurangan karena selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp66.360.505,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.410.899.404.757,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.165.982.127.533,00

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.





LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 AUDITED**

**DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan (Rp)	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor (Rp)	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor (Rp)	Uang Titipan (Rp)	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Rp)	Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Sekretariat DPRD	775.201.246	-	-	-	-	775.201.246
2	Dinas Sumber Daya Air	89.571.811	-	-	-	-	89.571.811
3	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	104.262.344.064	104.262.344.064
4	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	409.726	-	-	-	-	409.726
5	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	45.015	-	-	-	-	45.015
6	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	10.403.000	-	-	-	-	10.403.000
7	SEKRETARIAT PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	10.000	-	-	-	-	10.000
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	359.514.639	-	2.500	-	-	359.517.139
9	Kelurahan Kamal - JAKBAR	-	-	21.957.495	-	-	21.957.495
	TOTAL	1.235.155.437	-	21.959.995	-	104.262.344.064	105.519.459.496

**DAFTAR SALDO KAS BOS DI BENDAHARA PENGELUARAN SEKOLAH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1	20109425	SDLBN 1 Jakarta	40.012.202.814	4.528.522	21.420.491	-	-	-	21.420.491	21.420.491	-
2	20109425	SMALB N 1 Jakarta	40.012.202.814								
3	20109425	SMPLB N 1 Jakarta	40.012.202.814								
4	20103099	SDLBN A Pembina Tk. Nasional	40.012.203.101	11.916.385	57.516.702	-	-	-	57.516.702	57.516.702	-
5	20103099	SMALBN A Pembina Tk. Nasional	40.012.203.101							-	-
6	20103099	SMPLBN A Pembina Tk. Nasional	40.012.203.101							-	-
7	20112403	SDLBN 5 Jakarta	11.812.047.847	13.334.430	71.011.348	-	-	-	71.011.348	71.011.348	-
8	20112403	SMALBN 5 Jakarta	11.812.047.847							-	-
9	20112403	SMPLBN 5 Jakarta	11.812.047.847							-	-
10	20109970	SDLBN 3 Jakarta	12.212.027.534	52.937.079	239.804.679	-	-	-	239.804.679	239.804.679	-
11	20109970	SMALBN 3 Jakarta	12.212.027.534							-	-
12	20109970	SMPLBN 3 Jakarta	12.212.027.534							-	-
13	20110821	SDLBN 4 Jakarta	20.112.125.581	17.504.525	84.625.945	-	-	-	84.625.945	84.625.945	-
14	20110821	SMALBN 4 Jakarta	20.112.125.581							-	-
15	20110821	SMPLBN 4 Jakarta	20.112.125.581							-	-
16	20109529	SDLBN 6 Jakarta	30.312.002.333	26.658.500	120.327.879	-	-	-	120.327.879	120.327.879	-
17	20109529	SMALBN 6 Jakarta	30.312.002.333							-	-
18	20109529	SMPLBN 6 Jakarta	30.312.002.333							-	-
19	20103089	SDLBN 2 Jakarta	40.012.202.831	41.960.595	117.885.445	-	-	-	117.885.445	117.885.445	-
20	20103089	SMALBN 2 Jakarta	40.012.202.831							-	-
21	20103089	SMPLBN 2 Jakarta	40.012.202.831							-	-
22	20109280	SMALBN 7 Jakarta	51.312.011.286	634.674	253.292.562	-	-	-	253.292.562	253.292.562	-
23	20109280	SMPLBN 7 Jakarta	51.312.011.286							-	-
24	20109280	SDLBN 7 Jakarta	51.312.011.286							-	-
25	20104490	SDN Cempaka Baru 12 Pagi.	10.112.089.693	14.930.059	59.716.283	-	-	-	59.716.283	59.716.283	-
26	20104491	SDN Cempaka Baru 13 Pagi.	10.112.089.782	5.039.694	-	-	-	-	-	-	-
27	20104492	SDN Cempaka Baru 14 Pagi.	10.112.089.928	9.649.210	-	-	-	-	-	-	-
28	20104692	SDN Sumur Batu 08 Pagi.	10.112.089.804	1.204.480	71.975.669	-	-	-	71.975.669	71.975.669	-
29	20104693	SDN Sumur Batu 10 Pagi.	10.112.089.961	1.572.000	-	-	-	-	-	-	-
30	20104701	SDN Tanah Tinggi 05 Pagi.	12.212.028.042	44.795	15.753.512	-	-	-	15.753.512	15.753.512	-
31	20104703	SDN Tanah Tinggi 07 Pagi.	12.212.027.895	2.363.085	-	-	-	-	-	-	-
32	20104885	SDN Pegangsaan Dua 06 Pagi	20.012.059.164	-	35.179.607	-	-	-	35.179.607	11.659.607	-
33	20104889	SDN Pegangsaan Dua 09 Petang	20.012.056.181	3.391.880	3.391.880	-	-	-	3.391.880	26.911.880	-
34	20109485	SMPT Kec. Ciracas (SMPN 257)	51.112.040.832	-	462.361	-	-	-	462.361	462.361	-
35	20103578	SMP Negeri 257	51.112.038.501	14.512.524	28.865.389	8.250.000	-	-	37.115.389	37.115.389	-
36	20109118	SMPT Kec. Tj Priok (SMPN 95)	20.112.127.966	-	23.377.612	-	-	-	23.377.612	14.309.000	-
37	20100753	SMP Negeri 95	20.112.125.807	53.382.327	51.971.963	-	-	-	51.971.963	61.040.575	-
38	20103594	SMP Negeri 7	50.012.274.099	32.584.216	27.945.525	-	-	-	27.945.525	24.034.833	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
39	20109202	SMPT Kec. Matraman (SMPN 7)	50.012.276.598	-	34.085.798	-	-	-	34.085.798	37.996.490	-
40	20102160	SD Negeri Ragunan 10 Pagi	40.012.201.532	2.186.800	23.256.305	-	-	4.561.027	27.817.332	27.817.332	-
41	20106150	SDN Pondok Labu 07	40.012.201.923	-	1.252.957	-	-	2.243.865	3.496.822	3.496.822	-
42	20102131	SD Negeri Pulo 05 Pagi	40.012.200.234	-	333.292	-	-	765.383	1.098.675	1.098.675	-
43	20106164	SD Negeri Pulo 01 Pagi	40.012.200.218	-	149.171	-	-	468.046	617.217	617.217	-
44	20104164	SDN Jatinegara 08	50.312.021.705	571.929	5.433.776	-	-	7.740	5.441.516	5.441.516	-
45	20100759	SMP Negeri 244	20.012.057.242	81.893.429	26.346	-	-	315.636	341.982	341.982	-
46	20105821	SD Negeri Bukit Duri 05 Pagi	40.212.018.289	20.912.080	72.706	-	-	219.653	292.359	292.359	-
47	20100810	SMAN 40	14.012.000.545	84.087.907	280.106.104	-	-	200.000	280.306.104	280.306.104	-
48	20105373	SDN Kembangan Utara 04 Pagi.	32.212.000.418	12.303.918	51.418	-	-	107.364	158.782	158.782	-
49	20104168	SDN Jatinegara 01	50.312.021.501	42.966.614	-	-	-	49.961	49.961	49.961	-
50	20107433	SMKN 23	10.412.007.799	553.634	108.455.257	-	-	16.521	108.471.778	108.471.778	-
51	20104205	SDN Penggilingan 03	50.312.021.713	5.500.925	6.527.370	-	-	7.767	6.535.137	6.535.137	-
52	20108820	SDN Cijantung 11 PT.	51.112.037.602	12.172.972	17.927.351	-	-	(5.754.379)	12.172.972	12.172.972	-
53	20103783	SMK Negeri 5	50.012.274.293	-	541.238.746	-	-	-	541.238.746	541.238.746	-
54	20103257	SMA Negeri 98	51.112.038.820	253.998.068	311.244.438	-	-	-	311.244.438	311.244.438	-
55	20103281	SMA Negeri 31	50.012.274.331	227.535.486	477.318.658	-	-	-	477.318.658	477.318.658	-
56	20102510	SMP Negeri 115 Jakarta	40.212.018.696	121.549.312	81.127.397	-	-	-	81.127.397	81.127.397	-
57	20102598	SMK Negeri 57 Jakarta	40.412.010.861	20.731.165	611.289.869	-	-	-	611.289.869	611.289.869	-
58	20103616	SMP Negeri 172	50.312.021.411	54.443.462	35.563.409	-	-	-	35.563.409	35.563.409	-
59	20103312	SMA Negeri 51	51.312.015.541	395.366.140	385.312.279	-	-	-	385.312.279	385.312.279	-
60	20103142	SDN Bintaro 02	41.112.025.225	41.028.000	50.973.200	-	-	-	50.973.200	50.973.200	-
61	20102479	SMP Negeri 245	41.112.024.318	165.832.742	110.841.194	-	-	-	110.841.194	110.496.302	344.892
62	20100781	SMA Negeri 83	20.112.125.696	73.700.000	168.070.781	-	-	-	168.070.781	168.070.781	-
63	20104683	SDN Serdang 11 Pagi.	10.112.090.004	54.787.880	39.485.055	-	-	-	39.485.055	39.485.055	-
64	20105560	SDN Tegal Alur 02 Pagi	30.012.044.074	44.136.176	69.128.983	-	-	-	69.128.983	69.128.983	-
65	20103289	SMA Negeri 106	51.112.035.049	237.643.634	249.429.439	-	-	-	249.429.439	249.429.439	-
66	20103788	SMK Negeri 24	50.012.274.358	16.730.856	135.493.320	-	-	-	135.493.320	135.493.320	-
67	20103785	SMK Negeri 46	50.012.274.501	164.780	125.194.816	-	-	-	125.194.816	125.194.816	-
68	20100546	SDN Kenari 02 Petang.	10.912.021.903	27.112.466	-	-	-	-	-	-	-
69	20101949	SDN Jelambar 06 Pagi.	30.012.043.302	36.397.387	11.976.157	-	-	-	11.976.157	11.976.157	-
70	20101496	SMK Negeri 9	30.012.044.520	88.955.616	332.265.385	-	-	-	332.265.385	332.265.385	-
71	20101419	SDN Pinangia 01 Pagi	30.012.042.616	127.714.679	1.920.000	-	-	-	1.920.000	1.920.000	-
72	20102566	SMA Negeri 82	40.412.001.676	308.117.895	347.610.945	-	-	-	347.610.945	347.610.945	-
73	20104681	SDN Serdang 07 Pagi.	10.112.090.021	44.489.479	4.065.442	-	-	-	4.065.442	4.065.442	-
74	20104543	SDN Johar Baru 05 Pagi.	10.912.021.814	42.089.202	343.095	-	-	-	343.095	343.095	-
75	20105408	SDN Meruya Selatan 06 Pagi.	30.312.037.960	26.491.220	16.091.910	-	-	-	16.091.910	16.091.910	-
76	20100538	SDN Kenari 06 Petang.	10.912.021.989	19.791.661	-	-	-	-	-	-	-
77	20100233	SMP Negeri 181	11.312.109.787	46.987.236	117.691.302	-	-	-	117.691.302	117.691.302	-
78	20106130	SDN Pesanggrahan 10	41.112.024.504	-	40.157.174	-	-	-	40.157.174	40.157.174	-
79	20102213	SMA Negeri 37	40.212.018.998	236.823.282	727.883.613	-	-	-	727.883.613	727.827.957	55.656
80	20102582	SMK Negeri 30 Jakarta	40.412.010.888	134.046.780	254.605.000	-	-	-	254.605.000	254.605.000	-
81	20100797	SMA Negeri 52	20.012.043.276	322.702.298	699.228.896	-	-	-	699.228.896	699.228.896	-
82	20107358	SMK Negeri 59	40.412.001.650	20.758.375	104.763.672	-	-	-	104.763.672	104.763.672	-
83	20105178	SDN Cengkareng Timur 15 Pagi	30.012.042.802	32.225.200	17.835.644	-	-	-	17.835.644	17.835.644	-
84	20102006	SDN Kebon Jeruk 10 Pagi.	41.112.024.679	-	16.974.753	-	-	-	16.974.753	16.974.753	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
85	20104954	SDN Tugu Utara 03 Pagi	20.012.056.131	-	-	29.539.910	-	-	29.539.910	29.539.910	-
86	20100241	SMP Negeri 118	12.212.028.549	56.213.380	17.687.303	-	-	-	17.687.303	17.687.303	-
87	20100721	SMP Negeri 120	30.412.002.277	110.523.791	59.413.674	-	-	-	59.413.674	59.413.674	-
88	20104587	SDN Kebon Kacang 03	11.812.047.723	-	27.605.226	-	-	-	27.605.226	27.605.226	-
89	20100199	SMA Negeri 68	50.012.274.234	312.300.916	396.583.315	-	-	-	396.583.315	396.583.315	-
90	20104629	SDN Kenari 01 Pagi.	10.912.022.004	13.006.601	65.400.540	-	-	-	65.400.540	65.400.540	-
91	20100260	SMP Negeri 8	50.012.274.170	39.497.630	251.851.136	-	-	-	251.851.136	251.735.433	115.703
92	20100536	SDN Kenari 04 Petang.	10.912.021.890	12.908.929	-	-	-	-	-	-	-
93	20101170	SDN Tomang 08 Pagi.	30.012.043.370	26.087.828	48.574.409	-	-	-	48.574.409	48.574.409	-
94	20108541	SDN Cipinang Muara 15	51.112.035.456	8.656.000	12.606.136	-	-	-	12.606.136	12.606.136	-
95	20109049	SDN Cengkareng Timur 21 Pagi	30.412.002.030	18.191.157	1.466.663	23.288.072	-	-	24.754.735	24.754.735	-
96	20103598	SMP Negeri 51	51.212.015.321	303.351.748	331.786.138	-	-	-	331.786.138	331.786.138	-
97	20103308	SMA Negeri 59	50.112.015.130	282.527.671	353.538.409	-	-	-	353.538.409	353.343.144	195.265
98	20109383	SMPT Kec. Kebayoran Lama (SMPN 48)	41.112.027.147	-	38.978.163	-	-	-	38.978.163	38.978.163	-
99	20101622	SMA Negeri 2	30.012.044.511	126.784.044	249.350.357	21.776.187	-	-	271.126.544	271.126.544	-
100	20101564	SMP Negeri 142	41.112.024.377	181.280.905	36.741.840	-	-	-	36.741.840	36.741.840	-
101	20104616	SDN Kemayoran 03 Pagi.	12.212.028.247	-	20.288.000	-	-	-	20.288.000	20.288.000	-
102	20104551	SDN Johar Baru 16 Petang.	12.212.028.123	14.282.107	1.855.662	-	-	-	1.855.662	1.855.662	-
103	20103625	SMP NEGERI 237	51.112.038.269	65.085.344	34.716.838	-	-	-	34.716.838	34.716.838	-
104	20100537	SDN Kenari 05 Pagi.	10.912.021.920	7.062.753	87.902.810	-	-	-	87.902.810	87.902.810	-
105	20103380	SDN Pisangan Timur 05	50.112.014.451	-	12.537.940	-	-	-	12.537.940	12.537.940	-
106	20105272	SDN Kali Deres 10 Pagi	30.012.043.183	-	6.026.547	160.078	-	-	6.186.625	6.186.625	-
107	20102327	SD Negeri Kebon Baru 10 Pagi	40.212.019.153	9.317.295	-	-	-	-	-	-	-
108	20105485	SDN Semanan 05 Pagi	30.012.043.230	24.136.167	16.602.435	-	-	-	16.602.435	16.602.435	-
109	20102313	SD Negeri Kebon Baru 07 Pagi	40.212.017.754	8.054.853	16.187.570	-	-	-	16.187.570	16.187.570	-
110	20106040	SD Negeri Manggarai 05 Pagi	40.212.017.886	2.475.827	22.313.873	-	-	-	22.313.873	22.313.873	-
111	20102258	SD Negeri Tebet Timur 03 Pagi	40.212.018.131	-	15.498.750	-	-	-	15.498.750	15.498.750	-
112	20103619	SMP Negeri 167	50.112.015.016	2.033.603	66.289.320	-	-	-	66.289.320	66.289.320	-
113	20108791	SDN Kramat Jati 09 Pagi	51.312.015.052	4.904.800	4.904.800	-	-	-	4.904.800	4.904.800	-
114	20103145	SD Negeri Bangka 06 Pagi.	40.012.201.192	7.339.381	2.941.480	-	-	-	2.941.480	2.941.480	-
115	20108976	SDN Bali Mester 06	51.112.035.197	-	20.470.365	-	-	-	20.470.365	20.470.365	-
116	20108311	SDN Pisangan Baru 09	50.012.272.843	-	9.299.711	-	-	-	9.299.711	9.299.711	-
117	20100216	SMAN 1	10.112.090.373	217.536.914	358.566.289	-	-	-	358.566.289	358.566.289	-
118	20100262	SMP Negeri 94	11.812.047.880	56.809.468	40.006.538	-	-	-	40.006.538	40.006.538	-
119	20100535	SDN Kenari 03 Pagi.	10.912.021.971	9.456.000	61.746.776	-	-	-	61.746.776	61.746.776	-
120	20108558	SDN Duren Sawit 02	51.212.014.341	14.381.526	-	12.892.250	-	-	12.892.250	12.892.250	-
121	20105399	SDN Mangga Besar 11 Pagi	30.012.042.632	24.330.530	19.409.422	12.636.982	-	-	32.046.404	32.046.404	-
122	20108614	SDN Malaka Sari 03	51.212.014.678	21.616.430	320.000	-	-	-	320.000	320.000	-
123	20103360	SDN Rambutun 03 Pagi	51.112.036.258	-	1.027.111	-	-	-	1.027.111	1.027.111	-
124	20108839	SDN Pekayon 07 Pagi	51.112.037.807	-	60.218.930	13.657.650	-	-	73.876.580	71.885.760	1.990.820
125	20100221	SMAN 25	11.112.080.049	5.716.784	31.479.059	-	-	-	31.479.059	31.479.059	-
126	20104105	SDN Jatinegara Kaum 15	50.112.014.371	-	6.133.980	-	-	-	6.133.980	6.133.980	-
127	20105865	SD Negeri Cipete Utara 12 Pagi	40.012.200.366	20.269.354	5.569.065	-	-	-	5.569.065	5.569.065	-
128	20104604	SDN Kebon Kosong 17 Pagi.	10.112.090.012	24.617.530	189.515.751	-	-	-	189.515.751	189.515.751	-
129	20103303	SMA Negeri 71	51.212.014.040	-	251.444.243	-	-	-	251.444.243	249.744.243	1.700.000
130	20101563	SMP Negeri 134	41.112.024.229	45.161.250	135.642.925	-	-	-	135.642.925	135.642.925	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
131	20102478	SMP Negeri 247 Jakarta	40.012.203.497	28.612.901	97.427.024	-	-	-	97.427.024	97.427.024	-
132	20103464	SDN Setu 02	51.112.036.118	-	15.353.140	-	-	-	15.353.140	15.353.140	-
133	20104276	SDN Cakung Timur 03	50.312.021.136	-	-	10.093.285	-	-	10.093.285	10.093.285	-
134	20104649	SDN Paseban 07 Pagi.	50.012.273.491	55.970.776	3.628.936	-	-	-	3.628.936	3.628.936	-
135	20104157	SDN JATI 03	50.112.014.281	-	320.000	-	-	-	320.000	320.000	-
136	20108814	SDN Cijantung 01 Pagi	51.112.037.815	3.540.000	-	-	-	-	-	-	-
137	20101449	SDN Meruya Utara 11 PT.	30.312.038.036	7.558.000	4.822.600	-	-	-	4.822.600	4.822.600	-
138	20101569	SMP Negeri 190	30.412.002.293	184.575.532	132.506.974	-	-	-	132.506.974	132.506.974	-
139	20102202	SD Negeri Tegal Parang 03 Pagi	40.012.201.125	-	6.170.966	-	-	-	6.170.966	4.378.239	1.792.727
140	20104697	SDN Tanah Tinggi 01 Pagi.	12.212.027.909	7.833.420	7.318.419	-	-	-	7.318.419	7.318.419	-
141	20103611	SMP Negeri 188	51.112.038.323	22.129.982	7.946.475	-	-	-	7.946.475	7.946.475	-
142	20108993	SDN Kalisari 04 Pagi	51.112.037.769	2.939.326	2.939.326	-	-	-	2.939.326	2.939.326	-
143	20103524	SMP Negeri 106	51.112.038.480	2.463.713	28.223.695	-	-	-	28.223.695	28.223.695	-
144	20103794	SDN Pisangan Timur 01	50.112.014.389	-	10.844.899	-	-	-	10.844.899	10.844.899	-
145	20104257	SDN Cakung Barat 03	50.312.021.195	-	4.314.412	-	-	-	4.314.412	4.314.412	-
146	20103586	SMP Negeri 97	50.012.274.064	119.513.856	34.136.478	8.423.942	-	-	42.560.420	42.560.420	-
147	20105896	SD Negeri Gandaria Utara 11 Pagi	40.012.200.463	2.621.000	38.739.817	-	-	-	38.739.817	38.739.817	-
148	20101913	SDN Joglo 06 Pagi.	30.312.037.943	-	29.855.715	-	-	-	29.855.715	29.855.715	-
149	20103589	SMP Negeri 90	50.112.014.851	37.569.872	70.491.489	-	-	-	70.491.489	70.491.489	-
150	20104173	SDN JATI 06	50.112.014.176	-	11.514.416	-	7.770.900	-	3.743.516	3.743.516	-
151	20105542	SDN Tanjung Duren Selatan 05 Pagi.	30.012.044.597	18.370.530	55.350.556	-	2.500	-	55.348.056	55.348.056	-
152	20103291	SMA Negeri 104	51.112.035.065	324.113.349	285.706.517	-	-	-	285.706.517	278.423.299	7.283.218
153	20105863	SD Negeri Cipete Utara 10 Pagi	40.012.200.340	4.296.000	4.957.783	-	-	-	4.957.783	4.957.783	-
154	20105962	SDN Keb. Lama Selatan 05	41.112.024.962	-	31.778.350	-	-	-	31.778.350	31.778.350	-
155	20105296	SDN Kapuk 11 Pagi	30.412.002.021	-	5.900.346	-	-	-	5.900.346	5.900.346	-
156	20103343	SDN Pulo Gebang 06	50.312.021.560	3.251.865	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
157	20104559	SDN Johar Baru 29 Pagi.	12.212.027.828	18.941.015	191.918	-	-	-	191.918	191.918	-
158	20104636	SDN Kwitang 01 Pagi.	10.912.021.911	13.144.845	3.453.099	-	-	-	3.453.099	3.354.417	98.682
159	20108588	SDN Klender 16	51.212.014.899	3.675.463	10.080.400	-	-	-	10.080.400	10.080.400	-
160	20105575	SDN Tegal Alur 16 Pt	30.012.044.040	-	1.308.253	-	-	-	1.308.253	1.308.253	-
161	20108287	SDN Kayu Manis 03	50.012.272.894	-	1.597.052	-	-	-	1.597.052	1.597.052	-
162	20104944	SD Negeri Sunter Jaya 09	20.112.124.819	6.897.660	10.162.629	-	-	-	10.162.629	10.162.629	-
163	20100466	SDN Kramat 05 Pagi.	12.212.028.379	-	24.150.346	-	-	-	24.150.346	24.150.346	-
164	20108813	SDN Baru 06 Pagi	51.112.037.653	-	7.519.381	-	-	-	7.519.381	7.519.381	-
165	20108599	SDN Malaka Jaya 04	51.212.014.503	4.805.016	4.197.510	-	-	-	4.197.510	4.197.510	-
166	20100219	SMAN 24	11.312.109.809	42.130.217	73.493.315	-	-	-	73.493.315	73.493.315	-
167	20105572	SDN Tegal Alur 13 Pt	30.012.044.180	13.696.698	21.331.059	-	-	-	21.331.059	21.331.059	-
168	20109298	SD Negeri Pulo 07 Pagi	40.012.200.242	-	10.631.316	-	1.307.400	-	9.323.916	9.323.916	-
169	20102107	SDN Cengkareng Timur 11 PT	30.012.043.167	-	10.266.839	-	-	-	10.266.839	10.266.839	-
170	20104653	SDN Pegangsaan 01	11.112.066.623	686.600	47.081.736	-	-	-	47.081.736	41.919.837	5.161.899
171	20105243	SDN Jembatan Besi 02 PT	30.012.044.023	7.184.659	28.889.118	5.048.300	-	-	33.937.418	33.937.418	-
172	20105327	SDN Kedaung Kali Angke 07 PT	30.412.001.904	4.084.338	8.909.020	-	-	-	8.909.020	8.909.020	-
173	20102490	SMP Negeri 67	50.012.273.688	68.743.248	123.318.045	-	-	-	123.318.045	122.927.645	390.400
174	20108543	SMPT Kec. Cengkareng 2 (SMPN 190)	30.412.006.787	-	11.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-
175	20102395	SD Negeri Pancoran 07 Pagi.	40.012.200.579	5.612.920	19.737.840	-	-	-	19.737.840	19.737.840	-
176	20100636	SD Negeri Penjaringan 06	30.212.000.219	99.916.076	79.251.992	-	-	-	79.251.992	79.251.992	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
177	20104365	SDN Cipinang Melayu 09 Pagi	51.212.015.160	2.168.995	-	-	-	-	-	-	-
178	20106115	SD Negeri Pela Mampang 08	40.012.201.044	20.674.015	11.598.360	-	-	-	11.598.360	11.598.360	-
179	20105987	SD Negeri Kebagusan 01 Pagi	40.012.201.338	-	99.208.371	-	-	-	99.208.371	99.208.371	-
180	20105990	SD Negeri Kebagusan 05 Pt.	40.012.201.567	160.000	-	4.008.222	-	-	4.008.222	4.008.222	-
181	20100750	SMP Negeri 55	20.112.125.858	43.828.192	151.676.512	-	-	-	151.676.512	151.676.512	-
182	20104573	SDN Kampung Bali 03	11.312.109.167	26.752.673	4.009.840	-	-	-	4.009.840	4.009.840	-
183	20101557	SMP Negeri 101	11.312.109.906	35.661.604	113.417.964	-	-	-	113.417.964	113.417.964	-
184	20104965	SD Negeri Warakas 01	20.112.125.483	-	17.462.695	-	-	-	17.462.695	13.635.640	3.827.055
185	20108712	SDN Kalisari 08 Petang	51.112.037.858	1.273.500	1.273.500	-	-	-	1.273.500	1.273.500	-
186	20103340	SDN Pulo Gebang 09	50.312.021.306	1.908.000	3.826.615	-	-	-	3.826.615	3.826.615	-
187	20105263	SDN Kali Deres 01 Pagi	30.012.043.124	6.238.118	3.796.073	5.000	-	-	3.801.073	3.801.073	-
188	20103626	SMP Negeri 236	50.312.021.764	7.842.336	25.070.677	-	-	-	25.070.677	25.070.677	-
189	20100761	SMP Negeri 129	20.112.125.866	52.418.056	23.789.439	-	-	-	23.789.439	23.789.439	-
190	20106081	SD Negeri Pejaten Barat 01 Pagi	40.012.200.111	-	19.664.216	-	-	-	19.664.216	19.664.216	-
191	20106141	SDN Petukangan Utara 06	41.112.024.547	-	8.729.373	-	-	-	8.729.373	8.729.373	-
192	20100157	SMK Negeri 44	12.212.027.381	117.464.901	178.456.572	-	-	-	178.456.572	178.456.572	-
193	20108647	SDN Pondok Kelapa 10	51.212.014.813	2.007.566	24.738.686	-	-	-	24.738.686	24.738.686	-
194	20103629	SMP Negeri 232	50.012.274.137	-	71.012.919	-	-	-	71.012.919	71.012.919	-
195	20100517	SDN Karang Anyar 07	10.412.003.319	5.496.000	2.987.305	-	-	-	2.987.305	2.987.305	-
196	20105923	SD Negeri Gunung 01 Pagi.	40.012.200.498	20.719.810	51.422.975	-	-	-	51.422.975	51.422.975	-
197	20109110	SDN Gedong 03 Pagi	51.112.037.629	6.280.072	-	-	-	-	-	-	-
198	20102295	SD Negeri Manggarai 03	40.212.018.114	12.924.936	14.914.348	-	-	-	14.914.348	14.914.348	-
199	20100168	SMK Negeri 39	12.212.027.356	74.388.062	210.470.436	-	-	-	210.470.436	210.470.436	-
200	20105158	SDN Cengkareng Barat 14 Pagi	30.412.001.891	19.845.630	4.230.660	-	-	-	4.230.660	4.230.660	-
201	20103038	SD Negeri Cipete Utara 14 Pagi	40.012.200.382	-	2.233.000	-	-	-	2.233.000	2.233.000	-
202	20104600	SDN Kebon Kosong 13 Pagi.	10.112.089.979	23.947.351	79.519.788	-	-	-	79.519.788	79.519.788	-
203	20103304	SMA Negeri 67	51.312.012.096	2.091.891	261.132.618	11.322	-	-	261.143.940	261.143.940	-
204	20104873	SDN Marunda 03 Pagi	20.012.056.211	-	-	2.073.767	-	-	2.073.767	2.073.767	-
205	20101548	SMP Negeri 205	30.012.043.698	27.251.351	844.841	-	-	-	844.841	844.841	-
206	20102597	SMK Negeri 8 Jakarta	40.412.010.977	419.502.874	53.170.918	-	-	-	53.170.918	53.170.918	-
207	20100760	SMP Negeri 123	20.012.057.269	16.508	66.896.524	-	-	-	66.896.524	66.896.524	-
208	20108379	SDN Utan Kayu Selatan 02	50.012.272.789	-	5.239.693	-	-	-	5.239.693	5.239.693	-
209	20105511	SDN Srengseng 06 Pagi.	41.112.024.121	9.393.225	30.030.472	-	-	-	30.030.472	30.030.472	-
210	20103485	SDN Tengah 06 Pagi	51.112.036.967	1.594.000	-	1.893.558	-	-	1.893.558	1.893.558	-
211	20100687	SDN Rawa Badak Utara 17 Pagi	20.012.056.254	19.783	36.370.017	-	50.000	-	36.320.017	36.320.017	-
212	20100164	SMK Negeri 3	10.412.007.675	147.895.620	207.405.270	-	-	-	207.405.270	207.405.270	-
213	20109137	SDN Pisangan Baru 10	50.012.273.351	-	2.053.342	-	-	-	2.053.342	2.053.342	-
214	20104201	SDN Pinang Ranti 05 Pagi	51.112.037.203	1.666.683	-	1.795.051	-	-	1.795.051	1.795.051	-
215	20100671	SDN Rawa Badak Utara 19 Pagi	20.112.126.011	-	207.692.275	-	-	-	207.692.275	207.692.275	-
216	20105149	SDN Cengkareng Barat 05 Pagi	30.012.042.705	-	3.361.829	12.500	-	-	3.374.329	3.374.329	-
217	20100501	SDN Petamburan 03	11.812.047.642	24.233.608	19.729.958	-	-	-	19.729.958	19.729.958	-
218	20101497	SMK Negeri 60	41.112.024.458	5.370.180	135.758.850	-	-	-	135.758.850	135.758.850	-
219	20105938	SDN Jagakarsa 11	40.012.202.555	35.100.000	117.375.766	1.440.600	-	-	118.816.366	118.816.366	-
220	20104651	SDN Paseban 11 Pagi.	50.012.273.408	430.000	7.416.784	-	-	-	7.416.784	7.416.784	-
221	20103282	SMA Negeri 22	50.012.274.340	397.589.501	322.669.143	-	-	-	322.669.143	322.669.143	-
222	20100552	SDN Karet Tengsin 21	11.312.109.205	21.876.151	3.294.250	1.337.893	-	-	4.632.143	4.632.143	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
223	20108898	SMPT Kec. Kramatjati (SMPN 20)	51.112.040.794	-	42.096.269	-	-	-	42.096.269	42.096.269	-
224	20102248	SD Negeri SELONG 04 Pagi	40.012.200.544	10.227.042	4.685.169	-	-	-	4.685.169	4.685.169	-
225	20109019	SDN Bidara Cina 01	51.112.035.189	-	7.059	1.300.133	-	-	1.307.192	1.307.192	-
226	20105458	SDN Pegadungan 13 Pagi	30.012.044.465	29.568.475	16.186.721	-	-	-	16.186.721	16.186.721	-
227	20104554	SDN Johar Baru 19 Pagi	12.212.027.879	1.731.328	297.289	-	-	-	297.289	297.289	-
228	20104248	SDN Kramat Jati 24 Pagi	51.112.036.924	9.473	36.297.902	-	-	-	36.297.902	36.297.902	-
229	20101500	SMK Negeri 42	30.312.037.668	6.055.994	12.583.033	-	-	-	12.583.033	12.583.033	-
230	20105967	SDN Keb. Lama Selatan 12	41.112.023.753	-	10.564.243	-	-	-	10.564.243	9.336.970	1.227.273
231	20102372	SD Negeri Menteng Dalam 01 Pagi	40.212.018.068	5.425.000	1.149.016	50.000	-	-	1.199.016	1.199.016	-
232	20106144	SDN Petukangan Utara 09	41.112.025.373	-	1.230.784	-	-	-	1.230.784	1.230.784	-
233	20100766	SMP Negeri 162	20.012.057.226	73.745.541	77.881.498	-	-	-	77.881.498	77.881.498	-
234	20102486	SMPNegeri 86	40.012.203.241	25.403.266	107.919.066	-	-	-	107.919.066	107.919.066	-
235	20103362	SDN Rambutan 01 Pagi	51.112.036.533	-	5.868.235	-	-	-	5.868.235	5.868.235	-
236	20101537	SMP Negeri 88	11.312.109.591	97.921.727	235.931.895	-	1.160.000	-	234.771.895	234.771.895	-
237	20109050	SDN Duri Kosambi 10 Pagi	30.412.002.170	63.643.812	1.787.462	-	-	-	1.787.462	1.787.462	-
238	20102249	SDN Tanjung Barat 09	40.012.202.385	2.430.000	2.970.365	-	-	-	2.970.365	2.970.365	-
239	20108445	SDN Cipinang Besar Sel. 15	51.112.035.693	43.101.596	4.826.346	-	-	-	4.826.346	4.826.346	-
240	20105145	SDN Cengkareng Barat 01 Pagi	30.012.044.392	9.300.215	261.643	-	-	-	261.643	261.643	-
241	20108425	SDN Pondok Bambu 10	51.212.014.902	-	3.398.431	-	-	-	3.398.431	3.398.431	-
242	20104481	SDN Bendungan Hilir 12	11.312.109.159	67.100.256	5.677.489	-	-	-	5.677.489	5.677.489	-
243	20105848	SDN Cipadak 03	40.012.202.431	12.615.000	24.598.808	-	-	-	24.598.808	23.613.308	985.500
244	20103371	SDN Pisangan Timur 18	50.112.014.397	-	4.455.067	-	-	-	4.455.067	4.455.067	-
245	20105971	SDN Keb. Lama Selatan 17	41.112.023.788	488.000	19.916.800	-	-	-	19.916.800	19.916.800	-
246	20108532	SDN Cipinang Muara 04	51.112.035.332	5.169.685	-	-	-	-	-	-	-
247	20104347	SDN Cipayung 03	51.112.035.804	-	-	940.759	-	-	940.759	940.759	-
248	20102211	SMA Negeri 43	50.012.274.315	136.407.732	113.865.020	-	-	-	113.865.020	113.865.020	-
249	20103391	SDN Pulo Gadung 07	50.112.014.435	-	15.881.835	-	-	-	15.881.835	15.881.835	-
250	20103634	SMP Negeri 214	51.312.015.524	42.240.589	245.788.468	-	-	-	245.788.468	245.788.468	-
251	20105163	SDN Cengkareng Barat 19 Pagi	30.412.002.013	8.872.311	8.860.821	-	-	-	8.860.821	8.860.821	-
252	20102505	SMP Negeri 141 Jakarta	40.012.203.284	7.798.800	38.375.930	-	-	-	38.375.930	38.375.930	-
253	20102474	SMP Negeri 265 Jakarta	40.212.018.734	150.974.291	203.711.706	-	-	-	203.711.706	203.711.706	-
254	20103292	SMA Negeri 103	50.312.020.954	178.761.032	245.628.460	-	-	-	245.628.460	245.628.460	-
255	20108534	SDN Cipinang Muara 06	51.112.035.227	300.000	2.749.227	-	-	-	2.749.227	2.749.227	-
256	20100765	SMP Negeri 152	20.012.057.170	506	123.154.664	-	-	-	123.154.664	123.154.664	-
257	20104880	SDN Pegangsaan Dua 01 Pagi	20.012.055.576	-	85.916.449	-	-	-	85.916.449	85.916.449	-
258	20102975	SD Negeri Kebagusan 03 Pagi	40.012.203.586	-	3.592.908	-	-	-	3.592.908	3.592.908	-
259	20100805	SMA Negeri 115	20.012.043.268	-	467.330.350	-	-	-	467.330.350	467.330.350	-
260	20105277	SDN Kamal 02 Pagi	30.012.044.406	-	9.432.666	3.367.837	-	-	12.800.503	12.800.503	-
261	20105177	SDN Cengkareng Timur 14 Pagi	30.412.001.971	-	6.329.206	-	-	-	6.329.206	6.329.206	-
262	20103623	SMP Negeri 243	50.312.021.942	175.816.338	53.645.759	-	-	-	53.645.759	53.645.759	-
263	20101061	SDN Lagoa 09 Pagi	20.012.055.797	58.494	3.557.378	-	50.000	-	3.507.378	3.507.378	-
264	20106080	SD Negeri Pasar Minggu 06 PT	40.012.200.188	-	2.010.568	-	-	-	2.010.568	1.946.168	64.400
265	20102219	SMA Negeri 109	50.212.000.564	364.774.890	573.958.780	-	-	-	573.958.780	573.958.780	-
266	20104895	SD Negeri Pluit 01	30.212.000.090	20.724.884	47.878.821	-	-	-	47.878.821	47.246.088	632.733
267	20100806	SMA Negeri 13	20.012.047.468	124.153.528	128.536.152	-	-	-	128.536.152	128.536.152	-
268	20106156	SDN Pondok Labu 13	40.012.202.113	-	4.540.855	-	-	-	4.540.855	4.540.855	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
269	20108460	SDN Cipinang Besar Utara 09	51.112.035.588	6.363.230	21.132.961	-	-	-	21.132.961	20.528.926	604.035
270	20100618	SDN Tugu Utara 14 Pagi	20.012.056.157	9.114.781	639.281	-	-	-	639.281	639.281	-
271	20104593	SDN Kebon Kosong 03 Pagi.	10.112.089.626	4.555.510	807.546	-	-	-	807.546	807.546	-
272	20103518	SMP Negeri 138	50.312.021.144	146.067.719	86.100.287	-	-	-	86.100.287	86.100.287	-
273	20105982	SDN Keb. Lama Utara 09	41.112.025.047	-	5.026.795	570.000	-	-	5.596.795	5.596.795	-
274	20100477	SDN Paseban 09 Pagi.	50.012.273.416	20.161.096	29.475.282	-	-	-	29.475.282	28.908.884	566.398
275	20100528	SDN Cempaka Putih Timur 01 Pagi.	12.212.027.666	19.707.344	17.505.183	-	-	-	17.505.183	17.505.183	-
276	20102512	SMP Negeri 166	40.012.203.390	6.481.210	65.509.071	557.034	-	-	66.066.105	66.066.105	-
277	20100758	SMP Negeri 261	30.112.022.346	235.572.233	12.600.000	-	-	-	12.600.000	12.600.000	-
278	20101546	SMP Negeri 32	30.012.043.787	162.985.466	346.369.231	-	-	-	346.369.231	346.369.231	-
279	20106599	SMPT Kec. Penjaringan (SMPN 261)	30.112.022.567	-	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-
280	20100210	SMA Negeri 5	50.012.274.200	434.491.976	620.652.567	-	-	-	620.652.567	620.137.908	514.659
281	20105400	SDN Mangga Besar 15 Pagi	30.012.042.578	7.872.550	9.428.204	-	-	-	9.428.204	8.915.704	512.500
282	20104854	SD Negeri Kebon Bawang 03	20.012.055.452	3.015	636.373	-	-	-	636.373	133.010	503.363
283	20102322	SD Negeri Kramat Pela 07	40.012.200.277	400	-	500.000	-	-	500.000	500.000	-
284	20101588	SMA Negeri 78	11.312.109.841	24.141.921	321.663.836	-	-	-	321.663.836	321.663.836	-
285	20100769	SMP Negeri 200	20.012.057.099	25.697.660	49.834.725	-	-	-	49.834.725	49.834.725	-
286	20107179	SMP NEGERI 283	51.112.038.285	52.143.371	25.254.906	-	-	-	25.254.906	24.778.179	476.727
287	20105919	SDN Grogol Utara 16	41.112.024.920	501.280	501.286	-	-	-	501.286	29.396	471.890
288	20100807	SMAN 15	30.212.000.677	182.188.521	88.634.891	-	-	-	88.634.891	88.634.891	-
289	20103635	SMP Negeri 213	50.312.021.594	140.283.518	282.538.796	-	-	-	282.538.796	282.538.796	-
290	20108606	SDN Malaka Jaya 11	51.212.014.589	4.988.882	60.489.192	-	-	-	60.489.192	60.041.502	447.690
291	20103483	SDN Tengah 08 Pagi	51.112.036.991	-	1.120.000	-	-	-	1.120.000	1.120.000	-
292	20108604	SDN Malaka Jaya 09	51.212.014.562	1.000.000	1.710.977	-	-	-	1.710.977	1.710.977	-
293	20105940	SDN Jagakarsa 13	40.012.202.571	-	411.798	-	-	-	411.798	4.185	407.613
294	20101534	SMP Negeri 264	30.412.002.340	168.076.448	42.359.675	-	-	-	42.359.675	42.359.675	-
295	20108547	SDN Cipinang Muara 16	51.112.035.511	-	37.100.218	395.692	-	-	37.495.910	37.495.910	-
296	20102504	SMP Negeri 145 Jakarta	40.212.018.718	69.996.220	255.343.423	-	-	-	255.343.423	255.343.423	-
297	20107185	SMAN 69	30.112.022.303	186.340.594	92.633.729	-	-	-	92.633.729	92.633.729	-
298	20104612	SDN Kebon Sirih 04	10.812.169.091	4.086.178	32.577.931	-	-	-	32.577.931	32.577.931	-
299	20102152	SD Negeri Rawajati 01 Pagi.	40.012.200.757	-	1.657.116	-	-	-	1.657.116	1.287.984	369.132
300	20103570	SMP NEGERI 272	51.312.015.419	22.950.963	80.249.180	-	-	-	80.249.180	80.249.180	-
301	20102491	SMP Negeri 66	41.112.024.253	14.648.558	12.152.019	-	-	-	12.152.019	12.152.019	-
302	20101932	SDN Kapuk 05 Pagi	30.012.042.730	18.074.616	8.308	349.629	-	-	357.937	357.937	-
303	20101414	SDN Rawa Buaya 01 Pagi	30.312.038.192	1.819.720	12.231.869	-	-	-	12.231.869	12.231.869	-
304	20105378	SDN Kembangan Utara 09 Pagi.	30.312.038.222	443.003	12.990.765	337.248	-	-	13.328.013	13.328.013	-
305	20105876	SDN Cipulir 07	41.112.023.630	-	-	482.568	-	-	482.568	482.568	-
306	20104574	SDN Kampung Bali 07	11.812.047.693	8.999.373	441.704	-	-	-	441.704	441.704	-
307	20106072	SD Negeri Pasar Manggis 01 Pagi	40.212.019.056	-	24.691.651	-	-	-	24.691.651	24.691.651	-
308	20101538	SMP Negeri 83	30.012.043.566	16.358.013	66.178.685	290.000	-	-	66.468.685	66.468.685	-
309	20101529	SMP Negeri 22	10.412.007.781	179.203.545	129.798.349	-	-	-	129.798.349	129.798.349	-
310	20101583	SMA Negeri 96	30.312.037.358	10.441.788	196.156.172	-	-	-	196.156.172	196.156.172	-
311	20106047	SD Negeri Manggarai 15 Pagi	40.212.017.983	5.258.750	248.245	100.000	-	-	348.245	348.245	-
312	20100780	SMAN 80	20.012.043.349	39.623.952	205.756.868	254.995	-	-	206.011.863	206.011.863	-
313	20102023	SDN Cengkareng Barat 03 Pagi	30.012.042.942	-	21.161.420	-	-	-	21.161.420	21.161.420	-
314	20109104	SDN Pinang Ranti 01 Pagi	51.312.015.273	3.260.633	3.104.158	50.000	-	-	3.154.158	3.154.158	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
315	20106063	SD Negeri Menteng Dalam 05 Pagi	40.212.017.738	105.861.197	3.701.804	-	-	-	3.701.804	3.701.804	-
316	20101942	SDN Jati Pulo 08 Pagi	30.012.043.523	3.676.323	9.364.087	-	-	-	9.364.087	9.364.087	-
317	20105531	SDN Tamansari 09 Pagi	10.212.000.569	50.000	1.082.989	-	-	-	1.082.989	832.489	250.500
318	20106214	SD Negeri Tebet Timur 15 Pagi	40.212.017.797	10.180.538	160.000	50.000	-	-	210.000	210.000	-
319	20102263	SD Negeri Tebet Barat 05	40.212.017.851	6.042.224	9.474.958	-	-	-	9.474.958	9.474.958	-
320	20105957	SD Negeri Karet Kuningan 03 Pagi	40.212.017.959	58.329.390	11.865.662	50.000	-	-	11.915.662	11.915.662	-
321	20106049	SD Negeri Manggarai 19 Pagi	40.212.018.076	1.462.242	457.218	50.000	-	-	507.218	507.218	-
322	20102283	SD Negeri Manggarai 01 Pagi	40.212.018.203	19.474.670	13.485.946	50.000	-	-	13.535.946	13.535.946	-
323	20102264	SD Negeri Tebet Barat 03 Pagi	40.212.018.301	27.895.130	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-
324	20102982	SD Negeri Karet 05 Pagi	40.212.018.360	1.810.000	3.276.412	50.000	-	-	3.326.412	3.326.412	-
325	20106052	SD Negeri Manggarai SELATAN 03	40.212.019.005	16.584.286	5.594.559	-	-	-	5.594.559	5.594.559	-
326	20105153	SDN Cengkareng Barat 09 Pagi	30.012.042.870	17.509.767	747	-	-	-	747	747	-
327	20102981	SD Negeri Karet 06 Pagi	40.212.018.351	5.720.000	350.001	-	-	-	350.001	350.001	-
328	20104255	SDN Cakung Barat 05	50.312.021.349	14.613.187	2.416.167	2.076.000	-	-	4.492.167	4.492.167	-
329	20105509	SDN Srengseng 04 Pagi	41.112.024.091	71.744.400	8.973.650	-	-	-	8.973.650	8.973.650	-
330	20102473	SMP Negeri 267	41.112.024.172	44.523.842	111.560.327	-	-	-	111.560.327	111.560.327	-
331	20103296	SMA Negeri 39	50.212.000.670	51.286.629	152.252.174	-	-	-	152.252.174	152.252.174	-
332	20103258	SMA Negeri 93	51.112.038.846	3.599.693	15.974.674	-	-	-	15.974.674	15.974.674	-
333	20105536	SDN Tanah Sereal 02 PT	30.012.043.850	230.878	230.878	-	-	-	230.878	230.878	-
334	20104953	SDN Tugu Utara 02 Petang	20.012.055.878	-	1.476.875	-	-	-	1.476.875	1.476.875	-
335	20103154	SD Negeri Bukit Duri 10 Petang	40.212.017.771	137.320	75.000	50.000	-	-	125.000	125.000	-
336	20102204	SD Negeri Tebet Timur 20 Pagi	40.212.017.801	26.209.509	13.273.436	-	25.000	-	13.248.436	13.248.436	-
337	20105958	SD Negeri Karet Kuningan 04 PT	40.212.018.459	27.875.000	2.302.898	-	-	-	2.302.898	2.302.898	-
338	20100577	SDN Tugu Utara 11 Pagi	20.012.055.614	-	220.000	-	-	-	220.000	220.000	-
339	20103620	SMP Negeri 20	51.112.038.293	3.490.039	141.719.352	-	-	-	141.719.352	141.719.352	-
340	20103358	SDN Rambutan 06 Pagi	51.112.036.495	216.056	-	216.056	-	-	216.056	216.056	-
341	20106343	SMPN 241	20.012.057.234	6.737.460	1.238.235	-	-	-	1.238.235	1.238.235	-
342	20106846	SMPT Kec. Cengkareng 1 (SMPN 264)	30.412.006.761	-	4.099.350	-	-	-	4.099.350	4.099.350	-
343	20106066	SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi	40.212.017.746	55.237.763	1.194.030	-	-	-	1.194.030	1.194.030	-
344	20105921	SD Negeri Guntur 01 Pagi	40.212.017.819	32.441.000	54.711	216.140	-	-	270.851	270.851	-
345	20103153	SD Negeri Bukit Duri 11 Pagi	40.212.017.835	32.954.469	393.318	-	-	-	393.318	393.318	-
346	20102233	SD Negeri Tebet Timur 17 Pagi	40.212.017.860	5.417.494	163.838.246	-	-	-	163.838.246	163.838.246	-
347	20102299	SD Negeri Kebon Baru 05	40.212.017.894	8.501.554	10.405.743	-	-	-	10.405.743	10.405.743	-
348	20103019	SD Negeri Guntur 08 Pagi	40.212.017.908	14.072.600	50.000	-	-	-	50.000	50.000	-
349	20103161	SD Negeri Bukit Duri 01 Pagi	40.212.017.932	16.524.515	76.802	-	-	-	76.802	76.802	-
350	20102286	SD Negeri Manggarai 13 Pagi	40.212.018.017	11.115.226	489.758	-	-	-	489.758	489.758	-
351	20106216	SD Negeri Tebet Timur 18 Pagi	40.212.018.050	24.301.271	46.536.477	-	-	-	46.536.477	46.536.477	-
352	20102259	SD Negeri Tebet Timur 01 Pagi	40.212.018.165	25.812.210	6.141.506	-	-	-	6.141.506	6.141.506	-
353	20102253	SD Negeri Tebet Timur 11 Pagi	40.212.018.173	24.613.500	2.741.928	-	-	-	2.741.928	2.741.928	-
354	20106059	SD Negeri Menteng Atas 19 Pagi	40.212.018.181	8.896.300	1.618.943	-	-	-	1.618.943	1.618.943	-
355	20102205	SD Negeri Tebet Timur 19 Pagi	40.212.018.211	13.977.930	5.457.984	-	-	-	5.457.984	5.457.984	-
356	20106050	SD Negeri Manggarai SELATAN 01	40.212.018.297	73.250	12.107.166	-	-	-	12.107.166	12.107.166	-
357	20105955	SD Negeri Karet Kuningan 01 Pagi	40.212.018.335	18.761.342	-	-	-	-	-	-	-
358	20102260	SD Negeri Tebet Barat 08 Pagi	40.212.018.386	32.396.479	10.626.371	-	-	-	10.626.371	10.626.371	-
359	20105952	SD Negeri Karet 01 Pagi	40.212.018.441	753.508	370.000	-	-	-	370.000	370.000	-
360	20102580	SMK Negeri 41	40.412.010.748	24.090.395	123.154.929	-	-	-	123.154.929	123.154.929	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
361	20109933	SMAN Unggulan M.H. THAMRIN	10.312.001.709	65.556.564	196.413.370	-	-	-	196.413.370	196.413.370	-
362	20106057	SD Negeri Menteng Atas 11	40.212.018.394	5.248.468	55.827	-	-	-	55.827	55.827	-
363	20105527	SDN Tamansari 05 Pagi	10.212.000.534	-	297.496	-	-	-	297.496	117.496	180.000
364	20102251	SD Negeri Tebet Barat 01 Pagi	40.212.017.941	3.467.000	61.456	-	-	-	61.456	61.456	-
365	20105922	SD Negeri Guntur 03 Pagi.	40.212.018.149	1.345.102	12.450.438	-	-	-	12.450.438	12.450.438	-
366	20106092	SD Negeri Pejaten Timur 01 Pagi	40.012.201.265	-	21.229.335	-	-	-	21.229.335	21.229.335	-
367	20102300	SD Negeri Kebon Baru 03 Pagi	40.212.018.122	-	3.831.489	-	-	-	3.831.489	3.831.489	-
368	20102255	SD Negeri Tebet Timur 07	40.212.017.967	15.203.000	2.092.454	-	-	-	2.092.454	2.092.454	-
369	20105210	SDN Duri Utara 05 Pagi	30.012.044.210	3.003.000	19.818.806	-	-	-	19.818.806	19.666.685	152.121
370	20104896	SD Negeri Pluit 03	30.112.022.354	117.519	13.600.000	50.000	-	-	13.650.000	13.650.000	-
371	20100167	SMKN 38	10.812.168.990	87.807.917	138.601.982	-	-	-	138.601.982	138.601.982	-
372	20109175	SD Negeri Pluit 05	30.112.022.320	-	3.415.368	25.000	-	-	3.440.368	3.440.368	-
373	20105935	SDN Jagakarsa 07	40.012.202.521	25.204.100	90.405.260	-	-	-	90.405.260	90.405.260	-
374	20103018	SD Negeri Guntur 09 Pagi.	40.212.017.827	-	-	-	-	-	-	-	-
375	20106048	SD Negeri Manggarai 17 Pagi	40.212.018.106	-	8.534.953	-	-	-	8.534.953	8.534.953	-
376	20102983	SD Negeri Karet 04	40.212.018.238	-	952.517	-	-	-	952.517	952.517	-
377	20106060	SD Negeri Menteng Atas 21 Pagi	40.212.018.408	-	48.800.129	-	-	-	48.800.129	48.800.129	-
378	20102378	SD Negeri Menteng Atas 06 Pagi	40.212.018.416	-	14.642.945	-	-	-	14.642.945	14.642.945	-
379	20106056	SD Negeri Menteng Atas 05 Pagi	40.212.018.424	-	14.034.994	-	-	-	14.034.994	14.034.994	-
380	20102380	SD Negeri Menteng Atas 04 Pagi	40.212.018.432	-	1.120.000	-	-	-	1.120.000	1.120.000	-
381	20106186	SD Negeri Setiabudi 01	40.212.019.021	-	33.812.410	-	-	-	33.812.410	33.812.410	-
382	20104254	SDN Cakung Timur 06	50.312.021.632	284.206	-	185.201	-	-	185.201	185.201	-
383	20104272	SDN Cakung Barat 07	50.312.021.314	32.452.620	4.751.853	-	-	-	4.751.853	4.751.853	-
384	20104256	SDN Cakung Barat 04	50.312.021.390	30.579.126	-	-	-	-	-	-	-
385	20108780	SDN Rawa Terate 02	50.312.022.027	164.963	145.690	-	-	-	145.690	145.690	-
386	20100620	SDN Tugu Utara 16 Petang	20.012.055.886	-	7.443.776	-	-	-	7.443.776	7.443.776	-
387	20108452	SDN Cipinang Besar Utara 02	51.112.035.472	13.911.364	36.194.553	-	-	-	36.194.553	36.194.553	-
388	20106055	SD Negeri Menteng Atas 02	40.212.018.327	-	71.960.846	-	-	-	71.960.846	71.960.846	-
389	20100223	SMA Negeri 27	50.012.274.218	394.948.916	401.156.296	-	5.000	-	401.151.296	401.151.296	-
390	20101623	SMA Negeri 19	30.012.044.546	333.806.857	520.605.320	-	-	-	520.605.320	520.471.929	133.391
391	20105282	SDN Kamal 07 Pagi	30.012.043.574	827.000	7.788.711	230.000	-	-	8.018.711	8.018.711	-
392	20103328	SDN Pulo Gebang 11	50.312.021.365	24.560.727	-	37.628	-	-	37.628	37.628	-
393	20103163	SD Negeri Bukit Duri 03 Pagi	40.212.018.025	8.834.838	4.031.936	9.000	-	-	4.040.936	4.040.936	-
394	20107182	SMP Negeri 35	51.112.038.374	-	38.726.061	-	-	-	38.726.061	38.726.061	-
395	20104167	SDN Jatinegara 02	50.312.021.926	607.276	1.394.613	-	-	-	1.394.613	1.394.613	-
396	20106124	SDN Pesangrahan 04	41.112.024.482	-	2.693.800	-	-	-	2.693.800	2.693.800	-
397	20108715	SDN Kampung Melayu 02	51.112.035.570	-	3.246.145	-	-	-	3.246.145	3.246.145	-
398	20100690	SDN Rawa Badak Selatan 09 Pagi	20.112.125.114	50.382.950	23.509.496	-	-	-	23.509.496	23.509.496	-
399	20103507	SMP Negeri 102	51.112.038.692	67.425.080	81.919.263	-	-	-	81.919.263	81.919.263	-
400	20104128	SDN Kebon Pala 09 Pagi	51.112.037.351	2.581.260	17.425.743	-	-	-	17.425.743	17.425.743	-
401	20100218	SMAN 20	10.412.007.764	6.730.199	26.752.282	-	-	-	26.752.282	26.752.282	-
402	20104869	SDN Lagoa 01 Pagi	20.012.055.819	116.000	-	116.000	-	-	116.000	116.000	-
403	20100686	SDN Semper Barat 05 Pagi	20.012.056.017	116.000	40.116	116.000	-	-	156.116	156.116	-
404	20101004	SDN Kali Baru 08 Petang	20.012.056.033	-	12.453.800	116.000	-	-	12.569.800	12.569.800	-
405	20100591	SDN Semper Timur 05 Pagi	20.012.056.041	116.000	266.028	-	-	-	266.028	266.028	-
406	20101544	SMP Negeri 54	30.012.043.639	33.454.140	71.012.490	-	-	-	71.012.490	71.012.490	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
407	20105461	SDN Pekoan 01 Pagi	30.012.044.015	3.259.490	13.375.903	112.500	-	-	13.488.403	13.488.403	-
408	20102488	SMP Negeri 73 Jakarta	40.212.018.688	90.163.560	138.879.145	-	-	-	138.879.145	138.879.145	-
409	20104335	SDN Cipinang 05	50.112.014.338	1.107.118	4.048.368	-	-	-	4.048.368	3.937.743	110.625
410	20103288	SMA Negeri 107	12.312.005.105	60.894.563	424.953.961	110.000	-	-	425.063.961	425.063.961	-
411	20101574	SMP Negeri 169	30.012.043.647	1.535.243	119.114.488	-	-	-	119.114.488	119.114.488	-
412	20104640	SDN Menteng 01	50.012.273.599	3.251.559	41.743.626	-	-	-	41.743.626	41.743.626	-
413	20104642	SDN Menteng 03	50.012.273.611	82.833.108	53.978.437	110.000	-	-	54.088.437	54.088.437	-
414	20103601	SMP Negeri 44	50.012.274.153	16.691.875	73.109.655	110.000	-	-	73.219.655	73.219.655	-
415	20103280	SMA Negeri 36	50.012.274.404	7.874.145	345.575.785	-	-	-	345.575.785	345.575.785	-
416	20106342	SMPN 133	30.112.022.338	10.771.683	66.783	-	-	-	66.783	66.783	-
417	20101046	SDN Marunda 04 Petang	20.012.056.190	-	32.457.297	107.787	-	-	32.565.084	32.565.084	-
418	20105849	SDN Cipedak 05	40.012.002.458	-	60.988.990	107.400	-	-	61.096.390	61.096.390	-
419	20104239	SDN Lubang Buaya 06	51.112.035.821	3.323.163	113.392.379	50.000	-	-	113.442.379	113.442.379	-
420	20103326	SDN Pulo Gebang 13	50.312.021.101	86.396.907	1.810.518	-	-	-	1.810.518	1.810.518	-
421	20106074	SD Negeri Pasar Manggis 03	40.212.018.033	-	132.959.730	-	-	-	132.959.730	132.959.730	-
422	20102297	SD Negeri Kuningan Timur 01	40.212.018.246	-	-	25.000	-	-	25.000	25.000	-
423	20106042	SD Negeri Manggarai 07 Pagi.	40.212.017.789	-	-	-	-	-	-	-	-
424	20106041	SD Negeri Manggarai 06 PT	40.212.017.916	-	-	-	-	-	-	-	-
425	20102290	SD Negeri Manggarai 08 Petang	40.212.017.924	-	-	-	-	-	-	-	-
426	20104700	SDN Tanah Tinggi 04 Petang.	12.212.027.984	18.337.594	2.560.051	-	-	-	2.560.051	2.560.051	-
427	20101565	SMP Negeri 201	30.412.002.358	56.851.174	176.902.543	-	-	-	176.902.543	176.902.543	-
428	20103155	SD Negeri Bukit Duri 09 Pagi	40.212.017.843	-	2.240.280	-	-	-	2.240.280	2.240.280	-
429	20102289	SD Negeri Manggarai 09 Pagi.	40.212.017.975	-	244.320.000	-	-	-	244.320.000	244.320.000	-
430	20106045	SD Negeri Manggarai 11 Pagi.	40.212.017.991	-	52.179	-	-	-	52.179	52.179	-
431	20102326	SD Negeri Kebon Baru 11	40.212.018.092	-	2.720.000	-	-	-	2.720.000	2.720.000	-
432	20106054	SD Negeri Menteng Atas 01 Pagi	40.212.018.319	-	2.139.500	-	-	-	2.139.500	2.139.500	-
433	20105419	SDN Meruya Utara 10 Pagi.	41.112.024.075	14.838.318	3.933.563	-	-	-	3.933.563	3.933.563	-
434	20105524	SDN Sukabumi Utara 09 Pagi.	41.112.024.865	346.000	6.563	-	-	-	6.563	6.563	-
435	20105917	SDN Grogol Utara 14	41.112.025.179	50.000	-	-	-	-	-	-	-
436	20100165	SMK Negeri 31	50.012.274.650	22.113.220	212.248.036	97.375	-	-	212.345.411	212.345.411	-
437	20102314	SD Negeri Kebon Baru 09 Pagi	40.212.018.084	-	592.030	-	-	-	592.030	592.030	-
438	20105276	SDN Kamal 01 Pagi	30.012.043.141	-	6.151.180	-	-	-	6.151.180	6.151.180	-
439	20102502	SMP Negeri 153	41.112.024.148	35.395.482	108.927.742	-	-	-	108.927.742	108.927.742	-
440	20109126	SDN Susukan 09 Pagi	51.112.036.614	180.000	14.076.251	-	-	-	14.076.251	14.076.251	-
441	20102350	SD Negeri Pasar Minggu 05 Pagi	40.012.201.249	-	-	2.677.752	-	-	2.677.752	2.677.752	-
442	20105491	SDN Semanan 11 Pt	30.012.044.147	107.500	-	110.000	-	-	110.000	110.000	-
443	20102493	SMP Negeri 57 Jakarta	40.212.018.653	608.591	143.098.719	-	-	-	143.098.719	143.098.719	-
444	20108744	SDN Ujung Menteng 01	50.312.021.497	19.272	6.619.707	-	-	-	6.619.707	6.619.707	-
445	20103386	SDN Pulo Gebang 02	50.312.021.071	31.758.576	14.340.975	-	-	-	14.340.975	14.340.975	-
446	20102500	SMP Negeri 155 Jakarta	40.212.018.726	69.813.567	127.217.102	50.000	-	-	127.267.102	127.267.102	-
447	20104927	SD Negeri Sunter Agung 03	20.112.125.432	-	1.203.152	-	-	-	1.203.152	1.120.000	83.152
448	20103580	SMP Negeri 255	50.312.021.730	127.733.561	201.821.182	-	-	-	201.821.182	201.821.182	-
449	20108708	SDN Jatinegara 06	50.312.021.969	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
450	20101584	SMA Negeri 95	30.312.038.419	-	58.543.931	-	-	-	58.543.931	58.543.931	-
451	20105261	SDN KALIANYAR 01 Pagi	30.012.043.973	3.081.000	22.227.998	-	-	-	22.227.998	22.148.438	79.560
452	20102492	SMP Negeri 58 Jakarta	40.212.018.661	12.409.303	86.838.425	-	-	-	86.838.425	86.838.425	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
453	20104258	SDN Cakung Barat 02	50.312.021.578	18.457.976	18.748.899	-	-	-	18.748.899	18.748.899	-
454	20103568	SMP Negeri 281	51.112.038.579	40.536.823	121.332.226	50.000	-	-	121.382.226	121.382.226	-
455	20122001	SMPT Kec. Kemayoran (SMPN 79)	10.112.087.879	-	21.104.033	-	-	-	21.104.033	21.104.033	-
456	20103104	SD Negeri Cilandak Timur 01 Pagi	40.012.201.257	3.016.000	52.934.061	-	-	-	52.934.061	52.934.061	-
457	20102503	SMP Negeri 15 Jakarta	40.212.018.637	28.030.321	231.939.084	50.000	-	-	231.989.084	231.989.084	-
458	20104209	SDN Penggilingan 06	50.312.021.454	52.310.522	73.892.688	-	-	-	73.892.688	73.892.688	-
459	20102387	SD Negeri Menteng Dalam 07 Pagi	40.212.018.262	87.817.213	663.435	-	25.000	-	638.435	638.435	-
460	20100811	SMAN 41	10.412.007.772	8.335.192	215.687.398	-	-	-	215.687.398	215.687.398	-
461	20100211	SMAN 4	10.812.168.965	34.189.114	233.154.855	-	-	-	233.154.855	233.154.855	-
462	20102589	SMK Negeri 18	40.412.001.617	206.125.700	568.200.477	-	-	-	568.200.477	568.200.477	-
463	20107180	SMP Negeri 284	50.312.021.292	7.915	47.265.659	-	-	-	47.265.659	47.265.659	-
464	20106196	SDN Srengseng Sawah 12	40.012.202.318	-	1.236.880	-	-	-	1.236.880	1.236.880	-
465	20103150	SDN Bintaro 13	41.112.024.474	14.500.000	51.150	-	-	-	51.150	51.150	-
466	20104482	SDN Cempaka Baru 01 Pagi.	10.112.089.766	43.825.000	10.226.588	50.000	-	-	10.276.588	10.276.588	-
467	20104484	SDN Cempaka Baru 03 Pagi.	10.112.089.855	19.701.369	72.370.907	50.000	-	-	72.420.907	72.420.907	-
468	20104488	SDN Cempaka Baru 09 Pagi.	10.112.090.071	-	8.758.351	50.000	-	-	8.808.351	8.808.351	-
469	20104522	SDN Duri Pulo 08	10.112.090.144	9.032.494	3.306.631	50.000	-	-	3.356.631	3.356.631	-
470	20104588	SDN Kebon Kacang 05	11.312.109.213	28.660.600	20.529.825	50.000	-	-	20.579.825	20.579.825	-
471	20100480	SDN Rawasari 03 Pagi.	12.212.027.747	39.207.901	3.343.964	-	-	-	3.343.964	3.343.964	-
472	20104536	SDN Harapan Mulia 01 Pagi.	12.212.028.204	4.448.197	100.045.028	50.000	-	-	100.095.028	100.095.028	-
473	20100238	SMP Negeri 228	12.212.028.433	56.360.901	99.950.000	-	-	-	99.950.000	99.950.000	-
474	20100568	SDN Tugu Selatan 01 Pagi	20.012.055.461	66.810	157.851.251	-	50.000	-	157.801.251	157.801.251	-
475	20100633	SDN Sempur Barat 07 Pagi	20.012.055.703	-	4.850.000	-	50.000	-	4.800.000	4.800.000	-
476	20104917	SDN Sukapura 05 Pagi	20.012.055.746	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-
477	20104956	SDN Tugu Utara 05 Pagi	20.012.055.835	-	19.675.174	-	50.000	-	19.625.174	19.625.174	-
478	20101059	SDN Lagoa 07 Pagi	20.012.056.149	80.085.427	61.876.272	-	-	-	61.876.272	61.876.272	-
479	20101003	SDN Kali Baru 07 Pagi	20.012.056.262	1.600.000	13.520.196	-	50.000	-	13.470.196	13.470.196	-
480	20105152	SDN Cengkareng Barat 08 PT	30.412.002.005	480.000	1.760.000	50.000	-	-	1.810.000	1.810.000	-
481	20102920	SDN Grogol Selatan 10	41.112.023.966	-	50.000	-	-	-	50.000	50.000	-
482	20101586	SMA Negeri 85	41.112.024.423	47.504.446	203.289.026	50.000	-	-	203.339.026	203.339.026	-
483	20101604	SMA Negeri 57	41.112.024.431	101.090.726	476.892.524	50.000	-	-	476.942.524	476.942.524	-
484	20105192	SDN Duri Kepa 13 Pagi.	41.112.024.601	50.000	-	50.000	-	-	50.000	50.000	-
485	20105269	SDN Kali Deres 07 Pagi	30.012.044.481	-	8.790.910	48.590	-	-	8.839.500	8.839.500	-
486	20106105	SD Negeri Pejaten Timur 20	40.012.201.401	36.083	6.014.313	-	-	-	6.014.313	6.014.313	-
487	20104472	SDN P. PARI 02 PAGI	20.012.056.335	9.194.000	5.641.781	-	-	-	5.641.781	5.594.264	47.517
488	20102468	SMP Negeri 33 Jakarta	40.212.018.645	88.183.120	69.503.084	-	-	-	69.503.084	69.503.084	-
489	20104195	SDN Ujung Menteng 04	50.312.021.471	7.453.456	389.326	-	-	-	389.326	389.326	-
490	20103342	SDN Pulo Gebang 07	50.312.021.357	2.690.965	20.000	22.261	-	-	42.261	42.261	-
491	20105900	SDN Grogol Selatan 05	41.112.023.672	24.052.500	7.629.780	120.000	-	-	7.749.780	7.749.780	-
492	20103607	SMP Negeri 195	50.312.800.020	83.402.154	138.171.875	-	-	-	138.171.875	138.171.875	-
493	20108743	SDN Penggilingan 05	50.312.021.853	1.490.537	45.375	-	-	-	45.375	45.375	-
494	20103364	SDN Pulo Gebang 05	50.312.021.438	404.143	1	-	-	-	1	1	-
495	20104139	SDN Jatinegara 15	50.312.021.233	-	8.003.503	-	-	-	8.003.503	8.003.503	-
496	20104278	SDN Cakung Timur 01	50.312.021.527	20.474	39.921	-	-	-	39.921	39.921	-
497	20102376	SD Negeri Menteng Atas 14 Pagi.	40.212.018.271	-	3.261.129	-	-	-	3.261.129	3.261.129	-
498	20104849	SD Negeri Kamal Muara 01	30.112.022.311	1.229	800.000	1.229	-	-	801.229	801.229	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
499	20101955	SDN Jelambar Baru 07 Pagi.	30.012.043.329	6.061.780	41.885.374	-	-	-	41.885.374	41.885.374	-
500	20104921	SD Negeri Sungai Bambu 03	20.112.125.017	18.600.000	101.482.543	35.876	-	-	101.518.419	101.518.419	-
501	20104273	SDN Cakung Barat 08	50.312.021.951	13.810.825	11.490.440	-	-	-	11.490.440	11.490.440	-
502	20106143	SDN Petukangan Utara 08	41.212.000.140	87	4.715.621	-	-	-	4.715.621	4.715.621	-
503	20104163	SDN Jatinegara 09	50.312.021.870	3.977.490	7.189.596	-	-	-	7.189.596	7.189.596	-
504	20104271	SDN Cakung Barat 06	50.312.021.225	1.852.000	-	39.654	-	-	39.654	39.654	-
505	20103365	SDN Pulo Gebang 04	50.312.021.446	6.963.252	12.812.416	-	-	-	12.812.416	12.812.416	-
506	20106193	SDN Srengseng Sawah 07	40.012.202.652	25.956.000	46.761.650	-	-	-	46.761.650	46.761.650	-
507	20104183	SDN Makassar 06 Pagi	51.112.037.254	89.760	25.149.161	-	-	-	25.149.161	25.149.161	-
508	20109211	SDN Cakung Timur 09	50.312.021.331	15.084	7.262	-	-	-	7.262	7.262	-
509	20103479	SDN Ujung Menteng 02	50.312.021.845	-	11.368.932	-	-	-	11.368.932	11.368.932	-
510	20106157	SDN Pondok Labu 14	40.012.202.121	-	50.704	-	-	-	50.704	25.104	25.600
511	20104112	SDN Jatinegara Kaum 07	50.112.014.206	-	58.444.590	-	-	-	58.444.590	58.444.590	-
512	20104212	SDN Penggilingan 01	50.312.021.888	3.648.000	2.263.000	-	-	-	2.263.000	2.263.000	-
513	21104166	SDN Jatinegara 05	50.312.021.781	7.369.600	3.361.759	-	-	-	3.361.759	3.361.759	-
514	20108774	SDN Rawa Terate 01	50.312.021.381	5.132.992	5.134.883	-	-	-	5.134.883	5.134.883	-
515	20108706	SDN Jatinegara 03	50.312.021.721	15.772.240	3.153	-	-	-	3.153	3.153	-
516	20104213	SDN Lubang Buaya 11	51.112.035.901	20.509	14.981.579	-	-	-	14.981.579	14.981.579	-
517	20109327	SDN Pekojan 06 PT	30.012.044.007	1.690.486	9.797.736	-	-	-	9.797.736	9.797.736	-
518	20106162	SDN Pondok Pinang 03	41.112.025.071	-	21.231	-	-	-	21.231	21.231	-
519	20103517	SMP Negeri 139	50.312.022.922	58.738.039	125.933.024	-	-	-	125.933.024	125.933.024	-
520	20103475	SDN Ujung Menteng 07	50.312.021.462	4.443.569	8.573.727	-	-	-	8.573.727	8.573.727	-
521	20108540	SDN Cipinang Muara 14	51.112.035.294	865.824	35.409.128	-	-	-	35.409.128	35.409.128	-
522	20104207	SDN Penggilingan 08	50.312.021.802	4.584.377	4.591.691	-	-	-	4.591.691	4.591.691	-
523	20104275	SDN Cakung Timur 04	50.312.021.829	1.833.908	12.395.791	-	-	-	12.395.791	12.395.791	-
524	20105280	SDN Kamal 05 Pagi	30.012.043.531	3.479.173	12.740.311	-	-	-	12.740.311	12.740.311	-
525	20104549	SDN Johar Baru 14 Petang.	12.212.027.976	-	14.542	-	-	-	14.542	142	14.400
526	20104259	SDN Cakung Barat 01	50.312.021.217	8.758.757	27.520.264	-	-	-	27.520.264	27.520.264	-
527	20104277	SDN Cakung Timur 02	50.312.021.918	-	24.972.036	-	-	-	24.972.036	24.972.036	-
528	20101926	SDN Kapuk 12 PT	30.012.042.764	5.998.000	365.400	10.000	-	-	375.400	375.400	-
529	20101971	SDN Kedaung Kali Angke 14	30.012.042.926	10.030	5.922.045	10.000	-	-	5.932.045	5.932.045	-
530	20101917	SDN JEMBATAN LIMA 04 PT	30.012.043.019	-	4.979.434	-	5.000	-	4.974.434	4.974.434	-
531	20105143	SDN Angke 05 Pagi	30.012.043.272	25.708.423	23.635.059	-	-	-	23.635.059	23.635.059	-
532	20102518	SMPNegeri 226	40.112.000.268	10.874.655	100.449.740	10.000	-	-	100.459.740	100.459.740	-
533	20103511	SMP Negeri 149	50.012.274.048	6.346.917	40.949.738	-	-	-	40.949.738	40.949.738	-
534	20104368	SDN Cipayung 01	51.112.035.928	4.467.221	21.241.642	-	-	-	21.241.642	21.241.642	-
535	20103346	SDN Pulo Gebang 24	50.312.021.993	10.700.000	23.318	-	-	-	23.318	23.318	-
536	20108781	SDN Rawa Terate 03	50.312.021.799	2.121.705	18.181	3.370	-	-	21.551	21.551	-
537	20104274	SDN Cakung Timur 05	50.312.021.519	349.077	7.240.407	-	-	-	7.240.407	7.240.407	-
538	20103341	SDN Pulo Gebang 08	50.312.021.268	1.096.768	-	4.768	-	-	4.768	4.768	-
539	20104206	SDN Penggilingan 09	50.312.021.985	1.350.000	12.618.684	-	-	-	12.618.684	12.618.684	-
540	20104283	SDN Cakung Barat 15	50.312.021.063	38.428	368.633	-	-	-	368.633	368.633	-
541	20104162	SDN Jatinegara 10	50.312.021.152	36.517.560	14.449.529	-	-	-	14.449.529	14.449.529	-
542	20101526	SMP Negeri 225	30.012.043.710	137.964.169	246.304.192	7.500	-	-	246.311.692	246.311.692	-
543	20105452	SDN Pegadungan 08 Pt	30.012.043.892	7.500	2.730.468	7.500	-	-	2.737.968	2.737.968	-
544	20105571	SDN Tegal Alur 12 Pt	30.012.044.317	5.974.893	13.014.651	7.500	-	-	13.022.151	13.022.151	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
545	20105146	SDN Cengkareng Barat 02 PT	30.012.044.449	330.000	2.563.570	7.500	-	-	2.571.070	2.571.070	-
546	20103513	SMP Negeri 147	51.112.038.510	78.968.411	29.734.440	-	-	-	29.734.440	29.734.440	-
547	20103321	SDN Pulo Gebang 19	50.312.021.047	4.661.628	408.229	-	-	-	408.229	408.229	-
548	20103387	SDN Pulo Gebang 01	50.312.021.080	4.811.532	-	6.732	-	-	6.732	6.732	-
549	20102096	SDN Duri Utara 06 PT	30.012.043.761	5.274.500	9.409.055	-	-	-	9.409.055	9.409.055	-
550	20109164	SDN Pisangan Baru 05	50.012.272.975	4.800.000	5.397	-	-	-	5.397	-	5.397
551	20101436	SDN Rawa Buaya 09 Pagi	30.012.042.713	507.500	6.914.609	5.000	-	-	6.919.609	6.919.609	-
552	20105181	SDN Cengkareng Timur 18 Pagi	30.012.042.799	41.857.500	5.763.654	-	-	-	5.763.654	5.763.654	-
553	20102034	SDN Cengkareng Barat 06 PT	30.012.042.811	162.500	8.321.411	5.000	-	-	8.326.411	8.326.411	-
554	20105169	SDN Cengkareng Timur 05 Pagi	30.012.042.900	2.970.000	368	-	-	-	368	368	-
555	20102044	SDN Cengkareng Barat 11	30.012.044.244	7.095.206	8.065.469	-	-	-	8.065.469	8.065.469	-
556	20105570	SDN Tegal Alur 11 Pagi	30.012.044.287	7.880.245	640.000	5.000	-	-	645.000	645.000	-
557	20105175	SDN Cengkareng Timur 12 Pagi	30.012.044.490	7.368.023	9.056.798	-	-	-	9.056.798	9.056.798	-
558	20101589	SMA Negeri 65	41.112.025.691	260.126.680	418.245.228	5.000	-	-	418.250.228	418.250.228	-
559	20101527	SMP Negeri 224	30.012.043.736	154.826.530	126.413.755	-	-	-	126.413.755	126.413.755	-
560	20106344	SMPN 288	20.012.046.054	968.898	4.374.655	-	-	-	4.374.655	4.374.655	-
561	20104601	SDN Kebon Kosong 14 Pagi.	10.112.090.047	998	998	-	-	-	998	998	-
562	20105154	SDN Cengkareng Barat 10 Pagi	30.012.042.861	1.005.855	-	2.500	-	-	2.500	2.500	-
563	20105172	SDN Cengkareng Timur 09 Pagi	30.012.042.918	76.147.146	55.042.102	2.500	-	-	55.044.602	55.044.602	-
564	20108946	SDN Pegadungan 15 Pt	30.012.043.035	2.500	-	2.500	-	-	2.500	2.500	-
565	20105565	SDN Tegal Alur 07 Pagi	30.012.043.094	11.354.550	7.797.918	2.500	-	-	7.800.418	7.800.418	-
566	20105545	SDN Tanjung Duren Utara 02 Pagi.	30.012.043.353	16.303.374	47.771.607	2.500	-	-	47.774.107	47.774.107	-
567	20101549	SMP Negeri 204	30.012.043.540	86.147.828	227.947.198	2.500	-	-	227.949.698	227.949.698	-
568	20102100	SDN Duri Utara 02 PT	30.012.043.680	11.921.062	6.006.813	2.500	-	-	6.009.313	6.009.313	-
569	20102025	SDN Angke 06 Pagi	30.012.043.795	37.097.500	1.938.941	-	2.500	-	1.936.441	1.936.441	-
570	20105139	SDN Angke 01 Pagi	30.012.043.809	8.675.200	416.005	2.500	-	-	418.505	418.505	-
571	20105278	SDN Kamal 03 Pagi	30.012.044.139	110.000	-	2.500	-	-	2.500	2.500	-
572	20102028	SDN Angke 03 Pagi	30.012.044.228	8.440.481	3.897.464	2.500	-	-	3.899.964	3.899.964	-
573	20101921	SDN Jembatan Besi 04 PT	30.012.044.325	3.060.005	3.360.000	2.500	-	-	3.362.500	3.362.500	-
574	20101624	SMA Negeri 17	30.012.044.554	170.130.426	329.244.364	2.500	-	-	329.246.864	329.246.864	-
575	20101199	SDN Sukabumi Utara 04 Pagi.	41.112.024.849	12.637.631	480.000	-	2.500	-	477.500	477.500	-
576	20104470	SDN P. PANGGANG 03 PAGI	20.012.056.327	16.000	3.494.900	-	-	-	3.494.900	3.494.900	-
577	20108317	SDN Kayu Manis 04	50.012.272.835	-	733.860	-	-	-	733.860	733.860	-
578	20104841	SD Negeri Ancol 01	20.112.124.771	1.070	7.984.965	-	-	-	7.984.965	7.984.965	-
579	20107183	SMPN SATAP 01 P. PARI	20.112.126.315	1.000	6.516.997	-	-	-	6.516.997	6.516.997	-
580	20102575	SMA Negeri 55	40.412.010.411	584.072.750	1.118.893.573	-	-	-	1.118.893.573	1.118.893.573	-
581	20108602	SDN Malaka Jaya 07	51.212.014.520	8.904.933	640	-	-	-	640	640	-
582	20101547	SMP Negeri 278	30.012.043.779	127.294.868	109.102.382	-	-	-	109.102.382	109.102.382	-
583	20108568	SDN Duren Sawit 13	51.212.014.384	18.473.112	25.641.725	-	-	-	25.641.725	25.641.725	-
584	20101001	SDN Kali Baru 05 Pagi	20.112.126.099	-	24.863.530	-	-	-	24.863.530	24.863.530	-
585	20102521	SMP Negeri 211	40.012.203.411	-	3.071.961	-	-	-	3.071.961	3.071.961	-
586	20105549	SDN Tegal Alur 01 Pagi	30.012.044.279	392.537	11.187.179	-	-	-	11.187.179	11.187.179	-
587	20100255	SMP Negeri 273	11.812.047.863	26.849.059	36.845.779	-	-	-	36.845.779	36.845.779	-
588	20109183	SMP Negeri 49	51.112.038.587	4.846.497	52.772.919	-	-	-	52.772.919	52.772.919	-
589	20109165	SMKN 61	20.112.124.827	20.731.815	57.934.957	-	-	-	57.934.957	57.934.957	-
590	20108816	SDN Cijantung 05 Pagi	51.112.037.696	14.772.466	17.121.261	-	-	-	17.121.261	17.121.261	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
591	20109170	SDN Kayu Putih 01	50.112.014.427	110.002	-	90	-	-	90	90	-
592	20104471	SDN P. PARI 01 PAGI	20.112.125.939	1.988	2.560.671	-	-	-	2.560.671	2.560.671	-
593	20105941	SDN Jagakarsa 14	40.012.202.211	6.600.002	8.598.060	2	-	-	8.598.062	8.598.062	-
594	20100584	SDN Semper Barat 11 Pagi	20.112.125.050	20.683.556	2.240.003	-	-	-	2.240.003	2.240.003	-
595	20105832	SDN Cilandak Barat 06	40.012.201.982	400	2	-	-	-	2	2	-
596	20109257	SMP NEGERI 180	51.112.035.111	174.048.430	69.344.731	-	-	-	69.344.731	69.344.731	-
597	20100720	SMP Negeri 116	20.112.125.840	14.352.602	30.957.646	-	-	-	30.957.646	30.957.646	-
598	20101554	SMP Negeri 108	30.412.002.366	220.203.541	328.233.403	-	-	-	328.233.403	328.233.403	-
599	20102394	SD Negeri Pancoran 08 Pagi	40.012.200.587	1.450.682	83.767	-	-	-	83.767	83.767	-
600	20108573	SDN Duren Sawit 18	51.212.014.881	-	1	-	-	-	1	1	-
601	20104696	SDN Sumur Batu 15 Petang.	10.112.089.634	13.668.492	16.399.164	-	-	-	16.399.164	16.399.164	-
602	20104626	SDN Kemayoran 15	10.112.089.642	36.334.785	4.492.215	-	-	-	4.492.215	4.492.215	-
603	20104688	SDN Sumur Batu 03 Pagi.	10.112.089.651	552.536	46.239.036	-	-	-	46.239.036	46.239.036	-
604	20104603	SDN Kebon Kosong 16 Pagi.	10.112.089.669	7.632.355	12.986.355	-	-	-	12.986.355	12.986.355	-
605	20104615	SDN Kemayoran 02 Petang.	10.912.021.865	-	-	-	-	-	-	-	-
606	20104679	SDN Serdang 05 Pagi.	10.112.089.677	-	3.262.550	-	-	-	3.262.550	3.262.550	-
607	20104602	SDN Kebon Kosong 15 Pagi.	10.112.089.707	7.880.008	9.853.928	-	-	-	9.853.928	9.853.928	-
608	20104627	SDN Kemayoran 16 Petang.	10.112.089.723	-	3.638.510	-	-	-	3.638.510	3.638.510	-
609	20100554	SDN Kebon Kacang 02	11.812.047.715	-	-	-	-	-	-	-	-
610	20104622	SDN Kemayoran 11 Pagi.	10.112.089.731	3.987.000	7.043.167	-	-	-	7.043.167	7.043.167	-
611	20104595	SDN Kebon Kosong 05 Pagi.	10.112.089.740	39.927.500	1.265.531	-	-	-	1.265.531	1.265.531	-
612	20104676	SDN Serdang 03 Pagi.	10.112.089.758	4.126.266	25.685.893	-	-	-	25.685.893	25.685.893	-
613	20104605	SDN Kebon Kosong 18 Pagi.	10.112.089.774	39.858.758	6.668.553	-	-	-	6.668.553	6.668.553	-
614	20109355	SDN Harapan Mulia 04 Petang.	10.112.089.791	13.310.646	47.099.580	-	-	-	47.099.580	47.099.580	-
615	20106152	SDN Pondok Labu 09	40.012.201.931	-	-	-	-	-	-	-	-
616	20104591	SDN Kebon Kosong 01 Pagi.	10.112.089.812	10.435.556	15.359.482	-	-	-	15.359.482	15.359.482	-
617	20104689	SDN Sumur Batu 04 Pagi.	10.112.089.821	15.753.321	324.071	-	-	-	324.071	324.071	-
618	20104592	SDN Kebon Kosong 02 Pagi.	10.112.089.839	6.900.000	26.486.946	-	-	-	26.486.946	26.486.946	-
619	20104685	SDN Serdang 13 Pagi.	10.112.089.847	-	5.929.761	-	-	-	5.929.761	5.929.761	-
620	20102374	SD Negeri Menteng Atas 18 PT.	40.212.018.343	-	-	-	-	-	-	-	-
621	20102375	SD Negeri Menteng Atas 17 Pagi.	40.212.019.048	-	-	-	-	-	-	-	-
622	20104596	SDN Kebon Kosong 07 Pagi.	10.112.089.863	-	2.720.859	-	-	-	2.720.859	2.720.859	-
623	20106073	SD Negeri Pasar Manggis 02 PT	40.212.019.064	-	-	-	-	-	-	-	-
624	20104687	SDN Sumur Batu 01 Pagi.	10.112.089.871	5.514.344	4.497.051	-	-	-	4.497.051	4.497.051	-
625	20104625	SDN Kemayoran 14 Petang.	10.112.089.880	-	-	-	-	-	-	-	-
626	20104374	SDN Cawang 10 Pagi	51.112.036.797	-	-	-	-	-	-	-	-
627	20104606	SDN Kebon Kosong 19 Pagi.	10.112.089.898	67.666.561	281.949	-	-	-	281.949	281.949	-
628	20104376	SDN Cawang 08 Pagi	51.112.036.908	-	-	-	-	-	-	-	-
629	20104707	SDN Utan Panjang 01 Pagi.	10.112.089.901	-	3.557.639	-	-	-	3.557.639	3.557.639	-
630	20104149	SDN Dukuh 03 Pagi	51.112.037.050	-	-	-	-	-	-	-	-
631	20104709	SDN Utan Panjang 03 Pagi.	10.112.089.910	3.987.777	14.271.891	-	-	-	14.271.891	14.271.891	-
632	20104371	SDN Cawang 13 Pagi	51.112.037.149	-	-	-	-	-	-	-	-
633	20104675	SDN Serdang 01 Pagi.	10.112.089.936	4.014.500	10.443.899	-	-	-	10.443.899	10.443.899	-
634	20104694	SDN Sumur Batu 12 Pagi.	10.112.089.944	-	2.240.955	-	-	-	2.240.955	2.240.955	-
635	20104690	SDN Sumur Batu 06 Pagi.	10.112.089.952	-	31.969.488	-	-	-	31.969.488	31.969.488	-
636	20104597	SDN Kebon Kosong 09 Pagi.	10.112.089.987	1.161.403	3.977.240	-	-	-	3.977.240	3.977.240	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
637	20109388	SMPT Kec. Cilandak (SMPN 86)	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
638	20104537	SDN Harapan Mulia 02 Petang.	10.112.089.995	3.210.128	492.442	-	-	-	492.442	492.442	-
639	20106091	SD Negeri Pejaten Barat 12 Pagi	40.012.201.508	-	-	-	-	-	-	-	-
640	20104533	SDN Gunung Sahari Selatan 01 Pagi.	10.112.090.039	360.000	6.738.242	-	-	-	6.738.242	6.738.242	-
641	20104695	SDN Sumur Batu 14 Pagi.	10.112.090.063	1.769.072	17.185.940	-	-	-	17.185.940	17.185.940	-
642	20104489	SDN Cempaka Baru 11 Pagi.	10.112.090.080	-	8.320.236	-	-	-	8.320.236	8.320.236	-
643	20104501	SDN Cideng 07	10.112.090.098	42.193.056	547.882	-	-	-	547.882	547.882	-
644	20104515	SDN Duri Pulo 01	10.112.090.101	13.104.000	23.491.793	-	-	-	23.491.793	23.491.793	-
645	20104517	SDN Duri Pulo 03	10.112.090.110	-	9.920.106	-	-	-	9.920.106	9.920.106	-
646	20104518	SDN Duri Pulo 04	10.112.090.128	-	25.903.319	-	-	-	25.903.319	25.903.319	-
647	20104519	SDN Duri Pulo 05	10.112.090.136	-	480.048	-	-	-	480.048	480.048	-
648	20104524	SDN Duri Pulo 10	10.112.090.152	-	2.949.561	-	-	-	2.949.561	2.949.561	-
649	20102075	SDN Grogol 07 Pagi.	10.112.090.209	-	2.636.510	-	-	-	2.636.510	2.636.510	-
650	20101961	SDN Jelambar Baru 01 Pagi.	10.112.090.217	2.500	23.292.340	-	-	-	23.292.340	23.292.340	-
651	20101957	SDN Jelambar Baru 05 Pagi.	10.112.090.225	28.881.360	851.081	-	-	-	851.081	851.081	-
652	20105241	SDN Jelambar Baru 09 Pagi.	10.112.090.233	808.257	5.676.357	-	-	-	5.676.357	5.676.357	-
653	20105581	SDN Tomang 01 Pagi.	10.112.090.241	369.233	32.813.533	-	-	-	32.813.533	32.813.533	-
654	20105587	SDN Tomang 11 Pagi.	10.112.090.250	39.334	10.804.944	-	-	-	10.804.944	10.804.944	-
655	20100277	SMP Negeri 5	10.112.090.292	14.329.712	15.560.256	-	-	-	15.560.256	15.560.256	-
656	20100274	SMP Negeri 4	10.112.090.349	11.364.643	14.974.465	-	-	-	14.974.465	14.974.465	-
657	20100161	SMKN 2	10.112.090.390	87.336.005	299.490.249	-	-	-	299.490.249	299.490.249	-
658	20100163	SMKN 27	10.112.090.403	453.978.512	113.834.091	-	-	-	113.834.091	113.834.091	-
659	20100143	SMKN 1	10.112.090.411	31.434.625	417.649.763	-	-	-	417.649.763	417.649.763	-
660	20100162	SMK Negeri 21	10.112.090.501	82.266.335	46.813.559	-	-	-	46.813.559	46.813.559	-
661	20105213	SDN Grogol 05 Pagi.	10.112.090.551	-	16.872.980	-	-	-	16.872.980	16.872.980	-
662	20105526	SDN Tamansari 03 Pagi	10.212.000.542	31.274.000	2.537.356	-	-	-	2.537.356	2.537.356	-
663	20102001	SDN Keagungan 04 PT	10.212.000.577	9.996.000	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.760.000	-
664	20105530	SDN Tamansari 08 Pagi	10.212.000.585	-	6.999.329	-	-	-	6.999.329	6.999.329	-
665	20101361	SDN KRUKUT 03 Pagi	10.212.000.593	3.842.000	51.032.950	-	-	-	51.032.950	51.032.950	-
666	20105529	SDN Tamansari 07 Pagi	10.212.000.607	39.482.633	9.586.383	-	-	-	9.586.383	9.586.383	-
667	20100217	SMAN 10	10.212.000.691	72.169.231	42.430.946	-	-	-	42.430.946	42.430.946	-
668	20105525	SDN Tamansari 01 Pagi	10.212.000.712	50.000	-	-	-	-	-	-	-
669	20100231	SMP Negeri 17	10.412.003.246	63.548.021	34.964.755	-	-	-	34.964.755	34.964.755	-
670	20100280	SMP Negeri 64	10.412.003.254	30.068.800	105.071.852	-	-	-	105.071.852	105.071.852	-
671	20104577	SDN Karang Anyar 01	10.412.003.262	1.691.845	13.249.409	-	-	-	13.249.409	13.249.409	-
672	20100532	SDN Karang Anyar 08	10.412.003.271	2.525.419	7.672.773	-	-	-	7.672.773	7.672.773	-
673	20100464	SDN Pasar Baru 05	10.412.003.289	5.648.000	2.112.916	-	-	-	2.112.916	2.112.916	-
674	20100515	SDN Karang Anyar 04	10.412.003.297	1.127.579	35.289.967	-	-	-	35.289.967	35.289.967	-
675	20104535	SDN Gunung Sahari Utara 01	10.412.003.301	4.995.000	19.133.102	-	-	-	19.133.102	19.133.102	-
676	20100516	SDN Karang Anyar 06	10.412.003.335	786.000	9.440.562	-	-	-	9.440.562	9.440.562	-
677	20104579	SDN Karang Anyar 05	10.412.003.343	5.209.431	1.193.256	-	-	-	1.193.256	1.193.256	-
678	20104645	SDN Pasar Baru 07	10.412.003.351	4.185.030	3.480.095	-	-	-	3.480.095	3.480.095	-
679	20104644	SDN Pasar Baru 01	10.412.003.360	10.201.058	3.356.778	-	-	-	3.356.778	3.356.778	-
680	20104646	SDN Pasar Baru 11	10.412.003.378	-	640.018	-	-	-	640.018	640.018	-
681	20104639	SDN Mangga Dua Selatan 05	10.412.003.416	2.993.131	9.614	-	-	-	9.614	9.614	-
682	20104638	SDN Mangga Dua Selatan 01	10.412.003.424	9.254.000	4.483.638	-	-	-	4.483.638	4.483.638	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
683	20100514	SDN Karang Anyar 03	10.412.003.432	14.351.421	19.353.585	-	-	-	19.353.585	19.353.585	-
684	20100476	SDN Pasar Baru 03	10.412.003.441	36.092.200	8.163.261	-	-	-	8.163.261	8.163.261	-
685	20104584	SDN Kartini 01	10.412.003.459	2.743.970	32.918.040	-	-	-	32.918.040	32.918.040	-
686	20100513	SDN Karang Anyar 02	10.412.003.491	10.436.168	2.086.442	-	-	-	2.086.442	2.086.442	-
687	20100718	SMP Negeri 113	10.412.003.505	3.296.638	2.445.550	-	-	-	2.445.550	2.445.550	-
688	20100748	SMP Negeri 42	10.412.003.513	133.075.152	181.041.875	-	-	-	181.041.875	181.041.875	-
689	20100747	SMP Negeri 34	10.412.003.530	5.168.773	100.464.032	-	-	-	100.464.032	100.464.032	-
690	20100772	SMP Negeri 23	10.412.003.548	132.169.798	295.925.407	-	-	-	295.925.407	295.925.407	-
691	20107438	SMKN 55	10.412.003.637	3.212.144	163.760.179	-	-	-	163.760.179	163.760.179	-
692	20104643	SDN Merdeka Timur/ Gambir 01	10.812.169.058	15.664.871	840.520	-	-	-	840.520	840.520	-
693	20104529	SDN Gondangdia 01	10.812.169.066	1.906.499	4.166.741	-	-	-	4.166.741	4.166.741	-
694	20104532	SDN Gondangdia 05	10.812.169.074	600.008	16.529.991	-	-	-	16.529.991	16.529.991	-
695	20104610	SDN Kebon Sirih 01	10.812.169.082	27.672.686	1.140.326	-	-	-	1.140.326	1.140.326	-
696	20100278	SMP Negeri 59	10.812.169.104	15.595.606	90.249.431	-	-	-	90.249.431	90.249.431	-
697	20100261	SMP Negeri 93	10.812.169.112	89.799.303	24.862.415	-	-	-	24.862.415	24.862.415	-
698	20100251	SMP Negeri 1	10.812.169.147	294.216.764	64.347.902	-	-	-	64.347.902	64.347.902	-
699	20100232	SMP Negeri 18	10.812.169.155	90.941.868	143.666.036	-	-	-	143.666.036	143.666.036	-
700	20100271	SMP Negeri 280	10.812.169.163	600.264	38.770.851	-	-	-	38.770.851	38.770.851	-
701	20100469	SDN Kramat 08 Pagi.	10.912.019.453	884.464	268.153	-	-	-	268.153	268.153	-
702	20104614	SDN Kemayoran 01 Pagi.	10.912.021.822	4.126.000	11.253.560	-	-	-	11.253.560	11.253.560	-
703	20104618	SDN Kemayoran 07 Pagi.	10.912.021.831	12.888.584	3.353.633	-	-	-	3.353.633	3.353.633	-
704	20104674	SDN S e n e n 03 Pagi.	10.912.021.881	20.373.981	28.062.231	-	-	-	28.062.231	28.062.231	-
705	20100545	SDN Kramat 01	10.912.021.938	67.564.332	39.886.393	-	-	-	39.886.393	39.886.393	-
706	20100467	SDN Kramat 06 Pagi.	10.912.021.946	2.080.000	6.950.335	-	-	-	6.950.335	6.950.335	-
707	20100370	SDN Bungur 01 Pagi.	10.912.021.954	30.840.303	48.855.985	-	-	-	48.855.985	48.855.985	-
708	20104637	SDN Kwitang 02 Petang.	10.912.021.962	19.340.944	7.846.739	-	-	-	7.846.739	7.846.739	-
709	20100468	SDN Kramat 07 Petang.	10.912.021.997	1.600.042	55.973.548	-	-	-	55.973.548	55.973.548	-
710	20104499	SDN Cideng 04	11.012.080.521	11.359.500	5.422.608	-	-	-	5.422.608	5.422.608	-
711	20104504	SDN Cideng 10	11.012.080.539	16.211.100	23.448.395	-	-	-	23.448.395	23.448.395	-
712	20104506	SDN Cideng 13	11.012.080.547	16.288.555	776.956	-	-	-	776.956	776.956	-
713	20104498	SDN Cideng 02	11.012.080.555	42.692.000	5.752	-	-	-	5.752	5.752	-
714	20104503	SDN Cideng 09	11.012.080.563	36.916.800	1.902.103	-	-	-	1.902.103	1.902.103	-
715	20104516	SDN Duri Pulo 02	11.012.080.571	-	-	-	-	-	-	-	-
716	20104667	SDN Petojo Utara 05	11.012.080.580	5.013.200	4.059.341	-	-	-	4.059.341	4.059.341	-
717	20104668	SDN Petojo Utara 09	11.012.080.598	15.705.032	11.245.297	-	-	-	11.245.297	11.245.297	-
718	20104590	SDN Kebon Kelapa 02	11.012.080.652	12.040.960	13.054.137	-	-	-	13.054.137	13.054.137	-
719	20104659	SDN Petojo Selatan 01	11.012.080.661	42.667	701.525	-	-	-	701.525	701.525	-
720	20104661	SDN Petojo Selatan 05	11.012.080.679	5.115.568	1.852.128	-	-	-	1.852.128	1.852.128	-
721	20104662	SDN Petojo Selatan 06	11.012.080.687	-	11.637.052	-	-	-	11.637.052	11.637.052	-
722	20104664	SDN Petojo Utara 03	11.012.080.695	49.748.761	25.492	-	-	-	25.492	25.492	-
723	20100267	SMP Negeri 72	11.112.063.705	38.850.918	64.172.225	-	-	-	64.172.225	64.172.225	-
724	20106401	SMP Negeri 39	11.112.063.713	153.556.810	99.696.100	-	-	-	99.696.100	99.696.100	-
725	20100279	SMP Negeri 60	11.112.063.721	116.772.018	122.548.556	-	-	-	122.548.556	122.548.556	-
726	20104521	SDN Duri Pulo 07	11.112.066.607	22.917.215	14.487.459	-	-	-	14.487.459	14.487.459	-
727	20104663	SDN Petojo Utara 01	11.112.066.631	-	23.258.765	-	-	-	23.258.765	23.258.765	-
728	20104669	SDN Petojo Utara 13	11.112.066.674	1.901.640	7.411.386	-	-	-	7.411.386	7.411.386	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
729	20100473	SDN Mangga Dua Selatan 03	11.112.066.682	4.248.326	8.987.089	-	-	-	8.987.089	8.987.089	-
730	20104530	SDN Gondangdia 03	11.112.066.755	5.743.215	12.253.887	-	-	-	12.253.887	12.253.887	-
731	20104571	SDN Kampung Bali 01	11.112.066.763	23.871.923	1.393.371	-	-	-	1.393.371	1.393.371	-
732	20100156	SMK Negeri 54	11.112.080.103	148.496.781	300.192.498	-	-	-	300.192.498	300.192.498	-
733	20100160	SMKN 19	11.312.109.094	44.770.653	196.097.535	-	-	-	196.097.535	196.097.535	-
734	20104658	SDN Petamburan 07	11.312.109.116	83.270.014	14.067.962	-	-	-	14.067.962	14.067.962	-
735	20100390	SDN Bendungan Hilir 01	11.312.109.124	146.426.059	22.142	-	-	-	22.142	22.142	-
736	20100392	SDN Bendungan Hilir 05	11.312.109.132	-	6.128.073	-	-	-	6.128.073	6.128.073	-
737	20100379	SDN Bendungan Hilir 09	11.312.109.141	18.980.124	10.843.009	-	-	-	10.843.009	10.843.009	-
738	20104580	SDN Karet Tengsin 01	11.312.109.175	22.080.907	3.355.750	-	-	-	3.355.750	3.355.750	-
739	20104582	SDN Karet Tengsin 13	11.312.109.183	63.149.456	4.337.917	-	-	-	4.337.917	4.337.917	-
740	20100550	SDN Karet Tengsin 15	11.312.109.191	142.611.487	9.793	-	-	-	9.793	9.793	-
741	20104607	SDN Kebon Melati 01	11.312.109.221	59.266.020	2.946.286	-	-	-	2.946.286	2.946.286	-
742	20104608	SDN Kebon Melati 02	11.312.109.230	-	1	-	-	-	1	1	-
743	20101980	SDN Kemanggis 01 Pagi.	11.312.109.272	8.865.652	27.822.172	-	-	-	27.822.172	27.822.172	-
744	20105353	SDN Kemanggis 03 Pagi.	11.312.109.281	21.049.006	6.480.671	-	-	-	6.480.671	6.480.671	-
745	20105354	SDN Kemanggis 05 Pagi.	11.312.109.299	4.324.885	3.215.835	-	-	-	3.215.835	3.215.835	-
746	20101410	SDN Kemanggis 06 Pagi.	11.312.109.302	185.726	2.801.086	-	-	-	2.801.086	2.801.086	-
747	20101395	SDN Kemanggis 08 Pagi.	11.312.109.311	972	3.735.832	-	-	-	3.735.832	3.735.832	-
748	20105361	SDN Kemanggis 14 Pagi.	11.312.109.329	5.205.198	24.097.148	-	-	-	24.097.148	24.097.148	-
749	20105363	SDN Kemanggis 17 Pagi.	11.312.109.337	6.057.350	15.967.800	-	-	-	15.967.800	15.967.800	-
750	20101389	SDN Kemanggis 18 PT.	11.312.109.345	9.657.339	6.636.549	-	-	-	6.636.549	6.636.549	-
751	20105425	SDN Palmerah 03 Pagi.	11.312.109.353	3.769.330	33.724.180	-	-	-	33.724.180	33.724.180	-
752	20105427	SDN Palmerah 05 Pagi.	11.312.109.361	3.817.697	2.673.847	-	-	-	2.673.847	2.673.847	-
753	20105428	SDN Palmerah 07 Pagi.	11.312.109.370	2.112.918	-	-	-	-	-	-	-
754	20101452	SDN Palmerah 13 Pagi.	11.312.109.388	-	1.159.395	-	-	-	1.159.395	1.159.395	-
755	20105434	SDN Palmerah 15 Pagi.	11.312.109.396	431.362	1.920.962	-	-	-	1.920.962	1.920.962	-
756	20105435	SDN Palmerah 17 Pagi.	11.312.109.400	628.204	9.353.215	-	-	-	9.353.215	9.353.215	-
757	20105436	SDN Palmerah 19 Pagi.	11.312.109.418	-	14.835.410	-	-	-	14.835.410	14.835.410	-
758	20101463	SDN Palmerah 20 Pagi.	11.312.109.426	13.100	1.342.600	-	-	-	1.342.600	1.342.600	-
759	20101462	SDN Palmerah 21 Pagi.	11.312.109.434	10.234.560	1.295.660	-	-	-	1.295.660	1.295.660	-
760	20105501	SDN Slipi 11 Pagi.	11.312.109.442	3.680.000	3.052.200	-	-	-	3.052.200	3.052.200	-
761	20105216	SDN Jati Pulo 01 Pagi.	11.312.109.451	-	8.952.800	-	-	-	8.952.800	8.952.800	-
762	20101946	SDN Jati Pulo 04 PT.	11.312.109.469	1.123.041	141	-	-	-	141	141	-
763	20101943	SDN Jati Pulo 07 Pagi.	11.312.109.477	162.181	199.006	-	-	-	199.006	199.006	-
764	20101394	SDN Kemanggis 10 Pagi.	11.312.109.485	48.690.504	7.392.814	-	-	-	7.392.814	7.392.814	-
765	20101393	SDN Kemanggis 12	11.312.109.493	14.954.300	-	-	-	-	-	-	-
766	20109268	SDN Palmerah 09 Pagi.	11.312.109.507	336.000	102.253	-	-	-	102.253	102.253	-
767	20101461	SDN Palmerah 22 Pagi.	11.312.109.515	215.263	18.879.763	-	-	-	18.879.763	18.879.763	-
768	20105442	SDN Palmerah 25 Pagi.	11.312.109.531	45.055.378	88.490.478	-	-	-	88.490.478	88.490.478	-
769	20105499	SDN Slipi 07 Pagi.	11.312.109.540	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	-
770	20101541	SMP Negeri 69	11.312.109.604	231.022.696	115.822.586	-	-	-	115.822.586	115.822.586	-
771	20101522	SMP Negeri 89	11.312.109.612	48.118.272	684.952	-	-	-	684.952	684.952	-
772	20102523	SMP Negeri 185	11.312.109.680	8.034.382	4.194.698	-	-	-	4.194.698	4.194.698	-
773	20107034	SMP Negeri 16	11.312.109.698	43.404.000	127.980.275	-	-	-	127.980.275	127.980.275	-
774	20101543	SMP Negeri 61	11.312.109.744	215.291.951	378.605.411	-	-	-	378.605.411	378.605.411	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
775	20122014	SMPT Kec. Palmerah (smpn 61)	11.312.110.637	-	31.800.000	-	-	-	31.800.000	31.800.000	-
776	20100275	SMP Negeri 40	11.312.109.761	4.403.118	1.000.633	-	-	-	1.000.633	1.000.633	-
777	20100272	SMP Negeri 38	11.312.109.795	-	39.497.870	-	-	-	39.497.870	39.497.870	-
778	20100200	SMAN 7	11.312.109.817	468.522.241	225.173.287	-	-	-	225.173.287	225.173.287	-
779	20100212	SMAN 35	11.312.109.825	161.209.078	113.787.453	-	-	-	113.787.453	113.787.453	-
780	20102216	SMA Negeri 3	11.312.109.833	188.371.200	372.797.401	-	-	-	372.797.401	372.797.401	-
781	20101625	SMA Negeri 16	11.312.109.850	228.108.177	526.422.127	-	-	-	526.422.127	526.422.127	-
782	20105424	SDN Palmerah 01 Pagi.	11.312.109.884	612.893	3.520.000	-	-	-	3.520.000	3.520.000	-
783	20101553	SMP Negeri 111	11.312.109.892	39.316.769	161.064.594	-	-	-	161.064.594	161.064.594	-
784	20101502	SMK Negeri 17	11.312.110.017	33.928.900	133.631.670	-	-	-	133.631.670	133.631.670	-
785	20101460	SDN Palmerah 23 Pagi.	11.312.110.025	106.848	4.320.053	-	-	-	4.320.053	4.320.053	-
786	20104655	SDN Petamburan 01	11.812.047.634	53.448.000	8.587.522	-	-	-	8.587.522	8.587.522	-
787	20104657	SDN Petamburan 05	11.812.047.651	172.087.871	1.182.594	-	-	-	1.182.594	1.182.594	-
788	20104586	SDN Kebon Kacang 01	11.812.047.707	105.659.822	12	-	-	-	12	12	-
789	20104609	SDN Kebon Melati 03	11.812.047.731	86.734.157	1.992.035	-	-	-	1.992.035	1.992.035	-
790	20105382	SDN Kota Bambu 01 Pagi.	11.812.047.774	105.236	1.710.171	-	-	-	1.710.171	1.710.171	-
791	20105388	SDN Kota Bambu 07 Pagi.	11.812.047.782	3.023.900	40	-	-	-	40	40	-
792	20101428	SDN Slipi 15 Pagi.	11.812.047.791	43.503.219	35.168.460	-	-	-	35.168.460	35.168.460	-
793	20105505	SDN Slipi 18 Pagi.	11.812.047.804	-	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.760.000	-
794	20105384	SDN Kota Bambu 03 Pagi.	11.812.047.812	-	8.006.110	-	-	-	8.006.110	8.006.110	-
795	20105385	SDN Kota Bambu 04	11.812.047.821	1.134.003	8.278.248	-	-	-	8.278.248	8.278.248	-
796	20105495	SDN Slipi 01	11.812.047.839	834	4	-	-	-	4	4	-
797	20101550	SMP Negeri 130	11.812.047.855	73.250.900	34.851.014	-	-	-	34.851.014	34.851.014	-
798	20100269	SMP Negeri 70	11.812.047.952	-	-	-	-	-	-	-	-
799	20101621	SMA Negeri 23	11.812.048.037	1.215.467	15.755.962	-	-	-	15.755.962	15.755.962	-
800	20100259	SMP Negeri 79	12.212.027.518	107.054.353	341.127.696	-	-	-	341.127.696	341.127.696	-
801	20100240	SMP Negeri 119	12.212.027.526	86.171.117	106.367.916	-	-	-	106.367.916	106.367.916	-
802	20100522	SDN Cempaka Putih Barat 17 Pagi.	12.212.027.623	24.177.816	16.314.658	-	-	-	16.314.658	16.314.658	-
803	20100523	SDN Cempaka Putih Barat 19 Pagi.	12.212.027.631	4.628.242	1.903.483	-	-	-	1.903.483	1.903.483	-
804	20100378	SDN Cempaka Putih Barat 07 Pagi.	12.212.027.640	273.220	6.790.893	-	-	-	6.790.893	6.790.893	-
805	20100374	SDN Cempaka Putih Barat 01 Pagi	12.212.027.658	9.213.000	42.408.205	-	-	-	42.408.205	42.408.205	-
806	20104670	SDN Rawasari 01 Pagi.	12.212.027.674	140.000	129.632	-	-	-	129.632	129.632	-
807	20104671	SDN Rawasari 02 Pagi.	12.212.027.682	35.600.000	6.740.021	-	-	-	6.740.021	6.740.021	-
808	20100521	SDN Cempaka Putih Barat 15 Pagi.	12.212.027.691	50.000	122.338	-	-	-	122.338	122.338	-
809	20104672	SDN Rawasari 05 Pagi.	12.212.027.704	-	18.818.036	-	-	-	18.818.036	18.818.036	-
810	20100530	SDN Cempaka Putih Timur 03 Pagi.	12.212.027.712	167.551	10.181.804	-	-	-	10.181.804	10.181.804	-
811	20100375	SDN Cempaka Putih Barat 03 Pagi	12.212.027.739	-	9.440.000	-	-	-	9.440.000	9.440.000	-
812	20104558	SDN Johar Baru 25 Pagi.	12.212.027.836	56.458.839	22.983.358	-	-	-	22.983.358	22.983.358	-
813	20104705	SDN Tanah Tinggi 10 Petang.	12.212.027.844	-	-	-	-	-	-	-	-
814	20104706	SDN Tanah Tinggi 11 Pagi.	12.212.027.852	9.138.733	4.151.568	-	-	-	4.151.568	4.151.568	-
815	20104544	SDN Johar Baru 07 Pagi.	12.212.027.861	6.990.240	1.277.072	-	-	-	1.277.072	1.277.072	-
816	20104546	SDN Johar Baru 10 Pagi.	12.212.027.887	5.264.551	12.452.618	-	-	-	12.452.618	12.452.618	-
817	20104704	SDN Tanah Tinggi 09 Pagi.	12.212.027.917	-	2.686.995	-	-	-	2.686.995	2.686.995	-
818	20104575	SDN Kampung Rawa 01 Pagi.	12.212.027.925	10.357.415	4.306.631	-	-	-	4.306.631	4.306.631	-
819	20104541	SDN Johar Baru 03 Pagi.	12.212.027.933	39.268.950	-	-	-	-	-	-	-
820	20104699	SDN Tanah Tinggi 03 Pagi.	12.212.027.941	254.701	895.432	-	-	-	895.432	895.432	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
821	20104550	SDN Johar Baru 15 Pagi.	12.212.027.950	-	3.163.774	-	-	-	3.163.774	3.163.774	-
822	20104525	SDN Galur 01 Pagi.	12.212.027.968	17.109.513	413	-	-	-	413	413	-
823	20104556	SDN Johar Baru 21 Pagi.	12.212.027.992	17.976.111	339.079	-	-	-	339.079	339.079	-
824	20104540	SDN Johar Baru 01 Pagi.	12.212.028.000	45.190.238	15.117.720	-	-	-	15.117.720	15.117.720	-
825	20104545	SDN Johar Baru 09 Pagi.	12.212.028.018	31.617.821	11.674.453	-	-	-	11.674.453	11.674.453	-
826	20104527	SDN Galur 03 Pagi.	12.212.028.026	44.773.743	-	-	-	-	-	-	-
827	20104702	SDN Tanah Tinggi 06 Petang.	12.212.028.034	12.439.450	7.420.621	-	-	-	7.420.621	7.420.621	-
828	20104548	SDN Johar Baru 13 Pagi.	12.212.028.051	38.908.051	4.970.829	-	-	-	4.970.829	4.970.829	-
829	20104542	SDN Johar Baru 04 Petang.	12.212.028.069	49.458.835	5.459.115	-	-	-	5.459.115	5.459.115	-
830	20104553	SDN Johar Baru 18 Petang.	12.212.028.077	31.693.209	-	-	-	-	-	-	-
831	20104557	SDN Johar Baru 23 Pagi.	12.212.028.085	39.685.841	19.302.349	-	-	-	19.302.349	19.302.349	-
832	20104552	SDN Johar Baru 17 Pagi.	12.212.028.093	-	4.512	-	-	-	4.512	4.512	-
833	20104698	SDN Tanah Tinggi 02 Petang.	12.212.028.115	21.264.000	1.407.808	-	-	-	1.407.808	1.407.808	-
834	20104576	SDN Kampung Rawa 02 Petang.	12.212.028.131	17.564.394	15.177.404	-	-	-	15.177.404	15.177.404	-
835	20104485	SDN Cempaka Baru 05 Pagi.	12.212.028.182	22.175.740	45.384.110	-	-	-	45.384.110	45.384.110	-
836	20104624	SDN Kemayoran 13 Pagi.	12.212.028.191	820.299	5.698.988	-	-	-	5.698.988	5.698.988	-
837	20104538	SDN Harapan Mulia 03 Pagi.	12.212.028.221	1.699.800	144.903.093	-	-	-	144.903.093	144.903.093	-
838	20104487	SDN Cempaka Baru 07 Pagi.	12.212.028.239	24.692.427	649.865	-	-	-	649.865	649.865	-
839	20104620	SDN Kemayoran 09 Pagi.	12.212.028.255	1.002	182.510	-	-	-	182.510	182.510	-
840	20100372	SDN Bungur 03 Pagi.	12.212.028.387	19.318.450	37.971.628	-	-	-	37.971.628	37.971.628	-
841	20104635	SDN Kramat 09 Petang.	12.212.028.395	20.354.340	8.639.500	-	-	-	8.639.500	8.639.500	-
842	20100270	SMP Negeri 28	12.212.028.417	27.318.973	80.107.825	-	-	-	80.107.825	80.107.825	-
843	20112499	SMPT Kec. Johar Baru (SMPN 28)	12.212.030.675	-	7.398.960	-	-	-	7.398.960	7.398.960	-
844	20100236	SMP Negeri 2	12.212.028.425	55.786.151	1.319.390	-	-	-	1.319.390	1.319.390	-
845	20100258	SMP Negeri 78	12.212.028.441	108.909.525	104.505.929	-	-	-	104.505.929	104.505.929	-
846	20100252	SMP Negeri 10	12.212.028.450	75.524.318	171.964.259	-	-	-	171.964.259	171.964.259	-
847	20100235	SMP Negeri 183	12.212.028.468	38.862	10.856.672	-	-	-	10.856.672	10.856.672	-
848	20100276	SMP Negeri 47	12.212.028.492	177.602	6.240.533	-	-	-	6.240.533	6.240.533	-
849	20100257	SMP Negeri 77	12.212.028.506	55.492.957	30.434.672	-	-	-	30.434.672	30.434.672	-
850	20100256	SMP Negeri 76	12.212.028.514	110.337.700	16.461.907	-	-	-	16.461.907	16.461.907	-
851	20100230	SMP Negeri 156	12.212.028.522	6.332.383	69.528.418	-	-	-	69.528.418	69.528.418	-
852	20106410	SMP Negeri 71	12.212.028.531	13.692.877	45.066.890	-	-	-	45.066.890	45.066.890	-
853	20100228	SMP Negeri 137	12.212.028.565	62.375.955	76.952.644	-	-	-	76.952.644	76.952.644	-
854	20100253	SMP Negeri 269	12.212.028.751	16.393	47.553.915	-	-	-	47.553.915	47.553.915	-
855	20103574	SMP Negeri 262	12.212.028.760	56.016.536	106.552.016	-	-	-	106.552.016	106.552.016	-
856	20108785	SMPT Kec. Cakung 3 (SMPN 262)	12.212.030.659	-	27.182.747	-	-	-	27.182.747	27.182.747	-
857	20103627	SMP Negeri 234	12.212.028.778	224.359.740	72.847.843	-	-	-	72.847.843	72.847.843	-
858	20109465	SMPT Kec. Cakung 2 (SMPN 234)	12.212.030.616	-	3.005.898	-	-	-	3.005.898	3.005.898	-
859	20103515	SMP Negeri 144	12.212.028.786	1.074.497	53.550.369	-	-	-	53.550.369	53.550.369	-
860	20103514	SMP Negeri 146	12.212.028.808	29.370.924	744.456	-	-	-	744.456	744.456	-
861	20100201	SMA Negeri 77	12.212.028.816	307.955.823	131.071.487	-	-	-	131.071.487	131.071.487	-
862	20100158	SMK Negeri 14	12.212.028.972	346.635.045	430.271.453	-	-	-	430.271.453	430.271.453	-
863	20100377	SDN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.	12.212.027.721	-	18.732.740	-	-	-	18.732.740	18.732.740	-
864	20103299	SMA Negeri 89	12.312.003.161	162.138.254	543.351.548	-	-	-	543.351.548	543.351.548	-
865	20103293	SMA Negeri 102	12.312.003.218	14.292.665	300.677.056	-	-	-	300.677.056	300.677.056	-
866	20103609	SMP Negeri 193	12.312.004.966	32.077.424	5.401.095	-	-	-	5.401.095	5.401.095	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
867	20103287	SMA Negeri 11	12.312.005.113	274.708.542	570.782.079	-	-	-	570.782.079	570.782.079	-
868	20104958	SDN Tugu Utara 07 Pagi	20.012.055.711	32.872.723	65.103.651	-	-	-	65.103.651	65.103.651	-
869	20107434	SMK Negeri 33	20.012.043.284	132.200.000	89.958.174	-	-	-	89.958.174	89.958.174	-
870	20100779	SMA Negeri 75	20.012.043.314	66.101.611	52.293.040	-	-	-	52.293.040	52.293.040	-
871	20100795	SMA Negeri 73	20.012.043.357	23.632.745	41.219.230	-	-	-	41.219.230	41.219.230	-
872	20100804	SMA Negeri 114	20.012.043.381	130.664.796	273.061.021	-	-	-	273.061.021	273.061.021	-
873	69800097	SMP Negeri 289	20.012.052.011	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-
874	20100702	SDN Rawa Badak Utara 11 Pagi	20.012.055.487	4.114.000	20.483.990	-	-	-	20.483.990	20.483.990	-
875	20104946	SD Negeri Tanjung Priok 01	20.012.055.495	3.661.111	107.489.177	-	-	-	107.489.177	107.489.177	-
876	20104863	SDN Kelapa Gading TIM 01 Pagi	20.012.055.509	30.558.715	6.923.213	-	-	-	6.923.213	6.923.213	-
877	20100699	SDN Rawa Badak Utara 07 Pagi	20.012.055.517	4.670.966	3.580.518	-	-	-	3.580.518	3.580.518	-
878	20104903	SDN Rawa Badak Utara 09 Petang	20.012.055.525	28.215.000	11.068.372	-	-	-	11.068.372	11.068.372	-
879	20104865	SDN Kelapa Gading TIM 03 Pagi	20.012.055.533	-	26.490.250	-	-	-	26.490.250	26.490.250	-
880	20101013	SDN Cilincing 06 Pagi	20.012.055.550	-	2.118.393	-	-	-	2.118.393	2.118.393	-
881	20104852	SD Negeri Kebon Bawang 01	20.012.055.568	2.700.000	19.200.032	-	-	-	19.200.032	19.200.032	-
882	20100693	SDN Rawa Badak Utara 01 Pagi	20.012.055.584	17.105.293	9.562.657	-	-	-	9.562.657	9.562.657	-
883	20104861	SDN Kelapa Gading BAR 01 Pagi	20.012.055.592	57.406.172	11.001.842	-	-	-	11.001.842	11.001.842	-
884	20100647	SDN Rawa Badak Selatan 03 Pagi	20.012.055.606	410	16.590.726	-	-	-	16.590.726	16.590.726	-
885	20104844	SDN Cilincing 01 Pagi	20.012.055.622	-	41.717.605	-	-	-	41.717.605	41.717.605	-
886	20104867	SDN Kelapa Gading TIM 05 Petang	20.012.055.631	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	-
887	20101026	SDN Cilincing 03 Pagi	20.012.055.649	-	-	-	-	-	-	-	-
888	20104872	SDN Marunda 02 Pagi	20.012.055.657	36.239.277	191.427.962	-	-	-	191.427.962	191.427.962	-
889	20104915	SDN Semper Timur 07 Pagi	20.012.055.665	-	-	-	-	-	-	-	-
890	20100619	SDN Tugu Utara 15 Pagi	20.012.055.690	-	9.968.694	-	-	-	9.968.694	9.968.694	-
891	20100575	SDN Tugu Utara 09 Pagi	20.012.055.720	65.175.510	72.028.923	-	-	-	72.028.923	72.028.923	-
892	20100596	SDN Sukapura 04 Pagi	20.012.055.738	766.300	10.644	-	-	-	10.644	10.644	-
893	20104909	SDN Semper Barat 10 Petang	20.012.055.754	-	48.738.311	-	-	-	48.738.311	48.738.311	-
894	20100622	SDN Tugu Utara 19 Pagi	20.012.055.762	1.106.577	31.179.290	-	-	-	31.179.290	31.179.290	-
895	20101062	SDN Lagoa 11 Pagi	20.012.055.789	-	4.994.093	-	-	-	4.994.093	4.994.093	-
896	20100625	SDN Tugu Utara 22 Pagi	20.012.055.801	24.174.372	28.130.860	-	-	-	28.130.860	28.130.860	-
897	20104963	SDN Tugu Utara 17 Pagi	20.012.055.827	-	6.312.652	-	-	-	6.312.652	6.312.652	-
898	20100691	SDN Rawa Badak Selatan 11 Pagi	20.012.055.843	-	57.344.911	-	-	-	57.344.911	57.344.911	-
899	20100582	SDN Semper Barat 09 Pagi	20.012.055.851	-	680.860	-	-	-	680.860	680.860	-
900	20104952	SDN Tugu Utara 01 Pagi	20.012.055.860	4.355.679	15.166.151	-	-	-	15.166.151	15.166.151	-
901	20100689	SDN Rawa Badak Utara 15 Pagi	20.012.055.908	-	161.562	-	-	-	161.562	161.562	-
902	20100697	SDN Rawa Badak Utara 05 Pagi	20.012.055.916	-	42.592.659	-	-	-	42.592.659	42.592.659	-
903	20100648	SDN Rawa Badak Selatan 05 Pagi	20.012.055.924	7.000.000	33.199.301	-	-	-	33.199.301	33.199.301	-
904	20100695	SDN Rawa Badak Utara 03 Petang	20.012.055.941	-	-	-	-	-	-	-	-
905	20104884	SDN Pegangsaan Dua 05 Pagi	20.012.055.959	32.296.864	3.042.488	-	-	-	3.042.488	3.042.488	-
906	20104886	SDN Pegangsaan Dua 07 Pagi	20.012.055.967	5.760.000	16.055.025	-	-	-	16.055.025	16.055.025	-
907	20100679	SDN Rorotan 02 Pagi	20.012.055.975	-	3.360.000	-	-	-	3.360.000	3.360.000	-
908	20101005	SDN Kali Baru 09 Pagi	20.012.055.983	18.768.052	34.878.990	-	-	-	34.878.990	34.878.990	-
909	20104847	SDN Cilincing 08 Pagi	20.012.055.991	-	-	-	-	-	-	-	-
910	20104907	SDN Rorotan 03 Pagi	20.012.056.009	8.986.622	15.665.096	-	-	-	15.665.096	15.665.096	-
911	20104913	SDN Semper Timur 02 Petang	20.012.056.025	4.600.000	12.398.456	-	-	-	12.398.456	12.398.456	-
912	20100994	SDN Cilincing 11 Petang	20.012.056.050	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
913	20100681	SDN Rorotan 05 Pagi	20.012.056.068	49.883.701	270.887	-	-	-	270.887	270.887	-
914	20104848	SDN Kali Baru 01 Pagi	20.012.056.076	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
915	20101010	SDN Cilincing 09 Pagi	20.012.056.084	-	-	-	-	-	-	-	-
916	20100677	SDN Rorotan 01 Pagi	20.012.056.092	28.243.725	17.087.960	-	-	-	17.087.960	17.087.960	-
917	20104912	SDN Semper Timur 01 Pagi	20.012.056.106	3.377.772	4.154.022	-	-	-	4.154.022	4.154.022	-
918	20100590	SDN Semper Timur 04 Petang	20.012.056.114	-	3.264.488	-	-	-	3.264.488	3.264.488	-
919	20104846	SDN Cilincing 07 Pagi	20.012.056.122	212.761	-	-	-	-	-	-	-
920	20100997	SDN Kali Baru 03 Pagi	20.012.056.203	328.000	11.836.000	-	-	-	11.836.000	11.836.000	-
921	20104871	SDN Marunda 01 Pagi	20.012.056.220	-	430	-	-	-	430	430	-
922	20100598	SDN Tugu Utara 13 Pagi	20.012.056.238	4.613.440	14.762.734	-	-	-	14.762.734	14.762.734	-
923	20104959	SDN Tugu Utara 08 Petang	20.012.056.246	16.693.960	32.043.049	-	-	-	32.043.049	32.043.049	-
924	20100704	SDN Rawa Badak Utara 13 Pagi	20.012.056.271	7.287.208	87.213.188	-	-	-	87.213.188	87.213.188	-
925	20100812	SMA Negeri 45	20.012.056.289	440.925.303	422.815.699	-	-	-	422.815.699	422.815.699	-
926	20104882	SDN Pegangsaan Dua 03 Pagi	20.012.056.297	-	6.737.258	-	-	-	6.737.258	6.737.258	-
927	20104464	SDN P. HARAPAN 01 PAGI	20.012.056.301	10.008.218	856.783	-	-	-	856.783	856.783	-
928	20104475	SDN P. TIDUNG 03 PAGI	20.012.056.319	-	4.198.985	-	-	-	4.198.985	4.198.985	-
929	20104469	SDN P. PANGGANG 02 PAGI	20.012.056.343	3.964.000	10.463.450	-	-	-	10.463.450	10.463.450	-
930	20100782	SMA Negeri 92	20.012.056.670	265.074.706	258.600.706	-	-	-	258.600.706	258.600.706	-
931	20109047	SDN Rorotan 07 Pagi	20.012.056.921	227.358	5.567.600	-	-	-	5.567.600	5.567.600	-
932	20104468	SDN P. PANGGANG 01 PAGI	20.012.057.013	33.000	4.965.550	-	-	-	4.965.550	4.965.550	-
933	20100746	SMP Negeri 30	20.012.057.056	21.928.824	15.723.637	-	-	-	15.723.637	15.723.637	-
934	20100744	SMP Negeri 279	20.012.057.064	-	44.399.229	-	-	-	44.399.229	44.399.229	-
935	20100763	SMP Negeri 143	20.012.057.072	8.846.154	128.433.379	-	-	-	128.433.379	128.433.379	-
936	20100742	SMP Negeri 270	20.012.057.081	50.642.137	105.514.372	-	-	-	105.514.372	105.514.372	-
937	20100764	SMP Negeri 151	20.012.057.102	34.173.960	119.267.897	-	-	-	119.267.897	119.267.897	-
938	20100773	SMP Negeri 231	20.012.057.111	274.007.551	241.094.039	-	-	-	241.094.039	241.094.039	-
939	20100719	SMP Negeri 114	20.012.057.129	3.395.500	121.052.492	-	-	-	121.052.492	121.052.492	-
940	20100751	SMP Negeri 65	20.012.057.137	110.143.707	128.648.504	-	-	-	128.648.504	128.648.504	-
941	20100752	SMP Negeri 84	20.012.057.145	107.366.292	109.005.056	-	-	-	109.005.056	109.005.056	-
942	20100755	SMPT Kec. Koja (SMPN 84)	20.012.059.261	-	12.464.534	-	-	-	12.464.534	12.464.534	-
943	20100740	SMP Negeri 121	20.012.057.153	36.126.311	119.522.123	-	-	-	119.522.123	119.522.123	-
944	20100762	SMP Negeri 140	20.012.057.161	-	14.926.000	-	-	-	14.926.000	14.926.000	-
945	20100768	SMP Negeri 173	20.012.057.188	56.826.295	-	-	-	-	-	-	-
946	20100771	SMP Negeri 221	20.012.057.196	15.708.569	55.869.880	-	-	-	55.869.880	55.869.880	-
947	20100743	SMP Negeri 277	20.012.057.200	48.465.824	128.086.212	-	-	-	128.086.212	128.086.212	-
948	20100749	SMP Negeri 53	20.012.057.218	73.677.816	65.878.700	-	-	-	65.878.700	65.878.700	-
949	20106590	SMPT Kec. Cilincing 2 (SMPN 162)	20.012.059.245	-	5.279.900	-	-	-	5.279.900	5.279.900	-
950	20100754	SMPT Kec. Cilincing 1 (SMPN 244)	20.012.059.237	-	8.080.235	-	-	-	8.080.235	8.080.235	-
951	20100757	SMP Negeri 266	20.012.057.251	215.973	163.941.160	-	-	-	163.941.160	163.941.160	-
952	20100767	SMP Negeri 170	20.012.057.277	506.333	53.467.100	-	-	-	53.467.100	53.467.100	-
953	20106347	SMPN 285	20.012.057.285	23.730.074	7.185.602	-	-	-	7.185.602	7.185.602	-
954	20107711	SMPN SATAP 02 P. SEBIRA	20.012.057.781	-	154.900	-	-	-	154.900	154.900	-
955	20100673	SDN Rawa Badak Utara 21 Pagi	20.112.124.681	15.239.847	44.069.369	-	-	-	44.069.369	44.069.369	-
956	20100809	SMAN 18	20.112.124.711	217.316.181	373.678.136	-	-	-	373.678.136	373.678.136	-
957	20100802	SMA Negeri 110	20.112.124.746	65.428.994	285.120.244	-	-	-	285.120.244	285.120.244	-
958	20104842	SD Negeri Ancol 03	20.112.124.797	421.994	11.415.596	-	-	-	11.415.596	11.415.596	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
959	20104934	SD Negeri Sunter Agung 11	20.112.124.801	2.951.688	6.760.669	-	-	-	6.760.669	6.760.669	-
960	20101034	SD Negeri Pademangan Barat 04	20.112.124.878	1.292.254	796.439	-	-	-	796.439	796.439	-
961	20101042	SD Negeri Pademangan Barat 13	20.112.124.886	-	6.764.023	-	-	-	6.764.023	6.764.023	-
962	20104932	SD Negeri Sunter Agung 09	20.112.124.908	-	50.503.845	-	-	-	50.503.845	50.503.845	-
963	20104971	SD Negeri Warakas 07	20.112.124.924	12.570.529	82.521.235	-	-	-	82.521.235	82.521.235	-
964	20104968	SD Negeri Warakas 04	20.112.124.932	1.004.520	12.878.774	-	-	-	12.878.774	12.878.774	-
965	20101031	SD Negeri Pademangan Barat 01	20.112.124.941	7.210.950	1.810.118	-	-	-	1.810.118	1.810.118	-
966	20101036	SD Negeri Pademangan Barat 07	20.112.124.959	13.932.635	14.196.985	-	-	-	14.196.985	14.196.985	-
967	20101035	SD Negeri Pademangan Barat 05	20.112.124.967	3.427.500	2.404.070	-	-	-	2.404.070	2.404.070	-
968	20104969	SD Negeri Warakas 05	20.112.124.975	4.840	2.570.716	-	-	-	2.570.716	2.570.716	-
969	20101033	SD Negeri Pademangan Barat 03	20.112.124.983	2.478.849	98.723.456	-	-	-	98.723.456	98.723.456	-
970	20104966	SD Negeri Warakas 02	20.112.124.991	-	16.423.030	-	-	-	16.423.030	16.423.030	-
971	20104938	SD Negeri Sunter Jaya 02	20.112.125.009	570.000	342.086	-	-	-	342.086	342.086	-
972	20104860	SD Negeri Kebon Bawang 09	20.112.125.025	30.907.400	96.452.870	-	-	-	96.452.870	96.452.870	-
973	20104856	SD Negeri Kebon Bawang 05	20.112.125.033	21.256	552.126	-	-	-	552.126	552.126	-
974	20100593	SDN Sukapura 01 Pagi	20.112.125.041	320.364	114.198	-	-	-	114.198	114.198	-
975	20104916	SDN Sukapura 02 Pagi	20.112.125.068	4.320.000	62.433.632	-	-	-	62.433.632	62.433.632	-
976	20104919	SD Negeri Sungai Bambu 01	20.112.125.076	-	106.953.180	-	-	-	106.953.180	106.953.180	-
977	20104925	SD Negeri Sunter Agung 01	20.112.125.084	-	340.487	-	-	-	340.487	340.487	-
978	20100565	SDN Tugu Selatan 03 Pagi	20.112.125.092	12.215	28.703.222	-	-	-	28.703.222	28.703.222	-
979	20104855	SD Negeri Kebon Bawang 04	20.112.125.106	43.594	581.686	-	-	-	581.686	581.686	-
980	20104914	SDN Semper Timur 03 Pagi	20.112.125.122	-	3.001	-	-	-	3.001	3.001	-
981	20104929	SD Negeri Sunter Agung 05	20.112.125.131	-	2.080.970	-	-	-	2.080.970	2.080.970	-
982	20104918	SDN Sukapura 06 Petang	20.112.125.149	-	-	-	-	-	-	-	-
983	20100656	SD Negeri Pademangan Timur 08	20.112.125.157	4.332.000	20.473.086	-	-	-	20.473.086	20.473.086	-
984	20104874	SD Negeri Pademangan Barat 09	20.112.125.165	26.498.979	96.643.395	-	-	-	96.643.395	96.643.395	-
985	20100579	SD Negeri Sunter Jaya 03	20.112.125.173	632.883	23.338.524	-	-	-	23.338.524	23.338.524	-
986	20104939	SD Negeri Sunter Jaya 04	20.112.125.181	4.394.040	8.899.558	-	-	-	8.899.558	8.899.558	-
987	20104937	SD Negeri Sunter Jaya 01	20.112.125.190	-	6.585	-	-	-	6.585	6.585	-
988	20104858	SD Negeri Kebon Bawang 07	20.112.125.211	497	3.154.032	-	-	-	3.154.032	3.154.032	-
989	20104930	SD Negeri Sunter Agung 07	20.112.125.220	280.900	174.699	-	-	-	174.699	174.699	-
990	20104950	SD Negeri Tanjung Priok 05	20.112.125.238	30.156.800	25.721.161	-	-	-	25.721.161	25.721.161	-
991	20104875	SD Negeri Pademangan Barat 11	20.112.125.246	33.843.320	35.661.166	-	-	-	35.661.166	35.661.166	-
992	20101044	SD Negeri Pademangan Timur 01	20.112.125.254	-	82.637.498	-	-	-	82.637.498	82.637.498	-
993	20104942	SD Negeri Sunter Jaya 07	20.112.125.262	-	-	-	-	-	-	-	-
994	20101041	SD Negeri Pademangan Barat 12	20.112.125.271	328.791	32.523.789	-	-	-	32.523.789	32.523.789	-
995	20100586	SDN Semper Barat 13 Pagi	20.112.125.289	-	-	-	-	-	-	-	-
996	20100684	SDN Semper Barat 03 Pagi	20.112.125.297	32.119.847	63.425.853	-	-	-	63.425.853	63.425.853	-
997	20104935	SD Negeri Sunter Agung 12	20.112.125.327	340.755	12.291.514	-	-	-	12.291.514	12.291.514	-
998	20100683	SDN Semper Barat 02 Petang	20.112.125.335	-	-	-	-	-	-	-	-
999	20101039	SD Negeri Pademangan Barat 10	20.112.125.343	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	20104948	SD Negeri Tanjung Priok 03	20.112.125.351	179.788	5.815.342	-	-	-	5.815.342	5.815.342	-
1001	20104941	SD Negeri Sunter Jaya 06	20.112.125.360	7.420.000	-	-	-	-	-	-	-
1002	20104906	SDN Rawa Badak Utara 23 Pagi	20.112.125.378	30.435	21.895.154	-	-	-	21.895.154	21.895.154	-
1003	20101064	SD Negeri Pademangan Timur 03	20.112.125.386	-	207.844.532	-	-	-	207.844.532	207.844.532	-
1004	20104936	SD Negeri Sunter Agung 13	20.112.125.394	25.374.111	18.511.476	-	-	-	18.511.476	18.511.476	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1005	20104947	SD Negeri Tanjung Priok 02	20.112.125.408	2.729	99.840.000	-	-	-	99.840.000	99.840.000	-
1006	20100653	SD Negeri Pademangan Timur 05	20.112.125.416	20.946.000	21.714.978	-	-	-	21.714.978	21.714.978	-
1007	20100654	SD Negeri Pademangan Timur 06	20.112.125.424	19.649.872	108.785.711	-	-	-	108.785.711	108.785.711	-
1008	20100669	SDN Rawa Badak Selatan 07 Pagi	20.112.125.459	-	24.719.244	-	-	-	24.719.244	24.719.244	-
1009	20104967	SD Negeri Warakas 03	20.112.125.467	35.668.201	111.358.899	-	-	-	111.358.899	111.358.899	-
1010	20100682	SDN Semper Barat 01 Pagi	20.112.125.475	-	320.000	-	-	-	320.000	320.000	-
1011	20100685	SDN Semper Barat 04 Petang	20.112.125.491	-	492.992	-	-	-	492.992	492.992	-
1012	20104876	SD Negeri Pademangan Timur 09	20.112.125.505	-	28.425	-	-	-	28.425	28.425	-
1013	20104940	SD Negeri Sunter Jaya 05	20.112.125.513	15.707	4.366.252	-	-	-	4.366.252	4.366.252	-
1014	20100655	SD Negeri Pademangan Timur 07	20.112.125.521	5.633.430	83.393.312	-	-	-	83.393.312	83.393.312	-
1015	20101057	SDN Lagoa 05 Pagi	20.112.125.530	-	94.728.258	-	-	-	94.728.258	94.728.258	-
1016	20100585	SDN Semper Barat 12 Petang	20.112.125.548	9.063	21.874.433	-	-	-	21.874.433	21.874.433	-
1017	20104859	SD Negeri Kebon Bawang 08	20.112.125.556	-	3.914.150	-	-	-	3.914.150	3.914.150	-
1018	20104949	SD Negeri Tanjung Priok 04	20.112.125.564	7.199.180	45.779.475	-	-	-	45.779.475	45.779.475	-
1019	20107436	SMK Negeri 4	20.112.125.688	625.794.136	305.065.536	-	-	-	305.065.536	305.065.536	-
1020	20106346	SMPN 260	20.112.125.785	71.395.353	33.849.977	-	-	-	33.849.977	33.849.977	-
1021	20100745	SMP Negeri 282	20.112.125.793	73.949.314	193.378.665	-	-	-	193.378.665	193.378.665	-
1022	20106716	SMP Negeri 136	20.112.125.815	124.100.448	77.146.170	-	-	-	77.146.170	77.146.170	-
1023	20109207	SMPT Kec. Tanjung Priok (SMPN 55)	20.112.127.974	-	16.171.193	-	-	-	16.171.193	16.171.193	-
1024	20104467	SDN P. KELAPA 02 PAGI	20.112.125.891	1.598.306	2.082.065	-	-	-	2.082.065	2.082.065	-
1025	20104474	SDN P. TIDUNG 02 PAGI	20.112.125.904	3.738.593	15.014.462	-	-	-	15.014.462	15.014.462	-
1026	20104473	SDN P. TIDUNG 01 PAGI	20.112.125.912	509.600	1.950.238	-	-	-	1.950.238	1.950.238	-
1027	20104476	SDN P. TIDUNG 04 PAGI	20.112.125.921	-	708.090	-	-	-	708.090	708.090	-
1028	20104466	SDN P. KELAPA 01 PAGI	20.112.125.947	-	4.000.956	-	-	-	4.000.956	4.000.956	-
1029	20104465	SDN P. HARAPAN 02 PAGI	20.112.125.955	-	2.901.360	-	-	-	2.901.360	2.901.360	-
1030	20104477	SDN P. UNTUNG JAWA 01 PAGI	20.112.125.963	984.000	14.531.134	-	-	-	14.531.134	14.531.134	-
1031	20104970	SD Negeri Warakas 06	20.112.125.971	-	22.487.854	-	-	-	22.487.854	22.487.854	-
1032	20104877	SD Negeri Papanggo 01	20.112.125.998	100	24.269	-	-	-	24.269	24.269	-
1033	20101054	SDN Lagoa 02 Pagi	20.112.126.005	-	60.289.036	-	-	-	60.289.036	60.289.036	-
1034	20100645	SDN Rawa Badak Selatan 01 Pagi	20.112.126.021	1.832.508	41.251.305	-	-	-	41.251.305	41.251.305	-
1035	20101028	SDN Cilincing 05 Pagi	20.112.126.048	1.000	-	-	-	-	-	-	-
1036	20104845	SDN Cilincing 02 Pagi	20.112.126.056	-	3.043.761	-	-	-	3.043.761	3.043.761	-
1037	20100624	SDN Tugu Utara 21 Pagi	20.112.126.064	-	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
1038	20100597	SDN Semper Barat 08 Petang	20.112.126.072	-	10.599.992	-	-	-	10.599.992	10.599.992	-
1039	20104879	SD Negeri Papanggo 03	20.112.126.081	29.322	511.158	-	-	-	511.158	511.158	-
1040	20104911	SDN Semper Barat 15 Pagi	20.112.126.102	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000	3.840.000	-
1041	20104923	SD Negeri Sungai Bambu 05	20.112.126.111	15.983.076	33.709.933	-	-	-	33.709.933	33.709.933	-
1042	20100783	SMKN 12	20.712.001.112	17.827.000	89.483.395	-	-	-	89.483.395	89.483.395	-
1043	20107435	SMK Negeri 36	20.912.000.538	151.803.627	50.841.234	-	-	-	50.841.234	50.841.234	-
1044	20107437	SMK Negeri 49	20.912.000.546	3.008.999	137.021.044	-	-	-	137.021.044	137.021.044	-
1045	20100796	SMA Negeri 72	23.012.003.519	41.064.314	684.319.364	-	-	-	684.319.364	684.319.364	-
1046	20108854	SMP Negeri 286	30.012.031.070	180.000	1.881.420	-	-	-	1.881.420	1.881.420	-
1047	20105561	SDN Tegai Alur 03 Pagi	30.012.044.309	23.311.647	33.743.373	-	-	-	33.743.373	33.743.373	-
1048	20105393	SDN Mangga Besar 01 Pagi	30.012.042.586	3.411.835	15.885.585	-	-	-	15.885.585	15.885.585	-
1049	20101359	SDN Mangga Besar 03 Pagi	30.012.042.594	2.250.197	943.071	-	-	-	943.071	943.071	-
1050	20105396	SDN Mangga Besar 05 Pagi	30.012.042.608	15.924.188	10.998.588	-	-	-	10.998.588	10.998.588	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1051	20101370	SDN Mangga Besar 07 Pagi	30.012.042.624	9.908.261	4.181.684	-	-	-	4.181.684	4.181.684	-
1052	20105535	SDN Tanah Sereal 01 Pagi	30.012.042.641	-	960.000	-	-	-	960.000	960.000	-
1053	20101415	SDN Pinangsia 06 Pagi	30.012.042.659	17.220.600	45.087.938	-	-	-	45.087.938	45.087.938	-
1054	20102003	SDN Keagungan 02 PT	30.012.042.667	-	34.066.150	-	-	-	34.066.150	34.066.150	-
1055	20105307	SDN Keagungan 06 PT	30.012.042.675	-	256.873	-	-	-	256.873	256.873	-
1056	20105206	SDN Duri Utara 01 Pagi	30.012.042.683	475	1.224.831	-	-	-	1.224.831	1.224.831	-
1057	20105208	SDN Duri Utara 03 Pagi	30.012.042.691	2.179.096	12.546.181	-	-	-	12.546.181	12.546.181	-
1058	20105288	SDN Kapuk 03 Pagi	30.012.042.721	4.923.500	257.333	-	-	-	257.333	257.333	-
1059	20105171	SDN Cengkareng Timur 07 Pagi	30.012.042.748	6.278.702	10.243.671	-	-	-	10.243.671	10.243.671	-
1060	20105167	SDN Cengkareng Timur 03 Pagi	30.012.042.756	9.057.000	20.341.065	-	-	-	20.341.065	20.341.065	-
1061	20105489	SDN Semanan 09 Pagi	30.012.042.772	6.337.617	18.323.866	-	-	-	18.323.866	18.323.866	-
1062	20102020	SDN Kapuk 15 Pagi	30.012.042.781	4.294.300	2.034.300	-	-	-	2.034.300	2.034.300	-
1063	20102022	SDN Cengkareng Barat 04 PT	30.012.042.829	5.374.470	6.815.134	-	-	-	6.815.134	6.815.134	-
1064	20105173	SDN Cengkareng Timur 10 Pagi	30.012.042.837	27.933.500	-	-	-	-	-	-	-
1065	20105168	SDN Cengkareng Timur 04 PT	30.012.042.845	1.864.470	6.164.291	-	-	-	6.164.291	6.164.291	-
1066	20105294	SDN Kapuk 09 Pagi	30.012.042.853	13.962.468	68	-	-	-	68	68	-
1067	20105287	SDN Kapuk 02 Pagi	30.012.042.888	-	2.408.376	-	-	-	2.408.376	2.408.376	-
1068	20105180	SDN Cengkareng Timur 17 Pagi	30.012.042.896	12.147.392	7.927.180	-	-	-	7.927.180	7.927.180	-
1069	20101925	SDN Kapuk 13 PT	30.012.042.934	10.150.000	5.634.420	-	-	-	5.634.420	5.634.420	-
1070	20105157	SDN Cengkareng Barat 13 Pagi	30.012.042.951	20.496.723	11.624.785	-	-	-	11.624.785	11.624.785	-
1071	20105199	SDN Duri Kosambi 05 PT	30.012.042.969	1.437.915	532.253	-	-	-	532.253	532.253	-
1072	20105200	SDN Duri Kosambi 06 Pagi	30.012.042.977	13.022.000	640.000	-	-	-	640.000	640.000	-
1073	20105160	SDN Cengkareng Barat 16 Pagi	30.012.042.985	32.282.235	6.186.235	-	-	-	6.186.235	6.186.235	-
1074	20108950	SDN Cengkareng Barat 20 PT	30.012.042.993	4.543.407	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-
1075	20105159	SDN Cengkareng Barat 15 Pagi	30.012.043.001	65.057.714	452.006	-	-	-	452.006	452.006	-
1076	20105533	SDN Tambora 02 PT	30.012.043.027	163	5.281.447	-	-	-	5.281.447	5.281.447	-
1077	20105449	SDN Pegadungan 05 Pagi	30.012.043.043	2.000.000	42.608.376	-	-	-	42.608.376	42.608.376	-
1078	20105445	SDN Pegadungan 01 Pagi	30.012.043.051	3.697.376	1.998.440	-	-	-	1.998.440	1.998.440	-
1079	20105564	SDN Tegal Alur 06 Pagi	30.012.043.060	4.517.290	2.320.481	-	-	-	2.320.481	2.320.481	-
1080	20105576	SDN Tegal Alur 17 Pagi	30.012.043.078	16.287.330	56.172.906	-	-	-	56.172.906	56.172.906	-
1081	20105579	SDN Tegal Alur 20 Pt	30.012.043.086	4.751.198	617.119	-	-	-	617.119	617.119	-
1082	20105275	SDN Kali Deres 14 Pt	30.012.043.108	-	3.040.000	-	-	-	3.040.000	3.040.000	-
1083	20105268	SDN Kali Deres 06 Pagi	30.012.043.116	8.402.400	5.000	-	-	-	5.000	5.000	-
1084	20105283	SDN Kamal 08 Pt	30.012.043.132	520	13.490.100	-	-	-	13.490.100	13.490.100	-
1085	20102077	SDN Duri Kosambi 07 Pagi	30.012.043.159	31.185.246	3.812.796	-	-	-	3.812.796	3.812.796	-
1086	20101924	SDN KALIANYAR 02 PT	30.012.043.175	-	29.942.046	-	-	-	29.942.046	29.942.046	-
1087	20105488	SDN Semanan 08 Pagi	30.012.043.191	6.583.500	5.667.246	-	-	-	5.667.246	5.667.246	-
1088	20105492	SDN Semanan 12 Pagi	30.012.043.205	34.361.232	-	-	-	-	-	-	-
1089	20109142	SDN Pegadungan 07 Pagi	30.012.043.213	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	20105455	SDN Pegadungan 11 Pagi	30.012.043.221	90.000	1.282.500	-	-	-	1.282.500	1.282.500	-
1091	20105285	SDN Kamal 10 Pt	30.012.043.248	446.227	1.566.395	-	-	-	1.566.395	1.566.395	-
1092	20105569	SDN Tegal Alur 10 Pagi	30.012.043.256	1.150.013	21.982.919	-	-	-	21.982.919	21.982.919	-
1093	20105532	SDN Tambora 01 Pagi	30.012.043.264	36.192.213	29.837.231	-	-	-	29.837.231	29.837.231	-
1094	20105212	SDN Grogol 01 Pagi.	30.012.043.281	10.107.192	23.336.493	-	-	-	23.336.493	23.336.493	-
1095	20101939	SDN Jelambar 03 Pagi.	30.012.043.299	875.194	3.791.294	-	-	-	3.791.294	3.791.294	-
1096	20105230	SDN Jelambar 08 Pagi.	30.012.043.311	-	1.920.000	-	-	-	1.920.000	1.920.000	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1097	20105539	SDN Tanjung Duren Selatan 01 Pagi.	30.012.043.337	37.846.259	20.613.279	-	-	-	20.613.279	20.613.279	-
1098	20105544	SDN Tanjung Duren Utara 01 Pagi.	30.012.043.345	3.762.503	2.495.943	-	-	-	2.495.943	2.495.943	-
1099	20101172	SDN Tomang 03 Pagi.	30.012.043.361	-	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1100	20105590	SDN Wijaya Kusuma 01 Pagi.	30.012.043.388	5.090.676	5.525.266	-	-	-	5.525.266	5.525.266	-
1101	20105591	SDN Wijaya Kusuma 02 Pagi.	30.012.043.396	7.647.267	5.714.807	-	-	-	5.714.807	5.714.807	-
1102	20105592	SDN Wijaya Kusuma 03 Pagi.	30.012.043.400	-	19.036.369	-	-	-	19.036.369	19.036.369	-
1103	20105594	SDN Wijaya Kusuma 05 Pagi.	30.012.043.418	1.003.100	523.830	-	-	-	523.830	523.830	-
1104	20105596	SDN Wijaya Kusuma 07 Pagi.	30.012.043.426	6.247.266	19.487.786	-	-	-	19.487.786	19.487.786	-
1105	20101947	SDN Jati Pulo 03 Pagi.	30.012.043.442	3.201.170	134	-	-	-	134	134	-
1106	20105220	SDN Jati Pulo 06 Pagi.	30.012.043.451	-	320.122	-	-	-	320.122	320.122	-
1107	20105383	SDN Kota Bambu 02 PT.	30.012.043.469	80.520.682	28.700.742	-	-	-	28.700.742	28.700.742	-
1108	20105274	SDN Kali Deres 13 Pt	30.012.043.477	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	20105267	SDN Kali Deres 05 Pagi	30.012.043.485	-	7.204.927	-	-	-	7.204.927	7.204.927	-
1110	20105219	SDN Jati Pulo 05 Pagi.	30.012.043.493	30.489.427	9.056.397	-	-	-	9.056.397	9.056.397	-
1111	20105266	SDN Kali Deres 04 Pt	30.012.043.507	1.290.584	2.246.019	-	-	-	2.246.019	2.246.019	-
1112	20101935	SDN Kali Deres 02 Pt	30.012.043.515	2.131.674	611.785	-	-	-	611.785	611.785	-
1113	20105281	SDN Kamal 06 Pagi	30.012.043.558	6.577.212	15.979.630	-	-	-	15.979.630	15.979.630	-
1114	20105284	SDN Kamal 09 Pt	30.012.043.582	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	20105484	SDN Semanan 04 Pagi	30.012.043.591	208.635	2.500	-	-	-	2.500	2.500	-
1116	20105486	SDN Semanan 06 Pagi	30.012.043.604	56.541.564	35.395.363	-	-	-	35.395.363	35.395.363	-
1117	20105447	SDN Pegadungan 03 Pagi	30.012.043.612	3.312.592	160.300	-	-	-	160.300	160.300	-
1118	20101539	SMP Negeri 82	30.012.043.621	28.801.540	112.210.667	-	-	-	112.210.667	112.210.667	-
1119	20105446	SDN Pegadungan 02 Pagi	30.012.043.655	2.004.396	2.402.500	-	-	-	2.402.500	2.402.500	-
1120	20101536	SMP Negeri 274	30.012.043.663	72.329.183	88.668.131	-	-	-	88.668.131	88.668.131	-
1121	20105242	SDN Jembatan Besi 01 Pagi	30.012.043.671	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	20105209	SDN Duri Utara 04 PT	30.012.043.701	-	24.243.196	-	-	-	24.243.196	24.243.196	-
1123	20101524	SMP Negeri 248	30.012.043.728	81.521.778	195.707.673	-	-	-	195.707.673	195.707.673	-
1124	20101576	SMP Negeri 159	30.012.043.744	226.720.070	196.953.661	-	-	-	196.953.661	196.953.661	-
1125	20101542	SMP Negeri 63	30.012.043.752	4.431.113	49.987.287	-	-	-	49.987.287	49.987.287	-
1126	20105247	SDN JEMBATAN LIMA 02 PT	30.012.043.817	-	409.421	-	-	-	409.421	409.421	-
1127	20101417	SDN Pinangsia 03 Pagi	30.012.043.825	21.072.000	44.201.420	-	-	-	44.201.420	44.201.420	-
1128	20102004	SDN Keagungan 01 Pagi	30.012.043.833	2.476.000	21.273	-	-	-	21.273	21.273	-
1129	20101362	SDN KRUKUT 01 Pagi	30.012.043.841	4.878.500	5.079	-	-	-	5.079	5.079	-
1130	20105450	SDN Pegadungan 06 Pagi	30.012.043.868	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	20105457	SDN Pegadungan 12 Pagi	30.012.043.876	32.044.746	2.880.789	-	-	-	2.880.789	2.880.789	-
1132	20105448	SDN Pegadungan 04 Pagi	30.012.043.884	26.325.500	5.650	-	-	-	5.650	5.650	-
1133	20101437	SDN Pekojan 04 PT	30.012.043.906	440.800	4.389.550	-	-	-	4.389.550	4.389.550	-
1134	20105462	SDN Pekojan 02 PT	30.012.043.914	-	4.927.330	-	-	-	4.927.330	4.927.330	-
1135	20105463	SDN Pekojan 03 Pagi	30.012.043.922	500	1.810.756	-	-	-	1.810.756	1.810.756	-
1136	20102002	SDN Keagungan 03 Pagi	30.012.043.931	2.304.809	431.212	-	-	-	431.212	431.212	-
1137	20105306	SDN Keagungan 05 Pagi	30.012.043.949	4.111.990	481.940	-	-	-	481.940	481.940	-
1138	20105246	SDN JEMBATAN LIMA 01 Pagi	30.012.043.957	-	1.120.622	-	-	-	1.120.622	1.120.622	-
1139	20105248	SDN JEMBATAN LIMA 03 Pagi	30.012.043.965	-	2.400.017	-	-	-	2.400.017	2.400.017	-
1140	20105534	SDN Tambora 03 Pagi	30.012.043.981	-	2.560.000	-	-	-	2.560.000	2.560.000	-
1141	20105465	SDN Pekojan 05 Pagi	30.012.043.990	4.785.500	4.439.800	-	-	-	4.439.800	4.439.800	-
1142	20108945	SDN Pegadungan 14 Pagi	30.012.044.031	-	16.339.090	-	-	-	16.339.090	16.339.090	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1143	20105568	SDN Tegal Alur 09 Pagi	30.012.044.058	15.379.111	1.088.853	-	-	-	1.088.853	1.088.853	-
1144	20105574	SDN Tegal Alur 15 Pagi	30.012.044.066	2.273.264	-	-	-	-	-	-	-
1145	20105273	SDN Kali Deres 12 Pagi	30.012.044.082	-	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1146	20105562	SDN Tegal Alur 04 Pagi	30.012.044.091	8.500.060	161.394	-	-	-	161.394	161.394	-
1147	20105494	SDN Semanan 14 Pt	30.012.044.104	24.654.000	-	-	-	-	-	-	-
1148	20105490	SDN Semanan 10 Pt	30.012.044.112	9.611.751	2.893.598	-	-	-	2.893.598	2.893.598	-
1149	20105487	SDN Semanan 07 Pt	30.012.044.121	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	20105482	SDN Semanan 02 Pagi	30.012.044.155	37.475.621	44.971	-	-	-	44.971	44.971	-
1151	20105566	SDN Tegal Alur 08 Pagi	30.012.044.163	-	41.876.819	-	-	-	41.876.819	41.876.819	-
1152	20105578	SDN Tegal Alur 19 Pt	30.012.044.171	100	11.996.800	-	-	-	11.996.800	11.996.800	-
1153	20105573	SDN Tegal Alur 14 Pt	30.012.044.198	1.597.328	60.750	-	-	-	60.750	60.750	-
1154	20105580	SDN Tegal Alur 21 Pt	30.012.044.201	-	6.631.453	-	-	-	6.631.453	6.631.453	-
1155	20105176	SDN Cengkareng Timur 13 PT	30.012.044.236	36.610.546	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
1156	20101929	SDN Kapuk 08 PT	30.012.044.252	-	51.300	-	-	-	51.300	51.300	-
1157	20105483	SDN Semanan 03 Pagi	30.012.044.261	30.030.101	575.639	-	-	-	575.639	575.639	-
1158	20105401	SDN Maphar 01 Pagi	30.012.044.295	-	29.615.588	-	-	-	29.615.588	29.615.588	-
1159	20105244	SDN Jembatan Besi 03 Pagi	30.012.044.333	-	47.966.106	-	-	-	47.966.106	47.966.106	-
1160	20105537	SDN Tanah Sereal 03 Pagi	30.012.044.341	-	15.231.679	-	-	-	15.231.679	15.231.679	-
1161	20105538	SDN Tanah Sereal 04 PT	30.012.044.350	13.874.250	2.080.050	-	-	-	2.080.050	2.080.050	-
1162	20105301	SDN Kapuk 16 Pagi	30.012.044.368	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	20105271	SDN Kali Deres 09 Pagi	30.012.044.376	928.600	1.857.200	-	-	-	1.857.200	1.857.200	-
1164	20105265	SDN Kali Deres 03 Pagi	30.012.044.384	1.560.096	1.126.096	-	-	-	1.126.096	1.126.096	-
1165	20105481	SDN Semanan 01 Pagi	30.012.044.414	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	20105493	SDN Semanan 13 Pt	30.012.044.422	-	5.617	-	-	-	5.617	5.617	-
1167	20105454	SDN Pegadungan 10 Pt	30.012.044.431	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
1168	20105156	SDN Cengkareng Barat 12 Pagi	30.012.044.473	-	49.069	-	-	-	49.069	49.069	-
1169	20101501	SMK.Negeri 35	30.012.044.538	-	58.928.360	-	-	-	58.928.360	58.928.360	-
1170	20101504	SMK.Negeri 11	30.012.044.562	37.965.215	81.060.470	-	-	-	81.060.470	81.060.470	-
1171	20109105	SDN Jelambar Baru 03 Pagi.	30.012.044.619	760.103	60.261	-	-	-	60.261	60.261	-
1172	20100664	SD Negeri Pejagalan 09	30.212.000.014	52.355.041	24.947.490	-	-	-	24.947.490	24.947.490	-
1173	20104894	SD Negeri Penjaringan 09	30.212.000.022	6.018.260	69.631.310	-	-	-	69.631.310	69.631.310	-
1174	20100637	SD Negeri Penjaringan 07	30.212.000.031	3.321.820	3.429.438	-	-	-	3.429.438	3.429.438	-
1175	20100659	SD Negeri Pejagalan 03	30.212.000.049	344.953	39.431.563	-	-	-	39.431.563	39.431.563	-
1176	20100638	SD Negeri Penjaringan 08	30.212.000.073	7.575.027	5.474.637	-	-	-	5.474.637	5.474.637	-
1177	20104850	SD Negeri Kapuk Muara 03	30.212.000.103	248.762	19.161	-	-	-	19.161	19.161	-
1178	20100650	SD Negeri Penjaringan 04	30.212.000.138	94.315.502	102.290.622	-	-	-	102.290.622	102.290.622	-
1179	20100639	SD Negeri Penjaringan 10	30.212.000.146	12.956.867	48.124.898	-	-	-	48.124.898	48.124.898	-
1180	20101009	SD Negeri Kapuk Muara 01	30.212.000.154	1.217.833	44.791.168	-	-	-	44.791.168	44.791.168	-
1181	20100651	SD Negeri Penjaringan 03	30.212.000.171	340.671	10.318.192	-	-	-	10.318.192	10.318.192	-
1182	20100652	SD Negeri Penjaringan 01	30.212.000.189	26.115.352	60.855.412	-	-	-	60.855.412	60.855.412	-
1183	20104891	SD Negeri Pejagalan 01	30.212.000.197	49.113.022	47.698.399	-	-	-	47.698.399	47.698.399	-
1184	20100717	SMP Negeri 112	30.212.000.405	26.934.078	86.466.648	-	-	-	86.466.648	86.466.648	-
1185	20100741	SMP Negeri 122	30.212.000.413	27.187.176	43.896.611	-	-	-	43.896.611	43.896.611	-
1186	20100803	SMAN 111	30.212.000.626	3.480.260	38.112.133	-	-	-	38.112.133	38.112.133	-
1187	20107439	SMKN 56	30.212.000.669	68.713.524	239.122.264	-	-	-	239.122.264	239.122.264	-
1188	20100770	SMP Negeri 21	30.212.000.693	143.299.827	227.519.915	-	-	-	227.519.915	227.519.915	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1189	20104892	SD Negeri Pejagalan 05	30.212.000.707	7.440.000	122.268.631	-	-	-	122.268.631	122.268.631	-
1190	20101373	SDN Meruya Utara 05 Pagi.	30.312.038.338	521	-	-	-	-	-	-	-
1191	20101620	SMA Negeri 33	30.312.037.471	-	150.387.700	-	-	-	150.387.700	150.387.700	-
1192	20101605	SMA Negeri 56	30.312.037.579	-	92.892.929	-	-	-	92.892.929	92.892.929	-
1193	20105417	SDN Meruya Utara 08 Pagi.	30.312.037.951	4.284.619	1.021.347	-	-	-	1.021.347	1.021.347	-
1194	20105412	SDN Meruya Utara 03 Pagi.	30.312.037.978	-	15.410.657	-	-	-	15.410.657	15.410.657	-
1195	20105377	SDN Kembangan Utara 08 PT.	30.312.037.986	16.278.620	5.712.380	-	-	-	5.712.380	5.712.380	-
1196	20105366	SDN Kembangan Selatan 01 Pagi.	30.312.037.994	120.950.000	-	-	-	-	-	-	-
1197	20108940	SDN Joglo 09 Pagi.	30.312.038.001	-	6.750.340	-	-	-	6.750.340	6.750.340	-
1198	20105406	SDN Meruya Selatan 04 Pagi.	30.312.038.028	-	6.047.000	-	-	-	6.047.000	6.047.000	-
1199	20105403	SDN Meruya Selatan 01 Pagi.	30.312.038.044	210	161.210	-	-	-	161.210	161.210	-
1200	20101406	SDN Kembangan Utara 06 Pagi.	30.312.038.052	1.919.353	9.409.208	-	-	-	9.409.208	9.409.208	-
1201	20105215	SDN Grogol 11 Pagi.	30.312.038.061	1.431.700	3.631.956	-	-	-	3.631.956	3.631.956	-
1202	20105370	SDN Kembangan Utara 01 Pagi.	30.312.038.079	94.280.720	59.554.125	-	-	-	59.554.125	59.554.125	-
1203	20105513	SDN Srengseng 08 PT.	30.312.038.087	20.037.684	2.448.815	-	-	-	2.448.815	2.448.815	-
1204	20105508	SDN Srengseng 03 Pagi.	30.312.038.095	45.767.339	1.821.624	-	-	-	1.821.624	1.821.624	-
1205	20109301	SDN Kembangan Utara 05 Pagi.	30.312.038.109	1.099.094	13.847.244	-	-	-	13.847.244	13.847.244	-
1206	20105381	SDN Kembangan Utara 12 PT.	30.312.038.117	5.231.026	1.333.296	-	-	-	1.333.296	1.333.296	-
1207	20105476	SDN Rawa Buaya 05 PT	30.312.038.125	8.499.789	35.812.199	-	-	-	35.812.199	35.812.199	-
1208	20105165	SDN Cengkareng Timur 01 Pagi	30.312.038.133	6.456.000	2.529.000	-	-	-	2.529.000	2.529.000	-
1209	20101424	SDN Rawa Buaya 07 Pagi	30.312.038.150	975.267	3.531.588	-	-	-	3.531.588	3.531.588	-
1210	20105256	SDN Joglo 07 PT.	30.312.038.168	41.206	-	-	-	-	-	-	-
1211	20105251	SDN Joglo 02 PT.	30.312.038.176	-	1.440.000	-	-	-	1.440.000	1.440.000	-
1212	20105205	SDN Duri Kosambi 11 PT	30.312.038.184	24.515.445	1.649.838	-	-	-	1.649.838	1.649.838	-
1213	20102087	SDN Duri Kosambi 09 Pagi	30.312.038.206	8.713.000	15.065.379	-	-	-	15.065.379	15.065.379	-
1214	20105379	SDN Kembangan Utara 10 Pagi.	30.312.038.214	11.270	8.841.770	-	-	-	8.841.770	8.841.770	-
1215	20101912	SDN Joglo 08 Pagi.	30.312.038.231	-	63.650	-	-	-	63.650	63.650	-
1216	20101915	SDN Joglo 04 PT.	30.312.038.249	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	20105254	SDN Joglo 05 Pagi.	30.312.038.257	57.880	43.710.305	-	-	-	43.710.305	43.710.305	-
1218	20109067	SDN Joglo 01 Pagi.	30.312.038.265	129.183	7.656.183	-	-	-	7.656.183	7.656.183	-
1219	20101940	SDN Jelambar 01 Pagi.	30.312.038.273	8.090.635	48.003.854	-	-	-	48.003.854	48.003.854	-
1220	20105547	SDN Tanjung Duren Utara 06 Pagi.	30.312.038.281	25.923.600	46.480.220	-	-	-	46.480.220	46.480.220	-
1221	20101412	SDN Rawa Buaya 04 PT	30.312.038.290	-	26.902.003	-	-	-	26.902.003	26.902.003	-
1222	20105411	SDN Meruya Utara 02 Pagi.	30.312.038.303	66.371.970	27.758.317	-	-	-	27.758.317	27.758.317	-
1223	20105259	SDN Joglo 10 Pagi.	30.312.038.311	3.003.177	884.480	-	-	-	884.480	884.480	-
1224	20101446	SDN Meruya Utara 15 PT.	30.312.038.320	19.669.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1225	20101585	SMA Negeri 94	30.312.038.354	125.135.536	13.075.430	-	-	-	13.075.430	13.075.430	-
1226	20105421	SDN Meruya Utara 12 Pagi.	30.312.038.362	22.816.931	90.828.371	-	-	-	90.828.371	90.828.371	-
1227	20105376	SDN Kembangan Utara 07 PT.	30.312.038.371	6.795.402	68.258.952	-	-	-	68.258.952	68.258.952	-
1228	20101573	SMP Negeri 176	30.312.038.389	399.740	96.018.140	-	-	-	96.018.140	96.018.140	-
1229	20101626	SMA Negeri 112	30.312.038.397	4.690	283.024.840	-	-	-	283.024.840	283.024.840	-
1230	20101587	SMA Negeri 84	30.312.038.401	75.305.982	317.388.682	-	-	-	317.388.682	317.388.682	-
1231	20101425	SDN Rawa Buaya 08 Pagi	30.312.038.435	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	20105480	SDN Rawa Buaya 10 PT	30.312.038.443	-	3.707.836	-	-	-	3.707.836	3.707.836	-
1233	20102082	SDN Duri Kosambi 02 Pagi	30.312.038.451	15.234.700	1.482.700	-	-	-	1.482.700	1.482.700	-
1234	20105405	SDN Meruya Selatan 03 Pagi.	30.312.038.460	926.888	63.037.778	-	-	-	63.037.778	63.037.778	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1235	20105368	SDN Kembangan Selatan 03 Pagi.	30.312.038.478	4.780	1.699.992	-	-	-	1.699.992	1.699.992	-
1236	20102080	SDN Duri Kosambi 04 Pagi	30.312.038.583	3.720.000	549.313	-	-	-	549.313	549.313	-
1237	20105474	SDN Rawa Buaya 03 Pagi	30.312.038.591	4.530.030	2.683.439	-	-	-	2.683.439	2.683.439	-
1238	20101374	SDN Meruya Utara 04 PT.	30.312.038.605	26.230.080	-	-	-	-	-	-	-
1239	20101402	SDN Kembangan Utara 11 PT.	30.312.038.613	1.040.650	4.020.700	-	-	-	4.020.700	4.020.700	-
1240	20101916	SDN Joglo 03 Pagi.	30.312.038.630	-	275.207	-	-	-	275.207	275.207	-
1241	20101498	SMK.Negeri 53	30.412.001.718	633.898	363.420.071	-	-	-	363.420.071	363.420.071	-
1242	20102083	SDN Duri Kosambi 01 Pagi	30.412.001.874	74.377.268	65.120.516	-	-	-	65.120.516	65.120.516	-
1243	20101413	SDN Rawa Buaya 02 Pagi	30.412.001.882	9.001.000	4.038.504	-	-	-	4.038.504	4.038.504	-
1244	20105291	SDN Kapuk 06 Pagi	30.412.001.912	6.214.760	28.228.882	-	-	-	28.228.882	28.228.882	-
1245	20101930	SDN Kapuk 07 PT	30.412.001.921	8.653.720	348.182	-	-	-	348.182	348.182	-
1246	20105286	SDN Kapuk 01 Pagi	30.412.001.939	180	2.701.360	-	-	-	2.701.360	2.701.360	-
1247	20105326	SDN Kedaung Kali Angke 06 Pagi	30.412.001.947	3.456.100	5.644.090	-	-	-	5.644.090	5.644.090	-
1248	20105329	SDN Kedaung Kali Angke 09 PT	30.412.001.955	1.667.000	16.084.803	-	-	-	16.084.803	16.084.803	-
1249	20105330	SDN Kedaung Kali Angke 10	30.412.001.963	8.764.806	-	-	-	-	8.528.566	8.528.566	-
1250	20101990	SDN Kedaung Kali Angke 08 Pagi	30.412.001.980	128.000	4.431.363	-	-	-	4.431.363	4.431.363	-
1251	20102104	SDN Cengkareng Timur 16 PT	30.412.001.998	506.324	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2.880.000	-
1252	20102130	SDN Cengkareng Timur 22 PT	30.412.002.048	5.682.013	2.616.713	-	-	-	2.616.713	2.616.713	-
1253	20102011	SDN Kedaung Kali Angke 03 Pagi	30.412.002.056	371.896	8.047.786	-	-	-	8.047.786	8.047.786	-
1254	20105331	SDN Kedaung Kali Angke 11 Pagi	30.412.002.064	5.728.340	3.528.584	-	-	-	3.528.584	3.528.584	-
1255	20105151	SDN Cengkareng Barat 07 Pagi	30.412.002.072	888.589	703.105	-	-	-	703.105	703.105	-
1256	20105295	SDN Kapuk 10 PT	30.412.002.081	27.740.540	753.840	-	-	-	753.840	753.840	-
1257	20105299	SDN Kapuk 14 Pagi	30.412.002.099	18.256.188	12.003.438	-	-	-	12.003.438	12.003.438	-
1258	20102116	SDN Cengkareng Timur 19 PT	30.412.002.102	2.792.000	217.361	-	-	-	217.361	217.361	-
1259	20102009	SDN Kedaung Kali Angke 05 Pagi	30.412.002.111	7.996.425	6.536.835	-	-	-	6.536.835	6.536.835	-
1260	20101933	SDN Kapuk 04 PT	30.412.002.129	33.889.984	273.637	-	-	-	273.637	273.637	-
1261	20101972	SDN Kedaung Kali Angke 13 Pagi	30.412.002.137	49.995	24.308.125	-	-	-	24.308.125	24.308.125	-
1262	20105322	SDN Kedaung Kali Angke 01 Pagi	30.412.002.145	2.962.479	28.853.289	-	-	-	28.853.289	28.853.289	-
1263	20101973	SDN Kedaung Kali Angke 12 Pagi	30.412.002.153	6.273.294	2.909.410	-	-	-	2.909.410	2.909.410	-
1264	20102117	SDN Cengkareng Timur 20 PT	30.412.002.161	57.910.683	33.097.093	-	-	-	33.097.093	33.097.093	-
1265	20105161	SDN Cengkareng Barat 17 PT	30.412.002.188	21.348.000	7.706.600	-	-	-	7.706.600	7.706.600	-
1266	20101552	SMP Negeri 125	30.412.002.285	27.306.178	85.133.983	-	-	-	85.133.983	85.133.983	-
1267	20101571	SMP Negeri 187	30.412.002.307	37.465.654	29.949.798	-	-	-	29.949.798	29.949.798	-
1268	20101545	SMP Negeri 45	30.412.002.315	240.510.304	87.344.376	-	-	-	87.344.376	87.344.376	-
1269	20101562	SMP Negeri 132	30.412.002.323	18.576.572	116.496.555	-	-	-	116.496.555	116.496.555	-
1270	20101523	SMP Negeri 249	30.412.002.331	48.693.353	87.248.671	-	-	-	87.248.671	87.248.671	-
1271	20101572	SMP Negeri 186	30.412.002.374	19.502.056	116.714.906	-	-	-	116.714.906	116.714.906	-
1272	20101558	SMP Negeri 100	30.412.002.463	46.278.846	77.819.946	-	-	-	77.819.946	77.819.946	-
1273	20102572	SMA Negeri 63	32.212.000.345	90.003	179.973.134	-	-	-	179.973.134	179.973.134	-
1274	20102481	SMP Negeri 43 Jakarta	40.012.193.114	167.539.099	218.969.941	-	-	-	218.969.941	218.969.941	-
1275	20103144	SD Negeri Bangka 07 Pagi	40.012.200.072	16.384.154	23.884.875	-	-	-	23.884.875	23.884.875	-
1276	20102146	SD Negeri Ragunan 08 Pagi	40.012.200.081	-	8.391.266	-	-	-	8.391.266	8.391.266	-
1277	20106102	SD Negeri Pejaten Timur 15 Pagi	40.012.200.099	1.483.399	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1278	20106090	SD Negeri Pejaten Barat 11 Pagi	40.012.200.102	-	77.148.550	-	-	-	77.148.550	77.148.550	-
1279	20106172	SD Negeri Ragunan 5 Pagi	40.012.200.129	7.500.000	26.293.591	-	-	-	26.293.591	26.293.591	-
1280	20106079	SD Negeri Pasar Minggu 04 Pagi	40.012.200.137	20.000	3.984.685	-	-	-	3.984.685	3.984.685	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1281	20102147	SD Negeri Ragunan 09 Pagi	40.012.200.145	-	2.293.334	-	-	-	2.293.334	2.293.334	-
1282	20102976	SD Negeri Kebagusan 02 Pagi	40.012.200.153	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	20106104	SD Negeri Pejaten Timur 18 Pagi	40.012.200.161	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	20106176	SD Negeri Ragunan 14 Pagi	40.012.200.170	-	760.575	-	-	-	760.575	760.575	-
1285	20106097	SD Negeri Pejaten Timur 07 Pagi	40.012.200.196	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	20106165	SD Negeri Pulo 03 Pagi	40.012.200.226	-	17.077.022	-	-	-	17.077.022	17.077.022	-
1287	20102133	SD Negeri Pulo 09 Pagi.	40.012.200.251	-	5.764.300	-	-	-	5.764.300	5.764.300	-
1288	20106004	SD Negeri Kramat Pela 01 Pagi	40.012.200.269	5.920.000	2.480.263	-	-	-	2.480.263	2.480.263	-
1289	20102321	SD Negeri Kramat Pela 09	40.012.200.285	-	210.463	-	-	-	210.463	210.463	-
1290	20103126	SD Negeri Cipete Utara 01 Pagi	40.012.200.293	6.330.000	54.433.853	-	-	-	54.433.853	54.433.853	-
1291	20105860	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi	40.012.200.315	-	2.080.000	-	-	-	2.080.000	2.080.000	-
1292	20105861	SD Negeri Cipete Utara 07 Pagi.	40.012.200.323	-	5.768.700	-	-	-	5.768.700	5.768.700	-
1293	20105862	SD Negeri Cipete Utara 09 Pagi	40.012.200.331	-	19.385.732	-	-	-	19.385.732	19.385.732	-
1294	20105864	SD Negeri Cipete Utara 11 Pagi	40.012.200.358	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	20105866	SD Negeri Cipete Utara 13 Pagi	40.012.200.374	7.497.082	14.850.323	-	-	-	14.850.323	14.850.323	-
1296	20105868	SD Negeri Cipete Utara 15 Pagi	40.012.200.391	9.528.387	-	-	-	-	-	-	-
1297	20105887	SD Negeri Gandaria Utara 01 Pagi	40.012.200.412	20.141.274	29.791.749	-	-	-	29.791.749	29.791.749	-
1298	20105891	SD Negeri Gandaria Utara 03 Pagi	40.012.200.421	2.052.599	8.564.542	-	-	-	8.564.542	8.564.542	-
1299	20105892	SD Negeri Gandaria Utara 05 Pagi.	40.012.200.439	1.373	-	-	-	-	-	-	-
1300	20105894	SD Negeri Gandaria Utara 07 Pagi	40.012.200.447	-	85.732.000	-	-	-	85.732.000	85.732.000	-
1301	20105895	SD Negeri Gandaria Utara 08 Pagi	40.012.200.455	24.498.000	15.355.613	-	-	-	15.355.613	15.355.613	-
1302	20102156	SD Negeri Rawa Barat 05	40.012.200.480	24.375.300	5.614	-	-	-	5.614	5.614	-
1303	20105927	SD Negeri Gunung 05	40.012.200.528	20.645.295	95.391.540	-	-	-	95.391.540	95.391.540	-
1304	20106184	SD Negeri Rawa Barat 09 Pagi	40.012.200.536	572.245	3.583.388	-	-	-	3.583.388	3.583.388	-
1305	20106067	SD Negeri Pancoran 01 Pagi	40.012.200.552	1.254.293	14.927.824	-	-	-	14.927.824	14.927.824	-
1306	20102396	SD Negeri Pancoran 05 Pagi	40.012.200.561	-	34.509.706	-	-	-	34.509.706	34.509.706	-
1307	20102392	SD Negeri Pancoran 10 Pagi	40.012.200.595	2.791.676	7.160.556	-	-	-	7.160.556	7.160.556	-
1308	20102944	SD Negeri Duren Tiga 01 Pagi	40.012.200.609	15.453.054	26.494.163	-	-	-	26.494.163	26.494.163	-
1309	20102943	SD Negeri Duren Tiga 05 Pagi	40.012.200.617	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	20102956	SD Negeri Duren Tiga 07	40.012.200.625	4.378.400	9.660.823	-	-	-	9.660.823	9.660.823	-
1311	20102958	SD Negeri Duren Tiga 09	40.012.200.633	20.705.790	30.049.551	-	-	-	30.049.551	30.049.551	-
1312	20105881	SD Negeri Duren Tiga 13 Pagi.	40.012.200.650	1.858.000	118	-	-	-	118	118	-
1313	20105882	SD Negeri Duren Tiga 14 Pagi.	40.012.200.668	641.000	23.910.898	-	-	-	23.910.898	23.910.898	-
1314	20105945	SD Negeri Kalibata 01	40.012.200.684	21.387.600	26.005.924	-	-	-	26.005.924	26.005.924	-
1315	20105946	SD Negeri Kalibata 03	40.012.200.692	-	33.630.400	-	-	-	33.630.400	33.630.400	-
1316	20105947	SD Negeri Kalibata 04 Pagi.	40.012.200.706	-	18.458.514	-	-	-	18.458.514	18.458.514	-
1317	20105951	SD Negeri Kalibata 11 Pagi.	40.012.200.731	3.192.772	17.024.437	-	-	-	17.024.437	17.024.437	-
1318	20102150	SD Negeri Rawajati 03 Pagi	40.012.200.773	-	124.596.896	-	-	-	124.596.896	124.596.896	-
1319	20102149	SD Negeri Rawajati 05 Pagi	40.012.200.781	1.012.147	43.269.441	-	-	-	43.269.441	43.269.441	-
1320	20102148	SD Negeri Rawajati 06 Pagi.	40.012.200.790	16.518.364	648.934	-	-	-	648.934	648.934	-
1321	20102161	SD Negeri Rawajati 07 Pagi.	40.012.200.803	1.528.893	3.102.583	-	-	-	3.102.583	3.102.583	-
1322	20106183	SD Negeri Rawajati 08 Pagi	40.012.200.811	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	20102192	SD Negeri Pengadegan 03 Pagi	40.012.200.838	-	28.496.564	-	-	-	28.496.564	28.496.564	-
1324	20102173	SD Negeri Pengadegan 07 Pagi	40.012.200.862	-	485.401	-	-	-	485.401	485.401	-
1325	20103112	SD Negeri Cikoko 01 Pagi.	40.012.200.889	44.898.098	18.969.215	-	-	-	18.969.215	18.969.215	-
1326	20109302	SD Negeri Cikoko 03 Pagi	40.012.200.897	4.295.000	7.235.689	-	-	-	7.235.689	7.235.689	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1327	20106014	SD Negeri Kuningan Barat 01 Pagi	40.012.200.919	500.000	2.400.668	-	-	-	2.400.668	2.400.668	-
1328	20102298	SD Negeri Kuningan Barat 03 Pagi.	40.012.200.927	9.444.333	1.438.712	-	-	-	1.438.712	1.438.712	-
1329	20106016	SD Negeri Kuningan Barat 05	40.012.200.935	2.709.700	-	-	-	-	-	-	-
1330	20106032	SD Negeri Mampang Prapatan 01 Pagi	40.012.200.943	23.784.000	50.876.067	-	-	-	50.876.067	50.876.067	-
1331	20102269	SD Negeri Mampang Prapatan 02 Pagi.	40.012.200.951	19.748.572	54.455.352	-	-	-	54.455.352	54.455.352	-
1332	20102268	SD Negeri Mampang Prapatan 03 Pagi.	40.012.200.960	33.545.637	17.483.668	-	-	-	17.483.668	17.483.668	-
1333	20106035	SD Negeri Mampang Prapatan 05 Pagi	40.012.200.978	8.664.086	11.648.860	-	-	-	11.648.860	11.648.860	-
1334	20106108	SD Negeri Pela Mampang 01 PG	40.012.200.986	71.428.286	1.107.706	-	-	-	1.107.706	1.107.706	-
1335	20106110	SD Negeri Pela Mampang 03 Pagi	40.012.201.001	8.120.682	23.620.920	-	-	-	23.620.920	23.620.920	-
1336	20106113	SD Negeri Pela Mampang 05 Pagi	40.012.201.010	9.234.621	51.309.967	-	-	-	51.309.967	51.309.967	-
1337	20106114	SD Negeri Pela Mampang 07	40.012.201.036	34.869.735	8.916.215	-	-	-	8.916.215	8.916.215	-
1338	20102362	SD Negeri Pela Mampang 09	40.012.201.052	-	3.977.673	-	-	-	3.977.673	3.977.673	-
1339	20106117	SD Negeri Pela Mampang 11 Pagi.	40.012.201.079	5.084.651	1.022.611	-	-	-	1.022.611	1.022.611	-
1340	20106118	SD Negeri Pela Mampang 12 Pagi.	40.012.201.087	35.732.021	150.000	-	-	-	150.000	150.000	-
1341	20102358	SD Negeri Pela Mampang 13 Pagi	40.012.201.095	9.480.517	14.628.110	-	-	-	14.628.110	14.628.110	-
1342	20106119	SD Negeri Pela Mampang 14 Pagi	40.012.201.109	-	4.468.701	-	-	-	4.468.701	4.468.701	-
1343	20102203	SD Negeri Tegal Parang 01 Pagi	40.012.201.117	9.762.850	17.763.634	-	-	-	17.763.634	17.763.634	-
1344	20102201	SD Negeri Tegal Parang 05	40.012.201.133	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	20102200	SD Negeri Tegal Parang 06 Pagi.	40.012.201.141	50.416.698	2.834.455	-	-	-	2.834.455	2.834.455	-
1346	20103134	SD Negeri Bangka 01 Pagi	40.012.201.168	26.539.189	50.469.596	-	-	-	50.469.596	50.469.596	-
1347	20105813	SD Negeri Bangka 03 Pagi	40.012.201.176	14.911.380	26.884.705	-	-	-	26.884.705	26.884.705	-
1348	20103146	SD Negeri Bangka 05 Pagi	40.012.201.184	6.479.009	4.538.190	-	-	-	4.538.190	4.538.190	-
1349	20106076	SD Negeri Pasar Minggu 01 Pagi	40.012.201.214	-	320.000	-	-	-	320.000	320.000	-
1350	20106077	SD Negeri Pasar Minggu 02 Pagi	40.012.201.222	-	11.603.475	-	-	-	11.603.475	11.603.475	-
1351	20106078	SD Negeri Pasar Minggu 03 Pagi	40.012.201.231	-	5.907.311	-	-	-	5.907.311	5.907.311	-
1352	20103103	SD Negeri Cilandak Timur 02 PT	40.012.201.273	16.420.800	-	-	-	-	-	-	-
1353	20103116	SD Negeri Cilandak Timur 03 Pagi	40.012.201.281	8.316.450	38.681.354	-	-	-	38.681.354	38.681.354	-
1354	20103118	SD Negeri Cilandak Timur 05 Pagi	40.012.201.303	-	6.100.226	-	-	-	6.100.226	6.100.226	-
1355	20105942	SD Negeri JATI PADANG 01 Pagi	40.012.201.320	280.000	8.798.593	-	-	-	8.798.593	8.798.593	-
1356	20102337	SD Negeri Pejaten Timur 02 PT	40.012.201.346	-	30.944.326	-	-	-	30.944.326	30.944.326	-
1357	20106094	SD Negeri Pejaten Timur 04 PT	40.012.201.354	-	952.658	-	-	-	952.658	952.658	-
1358	20102334	SD Negeri Pejaten Timur 05 Pagi	40.012.201.362	-	5.604.200	-	-	-	5.604.200	5.604.200	-
1359	20102332	SD Negeri Pejaten Timur 06 Petang	40.012.201.371	-	4.160.917	-	-	-	4.160.917	4.160.917	-
1360	20106099	SD Negeri Pejaten Timur 11 Pagi	40.012.201.389	4.395.669	13.242.450	-	-	-	13.242.450	13.242.450	-
1361	20106103	SD Negeri Pejaten Timur 17 Pagi	40.012.201.397	-	320.019	-	-	-	320.019	320.019	-
1362	20106107	SD Negeri Pejaten Timur 22 Pagi	40.012.201.419	-	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2.880.000	-
1363	20106084	SD Negeri Pejaten Barat 05 Pagi.	40.012.201.443	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	20106085	SD Negeri Pejaten Barat 06 Pagi	40.012.201.451	-	6.744.891	-	-	-	6.744.891	6.744.891	-
1365	20106087	SD Negeri Pejaten Barat 08 Pagi	40.012.201.478	9.437.777	16.002.556	-	-	-	16.002.556	16.002.556	-
1366	20106088	SD Negeri Pejaten Barat 09 Pagi	40.012.201.486	-	343.733	-	-	-	343.733	343.733	-
1367	20106089	SD Negeri Pejaten Barat 10 Pagi	40.012.201.494	20.904.000	25.117.426	-	-	-	25.117.426	25.117.426	-
1368	20102134	SD Negeri Ragunan 01	40.012.201.516	14.501.482	18.674.938	-	-	-	18.674.938	18.674.938	-
1369	20102145	SD Negeri Ragunan 07 Pagi	40.012.201.524	-	13.236.225	-	-	-	13.236.225	13.236.225	-
1370	20103067	SD Negeri Ragunan 11	40.012.201.541	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	20105989	SD Negeri Kebagusan 04 Pagi	40.012.201.559	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	20105830	SDN Cilandak Barat 01	40.012.201.761	-	2.083.380	-	-	-	2.083.380	2.083.380	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1373	20103106	SDN Cilandak Barat 04	40.012.201.770	-	26.978.643	-	-	-	26.978.643	26.978.643	-
1374	20105834	SDN Cilandak Barat 08	40.012.201.788	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	20105837	SDN Cilandak Barat 12	40.012.201.796	-	3.418.559	-	-	-	3.418.559	3.418.559	-
1376	20105838	SDN Cilandak Barat 13	40.012.201.800	-	4.469.115	-	-	-	4.469.115	4.469.115	-
1377	20105840	SDN Cilandak Barat 15	40.012.201.818	-	44.672	-	-	-	44.672	44.672	-
1378	20105841	SDN Cilandak Barat 17	40.012.201.826	320.000	15.286.950	-	-	-	15.286.950	15.286.950	-
1379	20105851	SDN Cipete Selatan 01	40.012.201.834	-	16.412.371	-	-	-	16.412.371	16.412.371	-
1380	20105855	SDN Cipete Selatan 05	40.012.201.842	-	10.667.625	-	-	-	10.667.625	10.667.625	-
1381	20105884	SDN Gandaria Selatan 01	40.012.201.851	-	21.581.393	-	-	-	21.581.393	21.581.393	-
1382	20106020	SDN Lebak Bulus 02	40.012.201.877	22.296.983	56.644.213	-	-	-	56.644.213	56.644.213	-
1383	20106147	SDN Pondok Labu 03	40.012.201.907	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	20106148	SDN Pondok Labu 05	40.012.201.915	-	15.339.535	-	-	-	15.339.535	15.339.535	-
1385	20106155	SDN Pondok Labu 12	40.012.201.958	-	75.093.980	-	-	-	75.093.980	75.093.980	-
1386	20106159	SDN Pondok Labu 16	40.012.201.966	1.280.000	9.012.410	-	-	-	9.012.410	9.012.410	-
1387	20105831	SDN Cilandak Barat 03	40.012.201.974	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	20105833	SDN Cilandak Barat 07	40.012.201.991	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	20105853	SDN Cipete Selatan 03	40.012.202.024	5.280.000	9.915.680	-	-	-	9.915.680	9.915.680	-
1390	20105885	SDN Gandaria Selatan 03	40.012.202.032	-	8.175.375	-	-	-	8.175.375	8.175.375	-
1391	20106019	SDN Lebak Bulus 01	40.012.202.041	30.836.250	666.358	-	-	-	666.358	666.358	-
1392	20106025	SDN Lebak Bulus 07	40.012.202.059	-	378.400	-	-	-	378.400	378.400	-
1393	20106022	SDN Lebak Bulus 04	40.012.202.067	100.945.981	175.940.175	-	-	-	175.940.175	175.940.175	-
1394	20106021	SDN Lebak Bulus 03	40.012.202.075	-	2.193.467	-	-	-	2.193.467	2.193.467	-
1395	20106145	SDN Pondok Labu 01	40.012.202.083	-	48.105.523	-	-	-	48.105.523	48.105.523	-
1396	20106146	SDN Pondok Labu 02	40.012.202.091	-	4.150.002	-	-	-	4.150.002	4.150.002	-
1397	20106154	SDN Pondok Labu 11	40.012.202.105	-	560.961	-	-	-	560.961	560.961	-
1398	20103114	SDN Ciganjur 05	40.012.202.172	5.618.885	4.013.541	-	-	-	4.013.541	4.013.541	-
1399	20105847	SDN Cipadak 02	40.012.202.181	-	10.953.990	-	-	-	10.953.990	10.953.990	-
1400	20105850	SDN Cipadak 06	40.012.202.199	31.759.997	12.772.697	-	-	-	12.772.697	12.772.697	-
1401	20103022	SDN Jagakarsa 10	40.012.202.202	13.140.777	4.050.277	-	-	-	4.050.277	4.050.277	-
1402	20102278	SDN Lenteng Agung 03	40.012.202.229	11.411.200	59.328.289	-	-	-	59.328.289	59.328.289	-
1403	20106028	SDN Lenteng Agung 06	40.012.202.237	34.366.000	49.227.575	-	-	-	49.227.575	49.227.575	-
1404	20102275	SDN Lenteng Agung 07	40.012.202.245	44.932.154	4.802.599	-	-	-	4.802.599	4.802.599	-
1405	20106029	SDN Lenteng Agung 09	40.012.202.261	-	3.836	-	-	-	3.836	3.836	-
1406	20102247	SDN Srengseng Sawah 01	40.012.202.270	-	20.698	-	-	-	20.698	20.698	-
1407	20106189	SDN Srengseng Sawah 03	40.012.202.288	7.858.900	3.898.554	-	-	-	3.898.554	3.898.554	-
1408	20102244	SDN Srengseng Sawah 10	40.012.202.300	-	2.107.512	-	-	-	2.107.512	2.107.512	-
1409	20106198	SDN Srengseng Sawah 14	40.012.202.326	40.000	12.452.760	-	-	-	12.452.760	12.452.760	-
1410	20106201	SDN Srengseng Sawah 17	40.012.202.334	-	1.605.309	-	-	-	1.605.309	1.605.309	-
1411	20106202	SDN Tanjung Barat 01	40.012.202.342	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	20102239	SDN Tanjung Barat 03	40.012.202.351	-	11.385.900	-	-	-	11.385.900	11.385.900	-
1413	20106203	SDN Tanjung Barat 05	40.012.202.369	-	321.785	-	-	-	321.785	321.785	-
1414	20102237	SDN Tanjung Barat 07	40.012.202.377	-	9.925.759	-	-	-	9.925.759	9.925.759	-
1415	20103151	SDN Ciganjur 01	40.012.202.393	-	7.683.866	-	-	-	7.683.866	7.683.866	-
1416	20103133	SDN Ciganjur 02	40.012.202.407	-	13.288.200	-	-	-	13.288.200	13.288.200	-
1417	20105828	SDN Ciganjur 04	40.012.202.415	-	19.538.769	-	-	-	19.538.769	19.538.769	-
1418	20105846	SDN Cipadak 01	40.012.202.423	-	19.195	-	-	-	19.195	19.195	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1419	20105929	SDN Jagakarsa 01	40.012.202.466	648.000	10.102	-	-	-	10.102	10.102	-
1420	20105930	SDN Jagakarsa 02	40.012.202.474	-	4.668.428	-	-	-	4.668.428	4.668.428	-
1421	20105931	SDN Jagakarsa 03	40.012.202.482	10.332.000	11.901.274	-	-	-	11.901.274	11.901.274	-
1422	20105932	SDN Jagakarsa 04	40.012.202.491	-	4.529.500	-	-	-	4.529.500	4.529.500	-
1423	20105933	SDN Jagakarsa 05	40.012.202.504	-	105.432.030	-	-	-	105.432.030	105.432.030	-
1424	20105934	SDN Jagakarsa 06	40.012.202.512	-	26.520.277	-	-	-	26.520.277	26.520.277	-
1425	20105936	SDN Jagakarsa 08	40.012.202.539	-	50.850.550	-	-	-	50.850.550	50.850.550	-
1426	20105937	SDN Jagakarsa 09	40.012.202.547	-	23.166.350	-	-	-	23.166.350	23.166.350	-
1427	20105939	SDN Jagakarsa 12	40.012.202.563	-	29.848.472	-	-	-	29.848.472	29.848.472	-
1428	20106026	SDN Lenteng Agung 01	40.012.202.580	-	90.748.190	-	-	-	90.748.190	90.748.190	-
1429	20102276	SDN Lenteng Agung 05	40.012.202.598	-	31.242.456	-	-	-	31.242.456	31.242.456	-
1430	20102271	SDN Lenteng Agung 11	40.012.202.610	19.584.000	38.923.195	-	-	-	38.923.195	38.923.195	-
1431	20106188	SDN Srengseng Sawah 02	40.012.202.628	-	317.448	-	-	-	317.448	317.448	-
1432	20102246	SDN Srengseng Sawah 04	40.012.202.636	64.669.480	57.346.550	-	-	-	57.346.550	57.346.550	-
1433	20106199	SDN Srengseng Sawah 15	40.012.202.661	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	20102238	SDN Tanjung Barat 04	40.012.202.679	-	101.518.304	-	-	-	101.518.304	101.518.304	-
1435	20102420	SMP Negeri 104 Jakarta	40.012.202.806	147.374.307	9.494.290	-	-	-	9.494.290	9.494.290	-
1436	20102471	SMP Negeri 29 Jakarta	40.012.202.822	31.007.529	44.714.194	-	-	-	44.714.194	44.714.194	-
1437	20102522	SMP Negeri 19 Jakarta	40.012.202.849	13.414.012	102.312.967	-	-	-	102.312.967	102.312.967	-
1438	20102402	SMP Negeri 11 Jakarta	40.012.202.857	17.622.079	93.060.253	-	-	-	93.060.253	93.060.253	-
1439	20106195	SDN Srengseng Sawah 11	40.012.202.938	-	38.844.587	-	-	-	38.844.587	38.844.587	-
1440	20102210	SMA Negeri 46	40.012.203.136	376.531	802.579.267	-	-	-	802.579.267	802.579.267	-
1441	20102574	SMA Negeri 6	40.012.203.144	354.038.601	442.140.081	-	-	-	442.140.081	442.140.081	-
1442	20102570	SMA Negeri 70	40.012.203.152	585.995.005	1.073.545.805	-	-	-	1.073.545.805	1.073.545.805	-
1443	20102501	SMP Negeri 154 Jakarta	40.012.203.225	22.202.688	114.323.569	-	-	-	114.323.569	114.323.569	-
1444	20102494	SMP Negeri 56 Jakarta	40.012.203.233	182.286.749	6.238.233	-	-	-	6.238.233	6.238.233	-
1445	20102515	SMP Negeri 238 Jakarta	40.012.203.250	20.387	5.240.859	-	-	-	5.240.859	5.240.859	-
1446	20102498	SMP Negeri 163 Jakarta	40.012.203.268	-	50.180.555	-	-	-	50.180.555	50.180.555	-
1447	20102520	SMP Negeri 212 Jakarta	40.012.203.276	9.990.000	29.670.300	-	-	-	29.670.300	29.670.300	-
1448	20102508	SMP Negeri 124 Jakarta	40.012.203.292	59.676.445	59.260.892	-	-	-	59.260.892	59.260.892	-
1449	20102514	SMP Negeri 239	40.012.203.306	966.120	25.399.620	-	-	-	25.399.620	25.399.620	-
1450	20102475	SMP Negeri 254	40.012.203.314	-	184.689	-	-	-	184.689	184.689	-
1451	20102509	SMP Negeri 12 Jakarta	40.012.203.322	156.098.904	77.742.761	-	-	-	77.742.761	77.742.761	-
1452	20102507	SMP Negeri 13 Jakarta	40.012.203.331	38.958.789	133.055.914	-	-	-	133.055.914	133.055.914	-
1453	20102497	SMP Negeri 240 Jakarta	40.012.203.349	53.112.092	132.559.543	-	-	-	132.559.543	132.559.543	-
1454	20102477	SMP Negeri 250 Jakarta	40.012.203.357	141.621.782	179.886.307	-	-	-	179.886.307	179.886.307	-
1455	20102489	SMP Negeri 68	40.012.203.365	26.661.637	57.671.108	-	-	-	57.671.108	57.671.108	-
1456	20102483	SMP Negeri 98	40.012.203.373	4.860.000	79.470.312	-	-	-	79.470.312	79.470.312	-
1457	20102506	SMP Negeri 131	40.012.203.381	26.400.000	44.636.135	-	-	-	44.636.135	44.636.135	-
1458	20109379	SMPT Kec. Jagakarsa (SMPN 131)	40.012.208.430	-	13.005.995	-	-	-	13.005.995	13.005.995	-
1459	20102513	SMP Negeri 175	40.012.203.403	20.465.231	22.548.343	-	-	-	22.548.343	22.548.343	-
1460	20102524	SMP Negeri 182 Jakarta	40.012.203.420	954.107	41.266.879	-	-	-	41.266.879	41.266.879	-
1461	20102480	SMP Negeri 41 Jakarta	40.012.203.438	104.988.995	130.260.895	-	-	-	130.260.895	130.260.895	-
1462	20109503	SMP Terbuka Pasar Minggu	40.012.208.448	-	23.327.350	-	-	-	23.327.350	23.327.350	-
1463	20102482	SMP Negeri 46 Jakarta	40.012.203.446	36.185.273	83.244.339	-	-	-	83.244.339	83.244.339	-
1464	20102419	SMP Negeri 107 Jakarta	40.012.203.454	3.211.382	38.039.855	-	-	-	38.039.855	38.039.855	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1465	20102519	SMP Negeri 218 Jakarta	40.012.203.462	215.331.474	52.763.681	-	-	-	52.763.681	52.763.681	-
1466	20102517	SMP Negeri 227 Jakarta	40.012.203.471	12.362.075	24.498.643	-	-	-	24.498.643	24.498.643	-
1467	20102496	SMP Negeri 242	40.012.203.489	31.886.745	48.715.555	-	-	-	48.715.555	48.715.555	-
1468	20102476	SMP Negeri 253	40.012.203.501	-	6.954.190	-	-	-	6.954.190	6.954.190	-
1469	20102472	SMP Negeri 276	40.012.203.519	-	19.871.343	-	-	-	19.871.343	19.871.343	-
1470	20105944	SD Negeri JATI PADANG 05 Pagi	40.012.203.535	79.711.280	-	-	-	-	-	-	-
1471	20106174	SD Negeri Ragunan 12	40.012.203.543	36.000	26.628.069	-	-	-	26.628.069	26.628.069	-
1472	20106069	SD Negeri Pancoran 03 Pagi	40.012.203.551	22.085.030	15.746.120	-	-	-	15.746.120	15.746.120	-
1473	20105949	SD Negeri Kalibata 07 Pagi.	40.012.203.560	8.689.546	36.577.902	-	-	-	36.577.902	36.577.902	-
1474	20106093	SD Negeri Pejaten Timur 03 Pagi.	40.012.203.594	45.383.672	55.056.571	-	-	-	55.056.571	55.056.571	-
1475	20102466	SMP NEGERI RAGUNAN	40.012.203.683	18.474.200	51.693.588	-	-	-	51.693.588	51.693.588	-
1476	20102214	SMA Negeri 34	40.112.000.136	76.192.867	97.034.427	-	-	-	97.034.427	97.034.427	-
1477	20102484	SMP Negeri 96	40.112.000.241	-	88.767.520	-	-	-	88.767.520	88.767.520	-
1478	20102487	SMP Negeri 85	40.112.000.250	442.739	46.624.059	-	-	-	46.624.059	46.624.059	-
1479	20102467	SMP Negeri 37	40.112.000.276	192.330.237	85.794.007	-	-	-	85.794.007	85.794.007	-
1480	20102602	SMK Negeri 29 Jakarta	40.412.001.404	71.022.105	445.334.364	-	-	-	445.334.364	445.334.364	-
1481	20102600	SMK Negeri 43	40.412.001.439	138.167.496	105.133.809	-	-	-	105.133.809	105.133.809	-
1482	20107319	SMA Negeri 28	40.412.001.455	227.294.129	550.945.109	-	-	-	550.945.109	550.945.109	-
1483	20102576	SMA Negeri Ragunan	40.412.001.587	59.976.922	103.295.638	-	-	-	103.295.638	103.295.638	-
1484	20102578	SMK Negeri 15 Jakarta	40.412.001.609	73.125.054	107.108.168	-	-	-	107.108.168	107.108.168	-
1485	20102565	SMA Negeri 86	40.412.001.668	293.206.031	160.637.631	-	-	-	160.637.631	160.637.631	-
1486	20102564	SMA Negeri 87	40.412.001.757	292.855.374	284.469.615	-	-	-	284.469.615	284.469.615	-
1487	20107320	SMA Negeri 79	40.412.001.765	650.684.643	465.916.951	-	-	-	465.916.951	465.916.951	-
1488	20102585	SMK Negeri 28	40.412.001.811	77.294.550	104.134.563	-	-	-	104.134.563	104.134.563	-
1489	20109246	SMK Negeri 62	40.412.002.010	3.477.414	151.732.217	-	-	-	151.732.217	151.732.217	-
1490	20101528	SMP Negeri 220	41.112.024.342	139.891.166	157.543.299	-	-	-	157.543.299	157.543.299	-
1491	20102599	SMK Negeri 47 Jakarta	40.412.010.985	321.362.549	496.831.662	-	-	-	496.831.662	496.831.662	-
1492	20102217	SMA Negeri 29	40.412.010.381	590.953.580	885.982.005	-	-	-	885.982.005	885.982.005	-
1493	20102212	SMA Negeri 38	40.412.010.420	412.525.196	537.839.586	-	-	-	537.839.586	537.839.586	-
1494	20102215	SMA Negeri 32	40.412.010.438	255.829.125	550.602.875	-	-	-	550.602.875	550.602.875	-
1495	20102581	SMK Negeri 32 Jakarta	40.412.010.446	273.255.603	626.668.005	-	-	-	626.668.005	626.668.005	-
1496	20102569	SMA Negeri 74	40.412.010.454	106.723.514	555.225.412	-	-	-	555.225.412	555.225.412	-
1497	20102562	SMA Negeri 97	40.412.010.462	392.066.446	551.426.831	-	-	-	551.426.831	551.426.831	-
1498	20102568	SMA Negeri 8	40.412.010.471	588.935.643	1.131.767.465	-	-	-	1.131.767.465	1.131.767.465	-
1499	20102573	SMA Negeri 60	40.412.010.489	195.950	184.037.076	-	-	-	184.037.076	184.037.076	-
1500	20102193	SMA Negeri 47	40.412.010.497	777.822.415	1.256.661.150	-	-	-	1.256.661.150	1.256.661.150	-
1501	20102230	SMA Negeri 108	40.412.010.501	137.339.585	165.110.460	-	-	-	165.110.460	165.110.460	-
1502	20102571	SMA Negeri 66	40.412.010.519	42.806.186	193.546.405	-	-	-	193.546.405	193.546.405	-
1503	20102592	SMA Negeri 49	40.412.010.527	453.750.154	473.141.774	-	-	-	473.141.774	473.141.774	-
1504	20102587	SMKNegeri 20	40.412.010.543	-	131.416.140	-	-	-	131.416.140	131.416.140	-
1505	20112443	SMK Negeri 63	40.412.010.691	78.946.324	47.693.074	-	-	-	47.693.074	47.693.074	-
1506	20102218	SMA Negeri 26	40.412.010.764	225.190.518	261.423.325	-	-	-	261.423.325	261.423.325	-
1507	20102563	SMA Negeri 90	40.412.010.781	36.710.943	119.482.943	-	-	-	119.482.943	119.482.943	-
1508	20102601	SMK Negeri 37 Jakarta	40.412.010.870	79.869.290	153.582.990	-	-	-	153.582.990	153.582.990	-
1509	20102579	SMK Negeri 6 Jakarta	40.412.010.934	-	306.276.981	-	-	-	306.276.981	306.276.981	-
1510	20102586	SMK Negeri 25 Jakarta	40.412.010.942	164.600.711	342.504.949	-	-	-	342.504.949	342.504.949	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1511	20105321	SDN Kebon Jeruk 17 Pagi.	41.112.024.709	5.386.744	2.257.917	-	-	-	2.257.917	2.257.917	-
1512	20105972	SDN Keb. Lama Selatan 19	41.112.021.939	-	5.372.028	-	-	-	5.372.028	5.372.028	-
1513	20101503	SMK Negeri 13	41.112.023.621	52.518.510	334.616.190	-	-	-	334.616.190	334.616.190	-
1514	20105898	SDN Grogol Selatan 01	41.112.023.648	-	8.233.328	-	-	-	8.233.328	8.233.328	-
1515	20105913	SDN Grogol Utara 09	41.112.023.711	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	20102936	SDN Grogol Utara 10	41.112.023.729	-	29.028.200	-	-	-	29.028.200	29.028.200	-
1517	20105914	SDN Grogol Utara 11	41.112.023.737	-	3.732.840	50.000	-	-	3.782.840	3.782.840	-
1518	20105966	SDN Keb. Lama Selatan 11	41.112.023.745	-	38.048.204	-	-	-	38.048.204	38.048.204	-
1519	20105970	SDN Keb. Lama Selatan 16	41.112.023.770	-	11.140	-	-	-	11.140	11.140	-
1520	20105980	SDN Keb. Lama Utara 07	41.112.023.796	-	8.762	-	-	-	8.762	8.762	-
1521	20105984	SDN Keb. Lama Utara 11	41.112.023.818	120.480.002	119.605.888	-	-	-	119.605.888	119.605.888	-
1522	20105986	SDN Keb. Lama Utara 13	41.112.023.826	29.128.198	2.406.145	-	-	-	2.406.145	2.406.145	-
1523	20105870	SDN Cipulir 01	41.112.023.851	-	3.053.570	-	-	-	3.053.570	3.053.570	-
1524	20105872	SDN Cipulir 03	41.112.023.869	-	4.778.469	-	-	-	4.778.469	4.778.469	-
1525	20102952	SDN Cipulir 04	41.112.023.877	-	7.325.950	-	-	-	7.325.950	7.325.950	-
1526	20105874	SDN Cipulir 05	41.112.023.885	-	40	-	-	-	40	40	-
1527	20105878	SDN Cipulir 09	41.112.023.893	-	7.565.674	-	-	-	7.565.674	7.565.674	-
1528	20102946	SDN Cipulir 10	41.112.023.907	-	3.728.741	-	-	-	3.728.741	3.728.741	-
1529	20105879	SDN Cipulir 11	41.112.023.915	-	12.202.825	-	-	-	12.202.825	12.202.825	-
1530	20102742	SDN Grogol Selatan 08	41.112.023.940	-	14.425.352	-	-	-	14.425.352	14.425.352	-
1531	20102921	SDN Grogol Selatan 09	41.112.023.958	50.050	-	-	-	-	-	-	-
1532	20105904	SDN Grogol Selatan 13	41.112.023.974	-	10.880.034	-	-	-	10.880.034	10.880.034	-
1533	20102915	SDN Grogol Selatan 15	41.112.023.991	-	643.200	-	-	-	643.200	643.200	-
1534	20105514	SDN Sukabumi Selatan 01 Pagi.	41.112.024.008	59.562.800	3.227.774	-	-	-	3.227.774	3.227.774	-
1535	20105517	SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi.	41.112.024.016	21.617.900	3.841.750	-	-	-	3.841.750	3.841.750	-
1536	20105518	SDN Sukabumi Selatan 07 Pagi.	41.112.024.024	89.688.141	6.417.341	-	-	-	6.417.341	6.417.341	-
1537	20105522	SDN Sukabumi Utara 07 Pagi.	41.112.024.032	19.777.538	19.332.984	-	-	-	19.332.984	19.332.984	-
1538	20105523	SDN Sukabumi Utara 08 Pagi.	41.112.024.041	7.560.936	206.657	-	-	-	206.657	206.657	-
1539	20105416	SDN Meruya Utara 07 Pagi.	41.112.024.059	6.283.231	20.389.131	-	-	-	20.389.131	20.389.131	-
1540	20105418	SDN Meruya Utara 09 Pagi.	41.112.024.067	26.734.100	107.765	-	-	-	107.765	107.765	-
1541	20105506	SDN Srengseng 01 Pagi.	41.112.024.083	39.340.321	3.606.662	-	-	-	3.606.662	3.606.662	-
1542	20105510	SDN Srengseng 05 Pagi.	41.112.024.105	6.135.530	25.001.727	-	-	-	25.001.727	25.001.727	-
1543	20101447	SDN Meruya Utara 13 Pagi.	41.112.024.113	8.960.000	9.199.300	-	-	-	9.199.300	9.199.300	-
1544	20102485	SMP Negeri 87	41.112.024.130	44.527.271	32.397.888	-	-	-	32.397.888	32.397.888	-
1545	20102499	SMP Negeri 161	41.112.024.156	35.435.296	166.890.921	-	-	-	166.890.921	166.890.921	-
1546	20102511	SMP Negeri 164	41.112.024.164	87.962.497	61.801.259	-	-	-	61.801.259	61.801.259	-
1547	20102469	SMP Negeri 31	41.112.024.181	-	357.117.012	-	-	-	357.117.012	357.117.012	-
1548	20101568	SMP Negeri 191	41.112.024.199	136.234.159	196.620.124	-	-	-	196.620.124	196.620.124	-
1549	20101532	SMP Negeri 207	41.112.024.202	48.836.594	293.169.775	-	-	-	293.169.775	293.169.775	-
1550	20101533	SMP Negeri 206	41.112.024.211	50.199.643	176.380.543	-	-	-	176.380.543	176.380.543	-
1551	20101570	SMP Negeri 189	41.112.024.237	125.721.050	133.118.050	-	-	-	133.118.050	133.118.050	-
1552	20102495	SMP Negeri 48	41.112.024.245	48.669.093	133.949.753	-	-	-	133.949.753	133.949.753	-
1553	20101540	SMP Negeri 75	41.112.024.261	100.171.549	1.450.977	-	-	-	1.450.977	1.450.977	-
1554	20102527	SMP Negeri 110	41.112.024.270	87.261.514	58.935.710	120.000	-	-	59.055.710	59.055.710	-
1555	20101556	SMP Negeri 105	41.112.024.288	14.635.163	135.737.753	-	-	-	135.737.753	135.737.753	-
1556	20102516	SMP Negeri 235	41.112.024.296	13.024.058	47.279.857	-	-	-	47.279.857	47.279.857	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1557	20102525	SMP Negeri 178	41.112.024.300	21.583.100	42.369.787	-	-	-	42.369.787	42.369.787	-
1558	20102526	SMP Negeri 177	41.112.024.326	-	13.507.630	-	-	-	13.507.630	13.507.630	-
1559	20101551	SMP Negeri 127	41.112.024.334	-	23.056.820	-	-	-	23.056.820	23.056.820	-
1560	20109212	SMP Negeri 229	41.112.024.351	132.543.673	137.736.223	-	-	-	137.736.223	137.736.223	-
1561	20101535	SMP Negeri 271	41.112.024.369	6.392.309	61.013.579	-	-	-	61.013.579	61.013.579	-
1562	20101566	SMP Negeri 197	41.112.024.385	50.337.233	88.637.025	-	-	-	88.637.025	88.637.025	-
1563	20101530	SMP Negeri 219	41.112.024.393	136.287.302	310.306.483	-	-	-	310.306.483	310.306.483	-
1564	20101531	SMP Negeri 215	41.112.024.407	6.635.162	60.691.632	-	-	-	60.691.632	60.691.632	-
1565	20101627	SMA Negeri 101	41.112.024.415	-	176.197.200	-	-	-	176.197.200	176.197.200	-
1566	20101499	SMK Negeri 45	41.112.024.466	57.940.108	101.153.414	-	-	-	101.153.414	101.153.414	-
1567	20106125	SDN Pesanggrahan 05	41.112.024.491	-	3.202.482	-	-	-	3.202.482	3.202.482	-
1568	20106135	SDN Petukangan Selatan 05	41.112.024.512	-	20.595.536	-	-	-	20.595.536	20.595.536	-
1569	20102190	SDN Petukangan Utara 02	41.112.024.521	-	960.000	-	-	-	960.000	960.000	-
1570	20106142	SDN Petukangan Utara 07	41.112.024.555	55.200	23.304.332	-	-	-	23.304.332	23.304.332	-
1571	20106220	SDN Ulujami 05	41.112.024.563	-	14.195.168	-	-	-	14.195.168	14.195.168	-
1572	20105186	SDN Duri Kepa 01 Pagi.	41.112.024.571	6.768.236	4.007.239	-	-	-	4.007.239	4.007.239	-
1573	20105188	SDN Duri Kepa 05 Pagi.	41.112.024.580	11.500	12.378	-	-	-	12.378	12.378	-
1574	20102119	SDN Duri Kepa 11 Pagi.	41.112.024.598	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	20102085	SDN Duri Kepa 16 Pagi.	41.112.024.610	4.227.405	440.791	-	-	-	440.791	440.791	-
1576	20105194	SDN Duri Kepa 17 Pagi.	41.112.024.628	-	12.108.460	-	-	-	12.108.460	12.108.460	-
1577	20105308	SDN Kebon Jeruk 01 Pagi.	41.112.024.636	785.887	9.088.625	-	-	-	9.088.625	9.088.625	-
1578	20105309	SDN Kebon Jeruk 02 Pagi.	41.112.024.644	3.425.407	131	-	-	-	131	131	-
1579	20101994	SDN Kebon Jeruk 06 Pagi.	41.112.024.652	12.945.289	357.417	-	-	-	357.417	357.417	-
1580	20101996	SDN Kebon Jeruk 04 Pagi.	41.112.024.661	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	20105316	SDN Kebon Jeruk 11 Pagi.	41.112.024.687	92.277	1.760.068	-	-	-	1.760.068	1.760.068	-
1582	20102017	SDN Kebon Jeruk 15 Pagi.	41.112.024.695	33.015	4.480.143	-	-	-	4.480.143	4.480.143	-
1583	20105338	SDN Kedoya Selatan 01 Pagi.	41.112.024.717	18.608.000	47.318.266	-	-	-	47.318.266	47.318.266	-
1584	20105340	SDN Kedoya Selatan 04 Pagi.	41.112.024.725	8.220.129	16.243.480	-	-	-	16.243.480	16.243.480	-
1585	20101965	SDN Kedoya Utara 01 Pagi.	41.112.024.733	70.924.898	5.440.048	-	-	-	5.440.048	5.440.048	-
1586	20105344	SDN Kedoya Utara 03 Pagi.	41.112.024.741	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	20105346	SDN Kedoya Utara 04 Pagi.	41.112.024.750	-	3.093.507	-	-	-	3.093.507	3.093.507	-
1588	20105349	SDN Kelapa Dua 01 Pagi.	41.112.024.768	72.440.800	70.680	-	-	-	70.680	70.680	-
1589	20101984	SDN Kelapa Dua 03 Pagi.	41.112.024.776	-	10.419.000	-	-	-	10.419.000	10.419.000	-
1590	20101982	SDN Kelapa Dua 05 Pagi.	41.112.024.784	-	7.772.600	-	-	-	7.772.600	7.772.600	-
1591	20101981	SDN Kelapa Dua 06 Pagi.	41.112.024.792	10.153.400	1.605.610	-	-	-	1.605.610	1.605.610	-
1592	20105515	SDN Sukabumi Selatan 03 Pagi.	41.112.024.806	9.593.058	63.498	-	-	-	63.498	63.498	-
1593	20105516	SDN Sukabumi Selatan 05 Pagi.	41.112.024.814	24.918.000	6.783.217	-	-	-	6.783.217	6.783.217	-
1594	20105519	SDN Sukabumi Utara 01 Pagi.	41.112.024.822	4.967.174	33.791	-	-	-	33.791	33.791	-
1595	20101188	SDN Sukabumi Utara 03 PT.	41.112.024.831	-	9.124.510	-	-	-	9.124.510	9.124.510	-
1596	20105521	SDN Sukabumi Utara 05 Pagi.	41.112.024.857	335.973	1.441.513	-	-	-	1.441.513	1.441.513	-
1597	20105187	SDN Duri Kepa 03 Pagi.	41.112.024.873	3.121.410	12.122.600	-	-	-	12.122.600	12.122.600	-
1598	20105314	SDN Kebon Jeruk 08 Pagi.	41.112.024.881	3.649	4.635	-	-	-	4.635	4.635	-
1599	20105189	SDN Duri Kepa 07 Pagi.	41.112.024.890	94.149.337	10.218.794	-	-	-	10.218.794	10.218.794	-
1600	20105348	SDN Kedoya Utara 09 Pagi.	41.112.024.911	129.505.263	56.483.913	-	-	-	56.483.913	56.483.913	-
1601	20105977	SDN Keb. Lama Utara 03	41.112.024.946	-	21.898.943	-	-	-	21.898.943	21.898.943	-
1602	20105961	SDN Keb. Lama Selatan 03	41.112.024.954	26.918.858	10.976.996	-	-	-	10.976.996	10.976.996	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1603	20105964	SDN Keb. Lama Selatan 09	41.112.024.989	-	16.187	-	-	-	16.187	16.187	-
1604	20102914	SDN Grogol Selatan 16	41.112.025.004	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	20105969	SDN Keb. Lama Selatan 14	41.112.025.012	-	1.980.100	-	-	-	1.980.100	1.980.100	-
1606	20105975	SDN Keb. Lama Utara 01	41.112.025.039	-	5.238.700	-	-	-	5.238.700	5.238.700	-
1607	20109299	SDN Pondok Pinang 01	41.112.025.055	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	20106161	SDN Pondok Pinang 02	41.112.025.063	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	20106163	SDN Pondok Pinang 04	41.112.025.080	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	20102180	SDN Pondok Pinang 05	41.112.025.098	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	20105906	SDN Grogol Selatan 17	41.112.025.101	-	4.148.820	-	-	-	4.148.820	4.148.820	-
1612	20105907	SDN Grogol Utara 01	41.112.025.110	-	40.926	-	-	-	40.926	40.926	-
1613	20105909	SDN Grogol Utara 03	41.112.025.128	-	3.043.404	-	-	-	3.043.404	3.043.404	-
1614	20105910	SDN Grogol Utara 04	41.112.025.136	-	8.341.955	-	-	-	8.341.955	8.341.955	-
1615	20106270	SDN Grogol Utara 05	41.112.025.144	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	20105915	SDN Grogol Utara 12	41.112.025.152	-	2.240.000	-	-	-	2.240.000	2.240.000	-
1617	20105916	SDN Grogol Utara 13	41.112.025.161	-	333.511	50.000	-	-	383.511	383.511	-
1618	20105918	SDN Grogol Utara 15	41.112.025.187	-	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.760.000	-
1619	20102144	SDN Pondok Pinang 08	41.112.025.209	-	6.047.895	-	-	-	6.047.895	6.047.895	-
1620	20102140	SDN Pondok Pinang 10	41.112.025.217	-	3.097.500	-	-	-	3.097.500	3.097.500	-
1621	20105814	SDN Bintaro 03	41.112.025.233	-	480.000	-	-	-	480.000	480.000	-
1622	20103139	SDN Bintaro 05	41.112.025.241	4.000	15.272.858	-	-	-	15.272.858	15.272.858	-
1623	20103136	SDN Bintaro 09	41.112.025.250	-	9.863.105	-	-	-	9.863.105	9.863.105	-
1624	20103149	SDN Bintaro 12	41.112.025.268	4.319.000	15.450.931	-	-	-	15.450.931	15.450.931	-
1625	20103159	SDN Bintaro 14	41.112.025.276	200.000	13.409.151	-	-	-	13.409.151	13.409.151	-
1626	20106120	SDN Pesanggrahan 01	41.112.025.284	-	17.252.603	-	-	-	17.252.603	17.252.603	-
1627	20106121	SDN Pesanggrahan 02	41.112.025.292	110.000	-	-	-	-	-	-	-
1628	20106122	SDN Pesanggrahan 03	41.112.025.306	-	103.246.154	-	-	-	103.246.154	103.246.154	-
1629	20106129	SDN Pesanggrahan 09	41.112.025.314	3.100.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-
1630	20106131	SDN Petukangan Selatan 01	41.112.025.322	6.144.000	190.968.715	-	-	-	190.968.715	190.968.715	-
1631	20106132	SDN Petukangan Selatan 02	41.112.025.331	6.423.186	75.352.150	-	-	-	75.352.150	75.352.150	-
1632	20106133	SDN Petukangan Selatan 03	41.112.025.349	127.047	13.819.548	-	-	-	13.819.548	13.819.548	-
1633	20106139	SDN Petukangan Utara 01	41.112.025.357	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	20102184	SDN Petukangan Utara 10	41.112.025.381	13.737.713	3.927.784	-	-	-	3.927.784	3.927.784	-
1635	20102196	SDN Ulujami 01	41.112.025.390	-	3.324.630	-	-	-	3.324.630	3.324.630	-
1636	20102195	SDN Ulujami 02	41.112.025.403	-	1.302.533	-	-	-	1.302.533	1.302.533	-
1637	20102207	SDN Ulujami 04	41.112.025.411	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-
1638	20102208	SDN Ulujami 06	41.112.025.420	-	8.687.409	-	-	-	8.687.409	8.687.409	-
1639	20102209	SDN Ulujami 07	41.112.025.438	-	5.439.802	-	-	-	5.439.802	5.439.802	-
1640	20103143	SDN Bintaro 01	41.112.025.446	-	70.820.226	-	-	-	70.820.226	70.820.226	-
1641	20103140	SDN Bintaro 04	41.112.025.454	-	152.578.755	-	-	-	152.578.755	152.578.755	-
1642	20103137	SDN Bintaro 08	41.112.025.462	-	12.056.518	-	-	-	12.056.518	12.056.518	-
1643	20106140	SDN Petukangan Utara 05	41.112.025.489	4.937.542	182.561.593	-	-	-	182.561.593	182.561.593	-
1644	20108286	SDN Kayu Manis 02	50.012.272.827	757.000	3.279.955	-	-	-	3.279.955	3.279.955	-
1645	20103313	SMA Negeri 50	50.012.274.471	652.002.424	920.282.152	-	-	-	920.282.152	920.282.152	-
1646	20108298	SDN Kebon Manggis 11	50.012.272.690	-	2.466.970	-	-	-	2.466.970	2.466.970	-
1647	20108318	SDN Kebon Manggis 12	50.012.272.703	9.170.319	50.457	-	-	-	50.457	50.457	-
1648	20108849	SDN Utan Kayu Utara 11	50.012.272.711	-	3.360.046	-	-	-	3.360.046	3.360.046	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1649	20108302	SDN Palmeriam 01	50.012.272.720	33.235.832	20.520.664	-	-	-	20.520.664	20.520.664	-
1650	20108303	SDN Palmeriam 02	50.012.272.738	2.775.761	4.320.582	-	-	-	4.320.582	4.320.582	-
1651	20108414	SDN Utan Kayu Selatan 09	50.012.272.746	51.675	18.054.522	-	-	-	18.054.522	18.054.522	-
1652	20108380	SDN Utan Kayu Selatan 03	50.012.272.754	-	1.771.037	-	-	-	1.771.037	1.771.037	-
1653	20108316	SDN Kayu Manis 01	50.012.272.762	-	19.337.547	-	-	-	19.337.547	19.337.547	-
1654	20103415	SDN Utan Kayu Selatan 25	50.012.272.771	31.924.763	10.292.450	-	-	-	10.292.450	10.292.450	-
1655	20108848	SDN Utan Kayu Utara 08	50.012.272.797	19.632.000	22.704.322	-	-	-	22.704.322	22.704.322	-
1656	20108418	SDN Utan Kayu Selatan 13	50.012.272.851	5.088.699	9.957.118	-	-	-	9.957.118	9.957.118	-
1657	20108344	SDN Kebon Manggis 08	50.012.272.886	2.364.644	28.601.595	-	-	-	28.601.595	28.601.595	-
1658	20108421	SDN Utan Kayu Selatan 19	50.012.272.908	23.791.595	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1659	20108288	SDN Kebon Manggis 01	50.012.272.916	-	4.299.595	-	-	-	4.299.595	4.299.595	-
1660	20108378	SDN Utan Kayu Selatan 01	50.012.272.941	12.830.000	3.041.320	-	-	-	3.041.320	3.041.320	-
1661	20103419	SDN Utan Kayu Selatan 18	50.012.272.959	14.475.650	788	-	-	-	788	788	-
1662	20109029	SDN Pisangan Baru 01	50.012.272.967	51.642.326	20.867.948	-	-	-	20.867.948	20.867.948	-
1663	20108844	SDN Utan Kayu Utara 01	50.012.272.983	685	86.829.465	-	-	-	86.829.465	86.829.465	-
1664	20103418	SDN Utan Kayu Selatan 20	50.012.272.991	2.652.850	11.225.301	-	-	-	11.225.301	11.225.301	-
1665	20108416	SDN Utan Kayu Selatan 11	50.012.273.009	-	26.607.776	-	-	-	26.607.776	26.607.776	-
1666	20108419	SDN Utan Kayu Selatan 14	50.012.273.017	-	646.665	-	-	-	646.665	646.665	-
1667	20108309	SDN Pisangan Baru 07	50.012.273.025	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	20108422	SDN Utan Kayu Selatan 21	50.012.273.033	6.504.605	903.728	-	-	-	903.728	903.728	-
1669	20108382	SDN Utan Kayu Selatan 05	50.012.273.041	-	-	-	-	-	-	-	-
1670	20103440	SDN Utan Kayu Selatan 16	50.012.273.050	-	15.496.716	-	-	-	15.496.716	15.496.716	-
1671	20103439	SDN Utan Kayu Selatan 17	50.012.273.068	1.791.170	18.680.417	-	-	-	18.680.417	18.680.417	-
1672	20108381	SDN Utan Kayu Selatan 04	50.012.273.076	-	800.043	-	-	-	800.043	800.043	-
1673	20109030	SDN Pisangan Baru 11	50.012.273.092	-	22.850.753	-	-	-	22.850.753	22.850.753	-
1674	20103416	SDN Utan Kayu Selatan 23	50.012.273.106	-	26.173.300	-	-	-	26.173.300	26.173.300	-
1675	20109025	SDN Palmeriam 03	50.012.273.114	4.433.800	7.493.856	-	-	-	7.493.856	7.493.856	-
1676	20108533	SDN Cipinang Muara 05	50.012.273.319	3.743.961	2.594.585	-	-	-	2.594.585	2.594.585	-
1677	20109221	SDN Rawamangun 12	50.012.273.343	-	456.236	-	-	-	456.236	456.236	-
1678	20104648	SDN Paseban 01 Pagi.	50.012.273.424	24.733.831	864.079	-	-	-	864.079	864.079	-
1679	20100539	SDN Kenari 07 Pagi.	50.012.273.441	118.230.155	41.165.514	-	-	-	41.165.514	41.165.514	-
1680	20100460	SDN Paseban 05 Pagi.	50.012.273.459	55.988.715	64.051.018	-	-	-	64.051.018	64.051.018	-
1681	20108530	SDN Cipinang Muara 02	50.012.273.467	24.812.675	960.000	-	-	-	960.000	960.000	-
1682	20100459	SDN Paseban 03 Pagi.	50.012.273.475	36.968.960	83.503.169	-	-	-	83.503.169	83.503.169	-
1683	20104652	SDN Paseban 15 Pagi.	50.012.273.505	22.011.118	26.952.472	-	-	-	26.952.472	26.952.472	-
1684	20104631	SDN Kenari 08 Pagi.	50.012.273.513	287.500	48.256.950	-	-	-	48.256.950	48.256.950	-
1685	20104632	SDN Kramat 03 Pagi.	50.012.273.521	17.432.111	105.468.724	-	-	-	105.468.724	105.468.724	-
1686	20100496	SDN Paseban 18 Pagi.	50.012.273.530	5.916.100	41.711.330	-	-	-	41.711.330	41.711.330	-
1687	20104509	SDN Cikini 02	50.012.273.581	4.166.395	48.404.129	-	-	-	48.404.129	48.404.129	-
1688	20104641	SDN Menteng 02	50.012.273.602	-	14.762.389	-	-	-	14.762.389	14.762.389	-
1689	20100237	SMP Negeri 216	50.012.273.661	346.864.829	182.346.595	-	-	-	182.346.595	182.346.595	-
1690	20106394	SMPT Kec. Senen (SMPN 216)	50.012.276.571	-	16.264.460	-	-	-	16.264.460	16.264.460	-
1691	20102470	SMP Negeri 3 Jakarta	50.012.273.670	51.177.456	117.215.428	-	-	-	117.215.428	117.215.428	-
1692	20109414	SMPT Kec. Setiabudi (SMPN 67)	50.012.276.521	-	12.881.100	-	-	-	12.881.100	12.881.100	-
1693	20104508	SDN Cikini 01	50.012.273.726	12.115.648	7.025.446	-	-	-	7.025.446	7.025.446	-
1694	20103593	SMP Negeri 74	50.012.273.823	80.517.754	33.465.318	-	-	-	33.465.318	33.465.318	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1695	20103584	SMP Negeri 36	50.012.273.963	33.560.765	89.708.112	-	-	-	89.708.112	89.708.112	-
1696	20103602	SMP Negeri 25	50.012.273.971	34.257.547	55.833.677	-	-	-	55.833.677	55.833.677	-
1697	20103595	SMP Negeri 62	50.012.273.998	20.915.901	125.265.021	-	-	-	125.265.021	125.265.021	-
1698	20122024	SMPT Kec. Jatinegara (SMPN 62)	50.012.276.636	-	121	-	-	-	121	121	-
1699	20103516	SMP Negeri 14	50.012.274.021	79.244.030	24.087.509	-	-	-	24.087.509	24.087.509	-
1700	20103597	SMP Negeri 52	50.012.274.030	26.356.391	4.107.460	-	-	-	4.107.460	4.107.460	-
1701	20103575	SMP Negeri 26	50.012.274.056	153.110.676	15.499.654	-	-	-	15.499.654	15.499.654	-
1702	20103489	SMP Negeri 158	50.012.274.129	15.661.024	18.590.685	-	-	-	18.590.685	18.590.685	-
1703	20109226	SMPT Kec. Pulogadung (SMPN 158)	50.012.276.555	-	7.563.236	-	-	-	7.563.236	7.563.236	-
1704	20103565	SMP Negeri 99	50.012.274.145	107.359	96.326.590	-	-	-	96.326.590	96.326.590	-
1705	20103587	SMP Negeri 92	50.012.274.161	96.280.000	38.085.881	-	-	-	38.085.881	38.085.881	-
1706	20100224	SMA Negeri 30	50.012.274.226	260.560.341	529.392.770	-	-	-	529.392.770	529.392.770	-
1707	20103283	SMA Negeri 21	50.012.274.251	58.973.280	165.593.380	-	-	-	165.593.380	165.593.380	-
1708	20103310	SMA Negeri 54	50.012.274.269	213.455.895	241.533.603	-	-	-	241.533.603	241.533.603	-
1709	20103285	SMA Negeri 12	50.012.274.277	626.383.750	527.631.315	-	-	-	527.631.315	527.631.315	-
1710	20103791	SMK Negeri 10	50.012.274.285	13.332.100	31.124.457	-	-	-	31.124.457	31.124.457	-
1711	20103786	SMK Negeri 40	50.012.274.366	46.547.128	55.370.911	-	-	-	55.370.911	55.370.911	-
1712	20103297	SMA Negeri 42	50.012.274.412	158.908.572	249.707.704	-	-	-	249.707.704	249.707.704	-
1713	20103782	SMK Negeri 50	50.012.274.447	105.614.523	203.672.875	-	-	-	203.672.875	203.672.875	-
1714	20103294	SMA Negeri 100	50.012.274.463	232.916.006	360.212.841	-	-	-	360.212.841	360.212.841	-
1715	20103284	SMA Negeri 14	50.012.274.480	100.301.968	103.283.375	-	-	-	103.283.375	103.283.375	-
1716	20103778	SMK Negeri 7	50.012.274.498	222.361.293	502.085.313	-	-	-	502.085.313	502.085.313	-
1717	20100159	SMKN 16	50.012.274.510	145.822.031	191.435.966	-	-	-	191.435.966	191.435.966	-
1718	20108411	SDN Utan Kayu Utara 07	50.012.274.528	-	15.432.288	-	-	-	15.432.288	15.432.288	-
1719	20109169	SDN Utan Kayu Selatan 27	50.012.274.536	-	11.023.362	-	-	-	11.023.362	11.023.362	-
1720	20109031	SDN Pisangan Baru 13	50.012.274.544	9.070.225	13.111.204	-	-	-	13.111.204	13.111.204	-
1721	20100166	SMK Negeri 34	50.012.274.676	276.892.896	369.570.450	-	-	-	369.570.450	369.570.450	-
1722	20103354	SDN Rawamangun 02	50.112.011.541	30.632.471	33.491.266	-	-	-	33.491.266	33.491.266	-
1723	20103351	SDN Rawamangun 05(20103353)	50.112.011.606	22.280.341	4.196.231	-	-	-	4.196.231	4.196.231	-
1724	69862980	SD Negeri Rawamangun 07 Pagi Jakarta	50.112.011.649	-	1.344.365	-	-	-	1.344.365	1.344.365	-
1725	20103348	SDN Rawamangun 09	50.112.011.681	66.714.475	-	-	-	-	-	-	-
1726	20104138	SDN Jatinegara Kaum 01	50.112.014.192	-	7.807.523	-	-	-	7.807.523	7.807.523	-
1727	20104106	SDN Jatinegara Kaum 14	50.112.014.249	24.222.928	4.613.423	-	-	-	4.613.423	4.613.423	-
1728	20104172	SDN JATI 07	50.112.014.257	-	8.640.041	-	-	-	8.640.041	8.640.041	-
1729	20104156	SDN JATI 01	50.112.014.265	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	20104174	SDN JATI 05	50.112.014.273	-	7.085.154	-	-	-	7.085.154	7.085.154	-
1731	20104113	SDN Jatinegara Kaum 06	50.112.014.290	3.168.999	9.522.764	-	-	-	9.522.764	9.522.764	-
1732	20103394	SDN Pulo Gadung 03	50.112.014.303	-	4.680.080	-	-	-	4.680.080	4.680.080	-
1733	20103396	SDN Pulo Gadung 01	50.112.014.311	-	1.920.000	-	-	-	1.920.000	1.920.000	-
1734	20104108	SDN Jatinegara Kaum 11	50.112.014.320	1.903.627	38.101.131	-	-	-	38.101.131	38.101.131	-
1735	20104104	SDN Kayu Putih 03	50.112.014.354	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	20103376	SDN Pisangan Timur 11	50.112.014.362	1.350.000	2.442.965	-	-	-	2.442.965	2.442.965	-
1737	20108545	SDN Cipinang 01	50.112.014.419	1.458.000	800.720	-	-	-	800.720	800.720	-
1738	20104119	SDN Kayu Putih 09	50.112.014.443	56.022	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.760.000	-
1739	20103377	SDN Pisangan Timur 10	50.112.014.460	-	4.800.862	-	-	-	4.800.862	4.800.862	-
1740	20103389	SDN Pulo Gadung 09	50.112.014.478	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1741	20103356	SDN Rawamangun 01	50.112.014.486	-	30.736.764	-	-	-	30.736.764	30.736.764	-
1742	20103392	SDN Pulo Gadung 05	50.112.014.494	5.360.003	1.440.000	-	-	-	1.440.000	1.440.000	-
1743	20104116	SDN Jatinegara Kaum 03	50.112.014.508	-	6.120.954	-	-	-	6.120.954	6.120.954	-
1744	20103369	SDN Pisangan Timur 20	50.112.014.516	18.703.298	9.729.278	-	-	-	9.729.278	9.729.278	-
1745	20104118	SDN Kayu Putih 08	50.112.014.524	-	15.040.043	-	-	-	15.040.043	15.040.043	-
1746	20103374	SDN Pisangan Timur 13	50.112.014.532	-	3.594.182	-	-	-	3.594.182	3.594.182	-
1747	20104337	SDN Cipinang 03	50.112.014.541	6.244.405	6.270.712	-	-	-	6.270.712	6.270.712	-
1748	20104114	SDN Jatinegara Kaum 05	50.112.014.575	-	3.200.000	-	-	-	3.200.000	3.200.000	-
1749	20103605	SMP Negeri 198	50.112.014.842	17.716.904	1.600.109	-	-	-	1.600.109	1.600.109	-
1750	20103639	SMP Negeri 165	50.112.014.869	22.959.894	5.470.552	-	-	-	5.470.552	5.470.552	-
1751	20103596	SMP Negeri 6	50.112.014.991	639.789	63.938.080	-	-	-	63.938.080	63.938.080	-
1752	20103571	SMP Negeri 27	50.112.015.008	208	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
1753	20103512	SMP Negeri 148	50.112.015.024	276.867	1.533.752	-	-	-	1.533.752	1.533.752	-
1754	20103311	SMA Negeri 53	50.112.015.148	363.927.451	392.536.407	-	-	-	392.536.407	392.536.407	-
1755	20103787	SMK Negeri 26	50.112.015.237	346.936.468	968.791.634	-	-	-	968.791.634	968.791.634	-
1756	20103508	SMP Negeri 103	50.212.000.661	24.880.820	75.515.220	-	-	-	75.515.220	75.515.220	-
1757	20103309	SMA Negeri 58	50.212.000.696	299.715.766	374.176.846	-	-	-	374.176.846	374.176.846	-
1758	20103784	SMK Negeri 48	50.312.020.903	103.790.542	21.808.898	-	-	-	21.808.898	21.808.898	-
1759	20103302	SMA Negeri 76	50.312.020.971	51.797.052	457.977.614	-	-	-	457.977.614	457.977.614	-
1760	20103298	SMA Negeri 44	50.312.021.021	398.273.229	573.523.050	-	-	-	573.523.050	573.523.050	-
1761	20108709	SDN Jatinegara 14	50.312.021.098	-	6.314.032	-	-	-	6.314.032	6.314.032	-
1762	20109236	SMPT Kec. Cakung 1 (SMPN 138)	50.312.023.368	-	51.464.437	-	-	-	51.464.437	51.464.437	-
1763	20104280	SDN Cakung Barat 18	50.312.021.187	5.388.902	13.205.236	-	-	-	13.205.236	13.205.236	-
1764	20104210	SDN Penggilingan 04	50.312.021.241	1.360.400	21.209.368	-	-	-	21.209.368	21.209.368	-
1765	20103618	SMP Negeri 168	50.312.021.276	35.641.207	101.806.712	-	-	-	101.806.712	101.806.712	-
1766	20103320	SDN Pulo Gebang 20	50.312.021.322	6.497.043	-	-	-	-	-	-	-
1767	20103478	SDN Ujung Menteng 03	50.312.021.489	379.000	34.851.616	-	-	-	34.851.616	34.851.616	-
1768	20109289	SDN Pulo Gebang 25	50.312.021.667	23.281.630	16.193.363	-	-	-	16.193.363	16.193.363	-
1769	20103385	SDN Pulo Gebang 03	50.312.021.675	1.573.563	-	-	-	-	-	-	-
1770	20103476	SDN Ujung Menteng 06	50.312.021.837	19.539.007	-	-	-	-	-	-	-
1771	20103579	SMP Negeri 256	50.312.022.035	32.846.877	35.296.862	-	-	-	35.296.862	35.296.862	-
1772	20103604	SMP Negeri 199	50.312.022.671	32.484.650	9.105.318	-	-	-	9.105.318	9.105.318	-
1773	20108526	SDN Cipinang Cempedak 07	51.112.035.201	-	640.000	-	-	-	640.000	640.000	-
1774	20108690	SDN Cipinang Muara 18	51.112.035.219	5.348.848	3.690.614	-	-	-	3.690.614	3.690.614	-
1775	20108523	SDN Cipinang Cempedak 04	51.112.035.235	2.942.802	53.007.691	-	-	-	53.007.691	53.007.691	-
1776	20108535	SDN Cipinang Muara 07	51.112.035.243	10.340.000	-	-	-	-	-	-	-
1777	20108450	SDN Cipinang Besar Sel. 20	51.112.035.251	-	5.457.667	-	-	-	5.457.667	5.457.667	-
1778	20108574	SDN Kampung Melayu 01	51.112.035.278	10.431.490	4.059.532	-	-	-	4.059.532	4.059.532	-
1779	20108524	SDN Cipinang Cempedak 05	51.112.035.286	79.998	-	-	-	-	-	-	-
1780	20108462	SDN Cipinang Besar Utara 11	51.112.035.308	1.938.370	-	-	-	-	-	-	-
1781	20108455	SDN Cipinang Besar Utara 05	51.112.035.316	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	20108393	SDN Cipinang Besar Sel. 01	51.112.035.324	2.225.982	25.300.582	-	-	-	25.300.582	25.300.582	-
1783	20108442	SDN Cipinang Besar Sel. 13	51.112.035.341	21.771.061	10.884.562	-	-	-	10.884.562	10.884.562	-
1784	20108525	SDN Cipinang Cempedak 06	51.112.035.359	15.806.127	1.286.330	-	-	-	1.286.330	1.286.330	-
1785	20108458	SDN Cipinang Besar Utara 07	51.112.035.367	2.820.000	2.720.015	-	-	-	2.720.015	2.720.015	-
1786	20108550	SDN Cipinang Muara 19	51.112.035.375	898.022	15.158.398	-	-	-	15.158.398	15.158.398	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1787	20108400	SDN Cipinang Besar Sel. 02	51.112.035.383	1.196.311	3.062.217	-	-	-	3.062.217	3.062.217	-
1788	20108665	SDN Bali Mester 01	51.112.035.391	-	6.990.750	-	-	-	6.990.750	6.990.750	-
1789	20108657	SDN Rawa Bunga 01	51.112.035.405	-	11.083.604	-	-	-	11.083.604	11.083.604	-
1790	20108451	SDN Cipinang Besar Utara 01	51.112.035.413	-	38.960.327	-	-	-	38.960.327	38.960.327	-
1791	20108453	SDN Cipinang Besar Utara 03	51.112.035.421	2.339.998	33.391.284	-	-	-	33.391.284	33.391.284	-
1792	20108461	SDN Cipinang Besar Utara 10	51.112.035.430	-	52.562.000	-	-	-	52.562.000	52.562.000	-
1793	20108551	SDN Cipinang Muara 20	51.112.035.464	-	640.401	-	-	-	640.401	640.401	-
1794	20108454	SDN Cipinang Besar Utara 04	51.112.035.481	40.645.001	22.471.777	-	-	-	22.471.777	22.471.777	-
1795	20108459	SDN Cipinang Besar Utara 08	51.112.035.499	2.836.000	2.738.850	-	-	-	2.738.850	2.738.850	-
1796	20108521	SDN Cipinang Cempedak 02	51.112.035.529	-	1.400.945	-	-	-	1.400.945	1.400.945	-
1797	20108548	SDN Cipinang Muara 17	51.112.035.537	1.057.976	16.981.393	-	-	-	16.981.393	16.981.393	-
1798	20108447	SDN Cipinang Besar Sel. 17	51.112.035.545	1.687.689	-	-	-	-	-	-	-
1799	20108529	SDN Cipinang Muara 01	51.112.035.553	13.579.368	-	-	-	-	-	-	-
1800	20108538	SDN Cipinang Muara 12	51.112.035.561	2.967.373	-	-	-	-	-	-	-
1801	20108401	SDN Cipinang Besar Sel. 04	51.112.035.596	1.295.000	2.720.000	-	-	-	2.720.000	2.720.000	-
1802	20109214	SDN Cipinang Besar Sel. 03	51.112.035.600	468.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1803	20108449	SDN Cipinang Besar Sel. 19	51.112.035.618	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	20108528	SDN Cipinang Cempedak 09	51.112.035.626	-	13.281.691	-	-	-	13.281.691	13.281.691	-
1805	20108446	SDN Cipinang Besar Sel. 16	51.112.035.634	8.675.025	17.362.641	-	-	-	17.362.641	17.362.641	-
1806	20108440	SDN Cipinang Besar Sel. 08	51.112.035.642	1.441.591	18.409.633	-	-	-	18.409.633	18.409.633	-
1807	20108402	SDN Cipinang Besar Sel. 05	51.112.035.651	-	10.460.949	-	-	-	10.460.949	10.460.949	-
1808	20108659	SDN Rawa Bunga 11	51.112.035.669	9.685.316	7.764.194	-	-	-	7.764.194	7.764.194	-
1809	20108660	SDN Rawa Bunga 12	51.112.035.677	16.517.927	10.384.835	-	-	-	10.384.835	10.384.835	-
1810	20108387	SDN Bidara Cina 03	51.112.035.685	9.336.000	1.039.246	-	-	-	1.039.246	1.039.246	-
1811	20108552	SDN Cipinang Muara 21	51.112.035.707	8.781.219	20.248.673	-	-	-	20.248.673	20.248.673	-
1812	20108448	SDN Cipinang Besar Sel. 18	51.112.035.715	1.988.400	7.044.940	-	-	-	7.044.940	7.044.940	-
1813	20108463	SDN Cipinang Cempedak 01	51.112.035.723	1.572.000	2.229.043	-	-	-	2.229.043	2.229.043	-
1814	20108389	SDN Bidara Cina 05	51.112.035.731	15.251.082	4.640.000	-	-	-	4.640.000	4.640.000	-
1815	20108668	SDN Bali Mester 03	51.112.035.740	-	12.827.063	-	-	-	12.827.063	12.827.063	-
1816	20108457	SDN Cipinang Besar Utara 06	51.112.035.758	2.400	2.563.336	-	-	-	2.563.336	2.563.336	-
1817	20109021	SDN Cipinang Besar Sel. 12	51.112.035.766	748.000	5.942.485	-	-	-	5.942.485	5.942.485	-
1818	20104192	SDN Lubang Buaya 13	51.112.035.791	1.033.151	-	-	-	-	-	-	-
1819	20104313	SDN Bambu Apus 02	51.112.035.812	1.111.500	14.379.181	-	-	-	14.379.181	14.379.181	-
1820	20104385	SDN Ceger 02	51.112.035.839	27.786.683	-	-	-	-	-	-	-
1821	20104244	SDN Lubang Buaya 01	51.112.035.847	29.960.000	12	-	-	-	12	12	-
1822	20104311	SDN Bambu Apus 04	51.112.035.855	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	20104344	SDN Cipayung 05	51.112.035.863	-	480.000	-	-	-	480.000	480.000	-
1824	20104396	SDN Cilangkap 01	51.112.035.871	14.488.532	27.349.599	-	-	-	27.349.599	27.349.599	-
1825	20104369	SDN Ceger 01	51.112.035.880	5.161.002	7.829	-	-	-	7.829	7.829	-
1826	20104394	SDN Cilangkap 03	51.112.035.910	34.439.770	14.250.158	-	-	-	14.250.158	14.250.158	-
1827	20104241	SDN Lubang Buaya 04	51.112.035.936	65.846.729	32.759.280	-	-	-	32.759.280	32.759.280	-
1828	20103383	SDN Pondok Ranggon 03	51.112.035.979	49.509.875	29.361.930	-	-	-	29.361.930	29.361.930	-
1829	20104240	SDN Lubang Buaya 05	51.112.035.987	7.901.507	7.319.502	-	-	-	7.319.502	7.319.502	-
1830	20104346	SDN Cipayung 04	51.112.035.995	51.945.194	87.719.819	-	-	-	87.719.819	87.719.819	-
1831	20104314	SDN Bambu Apus 01	51.112.036.002	5.087.996	20.444.581	-	-	-	20.444.581	20.444.581	-
1832	20104237	SDN Lubang Buaya 08	51.112.036.011	98.195.525	5.252	-	-	-	5.252	5.252	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1833	20104312	SDN Bambu Apus 03	51.112.036.037	18.900.000	12.029.429	-	-	-	12.029.429	12.029.429	-
1834	20103384	SDN Pondok Ranggon 04	51.112.036.045	-	29.957.190	-	-	-	29.957.190	29.957.190	-
1835	20104236	SDN Lubang Buaya 09	51.112.036.053	-	31.027.809	-	-	-	31.027.809	31.027.809	-
1836	20104242	SDN Lubang Buaya 03	51.112.036.061	-	13.475.897	-	-	-	13.475.897	13.475.897	-
1837	20104193	SDN Lubang Buaya 12	51.112.036.070	19.582.204	8.227.397	-	-	-	8.227.397	8.227.397	-
1838	20109233	SDN Munjul 02	51.112.036.088	1.065.373	5	-	-	-	5	5	-
1839	20103397	SDN Pondok Ranggon 01	51.112.036.096	38.158.720	9.059.823	-	-	-	9.059.823	9.059.823	-
1840	20103465	SDN Setu 01	51.112.036.126	565.846	2.345.118	-	-	-	2.345.118	2.345.118	-
1841	20104178	SDN Munjul 01	51.112.036.134	5.272.937	303.132	-	-	-	303.132	303.132	-
1842	20103382	SDN Pondok Ranggon 02	51.112.036.142	8.138.000	12.654.867	-	-	-	12.654.867	12.654.867	-
1843	20109115	SDN Cibubur 05 Pagi	51.112.036.215	-	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
1844	20103447	SDN Susukan 06 Pagi	51.112.036.223	-	2.241.661	-	-	-	2.241.661	2.241.661	-
1845	20109194	SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi	51.112.036.231	-	11.688.592	-	-	-	11.688.592	11.688.592	-
1846	20104352	SDN Ciracas 10 Pagi	51.112.036.240	1.352.000	-	-	-	-	-	-	-
1847	20104355	SDN Ciracas 07 Pagi	51.112.036.266	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	20104229	SDN Kelapa Dua Wetan 06 Pagi	51.112.036.274	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	20108696	SDN Ciracas 01 Pagi	51.112.036.291	-	5.736.231	-	-	-	5.736.231	5.736.231	-
1850	20103449	SDN Susukan 04 Pagi	51.112.036.312	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	20104353	SDN Ciracas 09 Pagi	51.112.036.321	-	3.520.000	-	-	-	3.520.000	3.520.000	-
1852	20103461	SDN Susukan 02 Pagi	51.112.036.339	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	20103359	SDN Rambutan 05 Pagi	51.112.036.347	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	20103448	SDN Susukan 05 Pagi	51.112.036.355	2.858.182	6.080.096	-	-	-	6.080.096	6.080.096	-
1855	20109151	SDN Cibubur 10 Pagi	51.112.036.363	-	52.016.983	-	-	-	52.016.983	52.016.983	-
1856	20104175	SDN Ciracas 14 Pagi	51.112.036.371	20.597.500	2.445.760	-	-	-	2.445.760	2.445.760	-
1857	20108671	SDN Cibubur 09 Pagi	51.112.036.380	8.430.000	-	-	-	-	-	-	-
1858	20104357	SDN Ciracas 05 Pagi	51.112.036.398	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000	3.840.000	-
1859	20104176	SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi	51.112.036.401	1.100.000	8.655.974	-	-	-	8.655.974	8.655.974	-
1860	20104351	SDN Ciracas 11 Pagi	51.112.036.410	-	16.074.302	-	-	-	16.074.302	16.074.302	-
1861	20104252	SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi	51.112.036.428	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	20104356	SDN Ciracas 06 Pagi	51.112.036.436	-	284.644	-	-	-	284.644	284.644	-
1863	20103445	SDN Susukan 08 Pagi	51.112.036.444	180.000	-	-	-	-	-	-	-
1864	20108672	SDN Cibubur 11 Pagi	51.112.036.461	6.377.669	10.241.580	-	-	-	10.241.580	10.241.580	-
1865	20103460	SDN Susukan 03 Pagi	51.112.036.487	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	20104400	SDN Cibubur 04 Pagi	51.112.036.517	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	20103361	SDN Rambutan 02 Pagi	51.112.036.525	-	14.689.028	-	-	-	14.689.028	14.689.028	-
1868	20104155	SDN Ciracas 15 Pagi	51.112.036.541	100.000	3.051.954	-	-	-	3.051.954	3.051.954	-
1869	20108782	SDN Susukan 01 Pagi	51.112.036.550	116.812	2.036.812	-	-	-	2.036.812	2.036.812	-
1870	20104403	SDN Cibubur 01 Pagi	51.112.036.568	-	54.201.133	-	-	-	54.201.133	54.201.133	-
1871	20108968	SDN Kelapa Dua Wetan 04 Pagi	51.112.036.576	-	1.450	-	-	-	1.450	1.450	-
1872	20104253	SDN Ciracas 13 Pagi	51.112.036.592	16.572.000	6.857.259	-	-	-	6.857.259	6.857.259	-
1873	20109242	SDN Ciracas 03 Pagi	51.112.036.606	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	20104401	SDN Cibubur 03 Pagi	51.112.036.622	-	22.390.700	-	-	-	22.390.700	22.390.700	-
1875	20103446	SDN Susukan 07 Pagi	51.112.036.631	4.953.777	6.085.345	-	-	-	6.085.345	6.085.345	-
1876	20104233	SDN Kramat Jati 18 Pagi	51.112.036.711	4.111.361	9.108.448	-	-	-	9.108.448	9.108.448	-
1877	20104375	SDN Cawang 09 Pagi	51.112.036.738	-	2.365.000	-	-	-	2.365.000	2.365.000	-
1878	20104216	SDN Kramat Jati 13 Pagi	51.112.036.746	3.925.320	11.976.741	-	-	-	11.976.741	11.976.741	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1879	20103469	SDN Tengah 03 Pagi	51.112.036.754	9.704.876	6.379.976	-	-	-	6.379.976	6.379.976	-
1880	20104266	SDN Batu Ampar 05 Pagi	51.112.036.762	-	6.785.871	-	-	-	6.785.871	6.785.871	-
1881	20104247	SDN Kramat Jati 25 Pagi	51.112.036.771	1.932.000	20.715.415	-	-	-	20.715.415	20.715.415	-
1882	20104235	SDN Kramat Jati 19 Pagi	51.112.036.789	-	8.905.840	-	-	-	8.905.840	8.905.840	-
1883	20109225	SDN Batu Ampar 09 Pagi	51.112.036.801	2.424.254	9.456.258	-	-	-	9.456.258	9.456.258	-
1884	20104265	SDN Batu Ampar 06 Pagi	51.112.036.819	-	708.785	-	-	-	708.785	708.785	-
1885	20104147	SDN Dukuh 05 Pagi	51.112.036.827	19.665.600	5.598.103	-	-	-	5.598.103	5.598.103	-
1886	20104268	SDN Batu Ampar 03 Pagi	51.112.036.835	1.760.000	42.030.386	-	-	-	42.030.386	42.030.386	-
1887	20104144	SDN Dukuh 08 Pagi	51.112.036.843	4.740.294	9.392.943	-	-	-	9.392.943	9.392.943	-
1888	20104316	SDN Balekambang 01 Pagi	51.112.036.851	1.440.000	8.544.023	-	-	-	8.544.023	8.544.023	-
1889	20103441	SDN Tengah 01 Pagi	51.112.036.860	40.000	2.540.578	-	-	-	2.540.578	2.540.578	-
1890	20108788	SDN Batu Ampar 10 Pagi	51.112.036.878	-	13.977.393	-	-	-	13.977.393	13.977.393	-
1891	20103468	SDN Tengah 02 Pagi	51.112.036.886	2.726.484	22.899.406	-	-	-	22.899.406	22.899.406	-
1892	20104261	SDN Batu Ampar 12 Pagi	51.112.036.894	-	21.531.842	-	-	-	21.531.842	21.531.842	-
1893	20104227	SDN Kramat Jati 02 Pagi	51.112.036.941	2.216.106	258.391	-	-	-	258.391	258.391	-
1894	20104389	SDN Cililitan 03 Pagi	51.112.036.959	640.000	12.704.776	-	-	-	12.704.776	12.704.776	-
1895	20103486	SDN Tengah 05 Pagi	51.112.036.975	934.500	4.960.000	-	-	-	4.960.000	4.960.000	-
1896	20104372	SDN Cawang 12 Pagi	51.112.036.983	371.306	-	-	-	-	-	-	-
1897	20104380	SDN Cawang 04 Pagi	51.112.037.009	2.405.341	3	-	-	-	3	3	-
1898	20104263	SDN Batu Ampar 08 Pagi	51.112.037.017	-	17.280.071	-	-	-	17.280.071	17.280.071	-
1899	20104270	SDN Batu Ampar 01 Pagi	51.112.037.025	-	4.963.499	-	-	-	4.963.499	4.963.499	-
1900	20104269	SDN Batu Ampar 02 Pagi	51.112.037.033	-	10.270.050	-	-	-	10.270.050	10.270.050	-
1901	20104262	SDN Batu Ampar 11 Pagi	51.112.037.041	-	-	-	-	-	-	-	-
1902	20104151	SDN Dukuh 01 Pagi	51.112.037.076	53.350	3.951.384	-	-	-	3.951.384	3.951.384	-
1903	20104377	SDN Cawang 07 Pagi	51.112.037.084	-	33.280.000	-	-	-	33.280.000	33.280.000	-
1904	20103484	SDN Tengah 07 Pagi	51.112.037.106	481.336	6.028.092	-	-	-	6.028.092	6.028.092	-
1905	20104260	SDN Batu Ampar 13 Pagi	51.112.037.114	-	6.455.578	-	-	-	6.455.578	6.455.578	-
1906	20104232	SDN Kramat Jati 16 Pagi	51.112.037.122	875.228	3.089.073	-	-	-	3.089.073	3.089.073	-
1907	20104264	SDN Batu Ampar 07 Pagi	51.112.037.131	-	-	-	-	-	-	-	-
1908	20104122	SDN Kebon Pala 14 Pagi	51.112.037.190	2.400.000	1.280.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	-
1909	20108716	SDN Kebon Pala 01 Pagi	51.112.037.211	10.825.565	-	-	-	-	-	-	-
1910	20104135	SDN Kebon Pala 02 Pagi	51.112.037.220	1.594.004	-	-	-	-	-	-	-
1911	20104197	SDN Pinang Ranti 09 Pagi	51.112.037.238	1.892.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	-
1912	20104180	SDN Makasar 09 Pagi	51.112.037.246	5.625.741	-	-	-	-	-	-	-
1913	20104182	SDN Makasar 07 Pagi	51.112.037.262	1.860.000	2.720.000	-	-	-	2.720.000	2.720.000	-
1914	20104125	SDN Kebon Pala 17 Pagi	51.112.037.271	20.000	-	-	-	-	-	-	-
1915	20104130	SDN Kebon Pala 07 Pagi	51.112.037.297	7.812.505	28.332.346	-	-	-	28.332.346	28.332.346	-
1916	20104186	SDN Makasar 03 Pagi	51.112.037.301	-	38.426.354	-	-	-	38.426.354	38.426.354	-
1917	20104126	SDN Kebon Pala 11 Pagi	51.112.037.319	1.072.238	1.605.775	-	-	-	1.605.775	1.605.775	-
1918	20104181	SDN Makasar 08 Pagi	51.112.037.327	-	1.120.000	-	-	-	1.120.000	1.120.000	-
1919	20104204	SDN Pinang Ranti 02 Pagi	51.112.037.335	10.000	4.160.000	-	-	-	4.160.000	4.160.000	-
1920	20109084	SDN Makasar 01 Pagi	51.112.037.343	3.008.000	-	-	-	-	-	-	-
1921	20104121	SDN Kebon Pala 15 Pagi	51.112.037.360	4.000.000	74.014.020	-	-	-	74.014.020	74.014.020	-
1922	20104124	SDN Kebon Pala 13 Pagi	51.112.037.378	707.000	14.373	-	-	-	14.373	14.373	-
1923	20104184	SDN Makasar 05 Pagi	51.112.037.386	10.901.247	6.144.849	-	-	-	6.144.849	6.144.849	-
1924	20109002	SDN Halim 01 Pagi	51.112.037.394	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1925	20104202	SDN Pinang Ranti 04 Pagi	51.112.037.416	3.609.226	1.589	-	-	-	1.589	1.589	-
1926	20104187	SDN Makasar 02 Pagi	51.112.037.424	2.858.094	7.019.831	-	-	-	7.019.831	7.019.831	-
1927	20109262	SDN Cijantung 07 Pagi	51.112.037.548	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	20108989	SDN Baru 01 Pagi	51.112.037.564	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	-
1929	20109179	SDN Cijantung 02 Pagi	51.112.037.581	-	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
1930	20108833	SDN Pekayon 18 Pagi	51.112.037.611	-	2.240.042	-	-	-	2.240.042	2.240.042	-
1931	20108711	SDN Kalisari 05 Pagi	51.112.037.637	-	35.388.856	-	-	-	35.388.856	35.388.856	-
1932	20108836	SDN Pekayon 03 Pagi	51.112.037.645	3.040.000	3.565.259	-	-	-	3.565.259	3.565.259	-
1933	20108824	SDN Gedong 10 Pagi	51.112.037.688	180.303	4.522.298	-	-	-	4.522.298	4.522.298	-
1934	20108842	SDN Pekayon 11 Pagi	51.112.037.718	-	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
1935	20109024	SDN Gedong 08 Pagi	51.112.037.726	315.053	-	-	-	-	-	-	-
1936	20108967	SDN Kalisari 01 Pagi	51.112.037.734	-	8.800.000	-	-	-	8.800.000	8.800.000	-
1937	20108834	SDN Pekayon 01 Pagi	51.112.037.742	1.676.120	160.696	-	-	-	160.696	160.696	-
1938	20108817	SDN Cijantung 06 Pagi	51.112.037.751	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	20108841	SDN Pekayon 10 Pagi	51.112.037.777	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	20108670	SDN Baru 07 Pagi	51.112.037.785	-	1.440.142	-	-	-	1.440.142	1.440.142	-
1941	20108829	SDN Pekayon 12 Pagi	51.112.037.823	-	960.000	-	-	-	960.000	960.000	-
1942	20108812	SDN Baru 05 Pagi	51.112.037.831	200.000	147.433	-	-	-	147.433	147.433	-
1943	20108994	SDN Gedong 12 Pagi	51.112.037.866	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	20108830	SDN Pekayon 15 Pagi	51.112.037.874	-	6.402.269	-	-	-	6.402.269	6.402.269	-
1945	20108996	SDN Gedong 11 Pagi	51.112.037.882	200	4.640.027	-	-	-	4.640.027	4.640.027	-
1946	20108981	SDN Pekayon 09 Pagi	51.112.037.891	8.928.271	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
1947	20108990	SDN Baru 03 Pagi	51.112.037.904	2.050.000	-	-	-	-	-	-	-
1948	20108831	SDN Pekayon 16 Pagi	51.112.037.912	-	16.537.736	-	-	-	16.537.736	16.537.736	-
1949	20108821	SDN Gedong 01 Pagi	51.112.037.921	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	20108826	SDN Kalisari 03 Pagi	51.112.037.939	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	20109093	SDN Baru 08 Pagi	51.112.037.947	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	20108710	SDN Kalisari 02 Pagi	51.112.037.955	-	27.804.749	-	-	-	27.804.749	27.804.749	-
1953	20108997	SDN Baru 02 Pagi	51.112.037.963	37.355	-	-	-	-	-	-	-
1954	20108838	SDN Pekayon 05 Pagi	51.112.037.980	6.680.000	15.991.338	-	-	-	15.991.338	15.991.338	-
1955	20108822	SDN Gedong 05 Pagi	51.112.037.998	-	5.760.000	-	-	-	5.760.000	5.760.000	-
1956	20108815	SDN Cijantung 03 Pagi	51.112.038.005	740.000	550.727	-	-	-	550.727	550.727	-
1957	20103588	SMP Negeri 91	51.112.038.200	419.011	23.400.033	-	-	-	23.400.033	23.400.033	-
1958	20103606	SMP NEGERI 196	51.112.038.226	10.863.679	445.781	-	-	-	445.781	445.781	-
1959	20103636	SMP Negeri 210	51.112.038.234	17.627.566	682.530	-	-	-	682.530	682.530	-
1960	20103631	SMP Negeri 223	51.112.038.242	-	109.771.468	-	-	-	109.771.468	109.771.468	-
1961	20103628	SMP Negeri 233	51.112.038.251	39.241.109	49.840.847	-	-	-	49.840.847	49.840.847	-
1962	20103577	SMP Negeri 258	51.112.038.277	99.619.051	97.959.868	-	-	-	97.959.868	97.959.868	-
1963	20103576	SMP NEGERI 259	51.112.038.307	107.765.641	134.324.946	-	-	-	134.324.946	134.324.946	-
1964	20103615	SMP Negeri 174	51.112.038.315	5.456.308	45.902.331	-	-	-	45.902.331	45.902.331	-
1965	20103637	SMP Negeri 209	51.112.038.331	2.688.328	82.781.390	-	-	-	82.781.390	82.781.390	-
1966	20103603	SMP NEGERI 246	51.112.038.340	203.282.839	35.200.640	-	-	-	35.200.640	35.200.640	-
1967	20103582	SMP Negeri 251	51.112.038.358	500	1.588.590	-	-	-	1.588.590	1.588.590	-
1968	20103573	SMP Negeri 263	51.112.038.366	-	25.290.586	-	-	-	25.290.586	25.290.586	-
1969	20103569	SMP Negeri 275	51.112.038.382	137.284.126	205.409.975	-	-	-	205.409.975	205.409.975	-
1970	20103599	SMP Negeri 50	51.112.038.391	43.661.258	33.879.874	-	-	-	33.879.874	33.879.874	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
1971	20103591	SMP NEGERI 81	51.112.038.404	13.606.527	219.007.154	-	-	-	219.007.154	219.007.154	-
1972	20103630	SMP NEGERI 230	51.112.038.412	72.900.463	84.919.486	-	-	-	84.919.486	84.919.486	-
1973	20103632	SMP NEGERI 222	51.112.038.421	113.448.052	37.177.784	-	-	-	37.177.784	37.177.784	-
1974	20103564	SMP NEGERI 160	51.112.038.439	65.638.752	7.925.920	-	-	-	7.925.920	7.925.920	-
1975	20103509	SMP NEGERI 157	51.112.038.447	16.331.445	151.689.840	-	-	-	151.689.840	151.689.840	-
1976	20103590	SMP Negeri 9	51.112.038.471	97.404.989	3.660.427	-	-	-	3.660.427	3.660.427	-
1977	20103638	SMP Negeri 208	51.112.038.528	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1978	20103617	SMP Negeri 171	51.112.038.544	-	50.241.870	-	-	-	50.241.870	50.241.870	-
1979	20103521	SMP Negeri 126	51.112.038.561	23.224.630	49.015.302	-	-	-	49.015.302	49.015.302	-
1980	20103624	SMP Negeri 24	51.112.038.595	102.784.813	137.222.548	-	-	-	137.222.548	137.222.548	-
1981	20103592	SMP Negeri 80	51.112.038.609	30.343.209	66.924.823	-	-	-	66.924.823	66.924.823	-
1982	20103572	SMP Negeri 268	51.112.038.625	5.486.750	73.563.907	-	-	-	73.563.907	73.563.907	-
1983	20103633	SMP Negeri 217	51.112.038.633	141.955.137	28.956.038	-	-	-	28.956.038	28.956.038	-
1984	20103612	SMP Negeri 184	51.112.038.668	-	31.187.636	-	-	-	31.187.636	31.187.636	-
1985	20103614	SMP Negeri 179	51.112.038.676	129.422.025	162.000.126	-	-	-	162.000.126	162.000.126	-
1986	20109261	SMPT Kec. Pasar Rebo (SMPN 179)	51.112.040.816	-	27.719.487	-	-	-	27.719.487	27.719.487	-
1987	20103622	SMP Negeri 203	51.112.038.706	14.593.474	2.562	-	-	-	2.562	2.562	-
1988	20103314	SMA Negeri 48	51.112.038.757	389.423.613	402.052.719	-	-	-	402.052.719	402.052.719	-
1989	20103256	SMA Negeri 99	51.112.038.765	397.401.921	441.345.961	-	-	-	441.345.961	441.345.961	-
1990	20103286	SMA Negeri 113	51.112.038.781	101.627.389	190.196.231	-	-	-	190.196.231	190.196.231	-
1991	20103290	SMA Negeri 105	51.112.038.790	501.633.997	549.244.138	-	-	-	549.244.138	549.244.138	-
1992	20103306	SMA Negeri 62	51.112.038.811	1.728.824	171.211.525	-	-	-	171.211.525	171.211.525	-
1993	20103305	SMA Negeri 64	51.112.038.838	43.628.241	406.791.616	-	-	-	406.791.616	406.791.616	-
1994	20103300	SMA Negeri 88	51.112.038.854	60.111.878	98.131.216	-	-	-	98.131.216	98.131.216	-
1995	20103790	SMK Negeri 22	51.112.038.862	86.775.672	517.932.689	-	-	-	517.932.689	517.932.689	-
1996	20103779	SMK Negeri 58	51.112.038.871	343.310.198	625.872.598	-	-	-	625.872.598	625.872.598	-
1997	20103781	SMK Negeri 51	51.112.038.901	7.819.061	30.313.936	-	-	-	30.313.936	30.313.936	-
1998	20103780	SMK Negeri 52	51.112.038.919	338.350.806	202.171.207	-	-	-	202.171.207	202.171.207	-
1999	20108390	SDN Cipinang Besar Sel. 07	51.112.038.943	740.986	-	-	-	-	-	-	-
2000	20104393	SDN Cilangkap 04	51.112.038.960	3.184.400	-	-	-	-	-	-	-
2001	20104367	SDN Cipayung 02	51.112.038.978	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	20103278	SMA Negeri 91	51.212.012.446	175.544.755	336.881.992	-	-	-	336.881.992	336.881.992	-
2003	20103301	SMA Negeri 81	51.212.014.066	480.186.496	466.226.985	-	-	-	466.226.985	466.226.985	-
2004	20108629	SDN Pondok Bambu 07	51.212.014.091	4.685.409	-	-	-	-	-	-	-
2005	20108632	SDN Pondok Bambu 11	51.212.014.112	7.913.000	6.080.000	-	-	-	6.080.000	6.080.000	-
2006	20108601	SDN Malaka Jaya 06	51.212.014.139	5.323.844	107.411	-	-	-	107.411	107.411	-
2007	20108655	SDN Pondok Kopi 07	51.212.014.147	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	20108561	SDN Duren Sawit 06	51.212.014.163	33.535.069	3.834.569	-	-	-	3.834.569	3.834.569	-
2009	20108571	SDN Duren Sawit 16	51.212.014.171	1.567.396	18.760.070	-	-	-	18.760.070	18.760.070	-
2010	20108570	SDN Duren Sawit 15	51.212.014.180	-	4.320.169	-	-	-	4.320.169	4.320.169	-
2011	20108569	SDN Duren Sawit 14	51.212.014.198	7.968.630	894.983	-	-	-	894.983	894.983	-
2012	20108593	SDN Klender 22	51.212.014.210	57.912.759	2.080.000	-	-	-	2.080.000	2.080.000	-
2013	20108656	SDN Pondok Kopi 08	51.212.014.228	29.776.785	55.470.388	-	-	-	55.470.388	55.470.388	-
2014	20108626	SDN Pondok Bambu 04	51.212.014.236	700.000	4.237.474	-	-	-	4.237.474	4.237.474	-
2015	20108624	SDN Pondok Bambu 02	51.212.014.244	28.401.408	11.502.593	-	-	-	11.502.593	11.502.593	-
2016	20108628	SDN Pondok Bambu 06	51.212.014.252	6.112.600	23.695.397	-	-	-	23.695.397	23.695.397	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
2017	20108634	SDN Pondok Bambu 13	51.212.014.261	75.000	27.365.734	-	-	-	27.365.734	27.365.734	-
2018	20108751	SDN Pondok Bambu 14	51.212.014.279	21.919.277	4.159.999	-	-	-	4.159.999	4.159.999	-
2019	20108635	SDN Pondok Bambu 15	51.212.014.287	9.734.710	-	-	-	-	-	-	-
2020	20108623	SDN Pondok Bambu 01	51.212.014.295	44.724.864	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2.880.000	-
2021	20108562	SDN Duren Sawit 07	51.212.014.317	2.948.600	88.597.462	-	-	-	88.597.462	88.597.462	-
2022	20108565	SDN Duren Sawit 10	51.212.014.333	18.518.117	8.800.000	-	-	-	8.800.000	8.800.000	-
2023	20108557	SDN Duren Sawit 01	51.212.014.350	2.953.887	178	-	-	-	178	178	-
2024	20108560	SDN Duren Sawit 05	51.212.014.368	9.513.732	35.455.677	-	-	-	35.455.677	35.455.677	-
2025	20108563	SDN Duren Sawit 08	51.212.014.376	2.445.361	107.604.331	-	-	-	107.604.331	107.604.331	-
2026	20108578	SDN Klender 03	51.212.014.392	53.044.239	16.486.453	-	-	-	16.486.453	16.486.453	-
2027	20108579	SDN Klender 04	51.212.014.406	-	598.185	-	-	-	598.185	598.185	-
2028	20108580	SDN Klender 06	51.212.014.414	23.914.866	-	-	-	-	-	-	-
2029	20108583	SDN Klender 10	51.212.014.431	32.640.000	10.886.838	-	-	-	10.886.838	10.886.838	-
2030	20108584	SDN Klender 12	51.212.014.449	6.046.400	50	-	-	-	50	50	-
2031	20108585	SDN Klender 13	51.212.014.457	2.526.000	6.326.577	-	-	-	6.326.577	6.326.577	-
2032	20108586	SDN Klender 14	51.212.014.465	72.922.572	11.396.983	-	-	-	11.396.983	11.396.983	-
2033	20108587	SDN Klender 15	51.212.014.473	5.128.122	15.523.040	-	-	-	15.523.040	15.523.040	-
2034	20108591	SDN Klender 20	51.212.014.481	3.475.266	24.392.253	-	-	-	24.392.253	24.392.253	-
2035	20108592	SDN Klender 21	51.212.014.490	3.356.599	1.049.915	-	-	-	1.049.915	1.049.915	-
2036	20108600	SDN Malaka Jaya 05	51.212.014.511	21.303.703	7.703.600	-	-	-	7.703.600	7.703.600	-
2037	20108597	SDN Malaka Jaya 01	51.212.014.538	-	12.314.550	-	-	-	12.314.550	12.314.550	-
2038	20108603	SDN Malaka Jaya 08	51.212.014.546	9.173.700	10.653.326	-	-	-	10.653.326	10.653.326	-
2039	20108605	SDN Malaka Jaya 10	51.212.014.571	19.996.750	6.590.012	-	-	-	6.590.012	6.590.012	-
2040	20108607	SDN Malaka Jaya 12	51.212.014.597	4.052.552	1.901.137	-	-	-	1.901.137	1.901.137	-
2041	20108638	SDN Pondok Kelapa 01	51.212.014.619	39.982.566	48.012.562	-	-	-	48.012.562	48.012.562	-
2042	20108643	SDN Pondok Kelapa 06	51.212.014.635	47.261.253	45.956.903	-	-	-	45.956.903	45.956.903	-
2043	20108576	SDN Klender 01	51.212.014.643	6.030.479	479	-	-	-	479	479	-
2044	20108612	SDN Malaka Sari 01	51.212.014.651	6.171.374	1.882.470	-	-	-	1.882.470	1.882.470	-
2045	20108613	SDN Malaka Sari 02	51.212.014.660	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	20108615	SDN Malaka Sari 04	51.212.014.686	36.555.000	18.746.864	-	-	-	18.746.864	18.746.864	-
2047	20108616	SDN Malaka Sari 05	51.212.014.694	13.363.200	19.695.940	-	-	-	19.695.940	19.695.940	-
2048	20108620	SDN Malaka Sari 13	51.212.014.732	5.598.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
2049	20108640	SDN Pondok Kelapa 03	51.212.014.767	20.903.350	10.347.609	-	-	-	10.347.609	10.347.609	-
2050	20108641	SDN Pondok Kelapa 04	51.212.014.775	316.511	18.769.426	-	-	-	18.769.426	18.769.426	-
2051	20108642	SDN Pondok Kelapa 05	51.212.014.783	20.729.501	4.500.201	-	-	-	4.500.201	4.500.201	-
2052	20108646	SDN Pondok Kelapa 09	51.212.014.791	-	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.760.000	-
2053	20108644	SDN Pondok Kelapa 07	51.212.014.805	-	4.817.722	-	-	-	4.817.722	4.817.722	-
2054	20108650	SDN Pondok Kopi 01	51.212.014.848	36.141.900	89.678	-	-	-	89.678	89.678	-
2055	20108652	SDN Pondok Kopi 03	51.212.014.864	14.002.988	4.012.725	-	-	-	4.012.725	4.012.725	-
2056	20108653	SDN Pondok Kopi 04	51.212.014.872	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	20104364	SDN Cipinang Melayu 10 Pagi	51.212.015.151	2.636.000	29.785.958	-	-	-	29.785.958	29.785.958	-
2058	20109161	SDN Cipinang Melayu 07 Pagi	51.212.015.178	-	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-
2059	20104334	SDN Cipinang Melayu 01 Pagi	51.212.015.186	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2060	20104348	SDN Cipinang Melayu 05 Pagi	51.212.015.194	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	20104330	SDN Cipinang Melayu 04 Pagi	51.212.015.216	3.000	32.951.705	-	-	-	32.951.705	32.951.705	-
2062	20104366	SDN Cipinang Melayu 08 Pagi	51.212.015.224	1.000	-	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000	-

NO	NPSN	Nama Sekolah	Nomor Rekening Bank	Saldo Kas di Bendahara Sekolah	Saldo Rekening Bank	Pengembalian Belanja Diterima di Tahun 2019	Outstanding Check Belanja TA 2018 Dibayarkan Tahun 2019	Selisih Kas	Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2018 (Audited)		
				per 31 Desember 2017 (Audited)	per 31 Desember 2018				Jumlah	Saldo Kas Dana BOS	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 - 9 + 10)	12	13
2063	20104331	SDN Cipinang Melayu 03 Pagi	51.212.015.232	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	20103522	SMP Negeri 117	51.212.015.313	81.093.776	35.489.070	-	-	-	35.489.070	35.489.070	-
2065	20109154	SMPT DUREN SAWIT(SMPN 51)	51.212.016.280	-	80.870.646	-	-	-	80.870.646	80.870.646	-
2066	20103519	SMP Negeri 135	51.212.015.330	131.488.066	215.113.721	-	-	-	215.113.721	215.113.721	-
2067	20103608	SMP Negeri 194	51.212.015.348	-	29.320.158	-	-	-	29.320.158	29.320.158	-
2068	20103610	SMP NEGERI 192	51.212.015.411	65.139.770	9.887.647	-	-	-	9.887.647	9.887.647	-
2069	20103520	SMP Negeri 128	51.212.015.429	62.428.905	182.999.254	-	-	-	182.999.254	182.999.254	-
2070	20103523	SMP Negeri 109	51.212.015.437	-	4.054.612	-	-	-	4.054.612	4.054.612	-
2071	20103581	SMP Negeri 252	51.212.015.488	61.070.410	8.894.412	-	-	-	8.894.412	8.894.412	-
2072	20108784	SMPT Kec. Duren Sawit 2 (SMPN 252)	51.212.016.301	-	13.552.146	-	-	-	13.552.146	13.552.146	-
2073	20103621	SMP Negeri 202	51.212.015.526	135.831.826	224.385.015	-	-	-	224.385.015	224.385.015	-
2074	20103307	SMA Negeri 61	51.212.015.542	10.456.579	209.486.809	-	-	-	209.486.809	209.486.809	-
2075	20108651	SDN Pondok Kopi 02	51.212.015.640	16.181.004	960.000	-	-	-	960.000	960.000	-
2076	20104383	SDN Cawang 01 Pagi	51.312.015.036	9.890.970	37.970.000	-	-	-	37.970.000	37.970.000	-
2077	20104143	SDN Dukuh 09 Pagi	51.312.015.061	2.129	15.606.609	-	-	-	15.606.609	15.606.609	-
2078	20104228	SDN Kramat Jati 01 Pagi	51.312.015.079	2.305.300	7.287.789	-	-	-	7.287.789	7.287.789	-
2079	20104390	SDN Cililitan 02 Pagi	51.312.015.087	-	55.851.064	-	-	-	55.851.064	55.851.064	-
2080	20104218	SDN Kramat Jati 11 Pagi	51.312.015.095	610.400	20.566.471	-	-	-	20.566.471	20.566.471	-
2081	20104221	SDN Kramat Jati 07 Pagi	51.312.015.109	1.101.060	6.445.888	-	-	-	6.445.888	6.445.888	-
2082	20104148	SDN Dukuh 04 Pagi	51.312.015.125	11.641.977	21.630.881	-	-	-	21.630.881	21.630.881	-
2083	20104391	SDN Cililitan 01 Pagi	51.312.015.133	-	1.667.134	-	-	-	1.667.134	1.667.134	-
2084	20104226	SDN Kramat Jati 03 Pagi	51.312.015.141	4.325.200	-	-	-	-	-	-	-
2085	20104315	SDN Balekambang 03 Pagi	51.312.015.150	-	5.975.059	-	-	-	5.975.059	5.975.059	-
2086	20104381	SDN Cawang 03 Pagi	51.312.015.168	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	20104199	SDN Pinang Ranti 07 Pagi	51.312.015.281	9.281.033	-	-	-	-	-	-	-
2088	20104133	SDN Kebon Pala 04 Pagi	51.312.015.303	8.756.094	254	-	-	-	254	254	-
2089	20104132	SDN Kebon Pala 05 Pagi	51.312.015.311	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	20104134	SDN Kebon Pala 03 Pagi	51.312.015.320	3.570.000	6.882.241	-	-	-	6.882.241	6.882.241	-
2091	20104198	SDN Pinang Ranti 08 Pagi	51.312.015.338	-	2.080.585	-	-	-	2.080.585	2.080.585	-
2092	20103510	SMP Negeri 150	51.312.015.427	23.808.786	9.707.835	-	-	-	9.707.835	9.707.835	-
2093	20107181	SMP Negeri 287	51.312.015.435	38.741.600	112.531.132	-	-	-	112.531.132	112.531.132	-
2094	20103279	SMA Negeri 9	52.312.003.396	209.931.163	215.038.222	-	-	-	215.038.222	215.038.222	-
Jumlah Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah				62.659.228.773	103.808.272.849	180.113.875	10.655.800	3.208.584	103.980.939.508	103.949.117.015	31.822.493

**DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	24.759.248.748	-	-	-	-	24.759.248.748
2	Unit Pengelola Perparkiran	275.745.750	48.348.988.346	-	-	-	-	48.624.734.096
3	Laboratorium Kesehatan Daerah	19.220.000	7.116.202.299	-	-	-	-	7.135.422.299
4	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	-	24.495.986	-	-	-	-	24.495.986
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	18.000	601.792.056	52.136.138	-	-	-	653.946.194
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	33.997.398	60.362.888.134	-	-	1.046.437	-	60.397.931.969
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	13.637.684	6.713.575.721	-	-	-	-	6.727.213.405
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	12.398.616	1.689.503.260	-	-	-	-	1.701.901.876
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	2.772.000	2.317.502.639	-	-	-	-	2.320.274.639
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	6.782.963	191.613.553	-	-	-	-	198.396.516
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	16.532.800	1.100.871.212	-	-	-	-	1.117.404.012
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	8.251.770	1.675.334.263	-	-	-	-	1.683.586.033
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	6.890.000	4.776.019.285	-	-	-	-	4.782.909.285
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	3.819.900	5.904.871.517	-	-	-	-	5.908.691.417
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	3.659.050	125.812.321	-	-	-	-	129.471.371
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	8.747.311	2.306.966.446	-	-	-	-	2.315.713.757
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	3.791.500	7.249.605.067	-	-	-	-	7.253.396.567
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	1.001.000	551.558.660	-	-	-	-	552.559.660
19	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	10.548.970	1.956.006.649	-	-	-	-	1.966.555.619
20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	11.852.800	3.655.686.530	-	-	-	-	3.667.539.330
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	9.050.500	2.260.014.568	-	-	-	-	2.269.065.068
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	2.507.296	2.780.738.075	-	-	-	-	2.783.245.371
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	6.738.850	47.624.521	-	-	-	-	54.363.371
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	7.901.850	3.495.753.055	-	-	-	-	3.503.654.905
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	7.251.400	474.999.743	-	-	-	-	482.251.143
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	465.952	363.554.618	-	-	-	-	364.020.570
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	2.027.000	215.149.259	-	-	-	-	217.176.259

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	6.557.900	661.692.334	916.500	-	-	-	669.166.734
29	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	-	7.935.740.715	-	-	-	-	7.935.740.715
30	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS	637.000	4.141.913.490	-	-	-	-	4.142.550.490
31	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS	455.000	1.170.383.040	-	-	-	-	1.170.838.040
32	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS	124.000	298.874.491	-	-	-	-	298.998.491
33	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS	515.000	1.681.845.129	-	-	-	-	1.682.360.129
34	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS	1.149.000	500.388.083	-	-	-	-	501.537.083
35	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS	675.000	2.029.963.390	-	-	-	-	2.030.638.390
36	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS	6.094.000	1.742.563.255	-	-	-	-	1.748.657.255
37	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS	49.000	2.012.340.336	-	-	-	-	2.012.389.336
38	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	10.684.000	18.145.385.388	-	-	-	-	18.156.069.388
39	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	85.000	4.722.243.149	-	-	-	-	4.722.328.149
40	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	150.000	13.550.891.171	-	-	-	-	13.551.041.171
41	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT	465.000	15.063.092.004	-	-	-	-	15.063.557.004
42	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	374.000	3.334.821.240	-	-	-	-	3.335.195.240
43	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT	2.267.781	17.334.880.660	-	-	-	-	17.337.148.441
44	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	374.000	7.363.412.468	-	-	-	-	7.363.786.468
45	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	195.000	8.692.531.945	-	-	-	-	8.692.726.945
46	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	8.438.000	31.266.005.249	-	-	-	-	31.274.443.249
47	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	300.001	8.135.828.944	-	-	-	-	8.136.128.945
48	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	765.000	1.663.479.442	-	-	-	-	1.664.244.442
49	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR	460.000	10.355.945.409	-	-	-	-	10.356.405.409
50	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	975.000	7.236.273.840	-	-	-	-	7.237.248.840
51	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	135.020	3.597.208.122	-	-	-	-	3.597.343.142
52	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL	26.465.508	17.601.962.250	-	-	-	-	17.628.427.758

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL	150.000	11.643.986.273	-	-	-	-	11.644.136.273
54	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL	465.000	14.567.536.342	-	-	-	-	14.568.001.342
55	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL	465.000	5.612.054.067	-	-	-	-	5.612.519.067
56	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL	82.000	2.854.898.761	-	-	-	-	2.854.980.761
57	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL	210.000	3.158.813.510	-	-	-	-	3.159.023.510
58	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL	255.000	1.111.050.929	-	-	-	-	1.111.305.929
59	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL	292.000	2.152.418.483	-	-	-	-	2.152.710.483
60	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL	841.000	5.104.668.740	-	-	-	-	5.105.509.740
61	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL	536.000	3.089.471.216	-	-	-	-	3.090.007.216
62	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM	875.000	93.549.241	-	-	-	8.636.357	103.060.598
63	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM	639.000	3.883.197.447	-	-	-	69.284.234	3.953.120.681
64	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM	399.000	3.955.317.008	-	-	-	-	3.955.716.008
65	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM	373.000	10.404.460.981	-	-	-	-	10.404.833.981
66	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM	243.000	4.050.672.470	-	-	-	-	4.050.915.470
67	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM	221.000	6.790.327.298	-	-	-	-	6.790.548.298
68	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM	381.000	17.681.294.499	-	-	-	-	17.681.675.499
69	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	24.119.319	5.352.316.107	-	-	-	-	5.376.435.426
70	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM	511.000	11.660.068.505	29.815.516	-	-	-	11.690.395.021
71	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM	1.047.000	18.975.325.216	-	-	-	-	18.976.372.216
72	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU	-	282.447.069	5.745.376	-	-	-	288.192.445
73	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU	-	18.755.039	-	-	-	-	18.755.039
74	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	51.109.264	38.039.459.265	-	604.941.925	9.314.825	-	38.704.825.279
75	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	59.146.623	13.434.843.277	41.325	99.933.328	-	-	13.593.964.553
76	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	93.454.913	23.405.158.832	-	355.554.775	-	-	23.854.168.520

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	166.198.091	2.007.455.487	-	75.091.388	-	-	2.248.744.966
78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	-	4.929.867.086	-	6.000.000	-	-	4.935.867.086
79	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	16.858.516	3.525.501.400	-	5.800.000	-	-	3.548.159.916
80	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	-	1.201.902.527	-	-	-	-	1.201.902.527
81	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	-	7.483.636.772	-	-	-	-	7.483.636.772
	SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD	962.871.296,00	607.776.495.922,00	88.654.855,00	1.147.321.416,00	10.361.262,00	77.920.591,00	610.063.625.342,00

**REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

		MUTASI PIUTANG TAHUN DIBAWAH 2018							MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN 2018							
NO	JENIS PAJAK	SALDO AWAL PIUTANG PAJAK (AUDITED 31 DES 2017)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL PIUTANG PAJAK	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	PEMBEBASAN/PENGENAA N/PEMBETULAN/PEMBATA LAN/PENGHAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	SISA PIUTANG PAJAK TAHUN LALU PER 31 DES 2018	PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	PEMBEBASAN/PENGENAA N/PEMBETULAN/PEMBATA LAN/PENGHAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	SISA PIUTANG TAHUN BERJALAN PER 31 DES 2018	SALDO AKHIR PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DES 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5-6-7-8	10	11	12	13	14	15=10-11-12-13-14	16=9+15	
1	PKB	130.965.117.786,00	(36.690.469.275,00)	8.299.941.950,00				85.974.706.561,00	953.908.326.077,00	919.104.657.022,00	-	-	-	34.803.669.055,00	120.778.375.616,00	
2	BBN-KB	242.507.010,00	(242.507.010,00)					-						-	-	
3	PBB-KB	2.991.700.455,00	-	2.493.088.853,00	-	-	-	498.611.602,00	-	-	-	-	-	-	498.611.602,00	
4	P A T	572.309.739.813,00	(1.817.013.138,00)	13.775.875.717,00	1.979.196,00	-	-	556.714.871.762,00	108.243.938.361,00	91.437.563.338,00	643.744.450,00	-	-	16.162.630.573,00	572.877.502.335,00	
5	HOTEL	28.620.071.963,00	(367.957.279,00)	668.371.781,00	-	-	-	27.583.742.903,00	12.692.842.155,00	7.085.711.945,00	-	-	-	5.807.130.210,00	33.190.873.113,00	
6	RESTORAN	121.840.536.826,00	(288.304.505,00)	15.328.982.523,00	-	-	-	106.223.249.798,00	50.314.583.813,00	42.342.831.926,00	-	-	-	7.971.751.887,00	114.195.001.685,00	
7	HIBURAN	65.834.741.632,00	(200.689.132,00)	7.295.162.138,00	-	-	-	58.338.890.362,00	90.264.110.088,00	83.377.065.591,00	-	1.975.814.140,00	-	4.911.230.357,00	63.250.120.719,00	
8	REKLAME	503.074.271.676,00	(117.801.950,00)	86.890.637.719,00	140.160.000,00	594.257.188,00	(1.091.857.398,00)	416.423.272.217,00	1.027.976.274.756,00	925.346.986.704,00	1.190.740.585,00	121.198.717,00	-	101.317.348.750,00	517.740.620.967,00	
9	PPJ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
10	PARKIR	14.659.781.113,00	-	1.978.506.179,00	-	-	-	12.681.274.934,00	2.709.643.692,00	2.252.882.577,00	-	-	-	456.761.115,00	13.138.036.049,00	
11	BPHTB	54.571.909.933,00	(94.236.950,00)	7.310.900,00	-	-	-	54.470.362.083,00	7.298.011.341,00	135.223.944,00	-	-	-	7.162.787.397,00	61.633.149.480,00	
12	ROKOK	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
13	PBB-P2	6.835.709.020.886,00	263.192.692.645,00	641.700.598.717,00	12.226.068.854,00	162.848.401.519,00	443.786.961.869,00	5.838.339.682.572,00	10.517.374.613.647,00	8.166.517.189.132,00	657.586.087,00	109.314.255.343,00	532.804.278.238,00	1.708.081.304.847,00	7.546.420.987.419,00	
Grand Total		8.330.819.399.093	223.373.713.406	778.438.476.477	12.368.208.050	163.442.658.707	442.695.104.471	7.157.248.664.794	12.770.782.343.930	10.237.600.112.179	2.492.071.122	111.411.268.200	532.804.278.238	1.886.474.614.191	9.043.723.278.985	

606.137.763.178

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET						
					Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018		Saldo 31 Desember 2018	Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018		Saldo 31 Desember 2018					
						Penambahan				Pengurangan			Penambahan		Pengurangan		
			Mulai	Berakhir		TAHUN BERJALAN	Koreksi			PELUNASAN	Koreksi		PKS	Koreksi	Pelunasan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
1	PT Happyday Utama Indonesia	1.500.000.000	23-Dec-13	22-Dec-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nusantara Sejahtera Raya	1.060.000.000	19-Aug-14	18-Aug-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT Panca Permata Istana Pasar Baru	4.496.856.804	16-Jul-12	15-Jul-17	-	-	-	-	-	-	317.564.715,00	-	-	-	-	-	317.564.715
4	PT Lingkar Seni Indonesia	5.000.000.000	10-Mar-13	9-Mar-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	5.000.000	26-May-14	25-May-19	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-
6	Yayasan Gandhi Memorial International School (GMIS)	2.000.000.000	13-Jan-14	12-Jan-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Pendidikan Elka	1.650.000.000	23-Mar-13	23-Mar-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	625.000.000	19-Oct-13	18-Oct-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PT Prima Indo Bahari	876.218.235	15-Jun-14	14-Jun-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Prima Alto Sejahtera	2.367.579.043	2-Mar-10	1-Mar-15	1.502.379.043	-	-	-	-	1.502.379.043	75.118.952,00	-	-	-	-	-	75.118.952
11	UD Matahari Terbit	84.556.394	5-May-10	5-Apr-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	275.000.000	9-Jan-14	8-Jan-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.643.957.703	5-Apr-15	4-Apr-20	-	-	-	-	-	-	5.673.030,92	-	-	-	-	-	5.673.031
14	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan (SPBU)	1.324.800.000	18-Feb-16	17-Feb-21	-	-	-	-	-	-	996.400	-	-	-	-	-	996.400
15	PD Sumber Alam	225.483.718	16-Feb-11	16-Feb-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT Bank DKI (34 Bangunan Kantor)	14.300.660.100	31-May-11	30-May-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 ruang ATM)	3.120.130.953	7-Jul-11	6-Jul-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT Bank DKI (22 kantor kecamatan)	2.609.622.450	7-Jul-11	6-Jul-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT Astra Daihatsu Motor	298.765.927	3-Jan-11	2-Jan-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI)	25.000.000	18-Oct-11	17-Oct-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT Alam Segar Jaya	719.293.062	28-Feb-12	27-Feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Yayasan Ancol Barat	160.784.300	12-Apr-12	11-Apr-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation	990.000.000	12-Apr-12	11-Apr-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Yayasan Harapan Bangsa (3 unit SD)	507.338.366	15-Jun-12	14-Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Yayasan Harapan Bangsa (TK dan SD)	338.225.578	27-Jan-15	26-Jan-20	61.798.000	5.618.000	-	-	-	67.416.000	3.370.800	-	-	-	-	-	3.370.800
26	PT Wiradharma Sportindo	563.709.296	8-Nov-12	7-Nov-17	463.709.296	-	-	-	-	463.709.296	23.185.464,80	-	-	-	-	-	23.185.465
27	Koperasi Puteri Salju	208.572.440	22-Nov-12	21-Nov-17	-	-	-	-	-	-	93.423,00	-	-	-	-	-	93.423
28	RS Atmajaya	25.000.000	29-Aug-13	29-Aug-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kajima Waskita (KAWA)	496.110.320	2-Sep-14	31-Dec-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Rukun Gaya Baru	650.000.000	12-Aug-09	10-Aug-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Yayasan Jemaat Sungai Yordan	125.000.000	5-Jul-12	4-Jul-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Gereja Tiberias Indonesia	375.000.000	14-May-12	13-May-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Nata Sempurna Abadi	75.000.000	4-Apr-05	3-Apr-10	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	202.020.000,00	43.800.000	-	-	-	-	245.820.000
34	Koperasi Karyawan Bina Sejahtera BP3W Kodya Jakarta Utara	42.750.000	30-May-05	29-May-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Yayasan Mahatma Gading	1.266.767.531	28-Oct-13	27-Oct-18	44.607.519	-	-	44.607.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Yayasan Al - Hidayah	40.000.000	14-Mar-13	14-Mar-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT KMC Indonesia	400.000.000	25-Apr-14	25-Apr-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Peraliran (KPPOP)	430.400.000	19-Jun-14	18-Jun-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawarah	545.000.000	14-Oct-14	13-Oct-19	-	16.666.667	-	-	-	16.666.667	-	833.333.000	-	-	-	-	833.333
40	Koperasi Perikanan Mina Jaya	97.282.208	14-Oct-14	13-Oct-19	3.870.802	-	-	3.870.802	-	-	774.160	-	-	774.160	-	-	0
41	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	30.000.000	31-Oct-14	30-Oct-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT Flora Hijau Permai	120.000.000	14-Jul-03	13-Jul-08	48.000.000	72.000.000	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-
43	Kadin Jakarta Barat	40.000.000	22-Feb-08	21-Feb-13	-	-	-	-	-	-	12.208.000,00	-	-	12.208.000	-	-	-
44	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	845.563.944	18-Sep-13	17-Sep-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	828.844.687	24-Aug-13	23-Aug-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT Antilope Madju Puri Indah	1.806.415.004	30-Nov-13	29-Nov-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Palang Merah Indonesia Jakarta Barat	50.000.000	18-Sep-13	19-Sep-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	1.050.000.000	18-Aug-14	18-Aug-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Yayasan Pendidikan Kemurnian	563.708.802	23-Apr-13	22-Apr-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT Petross Gas	3.718.465.786	31-Mar-15	30-Mar-20	-	-	-	-	-	-	-	5.892.335	-	-	-	-	5.892.335
51	Yayasan Suhargo Gondokusumo	530.000.000	25-Jun-12	24-Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Yayasan Muslim Bojong Indah	30.000.000	19-Apr-12	18-Apr-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Yayasan Pendidikan Citra Kasih (Blok bl. 11-12)	855.000.000	12-Apr-12	11-Apr-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT Davalty Mugitama Gasindo	2.395.764.506	15-Mar-12	14-Mar-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Yayasan Pendidikan Islam Al Huda	45.000.000	29-Apr-08	28-Apr-11	-	-	-	-	-	-	49.215.000,00	-	-	-	-	-	49.215.000

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET					DENDA PIUTANG SEWA ASET						
					Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018		Saldo 31 Desember 2018	Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018		Saldo 31 Desember 2018				
						Penambahan	Pengurangan			Penambahan	Pengurangan					
			TAHUN BERJALAN	Koreksi		PELUNASAN	Koreksi			PKS	Koreksi		Pelunasan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
56	PT Petroleum Sukses	882.950.000	27-Apr-06	26-Apr-11	706.360.000					706.360.000	2.104.070.350,00	385.672.560				2.489.742.910
57	Pentrago Fertila Utama	500.000.000	23-Oct-07	23-Oct-12	500.000.000					500.000.000	1.309.500.000,00	365.000.000				1.674.500.000
58	Yayasan Diananda (TK)	253.643.183	20-Nov-12	19-Nov-17	-					-	-	-				-
59	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	175.000.000	14-Nov-12	14-Nov-17	-					-	1.645.000,00					1.645.000
60	Alfa Indah Sportindo	546.411.042	15-Mar-12	14-Mar-17	-					-	-	-				-
61	PT Alita Praya Mitra	802.200.000	23-Nov-07	21-Feb-12	204.030.000			204.030.000		-	129.956.400,00			129.956.400		-
62	Perusahaan Umum Damri	2.500.000.000	1-Nov-12	1-Nov-17	-	-		-		-	-	-			-	-
63	Yayasan Tanimbar Lestari	136.370.930	5-May-12	8-May-17	-					-	-					-
64	Ikrar Anugerah Perkasa	385.000.000	12-Sep-12	11-Sep-17	385.000.000	-	-			385.000.000	19.250.000,00					19.250.000
65	Koperasi Pegawai Dinas Pariwisata	125.000.000	30-Dec-08	29-Nov-13	-					-	169.075.000,00			100.000.000		69.075.000
66	Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM	30.000.000	14-Jul-08	13-Jul-13	12.000.000					12.000.000	21.660.000,00	8.760.000		-		30.420.000
67	PT Multi Kontrol Nusantara	602.228.090	14-Dec-14	13-Dec-19	84.826.617	42.413.309	63.619.963		63.619.963	127.239.926	381.720	5.980.277				6.361.996
68	Yayasan Putra Bahagia	1.157.559.375	14-Jun-14	13-Jun-19	-	-				-	694.536,00			694.536		-
69	CV Kandang Mas	180.386.975	29-Dec-10	28-Dec-15	40.399.263					40.399.263	2.019.963,00					2.019.963
70	Himpunan Penyayang Binatang	30.000.000	30-Jun-11	29-Jun-16	-					-	-					-
71	PT Safari Persada	986.491.268	7-Jul-11	6-Jul-16	811.491.268					811.491.268	40.574.563,00					40.574.563
72	PT Asri Karya Indah Pesona	620.080.226	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-
73	Yayasan Pantara	112.741.859	8-Aug-12	7-Aug-17	-					-	-					-
74	PT Griya Berlian	3.190.000.000	29-Nov-12	28-Nov-17	1.325.000.000	-				1.325.000.000	66.250.000,00	-				66.250.000
75	CV Satu Nafas	500.000.000	3-Jul-08	2-Jul-13	350.000.000					350.000.000	709.000.000,00	255.500.000				964.500.000
76	Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan	1.268.345.916	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-
77	CV Virginji	986.491.268	4-Apr-12	3-Apr-17	-					-	-					-
78	PT Figurkarya Semesta	507.338.366	10-Dec-12	10-Dec-17	113.622.926	-		113.622.926		-	5.681.146	-		5.681.146		0
79	PD Pembangunan Sarana Jaya	1.200.000.000	4-Apr-05	4-Apr-10	-					-	720.000,00					720.000
80	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga	37.500.000	13-Oct-06	12-Oct-11	-					-	735.000,00					735.000
81	PT Harkat Abadi Sukses				-					-	-					-
82	Yayasan Nawami Bhakti	375.000.000	15-Oct-12	15-Oct-17	-					-	-					-
83	PT Harco Jaya Abadi	2.100.000.000	1-Jun-06	30-May-11	-					-	-					-
84	PT Aksara Andalana Prima Lokasi Kp. Rambutan	4.246.908.500	21-Apr-08	21-Apr-13	-					-	6.169.532.586,00			1.000.000.000		5.169.532.586
85	PT T. Energy (PKS Lama)	2.700.000.000	1-Dec-08	30-Nov-13	316.342.950					316.342.950	545.228.159,00			198.516.286		346.711.873
86	PT T. Energy (PKS Baru)	1.832.055.212	1-Dec-13	1-Dec-18	1.455.916.867	375.833.333	-	1.831.750.200		-	84.207.510,00	7.380.000		91.587.510		-
87	Yayasan Perguruan Rakyat	750.000.000	2-Feb-14	1-Feb-19	-					-	-					-
88	Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya	150.000.000	25-Apr-13	24-Apr-18	-	-				-	90.000,00	-	-	90.000		-
89	Yayasan Dharma Siwa	250.000.000	27-Apr-13	26-Apr-18	-					-	-					-
90	PT MAJU LAMASITTAH LATIEF	3.005.000.000	26-Nov-02	26-Aug-27	790.625.000	-	-	673.625.000		117.000.000	76.937.500	-		71.087.500	-	5.850.000
90	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	32.500.000	25-May-11	24-May-16	-					-	-					-
91	PT Bank BNI (Persero) Tbk	375.000.000	1-Jun-09	31-May-14	-					-	-					-
92	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.202.960.000	7-Jun-14	6-Jun-19	-					-	16.841.440,00		3.368.288	3.368.288	16.841.440,00	-
93	Yayasan Rumah Bersalin Bidara Mulla	100.000.000	16-Jun-14	15-Jun-19	-					-	-					-
94	PT Bianglala Metropolitan	2.189.585.000	13-Jan-11	12-Jan-16	-					-	-					-
95	Kadin Jakarta Timur	125.000.000	13-Sep-11	12-Sep-16	25.000.000			25.000.000		-	3.750.000,00			3.750.000		-
96	Yayasan Baitul Muhajirin	30.000.000	1-Jan-13	31-Dec-18	-					-	50.000	30.000				80.000
97	PT Paljaya Bumi Utama	1.250.000.000	18-Jan-06	18-Jan-11	1.000.000.000					1.000.000.000	3.094.750.000,00	730.000.000				3.824.750.000
98	Yayasan Nurmala Hikmah	56.370.930	1-Jun-11	1-Jun-16	-					-	-					-
99	PT Hyunwoo Trading Indonesia	1.111.600.000	5-May-08	4-May-13	1.111.600.000					1.111.600.000	2.692.962.160,00	811.468.000				3.504.430.160
100	PT BNI (Persero) Tbk (Cabut Jatinegara)	425.000.000	1-Apr-11	31-Mar-16	-					-	-					-
101	Koperasi Karyawan RSUD Pasar Rebo	842.181.687	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-
102	Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI)	50.000.000	29-Apr-14	28-Apr-19	-					-	-					-
103	PT Satria Cipta Perkasa	2.252.972.568	13-May-14	12-May-19	1.186.519.525	475.759.053	-			1.662.278.578	87.667.276,90	12.280.676				99.947.953
104	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	112.741.859	18-Sep-13	17-Sep-18	-	-				-	-					-
105	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	550.000.000	24-Jul-06	23-Jul-18	-	-				-	-					-
106	PT Bumi Bintang Bersatu	700.000.000	2-Jul-14	1-Jul-19	-	-		-		-	-	-		-		-
107	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat "Wijaya Kusuma"	55.000.000	8-Aug-14	7-Aug-19	4.583.333	20.166.667		22.000.000		2.750.000	1.100.000	137.500		1.100.000		137.500
108	PT Swadaya Niaga Jaya (Smesco's)	22.500.000.000	10-Apr-15	9-Apr-20	-					-	375.000,00		-	-		375.000
109	Swadaya Panduarta	500.000.000	30-Oct-14	30-Oct-19	-	-				-	-		-			-
110	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	422.781.972	17-Nov-14	16-Nov-19	7.443.850			7.443.850		-	4.466.310			4.466.310		-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET					DENDA PIUTANG SEWA ASET						
					Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018				Saldo 31 Desember 2018	Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018				Saldo 31 Desember 2018
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
						TAHUN BERJALAN	Koreksi	PELUNASAN	Koreksi			PKS	Koreksi	Pelunasan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
111	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	175.000.000			-					-	-					-
112	PT Tunas Dipta Persada	4.350.000.000			1.585.000.000	-		-		1.585.000.000	79.250.000	-				79.250.000
113	PT Setia Utama Island	5.590.000.000	18-Dec-14	17-Dec-19		1.304.333.333				1.304.333.333	30.186.000	35.030.667				65.216.667
114	PT Gas Energi Indonesia	572.432.513	1-Sep-13	1-Sep-15	-					-	1.323.837					1.323.837
115	PT PLN Persero	145.139.715	4-Feb-15	3-Feb-20	-					-	-					-
116	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	2.222.665.229	26-Feb-15	25-Feb-20	369.189.502			369.189.502		-	22.151.370	19.567.044		41.718.414		0
117	PT Holcim Beton	5.500.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20	-					-	-					-
118	PT Swarna Jaya Sejahtera	100.000.000	11-Mar-15	10-Mar-20	-					-	-					-
119	Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Falah	25.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20	-					-	250.000	40.000		290.000		-
120	Yayasan Bait-el Indonesia	425.000.000	30-Aug-11	29-Aug-16						-	-					-
121	UD Lautan Mutiara	2.254.837.184	23-Apr-14	22-Apr-19	317.604.267	336.660.523		317.604.267		336.660.523	23.820.320	16.833.026		23.820.320		16.833.026
122	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	25.000.000	5-May-15	4-May-20	-	-				-	-	-				-
123	PT Balats Dwi Tunggal	325.859.614	26-May-15	25-May-17	-					-	-					-
124	Yayasan Diannanda (SD)	1.710.857.713	26-Sep-13	27-Sep-18	-					-	3.065.294	-				3.065.294
125	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	3.750.000.000	1-Jul-15	30-Jun-20	-					-	-					-
126	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	400.000.000	31-Jan-13	30-Jan-18	-					-	-					-
127	PT Surya Jaya Mandiri	110.000.000	9-Jul-15	8-Jul-20	-					-	-					-
128	PT Jamkrida Jakarta	31.373.624	1-Jul-15	30-Jun-17	-					-	-					-
129	Yayasan Meek Nusantara	27.000.000	27-Jul-15	26-Jun-18	-					-	-					-
130	Yayasan Rasa Sayang Mandiri	310.040.112	26-Oct-15	25-Oct-20	-					-	-					-
131	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	56.370.930	29-Oct-15	28-Oct-20	-					-	449.440	11.910		449.440		11.910
132	Yayasan Haleluya Jakarta	1.691.127.888	18-Nov-15	17-Nov-20	28.090.000	29.775.400	626.990.000			684.855.400	26.012.400	893.262	6.741.600			33.647.262
133	Yayasan Pelita Bangsa	2.333.333.340	23-Dec-15	22-Dec-20	-					-	-					-
134	PT Bank DKI (22 ATM dan Loket)	11.000.000	6-Oct-15	5-Oct-20	-					-	-					-
135	PT Bank DKI (58 ATM dan Loket)	29.000.000	28-Dec-15	27-Dec-20	-					-	-					-
136	PT Bank DKI (Wallikota Jakarta Pusat)	1.675.547.578	3-Feb-16	2-Feb-21	-	-				-	11.027.460	-		11.027.460		(0)
137	PT Jaya Sejaht Dua	555.000.000	11-Feb-16	10-Feb-21	-					-	-					-
138	PT Indocater	1.691.127.888	12-Feb-16	11-Feb-21	-	-				-	-	1.235.960				1.235.960
139	PT Duta Graha Karya	125.000.000	11-Mar-16	10-Mar-17	-					-	-					-
140	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat	281.854.648	20-Nov-14	21-Nov-19	-	-				-	3.208.580,00	-		3.208.580		-
141	PT Badra Abadi Perkasa	541.160.924	9-Feb-16	8-Feb-21	-					-	-	-				-
142	PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia (RSUD Koja)	106.372.475	18-Mar-16	17-Mar-21	-					-	-	-				-
143	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	693.945.000	8-Apr-15	7-Apr-20	-					-	6.384.294	-		6.384.294		-
144	PT Unggul Dian Perkasa	1.944.374.289	7-Mar-16	6-Mar-21	304.683.750	258.371.820	60.936.750			623.992.320	2.544.000	1.797.760				4.341.760
145	Yayasan Tanimbar Lestari	500.000.000	26-Apr-16	25-Apr-21	-					-	-					-
146	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	197.298.253	25-Apr-16	24-Apr-21	-					-	-	-				-
147	PT Bank Mandiri (RSUD Budhi Asih, Pasar Rebo, RSKD Duren Sawit)	540.000.000	3-Mar-16	2-Mar-21	-					-	-					-
148	PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia (RSUD Tarakan)	230.244.170	14-Apr-16	13-Apr-21	-					-	-					-
149	PT Bank DKI (Gedung Prasada Sasana Karya)	7.448.704.003	2-May-16	1-May-21	-	-				-	-					-
150	PT Pertamina Gas	260.000.000	2-May-16	1-May-21	-					-	-					-
151	Yayasan Safa Marwah	25.000.000	30-May-16	29-May-21	-					-	-					-
152	Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta	5.000.000	9-May-16	8-May-21	-					-	-					-
153	PT Seabreeze Indonesia	270.580.462	22-Apr-16	21-Apr-21	-					-	-					-
154	Yayasan Anak Bangsa Basmol	250.000.000	22-Feb-16	21-Feb-16	-	-				-	-	333.333				333.333
155	PD PAL Jaya	120.000.000	1-Feb-16	31-Jan-17	70.000.000		-	70.000.000	-	-	3.500.000	-			3.500.000	-
156	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat (SD)	563.709.296	23-Jul-16	22-Jul-16	-					-	5.618.000			5.618.000		-
157	PT Trust Parking Indonesia	1.200.000.000	1-Nov-14	31-Oct-19	-					-	-					-
158	PT Diansyah Dinamika Warna	225.483.718	15-Oct-15	14-Oct-20	-					-	-					-
159	Koperasi Pegawai RSUD Tarakan	466.074.846	29-Oct-15	28-Oct-20	-					-	-					-
160	PT Gas Energi Indonesia (Jakbar)	622.624.753	14-Nov-15	13-Nov-20	117.078.474		-	117.078.474		-	6.074.826	-	-		6.074.826	0
161	Yayasan Suhargo Gondokusumo	2.760.000.000	1-Apr-16	31-Mar-21	-					-	-					-
162	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tua	5.000.000	29-Oct-16	28-Oct-21	-					-	-					-
163	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta	1.348.400.000	14-Dec-16	13-Dec-21	-					-	-					-
164	PT. Gabungan Samudera Internasional	1.002.500.000	23-Dec-16	22-Dec-21	-					-	-					-
165	PT. Sanjaya Internasional Fisherv	1.002.500.000	27-Dec-16	26-Dec-21	-					-	-					-

NO.	PIHAKE KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET					
					Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018				Saldo 31 Desember 2018	Saldo Audited 31-12-2017	Mutasi Tahun 2018				Saldo 31 Desember 2018
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
						TAHUN BERJALAN	Koreksi	PELUNASAN	Koreksi			PKS	Koreksi	Pelunasan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
166	UD. Mina Sari	205.000.000	29-Dec-16	28-Dec-21	-					-	-					-
167	PT. Karya Syukur Maju Bersama	761.900.000	30-Dec-16	29-Dec-21	-					-	-					-
168	PT. Jamkrida	2.073.074.400	10-Mar-17	9-Mar-20	-					-	-					-
169	PT.EVI ASIA TENGGARA	701.250.000	29-Mar-17	29-Mar-22	-					-	-					-
170	Yayasan AL-Huda	125.000.000	16-May-17	25-May-22	-					-	-					-
171	PT. AETRA AIR JAKARTA	576.000.000	30-Aug-17	30-Aug-19	-					-	-					-
172	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TIARA KASIH	1.138.100.000	25-Oct-17	25-Oct-22	-	246.800.000				246.800.000	-	12.340.000				12.340.000
173	PT. GERAK MAJU ABADI	5.500.000.000	28-Oct-17	27-Oct-22	-					-	-					-
174	PT. ADICIPITA BOGA PRIMA INTIPRIMA	115.200.000	17-Apr-17	17-Apr-20	-					-	-					-
175	PT STELLA JAYA ABADI	175.000.000	1-Jan-17	31-Dec-21	-					-	-					-
176	PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA	64.974.000	4-Aug-17	4-Aug-19	-					-	-					-
177	PT JAKARTA TOURISINDO	183.500.000	26-Oct-16	26-Oct-18	-					-	-					-
178	PT TIFFANY MITRA SUKSES	194.000.000	1-Nov-15	1-Nov-17	-					-	-					-
179	PT BANK DKI	14.674.030.000	28-Feb-17	28-Feb-22	-					-	-					-
180	PT AMAN SAMUDERA INDONESIA	1.002.500.000	26-Jan-17	25-Jan-22	-					-	-					-
181	PT MARCELUNDO CITRA LESTARI	673.920.000	27-Jan-17	26-Jan-22	-					-	-					-
182	PT BAHTERA PRIMA PERSADA	756.400.000	1-Nov-15	1-Nov-17	-					-	-					-
183	PT YOMA MINA SEJAHTERA	1.002.500.000	9-Jan-17	8-Jan-22	-					-	-					-
184	PT FAN MARINA SHIPYARD & CO	717.700.000	20-Feb-17	20-Feb-22	-					-	-					-
185	PT ADHIKARSA CIPTA SENTOSA	83.250.000	19-Jun-17	19-Jun-21	-					-	-					-
186	BANK NEGARA INDONESIA	75.000.000	1-Jul-15	2-Jul-20	-					-	-					-
187	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSE)	75.000.000	30-Jun-16	30-Jun-21	-					-	-					-
188	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.	75.000.000	2-May-16	2-May-21	-					-	-					-
189	DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	150.000.000	1-Nov-17	31-Oct-22	-					-	-					-
TOTAL PIUTANG					15.406.772.252	3.184.398.105	751.546.713	3.799.822.540	63.619.963	15.479.274.567	18.274.307.387,79	2.708.477.643	10.109.888	1.715.846.644	26.416.266	19.262.972.008

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2018**

No.	Pihak Ketiga	Thn	Jangka Waktu	Nilai Kontribusi PKS	Piutang Pokok	Mutasi Tahun 2018				Piutang Pokok Per 30 DES 2018	Piutang Denda Per 31 Desember 2017	Mutasi Tahun 2018				Piutang Denda Per 31 DES 2018
		PKS	PKS	BOT/BTO	Per 31 Des 2017	Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
						PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
1	PT. Kempas Indah Indonesia	1997	1999 s/d 2024	910.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Duta Pertiwi Tbk	1997	1997 s/d 2017	460.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Duta Pertiwi Tbk	1999	1999 s/d 2029	1.450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT. Rointa Eka Jaya	2001	2001 s/d 2031	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT. Duta Masa Nusa	2003	2006 s/d 2031	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.860.000.000	-	-	-	4.860.000.000
6	PT. Duta Pertiwi Tbk	2003	2004 s/d 2029	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT. Gading Raya Propertindo	2004	2004 s/d 2029	3.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PT. Hotel Cikini Raya	2006	2008 s/d 2032	6.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PT. Grand Indonesia	2009	2008 s/d 2035	53.074.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT. Jaya Real Property	2011	2012 s/d 2037	6.957.000.000	833.333	166.667	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
11	PT. Fajar Setia Mandiri	2002	2003 s/d 2023	2.218.000.000	-	-	-	-	-	-	84.300.000	-	-	7.300.000	-	77.000.000
12	PT. AGB Tuna (Coldstorage)	2004	2004 s/d 2024	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Yayasan Al-Muhajirin	2005	2005 s/d -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT. Gamma Investa Lestari	2006	2005 s/d 2030	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gereja Protestan Minahasa	2006	2006 s/d -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT. AGB Tuna (Pabrik Es)	2006	2006 s/d 2026	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT. Duta Pertiwi Tbk	2008	2006 s/d 2031	7.453.280.000	-	-	-	-	-	-	2.420.000	12.100.000	-	-	-	14.520.000
18	PT. Gerak Maju Abadi	1997	1997 s/d 2017	5.315.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT. Bina Citra Tataswati	2000	2002 s/d 2040	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yayasan Tunas Muda	2000	2000 s/d 2025	911.281.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	2001	2001 s/d 2026	562.500.000	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.196.250	19.158.750	-	-	-	20.355.000
22	Yayasan Katolik Mardi Luhur	2001	2001 s/d 2026	911.281.328	215.061.875	18.301.250	39.615.625	-	-	272.978.750	281.586.011	3.275.924	176.784.599	-	-	461.646.534
23	PT. Pesona Marga Mandiri	2003	2004 s/d 2029	7.494.152.500	-	-	-	-	-	-	1.383.433	691.717	-	2.075.150	-	-
24	Yayasan Patmos	2003	2006 s/d 2031	2.629.958.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Yay. Pusat Pelatihan E&P	2003	2006 s/d 2031	2.446.290.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gereja Bethel Jemaat Ecclesia	2005	2005 s/d -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	2006	2008 s/d 2033	6.929.568.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT. Langgeng Ayom Lestari	1990	1991 s/d 2021	2.605.000.000	-	-	-	-	-	-	16.050.000	-	-	-	-	16.050.000
28	Yay. Sapta Nawami Bhakti	1992	1992 s/d 2012	351.779.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT. Dharma Alumas Sakti	1992	1997 s/d 2044	22.271.759.150	-	-	-	-	-	-	60.066.039.232	-	-	60.066.039.232	-	-
30	PT. Bakrie Investindo	1992	1997 s/d 2044	18.237.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT. Pasific Bangun Mas	2001	2001 s/d 2026	700.000.000	-	-	-	-	-	-	116.600.000	-	-	-	-	116.600.000
32	PT. Perwita Margasakti	2003	2003 s/d 2028	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	19.500.000	-	-	-	-	19.500.000
33	PT. Metropolitan Kentjana	2008	2006 s/d 2031	24.912.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT. Perwita Margasakti	2010	2010 s/d 2035	5.220.000.000	-	-	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	2.700.000
35	Yayasan Tugasku	1998	2004 s/d 2024	1.250.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Yay. Pend. Pemb. Bangsa	2003	2003 s/d 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT. Fajar Setia Mandiri	2003	2003 s/d 2023	1.600.000.000	109.583.333	42.500.000	-	152.083.333	-	-	382.116.333	12.070.000	76.213.667	-	-	470.400.000
38	PT. Pasific Prima Buana Mas	2004	2004 s/d 2029	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1.170.311.605	-	-	-	-	1.170.311.605
39	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2004	2004 s/d 2029	2.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2006	2006 s/d 2031	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT. AAP				4.302.396	-	-	-	-	4.302.396	-	-	-	-	-	-
42	Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP (PT. Tunas Dipta Persada)	JP	30 Tahun		540.000.000	-	-	-	-	540.000.000	-	-	-	-	-	-
43	Eks. PDUK		30 Tahun		400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	T. Kav No. I.C.2	JT	25 Tahun		525.000.000	-	-	-	-	525.000.000	-	-	-	-	-	-
45	Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) (PT. Majuan Masitah Latief)	JT	30 Tahun		1.510.000	-	-	-	-	1.510.000	-	-	-	-	-	-
46	Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P)	JT	30 Tahun		450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	-	-	-	-	-	-
47	PT. WAHANA NUSANTARA			45.560.339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				247.681.641.075	2.246.290.937	90.967.917	39.615.625	152.083.333	-	2.224.791.146	62.144.202.864	4.907.296.391	252.998.266	60.075.414.382	-	7.229.083.139,00

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PIUTANG SEWA PEMANFAATAN TITIK REKLAME
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2018	Keterangan
1	PT. Nindhotama Kharisma	JPO	Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII, Kebon Kacang, Jakarta Pusat	341.500.000	0			0	Lunas 14 Mei 2014
2	PT. Caesar	Bahu Jalan	Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten, Jakarta Barat	170.000.000	170.000.000			170.000.000	Titik B-6A; SK Nomor 46/SK/BPKD/PPTR/X/09 tanggal 6-10-2009
3	PT. Billy Sinar Pratama	JPO	Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex. Kymco Motor, Jakarta Barat	39.500.000	39.500.000			39.500.000	SK Nomor 145/SK/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 11-03-2010
4	PT. Ditadini Neo Swara	Halte Busway Bagian Dalam	Koridor 1 (19 unit)	25.000.000	25.000.000			25.000.000	SPS Nomor 177/SPS/BPKD-PPTR/IV/2010 tanggal 23-04-2010
5	PT. Starindo Pola Abadi	Halte Bus Reguler	Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI, Jakarta Timur	25.741.000	25.741.000			25.741.000	
6	PT. Garis Mediatama	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes, Jakarta Selatan	157.500.000	157.500.000			157.500.000	SPS Nomor 158/SPS/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 19-03-2010
7	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi, Kec.Mampang Prapatan, Jaksel	372.000.670	186.000.335			186.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
8	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi, Kec.Matraman Jak Timur	68.000.670	34.000.335			34.000.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
9	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Bekasi Barat samping Fly Over, Kec.Jatinegara Jak Timur	27.000.670	13.500.335			13.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
10	PT. Dinamika Mitra Internusa	Titik S-9B	Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas, Kec.Keb Baru, Jak Sel	400.000.670	200.000.335			200.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
11	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Warung Jati Barat depan Hotel Jati Padang, Kec.Ps Minggu Jak Sel	226.000.670	113.000.335			113.000.335	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
12	PT. Puri Anugerah Utama	Pos Polisi	Jl. S.Parmar-Jl.Palmerah, Kec.Palmerah Jak Barat	105.000.670	52.500.335			52.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
13	PT. Simpati Advertising	JPO	Samping Pasar raya Blok M, Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai, Jakarta Selatan	6.690.450	6.690.450			6.690.450	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
14	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox, Senen, Jakarta Pusat	254.589.000	127.294.500			127.294.500	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
15	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya depan UI, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
16	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC, Senen, Jakarta Pusat	289.900.000	289.900.000			289.900.000	Belum dibayar
17	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya dpn Carolus, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2018	Keterangan
18	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. HayamWuruk depan Htl Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat	285.500.000	142.750.000			142.750.000	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
19	PT. Caesar	Titik B1B	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
20	PT. Caesar	Titik B1A	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
21	PT. Caesar	Titik P7B	Jl, HR Rasuna/Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat	945.000.000	472.500.000			472.500.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
22	PT. Mida Jaya	Titik B10A	Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak, Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar	122.000.000	122.000.000			122.000.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
23	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti Fauji, Kec Ps Minggu, Jak Sel	353.000.670	176.500.335			176.500.335	Tahap I Lunas 25 Januari 2012 dikeluarkan 2x SPS
24	PT. Puri Anugrah Utama	JPO	Jl. Matraman Raya dpn BCA, Kec. Matraman Jak-Sel	280.067.000	0			0	Lunas 20 Mei 2014
25	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Casablanca depan Halte SD/Pemakaman, Kec.Tebet Jak-Sel	200.900.000	0			0	Lunas 25 Agustus 2014
26	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.551.000.000	0			0	SPS No. 5247/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
27	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.610.000.000	0			0	SPS No. 5246/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
28	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.850.900.000	0			0	SPS No. 5248/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
29	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.967.000.000	0			0	SPS No. 5243/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
30	PT. Unggul Dian Perkasa	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	3.500.000.000	0			0	SPS No. 5244/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
31	PT. Insite Media	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	5.849.800.000	0			0	SPS No. 5249/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
32	PT. Prisma Harapan	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	2.101.000.000	0			0	Lunas 30 Desember 2014
				5.684.292.140	2.871.178.295	0	0	2.871.178.295	

**DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD
PER 31 Desember 2018**

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Sekretariat DPRD	1.403.190.844,00	-	-	1.403.190.844
2	Biro Administrasi Sekretariat Daerah	315.457.310,00	-	66.960.190,00	382.417.500
3	Biro Tata Pemerintahan	148.277.366,00	-	35.624.133,00	183.901.499
4	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	176.607.325,00	-	36.257.595,00	212.864.920
5	Biro Hukum	33.147.007,00	-	-	33.147.007
6	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	127.791.515,00	-	33.058.195,00	160.849.710
7	Biro Umum	311.406.287,00	979.213.416,00	177.230.550,00	1.467.850.253
8	Biro Perekonomian	41.482.360,00	-	12.684.300,00	54.166.660
9	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	10.153.850,00	1.677.000,00	17.314.445,00	29.145.295
10	Biro Kesejahteraan Sosial	55.427.528,00	-	43.974.500,00	99.402.028
11	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	243.136.917,00	-	46.190.295,00	289.327.212
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	38.444.670,00	-	77.249.960.111,00	77.288.404.781
13	Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan	167.434.321,00	5.768.400,00	13.309.950,00	186.512.671
14	Unit Pengelola Rumah Susun Marunda	224.979.660,00	-	-	224.979.660
15	Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru	13.309.700,00	-	-	13.309.700
16	Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat	62.906.305,00	-	-	62.906.305
17	Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	6.069.360,00	10.000.000,00	1.939.423,00	18.008.783
18	Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek	22.147.950,00	-	87.192.050,00	109.340.000
19	Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang	95.718.480,00	-	-	95.718.480
20	Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari	102.964.562,00	-	13.342.670,00	116.307.232
21	Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	449.080.468,00	15.700.826,00	-	464.781.294
22	Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok	16.962.843,00	82.625.130,00	-	99.587.973
23	Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum	47.409.850,00	-	56.633.775,00	104.043.625
24	Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat	67.233.855,00	-	-	67.233.855
25	Unit Pengelola Rumah Susun Semper	149.256.585,00	-	11.863.720,00	161.120.305
26	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKPUS	42.893.486,00	-	-	42.893.486
27	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKUT	15.212.340,00	-	-	15.212.340

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
28	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKBAR	73.263.875,00	-	11.231.915,00	84.495.790
29	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKSEL	47.454.416,00	-	9.707.841,00	57.162.257
30	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKTIM	29.043.957,00	-	1.754.514,00	30.798.471
31	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kep. Seribu	36.953.748,00	-	-	36.953.748
32	Dinas Kehutanan	6.413.585.093,00	2.110.848.521,00	3.634.975.671,00	12.159.409.285
33	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.449.994.555,00	3.382.962.351,00	485.321.135,00	7.318.278.041
34	Sudin Kehutanan - JAKPUS	1.080.728.581,00	436.914.474,00	701.639.010,00	2.219.282.065
35	Sudin Kehutanan - JAKUT	154.104.601,00	15.070.000,00	2.661.365.147,00	2.830.539.748
36	Sudin Kehutanan - JAKBAR	2.192.155.671,00	554.421.468,00	46.223.430,00	2.792.800.569
37	Sudin Kehutanan - JAKSEL	259.532.463,00	-	2.552.294.829,00	2.811.827.292
38	Sudin Kehutanan - JAKTIM	2.857.235.354,00	700.076.472,00	1.875.015.516,00	5.432.327.342
39	Dinas Bina Marga	409.606.663,00	290.448.558,00	90.439.535.753,00	91.139.590.974
40	Sudin Bina Marga - JAKPUS	24.986.225,00	1.255.851.137,00	4.224.000,00	1.285.061.362
41	Sudin Bina Marga - JAKUT	31.413.800,00	4.388.615.189,00	23.072.500,00	4.443.101.489
42	Sudin Bina Marga - JAKBAR	102.324.860,00	5.198.818.006,00	142.188.255,00	5.443.331.121
43	Sudin Bina Marga - JAKSEL	65.964.050,00	-	2.181.599.096,00	2.247.563.146
44	Sudin Bina Marga - JAKTIM	275.403.860,00	1.697.654.358,00	28.901.510,00	2.001.959.728
45	Dinas Sumber Daya Air	1.486.081.279,00	25.119.476.333,00	115.060.329,00	26.720.617.941
46	Sudin Sumber Daya Air - JAKPUS	1.211.622.459,00	3.416.844.883,00	-	4.628.467.342
47	Sudin Sumber Daya Air - JAKUT	323.825.504,00	10.024.427.402,00	-	10.348.252.906
48	Sudin Sumber Daya Air - JAKBAR	400.570.143,00	2.300.795.933,00	-	2.701.366.076
49	Sudin Sumber Daya Air - JAKSEL	117.425.351,00	17.340.874.399,00	-	17.458.299.750
50	Sudin Sumber Daya Air - JAKTIM	3.456.200,00	11.246.171.283,00	5.616.600,00	11.255.244.083
51	Sudin Sumber Daya Air Kab Adm Kep Seribu	77.257.038,00	2.926.105.576,00	21.389.593,00	3.024.752.207
52	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	609.857.600,00	-	48.496.004.755,00	49.105.862.355
53	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - JAKPUS	133.889.250,00	-	43.503.350,00	177.392.600
54	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - JAKUT	78.465.133,00	-	-	78.465.133
55	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - JAKBAR	100.186.050,00	-	9.665.250,00	109.851.300
56	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - JAKSEL	155.062.790,00	-	14.968.250,00	170.031.040
57	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - JAKTIM	120.697.694,00	-	11.815.650,00	132.513.344
58	Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan - Kep. Seribu	73.563.358,00	-	3.651.186,00	77.214.544
59	Dinas Perhubungan	300.726.119,00	516.659.000,00	318.649.236,00	1.136.034.355
60	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	275.330.191,00	-	2.677.577.298,00	2.952.907.489

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
61	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	229.045.133,00	-	35.323.860,00	264.368.993
62	Unit PPKB Ujung Menteng	189.626.800,00	-	5.347.764.752,00	5.537.391.552
63	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	170.999.036,00	-	1.699.386.562,00	1.870.385.598
64	Unit Pengelola Perparkiran	2.886.783.208,00	-	-	2.886.783.208
65	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	15.059.100,00	-	1.167.500,00	16.226.600
66	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	432.768.390,00	-	-	432.768.390
67	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	4.201.776.875,00	9.212.500,00	1.441.000,00	4.212.430.375
68	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	417.428.188,00	13.418.350,00	1.770.560,00	432.617.098
69	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	262.244.623,00	5.660.600,00	42.402.400,00	310.307.623
70	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	52.772.910,00	-	3.733.591.576,00	3.786.364.486
71	Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan	28.215.220,00	-	-	28.215.220
72	Sudin Perhubungan - JAKPUS	8.777.202,00	-	10.842.700,00	19.619.902
73	Sudin Perhubungan - JAKUT	21.759.797,00	-	259.078.800,00	280.838.597
74	Sudin Perhubungan - JAKBAR	8.586.125,00	-	-	8.586.125
75	Sudin Perhubungan - JAKSEL	305.105.347,00	612.500,00	-	305.717.847
76	Sudin Perhubungan - JAKTIM	85.005.788,00	-	-	85.005.788
77	Sudin Perhubungan - Kep. Seribu	17.374.465,00	-	-	17.374.465
78	DINAS KESEHATAN	1.800.492.789,00	93.648.141.574,00	353.017.740,00	95.801.652.103
79	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.812.686.799,00	477.686.505,00	83.247.615,00	2.373.620.919
80	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	1.245.994.338,00	2.330.846.735,00	244.347.840,00	3.821.188.913
81	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	436.087.310,00	640.634.424,00	-	1.076.721.734
82	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	15.718.821.431,00	3.915.579.138,00	1.070.859.210,00	20.705.259.779
83	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	508.884.533,00	1.866.617.271,00	532.452.300,00	2.907.954.104
84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	2.613.058.385,00	1.417.073.691,00	229.440.063,00	4.259.572.139
85	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	919.834.964,00	1.439.919.832,00	648.156.630,00	3.007.911.426
86	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	3.720.074.830,00	99.678.154,00	73.450.371,00	3.893.203.355
87	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	1.359.027.830,00	1.639.681.767,00	102.067.870,00	3.100.777.467
88	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	854.923.383,00	1.276.249.852,00	320.172.900,00	2.451.346.135
89	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	1.922.377.976,00	1.946.248.035,00	435.256.061,00	4.303.882.072
90	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	641.191.019,00	1.740.268.673,00	151.288.461,00	2.532.748.153
91	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	1.368.786.053,00	1.303.522.288,00	73.657.270,00	2.745.965.611
92	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	1.233.869.462,00	1.769.841.859,00	196.380.252,00	3.200.091.573
93	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	1.232.408.653,00	2.736.962.652,00	61.695.700,00	4.031.067.005

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
94	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	984.251.782,00	1.630.985.830,00	93.850.300,00	2.709.087.912
95	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	913.338.011,00	1.612.772.128,00	92.726.688,00	2.618.836.827
96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	1.049.854.728,00	1.051.222.476,00	177.569.705,00	2.278.646.909
97	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	1.321.087.113,00	666.139.460,00	144.863.644,00	2.132.090.217
98	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	2.492.374.990,00	951.439.342,00	20.665.611,00	3.464.479.943
99	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	517.520.171,00	891.927.282,00	162.293.670,00	1.571.741.123
100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	736.463.034,00	2.039.854.230,00	213.358.863,00	2.989.676.127
101	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	746.513.286,00	755.334.449,00	159.184.990,00	1.661.032.725
102	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	562.378.826,00	1.039.919.636,00	10.667.800,00	1.612.966.262
103	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	476.205.023,00	707.743.527,00	11.591.250,00	1.195.539.800
104	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	3.575.998.162,00	4.694.232.755,00	107.826.118,00	8.378.057.035
105	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	2.842.483.374,00	545.591.423,00	549.344.585,00	3.937.419.382
106	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS	1.272.705.002,00	2.546.931.869,00	418.159.878,00	4.237.796.749
107	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS	1.270.659.028,00	2.303.821.118,00	-	3.574.480.146
108	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS	1.213.565.310,00	2.172.726.459,00	643.893.335,00	4.030.185.104
109	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS	217.076.816,00	1.523.923.461,00	169.084.500,00	1.910.084.777
110	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS	594.321.580,00	1.454.881.265,00	241.498.095,00	2.290.700.940
111	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS	3.306.648.382,00	2.975.522.024,00	17.782.476,00	6.299.952.882
112	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS	988.800.116,00	1.760.519.286,00	505.091.387,00	3.254.410.789
113	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS	532.834.974,00	2.009.247.939,00	44.133.455,00	2.586.216.368
114	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	2.177.055.662,00	1.949.033.858,00	433.113.115,00	4.559.202.635
115	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	629.628.756,00	1.164.657.647,00	156.490.670,00	1.950.777.073
116	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	1.254.947.638,00	3.295.551.328,00	257.870.443,00	4.808.369.409
117	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT	585.773.063,00	5.243.953.520,00	323.342.657,00	6.153.069.240
118	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	922.374.506,00	1.748.527.229,00	641.323.725,00	3.312.225.460
119	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT	1.796.348.995,00	4.357.601.276,00	1.487.055.972,00	7.641.006.243
120	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	447.386.336,00	909.467.648,00	117.813.000,00	1.474.666.984
121	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	1.342.663.139,00	1.315.200.172,00	501.273.985,00	3.159.137.296
122	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	1.017.047.108,00	3.832.439.345,00	493.719.020,00	5.343.205.473
123	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	748.150.367,00	2.542.324.493,00	164.011.773,00	3.454.486.633
124	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	1.398.882.721,00	1.747.360.755,00	392.484.008,00	3.538.727.484
125	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR	771.037.837,00	1.727.368.382,00	68.323.955,00	2.566.730.174
126	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	755.190.331,00	2.049.996.266,00	379.893.700,00	3.185.080.297

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
127	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	470.179.316,00	1.504.473.646,00	226.477.100,00	2.201.130.062
128	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL	670.482.702,00	2.315.491.529,00	39.706.595,00	3.025.680.826
129	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL	1.071.528.371,00	1.169.702.954,00	84.870.610,00	2.326.101.935
130	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL	1.546.202.534,00	1.709.774.185,00	568.425,00	3.256.545.144
131	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL	977.444.822,00	1.823.469.937,00	51.409.500,00	2.852.324.259
132	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL	242.124.921,00	1.206.487.806,00	-	1.448.612.727
133	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL	673.932.097,00	3.326.118.199,00	92.072.820,00	4.092.123.116
134	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL	261.769.653,00	734.329.304,00	653.472.619,00	1.649.571.576
135	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL	517.718.502,00	1.830.245.962,00	87.903.325,00	2.435.867.789
136	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL	1.508.042.182,00	720.972.241,00	50.120.625,00	2.279.135.048
137	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL	234.046.249,00	2.962.025.263,00	79.883.650,00	3.275.955.162
138	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM	610.686.324,00	1.805.088.191,00	193.080.360,00	2.608.854.875
139	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM	486.962.175,00	2.844.744.265,00	275.658.333,00	3.607.364.773
140	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM	2.327.788.750,00	2.282.513.318,00	396.969.119,00	5.007.271.187
141	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM	881.508.394,00	1.388.714.929,00	642.702.329,00	2.912.925.652
142	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM	1.211.332.586,00	3.570.824.413,00	87.038.645,00	4.869.195.644
143	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM	800.989.136,00	3.071.945.764,00	52.670.500,00	3.925.605.400
144	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM	2.709.867.387,00	-	408.178.642,00	3.118.046.029
145	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	901.921.208,00	2.762.781.282,00	215.129.394,00	3.879.831.884
146	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM	1.820.670.949,00	622.897.000,00	74.674.000,00	2.518.241.949
147	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM	1.334.831.903,00	3.227.504.474,00	427.858.530,00	4.990.194.907
148	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU	299.760.960,00	42.635.100,00	7.450.300,00	349.846.360
149	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU	455.620.300,00	515.690.249,00	300.546.925,00	1.271.857.474
150	Sudin Kesehatan - JAKPUS	84.743.296,00	4.716.673.303,00	13.734.500,00	4.815.151.099
151	Sudin Kesehatan - JAKUT	88.537.039,00	13.826.100.753,00	-	13.914.637.792
152	Sudin Kesehatan - JAKBAR	3.660.000,00	14.583.797.186,00	187.892.233,00	14.775.349.419
153	Sudin Kesehatan - JAKSEL	107.919.612,00	9.615.199.687,00	85.649.780,00	9.808.769.079
154	Sudin Kesehatan - JAKTIM	111.785.244,00	9.034.114.287,00	29.076.150,00	9.174.975.681
155	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	15.710.000,00	75.271.257,00	35.937.850,00	126.919.107
156	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	8.463.274.637,00	11.265.155.697,00	51.654.042,00	19.780.084.376
157	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	597.745.597,00	13.374.128.386,00	335.930.196,00	14.307.804.179
158	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	7.848.104.119,00	6.927.673.388,00	328.136.547,00	15.103.914.054
159	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	4.563.849.495,00	7.465.750.105,00	134.584.971,00	12.164.184.571

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
160	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	5.475.597.386,00	155.208.591,00	824.917.000,00	6.455.722.977
161	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	1.436.032.076,00	2.828.224.671,00	264.670.587,00	4.528.927.334
162	DINAS PENDIDIKAN	275.721.725,00	140.581.320,00	133.884.180,00	550.187.225
163	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	26.372.750,00	4.394.450,00	-	30.767.200
164	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - JAKPUS	1.994.295,00	-	246.664,00	2.240.959
165	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - JAKBAR	140.324.222,00	-	61.360.640,00	201.684.862
166	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - JAKSEL	30.507.650,00	762.300,00	3.857.590,00	35.127.540
167	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan - JAKTIM	158.837.162,00	-	34.246.080,00	193.083.242
168	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	3.312.435,00	-	630.780,00	3.943.215
169	Sudin Pendidikan I - JAKPUS	4.719.330,00	-	-	4.719.330
170	Sudin Pendidikan II - JAKPUS	2.672.000,00	-	-	2.672.000
171	Sudin Pendidikan I - JAKUT	1.367.300,00	-	-	1.367.300
172	Sudin Pendidikan II - JAKUT	21.505.520,00	-	-	21.505.520
173	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	1.000.000,00	-	-	1.000.000
174	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	7.011.200,00	-	-	7.011.200
175	Sudin Pendidikan I - JAKSEL	870.815,00	-	-	870.815
176	Sudin Pendidikan II - JAKSEL	15.503.500,00	-	-	15.503.500
177	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	2.935.570,00	-	-	2.935.570
178	Sudin Pendidikan II - JAKTIM	10.813.720,00	-	-	10.813.720
179	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	7.876.250,00	-	1.870.000,00	9.746.250
180	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.842.069,00	-	1.297.260.795,00	1.301.102.864
181	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	18.423.050,00	26.890.600,00	1.144.550,00	46.458.200
182	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	42.945.559,00	-	10.916.840,00	53.862.399
183	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	14.827.860,00	23.784.750,00	12.448.319,00	51.060.929
184	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	3.593.480,00	3.250.500,00	1.433.060,00	8.277.040
185	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	1.739.430,00	78.761.100,00	4.667.080,00	85.167.610
186	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	12.720.909,00	-	15.505.876,00	28.226.785
187	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKPUS	5.180.637,00	-	-	5.180.637
188	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKUT	22.240.680,00	87.579.800,00	375.386.220,00	485.206.700
189	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKBAR	690.017.850,00	-	-	690.017.850
190	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL	428.890.475,00	-	3.293.750,00	432.184.225
191	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKTIM	718.865.165,00	-	39.411.218,00	758.276.383
192	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	67.109.570,00	-	9.874.205,00	76.983.775

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
193	DINAS SOSIAL	3.010.670.810,00	91.545.200,00	39.050.000,00	3.141.266.010
194	PSAA Putra Utama 1	18.472.575,00	-	1.548.120,00	20.020.695
195	PSAA Putra Utama 2	51.900.647,00	-	1.065.698,00	52.966.345
196	PSAA Putra Utama 3	87.747.764,00	155.644,00	-	87.903.408
197	PSAA Putra Utama 4	25.918.585,00	-	-	25.918.585
198	PSAA Balita Tunas Bangsa	64.954.175,00	4.423.320,00	-	69.377.495
199	PSBR Taruna Jaya	75.399.065,00	4.348.630,00	208.780,00	79.956.475
200	PSTW Budi Mulia 1	114.332.095,00	-	-	114.332.095
201	PSTW Budi Mulia 2	106.540.819,00	4.429.205,00	-	110.970.024
202	PSTW Budi Mulia 3	2.670.250,00	-	-	2.670.250
203	PSTW Budi Mulia 4	106.669.402,00	941.710,00	-	107.611.112
204	PSBI Bangun Daya 1	373.641.386,00	-	-	373.641.386
205	PSBI Bangun Daya 2	721.466.910,00	61.839.529,00	1.290.355,00	784.596.794
206	PSBD Budi Bhakti	58.289.490,00	-	-	58.289.490
207	PSBN Cahaya Bathin	127.392.980,00	13.084.938,00	4.442.350,00	144.920.268
208	PSBG Belaian Kasih	40.001.340,00	-	8.996.136,00	48.997.476
209	PSBL Harapan Sentosa 1	383.334.223,00	7.193.044,00	3.802.700,00	394.329.967
210	PSBL Harapan Sentosa 2	904.714.419,00	12.605.000,00	4.280.000,00	921.599.419
211	PSBL Harapan Sentosa 3	12.928.760,00	586.310,00	543.933,00	14.059.003
212	PSBK Harapan Jaya	210.454.519,00	12.509.190,00	-	222.963.709
213	PSPP Khusnul Khotimah	70.590.882,00	-	845.460,00	71.436.342
214	PSBKW Harapan Mulya	46.122.450,00	3.637.880,00	-	49.760.330
215	PSP Bhakti kasih	74.620.385,00	6.279.057,00	2.858.046,00	83.757.488
216	SEKRETARIAT PENGELOLA MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'HARI	195.948.718,00	-	-	195.948.718
217	SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	39.837.670,00	37.234.850,00	6.072.000,00	83.144.520
218	Sudin Sosial - JAKPUS	71.588.330,00	56.072.874,00	21.667.199,00	149.328.403
219	Sudin Sosial - JAKUT	1.361.690,00	-	-	1.361.690
220	Sudin Sosial - JAKBAR	3.586.745,00	-	2.023.448,00	5.610.193
221	Sudin Sosial - JAKSEL	87.892.723,00	-	-	87.892.723
222	Sudin Sosial - JAKTIM	936.650,00	-	-	936.650
223	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.956.800,00	24.609.643.452,00	4.549.512.219,00	29.162.112.471
224	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	65.201.400,00	-	11.767.910,00	76.969.310
225	Penduduk serta Keluarga Berencana	38.326.782,00	-	12.295.470,00	50.622.252

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
226	Seribu	525.848,00	23.510.108,00	-	24.035.956
227	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKPUS	4.261.345,00	2.238.682.980,00	579.333.157,00	2.822.277.482
228	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKUT	43.731.060,00	1.872.750.093,00	286.773.158,00	2.203.254.311
229	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKBAR	1.714.360,00	1.892.496.078,00	443.290.950,00	2.337.501.388
230	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKSEL	559.123,00	1.620.152.860,00	547.024.386,00	2.167.736.369
231	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKTIM	25.529.177,00	1.856.243.618,00	321.723.246,00	2.203.496.041
232	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.321.044.364,00	9.109.291.242,00	8.510.003.450,00	24.940.339.056
233	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	30.499.876,00	-	-	30.499.876
234	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	85.431.828,00	-	-	85.431.828
235	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKPUS	169.939.825,00	2.241.068.638,00	3.931.518.800,00	6.342.527.263
236	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKUT	203.559.085,00	6.209.198,00	11.136.125,00	220.904.408
237	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKBAR	5.518.530.955,00	24.653.520,00	-	5.543.184.475
238	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKSEL	438.754.183,00	63.731.580,00	-	502.485.763
239	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKTIM	280.096.453,00	3.402.356.669,00	173.957.300,00	3.856.410.422
240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN	142.080.019,00	38.027.700,00	526.818.550,00	706.926.269
241	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	110.162.606,00	-	19.697.975,00	129.860.581
242	Permukiman Pulogadung	143.263.269,00	46.550.543,00	-	189.813.812
243	Unit Pengelola Metrologi	560.968.165,00	16.720.000,00	1.000.989.915,00	1.578.678.080
244	Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang - JAKPUS	33.852.687,00	-	10.831.205,00	44.683.892
245	Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang - JAKUT	2.517.900,00	-	1.419.000,00	3.936.900
246	Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang - JAKBAR	2.785.162,00	-	3.154.872,00	5.940.034
247	Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang - JAKSEL	86.046.428,00	-	-	86.046.428
248	Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagang - JAKTIM	41.569.005,00	-	-	41.569.005
249	SATPOL PP	561.381.793,00	-	-	561.381.793
250	Satpol PP - Jakpus	9.597.060,00	-	-	9.597.060
251	Satpol PP - Jakut	153.719.464,00	-	-	153.719.464
252	Satpol PP - Jakbar	106.031.827,00	6.217.742,00	48.661.745,00	160.911.314
253	Satpol PP - Jaksel	6.283.750,00	-	9.830.000,00	16.113.750
254	Satpol PP - Jaktim	36.584.133,00	-	24.493.336,00	61.077.469
255	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	16.413.498,00	-	-	16.413.498
256	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	716.599.806,00	39.150.210,00	1.865.332.266,00	2.621.082.282
257	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	205.493.560,00	8.041.176,00	311.644.719,00	525.179.455
258	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.901.781.610,00	56.223.750,00	15.797.239.198,00	27.755.244.558

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
259	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	82.291.105,00	68.760.190,00	-	151.051.295
260	Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan	63.276.500,00	-	-	63.276.500
261	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKPUS	23.818.245,00	-	819.575.133,00	843.393.378
262	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKUT	303.710.778,00	457.600,00	560.080.645,00	864.249.023
263	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKBAR	713.495.368,00	300.000,00	949.525.226,00	1.663.320.594
264	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKSEL	326.162.559,00	-	568.553.657,00	894.716.216
265	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKTIM	505.620.735,00	-	372.657.734,00	878.278.469
266	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kep.Seribu	142.256.762,00	-	-	142.256.762
267	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	347.223.310,00	5.579.800.374,00	158.225.058,00	6.085.248.742
268	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	189.639.557,00	7.223.991.173,00	23.030.260,00	7.436.660.990
269	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	130.377.066,00	1.293.485.600,00	3.346.860,00	1.427.209.526
270	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	5.679.929.296,00	71.260.915,00	583.162.982,00	6.334.353.193
271	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.265.105.749,00	2.977.502.293,00	43.532.773,00	4.286.140.815
272	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	11.465.850,00	-	-	11.465.850
273	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	19.606.334,00	176.406.485,00	4.504.500,00	200.517.319
274	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - JAKPUS	5.335.385,00	44.197.708,00	11.298.550,00	60.831.643
275	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - JAKUT	15.596.625,00	24.231.900,00	8.765.350,00	48.593.875
276	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - JAKBAR	451.992.028,00	174.199.218,00	7.121.422,00	633.312.668
277	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - JAKSEL	6.127.519,00	85.305.363,00	5.280.440,00	96.713.322
278	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - JAKTIM	123.852.408,00	113.309.559,00	63.576.348,00	300.738.315
279	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - KEP. SERIBU	12.459.590,00	-	5.982.130,00	18.441.720
280	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	50.454.747.743,00	151.158.260,00	203.263.940,00	50.809.169.943
281	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	115.560.430,00	190.786.760,00	57.745.600,00	364.092.790
282	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	158.068.697,00	33.777.420,00	47.021.450,00	238.867.567
283	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS	6.943.620.387,00	-	-	6.943.620.387
284	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT	13.737.572.313,00	88.281.300,00	11.408.210,00	13.837.261.823
285	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR	16.773.750.661,00	17.236.082,00	-	16.790.986.743
286	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL	10.938.061.963,00	18.115.000,00	3.520.000,00	10.959.696.963
287	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM	26.647.767.817,00	12.932.810,00	288.069.599,00	26.948.770.226
288	Sudin Perindustrian dan Energi - Kep. Seribu	1.627.419.297,00	9.380.000,00	28.909.560,00	1.665.708.857
289	BADAN PEMBINAAN BUMD	199.488.866,00	-	28.755.650,00	228.244.516
290	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	822.070.017,00	102.343.626,00	327.409.720,00	1.251.823.363
291	Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12.782.652,00	-	10.150.184,00	22.932.836

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
292	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - JAKPUS	50.688.395,00	-	37.487.593,00	88.175.988
293	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - JAKUT	126.291.587,00	-	83.340.221,00	209.631.808
294	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - JAKBAR	57.607.273,00	-	43.803.971,00	101.411.244
295	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - JAKSEL	60.729.055,00	-	29.559.633,00	90.288.688
296	Suku Badan Pengelola Keuangan Kota - JAKTIM	38.036.776,00	-	41.936.400,00	79.973.176
297	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	12.261.952,00	164.452.860,00	-	176.714.812
298	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	78.690.448,00	642.294.870,00	20.618.388,00	741.603.706
299	Suku Badan Pengelola Aset Kota - JAKPUS	998.910,00	-	8.404.220,00	9.403.130
300	Suku Badan Pengelola Aset Kota - JAKUT	54.715.335,00	-	5.755.728,00	60.471.063
301	Suku Badan Pengelola Aset Kota - JAKSEL	114.435.272,00	-	19.179.449,00	133.614.721
302	Suku Badan Pengelola Aset Kota - JAKTIM	20.871.026,00	-	737.110,00	21.608.136
303	Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten - Kep. Seribu	135.529.207,00	-	2.387.695,00	137.916.902
304	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	8.311.614.831,00	249.180.360,00	8.451.086.688,00	17.011.881.879
305	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - JAKPUS	30.372.477,00	3.084.400,00	2.671.416,00	36.128.293
306	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - JAKUT	45.812.731,00	165.000,00	6.153.424,00	52.131.155
307	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - JAKBAR	83.763.777,00	-	1.088.274,00	84.852.051
308	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - JAKSEL	68.657.650,00	8.452.400,00	1.865.193,00	78.975.243
309	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - JAKTIM	58.513.747,00	8.151.000,00	5.533.728,00	72.198.475
310	INSPEKTORAT	412.046.744,00	-	88.940.614,00	500.987.358
311	Inspektorat Pembantu - JAKPUS	86.985.377,00	-	35.085.806,00	122.071.183
312	Inspektorat Pembantu - JAKUT	92.396.713,00	-	-	92.396.713
313	Inspektorat Pembantu - JAKBAR	112.928.427,00	-	78.863.510,00	191.791.937
314	Inspektorat Pembantu - JAKSEL	172.027.944,00	-	12.418.670,00	184.446.614
315	Inspektorat Pembantu - JAKTIM	63.851.144,00	-	21.437.900,00	85.289.044
316	Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu	3.705.350,00	-	2.542.210,00	6.247.560
317	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	451.591.946,00	35.090.000,00	80.837.200,00	567.519.146
318	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - JAKPUS	2.838.000,00	-	1.204.500,00	4.042.500
319	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - JAKUT	2.975.500,00	-	68.750,00	3.044.250
320	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - JAKBAR	532.950,00	-	-	532.950
321	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - JAKSEL	3.856.380,00	-	-	3.856.380
322	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - JAKTIM	9.326.587,00	-	607.750,00	9.934.337
323	Suku Badan Perencanaan Pembangunan - Kab. Adm - Kep. Seribu	6.536.279,00	-	-	6.536.279
324	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.565.791.141,00	2.457.060.940,00	552.005.152,00	6.574.857.233

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
325	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	8.060.444.060,00	1.867.259.808,00	100.265.550,00	10.027.969.418
326	Unit Pengelola Sampah Terpadu	5.214.982.040,00	3.129.608.569,00	168.762.550,00	8.513.353.159
327	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air	365.225.043,00	3.741.693.206,00	283.236.800,00	4.390.155.049
328	Sudin Lingkungan Hidup - JAKPUS	1.727.403.202,00	4.970.676.374,00	2.742.268.200,00	9.440.347.776
329	Sudin Lingkungan Hidup - JAKUT	776.594.170,00	775.131.345,00	3.583.547.000,00	5.135.272.515
330	Sudin Lingkungan Hidup - JAKBAR	2.306.671.542,00	3.662.745.026,00	2.364.188.800,00	8.333.605.368
331	Sudin Lingkungan Hidup - JAKSEL	773.806.902,00	6.128.361.199,00	398.637.305,00	7.300.805.406
332	Sudin Lingkungan Hidup - JAKTIM	2.801.325.436,00	8.523.901.028,00	3.164.709.776,00	14.489.936.240
333	Sudin Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu	489.237.555,00	1.261.855.930,00	580.357.140,00	2.331.450.625
334	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.764.284.940,00	-	1.708.416.820,00	8.472.701.760
335	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	338.810.270,00	-	3.266.616.254,00	3.605.426.524
336	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata	164.890.315,00	-	49.544.825,00	214.435.140
337	Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya	366.853.966,00	-	24.143.900,00	390.997.866
338	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	418.998.470,00	2.062.500,00	55.838.750,00	476.899.720
339	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	39.406.290,00	3.015.000,00	-	42.421.290
340	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	93.182.601,00	-	183.737.180,00	276.919.781
341	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	336.269.222,00	-	101.485.450,00	437.754.672
342	Unit Pengelola Museum Seni	21.886.634,00	-	110.849.296,00	132.735.930
343	Pusat Konservasi Cagar Budaya	59.344.813,00	286.103.815,00	116.390.725,00	461.839.353
344	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	-	-	27.600,00	27.600
345	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKPUS	25.762.770,00	-	8.163.375,00	33.926.145
346	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKUT	28.964.430,00	-	22.053.200,00	51.017.630
347	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKBAR	21.012.880,00	-	60.165.500,00	81.178.380
348	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKSEL	5.390.924,00	-	942.150,00	6.333.074
349	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKTIM	95.001.726,00	-	34.645.111,00	129.646.837
350	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	69.523.520,00	-	-	69.523.520
351	UNIT PENGELOLA KAWASAN MONAS	364.664.403,00	9.939.600,00	398.918.256,00	773.522.259
352	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.491.020,00	-	10.097.395,00	36.588.415
353	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKPUS	14.328.050,00	-	4.502.355,00	18.830.405
354	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKUT	3.747.105,00	-	2.075.493,00	5.822.598
355	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKBAR	7.841.393,00	-	-	7.841.393
356	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL	4.439.202,00	-	-	4.439.202
357	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKTIM	30.152.088,00	-	20.499.050,00	50.651.138

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
358	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	336.223.575,00	-	80.325.273,00	416.548.848
359	Suku Badan Kepegawaian - JAKPUS	2.332.000,00	-	-	2.332.000
360	Suku Badan Kepegawaian - JAKUT	18.679.726,00	-	1.393.645,00	20.073.371
361	Suku Badan Kepegawaian - JAKBAR	39.517.690,00	-	-	39.517.690
362	Suku Badan Kepegawaian - JAKSEL	12.596.980,00	-	-	12.596.980
363	Suku Badan Kepegawaian - JAKTIM	740.372,00	-	344.751,00	1.085.123
364	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	25.963.250,00	-	5.632.008,00	31.595.258
365	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	257.090.850,00	20.642.599,00	117.762.355,00	395.495.804
366	PPKD Jakarta Pusat	3.096.390,00	-	768.900,00	3.865.290
367	PPKD Jakarta Utara	30.908.112,00	754.050,00	16.982.714,00	48.644.876
368	PPKD Jakarta Barat	7.153.410,00	-	3.631.100,00	10.784.510
369	PPKD Jakarta Selatan	1.818.850,00	-	774.400,00	2.593.250
370	PPKD Jakarta Timur	7.019.585,00	-	11.431.035,00	18.450.620
371	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	30.968.140,00	111.150.875,00	9.048.600,00	151.167.615
372	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	7.075.100,00	-	2.753.600,00	9.828.700
373	Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	7.405.200,00	31.177.355,00	30.558.000,00	69.140.555
374	PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH	9.992.950,00	-	8.664.700,00	18.657.650
375	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKPUS	956.450,00	1.637.939,00	2.891.350,00	5.485.739
376	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKUT	8.306.500,00	-	17.406.000,00	25.712.500
377	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKBAR	15.031.741,00	-	13.742.454,00	28.774.195
378	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKSEL	4.005.650,00	-	6.575.800,00	10.581.450
379	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKTIM	28.288.917,00	-	66.081.577,00	94.370.494
380	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	648.693.397,00	38.863.000,00	73.480.700,00	761.037.097
381	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - JAKPUS	66.946.660,00	-	6.502.650,00	73.449.310
382	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - JAKUT	29.673.970,00	-	29.434.900,00	59.108.870
383	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - JAKBAR	44.499.161,00	-	3.436.125,00	47.935.286
384	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - JAKSEL	56.949.503,00	-	16.468.650,00	73.418.153
385	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - JAKTIM	14.993.110,00	-	25.486.010,00	40.479.120
386	Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik - Kep.Seribu	1.557.430,00	-	-	1.557.430
387	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.403.412.275,00	-	-	2.403.412.275
388	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - JAKPUS	234.746.386,00	-	-	234.746.386
389	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - JAKUT	367.940.966,00	-	-	367.940.966
390	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - JAKBAR	181.322.300,00	-	-	181.322.300

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
391	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - JAKSEL	593.519.553,00	-	-	593.519.553
392	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - JAKTIM	277.799.220,00	-	-	277.799.220
393	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.615.966.493,00	25.171.300,00	87.258.086,00	1.728.395.879
394	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - JAKPUS	151.066.230,00	-	52.710.700,00	203.776.930
395	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - JAKUT	171.789.510,00	-	6.257.900,00	178.047.410
396	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - JAKBAR	466.627.174,00	-	74.762.875,00	541.390.049
397	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - JAKSEL	554.446.244,00	-	9.474.450,00	563.920.694
398	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - JAKTIM	258.493.611,00	-	24.361.150,00	282.854.761
399	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kep. Seribu	90.347.884,00	-	7.178.490,00	97.526.374
400	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	646.427.819,00	-	-	646.427.819
401	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	537.825.402,00	39.094.722,00	102.516.700,00	679.436.824
402	Kecamatan Tanah Abang - JAKPUS	17.256.910,00	-	592.350,00	17.849.260
403	Kelurahan Gelora - JAKPUS	512.079.162,00	304.549.300,00	20.596.708,00	837.225.170
404	Kelurahan Bendungan Hilir - JAKPUS	89.817.200,00	-	-	89.817.200
405	Kelurahan Karet Tengsin - JAKPUS	11.940.599,00	-	924.000,00	12.864.599
406	Kelurahan Petamburan - JAKPUS	150.895.042,00	815.100,00	2.250.000,00	153.960.142
407	Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS	4.585.460,00	-	552.310,00	5.137.770
408	Kelurahan Kebon Kacang - JAKPUS	23.616.159,00	-	11.253.660,00	34.869.819
409	Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS	33.925.580,00	-	5.450.060,00	39.375.640
410	Kecamatan Menteng - JAKPUS	43.632.578,00	-	6.927.140,00	50.559.718
411	Kelurahan Menteng - JAKPUS	13.550.050,00	-	2.292.710,00	15.842.760
412	Kelurahan Pegangsaan - JAKPUS	57.099.271,00	-	22.374.182,00	79.473.453
413	Kelurahan Cikini - JAKPUS	26.744.520,00	-	-	26.744.520
414	Kelurahan Gondangdia - JAKPUS	101.424.180,00	2.838.880,00	3.364.625,00	107.627.685
415	Kelurahan Kebon Sirih - JAKPUS	59.115.395,00	-	20.604.660,00	79.720.055
416	Kecamatan Senen - JAKPUS	5.801.458,00	-	390.720,00	6.192.178
417	Kelurahan Kenari - JAKPUS	53.137.700,00	-	9.279.600,00	62.417.300
418	Kelurahan Paseban - JAKPUS	58.488.862,00	-	7.167.800,00	65.656.662
419	Kelurahan Kramat - JAKPUS	79.506.594,00	-	10.654.072,00	90.160.666
420	Kelurahan Kwitang - JAKPUS	73.913.209,00	-	16.636.400,00	90.549.609
421	Kelurahan Senen - JAKPUS	6.213.233,00	5.816.677,00	28.511.478,00	40.541.388
422	Kelurahan Bungur - JAKPUS	73.720.343,00	-	15.113.560,00	88.833.903
423	Kecamatan Cempaka Putih - JAKPUS	13.792.460,00	-	5.422.461,00	19.214.921

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
424	Kelurahan Rawasari - JAKPUS	32.207.944,00	-	-	32.207.944
425	Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS	792.076,00	-	-	792.076
426	Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS	22.063.635,00	18.279.910,00	1.431.375,00	41.774.920
427	Kecamatan Johar Baru - JAKPUS	43.951.219,00	-	6.608.085,00	50.559.304
428	Kelurahan Johar Baru - JAKPUS	50.283.708,00	-	424.996,00	50.708.704
429	Kelurahan Kampung Rawa - JAKPUS	264.428.039,00	786.500,00	8.779.188,00	273.993.727
430	Kelurahan Galur - JAKPUS	280.091.764,00	-	32.402.040,00	312.493.804
431	Kelurahan Tanah Tinggi - JAKPUS	22.237.215,00	-	12.864.500,00	35.101.715
432	Kecamatan Kemayoran - JAKPUS	27.927.165,00	27.746.191,00	6.646.805,00	62.320.161
433	Kelurahan Harapan Mulia - JAKPUS	12.104.950,00	2.861.650,00	5.021.500,00	19.988.100
434	Kelurahan Cempaka Baru - JAKPUS	25.270.850,00	4.163.500,00	10.357.270,00	39.791.620
435	Kelurahan Sumur Batu - JAKPUS	25.368.530,00	-	17.263.400,00	42.631.930
436	Kelurahan Serdang - JAKPUS	23.029.655,00	-	-	23.029.655
437	Kelurahan Kebon Kosong - JAKPUS	598.400,00	-	-	598.400
438	Kelurahan Kemayoran - JAKPUS	19.471.320,00	-	4.965.400,00	24.436.720
439	Kelurahan Utan Panjang - JAKPUS	40.068.710,00	22.847.000,00	50.597.690,00	113.513.400
440	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - JAKPUS	28.976.915,00	-	3.566.200,00	32.543.115
441	Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS	5.152.686,00	-	326.618,00	5.479.304
442	Kelurahan Pasar Baru - JAKPUS	54.677.370,00	13.077.350,00	12.636.400,00	80.391.120
443	Kelurahan Karang Anyar - JAKPUS	80.103.298,00	-	8.456.350,00	88.559.648
444	Kelurahan Kartini - JAKPUS	2.635.930,00	-	1.742.070,00	4.378.000
445	Kelurahan Gunung Sahari Utara - JAKPUS	29.007.330,00	-	-	29.007.330
446	Kelurahan Mangga Dua Selatan - JAKPUS	32.202.390,00	-	1.830.125,00	34.032.515
447	Kecamatan Gambir - JAKPUS	31.634.570,00	-	4.431.075,00	36.065.645
448	Kelurahan Cideng - JAKPUS	24.803.730,00	-	-	24.803.730
449	Kelurahan Petojo Selatan - JAKPUS	2.147.569,00	-	-	2.147.569
450	Kelurahan Gambir - JAKPUS	32.544.465,00	-	2.457.400,00	35.001.865
451	Kelurahan Kebon Kelapa - JAKPUS	4.597.230,00	-	4.483.600,00	9.080.830
452	Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS	26.356.751,00	-	313.170,00	26.669.921
453	Kelurahan Duri Pulo - JAKPUS	109.247.600,00	-	5.720.000,00	114.967.600
454	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	684.889.601,00	269.222.356,00	-	954.111.957
455	Kecamatan Penjaringan - JAKUT	6.699.440,00	1.548.994,00	2.544.300,00	10.792.734
456	Kelurahan Kamal Muara - JAKUT	10.959.242,00	67.590.000,00	17.959.340,00	96.508.582

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
457	Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT	32.655.810,00	-	11.972.400,00	44.628.210
458	Kelurahan Pejagalan - JAKUT	35.997.027,00	-	11.555.720,00	47.552.747
459	Kelurahan Penjaringan - JAKUT	46.720.375,00	-	1.456.800,00	48.177.175
460	Kelurahan Pluit - JAKUT	113.612.003,00	2.098.800,00	24.967.995,00	140.678.798
461	Kecamatan Pademangan - JAKUT	106.746.703,00	-	29.609.148,00	136.355.851
462	Kelurahan Ancol - JAKUT	35.583.381,00	30.194.050,00	5.415.000,00	71.192.431
463	Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT	16.244.196,00	-	-	16.244.196
464	Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT	93.321.800,00	-	37.641.230,00	130.963.030
465	Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT	44.768.325,00	-	16.338.700,00	61.107.025
466	Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT	481.958.332,00	-	29.827.298,00	511.785.630
467	Kelurahan Sunter Agung - JAKUT	80.577.464,00	-	-	80.577.464
468	Kelurahan Papanggo - JAKUT	35.950.577,00	-	4.865.410,00	40.815.987
469	Kelurahan Warakas - JAKUT	13.916.650,00	-	4.189.350,00	18.106.000
470	Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT	126.000.426,00	-	19.147.898,00	145.148.324
471	Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT	177.532.872,00	-	13.038.080,00	190.570.952
472	Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT	156.821.830,00	-	17.694.600,00	174.516.430
473	Kecamatan Koja - JAKUT	269.416.040,00	-	80.347.144,00	349.763.184
474	Kelurahan Tugu Utara - JAKUT	97.655.910,00	2.303.400,00	16.586.050,00	116.545.360
475	Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT	69.471.020,00	40.950.800,00	114.890.128,00	225.311.948
476	Kelurahan Rawa Badak Utara - JAKUT	126.610.625,00	-	-	126.610.625
477	Kelurahan Koja - JAKUT	158.515.608,00	-	1.500.400,00	160.016.008
478	Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT	26.794.368,00	-	5.204.650,00	31.999.018
479	Kelurahan Lagoa - JAKUT	13.858.550,00	1.918.350,00	-	15.776.900
480	Kecamatan Kelapa Gading - JAKUT	93.157.735,00	-	23.413.385,00	116.571.120
481	Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT	292.621.339,00	-	55.540.287,00	348.161.626
482	Kelurahan Kelapa Gading Barat - JAKUT	24.457.180,00	-	-	24.457.180
483	Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT	21.575.777,00	-	2.327.930,00	23.903.707
484	Kecamatan Cilincing - JAKUT	81.350.444,00	-	-	81.350.444
485	Kelurahan Sukapura - JAKUT	19.021.508,00	-	4.981.933,00	24.003.441
486	Kelurahan Rorotan - JAKUT	8.314.350,00	9.505.155,00	1.385.010,00	19.204.515
487	Kelurahan Marunda - JAKUT	23.703.350,00	-	8.413.350,00	32.116.700
488	Kelurahan Cilincing - JAKUT	27.647.180,00	-	12.694.880,00	40.342.060
489	Kelurahan Semper Timur - JAKUT	45.288.979,00	13.046.000,00	-	58.334.979

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
490	Kelurahan Semper Barat - JAKUT	58.808.456,00	-	5.794.097,00	64.602.553
491	Kelurahan Kalibaru - JAKUT	69.853.935,00	-	10.070.500,00	79.924.435
492	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	642.633.749,00	226.134.480,00	144.690.150,00	1.013.458.379
493	Kecamatan Kebon Jeruk - JAKBAR	69.319.113,00	-	17.372.630,00	86.691.743
494	Kelurahan Sukabumi Selatan - JAKBAR	34.326.270,00	-	16.868.280,00	51.194.550
495	Kelurahan Sukabumi Utara - JAKBAR	45.750.480,00	960.300,00	4.649.150,00	51.359.930
496	Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR	9.730.892,00	-	27.907.220,00	37.638.112
497	Kelurahan Duri Kepa - JAKBAR	85.637.805,00	-	-	85.637.805
498	Kelurahan Kedoya Utara - JAKBAR	15.658.950,00	-	14.214.425,00	29.873.375
499	Kelurahan Kebon Jeruk - JAKBAR	9.296.840,00	-	3.148.200,00	12.445.040
500	Kelurahan Kedoya Selatan - JAKBAR	50.506.560,00	-	27.650.700,00	78.157.260
501	Kecamatan Kembangan - JAKBAR	22.768.433,00	-	10.729.400,00	33.497.833
502	Kelurahan Kembangan Selatan - JAKBAR	19.435.680,00	-	36.307.700,00	55.743.380
503	Kelurahan Meruya Utara - JAKBAR	94.497.900,00	-	-	94.497.900
504	Kelurahan Meruya Selatan - JAKBAR	69.640.450,00	-	8.679.000,00	78.319.450
505	Kelurahan Srengseng - JAKBAR	67.146.156,00	47.949.110,00	25.170.200,00	140.265.466
506	Kelurahan Joglo - JAKBAR	39.009.200,00	-	-	39.009.200
507	Kelurahan Kembangan Utara - JAKBAR	45.074.332,00	-	7.418.895,00	52.493.227
508	Kecamatan Cengkareng - JAKBAR	139.365.600,00	-	22.910.250,00	162.275.850
509	Kelurahan Cengkareng Barat - JAKBAR	46.576.756,00	-	17.669.396,00	64.246.152
510	Kelurahan Cengkareng Timur - JAKBAR	9.481.810,00	-	4.310.130,00	13.791.940
511	Kelurahan Kapuk - JAKBAR	3.468.550,00	1.949.500,00	1.639.300,00	7.057.350
512	Kelurahan Duri Kosambi - JAKBAR	175.232.560,00	-	-	175.232.560
513	Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR	12.791.164,00	-	-	12.791.164
514	Kelurahan Kedaung Kali Angke - JAKBAR	47.477.870,00	-	13.926.803,00	61.404.673
515	Kecamatan Kalideres - JAKBAR	6.806.399,00	-	6.186.444,00	12.992.843
516	Kelurahan Kamal - JAKBAR	4.081.618,00	-	15.663.400,00	19.745.018
517	Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR	42.913.901,00	-	7.179.705,00	50.093.606
518	Kelurahan Pegadungan - JAKBAR	2.074.775,00	-	534.300,00	2.609.075
519	Kelurahan Kalideres - JAKBAR	17.542.914,00	-	-	17.542.914
520	Kelurahan Semanan - JAKBAR	86.605.200,00	-	12.452.325,00	99.057.525
521	Kecamatan Grogol Petamburan - JAKBAR	98.214.667,00	-	15.115.500,00	113.330.167
522	Kelurahan Tomang - JAKBAR	83.310.700,00	-	21.225.500,00	104.536.200

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
523	Kelurahan Tanjung Duren Utara - JAKBAR	24.382.490,00	462.000,00	3.522.640,00	28.367.130
524	Kelurahan Grogol - JAKBAR	9.897.415,00	20.765.250,00	9.271.488,00	39.934.153
525	Kelurahan Jelambar - JAKBAR	55.714.078,00	-	7.756.023,00	63.470.101
526	Kelurahan Jelambar Baru - JAKBAR	71.851.336,00	-	41.242.910,00	113.094.246
527	Kelurahan Wijaya Kusuma - JAKBAR	180.370.883,00	-	14.495.800,00	194.866.683
528	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - JAKBAR	98.685.499,00	633.600,00	15.691.500,00	115.010.599
529	Kecamatan Palmerah - JAKBAR	10.931.030,00	-	4.417.870,00	15.348.900
530	Kelurahan Palmerah - JAKBAR	143.600.530,00	6.466.050,00	16.187.550,00	166.254.130
531	Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR	50.038.621,00	19.305.000,00	5.687.000,00	75.030.621
532	Kelurahan Slipi - JAKBAR	4.673.050,00	9.992.400,00	107.235.700,00	121.901.150
533	Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR	383.403.500,00	43.945.300,00	22.896.100,00	450.244.900
534	Kelurahan Jati Pulo - JAKBAR	458.887.770,00	672.500,00	3.047.275,00	462.607.545
535	Kelurahan Kota Bambu Selatan - JAKBAR	68.186.210,00	-	11.196.570,00	79.382.780
536	Kecamatan Tambora - JAKBAR	63.288.747,00	-	18.339.750,00	81.628.497
537	Kelurahan Kalianyar - JAKBAR	177.389.900,00	-	16.248.300,00	193.638.200
538	Kelurahan Duri Utara - JAKBAR	16.570.950,00	-	-	16.570.950
539	Kelurahan Tanah Sereal - JAKBAR	6.862.700,00	30.670.000,00	3.854.100,00	41.386.800
540	Kelurahan Krendang - JAKBAR	3.109.150,00	-	-	3.109.150
541	Kelurahan Jembatan Besi - JAKBAR	68.881.842,00	-	2.255.000,00	71.136.842
542	Kelurahan Angke - JAKBAR	11.152.405,00	5.896.000,00	648.230,00	17.696.635
543	Kelurahan Jembatan Lima - JAKBAR	11.636.000,00	436.000,00	3.453.000,00	15.525.000
544	Kelurahan Duri Selatan - JAKBAR	10.015.885,00	12.499.520,00	655.105,00	23.170.510
545	Kelurahan Tambora - JAKBAR	39.388.270,00	-	23.678.600,00	63.066.870
546	Kelurahan Pekojan - JAKBAR	3.947.000,00	-	-	3.947.000
547	Kelurahan Roa Malaka - JAKBAR	47.431.890,00	-	-	47.431.890
548	Kecamatan Taman Sari - JAKBAR	3.718.000,00	-	5.622.650,00	9.340.650
549	Kelurahan Krukut - JAKBAR	133.762.781,00	-	3.537.600,00	137.300.381
550	Kelurahan Maphar - JAKBAR	27.721.065,00	90.427.975,00	16.844.850,00	134.993.890
551	Kelurahan Taman Sari - JAKBAR	89.369.780,00	1.575.750,00	2.948.235,00	93.893.765
552	Kelurahan Tangki - JAKBAR	1.349.595,00	26.628.763,00	7.779.750,00	35.758.108
553	Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR	59.285.710,00	-	1.330.780,00	60.616.490
554	Kelurahan Keagungan - JAKBAR	181.545.258,00	-	77.166.872,00	258.712.130
555	Kelurahan Glodok - JAKBAR	75.834.330,00	-	114.290,00	75.948.620

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
556	Kelurahan Pinangsia - JAKBAR	3.718.420,00	-	6.674.800,00	10.393.220
557	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	300.173.566,00	-	127.655.066,00	427.828.632
558	Kecamatan Kebayoran Lama - JAKSEL	11.870.210,00	-	5.776.650,00	17.646.860
559	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - JAKSEL	154.068.288,00	5.058.341,00	16.678.420,00	175.805.049
560	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - JAKSEL	12.129.260,00	18.376.930,00	19.547.800,00	50.053.990
561	Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL	23.031.670,00	-	11.684.651,00	34.716.321
562	Kelurahan Cipulir - JAKSEL	160.553.767,00	-	17.194.210,00	177.747.977
563	Kelurahan Grogol Selatan - JAKSEL	4.789.730,00	-	2.032.250,00	6.821.980
564	Kelurahan Grogol Utara - JAKSEL	71.589.430,00	-	7.780.487,00	79.369.917
565	Kecamatan Pesanggrahan - JAKSEL	54.758.420,00	4.620.000,00	11.956.450,00	71.334.870
566	Kelurahan Pesanggrahan - JAKSEL	103.813.603,00	-	11.729.300,00	115.542.903
567	Kelurahan Petukangan Selatan - JAKSEL	16.731.000,00	-	1.069.860,00	17.800.860
568	Kelurahan Petukangan Utara - JAKSEL	22.431.843,00	4.820.200,00	6.514.668,00	33.766.711
569	Kelurahan Ulujami - JAKSEL	75.815.630,00	-	27.007.200,00	102.822.830
570	Kelurahan Bintaro - JAKSEL	19.063.937,00	-	6.152.850,00	25.216.787
571	Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL	53.721.800,00	-	-	53.721.800
572	Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL	39.078.325,00	-	15.312.550,00	54.390.875
573	Kelurahan Jati Padang - JAKSEL	47.123.084,00	4.000.260,00	3.127.609,00	54.250.953
574	Kelurahan Ragunan - JAKSEL	48.878.551,00	-	5.819.000,00	54.697.551
575	Kelurahan Cilandak Timur - JAKSEL	45.752.542,00	3.510.100,00	896.390,00	50.159.032
576	Kelurahan Kebagusan - JAKSEL	67.331.220,00	-	5.545.755,00	72.876.975
577	Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL	48.255.460,00	-	559.515,00	48.814.975
578	Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL	71.891.315,00	-	-	71.891.315
579	Kecamatan Jagakarsa - JAKSEL	44.695.539,00	-	57.901.492,00	102.597.031
580	Kelurahan Jagakarsa - JAKSEL	13.034.862,00	21.661.475,00	3.785.534,00	38.481.871
581	Kelurahan Ciganjur - JAKSEL	59.360.704,00	-	10.128.180,00	69.488.884
582	Kelurahan Srengseng Sawah - JAKSEL	34.418.180,00	-	91.300,00	34.509.480
583	Kelurahan Lenteng Agung - JAKSEL	18.313.750,00	37.342.360,00	3.595.900,00	59.252.010
584	Kelurahan Tanjung Barat - JAKSEL	22.687.998,00	-	3.370.675,00	26.058.673
585	Kelurahan Cipadak - JAKSEL	4.215.640,00	-	344.080,00	4.559.720
586	Kecamatan Mampang Prapatan - JAKSEL	21.819.494,00	-	7.838.710,00	29.658.204
587	Kelurahan Tegal Parang - JAKSEL	46.326.610,00	19.983.260,00	5.215.320,00	71.525.190
588	Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL	20.200.688,00	4.985.200,00	6.473.500,00	31.659.388

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
589	Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL	18.845.750,00	-	15.247.650,00	34.093.400
590	Kelurahan Kuningan Barat - JAKSEL	16.754.338,00	16.927.900,00	4.039.200,00	37.721.438
591	Kelurahan Bangka - JAKSEL	20.191.633,00	33.851.950,00	19.362.970,00	73.406.553
592	Kecamatan Pancoran - JAKSEL	111.361.783,00	-	34.722.710,00	146.084.493
593	Kelurahan Pancoran - JAKSEL	213.675.823,00	-	18.110.645,00	231.786.468
594	Kelurahan Duren Tiga - JAKSEL	147.425.914,00	-	-	147.425.914
595	Kelurahan Kalibata - JAKSEL	33.457.610,00	45.132.600,00	13.775.300,00	92.365.510
596	Kelurahan Rawa Jati - JAKSEL	8.013.170,00	47.469.043,00	94.005.157,00	149.487.370
597	Kelurahan Pangadegan - JAKSEL	7.120.740,00	23.795.970,00	9.735.693,00	40.652.403
598	Kelurahan Cikoko - JAKSEL	38.350.730,00	34.955.745,00	8.306.100,00	81.612.575
599	Kecamatan Kebayoran Baru - JAKSEL	52.243.242,00	-	1.214.400,00	53.457.642
600	Kelurahan Gandaria Utara - JAKSEL	67.426.497,00	-	4.470.400,00	71.896.897
601	Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL	92.476.856,00	-	6.708.900,00	99.185.756
602	Kelurahan Pulo - JAKSEL	24.225.630,00	-	5.546.640,00	29.772.270
603	Kelurahan Petogogan - JAKSEL	37.654.760,00	-	9.490.360,00	47.145.120
604	Kelurahan Melawai - JAKSEL	76.797.050,00	-	7.653.250,00	84.450.300
605	Kelurahan Kramat Pela - JAKSEL	91.307.604,00	-	7.427.750,00	98.735.354
606	Kelurahan Gunung - JAKSEL	133.449.592,00	21.209.430,00	18.897.538,00	173.556.560
607	Kelurahan Selong - JAKSEL	9.116.624,00	45.340.878,00	96.373.590,00	150.831.092
608	Kelurahan Rawa Barat - JAKSEL	68.984.057,00	-	10.866.800,00	79.850.857
609	Kelurahan Senayan - JAKSEL	5.443.950,00	381.250,00	407.500,00	6.232.700
610	Kecamatan Setiabudi - JAKSEL	11.263.700,00	-	4.504.500,00	15.768.200
611	Kelurahan Karet Semanggi - JAKSEL	46.294.200,00	-	15.981.900,00	62.276.100
612	Kelurahan Kuningan Timur - JAKSEL	157.276.559,00	40.207.079,00	13.588.333,00	211.071.971
613	Kelurahan Karet Kuningan - JAKSEL	78.248.210,00	-	4.460.000,00	82.708.210
614	Kelurahan Karet - JAKSEL	99.353.375,00	-	1.613.700,00	100.967.075
615	Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL	236.499.193,00	-	3.508.340,00	240.007.533
616	Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL	42.973.590,00	2.735.040,00	2.009.700,00	47.718.330
617	Kelurahan Guntur - JAKSEL	24.840.090,00	58.077.250,00	15.537.500,00	98.454.840
618	Kelurahan Setiabudi - JAKSEL	10.732.150,00	-	5.583.545,00	16.315.695
619	Kecamatan Tebet - JAKSEL	18.172.526,00	-	8.534.900,00	26.707.426
620	Kelurahan Menteng Dalam - JAKSEL	78.987.483,00	684.750,00	12.334.300,00	92.006.533
621	Kelurahan Tebet Barat - JAKSEL	14.856.789,00	925.650,00	2.153.624,00	17.936.063

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
622	Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL	13.088.709,00	7.579.000,00	47.920.837,00	68.588.546
623	Kelurahan Kebon Baru - JAKSEL	29.416.420,00	-	1.786.950,00	31.203.370
624	Kelurahan Bukit Duri - JAKSEL	18.268.431,00	-	5.977.950,00	24.246.381
625	Kelurahan Manggarai Selatan - JAKSEL	3.718.866,00	-	29.560.538,00	33.279.404
626	Kelurahan Manggarai - JAKSEL	60.063.850,00	-	-	60.063.850
627	Kecamatan Cilandak - Jaksel	1.815.242,00	-	17.790.300,00	19.605.542
628	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	67.085.000,00	-	20.558.395,00	87.643.395
629	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	117.306.584,00	-	19.551.807,00	136.858.391
630	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	87.119.296,00	-	13.729.760,00	100.849.056
631	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	22.066.880,00	-	57.482.838,00	79.549.718
632	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	88.714.203,00	-	3.437.280,00	92.151.483
633	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.010.690.581,00	2.508.000,00	132.208.890,00	1.145.407.471
634	Kecamatan Pasar Rebo - JAKTIM	62.360.220,00	-	25.840.100,00	88.200.320
635	Kelurahan Pekayon - JAKTIM	268.969.250,00	-	1.367.960,00	270.337.210
636	Kelurahan Kalisari - JAKTIM	45.684.210,00	-	1.883.750,00	47.567.960
637	Kelurahan Kampung Baru - JAKTIM	108.408.351,00	6.710.000,00	20.656.680,00	135.775.031
638	Kelurahan Cijantung - JAKTIM	66.847.039,00	52.657.000,00	29.370.000,00	148.874.039
639	Kelurahan Gedong - JAKTIM	57.465.578,00	2.944.502,00	2.990.980,00	63.401.060
640	Kecamatan Ciracas - JAKTIM	79.688.235,00	8.800.000,00	48.529.767,00	137.018.002
641	Kelurahan Cibubur - JAKTIM	3.413.416,00	-	1.811.457,00	5.224.873
642	Kelurahan Kampung Rambutan - JAKTIM	46.494.140,00	4.044.480,00	4.274.430,00	54.813.050
643	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - JAKTIM	14.255.120,00	-	228.800,00	14.483.920
644	Kelurahan Susukan - JAKTIM	41.643.745,00	-	14.724.600,00	56.368.345
645	Kelurahan Ciracas - JAKTIM	27.484.213,00	-	3.278.000,00	30.762.213
646	Kecamatan Cipayung - JAKTIM	81.795.230,00	-	24.594.350,00	106.389.580
647	Kelurahan Cipayung - JAKTIM	71.525.174,00	-	-	71.525.174
648	Kelurahan Lubang Buaya - JAKTIM	88.497.475,00	-	1.667.600,00	90.165.075
649	Kelurahan Ceger - JAKTIM	37.927.040,00	-	10.467.000,00	48.394.040
650	Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM	128.115.803,00	19.443.620,00	33.458.700,00	181.018.123
651	Kelurahan Setu - JAKTIM	115.745.923,00	-	8.654.800,00	124.400.723
652	Kelurahan Cilangkap - JAKTIM	30.181.900,00	-	1.908.390,00	32.090.290
653	Kelurahan Munjul - JAKTIM	22.799.100,00	-	12.344.969,00	35.144.069
654	Kelurahan Pondok Rangon - JAKTIM	22.379.946,00	-	19.648.475,00	42.028.421

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
655	Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM	44.033.176,00	-	-	44.033.176
656	Kelurahan Kampung Tengah - JAKTIM	52.590.284,00	-	25.873.950,00	78.464.234
657	Kelurahan Kampung Dukuh - JAKTIM	68.104.823,00	-	3.708.320,00	71.813.143
658	Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM	25.286.800,00	-	17.718.525,00	43.005.325
659	Kelurahan Batu Ampar - JAKTIM	39.919.110,00	7.420.600,00	-	47.339.710
660	Kelurahan Bale Kambang - JAKTIM	25.105.314,00	-	-	25.105.314
661	Kelurahan Cililitan - JAKTIM	38.916.075,00	5.685.548,00	30.231.999,00	74.833.622
662	Kelurahan Cawang - JAKTIM	52.367.700,00	-	4.974.200,00	57.341.900
663	Kecamatan Makasar - JAKTIM	21.812.566,00	-	17.856.693,00	39.669.259
664	Kelurahan Cipinang Melayu - JAKTIM	41.971.762,00	-	19.597.125,00	61.568.887
665	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - JAKTIM	26.637.600,00	-	9.168.500,00	35.806.100
666	Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM	37.929.276,00	-	10.232.750,00	48.162.026
667	Kelurahan Makasar - JAKTIM	26.650.617,00	-	26.162.741,00	52.813.358
668	Kelurahan Pinang Ranti - JAKTIM	73.953.990,00	-	19.772.240,00	93.726.230
669	Kecamatan Jatinegara - JAKTIM	55.068.568,00	-	23.238.800,00	78.307.368
670	Kelurahan Kampung Melayu - JAKTIM	58.225.382	-	14.917.958	73.143.340
671	Kelurahan Bidara Cina - JAKTIM	25.658.908	-	6.344.250	32.003.158
672	Kelurahan Bali Mester - JAKTIM	68.414.660	-	19.524.890	87.939.550
673	Kelurahan Rawa Bunga - JAKTIM	101.683.975	-	22.573.650	124.257.625
674	Kelurahan Cipinang Cempedak - JAKTIM	55.492.048	-	8.224.260	63.716.308
675	Kelurahan Cipinang Muara - JAKTIM	12.873.300	-	3.477.540	16.350.840
676	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - JAKTIM	17.822.189	10.501.700	3.339.490	31.663.379
677	Kelurahan Cipinang Besar Utara - JAKTIM	3.825.580	-	1.686.850	5.512.430
678	Kecamatan Duren Sawit - JAKTIM	48.074.599	-	37.821.980	85.896.579
679	Kelurahan Klender - JAKTIM	20.680.960	9.851.660	75.070.548	105.603.168
680	Kelurahan Pondok Bambu - JAKTIM	67.319.707	86.564.196	13.585.358	167.469.261
681	Kelurahan Duren Sawit - JAKTIM	155.146.865	-	3.960.000	159.106.865
682	Kelurahan Malaka Sari - JAKTIM	58.139.446	-	-	58.139.446
683	Kelurahan Malaka Jaya - JAKTIM	125.078.140	-	804.100	125.882.240
684	Kelurahan Pondok Kopi - JAKTIM	48.917.823	-	159.316.667	208.234.490
685	Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM	128.087.902	15.485.110	7.756.240	151.329.252
686	Kecamatan Matraman - JAKTIM	46.563.931	-	11.465.443	58.029.374
687	Kelurahan Pisangan Baru - JAKTIM	42.741.906	-	-	42.741.906

NO	NAMA SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis (Rp)	Persediaan Bahan/Material (Rp)	Persediaan Barang Lainnya (Rp)	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
688	Kelurahan Utan Kayu Selatan - JAKTIM	53.472.805	-	14.662.600	68.135.405
689	Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM	41.197.490	-	-	41.197.490
690	Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM	8.835.210	-	-	8.835.210
691	Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM	45.141.910	-	11.778.800	56.920.710
692	Kelurahan Kebon Manggis - JAKTIM	58.075.071	-	27.087.300	85.162.371
693	Kecamatan Pulogadung - JAKTIM	32.055.155	-	31.830.700	63.885.855
694	Kelurahan Pisangan Timur - JAKTIM	24.547.090	-	3.000.800	27.547.890
695	Kelurahan Cipinang - JAKTIM	3.279.034	-	593.450	3.872.484
696	Kelurahan Jatinegara Kaum - JAKTIM	20.399.845	597.000	2.804.175	23.801.020
697	Kelurahan Pulogadung - JAKTIM	52.175.293	-	9.887.900	62.063.193
698	Kelurahan Rawamangun - JAKTIM	90.545.699	-	8.655.000	99.200.699
699	Kelurahan Jati - JAKTIM	2.719.063	-	21.474.112	24.193.175
700	Kelurahan Kayu Putih - JAKTIM	12.841.100	-	3.945.656	16.786.756
701	Kecamatan Cakung - JAKTIM	67.538.400	-	2.083.400	69.621.800
702	Kelurahan Jatinegara - JAKTIM	52.612.627	-	4.704.480	57.317.107
703	Kelurahan Rawa Terate - JAKTIM	334.492.060	-	-	334.492.060
704	Kelurahan Penggilingan - JAKTIM	11.298.430	-	-	11.298.430
705	Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM	97.625.825	-	1.651.650	99.277.475
706	Kelurahan Ujung Menteng - JAKTIM	67.708.190	-	9.600.129	77.308.319
707	Kelurahan Cakung Timur - JAKTIM	54.119.911	20.792.200	19.705.455	94.617.566
708	Kelurahan Cakung Barat - JAKTIM	146.039.306	-	4.016.500	150.055.806
709	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU	309.401.535	-	64.303.025	373.704.560
710	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	6.990.500	-	1.805.000	8.795.500
711	Kelurahan P.Panggang - Kep. Seribu	10.658.691	-	-	10.658.691
712	Kelurahan P.Kelapa - Kep. Seribu	7.457.500	-	6.505.000	13.962.500
713	Kelurahan P.Harapan - Kep. Seribu	27.931.405	-	6.220.000	34.151.405
714	Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	19.087.640	-	-	19.087.640
715	Kelurahan P.Untung Jawa - Kep. Seribu	4.380.499	-	-	4.380.499
716	Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu	3.612.400	-	-	3.612.400
717	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu	3.219.233	-	-	3.219.233
	JUMLAH PERSEDIAAN	420.075.198.002	521.477.597.517	346.759.395.667	1.288.312.191.186

**REKAPITULASI PERSEDIAAN USANG/RUSAK
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca			Total Nilai Persediaan Usang/Rusak	Keterangan
		Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan	Sudah Dimusnahkan		
1	1	2	3	4	5=2+3+4	6
	1.1.07.01 - Persediaan Bahan Pakai Habis	182.456.500,00	1.845.035.211,00	148.940.714,00	2.176.432.425,00	
1	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL	83.241.600,00			83.241.600,00	Komponen lampu lama
2	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR	97.277.400,00			97.277.400,00	Armatur Lengkap Classic MH 175 Watt
3	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM	1.937.500,00			1.937.500,00	Continous Form
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET		1.384.534,00		1.384.534,00	Alat kesehatan pakai habis
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		11.666.600,00		11.666.600,00	Lembar Disposisi
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1.831.984.077,00		1.831.984.077,00	Blanko KTP, KK dan formulir
7	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas			8.257.700,00	8.257.700,00	Cetakan umum, suku cadang peralatan monitoring lalu lintas dan ATK
8	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan			86.664.660,00	86.664.660,00	Karcis-karcis
9	Unit PPKB Ujung Menteng			24.805.000,00	24.805.000,00	Alat tulis kantor
10	Dinas Perhubungan			29.213.354,00	29.213.354,00	Lampu pijar
	1.1.07.02 - Persediaan Bahan/Material	-	341.058.891,00	4.558.767.249,00	4.899.826.140,00	
1	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL			43.321.731,00	43.321.731,00	Obat Kadaluaarsa
2	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL			69.670.716,00	69.670.716,00	Obat, Alkes dan Reagen Kadaluaarsa
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET		160.290.993,00		160.290.993,00	Obat Kadaluaarsa
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA			22.165.847,00	22.165.847,00	Terdiri atas : 1). Bahan Pangan Senilai Rp 2.416.730 karena expired dan rusak 2). Obat-Obatan Senilai Rp 19.794.117 expired
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU		477.701,00		477.701,00	Obat Kadaluaarsa (melavita 0.1% cream 49 tube)
6	Sudin Kesehatan - JAKSEL			921.156.722,00	921.156.722,00	Obat Kadaluaarsa

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca			Total Nilai Persediaan Usang/Rusak	Keterangan
		Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan	Sudah Dimusnahkan		
7	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR			54.060.795,00	54.060.795,00	Obat Kadaluarsa
8	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR			57.102.116,00	57.102.116,00	Obat Kadaluarsa
9	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR		22.405.037,00		22.405.037,00	Obat Kadaluarsa
10	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR			48.650.032,00	48.650.032,00	Obat Kadaluarsa
11	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR		15.345.056,00		15.345.056,00	Obat Kadaluarsa
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG			21.457.000,00	21.457.000,00	obat kadalruasa
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA		142.540.104,00		142.540.104,00	Vaksin kadalruasa
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN			390.334.239,00	390.334.239,00	obat kadalruasa
15	DINAS KESEHATAN (RSUD Kebayoran Lama)			13.538.458,00	13.538.458,00	obat kadalruasa
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO			26.167.489,00	26.167.489,00	obat kadalruasa
17	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA			134.525.053,00	134.525.053,00	obat kadalruasa
18	DINAS KESEHATAN			2.753.137.408,00	2.753.137.408,00	obat kadalruasa
19	Sudin Kesehatan - JAKPUS			3.479.643,00	3.479.643,00	obat kadalruasa
	1.1.07.03 - Persediaan Barang Lainnya	216.263.831,00	650.238.679,00	1.650.050.279,00	2.516.552.789,00	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.292.734,00	-	-	9.292.734,00	Kop surat format dan alamat lama
2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	33.372.130,00			33.372.130,00	Kwitansi Dinas, Lembar Disposisi, SSP, Buku Pergub
3	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM	8.296.834,00			8.296.834,00	Lembar Disposisi, Amplop Sudin, Kartu Kendali, Kartu Stock Barang, Lembar Pengantar
4	Sudin Perindustrian dan Energi - Kep. Seribu	51.872.080,00			51.872.080,00	Amplop Sudin, Kwitansi Sudin, Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, SSP
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.772.467,00			8.772.467,00	Cetakan usang dan akan diajukan pengusulan pemusnahan
6	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	25.155.086,00			25.155.086,00	Cetakan usang dan akan diajukan pengusulan pemusnahan
7	Unit PPKB Ujung Menteng			258.653.835,00	258.653.835,00	Cetakan umum, cetakan khusus dan ATK
8	Dinas Perhubungan			1.391.396.444,00	1.391.396.444,00	Kertas tiket transjakarta

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca			Total Nilai Persediaan Usang/Rusak	Keterangan
		Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan	Sudah Dimusnahkan		
9	Dinas Ketahanan Pangan	79.502.500,00			79.502.500,00	Cetakan usang berupa karcis dan blanko perizinan yang akan diajukan usulan pemusnahan
10	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		18.493.700,00		18.493.700,00	barang cetakan
11	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		631.744.979,00		631.744.979,00	alat kontrasepsi, disposable, anasthesi kit untuk operasi lokal vaksetomi tanpa pisau (VTP)
JUMLAH		398.720.331,00	2.836.332.781,00	6.357.758.242,00	9.592.811.354,00	

**IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	Perusahaan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	% Kepemilikan	Saldo per 31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2018				Mutasi Kurang Tahun 2018			Nilai PMP per 31 Desember 2018 (Audited)
								Tambahan Modal Disetor	Pengumuman Laba	Lain-lain	Koreksi Ekuitas	Pembagian Dividen	Pengumuman Rugi	lain-lain	
1	PD AM Jaya	Audited 2018	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	100%	-								-
2	PD Dharma Jaya	Audited 2018	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	100%	129.373.197.101,00	79.400.000.000,00	13.573.292.813,00	-	10.335.532.689,00	2.033.671.627,00	-	1.016.835.812,00	229.631.515.164,00
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2018	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	100%	1.157.598.698.750,00	935.997.229.164,00	136.268.843.482,00	2.081.263.775,00	-	47.774.672.040,00	-	1,00	2.184.171.363.130,00
4	PD Pasar Jaya	Audited 2018	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	100%	1.165.209.030.797,00	166.668.000.000,00	95.410.632.247,00	-	101,00	37.407.235.608,00	-	27.334.171.522,00	1.362.546.256.015,00
5	PD PAL Jaya	Audited 2018	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	100%	683.424.757.090,00	235.219.361.000,00	43.862.650.931,00	2.665.177.359,00	(1,00)	15.669.818.960,00	-	13.747.529.384,00	935.754.598.035,00
Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD							3.135.605.683.738,00	1.417.284.590.164,00	289.115.419.473,00	4.746.441.134,00	10.335.532.789,00	102.885.398.235,00	-	42.098.536.719,00	4.712.103.732.344,00
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2018	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	38,80%	2.879.655.219.572,00	-	415.113.033.975,00	-	-	30.400.000.000,00	-	2.353.389.453,00	3.262.014.864.094,00
7	PT Food Station Tjipinang	Audited 2018	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	99,98%	380.934.130.133,00	85.500.000.000,00	30.230.110.071,00	1.432.277,00	-	5.032.786.787,00	-	1.297.956.959,00	490.334.928.735,00
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	50,00%	212.809.824.097,00	-	58.114.120.210,00	-	-	12.884.249.518,00	-	22.027.839,00	258.017.666.950,00
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2018	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	26,25%	299.443.049.949,00	-	88.754.217.800,00	2.509.775.340,00	-	54.652.182.000,00	-	-	336.054.861.089,00
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2018	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	72,00%	1.336.493.704.759,00	-	160.837.332.109,00	-	-	59.903.999.948,00	-	2.710.361.952,00	1.434.716.674.988,00
11	PT Kawasan Benik Nusantera	Audited 2018	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	26,85%	209.692.695.000,00								209.692.695.000,00
12	PT Cemari Toka	Audited 2018	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	27,42%	27.059.360.000,00								27.059.360.000,00
13	PT Pakuan International	Audited 2010	1971	-	Saham	1,94%	1.345.900.000,00								1.345.900.000,00
14	PT Grahasahari Suryajaya	audited 2016	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	8,08%	3.951.000.000,00								3.951.000.000,00
15	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2017	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	4,45%	13.080.000.000,00								13.080.000.000,00
16	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2018	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	99,99%	15.004.074.881.149,00	2.232.000.000.000,00	22.122.170.744,00	443.580.634,00	-	95.149.754.635,00	-	650.001.798.032,00	16.513.489.079.860,00
17	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2018	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	99,98%	8.201.485.715.268,00	-	800.126.391.044,00	108.384.812.532,00	-	213.605.061.635,00	-	311.898.596.523,00	8.584.493.260.686,00
18	PT Jakarta International Expo	audited 2016	2004	Akta Hibah No. 67/22-07-2004	Saham	13,14%	39.375.000.000,00								39.375.000.000,00
19	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2018	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	99,35%	454.320.071.158,00	-	-	-	-	-	15.356.140.004,00	-	438.963.931.154,00
20	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2018	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	99,99%	8.758.878.104.463,00	3.660.724.931.448,00	-	1.213.254.507,00	-	-	138.708.232.336,00	241.736.019,00	12.281.866.322.063,00
21	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2018	2014	Perda No. 4 Tahun 2014	Saham	99,43%	2.595.702.155.846,00	-	342.339.169.058,00	-	4.012.208.958,00	-	-	-	2.942.053.533.862,00
22	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2018	2013	Perda No.13 Tahun 2013	Saham	98,75%	401.431.087.856,00	-	8.620.907.481,00	15.982.688,00	-	1.262.740.032,00	-	309.583.009,00	408.495.654.984,00
Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan							40.819.731.899.250,00	5.978.224.931.448,00	1.926.257.452.492,00	112.568.837.978,00	4.012.208.958,00	472.890.774.555,00	154.064.372.340,00	968.835.449.786,00	47.245.004.733.445,00
JUMLAH							43.955.337.582.988,00	7.395.509.521.612,00	2.215.372.871.965,00	117.315.279.112,00	14.347.741.747,00	575.776.172.790,00	154.064.372.340,00	1.010.933.986.505,00	51.957.108.465.789,00

JAKARTA, 10 APRIL 2019

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2017	298.499.135.884.947,00	23.984.923.949.031,00	31.214.105.901.427,00	40.403.967.992.805,00	1.676.564.224.112,00	5.456.879.960.908,00	401.235.577.913.230,00
Mutasi Penambahan							
<i>Belanja Modal TA 2018 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD</i>	<i>5.493.373.929.929,00</i>	<i>2.503.550.334.498,00</i>	<i>3.787.773.213.370,00</i>	<i>2.195.927.869.729,00</i>	<i>137.982.740.117,00</i>	-	<i>14.118.608.087.643,00</i>
Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	5.493.373.929.929,00	2.474.426.840.163,00	3.796.942.343.407,00	2.196.534.865.666,00	137.229.694.165,00	-	14.098.507.673.330,00
Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan dari Belanja BOS	-	29.852.455.335,00	-	-	753.045.952,00	-	30.605.501.287,00
Belanja Modal Tahun 2018 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	-	156.726.000,00	9.169.130.037,00	606.995.937,00	-	-	9.932.851.974,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun 2017	-	572.235.000,00	-	-	-	-	572.235.000,00
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	352.800.000,00	47.299.184.703,00	13.631.050.112,00	-	12.292.685.034,00	-	73.575.719.849,00
Hutang Pihak Ke-3	546.660.390,00	20.028.024.219,00	361.291.458.954,00	30.861.653.379,00	72.897.200,00	-	412.800.694.142,00
Hasil Tukar Guling	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan dari Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap:							-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	88.913.015.000,00	77.579.645.122,00	289.783.522.860,00	309.483.048.738,00	15.575.180.042,00	509.881.653.106,00	1.291.216.064.868,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	-	-	3.935.565.383,00	652.671.480,00	312.405.000,00	-	4.900.641.863,00
Reklasifikasi Ke-6 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	1.381.329.160,00	-	4.551.121.234.113,00	659.882.581.950,00	-	-	5.212.385.145.223,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	-	-	-	-	-	1.406.194.672.595,00	1.406.194.672.595,00
Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi Aset Tetap:							-
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	-	849.642.382,00	651.920.000,00	-	-	-	1.501.562.382,00
Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	1.413.885.000,00	33.774.786.493,00	25.970.445.637,00	-	-	-	61.159.117.130,00
Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	-	137.571.500,00	-	-	-	13.100.000,00	150.671.500,00
Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	19.320.448.740.743,00	19.318.905.663,00	318.649.049.962,00	338.791.933.116,00	339.167.000,00	-	19.997.547.796.484,00
Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap	197.102.281.941,00	-	-	-	-	-	197.102.281.941,00
Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	-	146.500.000,00	153.625.157.742,00	366.377.200.000,00	-	-	520.148.857.742,00
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	-	59.620.000,00	-	-	-	-	59.620.000,00
Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	33.673.007.000,00	1.659.720.000,00	3.491.540.000,00	-	-	-	38.824.267.000,00
Reklasifikasi Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga menjadi Aset Tetap:							-
Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap	580.770.326.797,00	15.014.292.597,00	193.566.755.541,00	-	-	-	789.351.374.935,00
Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalisasi :							-
Kapitalisasi dari Beban Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	-	8.036.843.056,00	45.924.610.507,00	99,00	5.390.000,00	-	53.966.843.662,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	-	7.087.159.804,00	954.324.257,00	7.140.248.623,00	102.432.000,00	-	15.284.164.684,00
Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD	-	5.716.336.668,00	442.024.880,00	142.799.800,00	85.140.000,00	-	6.386.301.348,00
Kapitalisasi dari Beban Jasa	30.325.544.804,00	201.716.015,00	29.998.385.460,00	8.623.659.909,00	-	26.331.098.160,00	95.480.404.348,00
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	-	3.128.843.764,00	10.516.003.910,00	55.927.127.764,00	8.800.000,00	-	69.580.775.438,00
Koreksi:							-
Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain :							-
Transfer masuk sebelum Tahun 2015	-	188.200.000,00	2.930.928.600,00	-	-	-	3.119.128.600,00
Transfer masuk Tahun 2015	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Kurang Catat:							-
Koreksi Kurang Catat Nilai	4.816.123.000,00	461.716.173,00	117.236.854.505,00	1.459.080.830,00	65,00	1,00	123.973.774.574,00
Koreksi Kurang Catat Barang	676.655.688.000,00	8.967.423.691,00	292.602.375.322,00	3.118.464.697,00	9.900.000,00	-	981.353.851.710,00
Koreksi Penambahan Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Mutasi Penambahan	26.429.773.331.764,00	2.753.206.466.348,00	10.204.096.421.115,00	3.978.388.340.114,00	166.786.736.458,00	1.942.420.523.862,00	45.474.671.819.661,00
Mutasi Pengurangan							

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Penghapusan	-	12.133.384.075,00	231.917.008.984,00	2.767.500.000,00	-	-	246.817.893.059,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD:							-
Dari Belanja Modal Tahun 2018	-	436.473.750,00	1.050.688.509,00	-	-	-	1.487.162.259,00
Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018)	-	4.890.134.827,00	5.737.744.108,00	-	11.422.500,00	-	10.639.301.435,00
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap:							-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	197.107.203.266,00	9.573.633.092,00	729.749.913.962,00	88.190.717.440,00	76.961.311.468,00	189.522.992.134,00	1.291.105.771.362,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	-	4.900.641.863,00	-	-	-	-	4.900.641.863,00
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	-	-	-	-	-	5.327.788.416.081,00	5.327.788.416.081,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2018 Ke KDP	4.227.600,00	3.152.904.682,00	1.218.344.475.399,00	62.340.466.681,00	-	-	1.283.842.074.362,00
							-
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya:							-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	-	285.167.959.050,00	53.919.376.006,00	4.510.146.374,00	97.292.899,00	-	343.694.774.329,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	-	-	7.272.882.416,00	-	-	332.264.375,00	7.605.146.791,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	42.190.177.697,00	-	-	-	-	-	42.190.177.697,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	-	16.646.183.154,00	-	-	-	-	16.646.183.154,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	288.477.029.000,00	15.014.292.597,00	111.169.536.441,00	-	-	-	414.660.858.038,00
							-
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga:							-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	33.673.007.000,00	-	56.678.102.450,00	-	-	-	90.351.109.450,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO)	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer)	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate)	-	-	-	-	-	-	-
							-
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 Ke Beban:							-
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pegawai	-	-	-	63.980.280,00	-	-	63.980.280,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang	-	100.855.773.110,00	3.442.174.453,00	1.365.102.203,00	134.337.932.282,00	-	240.000.982.048,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang - BLUD	-	5.161.557.737,00	-	-	-	-	5.161.557.737,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Jasa	17.334.000,00	19.190.000,00	935.000,00	428.865.000,00	-	-	466.324.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Pemeliharaan	-	1.573.068.845,00	3.088.109.286,00	23.657.428,00	-	-	4.684.835.559,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 menjadi Persediaan	7.500.000,00	45.470.157.535,00	1.382.117.096,00	1.973.168.552,00	803.157.300,00	-	49.636.100.483,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2018)							-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang	-	30.555.740.679,00	7.247.074.403,00	24.373.197.815,00	1.560.280.558,00	-	63.736.293.455,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang - BLUD	-	3.504.179.891,00	20.470.000,00	25.300.000,00	-	-	3.549.949.891,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Jasa	-	1.817.600,00	175.434.600,00	-	-	-	177.252.200,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Pemeliharaan	-	-	105.145.149,00	139.922.100,00	287.166.000,00	-	532.233.249,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	-	18.809.942.117,00	112.736.605,00	106.333.150,00	1.980.326.439,00	15.152.441.407,00	36.161.779.718,00
							-
Koreksi:							-
Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain:							-
Transfer keluar sebelum Tahun 2015	-	127.850.000,00	-	-	-	-	127.850.000,00
Transfer keluar Tahun 2015	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya							-
Belanja Modal sebelum Tahun 2018 (Temuan)	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Lebih Catat							-
Koreksi Lebih Catat Nilai	47.622.042.469,00	1.590.648.806,00	181.025.139.503,00	1.627.359.070,00	-	13.047.358.099,00	244.912.547.947,00
Koreksi Lebih Catat Barang	26.761.569.000,00	31.081.294.962,00	71.262.304.967,00	-	78.717.986,00	272.209.000,00	129.456.095.915,00
Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Ulang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	157.180.380,00	12.549.182.724,00	561.200.756.189,00	35.865.740.245,00	-	-	609.772.859.538,00
Koreksi Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
							-
Jumlah Mutasi Pengurangan	636.017.270.412,00	603.216.011.096,00	3.244.902.125.526,00	223.801.456.338,00	216.117.607.432,00	5.546.115.681.096,00	10.470.170.151.900,00
Saldo Per 31 Desember 2018	324.292.891.946.299,00	26.134.914.404.283,00	38.173.300.197.016,00	44.158.554.876.581,00	1.627.233.353.138,00	1.853.184.803.674,00	436.240.079.580.991,00

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PER 31 DESEMBER 2018

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN					MUTASI		PENGURANGAN					SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai		Koreksi Lebih Catat Barang
1.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PE	2.990.325.968.125	50.019.275.754	-	-	276.649.054.217	8.308.068.600	-	-	2.982.985.000	561.828.405	3.290.780.888.840	-	-	-	5.458.579.960.906 43.856.744.807
		SUBTOTAL	2.990.325.968.125	48.641.864.296	-	-	271.633.472.659	-	-	-	2.982.985.000	-	3.290.780.888.840	-	-	-	43.856.744.807
1		Pembangunan Gedung Kantor Pemda Kepulauan Seribu	3.215.932.000,00										3.215.932.000,00				-
2		Pembangunan rumah susun untuk lokasi binaan (lokbin) rawa buaya+perencanaan	128.377.639.727,00										128.377.639.727,00				-
3		Pembangunan Masjid Raya Jakarta	109.372.429.308,00										109.372.429.308,00				-
4		Pembangunan rumah susun jatinegara kaum, Jakarta timur+perencanaan	59.661.895.101,00										59.661.895.101,00				-
5		Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Baitul	2.982.985.000,00								2.982.985.000,00						-
6		Pembebasan Lahan. Jasa Appraisal (penilaian tanah)	19.404.000,00										19.404.000,00				-
7		Pembebasan lahan Untuk Rusun. Jasa Appraisal (penilaian tanah)	17.710.000,00										17.710.000,00				-
8		Pembebasan lahan Untuk Rumah Susun.	20.823.000,00										20.823.000,00				-
9		Pembebasan lahan Untuk Rumah Susun. Jasa Appraisal (penilaian tanah)	17.930.000,00										17.930.000,00				-
10		Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur Tower 2	2.541.592.358,00										2.541.592.358,00				-
11		Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur Tower 2	76.475.680.914,00										76.475.680.914,00				-
12		Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (Multi Years) - Fisik & Pengawasan (hutang pihak ke 3)	394.998.726,00										394.998.726,00				-
13		Rehab Kantor Gedung Pemda Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur	42.626.680,00										42.626.680,00				-
14		Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara	162.470.000,00										162.470.000,00				-
15		Pembangunan Gedung PMI Kepulauan Seribu	45.891.000,00										45.891.000,00				-
16		Pembangunan Musholla dan Sarana Prasarana Pendukung di Rumah Susun Pondok Bambu	1.164.977.925,00										1.164.977.925,00				-
17		Penyelesaian Pembangunan Masjid Marunda, Jakarta Utara	7.124.210.980,00										7.124.210.980,00				-
18		Pemb Masjid & Sarana Prasarana Penunjang di Rusun Cipinang Besar Selatan	167.330.625,00										167.330.625,00				-
19		perancangan dasar rusun blog nagrak+penyusunan dokumen lingkungan rusun nagrak	557.667.000,00										557.667.000,00				-
20		Perencanaan sarana untuk rusun rawa Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur	20.482.000,00										20.482.000,00				-
21		Perencanaan sarana untuk rusun rawa Muara Baru, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan	37.686.000,00										37.686.000,00				-
22		Perencanaan sarana untuk rusun rawa Prasarana Pendukung di Rumah Susun Marunda	2.019.611.650,00										2.019.611.650,00				-
23		Pembangunan rumah susun pinus blok 1 blok	3.118.588.000,00										3.118.588.000,00				-
24		Pembangunan jaringan pipa gas pada rumah susun jatinegara kaum, Jakarta timur	18.027.625,00										18.027.625,00				-
25		Pembangunan jaringan pipa gas pada	18.027.625,00										18.027.625,00				-
26		Perbaikan Rumah Susun Kapuk Muara, Jakarta Utara	973.202.500,00										973.202.500,00				-
27		Perbaikan Rumah Susun Bulak Wadon, Jakarta Barat	361.341.000,00										361.341.000,00				-
28		Perbaikan Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara	513.223.000,00										513.223.000,00				-
29		Perbaikan Rumah Susun Pulo Jahe, Jakarta Timur	276.638.500,00										276.638.500,00				-
30		Perbaikan Rumah Susun Cipinang Muara, Jakarta Timur	254.437.424,00										254.437.424,00				-
31		Perencanaan DED Rumah Susun Masterplan Kawasan Ciangir	1.189.276.000,00										1.189.276.000,00				-
32		Perencanaan Perumahan dan Gedung Pemda	1.255.258.950,00										1.255.258.950,00				-
33		Perancangan Dasar Rusun Daan Mogot	197.340.000,00										197.340.000,00				-
34		Perancangan dasar rusun penjaringan+penyusunan dokumen	622.540.000,00										622.540.000,00				-
35		Perancangan Dasar komplek Rusun Pondok Pinang Jakarta Selatan	305.681.512,00										305.681.512,00				-
36		Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda	151.548.760										151.548.760				-

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI											SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN					PENGURANGAN							
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan		Koreksi Lebih Catat Nilai
37		Perbaikan Rumah Susun Cakung Barat (Pemeliharaan & pengawasan)	1.237.053,067									1.237.053,067				-
38		Pembangunan rumah susun untuk tower Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower	124.410.000									124.410.000				-
39		Pembangunan rumah susun untuk tower Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower	136.219.015,070									136.219.015,070				-
40		Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (MY)	124.080.000									124.080.000				-
41		Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (MY)	148.599.292,050									148.599.292,050				-
42		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Penggilingan	372.703,100									372.703,100				-
43		Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years) - Fisik & Pengawasan (utang pihak ke 3)	146.192.403,602									146.192.403,602				-
44		Pembangunan Rumah Susun Penggilingan	12.120.613.000									12.120.613.000				-
45		Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta Utara	193.601,100									193.601,100				-
46		Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa Bebek	106.808,625									106.808,625				-
47		Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda	79.749,140									79.749,140				-
48		Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot	82.931,416									82.931,416				-
49		Kajian Pengelolaan Rusun Fungsi Campuran	568.000.000									568.000.000				-
50		Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPKUP)	889.185.000									889.185.000				-
51		Perencanaan Dasar Rusun Sempur (Kantor Pajak/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	226.028.000									226.028.000				-
52		Perancangan Dasar Rusun Flamboyen	220.748.000									220.748.000				-
53		Perancangan Dasar Rusun Terminal Pulo Gadung	303.425.000									303.425.000				-
54		Perancangan Dasar Rusun Terminal Rawa Buaya	247.787.000									247.787.000				-
55		Perancangan Dasar Rusun di Kepulauan Seribu	210.180.000									210.180.000				-
56		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Daan Mogot	428.900.000									428.900.000				-
57		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Rorotan IV	428.989,880									428.989,880				-
58		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Cipinang Besar Utara	428.900.000									428.900.000				-
59		Kajian Manajemen Rekeyasa Lalu Lintas Rusun BLK Pasar Rebo, Penggedan, Rorotan IV dan Cipinang Besar Utara	373.300,400									373.300,400				-
60		Kajian manajemen rekeyasa lalu lintas Rusun Bekasi Timur, Boker, Penggilingan	359.514,320									359.514,320				-
61		Kajian Manajemen Rekeyasa Lalu Lintas Masjid Raya Jakarta	111.804,000									111.804,000				-
62		Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK)	2.899.835,100									2.899.835,100				-
63		Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1 - 5, Jakarta Utara	287.837.162,263									287.837.162,263				-
64		Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 - 10, Jakarta Utara	417.920.059,189									417.920.059,189				-
65		Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11 - 14, Jakarta Utara	331.902.145,362									331.902.145,362				-
66		Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV, Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara	337.534.206,858									337.534.206,858				-
67		Pembangunan rumah susun untuk tower Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan Pembangunan Rumah Susun Pulo Gadung dan Balai Latihan Kerja dan Bina	319.955,403,142									319.955,403,142				-
68		Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)	229.221.523,236									229.221.523,236				-
69		Pembangunan rumah susun untuk tower dan Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)	557.199,927									557.199,927				-
70		Inspeksi BKT Kel. Ujung Menteng, Kec. Petamburan	213.487,000									213.487,000				-
71		Inspeksi BKT Kel. Ujung Menteng, Kec. Petamburan	3.511.192,665									3.511.192,665				-
72		Perancangan Dasar Rumah Susun Jl. Yos Sudarso Raya Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta utara	213,487,000									213,487,000				-
73		Perancangan Dasar Rumah Susun Karang Anyar	168,391,300									168,391,300				-
74		Perancangan Dasar Revitalisasi Rumah Susun Tambora Jakarta Barat	222,605,900									222,605,900				-

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN						PENGURANGAN							
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai		Koreksi Lebih Catat Barang
75		Perancangan Dasar Rumah Susun PK Pulo Gadung, JAKTIM	189.424.000										189.424.000				-
76		Perancangan Dasar Rumah Susun Cakung Barat	189.424.000										189.424.000				-
77		Perancangan Dasar Rumah Susun Pulo Jahe Istingegara, Cakung, Jakarta	213.487.000										213.487.000				-
78		Perancangan Dasar Rumah Susun Kel. Kelapa gading Timur, Kec. Kelapa gading, Jakarta	213.487.000										213.487.000				-
79		Perancangan Dasar Rumah Susun Rawas Kerbau Jakarta Pusat	319.415.800										319.415.800				-
80		Perancangan dan kegiatan sosial pengembangan Jakarta Timur (Multi Years) - Fisik & Revitalisasi Kawasan perkotaan k. 31	1.982.880.000										1.982.880.000				-
81		Perancangan Dasar Rusun Pulogebang+penyusunan dokumen lingk+pengangunan rusun pulogebang	541.443.100										541.443.100				-
82		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	163.735.000										163.735.000				-
83		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	1.250.979.672										1.250.979.672				-
84		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	1.338.305.037										1.338.305.037				-
85		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	414.219.080										414.219.080				-
86		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	93.088.429.300										93.088.429.300				-
87		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	40.613.591.962										40.613.591.962				-
88		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	42.849.856.399										42.849.856.399				-
89		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	6.380.658.878										6.380.658.878				-
90		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN	3.193.901.541										3.193.901.541				-
91		Pembayaran Hutang Daerah Th.2017 SP2D 0001134/SP2D/II/2018 tg. 8 Maret 2018	6.619.709.779										6.619.709.779				-
92		Pembayaran Hutang Daerah Th.2017 SP2D 0001133/SP2D/II/2018 tg. 8 Maret 2018	4.659.794.975										4.659.794.975				-
93		KDP Selesai Rusun Laban Rawas Buaya Tower 3,4,5 BAST: 1051/-1.796.32 Jdl.26/6/2018		48.641.864.296									48.641.864.296				-
94		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.84)															-
95		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.85)															-
96		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.86)															-
97		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.79)															-
98		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.80)															-
99		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.81)															-
100		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.82)															-
101		Penambahan HD 2018 (Fisik+Penggawasan, +Aset Induk Reg.83)															-
102		pembangunan rusun penggilingan				3.916.644.398											3.916.644.398
103		pembangunan rusun pulo gebang dan penggilingan				11.351.462.632							2.734.114.434				8.617.348.198
104		pembangunan rusun rawa bebek				190.306.862											190.306.862
105		pembangunan rusun nagrak tower 6-10				27.775.763.681							27.775.763.681				-
106		pembangunan rusun nagrak 1-5				95.607.608.637							95.607.608.637				-
107		embangunan rusun nagrak tower 11-14				28.129.253.167							28.129.253.167				-
108		pembangunan rusun JL Ronatan IV				30.222.223.442							30.222.223.442				-
109		Pembangunan rusun kel penggilingan dan rusun pulo gebang				70.127.078.058							70.127.078.058				-
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM PENERJAJAN				4.113.131.782											4.113.131.782
		SUDIN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM	-	-	-	-	-	908.026.210	-	-	-	-	-	-	-	-	908.026.210
		Biaya jasa Community action Plan						384.538.550									384.538.550
		RPTRA Jln HJ Murtado 16 Kel Paseban						15.603.240									15.603.240
		RPTRA Jln Percetakan negara V Rawasari						16.416.618									16.416.618
		RPTRA Jln Rawasari Barat Kel.Cempaka Putih Timur						24.033.838									24.033.838
		RPTRA Jln Semen dalam kel.Senen						17.499.280									17.499.280
		RPTRA Jl.Kramat Sawah Kel.Paseban						12.172.524									12.172.524
		Biaya Community Action Plan						437.762.160									437.762.160
																	-

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN					MUTASI					PENGURANGAN					SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang			
		SUDIN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM	-	-	-	-	-	2.915.993.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.915.993.590	
		Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						2.915.993.590										2.915.993.590	
																		-	
		SUDIN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM	-	-	-	-	-	2.147.717.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.147.717.000	
		Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kota Bambu Utara Jakbar						306.878.000										306.878.000	
		Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Pinangsis Jakbar						385.528.000										385.528.000	
		Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kebon Jeruk Jakbar						408.298.000										408.298.000	
		Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kali Angke Jakbar						514.503.000										514.503.000	
		Jasa konsultasi Perencanaan CAP Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kelurahan Kapuk Jakbar						532.510.000										532.510.000	
																		-	
		SUDIN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM	-	-	-	-	-	4.437.534.298	1.086.345.700	-	-	-	312.396.700	-	-	-	-	5.211.483.298	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Tegai Parang						87.760.750										87.760.750	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Tegai Parang						70.208.600										70.208.600	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Bukit Duri						84.581.200										84.581.200	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Tegai Parang						87.760.750										87.760.750	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Keramat Pela						89.256.200					89.256.200					-	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Tegai Parang						105.312.900										105.312.900	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Bukit Duri						105.726.500										105.726.500	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Bukit Duri						105.726.500										105.726.500	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Keramat Pela						111.570.250					111.570.250					-	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Keramat Pela						111.570.250					111.570.250					-	
		Penyusunan CAP (Community Action Plan) Peningkatan Kawasan Permukiman di Kel. Bukit Duri						126.871.800										126.871.800	
		TP BPK 14E LAMP 14.6						2.582.082.109										2.582.082.109	
		TP BPK 14 E LAMP 14.6						118.117.450										118.117.450	
		TP BPK 14 E LAMP 14.6						49.280.000										49.280.000	
		TP BPK 14 E LAMP 14.6						1.708.054.739										1.708.054.739	
																		-	
		SUDIN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM	-	1.377.411.458	-	-	-	578.047.260	1.249.986.100	-	-	-	249.431.705	-	-	-	-	2.956.013.113	
		JASA KONSULTAN CAP WILAYAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR / FISIK BELUM DIBANGUN		1.377.411.458				319.448.800										1.696.860.258	
		JASA KONSULTAN CAP WILAYAH KELURAHAN KLENDER / FISIK BELUM DIBANGUN						461.059.500											
		JASA KONSULTAN CAP WILAYAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU / FISIK BELUM DIBANGUN						469.477.800											
		Pembangunan Shelter Motor Rusun Cakung Barat						249.431.705					249.431.705,00						
		Koreksi Penggabung KDP, Pembangunan Sarpras, Penataan Lt Dasar, Pagar, dll TA 2018 Rusun Pinus Elok						265.436.728											
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan						63.178.829										63.178.829	
2.		DINAS KEHUTANAN (GABUNGAN)	21.348.186.620	-	-	-	-	11.921.947.552	522.803.895	-	-	-	123.800.950	3.087.484.981	-	5.535.750.091	-	12.602.150.588	
		DINAS KEHUTANAN	17.371.198.060	-	-	-	-	11.688.030.174	258.021.995	-	-	-	123.800.950	-	-	5.535.750.091	-	11.711.647.019	
1		Jembatan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama	5.535.750.091													5.535.750.091		-	
2		Jembatan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama	5.880.002.800															5.880.002.800	
3		Jembatan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama	238.238.800															238.238.800	

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN					PENGURANGAN								
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai		Koreksi Lebih Catat Barang
4		Taman Tebet Utara dan Sisi Selatan	123.800.950														123.800.950
5		Pagar Panel PrecTPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	1.367.255.997														1.367.255.997
6		Plaza TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	270.922.472														270.922.472
7		Signage (Papan Nama) TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	67.755.705									67.755.705					-
8		Sapura TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	28.306.578									28.306.578					-
9		Pintu Gerbang TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	27.242.665									27.242.665					-
10		Turap Batu Kali TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	206.689.071									496.002					206.193.069
11		Jembatan TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	212.329.811														212.329.811
12		Toilet TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	181.718.264														181.718.264
13		Instalasi Pumbi TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	57.167.394														57.167.394
14		Jalan TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	1.671.747.756														1.671.747.756
15		Saluran Air TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	1.392.001.102														1.392.001.102
16		TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	52.613.276														52.613.276
17		Instalasi Listrik TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur	57.655.328														57.655.328
18		Biaya Perencanaan Pembangunan Taman						180.170.100									180.170.100
		Biaya Perencanaan Pembangunan Taman						36.558.720									
		Biaya Perencanaan Pembangunan Air Mancur					188.027.495	41.293.175									
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					193.306.062										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					465.021.873										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					357.629.832										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					11.360.250										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					12.793.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					8.528.666										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					22.049.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					11.360.250										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					42.900.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					8.528.667										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					22.049.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					7.293.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					7.293.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					22.049.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					8.528.667										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					12.457.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					24.596.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					22.110.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					12.677.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					24.365.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					25.074.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					11.940.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					13.200.000										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					8.528.666										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					23.776.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					22.203.500										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					125.122.523										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					409.380.905										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					384.691.671										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					1.305.552.914										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					679.260.587										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					27.462.331										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					2.263.084.220										
		GOLONGAN KONSTRUKSI DHM PENERJAJAN					211.765.000										

[illegible]

[illegible]

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN						MUTASI		PENGURANGAN						SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang		
		Penataan ruang terbuka hijau taman bongo						7.303.384										
		Penataan ruang terbuka hijau taman kelapa puan 1						9.938.767										
		Penataan ruang terbuka hijau taman janur kuning						6.688.600										
		Penataan ruang terbuka hijau makam TPU Tegai Kunir						74.688.405										
1		Taman BMW Jl. Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjungpriok	224.639.615															224.639.615
		SUDIN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN - JAKBA	-	-	-	-	233.917.378	6.243.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.917.378
1		Biaya Pengawasan Penataan Taman Blok (3 Rt. 010/16 Kalideres Jakarta Barat TUH BPK 2018						2.234.670										2.234.670
		Biaya Pengawasan Penataan Taman Delima IV , TDS, Grogol Petamburan TUH BPK 2018						3.009.325										
		GELOSAR KONSTRUKSI DALAM PENGURAJAN					233.917.378											233.917.378
3.		DINAS BINA MARGA (GABUNGAN)	776.038.507.018	83.583.261.517	-	-	6.207.909.673	1.273.750.000	-	-	-	-	732.042.840.078	-	-	-	-	133.609.839.330
		DINAS BINA MARGA	766.720.325.069	83.583.261.517	-	-	6.030.910.873	1.190.590.000	-	-	-	-	732.017.840.078	-	-	-	-	124.316.657.381
1		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda - Rorotan)	14.069.575.092															14.069.575.092
2		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Rorotan - Cakung Timur)	10.206.563.541															10.206.563.541
3		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda	20.223.424.132															20.223.424.132
4		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda - Rorotan)	25.000.000															25.000.000
5		Keg Invent dan PT II Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	5.000.000															5.000.000
6		Prog. Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg. Invent dan PT II Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000															25.000.000
7		Program optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan (Dedicated) keg invent dan PT II Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	15.000.000															15.000.000
8		Keg Invent dan PT II Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000															25.000.000
9		Program Keg pembebasan tanah Jl. Tis Missing Link (Jl. KH. M	50.000.000										50.000.000					-
10		Keg PT Jin Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman dll) Sigit Pramono	20.000.000										20.000.000					-
11		Prog. Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg. Invent dan PT II Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000										21.773.706					3.226.294
12		Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi - Pulo Gebang) /pondasi	11.789.361.707															11.789.361.707
13		Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Pulo Gebang - Pondok Kopi)/termasuk saluran & trotoar	5.887.804.094															5.887.804.094
14		Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu (Blaya Lelang dan Perencanaan)	130.392.000															130.392.000
15		Pembangunan UP. Jl. RA Kartini (Blaya Lelang Konsultan)																-
16		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Operasional menuju Waduk Cilangkap (Jalan Sepakat 2 & 3)	25.000.000															25.000.000
17		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Deplu Raya	50.000.000															50.000.000
18		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Akses Menuju Rusun Pulo Gebang (Jl. Mutiara Mas Raya)	62.500.000															62.500.000
19		Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Layang Jl. Kunir - P. Jayakarta	50.000.000															50.000.000
20		Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk Raya	87.500.000															87.500.000
21		Biaya Perenc pengukuran dan gambar trace Pembayaran Ganti Rugi di Jl Perjuangan RT 1 RW 7 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk	50.000.000															50.000.000

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN						MUTASI		PENGURANGAN						SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang		
22		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol P. Antasari - Blok M Lanjutan	25.000.000														25.000.000	
23		Inventarisasi Pembebasan Tanah FO Kuningan Sisi Selatan	75.000.000														75.000.000	
24		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Tembok (Missing Link) Industri Pulogadung - Rajman - Dr. Sumarmo Lanjutan	25.000.000														25.000.000	
25		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lan	126.565.040														126.565.040	
26		Pembangunan IPD Kanal Barat Pasar Tanah Abang	11.300.000														11.300.000	
27		Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu	404.219.000														404.219.000	
28		Pembangunan Busway Layang Koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang Paket I	842.949.000														842.949.000	
29		Pembangunan Busway Layang Koridor 14 Kalimantan - Tendeau	834.776.500														834.776.500	
30		Pembangunan Busway Layang Koridor 15 Pasar Minggu - Manggarai	874.258.000														874.258.000	
31		Simpang Tak Sebidang Tanjung Barat	999.077.000														999.077.000	
32		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung	12.500.000														12.500.000	
33		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah FO Jl Semanan Rel KA	12.500.000														12.500.000	
34		Invent Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan (Jl.	14.725.000										14.725.000				-	
35		Pembangunan Jalan Tembus Asia Afrika - Jalan Teuku Nyak Arief	37.058.600														37.058.600	
36		Pembangunan Jalan dan Saluran Pengamanan sejar BKT (Segmen Marunda Raya Bekasi)	15.722.322.256														15.722.322.256	
37		Pembangunan Jalan dan saluran Pengaman sejar BKT (Segmen Raya Bekasi Cipinang)	12.626.836.227														12.626.836.227	
38		Jalan dan Saluran pengaman sejar BKT (segmen Raya Bekasi - Cipinang)	4.410.013.925														4.410.013.925	
39		Jalan dan Saluran pengaman sejar BKT (segmen Marunda - Raya Bekasi)	7.834.223.000														7.834.223.000	
40		Pembangunan Simpang Tak sebidang Jl. Panjang	80.080.000														80.080.000	
41		Pembangunan FO Jembatan Tiga Ploot	390.259.100														390.259.100	
42		Pembangunan FO Pancoran															-	
46		Pembangunan Underpass Kartini															-	
62		Pembangunan Underpass Santa	64.643.334										64.643.334				-	
63		Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan/Pelebaran Jalan Raya Bekasi Kel.Ujung Menteng dan Kel.Cakung Timur	15.560.000										15.560.000				-	
65		Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tembus dari Jl.Kapuk Raya-Jl.Pantai Indah Selatan 2 Kel.Kapuk Muara	11.860.000										11.860.000				-	
66		Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tembus Sunter (Dari Komplek Kencana Sunter Jaya,Beringin-Taman Sunter Indah Boulevard Timur Raya) Kel.Sunter Jaya	11.332.000										11.332.000				-	
67		Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper Kel.Tugu	1.396.000										1.396.000				-	
68		Hotmix Jl. Asia Afrika Cs (Peningkatan Jalan2 Strategis)															-	
69		Pek. Beton Cepat Keras (Peningkt. Jalur Busway)															-	
70		Jembatan Jl. Yos Sudarso (Marka - Peningkatan Jembatan)															-	
71		Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 1)															-	
72		Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 3)															-	
73		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelempap Jalan Jaktim Pkt 1 (Trotoar Jl. Pulomas dan sekitarnya)															-	
74		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelempap Jalan Jaktim Pkt 2 (Trotoar Jl. Pemuda dan Jl. Perintis Kemerdekaan)															-	
75		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelempap Jalan Jaksel Pkt 1 (Peningkt. Saluran Jl. Sisingamangaraja, Jl. Panglima Polim Raya dan sekitarnya)															-	

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				PENAMBAHAN						PENGURANGAN						
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang
76		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jaksel Pkt 1 (Trotoar Kawasan Kalijodo dan sekitarnya)														-
77		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jakpus Pkt 4 (Kelengkapan Prasarana Trotoar)														-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		10.211.462.000												10.211.462.000
		Hotmix II, Asia Afrika C6 (Peningkatan Jalan2 Strategis)		16.025.805.000								16.025.805.000				
		Pek. Beton Cepat Keras (Peningkt. Jalur Borew)		16.806.510.000								16.806.510.000				
		Jembatan II, Yos Sudarso (Marka - Peningkatan Jembatan)		701.250.000								701.250.000				
		Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 1)		9.391.360.000								9.391.360.000				
		Pemb. Prasarana Jaringan Utilitas (Pkt. 3)		9.043.410.000								9.043.410.000				
		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jaktim Pkt 1 (Trotoar II, Pulomas dan sekitarnya)		8.540.124.040								8.540.124.040				
		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jaktim Pkt 2 (Trotoar II, Pemuda dan II, Perintis Kemerdekaan)		8.253.294.669								8.253.294.669				
		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jaksel Pkt 1 (Peningkt. Saluran II, Singamangaraja, II, Panglima Polim Raya dan sekitarnya)		2.088.240.000								2.088.240.000				
		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jakbar Pkt 1 (Trotoar Kawasan Kalijodo dan sekitarnya)		1.873.542.360								1.873.542.360				
		Pemb. Trotoar dan Bangunan Pelelangkap Jalan Jakpus Pkt 4 (Kelengkapan Prasarana Trotoar)		648.263.448								648.263.448				
78		STS Cipinang Lontar		107.783.732.313								107.783.732.313				-
79		Ph Over Pancoran		150.178.074.146								150.178.074.146				-
80		STS Bintaro Permai - Rel KA		54.003.535.160								54.003.535.160				-
81		Underpass Kartini		74.702.468.129								74.702.468.129				-
82		Underpass Mampang - Kuningan		168.449.277.377								168.449.277.377				-
83		Underpass Matraman - Salemba		103.317.663.396								103.317.663.396				-
84		Perencanaan Skywalk Halte Velbak - Halte Kebayoran Lama - Stasiun Kebayoran Lama					561.902.000									561.902.000
85		Perencanaan Skywalk Halte Tendean - Halte Tegal Parang					544.852.000									544.852.000
86		UKL UPL Pembangunan U/P Senen Extension					315.095.000									315.095.000
87		Kajian Andalalin Pembangunan FO Lenteng Agung - GSP					276.100.000									276.100.000
88		Kajian Andalalin Pembangunan U/P Senen Extension					276.100.000									276.100.000
89		Kajian dan Perencanaan STS di Provinsi DKI Jakarta														-
90		FO Bintaro Puspita					828.623.124									828.623.124
91		FO Cakung					737.358.875									737.358.875
92		FO Lumenten					838.495.624									838.495.624
93		FO Sunter Permai Martadinata					826.031.250									826.031.250
94		FO Tanjung Barat					826.353.000									826.353.000
95		UKL UPL STS LENTENG AGUNG IGSP						400.235.000								
96		DED						665.450.000								
97		Review DED dan Soil Investigation						124.905.000								
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		-												-
		SUDIN BINA MARGA - JAKPUS		690.940.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.940.780
1		Inventarisasi II, Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari		-												-
2		Inventarisasi II, Inspeksi Kali Utan Kayu (II, Kodam - Suprpto)		50.000.000												50.000.000
3		Inventarisasi II, Inspeksi Kali Baru Barat		50.000.000												50.000.000
4		Inventarisasi II, Kali Krukut Atas (II, Tis Pengiriban - Bendungan hilir)		50.000.000												50.000.000
5		Inventarisasi jalan menuju II, Karet Pasar Baru Barat 1 (samping TPU Karet Bivak)		25.000.000												25.000.000
		Inventarisasi II, Mangga Dua Dalam		25.000.000												25.000.000
		Inventarisasi & Appraisal II, Kali Baru Barat, II, Kali Sejar Utan Kayu, II, Pramukasari		335.005.000												335.005.000
7		Peningkatan Jembatan di Wilayah Kota administrasi Jakarta pusat (Jasa Konsultan Perencanaan)		155.935.780												155.935.780
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan														-
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan														-
																-
																-
		SUDIN BINA MARGA - JAKBAR		60.717.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.717.580

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN					MUTASI		PENGURANGAN						SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang		
2		Peningkatan trotoir Tanjung Duren Barat VI, Kel. Tanjung Duren	25.605.000															25.605.000
7		Peningkatan Trotoar Jl. Anggrek Neel Murni	22.030.000															22.030.000
13		Perbaikan Jl. Tanggul Selatan RT 02, 04, 05, 06, 010, 012 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng	13.082.500															13.082.500
		SUDIN BINA MARGA - JAKSEL	6.566.523.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	6.541.523.669
1		Cilandak I Ujung (Kel. Cilandak Barat)	73.726.000															73.726.000
2		Jl. Tembus Mampang Prapatan 13 (Kantor Kecamatan Mampang)	118.180.000															118.180.000
3		Pengukuran Trace kegiatan : Pengukuran dan Perencanaan Trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo - Sahardjo Kota Administrasi Jakarta Selatan	45.000.000															45.000.000
4		Pengukuran Trace kegiatan : Pengukuran dan Perencanaan Trace Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.000.000															6.000.000
5		Perencanaan dan Pengukuran Trace Pra Invent Jl. Bangka Raya	30.000.000															30.000.000
6		Perencanaan dan Pengukuran Trace Invent Jalan Sejajar Rel Kereta Bukit Duri Sisi Barat	7.500.000															7.500.000
7		Perencanaan dan Pengukuran Trace Pra Invent Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga	6.000.000															6.000.000
8		Perencanaan dan Pengukuran Trace, Pematokan Trace DTR, Pelaksanaan (Pembayaran Ganti Rugi) Invent + PT Jl. Alwi	94.555.000															94.555.000
9		Ducting System Kawasan Blok M Tahap 2	1.927.508.866															1.927.508.866
10		Ducting System Kawasan Blok M Tahap 1	4.808.025.637															4.808.025.637
11		Ducting System Kawasan Blok M (Tahap 3)	1.088.082.100															1.088.082.100
12		Pra Invent Jl. Mampang Prapatan 13	25.000.000															25.000.000
13		Pra Invent Jl. AKRI - Gamsun	37.500.000															37.500.000
14		Pra Invent Jl. Pinang 1	37.500.000															37.500.000
15		Inv. Jl. Bangka	186.946.066															186.946.066
16		Pra Invent Jl. Pinding - Brigif	50.000.000															50.000.000
17		Pra-Invent Jl. Seno - Jl. Masjid Al Makmur	25.000.000										25.000.000					-
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan																-
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan																-
		SUDIN BINA MARGA - JAKTIM		-	-	-	-	176.998.800	83.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	260.158.800
		Jasa konsultan perencanaan trotoar untuk kota administrasi jakarta timur							83.160.000									83.160.000
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan						176.998.800										176.998.800
4		DINAS SUMBER DAYA AIR	28.166.481.913	52.133.232.281	-	-	8.245.064.237		-	-	-	-	2.727.156.551	-	-	272.209.000		79.611.353.968
		DINAS SUMBER DAYA AIR	26.810.629.230	6.257.195.922	-	-	4.360.198.100		-	-	-	-	982.569.120	-	-	-	-	30.510.795.210
3		Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigt Pramono	25.000.000										25.000.000					-
4		Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigt Pramono	4.125.000															4.125.000
5		Prog. Pengembangan Sistem Drainase, Keg. Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigt Pramono	25.000.000															25.000.000
6		Keg Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigt Pramono	25.000.000															25.000.000
7		Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigt Pramono	25.000.000															25.000.000
8		Keg Invent dan PT Kali Angke Hulu Sigt Pramono	50.000.000															50.000.000
9		Invent Kali Angke	275.000.000															275.000.000
10		Invent Kali Cipinang	75.000.000															75.000.000
11		Invent Kali Banglio	50.000.000															50.000.000
12		Invent. Waduk Pdb. Ranganon III	50.000.000															50.000.000
13		Invent. Wdk. Pondok Ranganon II	50.000.000															50.000.000
14		Invent. Situ Munjul	50.000.000										50.000.000					-
15		Invent. AMP Marunda	9.419.700															9.419.700
16		Invent. Jalur Busway FO Buaran	100.000.000															100.000.000
17		Invent. Bojong Rangkong	41.195.000															41.195.000
18		Invent. Jemb. Kalibata	45.375.000															45.375.000
19		Invent. Jln. Tembus Rajman	85.000.000															85.000.000
20		Invent. Jln. Tembus Larij, Gabungan	150.000.000															150.000.000
21		Invent. Sejajar rel I Gusti Ngurah Rai	41.195.000															41.195.000
22		Invent. JLN1 Toh. Abang - Kp. Melayu	44.600.000															44.600.000
26		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan	50.000.000										50.000.000					-

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				PENAMBAHAN						PENGURANGAN						
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	
27		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sekretaris dan Jalan Inspeksinya	50.000.000									50.000.000				-
28		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Semonggi	75.000.000													75.000.000
29		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Jatikramat	61.600.000										61.600.000			-
30		Invent dan Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangoon III Kali Sunter Lanjutan Kel. Ciangkap	220.423.000										220.423.000			-
31		Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangoon II Kali Sunter Lanjutan	101.087.000										101.087.000			-
32		Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Waduk Cilandak Marinir	146.434.000													146.434.000
33		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Situ Munjul Lanjutan	62.500.000													62.500.000
34		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Ciracas	87.500.000													87.500.000
35		Inventaris dan Pembebasan Tanah Waduk Jl. Raya Pondok Rangoon Kel. Pondok Rangoon Kec. Cipayung	100.000.000										100.000.000			-
36		Inventarisasi Pembebasan Lahan Jalan Tembus Arjuna Selatan - Jl. Salam	87.500.000													87.500.000
37		Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Jalan Arjuna Selatan	62.500.000													62.500.000
38		Inventarisasi Pembebasan tanah Jl. Tali Raya - Kemanggisan Utama - Kemanggisan Raya	87.500.000													87.500.000
39		Inventarisasi Pembebasan Tanah Jl. Taman Sunter Indah - Kemayoran	50.000.000										50.000.000			-
40		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Sub Makro Kali Cipinang di Kampung Dukuh, Jakarta Timur	25.000.000													25.000.000
41		Invent Pembebasan Lahan untuk waduk rawa badung, kel Jatinegara Kec. Cakung	30.000.000										30.000.000			-
42		Invent Kali Angke	130.177.280													130.177.280
43		Invent Pembebasan Tanah Kali Krukut	227.040										227.040			-
44		Invent Pembebasan Tanah Waduk Marunda beserta Sarana dan Prasarannya	50.000.000										50.000.000			-
45		Invent Pembebasan Tanah Waduk Brigif Kelurahan Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan lanjutan	13.741.440										13.741.440			-
46		Inventarisasi dan PembebasanTanah Waduk Jl. Raya Pondok Rangoon	87.480.560										87.480.560			-
47		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir yang telah Dibeaskan/ Diterbitkan termasuk lahan-lahan lainnya yang telah dibebaskan	9.227.107.900													9.227.107.900
48		Refungsi Sarana dan Prasarana Dainase di Prov. DKI Jakarta	266.000.000													266.000.000
49		Penanggulangan Sampah di Inlet Waduk Pluit dan Inlet Rumah Pompa Waduk Pluit	3.491.655.750													3.491.655.750
50		Peningkatan Pompa Bidang Cina	10.151.336.250													10.151.336.250
51		penurapan kali baru rwo6/rw 1. kramat jati - Jakarta timur	287.477.950													287.477.950
52		Kajian Embung Jl. Salihara Kel. Pasar Minggu	30.800.000													30.800.000
53		Kajian Embung Jl. H. Saibun Kel. Jati Padang	30.800.000													30.800.000
54		Kajian Embung Jl. Kelinci Kel. Ciganjur	30.800.000													30.800.000
55		Tanah Kali Kamal Kel. Tegal Alur (Biaya SPS)	10.115.200										10.115.200			-
56		Tanah Sakuran Tegal Amba Kel. Duren Sawit (Biaya SPS)	116.320										116.320			-
57		Tanah Kali Baru Kel. Tengah (Biaya SPS)	256.000										256.000			-
58		Tanah Kali Pesanggrahan Kel. Sukabumi Selatan dan Kel. Kebon Jeruk (Biaya SPS)	1.431.440													1.431.440
59		Tanah Kali Angke Lama Kel. Kedoya Utara (Biaya SPS)	485.120													485.120
60		Tanah Embung Rawa Melati Kel. Tegal Alur (Biaya SPS)	2.528.480													2.528.480
61		Tanah Waduk Brigif Kel. Cipedak (Biaya SPS)	5.558.480										5.558.480			-
62		Tanah Waduk Pondok Rangoon III Kel. Ciangkap (Biaya SPS)	1.179.040										1.179.040			-
63		Tanah Kali Cilawang (Biaya SPS)	68.578.400										68.578.400			-
64		Tanah Kali Sunter Kel. Lubang Buaya (Biaya SPS)	3.970.880										3.970.880			-
65		Tanah Embung Kebagusan Kel. Kebagusan (Biaya SPS)	2.648.000										2.648.000			-
66		Pembebasan BKT	6.489.440													6.489.440
		Waduk Lubang Buaya / Jakarta Timur	46.000.000													46.000.000
		Embung Situ Cipayung/ Jakarta Timur	46.000.000													46.000.000

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN							MUTASI							PENGURANGAN							SALDO PER 31 DESEMBER 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Waduk Tegal Alur / Kalideres Jakarta Barat	46.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN					PENGURANGAN								
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai		Koreksi Lebih Catat Barang
8		Koreksi tambah atas perencanaan X-1 Tahun 2013 pekerjaan Normalisasi Sistem Drainase Kawasan II Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang yang belum dikapitalisasi sebagai penambah aset tetap KDP karena pekerjaan fisik per 31 Desember 2014 belum dilaksanakan namun telah dianggarkan di Tahun 2015	31.610.683														31.610.683
																	-
		SUDIN SUMBER DAYA AIR - JAKBAR	4.350.000	45.876.036.359	-	-	3.884.866.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.765.252.496
1		Saluran Drainase (Perencanaan X-1 Kawasan Kali Anyar)	2.175.000														2.175.000
2		Saluran Drainase (Perencanaan X-1 Kot. Kalideres)	2.175.000														2.175.000
3		Konstruksi Dalam Pengerjaan		45.876.036.359			3.884.866.137										49.760.902.496
		SUDIN SUMBER DAYA AIR - JAKTIM	623.177.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.177.500
1		Inventarisasi Sal. Prib. Cipayung	70.000.000														70.000.000
2		Pembebasan Tanah Waduk Surling Jakarta Timur	90.000.000														90.000.000
3		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Surling	70.000.000														70.000.000
4		Inventarisasi lanjutan pembebasan tanah sal. Prib. Cipayung	100.000.000														100.000.000
		Perencanaan Normalisasi Sal. Prib WIP	49.005.000														49.005.000
		Perencanaan Normalisasi Sal. Prib Sanyar	49.005.000														49.005.000
		Perencanaan Normalisasi Sal. Prib Laut Banda	49.005.000														49.005.000
		Perencanaan Normalisasi Sal. Prib Pulomas Barat	49.005.000														49.005.000
		Perencanaan Normalisasi Sal. Prib Cakung Cilingning, sesuai SPK No. 486/1.794.4 Tgl. 23-01-2017	47.877.500														47.877.500
		Perencanaan IPAL Rw.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	49.280.000														49.280.000
																	-
		SUDIN SUMBER DAYA AIR - KEP.SERIBU	272.209.000	-	-	-	-	-	-	-	-		1.744.587.431	-	-	272.209.000	(1.744.587.431)
1		Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Pulau Kelapa RW 04	114.816.000													114.816.000	-
2		Perencanaan X-1 Pemeliharaan dan Peningkatan Bidang Jalan, Jembatan dan Pengendali Banjir Tahun 2015	157.393.000										1.744.587.431			157.393.000	(1.744.587.431)
8		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANIAN	225.482.271.822	40.705.540.836	2.982.985.000	-	229.241.268	1.490.574.678	-	-	-	188.712.171.779	-	15.162.441.407	-	-	251.241.476.182
		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANIAN	225.482.271.822	40.705.540.836	2.982.985.000	-	229.241.268	1.490.574.678	-	-	-	188.712.171.779	-	15.162.441.407	-	-	251.241.476.182
1		Gedung BPMPKB (Lanjutan Pembangunan) (Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor)	15.125.000.000											15.125.000.000			-
2		Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara (Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor)	8.823.771.000														8.823.771.000
		Jasa Konsultasi Perencanaan (Planning) Gedung BPMPKB (Lanjutan Pembangunan)	48.235.000														48.235.000
		Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision) Gedung BPMPKB (Lanjutan Pembangunan)	269.610.000														269.610.000
		Jasa Konsultasi Perencanaan (Planning) Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara	49.511.000														49.511.000
		Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision) Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara	107.468.625														107.468.625
		Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara (Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor)	510.798.299														510.798.299
		penambahan konstruksi pembangunan koreksi penambahan lain-lain	905.185.000														905.185.000
			28.959.212											27.441.407,00			1.517.805
		pembangunan kantor dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	199.583.733.686									188.712.171.779					199.583.733.686
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		469.620.701													469.620.701
		Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Badikat			2.982.985.000												
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		40.235.920.135													40.235.920.135
		GO LONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan						6.863.663									6.863.663
		Kapitalisasi ke KDP - Gedung BPMPKB (Lanjutan Pembangunan)						382.632.250									

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN					MUTASI					PENGURANGAN					SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang			
		Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Satpol PP						234.000.360											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rumah Dinas Ketua DPRD						96.294.000											
		Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta						267.828.000											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Sekda						95.634.000											
		Jasa konsultansi Perencanaan Bangunan Sudin Kependudukan Jakarta Barat						306.754.800											
		Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Menya Utara						96.019.000											
		Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan ke KDP dari Tambahan Progress Fiskal BPMPKIB km bim selesai						4.548.605											
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan						229.241.268										229.241.268	
6		DINAS PERHUBUNGAN GABUNGAN	2.154.684.246	-	-	-	-	628.017.720	-	332.264.375	-	-	-	-	-	-	-	2.450.437.591	
		DINAS PERHUBUNGAN	332.264.375	-	-	-	-	628.017.720	-	332.264.375	-	-	-	-	-	-	-	628.017.720	
1		Jembatan Penyebrangan Orang	67.392.875							67.392.875								-	
2		Jembatan Penyebrangan Orang	32.992.000							32.992.000								-	
4		Jembatan Penyebrangan Orang (PO (sonor))	136.094.250							136.094.250								-	
		Jasa Desain Peningkatan Dermaga Pelabuhan Muara Angke	95.785.250							95.785.250								-	
		Pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Angke						105.699.000										105.699.000	
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan						522.318.720										522.318.720	
		UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GE	77.832.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.832.440	
1		Kapitalisasi non belanja modal untuk kas yang dikonsumsi			0													-	
		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KEP SERIBU	1.744.587.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.744.587.431	
1		konstruksi pembuatan pantai	1.744.587.431															1.744.587.431	
7		DINAS KESEHATAN (GABUNGAN)	323.175.162.391	41.469.190.745	-	-	164.750.582.636	562.280.596	-	-	-	-	362.826.580.288	-	-	-	-	1.817.772.848	
		DINAS KESEHATAN	320.795.108.947	41.469.190.745	-	-	-	562.280.596	-	-	-	-	362.826.580.288	-	-	-	-	(562.280.596)	
4		REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU	12.301.079.630										12.301.079.630					-	
5		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELLURAHAN KEBON SIRIH	4.657.178.079										4.657.178.079					-	
6		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELLURAHAN KEBON MELATI	4.620.874.227										4.620.874.227					-	
7		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELLURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR	5.802.358.346										5.802.358.346					-	
8		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN PASAR BARU	3.591.867.390										3.591.867.390					-	
9		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELLURAHAN PADJANGRANG TIMUR	4.603.610.001										4.603.610.001					-	
10		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN SEMPER BARAT III	3.449.661.772										3.449.661.772					-	
11		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELLURAHAN KALIBARI	4.615.058.265										4.615.058.265					-	
12		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN SEMPER BARAT II	3.681.887.189										3.681.887.189					-	
13		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN KEMANGGASAN	4.611.262.585										4.611.262.585					-	
14		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN TEGAL ALUR I	4.623.690.378										4.623.690.378					-	
15		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN KELAPA DUA	4.591.671.972										4.591.671.972					-	
16		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN TOMANG	1.037.016.767										1.037.016.767					-	
17		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN KALIDERES II	5.714.091.561										5.714.091.561					-	
18		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN MERUYA UTARA	4.132.027.253										4.132.027.253					-	
19		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN TEGAL ALUR III	4.623.690.378										4.623.690.378					-	
20		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN RAWA BUKIT	5.644.912.215										5.644.912.215					-	
21		REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN	10.228.540.772										10.228.540.772					-	
22		PEMBANGUNAN PUSKESMAS KECAMATAN JAGAKARSA	10.592.060.964										10.592.060.964					-	
23		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN MANGGARAI	4.618.853.946										4.618.853.946					-	
24		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN MANGGARAI SELATAN	4.662.504.276										4.662.504.276					-	
25		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN MENTENG ATAS	4.617.481.474										4.617.481.474					-	
26		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN LIRAK BULUS	4.701.785.879										4.701.785.879					-	
27		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN PULO	4.067.349.081										4.067.349.081					-	
28		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELLURAHAN PINANG RANTI	4.654.033.896										4.654.033.896					-	

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN						PENGURANGAN							
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai		Koreksi Lebih Catat Barang
29		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA WETAN	4.595.773.759										4.595.773.759				-
30		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN EGER	5.831.647.847										5.831.647.847				-
31		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LUBANG BUAYA	4.598.345.024										4.598.345.024				-
32		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN BIDARA CINA II	4.637.832.350										4.637.832.350				-
33		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CULUTAN	5.640.443.106										5.640.443.106				-
34		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR	4.614.446.058										4.614.446.058				-
35		REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KLENDER III	4.628.865.646										4.628.865.646				-
36		REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JATINEGARA	11.113.859.650										11.113.859.650				-
37		REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN DUREN SAWIT	11.234.152.022										11.234.152.022				-
38		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KECAMATAN CIPAYUNG	31.397.374.455										31.397.374.455				-
39		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KECAMATAN KEBAYORAN LAMA	32.192.304.041										32.192.304.041				-
40		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KECAMATAN KRAMAT JATI	32.020.477.064										32.020.477.064				-
41		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KECAMATAN CLUNCING	2.983.936.331										2.983.936.331				-
42		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KECAMATAN KOJA	34.861.103.298	41.469.190.745,00				562.280.596,00					76.892.574.639				(562.280.596)
		SUDIN KESEHATAN - JAKPUS	895.971.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895.971.376
1		X-1 Bungur	211.049.000														211.049.000
2		X-1 Gampil	439.531.500														439.531.500
3		X-1 Senen	245.390.876														245.390.876
																	-
		SUDIN KESEHATAN - JAKBAR	114.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.027.500
1		Perencanaan Pembangunan Gudang Obat di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Penunjang Rawat Inap	70.127.500														70.127.500
2		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kemanggisan	43.900.000														43.900.000
																	-
		SUDIN KESEHATAN - JAKSEL	668.819.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668.819.280
1		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai	195.712.000														195.712.000
2		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II	167.876.200														167.876.200
3		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan	192.825.000														192.825.000
4		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ciganjur	112.406.080														112.406.080
																	-
		SUDIN KESEHATAN - JAKTIM	573.438.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.438.288
1		Puskesmas Kel. Cililitan	126.864.000														126.864.000
2		PerencanaanRehab Total Eks Kantor Lurah Cipayang Menjadi Gedung Puskesmas Kelurahan Cipayung	114.680.775														114.680.775
3		Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung dengan Bawah Inap (ditambah lahan eks kantor Lurah Cijantung)	123.659.800														123.659.800
4		Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester	128.068.713														128.068.713
5		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Ciracas (Perencanaan)Konsultansi	26.653.000														26.653.000
6		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Kramat Jati (Perencanaan) Konsultansi	26.752.000														26.752.000
7		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Matraman (Perencanaan) Konsultansi	26.752.000														26.752.000
																	-
		SUDIN KESEHATAN - KEP SERIBU	127.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.865.000
1		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Lancang	36.600.000														36.600.000
2		Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kelurahan PULAU HARAPAN	91.205.000														91.205.000
																	-
		BLUD RS CENGKARENG		-	-	-	-	164.750.582.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan						164.750.582.636									-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan															-
																	-
8		BLUD RS KOJA		-	37.143.937.978	-	-	4.402.533.556	-	-	-	-	-	-	-	-	41.546.471.534

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI										SALDO PER 31 DESEMBER 2018		
				PENAMBAHAN					PENGURANGAN							
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang
1		Pengadaan konstruksi gedung	-	12.463.580.518			1.013.380.664									13.476.961.182
2		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	-	24.680.357.460			3.331.848.257									28.012.205.717
3		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	-				57.304.635									57.304.635
4		Belanja pemeliharaan gedung kantor blok E Lain - lain	-													-
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	-													-
9	BLUD RS PASAR REBO		639.021.873	30.521.971.839	-	-	250.372.868	436.583.400	-	-	-	-	-	-	-	31.160.993.712
1		Green Building	95.076.873													95.076.873
2		Perencanaan Gedung F	543.945.000													543.945.000
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		8.770.681.563												8.770.681.563
3		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		4.209.927.150												4.209.927.150
5		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		8.770.681.563												8.770.681.563
6		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		8.770.681.563												8.770.681.563
7		Gedung Parkir dan Dapur Gizi						436.583.400								-
8		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan					250.372.868									-
		GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan														-
10	BLUD RS DUREN SAWIT			101.426.381.125	-	-		1.667.754.000	-	-	-	-	-	-	-	101.426.381.125
1		Kapitalisasi Jasa Pengawas Th 2018 Rp. 1.348.105.000,- dan Basic Design Th 2017 Rp.319.649.000,-		101.426.381.125	-			1.667.754.000								101.426.381.125
11	BLUD RSU TARAKAN		238.514.573.292		-	-	-	-	-	-	-	238.514.573.292	-	-	-	-
1		Bangunan Rumah Sakit	-													-
		Gedung Rumah Sakit	3.363.535.692									3.363.535.692				-
		Gedung Rumah Sakit	235.151.037.600									235.151.037.600				-
1		Gedung Rumah Sakit	-													-
12	DINAS PENDIDIKAN		680.245.946.370	954.235.929.175	-	-	1.362.676.054	9.520.979.646	1	-	-	680.245.946.370	-	7.511.608.008	-	896.456.598.282
1		SDN Petamburan 07	12.123.051.785						1							-
2		SMPN 93 Gunung Sahari	13.520.065.472													-
3		SD Negeri Pademangan Barat 10	11.952.069.157													-
4		SD Negeri Warakas 01/02	15.275.354.403													-
5		SDN Pademangan Barat 11/14	16.566.133.654													-
6		SDN Sungai Bambu 05/06	15.847.003.587													-
7		SDN Lagoa 07/08	10.116.328.019													-
8		SDN Rawabadak Utara 11 Pagi	9.762.989.775													-
9		SMP Negeri 136	19.678.824.136													-
10		SMP Negeri 84	16.181.269.334													-
11		SMKPA 63	17.083.123.365													-
12		SDN Bintaro 08	16.791.395.085													-
13		SDN Ciganjur 01	13.486.395.089													-
14		SDN Kebayoran Lama Utara 13	9.549.884.651													-
15		SDN Lenteng Agung 07	15.003.805.529													-
16		SDN Menteng Dalam 07	11.119.415.067													-
17		SDN Petukangan Utara 02	11.203.073.392													-
18		SMKPA 29	18.369.862.029													-
19		SDN Kapuk 09/10	14.951.064.379													-
20		SDN Mangga Besar 01/03/05/07	22.337.892.617													-
21		Sekolah Terpadu Tambora (SDN 01/02/03, SMPN 63, SMAAN 19)	15.807.662.221													-
22		SMPN 190	10.853.822.677													-
23		SMPN 204	12.871.823.820													-
24		SMPN 224	14.075.768.529													-
25		SDN Kebon Jeruk 06 Pagi	13.460.347.495													-
26		SDN Meruya Selatan 04	12.143.896.819													-
27		SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi	12.219.819.369													-
28		SMPN 69	15.211.736.982													-
29		SMPN 22/SDN Pinangsis 06	21.689.630.102													-
30		SDN Angkor 01/05/06	19.697.761.436													-
31		SDN Ciracas 09	13.128.728.064													-
32		SDN Kramat Jati 11	11.950.336.915													-
33		SDN Kramat Jati 12	11.144.292.924													-
34		SDN Kramat Jati 18	10.297.493.045													-
35		SDN Lubang Buaya 05	12.507.475.479													-
36		SDN Lubang Buaya 06	16.084.960.969													-
37		SDN Pondok Ranggon 03	15.161.405.331													-
38		SMPN 102	17.912.733.534													-
39		SMPN 192	17.769.048.601													-
40		PKBM 36 Pulau Harapan	8.128.908.246													-
41		SDN P. Panggang 03 Pagi	13.501.035.227													-
42		SDN Pulau Kelapa 01	13.359.630.122													-
43		SMKN 61	18.787.821.132													-
44		SMPN 133	14.558.257.554													-
45		SMPN 260	16.837.514.193													-
46		SMPN 285	14.477.700.298													-
47		SMPN 288	14.787.331.661													-
48		SDN Sunter Agung 09	15.418.499.516													-
49		RTS SAMKN 36 Marunda	2.860.292.982											208.265.911	-	15.418.499.516
50		SDN Tugu Utara 09	22.181.141.972											974.356.284	-	2.652.027.071
51		SDN Rawa Badak Selatan 01	13.338.701.053											167.637.162	-	21.206.786.688
52		SDN Rawa Badak Selatan 03	14.106.833.674											118.180.002	-	13.988.673.672
53		SDN Sempur Timur 01	15.535.090.669											852.064.485	-	14.683.026.184
54		SDN Lagoa 01, 02, dan 05	31.962.127.642											-	-	31.962.127.642
55		SDN Rawa Badak Utara 19	17.135.741.800											93.923.823	-	17.041.817.777
56		SDN Kalibaru 05	26.908.009.665											176.091.181	-	26.731.918.484

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN						MUTASI						PENGURANGAN						SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang						
57		SDN Pulau Untung Jawa 01 Pgi		4.651.661.224													4.651.661.224					
58		SDN Pulau Tidung 04 Pagi		12.643.290.893											231.971.100	-	12.411.319.793					
59		SDN Pulau Pari 02 Pagi		8.019.187.122											-		8.019.187.122					
60		Astrama Putri Pulau Pramuka		9.768.443.951											-		9.768.443.951					
61		SDN Pulau Panggang 02 Pagi		12.728.097.538											320.115.850	-	12.407.981.688					
62		SDN RAWA BUAYA 01/04		17.189.549.813											211.003.575	-	16.978.546.238					
63		SDN TANAH SEREAL 01/02		15.318.467.637											194.326.804	-	15.124.140.833					
64		Astrama SMKN 63		18.222.623.421											-		18.222.623.421					
65		SMPN 31		16.911.429.939											-		16.911.429.939					
66		SDN Grogol Utara 09		17.948.326.714											214.622.320	-	17.733.704.394					
67		SMPN 242		16.525.165.155											-		16.525.165.155					
68		SDN Pondok Labu 01/05		17.711.889.124											-		17.711.889.124					
69		SDN Petukangan Selatan 01, 02		16.819.565.404											-		16.819.565.404					
70		SDN Petukangan Utara 05		16.257.417.262											103.756.094	-	16.153.661.168					
71		SUBN Menteng Dalam 05		23.286.399.368											177.038.231	-	23.109.361.137					
72		SDN Ragunan 07		13.409.602.850											-		13.409.602.850					
73		SDN Pejaten Timur 01		17.394.786.726											-		17.394.786.726					
74		SDN Kalibata 11		15.053.557.439											-		15.053.557.439					
75		SDN Pancoran 07		9.220.894.656											-		9.220.894.656					
76		SDN JATINEGARA KAUUM 07 11		19.235.988.406											279.628.691	-	18.956.359.715					
77		SDN CIPINANG CEMPEDEK 04 07		17.312.246.536											175.057.222	-	17.137.189.314					
78		SDN PONDOK KOPIN 02		16.892.723.618											163.038.037	-	16.729.685.581					
79		SMPN 94 Gambir Jakarta Pusat		13.125.364.973											188.596.987	-	12.936.767.986					
80		SMPN 38 Tanah Abang Jakarta Pusat		16.036.481.333											377.747.220	-	15.658.734.113					
81		SDN Tanah Tinggi 01/02 11		17.727.085.096											308.028.227	-	17.419.056.869					
82		SMPN 59 Kemayoran Jakarta Pusat		14.938.170.550											-		14.938.170.550					
83		SDN Kampung Rawa 01 Pagi/02 Petang		16.382.816.283											198.026.092	-	16.184.790.191					
84		SDN Cipinang 06		11.396.216.108											-		11.396.216.108					
85		SDN Balekambang 02 Pagi		8.577.635.600											-		8.577.635.600					
86		SDN Susukan 09 Pagi		11.808.320.785											-		11.808.320.785					
87		SDN Cawang 07		16.732.642.582											311.013.211	-	16.421.629.371					
88		SDN Baru 03		14.357.079.045											414.118.315	-	13.942.960.730					
89		SDN Cipinang 04		15.654.883.164											272.904.781	-	15.381.978.383					
90		SDN Susukan 04/05 Pagi		18.168.161.620											227.432.977	-	17.940.728.643					
91		SDN Kalian 05		22.176.670.843											372.082.228	-	21.804.578.615					
92		SDN Cempaka Baru 05 Pagi/07 Pagi		17.805.758.684											180.591.198	-	17.625.167.486					
93		GEDUNG DINAS PENDIDIKAN		185.950.490.000													185.950.490.000					
		AC, Gedung DLL		61.630.398.940													-					
		gedung sekolah															-					
		AC Sekolah					1.362.676.054										1.362.676.054					
		MK KSO PT Yodya Karya (Persero), PT Aritha Teknik Persada						3.539.055.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH BENASRAMA DIATAS 10 LANTAI						75.460.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH UNGGULAN SLBN DI DKI JAKARTA						75.636.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH UNGGULAN SMANDI DKI JAKARTA						75.636.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMKN 65 JAKARTA TIMUR						75.680.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH UNGGULAN SMKN 73 JAKARTA TIMUR						75.680.000									-					
		PERENCANAAN DASAR (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH UNGGULAN SMPN DI DKI JAKARTA						75.460.000									-					
		Pembangunan Unit Sekolah Baru Gedung SLBN Jakarta Utara pada Kompleks Rumah Dinas SDN Sunter Agung 0						174.184.738									-					
		Pembangunan Gedung Pratik Basic Safety Training (BST) SMKN 36 (standar International Maritime Organ						41.454.846									-					
		Rehab Total Gedung SDN Tugu Utara 09, 11						159.744.898									-					
		Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 01						99.302.466									-					
		Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 03						99.813.332									-					
		Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 01						109.672.618									-					
		Rehab Total Gedung SDN Lagoa 01, 02, 05						231.868.511									-					
		Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Utara 19						122.765.797									-					
		Rehab Total Gedung SDN Kali Baru 05, 07						191.036.927									-					
		Rehab Total Gedung SDN Pulau Tidung 04 Pagi						95.222.573									-					
		Pembangunan RKB Gedung SDN Pulau Pari 02 Pagi						85.497.581									-					
		Rehab Total Gedung Astrama Putri Siswa SMAA 69 Pulau Pramuka						100.655.628									-					
		Rehab Total Gedung SDN Pulau Panggang 02 Pagi						91.944.019									-					

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN					MUTASI					PENGURANGAN					SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang			
		SUDIN PEMUDA DAN OLAHRAGA - JAKSEL				10.350.000													
		honor perencanaan pembangunan Gelanggang olah raga			10.350.000														
		SUDIN PEMUDA DAN OLAHRAGA - JAKTIM	47.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.850.000		
1		pembangunan gedung	47.850.000														47.850.000		
15		DINAS PENANGGULANAN KEBAKARAN DAN PEN	297.433.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.433.013		
		DINAS PENANGGULANAN KEBAKARAN DAN PEN	297.433.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.433.013		
1		Kantor Sektor Tanjung Priok	187.854.013														187.854.013		
2		Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok	12.084.000														12.084.000		
3		Pembangunan Rumah Dinas	48.895.000														48.895.000		
4		Pembangunan Masjid Rusun Pengadungan (Perencanaan)	48.600.000														48.600.000		
5		Kantor Kepala Suku Dinas Pemadam Jakarta Barat	-														-		
		SUDIN PENANGGULANAN KEBAKARAN DAN PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Biaya Perencanaan Pemagran Kantor Sudin dan Arama Matraman	-														-		
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN ME	262.922.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.922.000		
		Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Us	262.922.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.922.000		
1		Perencanaan Penyediaan untuk Pengembangan	262.922.000														262.922.000		
17		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PI	515.450.875	-	-	-	216.402.036	378.085.625	-	-	-	125.191.000	-	-	-	-	515.450.875		
		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PI	362.938.625	-	-	-	-	378.085.625	-	-	-	125.191.000	-	-	-	-	362.938.625		
1		TC Pertanian Klender Jakarta Timur	169.275.375														169.275.375		
2		Kamal Muara Jakarta Utara	46.939.750														46.939.750		
4		Pulau Pari Kepulauan Seribu	72.659.125														72.659.125		
5		Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu	74.064.375														74.064.375		
6		Belanja jasa konsultasi dan perencanaan pematangan tanah uji						82.071.000				82.071.000					-		
7		Belanja jasa konsultasi dan perencanaan						43.120.000				43.120.000					-		
8		Perencanaan Revitalisasi Kawasan PIPT															-		
9		Perencanaan Dermaga kali adem Muara Angke Jakarta utara SPK No. 7833/1.792.3															-		
10		Perencanaan break water Kali Adem Muara angke SPK NO. 7858/792.3 TGL 23-10-2018															-		
11		Belanja jasa konsultasi dan perencanaan pematangan tanah uji															-		
12		Belanja jasa konsultasi dan perencanaan															-		
		Belanja jasa konsultasi dan perencanaan						252.894.625									-		
		Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Per	95.601.000	-	-	-	9.277.000		-	-	-	-	-	-	-	-	95.601.000		
1		Rehab gedung serbaguna (perencanaan)															-		
2		Pembangunan rumah jaga (perencanaan)	95.601.000														95.601.000		
		Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan					9.277.000										-		
		UPT PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTE	-	-	-	-	207.125.036		-	-	-	-	-	-	-	-	207.125.036		
1		Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan					207.125.036										207.125.036		
2																	-		
		Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang															-		
2		Dokumen Tender Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang															-		
3		Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang															-		
4		Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng															-		
5		Dokumen Tender Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng															-		
6		Honor Lelang Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng															-		
7		Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perikanan															-		
8		Dokumen Tender Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perikanan															-		

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	PENAMBAHAN						MUTASI						PENGURANGAN						SALDO PER 31 DESEMBER 2018
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang						
9		Honor Lelang Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perikanan																-				
10		Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perikanan																-				
11		Dokumen Tender Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perikanan																-				
12		Honor Lelang Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perikanan																-				
13		Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura																-				
14		Dokumen Tender Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura																-				
15		Honor Lelang Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura																-				
		Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.911.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.911.250				
1		Pengadaan Lahan RTH Untuk Hutan Kota Kel. Setu Jakarta Timur	52.311.250															52.311.250				
2		Pengadaan Lahan RTH Untuk Hutan Kota Jl. Tipe Pakayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	4.600.000															4.600.000				
		18/BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (GABUN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)	15.567.880.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.677.466.533	-	-	-	-	3.944.892.158				
1		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Ciracas	104.810.000															104.810.000				
2		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Penjaringan	125.910.000															125.910.000				
3		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Pasar Minggu	3.215.435.607										3.215.435.607					-				
4		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Pancoran	2.925.447.879										2.925.447.879					-				
5		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Cilandak	65.000.000															65.000.000				
6		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Kembangan	65.000.000															65.000.000				
7		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Palmerah	65.000.000															65.000.000				
8		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Kalideres	65.000.000															65.000.000				
9		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Duren Sawit	704.347.825															704.347.825				
10		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Cilingin	3.923.185.260										3.923.185.260					-				
11		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPDP Kebayoran Lama	25.000.000															25.000.000				
12		Bangunan Gedung Permanen	-															-				
13		Gedung dan Bangunan Ps. Minggu	741.911.564										741.911.564					-				
14		Gedung dan Bangunan Pancoran	741.911.564										741.911.564					-				
15		Gedung dan Bangunan Duren Sawit	662.782.000															662.782.000				
16		Gedung dan Bangunan Duren Sawit	795.338.400															795.338.400				
17		Gedung dan Bangunan Duren Sawit	530.225.600															530.225.600				
18		Gedung dan Bangunan Cilingin	129.568.659										129.568.659					-				
		Gedung KDP Duren Sawit	662.782.000															662.782.000				
		Gedung KDP Duren Sawit	18.424.083															18.424.083				
		Gedung KDP Duren Sawit					55.272.250											55.272.250				
		19/DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN(GABUNG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	31.923.641.653	14.123.390.500	-	-	-	7.647.186.200	-	-	-	-	5.885.485.148	-	-	-	-	26.038.156.505				
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	14.123.390.500	-	-	-	7.647.186.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.038.156.505				
1		Rehabilitasi Gedung Sangkuni Jaya Lanjutan			-													-				
2		Pekerjaan Rumah Detman			-													-				
3		konstruksi Dalam Pengerjaan					1.131.405.000											-				
		konstruksi Dalam Pengerjaan		14.123.390.500														-				
		Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	5.885.485.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.885.485.148	-	-	-	-	-				
1		Rehabilitasi Gedung Sangkuni Jaya Lanjutan	5.885.485.148										5.885.485.148					-				
2		Pekerjaan Rumah Detman																-				
3		Lain - Lain																-				
		Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya B	25.687.426.630	-	-	-	6.515.781.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.687.426.630				
1		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan permanen	25.687.426.630															25.687.426.630				
		Konstruksi Dalam Pengerjaan					6.515.781.200											-				
		Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakut	248.499.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.499.875				
1		Perencanaan Pembangunan Gedung Kesenian	37.295.500															37.295.500				
2		Perencanaan Pembuatan gapura di Kawasan Tugie	23.375.000															23.375.000				
3		Perencanaan pembangunan 4 gapura di jakut	59.440.125															59.440.125				
4		Perencanaan dan pengawasan penyempurnaan pembangunan komplek rumah si pitung	128.389.250															128.389.250				
		Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	162.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.230.000				
1		Pembangunan Plaza di Pulau Tidung	51.170.000															51.170.000				

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI												SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				PENAMBAHAN						PENGURANGAN							
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2018 ke KDP	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Koreksi Kurang Catat Nilai	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2018) menjadi Persediaan	Koreksi Lebih Catat Nilai	Koreksi Lebih Catat Barang	
2		Pembangunan Plaza di Pulau Pramuka	51.060.000													51.060.000	
20		DINAS LINGKUNGAN HIDUP (GABUNGAN)	-	832.560.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.560.845	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	832.560.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.560.845	
1		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjang		75.165.636												75.165.636	
2		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjang		186.202.419												186.202.419	
3		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjang		181.940.216												181.940.216	
		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dn Sarana Penunjangnya		75.307.728												75.307.728	
5		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dn Sarana Penunjangnya		88.965.492												88.965.492	
6		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dn Sarana Penunjangnya		57.753.877												57.753.877	
7		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dn Sarana Penunjangnya		90.276.901												90.276.901	
8		Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dn Sarana Penunjangnya		76.948.576												76.948.576	
21		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI (GABUNGAN)	-	-	-	-	-	1.542.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	-	-	-	-	-	1.542.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan pembangunan jaringan listrik kabel laut tahap III di Kepulauan Seribu						1.542.200.000								-	
																-	
																-	
																-	
22		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (GABUNGAN)	20.616.752.316	-	-	-	-	21.642.841.120	-	-	-	-	-	-	-	42.259.593.436	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.628.009.816	-	-	-	-	21.642.841.120	-	-	-	-	-	-	-	42.170.850.936	
1		Pembangunan Gedung Blok A Pulomas														-	
2		Pembangunan Gedung Blok B Cikini	14.533.698.000													14.533.698.000	
3		Pembangunan Konstruksi/Pembelian Gedung KPAK Jakarta Selatan	2.852.152.550													2.852.152.550	
4		Pembelian Gedung dan Bangunan (Sudin Timur)	2.897.313.788													2.897.313.788	
5		Perencanaan (Sudin Timur)	203.000.000													203.000.000	
6		Supervisi (Sudin Timur)	41.845.478													41.845.478	
7		GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN					21.642.841.120									21.642.841.120	
		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	88.742.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.742.500	
1		Perencanaan Pembangunan (K-3) Gedung Kantor	88.742.500													88.742.500	
																-	
23		PEJABAT PENGELOLA ASET DAERAH	-	-	2.982.985.000	-	-	-	-	2.982.985.000	-	-	-	-	-	-	
		PEJABAT PENGELOLA ASET DAERAH	-	-	2.982.985.000	-	-	-	-	2.982.985.000	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Badiilat			2.982.985.000					2.982.985.000						-	
																-	
																-	
24		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)	-	-	-	-	-	2.619.126.014	-	-	-	-	-	-	-	2.619.126.014	
		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	-	-	-	-	2.619.126.014	-	-	-	-	-	-	-	2.619.126.014	
1		GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN						2.619.126.014								2.619.126.014	
																-	
																-	
25		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. 5	84.535.189.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.535.189.400	
		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. 5	84.535.189.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.535.189.400	
1		Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton	84.535.189.400													84.535.189.400	
		JUMLAH	6.456.879.960.906,00	1.406.194.672.595,00	5.965.970.000,00	13.100.000,00	509.881.653.106,00	26.331.098.160,00	1,00	332.264.375,00	5.965.970.000,00	189.522.992.134,00	5.327.788.416.081,00	15.152.441.407,00	13.047.358.099,00	272.209.000,00	1.853.164.803.674,00

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT, BTO, DAN KSO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO	Keterangan
1	2	3	4	6	5	7	8	9	9
I	BPMP								
1	PT. Bakrie Investindo	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Tanah	2.155.516.125.000,00	41.990.830.572,00	-	2.197.506.955.572,00	-	-
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM 1 dan PIM 2	Jembatan	-	32.924.000.000,00	-	-	-	-
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	Tanah Terminal	537.964.575.000,00	47.701.292.300,00	585.665.867.300,00	-	-	Bangunan belum diserahkan
4	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	-	-	-	-	-	-
5	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP	Jembatan	-	10.553.000.000	-	10.553.000.000,00	-	bangunan sudah di serahkan dr pihak ketiga
6	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	-	20.127.253.186,90	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
7	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	-	50.409.075.784,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
8	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-	-	-	-	-
9	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	-	20.092.540.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
10	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	-	14.624.400.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
11	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	577.563.000.000,00	17.321.632.000,00	-	594.884.632.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
12	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	-	9.768.000.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
13	PT. Bumi Grafika Jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	48.508.000.000,00	-	-	48.508.000.000,00	-	-
14	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya, Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	24.406.500.000,00	-	-	24.406.500.000,00	-	-
15	PT. AGB Tuna (pabrik es)	Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	22.806.000.000,00	-	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
16	PT. AGB Tuna (cold storage)	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	5.087.082.000,00	-	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
17	PT. Gading Raya Proptertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Regional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	71.438.310.000,00	123.467.608.000,00	-	71.438.310.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
18	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	-	28.782.859.949,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
19	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mal Ambassador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	-	46.794.087.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
20	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	49.334.175.000,00	70.000.000.000,00	-	49.334.175.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
21	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna	-	222.000.000.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
JUMLAH I				3.492.623.767.000,00	756.556.578.791,90	585.665.867.300,00	2.996.631.572.572,00	-	-
II	Dinas Perhubungan (KSO)								
1	PT. Suar Andika WU	Tempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	PT. Nakia Dwipradita	Tempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat Luas 23.350 m2	Tanah	-	-	-	-	-	
3	PT. Cakra Sarana Persada	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP	Tanah	246.966.276.000,00	-			246.966.276.000,00	
BP LIP									-
JUMLAH II				246.966.276.000,00	-	-	-	246.966.276.000,00	

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO	Keterangan
1	2	3	4	6	5	7	8	9	9
III BPKD (Eks Biro Perlengkapan)									
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah	6.223.392.000,00	6.254.605.100,00	12.477.997.100,00	-	-	-
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah	9.896.145.000,00	4.403.361.276,00	14.299.506.276,00	-	-	-
3	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU	7.128.225.000,00	4.883.444.400,00	12.011.669.400,00	-	-	-
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU	11.564.560.000,00	4.313.800.000,00	15.878.360.000,00	-	-	-
5	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya Iir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.880.000.000,00	4.090.967.000,00	9.970.967.000,00	-	-	-
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	10.387.500.000,00	6.600.000.000,00	16.987.500.000,00	-	-	-
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m.Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah	16.813.500.000,00	10.482.000.000,00	27.295.500.000,00	-	-	-
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.309.436.000,00	4.170.342.000,00	9.479.778.000,00	-	-	-
9	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah	21.522.900.000,00	12.609.562.352,00	34.132.462.352,00	-	-	-
10	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah	195.432.825.000,00	170.647.000.000,00	366.079.825.000,00	-	-	-
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cililitan	Tanah	17.550.000.000,00	1.226.000.000,00	-	18.776.000.000,00	-	-
12	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah	12.400.000.000,00	12.000.000.000,00	24.400.000.000,00	-	-	-
13	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja	19.329.075.000,00	1.465.000.000,00	20.794.075.000,00	-	-	-
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gading Timur Jakarta Utara.	Masjid	13.326.720.000,00	11.105.600.000,00	24.432.320.000,00	-	-	-
15	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja	6.039.936.000,00	3.080.986.780,00	9.120.922.780,00	-	-	-
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa*	Sarana Pendidikan di Jl. Swadaya Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.	Sekolah	3.675.936.000,00	-	3.675.936.000,00	-	-	-
17	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid	1.699.200.000,00	2.797.818.600,00	4.497.018.600,00	-	-	-
18	PT. Jaya Real Property	Jembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat	Tanah Jalan	-	19.011.075.000,00	-	-	-	-
JUMLAH III				364.179.350.000,00	279.141.562.508,00	605.533.837.508,00	18.776.000.000,00	-	
JUMLAH I + II + III				4.103.769.393.000,00	1.035.698.141.299,90	1.191.199.704.808,00	3.015.407.572.572,00	246.966.276.000,00	
TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO								4.453.573.553.380,00	

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DISEWAKAN DAN ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
SEWA UMUM								
1	Jalan Teuku Umar Nomor 1 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat	PT Lingkar Seni Indonesia (9 Maret 2023)	42.643.125.000	2.772.000.000,0			45.415.125.000,0	
2	Jalan Cikini Raya Nomor 73, Kel. Cikini, Kec. Menteng	PT Nusantara Sejahtera Raya (18 Agustus 2019)	13.643.775.000	2.088.000.000			15.731.775.000,0	
4	Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, C6, dan Perumahan Sunter Garden Blok B7 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok	Yayasan Harapan Bangsa (4 Juni 2017)	23.962.500.000	1.250.340.000			25.212.840.000,0	
5	Jalan Gading - Sunter Kelapa Gading Permai, Jalan Kelapa Gading Permai, Jalan Pelepah Kuning III Kelapa Gading Permai, Jalan Sunter Kuning III, Sunter Utara	Yayasan Pendidikan Eika (23 Maret 2018)	70.795.025.000	760.000.000			71.555.025.000,0	
6	Jalan Parang Tritis 6 Kelurahan Ancol Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	Yayasan Gandhi Memorial Internasional School (12 Januari 2019)	10.023.750.000				10.023.750.000,0	
7	Perumahan Taman Pegangsaan Indah dan Perumahan Gading Griya Lestari, Kec. Kelapa Gading	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara (18 Oktober 2018)	79.161.015.000	8.205.000.000			87.366.015.000,0	
8	Jalan Karya Selatan RT: 01/13 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok	Yayasan Al - Amanah Sunter Agung (8 Januari 2019)	452.748.274	28.149.979			480.898.253,0	
9	Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Jalan Lodan Timur Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	PT Pembangunan Jaya Ancol	24.780.000.000	4.309.094.400			29.089.094.400,0	
10	Jalan Prang Tritis IX Blok B4/B Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara	Yayasan Ancol Barat (11 April 2017)	585.480.000				585.480.000,0	
12	Jl. Kelapa Nias Blok HT 60 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading	Gereja Tiberias Indonesia (14 Mei 2022)	34.509.195.000	31.071.945.000			65.581.140.000,0	
13	Jalan Kumala Artha Gading Blok D - 11 Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Swadaya Pandu artha (30 Oktober 2019)	19.629.015.000	5.964.000.000			25.593.015.000,0	
14	Jalan Agung Timur 8 Blok O 2 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Al Hikmah Sunter Jaya (30 Oktober 2019)	20.266.875.000				20.266.875.000,0	
15	Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading	Mesjid Al Musyawara (13 Oktober 2019)	175.341.600.000				175.341.600.000,0	
16	Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara	Yayasan AL-Huda Kelapa Gading (25 Mei 2022)	11.241.608.000				11.241.608.000,0	
17	Perumahan Taman Kedoya Baru Jalan Angsana Raya Blok D8 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Majelis Jemaat GKI Kedoya (15 November 2022)	5.673.360.000	990.000.000			6.663.360.000,0	
18	Perumahan Permata Buana Blok B1 Nomor 1 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan	Yayasan Pusat Pelatihan E dan P (Jalan Pulau Selayar) (17 September 2018)	14.750.250.000				14.750.250.000,0	
19	Jalan Puri Indah - Pasar Puri Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	PT Antilope Madju Puri Indah (29 November 2018)	20.775.000.000	1.830.000.000			22.605.000.000,0	
20	Perumahan Citra 5 Blok E 7 Nomor 1 -2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Pelita Bangsa (22 Desember 2020)	1.412.814.000	6.567.415.000			7.980.229.000,0	
21	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	512.193.228				512.193.228,0	
22	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	873.500.000				873.500.000,0	
23	Perumahan Citra 2 Blok G 6 Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diannanda (20 November 2017)	441.500.000	218.450.000			659.950.000,0	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
24	Blok N3 Perumahan Citra 2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diannanda (27 September 2018)	1.519.000.000	1.463.805.158			2.982.805.158,0	
25	Perumahan Daan Mogot Baru Blok NA-1, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (30 Juni 2020)	52.156.615.000	23.870.840.000			76.027.455.000,0	
26	Jalan Belimbing Raya Blok B.5, Kompleks Perumahan Bojong Indah, Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng	Yayasan Muslim Bojong Indah (20 April 2022)	163.800.000	1.471.250.000			1.635.050.000,0	
27	Perumahan Taman Surya Blok -MM Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo Gondokusumo (31 Maret 2021)	7.814.016.000	6.139.188.493			13.953.204.493,0	
28	kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Raya Blok C1-2 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Adm Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih (25 Oktober 2022)	858.132.000				858.132.000,0	
29	Jalan Blustru glodok RT 001 RW 006, Kel.Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota adm Jakarta Barat.	PT. Gerakmaju Abadi (27 Oktober 2022)	18.243.975.000	1.900.000.000			20.143.975.000,0	
32	Jalan Lampiri Raya Nomor 28 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Perguruan Rakyat (1 Februari 2019)	4.155.864.000	3.402.000.000			7.557.864.000,0	
33	RT 10 RW 02 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang Jakarta Timur	KSU Ceger Raya (24 April 2018)	664.734.000	184.464.000			849.198.000,0	
34	Komplek Pulo Gebang Permai Blok B Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur	Yayasan Pendidikan dharma Siswa (26 April 2018)	1.955.283.000	1.861.789.000			3.817.072.000,0	
35	Jalan Harsono RM Nomor 28 Belakang Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Yayasan Sapta Nawami Bhakti (15 Oktober 2017)	23.164.125.000	2.469.840.000			25.633.965.000,0	
36	Kavling DKI Phase I Blok I Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Baitul Muhajirin (31 Desember 2018)	916.000.000				916.000.000,0	
37	Jl. Pulau Tidung Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Pusat Pelatihan E dan P (23 Agustus 2018)	1.801.762.000				1.801.762.000,0	
39	Perumahan Vila Gading Indah Blok D Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	Yayasan Mahatma Gading (27 Oktober 2018)	3.311.250.000	6.352.289.364			9.663.539.364,0	
41	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A10, Kel. Joglo, Kec. Kembangan	PT. Alfa Indah Sportindo (14 Maret 2017)	2.285.200.000	1.025.000.000			3.310.200.000,0	
42	Perumahan Citra 2 Extention Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Citra Kasih (	10.912.314.000	5.037.200.000			15.949.514.000,0	
44	Perumahan Taman Alfa Indah di Blok G1 Kel. Joglo, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah (23 Juli 2018)	12.562.572.000				12.562.572.000,0	
45	Kompleks Perumahan Taman Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat	PT Bumi Bintang Bersatu (2 Juli 2019)	44.078.850.000	6.349.550.000			50.428.400.000,0	
46	Jalan KH. Mas Mansur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan tanah Abang Jakarta Pusat	PT Swadaya Niaga Jaya (Smes'co) (9 April 2020)	52.617.390.000	52.558.200.000			105.175.590.000,0	
47	Blok F5 Perumahan Citra Garden 1 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Tanimbar Lestari (8 Mei 2017)	1.087.020.000	92.630.000			1.179.650.000,0	
48	Kompleks Perumahan Karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah (17 September 2018)	1.887.600.000				1.887.600.000,0	
49	Blok EE4 Perumahan Taman Ratu Indah Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Yayasan Abdi Karya (Yadika) (25 Februari 2020)	2.172.360.000				2.172.360.000,0	
50	Tanah yang terletak di Jalan Pulau Pantara IV, Blok N.2, Perumahan Taman Permata Buana Kota Administrasi Jakarta Barat	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	1.868.660.000				1.868.660.000,0	
51	Blok A 6 Perumahan Citra 3 Ekstension Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Harapan Bangsa (27 Januari 2020)	323.328.000	1.394.873.232			1.718.201.231,7	
52	BLOK A.6, PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	Yayasan Harapan Bangsa	1.042.734.000	212.940.000			1.255.674.000,0	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
53	Halaman dan Basement Gedung Blok A dan Blok D RSUD Tarakan Jalan Kyai Caringin Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat	PT Trust Parking Indonesia (31 Oktober 2019)	67.736.835.000				67.736.835.000,0	
54	Jalan Agung Perkasa Blok J 14 Sunter Agung dan	Yayasan Bait-EI Indonesia (29 Agustus 2016)	28.566.000.000	2.525.600.000			31.091.600.000,0	
55	Jalan Sunter Garden Blok B 3 Nomor 10 B Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Bait-EI Indonesia (29 Agustus 2016)	5.842.200.000	106.890.315			5.949.090.315,5	
56	Perumahan Taman Ratu Blok F-7 Dan Blok F 13 Nomor 2 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri (25 Oktober 2020)	4.074.336.000				4.074.336.000,0	
57	Perumahan Citra Garden Ext. 1 Blok AE 4 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Haleluya Jakarta (17 November 2020)	1.346.796.000	2.499.130.379			3.845.926.378,8	
58	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok D-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat (22 Juli 2019)	8.075.520.000	2.034.480.000			10.110.000.000,0	
59	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok A-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat (21 November 2019)	835.040.000	198.906.861			1.033.946.861,0	
60	Komplek Perumahan Citra 1 Ext. Blok AA-5 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Tanimbar Lestari (25 April 2021)	1.509.000.000				1.509.000.000,0	
61	Kompleks Perumahan Qaryah Thayyibah Blok B Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Yayasan Safa Marwah (29 Mei 2021)	1.225.588.000	1.913.589.000			3.139.177.000,0	
62	Kompleks Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo Gondokusumo (24 Juni 2022)	21.015.383.000	27.916.000.000			48.931.383.000,0	
76	Jalan Kamal Raya Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat	PMI Cab Jakarta Barat	5.181.462.000	2.484.300.000			7.665.762.000,0	
77	Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 2A Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (23 April 2016)	40.000.000	187.000.000			227.000.000,0	
83	Jalan Kalibaru Timur VI Nomor 106A Kota Administrasi Jakarta Pusat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat	1.860.000.000	507.000.000			2.367.000.000,0	
84	Jalan Kesatrian Pasar Pagi Nomor 3 Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara	849.600.000	507.000.000			1.356.600.000,0	
86	Jalan Raya Joglo RT 03 RW 06 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta	1.982.400.000	540.800.000			2.523.200.000,0	
87	Jalan Semanan Pintu Air RT 10 RW 08 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat	1.968.624.000	507.000.000			2.475.624.000,0	
88	Jalan Pasir Nomor 3 Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan	1.945.300.000	507.000.000			2.452.300.000,0	
90	Tanah dan Gedung di Jalan H. Naman Nomor 3 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur	746.697.000	507.000.000			1.253.697.000,0	
93	Jl. industri no 9-11 jakpus	Eks. Unit Komplek Aloca	9.256.610.000				9.256.610.000,0	
94	Jl. kali besar timur no 31 jakarta barat	Eks. PD. Tastra Jaya	22.583.847.000				22.583.847.000,0	
95	Jl. raya bekasi km 17 klender, jakarta timur	Eks. PD. Undagi Jaya Klender	1.832.550.000				1.832.550.000,0	
96	Jl. pulo gadung kavling no 1 C.2	Tanah kavling No.1.C2	6.547.875.000				6.547.875.000,0	
97	Jl rawa sumur timur, kavling blok III AA no 9-10	Tanah kavling blok III AA No.9 dan No.10	7.500.000.000				7.500.000.000,0	
98	Jl. pulo kambing no 5 kapling no II/J 14	Tanah kavling blok II/J.44/Eks.PD.Parwita Jaya	5.293.200.000				5.293.200.000,0	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
99	Pompa Bensin DB-539 Tebet	Pompa Bensin DB-539 Tebet	872.200.000				872.200.000,0	
100	Toyota New Avanza Veloz 1,5 AT				189.960.000		189.960.000,0	
101	Yayasan Safa Marwah				75.025.000		75.025.000,0	
101	Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat			915.000.000			915.000.000,0	
102	Kawasan Rumah Susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1		23.375.289.300			23.375.289.300,0	
104	Gedung kantor dinas pariwisata jl. Kuningan Barat 1 Jakarta Selatan	Koppeg Dinas Pariwisata		532.350.000			532.350.000,0	
106	PT Bank DKI	PT Bank DKI		57.798.000			57.798.000,0	
136	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		56.678.102.450			56.678.102.450	
108	Kotak Amal Kecil/Kayu					200.000	200.000	
109	Kotak Amal Besar/Besi					600.000	600.000	
110	Keranda Jenazah					3.750.000	3.750.000	
111	Karpet Sholat					4.425.000	4.425.000	
112	Kantong Amal Sholat led					200.000	200.000	
113	Kain Panggung					750.000	750.000	
114	Tangki/Tandem Air 1000 L					3.060.000	3.060.000	
115	Tirai Pemisah Jamaah Pria dan Wanita					7.500.000	7.500.000	
116	Rambu Lalu Lintas					300.000	300.000	
117	Tiang Mic Pendek					275.000	275.000	
118	Tutup Keranda Jenazah					650.000	650.000	
119	Sepeda					200.000	200.000	
120	Tempat Pemandian Jenazah					2.000.000	2.000.000	
TOTAL ASET KERJASAMA SEWA (I)			1.027.723.975.502	306.340.489.931	264.985.000	23.910.000	1.334.353.360.433	
PINJAM PAKAI								
1	Kendaraan Pinjam Pakai yg awalnya tercatat di BPKD.				610.350.000		610.350.000,00	
2	Toyota New Avanza Veloz 1,5 AT				189.960.000		189.960.000,00	
3	Mini Bus Isuzu Panther				257.495.020		257.495.020,00	
4	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
5	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
6	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
7	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
8	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
9	Sedan Toyota Altis				260.331.000		260.331.000,00	
10	Toyota Avanza				166.701.108		166.701.108,00	
11	Toyota Avanza				166.701.108		166.701.108,00	
12	Toyota Avanza				166.701.108		166.701.108,00	
13	Isuzu APV				169.689.800		169.689.800,00	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
14	Isuzu APV				131.216.670		131.216.670,00	
15	Isuzu APV				131.216.670		131.216.670,00	
16	Isuzu Panther				210.733.714		210.733.714,00	
17	Isuzu Panther				210.733.714		210.733.714,00	
18	Isuzu Panther				210.733.714		210.733.714,00	
19	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
20	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
21	Toyota Avanza				152.886.250		152.886.250,00	
22	Daihatsu Terios				180.200.000		180.200.000,00	
23	Toyota Altis				376.500.000		376.500.000,00	
24	Mobil Mithsubishi				137.000.000		137.000.000,00	
25	Mobil Ford Barang				147.959.750		147.959.750,00	
26	Toyota Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
27	Toyota Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
28	Toyota Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
29	Toyota Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
30	Toyota Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
31	Yamaha Jupiter Z CW FI				15.000.000		15.000.000,00	
32	Yamaha Jupiter Z CW FI				15.000.000		15.000.000,00	
33	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
34	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
35	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
36	Minibus Ford Escape 2.3 XL S AT				331.320.000		331.320.000,00	
37	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
38	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
39	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
40	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
41	Corolla Altis				376.500.000		376.500.000,00	
42	Nissan X-Trail				455.024.416		455.024.416,00	
43	Double Cabin Ford Ranger				317.521.250		317.521.250,00	
44	Isuzu Panther TBR				274.600.011		274.600.011,00	
45	Isuzu Panther TBR				274.600.011		274.600.011,00	
46	Isuzu Panther TBR				274.600.011		274.600.011,00	
47	Isuzu Panther TBR				274.600.011		274.600.011,00	
48	Toyota Fortuner 2.5 G AT				429.660.000		429.660.000,00	
49	Isuzu Panther				238.176.000		238.176.000,00	
50	Isuzu Panther				274.600.011		274.600.011,00	
51	Ford R SC Base				242.521.250		242.521.250,00	
52	jalan radin inten II no 3, duren sawit, jaktim	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur	6.745.780.000				6.745.780.000,00	
53	JL. KH. H. AGUS SALIM NO 19 JAKARTA PUSAT	Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI)	9.856.875.000				9.856.875.000,00	
54	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Kemenkumham Nomor BAST 3910/-076.25 Tgl. 01-10-2015	17.507.875.000				17.507.875.000,00	
55	Jalan Sungai Landak No. 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Kanwil Dep. Kehakiman dan HAM DKI Jakarta (RUPBASAN)	1.911.000.000				1.911.000.000,00	
56	Jl anggrek rosilina blok E/30 kel. kemanggisan, kec. palmerah, Jakarta Barat	Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan 45 Jak Barat	164.034.000				164.034.000,00	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
57	Badan Narkoba Provinsi DKI Jakarta	Badan Narkoba Provinsi DKI Jakarta	101.484.000.000				101.484.000.000,00	
58	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Regional V BKN	14.929.740.000				14.929.740.000,00	
59	Jl. TB Smitupang no 2, Jakarta Timur	Kodam Jaya	24.800.000.000				24.800.000.000,00	
60	Jl. lapangan tembak no 75, cibubu, ciracas jakarta timur	Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI	22.586.616.000				22.586.616.000,00	
61	rumah susun bidara cina, jatinegara, jakarta timur	PRIMKOVERI MABES LVRI	47.320.000				47.320.000,00	
62	Jalan Kalibaru Timur V Nomor 9 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	885.170.000	236.600.000			1.121.770.000,00	
63	Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	1.595.790.000	330.624.000			1.926.414.000,00	
64	Jalan Panjang C Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.151.772.000	759.682.000			2.911.454.000,00	
65	Eks. Kec. Mampang Prapatan, Jl. Piere Tendean	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	9.931.550.000	3.173.332.755			13.104.882.755,00	
66	Jalan Pulomas Barat VI Kav. 14 - 16 Kota Administrasi Jakarta Timur	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.658.800.000	1.953.640.000			4.612.440.000,00	
67	Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kejaksaan Agung Republik Indonesia - Sesuai dengan BAST Nomor 1223/-076.36	15.212.870.000	42.384.693.832			57.597.563.832,00	
68	Jalan Taman Jatibaru Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bareskrim Polri	20.481.230.000				20.481.230.000,00	
69	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri	1.853.600.000				1.853.600.000,00	
70	Jl. Warung Buncit Raya no 11 jakarta selatan	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta		1.000.600.000			1.000.600.000,00	
71	Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta		442.800.000			442.800.000,00	
72	JL. KH. H. AGUS SALIM NO 19 JAKARTA PUSAT	Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI)		338.000.000			338.000.000,00	
73	Jalan Sungai Landak No. 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Kanwil Dep. Kehakiman dan HAM DKI Jakarta (RUPBASAN)		819.280.000			819.280.000,00	
74	Jl. Danau Agung III No. 5, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta		1.289.250.300			1.289.250.300,00	
75	Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000			107.184.000,00	
76	Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000			107.184.000,00	
77	Jalan Menteng Raya Prapatan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000			107.184.000,00	
78	Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		61.820.000			61.820.000,00	
79	Jalan Kramat Bunder Senen Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
80	Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
81	Jalan Hasyim Ashari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
82	Jalan Salemba Raya Depan RS Carolus Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
83	Jalan Raya Pasar Jumat Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
84	Jalan MT Haryono Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
85	Jalan Sisingamaharaja - Trunojoyo Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
86	Jalan Pangeran Antasari - Panglima Polim / Melawai Blok M Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
87	Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
88	Jalan Jend. S Parman Simpang Tomang Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
89	Jalan Jend. S Parman Simpang Grogol Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
90	Jalan Jend. S Parman Simpang Slipi Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
91	Jalan Pluit Selatan, Simpang Pluit Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
92	Jalan A Yani, Simpang Pramuka Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
93	Jalan Mayjen Sutoyo UKI Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
94	Jalan Kalimalang Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
95	Jalan Pusdika Cibubur Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
96	Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 30 Desember 2018					KETERANGAN
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total	
97	Jalan Siliang Merdeka Barat Daya Monas Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
98	Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
99	Jalan Suprpto / Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
100	Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400			92.983.400,00	
101	Jalan Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
102	Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
103	Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
104	Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
105	Jalan Diponegoro Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
106	Jalan Mayjen Sutoyo Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
107	Jalan Matraman Raya Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
108	Jalan Sisingamaraja Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240			73.252.240,00	
109	Jalan Taman Jalibaru Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bareskrim Polri		31.381.223.000			31.381.223.000,00	
110	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri		319.907.284			319.907.284,00	
111	Jalan Raden Inten II Nomor 3 Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur (13-02-2017)		4.095.086.630			4.095.086.630,00	
112	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri		9.417.025.840			9.417.025.840,00	
113	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri		47.648.752			47.648.752,00	
114	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri		46.719.698			46.719.698,00	
115	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri		6.824.169.230			6.824.169.230,00	
TOTAL ASET KERJASAMA PINJAM PAKAI (II)			254.804.022.000	107.677.996.441	14.824.332.597	-	377.306.351.038	
TOTAL ASET KERJASAMA (I+II)			1.282.527.997.502	414.018.486.372	15.089.317.597	23.910.000	1.711.659.711.471	

**UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)
PER 31 DESEMBER 2018**

No	URAIAN REKENING	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	Utang PPh 21 Dana BLUD	Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	Utang PPh 22 Dana BLUD	Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	Utang PPh 23 Dana BLUD	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	Utang PPN di SPKD dan PPKD	Utang PPN Dana BLUD	Utang BPJS Kesehatan	Utang BPJS Ketenagakerjaan	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=-(3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)
1	PPKD	242.071.200	-	-	-	-	-	67.237.241	-	336.186.209	-	-	5.464.144	650.958.794
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	-	1.474.201	-	5.556.790	-	577.403	-	811.200	-	43.716.544	-	-	52.136.138
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	-	-	-	800	-	-	-	-	-	(800)	-	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	-	-	-	-	-	916.500	-	-	-	-	-	-	916.500
5	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.636.357	-	8.636.357
6	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.368.044	61.916.190	69.284.234
7	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM	-	29.815.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.815.516
8	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	-	-	-	12.089.636	-	-	-	-	-	(12.089.636)	-	-	-
9	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU	-	-	-	51.182	-	101.271	-	-	-	5.592.923	-	-	5.745.376
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	-	-	-	41.325	-	-	-	-	-	-	-	-	41.325
11	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	13.278.100	-	-	-	18.544.393	-	-	-	31.822.493
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500
13	Kelurahan Kamal - JAKBAR	5.979.317	-	638.551	-	6.984.173	-	-	-	8.355.454	-	-	-	21.957.495
	SALDO PERHITUNGAN	248.053.017	31.289.717	638.551	17.739.733	20.262.273	1.595.174	67.237.241	811.200	363.086.056	37.219.031	16.004.401	67.380.334	871.316.728

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2018

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
1	YAY. PENDIDIKAN ELKA	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan berupa 15 Unit Gedung Sekolah Perum Kelapa Gading Permai dan Perum Sunter Hijau, Jak-Utr (Sarana Pendidikan)	179/2014 04/02/2014	25/04/2014	1.650.000.000	5 Tahun 23 Maret 2013 s.d 22 Maret 2018	0	27.500.000	-
2	Yayasan The Gandhi Memorial Internasional School	4.1.4.03.01	Tanah Jalan Parang Tritis VI Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	181/2014 04/02/2014	26/03/2014	2.000.000.000	5 Tahun 13 Januari 2014 s.d 12 Januari 2019	0	33.333.333	-
3	PT. Prima Indo Bahari	4.1.4.03.01	Tanah Areal Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara (Coldstorage)	1547/2014 29/09/2014	31/10/2014	876.218.235	5 tahun 15 Juni 2014 s.d 14 Juni 2019	6	14.603.637	87.621.824
4	PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Gedung BP Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara (Perluasan Kantor DUFAN dan	748/2015 05/05/2015	01/07/2015	1.643.957.703	5 Tahun 05 April 2015 s.d 04 April 2020	3	28.944.883	86.834.648
5	KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN	4.1.4.03.01	Tanah Di Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjarangan Jakarta Utara (SPBU)	5/2016 04/01/2016	25/1/2016	1.324.800.000	5 Tahun 18/2/2016 s.d 17/2/2021	2	22.008.333	44.016.667
6	PT. ASTRA DAIHATSU	4.1.4.03.01	Berupa Ruang Publik (Udara) Jalan Gaya Motor Kel. S. Bambu Kec. Tj. Priok Jakarta Utara (Jembatan Penyebrangan Barang)	122/2016 11/01/2016	18/03/2016	422.781.972	5 Tahun 01 Februari 2016 s.d 01 Januari 2021	12	7.443.850	89.326.200
7	YAYASAN BAITUL MUHAJIRIN	4.1.4.03.01	BERUPA TANAH DI KAVLING DKI PHASE I BLOK I, KEL. PONDOK KELAPA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (MASJID)		06/12/2013	25.000.000	5 TAHUN 01 Januari 2013 S.D 31 Desember 2018	0	416.667	-
8	PT. GAGAS ENERGY INDONESIA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH DI JALAN KYAI TAPA/ SOESILO RAYA, KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GROGOL, JAKARTA BARAT (PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS)		2599/-076.25 10/06/2016	622.624.753	5 TAHUN 14 November 2015 S.D 13 November 2020	10	10.962.448	109.624.478
9	KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA	4.1.4.03.01	BERUPA TANAH DI JALAN MANDALA BAHARI NOMOR 1 KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, Kel. PLUIT Kec. PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		9966/-072.26 14/12/2016	1.348.400.000	5 TAHUN 14 Desember 2016 S.D 13 Desember 2021	25	22.473.333	561.833.333
10	PT. GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH DI KAWASAN MUARA ANGKE, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		10175/-076.33 23/12/2016	1.002.500.000	5 TAHUN 23 Desember 2016 S.D 22 Desember 2016	24	16.708.333	401.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
11	YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO (perpanjangan)	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Perum Taman Surya Blok MM Kel. Pegadungan Kalideres Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)	1624/2017 01/09/2017	2324/-076.33 27/09/2017	635.000.000	5 Tahun 25 Juni 2017 s.d 24 Juni 2022	42	10.583.333	444.500.000
12	SANJAYA INTERNASIONAL	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH PENGOLAHAN IKAN DAN GUDANG PENDINGIN IKAN (COLD STORAGE) KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JALAN DERMAGA MUARA ANGKE/JALAN PENDARATAN IKAN, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		10202/-076.33 27/12/2016	1.002.500.000	5 TAHUN 27 Desember 2016 S.D 26 Desember 2021	36	16.708.333	601.500.000
13	UD. MINA SARI	4.1.4.03.01			10257/-076.33 29/12/2015	205.000.000	5 TAHUN 29 Desember 2016 S.D 28 Desember 2021	36	3.416.667	123.000.000
14	PT. KARYA SYUKUR MAJU BERSAMA	4.1.4.03.01			10257/-076.33	761.900.000	5 TAHUN 30 Desember 2016 S.D 29 Desember 2021	36	12.698.333	457.140.000
15	PT. JAMKRIDA JAKARTA	4.1.4.03.02	JALAN ABDUL MUIS NO. 66 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT		533/-077 10/03/2017	2.073.074.400	3 TAHUN 10 Maret 2017 S.D 09 Maret 2020	14	57.585.400	806.195.600
16	PT. EVI ASIA TENGGARA	4.1.4.03.02	JALAN PROV. DR. Satrio Nomor 7 (D/H Jalan Casablanca) Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan		728/076.33 29-Mar-17	701.250.000	5 TAHUN 29 Maret 2017 S.D 29 Maret 2022	39	11.687.500	455.812.500
17	YAYASAN AL- HUDA	4.1.4.03.01	JALAN MUSIK RAYA BLOK Z-2, RT 003 RW 09, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN		1246/076.33 16-Mei-17	125.000.000	5 TAHUN 16 Juni 2017 S.D 25 Mei 2022	41	2.083.333	85.416.667
18	PT. AETRA AIR JAKARTA	4.1.4.03.01	Jl. Sunter Permai Raya/Jl. Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm Jakarta Utara (Taman BMW/Samping Transito Sampah Sunter)		4006/-1.795.22 01-Agt-17	576.000.000	2 TAHUN 30 Agustus 2017 S.D 30 September 2019	9	24.000.000	216.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
19	PT. JAKARTA TOURISINDO	4.1.4.03.01	JALAN MERDEKA SELATAN NO 8-9, KEL. GAMBIR, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT (GEDUNG BALAIKOTA BLOK B)		3747/-072.26 ; 595/-072.26	183.500.000	2 TAHUN	0	7.645.833	-
					19 September 2017		26 Oktober 2016			
							S.D			
							26 Oktober 2018			
20	PT. DIANSYAH DINAMIKA WARNA	4.1.4.03.02	SEBAGIAN BANGUNAN DI RSUD PASAR		1518/PKS/-076.33/VIII/2017 ; 89/PKS/DDW-DIR/VIII/17	64.974.000	2 TAHUN	7	2.707.250	18.950.750
			MINGGU				04 Agustus 2017			
							S.D			
							04 Agustus 2019			
21	PT. GERAKMAJU ABADI	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN JALAN BLUSTRU GLODOK RT 001 RW. 006 KEL. MANGGA BESAR, KEC. TAMAN SARI, KOTA ADM JAKARTA BARAT			5.500.000.000	5 TAHUN	46	91.666.667	4.216.666.667
							28 Oktober 2017			
							S.D			
							28 Oktober 2022			
22	PT. ADICIPTA BOGA PRIMA INTIPRIMA	4.1.4.03.02	SEBAGIAN BANGUNAN DI RSUD PASAR		16.1/IC/PAL/04/2017	115.200.000	3 TAHUN	16	3.200.000	51.200.000
			MINGGU				17 April 2017			
							S.D			
							17 April 2020			
23	PT. STELLA JAYA ABADI	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH JALAN HARSONO RM NO. 1 KEL. RAGUNAN, KEC. PASAR MINGGU KOTA ADM JAKARTA SELATAN		867/-072.2	175.000.000	5 TAHUN	48	2.916.667	140.000.000
							01 Januari 2017			
							S.D			
							31 Desember 2021			
24	PT. BANK DKI	4.1.4.03.02	BANGUNAN LANTAI 4 S/D LANTAI 8 SERTA BASEMENT LANTAI 1 DAN 2, GEDUNG PRASADA SASANA KARYA, JL. SURYO PRANOTO NO 8, JAKARTA PUSAT		378/-076.31	14.674.030.000	5 TAHUN	38	244.567.167	9.293.552.333
							28 Februari 2017			
							S.D			
							28 Februari 2022			
25	PT. AMAN SAMUDERA INDONESIA	4.1.4.03.01	TANAH DI KAWASAN PELABUHAN MUARA ANGKE, JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		443/-1.711 26-Jan-17	1.002.500.000	5 TAHUN	37	16.708.333	618.208.333
							26 Januari 2017			
							S.D			
							25 Januari 2022			
26	PT. MARCELINDO CITRA LESTARI	4.1.4.03.01	TANAH DI KAWASAN PELABUHAN MUARA ANGKE, JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		450/-1.711 27-Jan-17	673.920.000	5 TAHUN	37	11.232.000	415.584.000
							27 Januari 2017			
							S.D			
							26 Januari 2022			
27	PT. YOMA MINA SEJAHTERA	4.1.4.03.01	TANAH DI KAWASAN PELABUHAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL.PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		205/-1.711 09-Jan-17	1.002.500.000	5 TAHUN	36	16.708.333	601.500.000
							09 Januari 2017			
							S.D			
							08 Januari 2022			
28	PT. FAN MARINA SHIPYARD	4.1.4.03.01	TANAH DI JALAN BAHARI NO 3, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		951/-076.2 20/02/2017	717.700.000	5 TAHUN	38	11.961.667	454.543.333
							20 Februari 2017			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
							S.D 20 Februari 2022			
29	DEWAN PIMPINAN DAERAH PDIP	4.1.4.03.01	TANAH DAN BANGUNAN DI 5 WILAYAH		2708/-076.33 01/11/2017	150.000.000	5 TAHUN 01 November 2017 S.D 31 Oktober 2022	46	2.500.000	115.000.000
30	PT. BANK DKI	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN BLOK D LT 1 S/D 3, JLN MERDEKA NO 8-9 KEL. GAMBIR, KEC. GAMBIR JAKARTA PUSAT		377/-076.3 28/02/2017	1.607.840.000	5 TAHUN 28 Februari 2017 S.D 28 Februari 2022	38	26.797.333	1.018.298.667
31	YAYASAN PERGURUAN RAKYAT	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Sekolah Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)	05-Mei-14 742/2014	19/06/2014	750.000.000	5 Tahun 02 Februari 2014 s.d 01 Februari 2019	1	12.500.000	12.500.000
32	YAY. DHARMA SISWA	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Sekolah Blok B Perumahan Pulo Gebang Permai, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)	02-Jun-14 954/2014	08/12/2014	250.000.000	5 Tahun 27 April 2013 s.d 26 April 2018	0	4.166.667	-
33	PT. BANK MANDIRI	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Kantor BP2TKI Jakarta Timur (Kantor Cabang Mandiri)	26-Agt-14 1360/2014	10/12/2014	1.202.960.000	5 Tahun 07 Juni 2014 s.d 06 Juni 2019	5	20.049.333	100.246.667
34	PT Lingkar Seni Indonesia	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Ex. Kantor Imigrasi Jl. Teuku Umar No. 1, Menteng Jakarta Pusat (Galeri Budaya dan Kunstring)	01/10/2012 1529/2012	29/11/2012	5.000.000.000	5 Tahun 10 Maret 2013 s.d 09 Maret 2018	0	83.333.333	-
	PT Lingkar Seni Indonesia (perpanjangan)	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Ex. Kantor Imigrasi Jl. Teuku Umar No. 1, Menteng Jakarta Pusat (Galeri Budaya dan Kunstring)		2537/-076.33 17/10/2017	6.914.600.001	5 Tahun 10 Maret 2018 s.d 09 Maret 2023	14	96.036.111	1.344.505.556
35	RS ATMAJAYA	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN DI RUSUNAWA			25.000.000	5 TAHUN 29 Agustus 2013 S.D 29 Agustus 2018	0	416.667	-
36	YAYASAN PENDIDIKAN RASA SAYANG MANDIRI	4.1.4.03.01	TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN DI PERUMAHAN TAMAN RATU BLOK F-7 DAN BLOK F-13, KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK JAK-BARAT		4335/-076.76 26/10/2015	310.040.112	5 TAHUN 26 Oktober 2015 S.D 25 Oktober 2020	10	54.588.233	545.882.333
37	YAYASAN AL IKHWAN MERUYA	4.1.4.03.01	TANAH DI TAMAN MERUYA ILIR UTARA		4405/-076.25 29/10/2015	56.370.930	5 TAHUN 29 Oktober 2015 S.D 28 Oktober 2020	10	992.513	9.925.133
38	PT. PETROSS GAS	4.1.4.03.01	TANAH POOL TRANSJAKARTA TANAH POOL BUS TRANS JAKARTA , JL. PERINTIS KEMERDEKAAN JAKARTA TIMUR		26/02/2015	3.718.465.786	5 TAHUN 31 Maret 2015	3	65.470.392	196.411.177

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
			TANAH TERMINAL RAWA BUAYA, JL. LINGKAR LUAR CENGKARENG, JAKARTA BARAT				S.D 31 Maret 2020			
39	Yayasan Al Hikmah Sunter Jaya	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Jl. Agung Timur 8 Blok O2, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok		31/10/2014	25.000.000	5 TAHUN 31 Oktober 2014 s.d 30 Oktober 2019	10	416.667	4.166.667
40	MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA PURI INDAH	4.1.4.03.01	TANAH Jl. Pulau Pantara IV Blok N2 Perum Permata Buana, Kel. Kembangan Utara	1421/2014 11/09/2014	26/02/2014	175.000.000	5 Tahun 11 September 2014 s.d 10 September 2019	8	2.916.667	23.333.333
41	YAYAYASAN PUTERA BAHAGIA	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Desa Palasari Kec. Pacet, Jawa barat	1689/2014 27/10/2014	11/12/2014		5 Tahun 14 Juni 2014 s.d 13 Juni 2019	0	9.646.328	-
42	DPP PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (DPP PAMMI)	4.1.4.03.02	Sebagian Gedung Nyi Ageng Serang		29/04/2014	50.000.000	5 Tahun 29 April 2014 s.d 28 April 2019	4	833.333	3.333.333
43	PUSAT PELATIHAN E & P	4.1.4.03.01	TANAH DI Perumahan Permata Buana Blok 1.1 Kel. Kembangan Jakarta Barat		13/11/2014		5 TAHUN 24 Agustus 2013 S.D 23 Agustus 2018	0	15.193.828	-
44	KOPERASI PEMBINA PROFESI OLAHRAGA PERAIRAN (KPPOP)	4.1.4.03.01	TANAH DI JALAN DANAU SUNTER SELATAN KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK		19/06/2014	430.400.000	5 TAHUN 19 Juni 2014 S.D 18 Juni 2019	6	7.173.333	43.040.000
45	SWADAYA PANDUARTA	4.1.4.03.01	TANAH DI JL. KUMALA ARTHA GADING BLOK D-11, KOTA ADM JAKARTA UTARA		30/10/2014	500.000.000	5 TAHUN 30 Oktober 2014 S.D 30 Oktober 2019	10	8.333.333	83.333.333
46	YAYASAN AL AMANAH SUNTER AGUNG	4.1.4.03.02	BANGUNAN, SARANA PENDIDIKAN JL. KARYA SELATAN 01/013, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TJ. PRIOK JAK-UT		31/10/2014	275.000.000	5 TAHUN 09 Januari 2014 S.D 08 Januari 2019	0	4.583.333	-
47	Happyday Utama Indonesia	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kel. Kebon Pala Kec. Gambir, Jakarta Pusat Restoran	182/2014 04/02/2014	30/04/2014	1.500.000.000	5 Tahun 23 Desember 2013 s.d 22 Desember 2018	0	29.166.667	-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
48	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan	540/2014	19/06/2014	112.741.859	5 Tahun	0	2.104.128	-
			Komp. Perumahan Karyawan DKI Jkt	04/04/2014			18 September 2013			
			Blok M, Kel. Pondok Kelapa				s.d			
			Kec. Duren Sawit Jakarta Timur				17 September 2018			
			Balai Pertemuan Warga							
49	PT. Antilope Madju Puri Indah	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan	1691/2014	10/12/2014	1.806.415.004	5 Tahun	0	35.631.114	-
			Pasar Puri Indah Jakarta Barat	27/10/2014			30 November 2013			
			Pasar				s.d			
							29 November 2018			
50	PT. Gagas Energi Indonesia	4.1.4.03.01	Tanah	1039/2016	18/07/2016	1.760.045.927	5 Tahun	8	30.988.828	247.910.625
			Lahan Parkir Taman Irti Monas	19/04/2016			02 September 2015			
			Jl. Medan Merdeka Selatan				s.d			
			Jakarta Pusat				01 September 2020			
			SPBG							
51	PT. PLN Persero	4.1.4.03.01	Sebagian Lahan	69/2015	04/02/2015	145.139.715	5 Tahun	13	2.418.995	31.446.938
			Jl. Sriwijaya Raya No. 47, Kel. Selong	16/01/2015			04 Februari 2015			
			Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan				s.d			
			Gardu PLN				03 Februari 2020			
52	PT. Holcim Beton	4.1.4.03.01	Sebagian Tanah	418/2015	08/04/2015	5.500.000.000	5 Tahun	15	91.666.667	1.375.000.000
			JALAN KETEL I, KELURAHAN ANCOL	19/03/2015			08 April 2015			
			KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA				s.d			
							07 April 2020			
53	KOPERASI SERBA USAHA CEGER JAYA	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	2019/2014	04/02/2015	150.000.000	5 TAHUN	0	2.500.000	-
			RT. 001 RW 02, KEL. CEGER	26/11/2014			25 April 2013			
			KEC. CIPAYUNG, KOTA ADM. JAKTIM				S D			
							24 April 2018			
54	PT. Nusantara Sejahtera Raya	4.1.4.03.02	Sebagian Tanah dan Bangunan	303/2015	1737/-076.11	1.205.000.000	5 TAHUN	8	20.416.667	163.333.333
			Kompleks Taman Ismail Marzuki	27-Feb-15	05/05/2015		19 Agustus 2014			
			Jl. Cikini Raya No. 73 kel. Cikini Kec.				S D			
			Menteng Jakarta Pusat				18 Agustus 2019			
			(Bioskop)							
55	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan	592/2015	05/05/2015	25.000.000	5 Tahun	4	416.667	1.666.667
			Jalan Melur I/4 Rt.006/013, Kel. Koja	15/04/2015			05 Mei 2015			
			Kec. Koja, Kota Administrasi Jakut				s.d			
			(Kantor)				04 Mei 2020			
56	Yayasan Diannanda	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan (SD)	590/2015		1.710.857.713	5 Tahun	0	31.930.146	-
			Blok N-3, Perumahan Citra Garden II,	15/04/2015	08/06/2015		26 September 2013			
			Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres				s.d			
			Kota Administrasi Jakarta Barat				27 September 2018			
57	Yayasan Pelita Harapan	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan	725/2015		3.750.000.000	5 Tahun	18	62.500.000	1.125.000.000
			Perumahan Daan Mogot Baru, Blok Na-1	30/04/2015	17/06/2015		01 Juli 2015			
			Kelurahan Kali Deres, Kec. Kalideres,				s.d			
			Kota Administrasi Jakarta Barat				30 Juni 2020			
58	PT Surya Jaya Mandiri	4.1.4.03.02	Sebagian Bangunan (TPO)	1137/2015	2712/-1.754.12	110.000.000	5 TAHUN	18	1.833.333	33.000.000
			Sebagian Bangunan Tempat Penyeberangan	19-Jun-15	09/07/2015		09 Juli 2015			
			Orang (Tpo) Kota Yang Terletak Di Jalan				s.d			
			Pintu Besar Utara, Kelurahan Pinangsia				08 Juli 2020			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
			Kecamatan Taman Sari							
59	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan	535/2014	19/06/2014	500.000.000	5 TAHUN	0	8.333.333	-
			Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1	04-Apr-14			23 Juli 2013			
			Kel. Joglo, Kec. Kembangan				s.d			
			Kota Adm. Jakarta Barat				23 Juli 2018			
60	Yayasan Rumah Bersalin Bidara	4.1.4.03.01	Tanah	966/2015		100.000.000	5 TAHUN	6	1.666.667	10.000.000
			Jalan Otista Raya Nomor 64	27/05/2015	29/07/2015		16 Juni 2014			
			Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara				s.d			
			Kota Administrasi Jakarta Timur				15 Juni 2019			
61	Yayasan Al-Hidayah	4.1.4.03.01	Tanah	542/2014	19/06/2014	25.000.000	5 TAHUN	0	416.667	-
			Jl. Tari Klasik Rt. 005 Rw. 08	04-Apr-14			14 Maret 2013			
			Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading				s.d			
			Kota Adm Jakarta Utara				14 Maret 2018			
62	Yayasan Pendidikan Kemurnian	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan	541/2014	19/06/2014	563.709.296	5 TAHUN	0	10.520.641	-
			Perumahan Citra Garden II, Blok B6	04-Apr-14			23 April 2013			
			Dan Blok A3, Kota Adm. Jakarta Barat				s.d			
							22 April 2018			
63	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	4.1.4.03.01	Tanah	1207/2013	18/09/2013		5 TAHUN	0	15.780.962	-
			Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata	25/07/2013			18 September 2013			
			Buana Kel. Kembangan Utara				s.d			
			Kec. Kembangan				17 September 2018			
64	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah	4.1.4.03.02	Tanah	336/2015	1377/-076.25	25.000.000	5 TAHUN	3	416.667	1.250.000
			Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah	05/03/2015	08/04/2015		08 April 2015			
			DKI Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa				s.d			
			Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur				07 April 2020			
			Masjid							
65	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan	1726/2015	3924/-076.11	1.050.000.000	5 TAHUN	8	17.500.000	140.000.000
			Kawasan Rumah Susun Cengkareng No. 2	26/08/2015	01/10/2015		18 Agustus 2014			
			Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng				s.d			
			Kota Administrasi Jakarta Barat				18 Agustus 2019			
66	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawaharah	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan	1359/2014	14/10/2014	500.000.000	5 TAHUN	0	8.333.333	-
			Jl. Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2	26/08/2014			14 Oktober 2014			
			Kel. Kelapa Gading Timur				s.d			
			Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara				13 Oktober 2019			
67	Yayasan Meek Nusantara	4.1.4.03.02	Sebagian Bangunan	2027/2015	3923/-076.73	27.000.000	3 TAHUN	0	750.000	-
			Jalan Marunda Pulo Rt 003 Rw 007,	25-Sep-15	01/10/2015		27 Juli 2015			
			Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara				s.d			
							26 Juni 2018			
68	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi DKI Jakarta (Dekranasda)	4.1.4.03.02	Sebagian Bangunan	516/2014	26/05/2014	5.000.000	5 TAHUN	5	83.333	416.667
			Lantai Dasar Blok G Gedung Balaiikota	04-Apr-14			26 Mei 2014			
			Provinsi DKI Jakarta				s.d			
							25 Mei 2019			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
69	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi DKI Jakarta (Dekranasda)	4.1.4.03.02	Berupa Tanah dan sebagian bangunan Jl. Taman Fatahillah no 1, kawasan fatahillah kel. Pisangan Kec. Taman Sari, Jak-Bar Galeri		4872/-076.11 28/10/2016	5.000.000	5 Tahun 29 Oktober 2016 s.d 28 Oktober 2021	34	83.333	2.833.333
70	PD Sumber Alam	4.1.4.03.01	Tanah Areal Pasar Ikan Muara Angke Jak-Ut	687/2016 14-Apr-16	1676/-076.25 14/04/2016	338.227.000	5 TAHUN 16 Februari 2016 s.d 15 Februari 2021	2	5.618.000	11.236.000
71	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	4.1.4.03.02	Sebagian Ruangannya Gedung Dinas Teknis Muis Kantor Samsat Jakarta Pusat dan Utara, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakbar dan Jaktim	250/2015 16-Feb-15	08/04/2015	400.000.000	5 TAHUN 31 Januari 2013 s.d 30 Januari 2018	0	6.666.667	-
72	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Perumahan Taman Pegangsaan Indah Dan Perumahan Gading Griya Lestari Kec. Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara	1358/2014 26-Agt-14	31/10/2014	625.000.000	5 TAHUN 19 Oktober 2013 s.d 18 Oktober 2018	0	10.416.667	
73	Yayasan Pelita Bangsa	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Perumahan Citra 5, Blok E-7 Citra Garden City, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	2512/2015 19/11/2015	23/12/2015	2.333.333.340	5 TAHUN 23 Desember 2015 s.d 22 Desember 2020	24	38.888.889	933.333.336
74	PT Bank DKI (22 ATM dan Loket)	4.1.4.03.02	Sebagian Tanah dan Bangunan 22 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	1278/2015 09-Jul-15	06/10/2015	11.000.000	5 TAHUN 06 Oktober 2015 s.d 05 Oktober 2020	15	183.333	2.750.000
75	PT Bank DKI (58 ATM dan Loket)	4.1.4.03.02	Sebagian Tanah dan Bangunan 58 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	2054/2015 30/09/2015	28/12/2015	29.000.000	5 TAHUN 28 Desember 2015 s.d 27 Desember 2020	24	483.333	11.600.000
76	PT Bank DKI	4.1.4.03.02	Sebagian Bangunan yang terletak di Lantai Dasar Blok C Walikota Jak-Pus		530/-076.11 11/01/2015 03/02/2016	1.675.547.578	5 TAHUN 03 Februari 2016 s.d 27/12/2021	1	27.831.208	27.831.208
77	Yayasan Safa Marwah	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Jalan Muzdalifah, Komplek Perumahan Qarya Srengseng, Kembangan Jakbar		2108/-076.25 30/05/2016	25.000.000	5 TAHUN 30/05/2016 s.d 29/05/2021	29	416.667	12.083.333
78	Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen		2018/-076.11 09/05/2016	5.000.000	5 TAHUN 09 Mei 2016 s.d 08 Mei 2021	28	83.333	2.333.333
79	PT Pertamina Gas	4.1.4.03.02	Ruang Bawah Tanah Areal Pergudangan Jalan Tongkol (Krapu) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jak-ut		1973/-1.823.3 02/05/2016	260.000.000	5 TAHUN 02 Mei 2016 s.d 01 Mei 2021	28	4.333.333	121.333.333.33
80	PT Bank DKI	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Lantai 1 s.d 3 Gd. Prasada Sasana Karya		1628/-076.1 08/04/2016	7.448.704.003	5 TAHUN 02 Mei 2016	4	123.724.585	494.898.338

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
			Suryo pranoto Jakpus				s.d 01 Mei 2021			
81	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	4.1.4.03.01	Tanah		1847/-076.25	197.298.253	5 TAHUN	4	3.277.167	13.108.667
			Jl. Outer Ring Road Kayu Besar No. 1		25/04/2016		25/4/2016			
			Jakarta Barat				s.d 24/4/2021			
82	Yayasan Tanimbar Lestari	4.1.4.03.01	Tanah		1887/-076.25	500.000.000	5 TAHUN	28	8.333.333	233.333.333
			Komplek Perumahan I Citra Ext. Blok AA.5		26/04/2016		26/4/2016			
			Jakarta Barat				s.d 25/4/2021			
83	PT Unggul Dian Perkasa	4.1.4.03.01	Tanah		1030/-076.25	1.944.374.289	5 TAHUN	0	32.296.478	-
			Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur		07/03/2016		03 Juli 2016			
							s.d 03 Juni 2021			
84	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan		487/-076.11	693.945.000	5 TAHUN	3	11.565.750	34.697.250
			Jl. Raya PKP		01/02/2016		08 April 2015			
			Jakarta Timur				s.d 07 April 2020			
85	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan		1151/-076.11	281.854.648	5 TAHUN	11	5.260.321	57.863.527
			Komplek Perumahan Citra 5 Blok A.6		15/03/2016		20/11/2014			
			Jakarta Barat				s.d 19/11/2019			
86	Yayasan Anak Bangsa Basmol	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan		870/-076.11	250.000.000	5 TAHUN	2	4.166.667	8.333.333
			Jl. Tanggul Cengkareng Drain No. 1 Basmol		22/02/2016		22/2/2016			
			Jakarta Barat				s.d 21/2/2021			
87	PT Indocater	4.1.4.03.02	Jaringan Distribusi Kabel Listrik Bawah Laut		695/-1.795.133	1.691.127.888	5 TAHUN	1	28.090.000	28.090.000
			Pulau Kallage		12/02/2016		12 Februari 2016			
			Kepulauan Seribu				s.d 11 Februari 2021			
88	PT Jaya Sejati Dua	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan		658/-076.11	555.000.000	5 TAHUN	25	9.250.000	231.250.000
			Jalan Mandala Bahari No. 5, Muara Angke		11/02/2016		11 Februari 2016			
			Jakarta Utara				s.d 10 Februari 2021			
89	Yayasan Mahatma Gading	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan		10/12/2014	1.266.767.531	5 TAHUN	0	23.641.985	-
			Perum Villa Gading Indah Blok D Kel.				28 Oktober 2013			
			Kelapa Gading Jakarta Utara				s.d 27 Oktober 2018			
90	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Gereja		2624/-076.1	250.000.000	5 TAHUN	46	4.166.667	191.666.667
			Jl. Angsana Raya Blok D.8 Perum Taman		25/10/2017		15 November 2017			
			Kedoya Selatan				s.d			
			Jakarta Barat				15 November 2022			
91	PT Bumi Bintang Bersatu	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan		02/07/2014	700.000.000	5 TAHUN	6	13.333.333	80.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
			Komplek Perumahan Taman Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma, Kec. Grogol				02 Juli 2014 s.d 02 Juli 2019			
92	PT Swarna Jaya Sejahtera	4.1.4.03.01	Sebagian Tanah Kawasan Dermaga Pelabuhan Penumpang Kali Adem Muara Angke		1377/-076.25 11/03/2015	100.000.000	5 TAHUN 02 Juli 2014 s.d 02 Juli 2019	6	1.666.667	10.000.000
93	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Komplek Perumahan Citra 5, Blok D-6 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat		2788/-076.11 23/06/2016		5 TAHUN 23 Juli 2014 s.d 22 Juli 2019	7	10.520.641	73.644.489
94	Yayasan Suhargo Gondokusumo	4.1.4.03.01	Tanah dan Bangunan Jl. Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16 Komplek Perumahan Taman Surya 5 Jakarta Barat		4309/-076.11 30/09/2016	2.760.000.000	5 TAHUN 01 April 2016 s.d 31 Maret 2021	27	46.000.000	1.242.000.000
95	PT. Balats Dwi Tunggal	4.1.4.03.01	Sebagian Tanah Jl. Gerbang Pemuda No 1, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat		338/-072 18/09/2017	675.000.000	5 Tahun 26 Mei 2017 s.d 25 Mei 2022	41	11.250.000	461.250.000
96	Yayasan Muslim Bojong Indah	4.1.4.03.02	Tanah dan Bangunan Jl. Belimbing Raya Blok B.5 Kel, Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat		2923/-076.11 22/11/2017	75.000.000	5Tahun 20 April 2017 s.d 20 April 2022	40	1.250.000	50.000.000
97	PT. Alam Segar Raya	4.1.4.03.01	Sebagian Tanah Jl. Dermaga Muara Angke / Jl. Pendaratan Ikan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara		6977/-077	1.033.800.000	5 Tahun 27 Februari 2017 s.d 26 Februari 2022	38	17.230.000	654.740.000
98	PT. KMC INDONESIA	4.1.4.03.01	Tanah KAWASAN PASAR IKAN MUARA ANGKE KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		25/04/2014	80.000.000	5 tahun 25 April 2014 s.d 25 April 2019	4	6.666.667	26.666.667
99	YAYASAN PERMATA INDONESIA PERMAI	4.1.4.03.01	SARANA PENDIDIKAN (SEKOLAH TK) PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO BLOK B10 RT.007 RW.002 KEL. TUGU UTARA, KEC. KOJA, KOTA ADM JAKARTA UTARA		2138/076.11 17-Mei-18	125.000.000	5 TAHUN 19 Desember 2014 S.D 18 Desember 2019	12	2.083.333	25.000.000
100	KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA	4.1.4.03.01	Stasiun Pengisian Solar		14/10/2014	73.282.208	5 TAHUN 14 Oktober 2014 S.D 13 Oktober 2019	9	1.367.683	12.309.150
101	YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK KOPI	4.1.4.03.01	SARANA IBADAH Jl. Pondok Kopi V Blok E2 dan Blok E7 Kel. Pondok Kopi Duren Sawit		17/11/2014	462.781.972	5 TAHUN 17 November 2014 S.D	11	7.890.481	86.795.291

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
							16 November 2019			
102	YAYASAN HARAPAN BANGSA	4.1.4.03.02	SARANA PENDIDIKAN (TK DAN SD)		27/01/2015	338.225.578	5 TAHUN	1	5.955.080	5.955.080
			BLOK A.6, PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT				27 Januari 2015			
							S.D			
							27 Januari 2020			
103	PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH (PD PAL)	4.1.4.03.01	PENGELOLAAN AIR LIMBAH		01/02/2016 488/-076.25	120.000.000	1 TAHUN	1	10.000.000	10.000.000
							01 Februari 2018			
							S.D			
							31 Januari 2019			
104	GEREJA TIBERIAS	4.1.4.03.01	SARANA IBADAH / GEREJA		2741/-076.11	1.125.000.000	5 TAHUN	40	18.750.000	750.000.000
			JL. KELAPA NIAS RAYA BLOK HT 60		25/07/2018		13 Mei 2017			
			KELAPA GADING JAKARTA UTARA				S.D			
							14 Mei 2022			
105	ROYAL CITY HOTEL	4.1.4.03.01	AKSES JALAN		6490/-1.795.22	551.300.000	5 TAHUN	48	9.188.333	441.040.000
			JL. TOMANG RAYA, NO 88 CIDENG		26-Okt-18		24/12/2017			
			RAMBUTAN JAKARTA TIMUR				S.D			
			KEL. CIDENG, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT				23/12/2022			
106	PD. SUMBER MINA REJEKI	4.1.4.03.01	COLD STORAGE		8776/-1.711.31	400.000.000	5 TAHUN	60	6.666.667	400.000.000
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		27-Nov-18		03/01/2019			
							S.D			
							02/01/2024			
107	PT. GLOBAL SAMUDRA MAKMUR	4.1.4.03.01	COLD STORAGE		8779/-1.711.31	632.400.000	5 TAHUN	59	10.540.000	621.860.000
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		27-Nov-18		27/11/2018			
							S.D			
							26/11/2023			
108	CV. ANUGRAH ANDALAN NELAYAN	4.1.4.03.01	COLD STORAGE		8778/-1.711.31	400.000.000	5 TAHUN	59	6.666.667	393.333.333
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		27-Nov-18		27/11/2018			
							S.D			
							26/11/2023			
109	SINERGI BANGUN GLOBAL	4.1.4.03.01	PERPARKIRAN		4340/-076.33	300.000.000	5 TAHUN	59	5.000.000	295.000.000
			JL. ABDUL RAHMAN SALEH SALEH 1		07-Dec-18		07/12/2018			
			KEL. SENEN, KEC. SENEN							
			JAKARTA PUSAT				06/12/2023			
110	YAYASAN MASJID AT TAQWA	4.1.4.03.01	SARANA IBADAH (MASJID)		4207/-076.1	67.500.000	3 + 5 TAHUN	48	703.125	33.750.000
			PERUMAHAN TUGU PERMAI, JL. H. MURTADHO BLOK B10 RT 007 RW 002, KEL. TUGU UTARA, KEC. KOJA, JAKARTA UTARA		27-Nov-18		19/12/2014			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
							S.D 18/12/2022			
111	KOPERASI MINA USAHA SEJAHTERA	4.1.4.03.01	SPBB SOLAR NON SUBSIDI		9210/-1.711.31	413.100.000	5 TAHUN	60	6.885.000	413.100.000
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		07-Des-18		02/05/2019			
							S.D 01/05/2024			
112	PT. JAKARTA PROPERTINDO	4.1.4.03.01	PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (ITF)		4603/-076.33	20.535.463.000	5 TAHUN	60	342.257.717	20.535.463.000
			JL. SUNTER PERMAI RAYA/JALAN RE MARTADINATA, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA		20-Des-18		20/12/2018			
							S.D 19/12/2023			
113	LPPOM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA	4.1.4.03.02	KANTOR SEKRETARIAT		4651/-076.36	25.000.000	5 TAHUN	57	416.667	23.750.000
			GEDUNG GRAHA MENTAL SPIRITUAL LT 1 (GMS) JL. KH. MAS MANSYUR / JL. H. AWWALUDIN KEL. KEBON MELATI, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT		15-Okt-18		26/09/2018			
							S.D 26/09/2023			
114	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	4.1.4.03.02	JARINGAN SELULER		5734/-1.817	1.323.600.000	5 TAHUN	59	22.060.000	1.301.540.000
			RUSUN DAAN MOGOT, RUSUN KAPUK MUARA DAN RUSUN MUARA BARU		28/12/2018		12/12/2018			
							S.D 12/12/2023			
115	CV. MUARA KERTA JAYA	4.1.4.03.01	DOCKING KAPAL		7939/-1.711.31	587.300.000	5 tahun	45	9.788.333	440.475.000
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA				11/10/2017			
							s.d 10/10/2022			
116	CV. SAMUDRA PASIFIC FISHINDO	4.1.4.03.01	COLD STORAGE		8780/-1.711.31	250.000.000	5 tahun	59	4.166.667	245.833.333
			JL. DERMAGA MUARA ANGKE/ JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA		27-Nov-18		03/12/2018			
							s.d 02/12/2023			
117	PT. MAC SARANA DJAYA		ANTENA INDOOR		3742/-076.3	642.000.000	5 TAHUN	60	10.700.000	642.000.000
			JL. YOS SUDARS NO 27 - 29, KEL. KEBON BAWANG, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA		20/12/18		24/12/18			
							S.D 23/12/23			
118	PT. MAC SARANA DJAYA		ANTENA INDOOR		9424/-076.33	633.000.000	5 TAHUN	60	10.550.000	633.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	NILAI PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
			PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL					
			JL. SEJAJAR PINTU TOL TIMUR CAKUNG-CILINCING KM 2, KEL. PULO GEBANG, KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR		21/12/18		24/12/18			
							S.D 23/12/23			
			JUMLAH							59.336.108.098

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUTSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUTSI TAHUN 2018	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2018	KONTRIBUTSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 13 Maret 2008	25 Tahun	290.400.000	0	24.200.000	-
2	Yayasan Tunas Muda	BTO Jl. Kedoya Angsana Raya Blok D-8 No.2 Kompleks Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya Selatan Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat. (Sarana Pendidikan)	PKS Tgl 19 September 2000	25 Tahun	81.367.258,90	9	6.780.605	61.025.444
3	Yay. Patmos	BTO Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 210/073.551 Tgl 6 Pebruari 2003 Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006 Tgl 1 Juni 2006	25 Tahun	107.179.441	1	8.931.620	8.931.620
4	Yay. Pusat Pelatihan E & P	BTO Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 130/073.511 Tgl 28 Januari 2003 BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006	25 Tahun	103.568.136	1	8.630.678	8.630.678
5	PT Langgeng Ayom	BOT Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)	PKS tahun 1990 Addendum Tgl 18 Juli 2012	30 Tahun	321.000.000	0	26.750.000	-
6	PT. Bakrie Investindo	BOT Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Kuningan JakSel (sarana olahraga an fasilitas komersil)	PKS Tgl 22 Agustus 1992	48 Tahun	180.000.000	0	12.500.000	-
7	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	PKS No. 734/073.511 Tgl 28 Maret 2003	20 Tahun	85.000.000	0	7.083.333	-

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUTSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUTSI TAHUN 2018	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2018	KONTRIBUTSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10
8	PT. Metropolitan Kentjana Tbk	BOT Antara Pondok Indah Mal I & II Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel (Jembatan Multiguna)	PKS Tgl 4 April 2008	25 Tahun	893.000.000	0	74.416.666,67	-
9	PT. Gamma Investa Lestari	BTO Kompleks Bola Basket Internasional Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3 Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. (Sarana Olahraga)	PKS No. 15/AK/BP/III/2006 Tanggal 24 Maret 2006	25 Tahun	60.000.000	0	5.000.000	-
10	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	Kompleks Taman Kebon Jeruk Blok G.VII Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Sarana Pendidikan	PKS No. 37/AK/BP/IX/2006 Tanggal 6 September 2006. PKS Addendum Tanggal 26 Oktober 2010	25 Tahun	146.742.750	0	12.228.563	-
11	PT. WAHANA NUSANTARA	BOT JL. HR RASUNA SAID KAV. C22, KEL. KARET KUNINGAN, KEC. SETIABUDI. KOTA ADM JAKARTA SELATAN HOTEL	PKS NO. 02/ARG/WN/X/2017	30 TAHUN	45.560.339.000	344	126.556.497,22	43.535.435.044
12	PT Rointa Eka Jaya	BOT Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus (Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhruddin)	PKS No. 27 Tahun 2001 Tgl 30 Maret 2001	30 Tahun	41.666.667	144	3.472.222	500.000.000
13	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC dan Gedung Mal Mangga Dua	PKS No. 65 Tahun 1999 Tgl 13 September 1999	30 Tahun	31.666.667	134	2.638.889	353.611.115
14	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus	PKS Tgl 14 Mei 2003 Addendum Tgl 30 Agustus 2005	25 Tahun	60.000.000	132	5.000.000	660.000.000

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2018	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2018	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga Dua dengan Mal Mangga Dua)						
15	PT. Gading Raya Proptindo	BOT	PKS Tgl 27 Oktober 2004	25 Tahun	140.000.000	130	11.666.667	1.516.666.667
		Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus						
		(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)						
16	PT. AGB Tuna (cold storage)	BOT	PKS Tgl 28 Feb 2004	20 Tahun	30.000.000	62	2.500.000	155.000.000
		Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit						
		Kec. Penjaringan JakUtara						
		(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta sarana pelengkapanya)						
17	PT. AGB Tuna (pabrik es)	BOT	PKS Tgl 21 November 2006	20 Tahun	22.500.000	95	1.875.000	178.125.000
		Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit						
		Kec. Penjaringan JakUtara						
		(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana pelengkapanya)						
18	PT. Pasific Bangun Mas	BOT	PKS No. 40 Tahun 2001	25 Tahun	28.000.000	88	2.333.333	205.333.333
		Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan	Tgl 1 Mei 2001					
		(Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)						
19	PT. Pervita Margasakti	BOT	PKS Tgl 8 Oktober 2003	25 Tahun	100.000.000	117	8.333.333	975.000.000
		Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel						
		(jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)						
20	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT	PKS Tgl 7 April 2004	25 Tahun	94.000.000	123	7.833.333	963.500.000
		Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan)						
		Jakarta Timur						
		(Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A)						
		& Gedung Parkir (Bangunan B))						

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2018	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2018	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10
21	PT. Grand Indonesia	BOT Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat	PKS tanggal 4 Mei 2009 18 JAN 08 S/D 31 DES 2035	28 TAHUN	655.000.000	0	54.583.333	-
22	Hotel Cikini Realty	BOT	PKS tanggal 17 Juli 2006	25 TAHUN	1.350.000.000	19	18.750.000	356.250.000
JUMLAH SELURUHNYA								49.477.508.901,00

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS HASIL LELANG TITIK REKLAME ATAS ASET PEMDA
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jangka Waktu	Tanggal PKS	Jangka Waktu		Nilai SPS	Sewa Titik Lelang yang Belum Diakui per 31 Desember 2018	Sewa Titik Lelang Diterima Dimuka
					Awal	Akhir			
1	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)				1.551.000.000	18 Bulan	1.551.000.000
2	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)				1.610.000.000	18 Bulan	1.610.000.000
3	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)				1.850.900.000	18 Bulan	1.850.900.000
4	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)				1.967.000.000	18 Bulan	1.967.000.000
5	PT. Unggul Dian Perkasa	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	17/03/2015	27 Mei 2015	26 Mei 2017	3.500.000.000	0 BULAN	
6	PT. Insite Media	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	10/02/2015	22 April 2015	21 April 2017	5.849.800.000	0 BULAN	-
7	PT. Prisma Harapan	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	01/09/2015	10 November 2015	09 November 2017	2.101.000.000	0 BULAN	-
JUMLAH									6.978.900.000

**DAFTAR UTANG PEGAWAI
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Keterangan
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
A.	UTANG PEGAWAI						
1	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	134.408.818				-	
		9.870.737		9.870.737		-	Kekurangan Pembayaran TKD Statis Bulan Januari-Maret 2015
		34.528.406		34.528.406		-	Kekurangan Pembayaran TKD Dinamis Bulan Januari-Maret 2015
		78.364.539		78.364.539		-	Kekurangan Pembayaran TKD Bulan Oktober staf Sub Bagian
		11.645.136		11.645.136		-	Jamuan Acara Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota	7.195.680				-	Utang TKD Biro PKLH an. Wenny
		7.195.680		7.195.680		-	mencatat TKD an Iwan Fairdiyanto TA 2014 yang belum dibayarkan ke pegawai
3	Dinas Sumber Daya Air	561.685.823				-	
		556.160.823		556.160.823		-	Koreksi -review-kekurangan TKD 2016
		3.375.000		3.375.000		-	Gaji PTT Bulan Desember 2017
		2.150.000		2.150.000		-	Gaji Tunjangan Peningkatan Penghasilan PTT Bulan Desember 2017
4	Dinas Perhubungan	128.299.835				35.631.000	
		128.299.835		128.299.835		-	Hutang Tunjangan Kinerja Daerah
			35.631.000			35.631.000	Hutang Tunjangan Kinerja Daerah (Kesalahan penghitungan sistem BKD)
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	8.050.000				-	
		8.050.000		8.050.000		-	Honor dr spesialis bulan Desember 2017
6	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	14.399.978				-	
		14.399.978	22	14.400.000		-	Rapel Tunjab Fungsional dan Gaji Pokok
7	Dinas Pendidikan	55.933.988.942				-	
		651.955.249		651.955.249		-	Kekurangan TKD bulan Juli 2015
		791.037.231		791.037.231		-	Kekurangan TKD bulan Agustus 2015
		162.234.516		162.234.516		-	Kekurangan TKD bulan September 2015
		271.647.206		271.647.206		-	Kekurangan TKD bulan Oktober 2015
		1.531.251.358		1.531.251.358		-	Kekurangan TKD bulan November 2015
		371.951.156		371.951.156		-	Kekurangan TKD bulan September 2015 Guru
		816.072.847		816.072.847		-	Kekurangan TKD bulan Oktober 2015 Guru
		2.571.520.153		2.571.520.153		-	Kekurangan TKD bulan November 2015 Guru
		1.466.382.010		1.466.382.010		-	Kekurangan TKD bulan Januari 2016 Guru
		351.952.735		351.952.735		-	Kekurangan TKD bulan Februari 2016 Guru
		176.224.064		176.224.064		-	Kekurangan TKD bulan Maret 2016 Guru
		57.139.319			57.139.319	-	Kekurangan TKD bulan Mei s.d Desember 2016
		41.794.585.816		41.794.585.816		-	Kekurangan PPH, bulan Mei s.d. Desember 2017
		248.287.288		248.287.288		-	Kekurangan TKD bln Jan s.d. Desember 2014
		4.671.747.994		2.571.243.860	2.100.504.134	-	Kekurangan TKD bln Desember 2017
			4.000.100	4.000.100		-	Perbaikan dan rapel gaji a.n. Pupu Herawati S.Pd
			6.002.100	6.002.100		-	Perbaikan dan rapel gaji a.n. Hazriah
			33.106.340	33.106.340		-	Perbaikan dan rapel gaji a.n. Syarif Hidayat (Okt 2017); TKD Desember 2017 a.n. Nuraini
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	561.703.865				17.308.500	
		415.329.681		415.329.681		-	Tunjangan PPH Tahun 2015-2016
		146.374.184	17.308.500	146.374.184		17.308.500	Tunjangan Kinerja Daerah Tahun 2015-2016
9	Dinas Sosial	45.639.970				-	
		45.639.970		45.639.970		-	Kekurangan TKD Tahap II bulan Januari-Maret 2015
10	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.317.554				-	
		1.317.554		1.317.554		-	Kekurangan TKD Pegawai Sudin Utara

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Keterangan	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
					PEMBAYARAN		KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
11	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.403.341.094				-	
		1.399.493.023		1.399.493.023		-	Utang Tunjangan PPH bulan Desember 2017
		3.848.071	62.429	3.910.500		-	Utang TKD atas nama Meida periode November 2014
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	300.386.131				-	
		300.386.131		300.386.131		-	Kekurangan Hutang PPh tahun 2015 dan 2016
13	Badan Pengelola Aset Daerah	171.067.981				-	
		171.067.981		171.067.981		-	PPh 21 atas Kekurangan TKD Bulan April 2015 s.d Maret 2016
14	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	14.114.000				-	
		14.114.000		14.114.000		-	Utang pembayaran e-toll kepada pegawai
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.516.407				-	
		285.627		285.627		-	Utang Pembayaran Kekurangan TKD Tahap Kedua bulan Mei 2015 (a.n. Zaenal Arifin)
		3.613.994		3.613.994		-	Utang Pembayaran Kekurangan TKD Bulan Januari-Maret 2015 (a.n. Arimbi Putik Apsari)
		3.616.786		3.616.786		-	Utang Pembayaran Kekurangan TKD Bulan Januari-Maret 2015 (a.n. Frisia Soraya Magitha)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	128.364.214				-	
		37.602.666		37.602.666		-	Hutang Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Bulan Januari s.d Maret 2015 (Berdasarkan Pergub 207 Tahun 2014)
		38.719.215		38.719.215		-	Hutang Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahap Kedua Bln Maret 2015 (Berdasarkan Pergub 193 Tahun 2015)
		10.947.391		10.947.391		-	Hutang Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua Berdasarkan Pergub Nomor 193 Tahun 2015 Bulan Januari - Februari 2016
		41.094.942		41.094.942		-	Hutang Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua Berdasarkan Pergub Nomor 193 Tahun 2015 Bulan April s.d November 2015
17	Badan Kepegawaian Daerah	6.979.489.841				-	
		888.000		888.000		-	Hutang kekurangan tunjangan fungsional pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 2 orang.
		879.324.822		879.324.822		-	Hutang belanja pegawai pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) bulan Desember 2017 kepada PT. Taspen
		6.099.277.019		6.099.277.019		-	Hutang belanja pegawai pembayaran selisih perubahan premi Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) Tahun 2017 kepada PT. Taspen
18	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	800.556.772				-	
		217.135.684		217.135.684		-	Hutang TKD bulan April s/d November 2015
		395.050.859		395.050.859		-	Hutang TKD bulan Januari s/d Maret 2016
		64.931.308		64.931.308		-	Hutang pajak TKD bulan Oktober s/d Desember 2015
		123.438.921		123.438.921		-	Hutang pajak TKD bulan Februari s/d April 2016
			4.603.464	4.603.464		-	Hutang TKD Tahun 2015 dan 2016
19	Kota Administrasi Jakarta Utara	5.894.928				-	
		5.894.928		5.894.928		-	Hutang Pembayaran TKD Bulan November 2017 an Henny Purwaningsih Kelurahan Sunter Agung
20	Kota Administrasi Jakarta Timur	4.944.140				-	
		2.261.600		2.261.600		-	Gaji Tahun 2014
		2.682.540		2.682.540		-	TKD Tahun 2014
24	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - JAKSEL				4.092.000		
			4.092.000			4.092.000	Kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 2% tahun 2016
25	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu				63.558.972		
			63.558.972			63.558.972	Utang Tunjangan Kinerja Daerah
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan				43.500.000		
			43.500.000			43.500.000	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai November dan Desember 2018
27	Dinas Bina Marga				3.766.000		

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Keterangan
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			3.766.000			3.766.000	Kekurangan pembayaran gaji dan tunjanganbulan Oktober 2018 a/n Seno Muhajir Yunus, ST
	JUMLAH	67.212.365.973	215.630.927	65.102.496.975	2.157.643.453	167.856.472	

**DAFTAR UTANG BELANJA DI SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
A	Utang Belanja Persediaan								
1	Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	358.715		358.715		-	Utang Belanja Persediaan	Pertamina	Kelebihan penggunaan BBM
2	Unit Pengelola Rumah Susun Marunda	1.258.730		1.258.730		-	Utang Belanja Persediaan	Pertamina	Kelebihan penggunaan BBM
3	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	1.016.400		1.016.400		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Tawada Healthcare	Pengadaan BHP Radiologi
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	6.710.000		6.710.000		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Zalfa Mandiri	Pengadaan BHP Radiologi
4	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanamar	34.150.600		34.150.600		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Soluna Berlima Putra	Pengadaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Penyediaan Jasa dan Alat Tenaga Teknis Lainnya
	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanamar	15.180.000		15.180.000		-	Utang Belanja Persediaan	CV. Sosor Lestari Jaya	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kanto
5	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	2.083.200		2.083.200		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Pertamina Retail	BBM
6	Kelurahan Pulo - Jaksel	2.174.521		2.174.521		-	Utang Belanja Persediaan	PD. ALMUBARAK ENERGY	Belanja BBM
7	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	470.441		470.441		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Pertamina Retail	BBM
8	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	1.446.750		1.446.750		-	Utang Belanja Persediaan	PT. Pertamina Retail	BBM
9	Kelurahan Cilincing - Jakut	25.055.800		25.055.800		-	Utang Belanja Persediaan	CV. Gomal Jaya	Barang jasa perkakas kerja
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		22.000.000			22.000.000	Utang Belanja Persediaan	PT. MERANTAU MANDIRI	Utang dekorasi stand Dinas Pariwisata
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut		21.452.800			21.452.800	Utang Belanja Persediaan	PT. Pualam Tirta Sentosa	Utang BBM
	JUMLAH UTANG BELANJA PERSEDIAAN	89.905.157	43.452.800	89.905.157	-	43.452.800			
B	Utang Belanja Barang								
1	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	90.002.006		90.002.006		-	Utang Belanja Barang	CV. Karya Nusantara	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
2	Dinas Pendidikan	45.349.507				45.349.507	Utang Belanja Barang	PT Rendi Nurumiris Jaya	Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA
	Dinas Pendidikan	48.437.440				48.437.440	Utang Belanja Barang	PT Citra Abadi Pensa	Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMP
	Dinas Pendidikan	32.098.740				32.098.740	Utang Belanja Barang	CV Alpin Sejahtera Sentosa	Pengadaan Integrated Library Equipment SMA
	Dinas Pendidikan	38.243.212				38.243.212	Utang Belanja Barang	CV Rapina Rejeki	Pengadaan Integrated Library Equipment SMP
	Dinas Pendidikan	44.911.500				44.911.500	Utang Belanja Barang	CV Achmad Jaya	Pengadaan Bangku Tunggu SD
	Dinas Pendidikan	43.246.155				43.246.155	Utang Belanja Barang	CV Gok Uli Rejeki	Pengadaan Kursi Kuli/Kursi Serba Guna
	Dinas Pendidikan	40.621.500				40.621.500	Utang Belanja Barang	CV Charissa Sehati	Pengadaan Bangku Tunggu SMP
	Dinas Pendidikan	44.804.250				44.804.250	Utang Belanja Barang	PT Abrooro Haya	Pengadaan Bangku Tunggu SMA
	Dinas Pendidikan	48.930.623				48.930.623	Utang Belanja Barang	PT Surya Menara Indah	Pengadaan File Cabinet
	Dinas Pendidikan	22.132.815				22.132.815	Utang Belanja Barang	CV Wannu Star	Pengadaan Tempat Sampah
	Dinas Pendidikan	53.500.000				53.500.000	Utang Belanja Barang	CV Lima Putri Jaya	Pengadaan Papan Tulis IT
	Dinas Pendidikan	47.745.727				47.745.727	Utang Belanja Barang	PT Revalino Agung Pratama	Pengadaan Mikroskop Digital Observasi untuk Pengajaran dan Praktikum
	Dinas Pendidikan	26.019.000				26.019.000	Utang Belanja Barang	CV Anugerah Indah Maha Karya	Pengadaan Classroom Audio System MTC untuk SMP
3	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	44.495.000				44.495.000	Utang Belanja Barang	Kantor jasa penilai Febriman Siregar & Rekan	
	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	44.495.000				44.495.000	Utang Belanja Barang	Kantor jasa penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan, Nazir & Rekan	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.213.000		31.213.000		-	Utang Belanja Barang	CV. Rama Bintang Fumindo	Belanja Makan Minum Peserta/Petugas/Panitia keg 1.18.02.008
5	Kelurahan Tomang - Jakbar	6.133.883		6.133.883		-	Utang Belanja Barang		Belanja BBM
6	Kelurahan Makasar - Jaktim	55.994.400		55.994.400		-	Utang Belanja Barang	CV. MANDIRI PUTRA TOMOK	Kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu	2.595.673		2.595.673		-	Utang Belanja Barang	BPJS	
8	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	1.116.829.833	644.731.417	1.761.561.250		-	Utang Belanja Barang	PT. Bangun Nusa Raya	utang pihak ketiga DCKTRP atas persediaan bangunan PMI Jakse (pembangunan kontruksi yang akan diserahkan kepada pihak ketiga) sesuai BA Monitoring Bobot Pekerjaan Per 31 Desember 201
9	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta		88.501			88.501	Utang Belanja Barang	PT. Tirta Investama	Utang belanja minuman pegawai
	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG	1.927.799.264	644.819.918	1.947.500.212	-	625.118.970			
C	Utang Belanja Jasa Non TALI								
1	Dinas Perumahan	10.970.124	9.956.031	20.926.155	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Marunda
	Dinas Perumahan	5.674.669	3.610.818	9.285.487	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Muara Baru
	Dinas Perumahan	4.234.360	9.899.251	14.132.611	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara
	Dinas Perumahan	2.740.751	11.176.147	13.916.898	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Penjaringan
	Dinas Perumahan	6.253.369	7.179.558	13.387.164	45.763	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Tipar Cakung

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Perumahan	4.497.735	6.216.167	10.194.515	519.387	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pinus Elok
	Dinas Perumahan	7.296.422	8.769.237	16.065.859	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Komarudin
	Dinas Perumahan	11.128.644	18.345.546	29.474.190	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Besar Selatan
	Dinas Perumahan	3.410.968	45.718.199	49.129.167	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulo Gebang
	Dinas Perumahan	2.722.681	28.911.459	31.634.140	-	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Muara
	Dinas Perumahan	37.686.000				37.686.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Muara Baru, Kel, Penjarangan, Kec Penjarangan- Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	47.404.500				47.404.500	Utang Belanja Jasa Non TALI	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Pembebasan Lahan Untu Pembangunan Rusun di Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng - Jakarta Barat
	Dinas Perumahan		8.077.506			8.077.506	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. GAMMA INSUKO	Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan
	Dinas Perumahan		2.010.627			2.010.627	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. BUMI MADANI	Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara
	Dinas Perumahan		4.411.463			4.411.463	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. HUDA TATA SARANA	Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot
2	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaksel	4.092.000		4.092.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	
3	Dinas Kehutanan	74.137.065				74.137.065	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Maxitech Utama Indonesia	Utang Daerah 10.013 / Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim (Pengawasan)
4	Dinas Perhubungan	3.600.000				3.600.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Emplsemen Terminal Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)
	Dinas Perhubungan	3.600.000				3.600.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti (Konsultan Perencanaan)
	Dinas Perhubungan	1.210.000				1.210.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT. Terminal, Gedung Sudinhub Jakarta Barat, Gedung Kantor Penerbitan Sudinhub Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan)
	Dinas Perhubungan	1.950.000				1.950.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X (Konsultan - Legal Opinion)
	Dinas Perhubungan	50.000.000				50.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Dinas Tata Ruang	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion)
	Dinas Perhubungan	3.600.000				3.600.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks Kanwil, Ruang Aula Dishub (Konsultan Pengawasan)
	Dinas Perhubungan	50.000.000				50.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Sugeng W.M.Widigdo & Rekan	Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawas)
	Dinas Perhubungan	50.000.000				50.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Sugeng W.M.Widigdo & Rekan	Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan
	Dinas Perhubungan	12.364.000				12.364.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Alfriz Auliatama	Peningkatan Emplsement Terminal/Depo (Konsultan Perencanaan)
	Dinas Perhubungan	24.519.000				24.519.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	CV. Galuh	Pemeliharaan Terminal Muara Angke (Konsultan Pengawasan)
	Dinas Perhubungan	12.364.000				12.364.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan (Konsultan Perencanaan)
	Dinas Perhubungan	29.305.500				29.305.500	Utang Belanja Jasa Non TALI	CV. Cipta Sukses Raya	Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuat Lampiran SK. Gub)
	Dinas Perhubungan	38.875.375				38.875.375	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Hardja Moekti Consultant	Pembangunan JPO Sentra Primer Timur
	Dinas Perhubungan	27.014.250				27.014.250	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Bahana Nusantara	By. Konsultan Pengawas atas Kegiatan Pekerjaan Fasilitas Integrasi Halte Busway Dengan Stasiun KRL Manggarai
5	Dinas Kesehatan	3.723.215	134.704.965		138.428.180	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Pengembangan Gedung Ruma Sakit Umum D Kecamatan Di Provinsi DKI Jakarta-Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cipayun
	Dinas Kesehatan	14.331.798	124.096.382		138.428.180	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum D Kecamatan Di Provinsi DKI Jakarta-Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kebayoran Lama
	Dinas Kesehatan	12.008.010	126.491.890		138.499.900	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum D Kecamatan Di Provinsi DKI Jakarta-Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kramat Jati
	Dinas Kesehatan	9.808.009	562.280.585		572.088.594	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Pengembangan Gedung Ruma Sakit Umum D Kecamatan Di Provinsi DKI Jakarta-Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cilincin
	Dinas Kesehatan	11.569.360	139.769.300		151.338.660	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Pengembangan Gedung Ruma Sakit Umum D Kecamatan Di Provinsi DKI Jakarta-Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kali
	Dinas Kesehatan	21.884.250	46.206.135		68.090.385	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
	Dinas Kesehatan	1.212.425	27.062.415		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON SIRIH
	Dinas Kesehatan	541.746	27.733.094		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON MELATI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kesehatan	21.908.173	6.482.057		28.390.230	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR
	Dinas Kesehatan	16.143.993	33.942.857		50.086.850	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PASAR BARU
	Dinas Kesehatan	222.806	28.052.034		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR
	Dinas Kesehatan	7.179.547	49.370.133		56.549.680	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT III
	Dinas Kesehatan	434.302	27.840.538		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KALIBARU
	Dinas Kesehatan	11.166.445	45.614.015		56.780.460	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT II
	Dinas Kesehatan	364.180	27.910.660		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KEMANGGISAN
	Dinas Kesehatan	593.772	27.681.068		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR I
	Dinas Kesehatan	2.262	28.272.578		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA
	Dinas Kesehatan	2.192.997	93.941.459		96.134.456	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TOMANG
	Dinas Kesehatan	20.737.900	7.536.940		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KALIDERES II
	Dinas Kesehatan	19.785.602	36.764.078		56.549.680	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MERUYA UTARA
	Dinas Kesehatan	593.772	27.681.068		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR III
	Dinas Kesehatan	19.459.876	8.814.964		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN RAWA BUAYA
	Dinas Kesehatan	52.765.757	82.261.003		135.026.760	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
	Dinas Kesehatan	1.130.265	63.382.535		64.512.800	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KECAMATAN JAGAKARSA
	Dinas Kesehatan	504.423	27.770.417		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI
	Dinas Kesehatan	1.310.822	26.964.018		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI SELATAN
	Dinas Kesehatan	42.018	28.348.212		28.390.230	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MENTENG ATAS
	Dinas Kesehatan	1.597.802	26.792.428		28.390.230	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LEBAK BULUS
	Dinas Kesehatan	18.279.901	38.500.559		56.780.460	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PULO
	Dinas Kesehatan	716.570	27.673.660		28.390.230	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PINANG RANTI
	Dinas Kesehatan	78.040	28.196.800		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA WETAN
	Dinas Kesehatan	22.177.372	6.328.248		28.505.620	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CEGER
	Dinas Kesehatan	125.540	28.149.300		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LUBANG BUAYA
	Dinas Kesehatan	855.031	27.419.809		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN BIDARA CINA II
	Dinas Kesehatan	19.377.313	8.897.527		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CILILITAN

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kesehatan	422.992	27.851.848		28.274.840	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR
	Dinas Kesehatan	252.105	28.138.125		28.390.230	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KLENDER III
	Dinas Kesehatan	57.196	68.033.244		68.090.440	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JATINEGARA
	Dinas Kesehatan	2.268.773	65.821.667		68.090.440	-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri	Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas Di Provinsi DKI Jakarta-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN DUREN SAWIT
6	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	205.823.750		205.823.750		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Karsa Buana Lestari	Belanja Jasa Amdal
7	Sudin Pemuda dan Olah Raga - Jakbar	3.255.000		3.255.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	
8	PSAA Putra Utama 2	193.695.000		193.695.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMK Perintis Nasional	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017
	PSAA Putra Utama 2	67.855.000		67.855.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMP Perintis Nasional	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017
	PSAA Putra Utama 2	93.000.000		93.000.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMK Gunung Jati	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2015 s/d 2018
	PSAA Putra Utama 2	24.950.000		24.950.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMP Gunung Jati	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2015 s/d 2018
	PSAA Putra Utama 2	4.900.000		4.900.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMA Dharma Putra Jakarta	Biaya Pendidikan Per September 2017 an Suprianto Sagugubal
	PSAA Putra Utama 2	1.055.000		1.055.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMK Dharma Putra 1	Biaya Pendidikan Per September 2017 an Seljimus Setoreu
	PSAA Putra Utama 2	745.000		745.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMK Dharma Putra 2	Biaya Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018 an Yuda
	PSAA Putra Utama 2	1.010.000		1.010.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	Madrasah Tsanawiyah Al-Jihad	Biaya Pendidikan Per September Tahun Ajaran 2017/2018 an Arif Nur Bowo
9	PSAA Putra Utama 4	400.295.000		400.295.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Uswatun Hasanah dan SMP Uswatun Hasanah	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017
	PSAA Putra Utama 4	33.070.000		33.070.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SMA Nasional Nusantara Hasanah	Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017
10	PSP Bhakti kasih	39.933		39.933		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	BPJS Kesehatan Cleaning
11	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	531.245.000		531.245.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	RS	Klaim KB Gratis
	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4.213.100		4.213.100		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SAMSAT	Pajak KDO
12	Dinas Pendidikan	260.548.068		260.548.068		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	KPP	Hutang PBB Rumah Dinas Th 1993 s.d. 2016
	Dinas Pendidikan	56.222.550	3.945.442	60.167.992		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	KPP	Kurang catat Hutang PBB Rumah Dinas Th 1993 s.d. 2017
	Dinas Pendidikan		1.992.991.831			1.992.991.831	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT Virama Karya Persero	Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		78.223.200			78.223.200	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT Ganesha Piramida	Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		492.981.225			492.981.225	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT Adhikara Mitra Cipta	Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		18.865.000			18.865.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. ARIHTA TEKNIK PERSADA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Berasrama Di atas 10 Lanta
	Dinas Pendidikan		18.909.000			18.909.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. TAMBORA SETIA JAYA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SLBN di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		18.865.000			18.865.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. ARIHTA TEKNIK PERSADA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMPN di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		18.909.000			18.909.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. TAMBORA SETIA JAYA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMAN di DKI Jakarta
	Dinas Pendidikan		18.920.000			18.920.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. LARAS SEMBADA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 65 Jakarta Timur
	Dinas Pendidikan		18.920.000			18.920.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. LARAS SEMBADA	Perencanaan Dasar (Basic Design) Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan SMKN 65 Jakarta Timur
13	PPKD Jakarta Selatan	17.130.252		17.130.252		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS Kesehatan	Biaya BPJS Kesehatan 5% (Sebanyak 20 Jiwa)
14	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan - Jakbar	8.456.490		8.456.490		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	
15	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	3.748.700		3.748.700		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SAMSAT	Utang STNK KDO
16	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	2.244.306	2.200.800	1.194.506		3.250.600	Utang Belanja Jasa Non TALI	SAMSAT	Utang STNK KDO
17	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	7.754.000		7.754.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SAMSAT	Utang STNK KDO
18	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	10.082.000		10.082.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	SAMSAT	Utang STNK KDO
19	Kelurahan Penjaringan - Jakut	27.852.808		27.852.808		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	
20	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	11.175.357		11.175.357		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	Ali Santoso pemilik PT. Bumi Betawi Lestari	Utang atas Pembayaran Listrik Gedung Kantor Kelurahan (sewa) an PT Bumi Betawi Lestari yang telah dibayar oleh Pak Ali Santoso selaku pemilik PT Bumi Betawi Lestari melalui rekening pribadi Pak Ali.
21	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	72.000.000		72.000.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI		Uang penghargaan tahunan jumatik TA 2017 sebanyak 144 orang (kader jumatiki)
22	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	10.842.826	6.259.424	17.102.250		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Herpis Pertoma Mulla	hutang pihak ketiga DCKTRP atas persediaan bangunan PMI Jaksel (jasa pengawasan) sesuai BA Monitoring Bobot Pekerjaan Per 31 Desember 2017

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	99.619.096		99.619.096		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Virama Karya	Kekurangan pembayaran jasa konsultasi pengawasan pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingsungan PKF
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	28.959.212	6.863.663	35.822.875		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Komsha Akur Consult	hutang pihak ketiga DCKTRP atas KDP Pengawasan Pembangunan Sudinakertrans Jakarta Utara sesuai BA Monitoring Bobot Pekerjaan Per 31 Desember 2017
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		4.548.605			4.548.605	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Bayu Berlian Mandiri	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision). Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta (Progress Fisik: 96,29%)
23	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	56.737.692	117.304.308	174.042.000		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Arkonin	Jasa Pengawasan KDP
24	Kelurahan Klender - Jaktim	2.365.000				2.365.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	PT. Astra Graphia Tbk	Utang sewa Fotocopy
25	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	3.187.972		3.187.972		-	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	Utang BPJS Kesehatan atas 2 PHL Bin Juli s.d. Desember 2017
26	Kecamatan Makasar - Jaktim		22.360.000			22.360.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Lembaga Masyarakat Kelurahan	Utang kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan
27	Kelurahan Makasar - Jaktim		37.296.000			37.296.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Lembaga Masyarakat Kelurahan	Utang kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan
28	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim		16.000.000			16.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Lembaga Masyarakat Kelurahan	Utang kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan
29	Kecamatan Cengkareng - Jakbar		2.394.557			2.394.557	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	Utang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
30	Badan Pengelola Keuangan Daerah		3.100.834			3.100.834	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	
31	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim		166.416.074			166.416.074	Utang Belanja Jasa Non TALI	BPJS	Utang BPJS Kesehatan
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		11.000.000			11.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	Sanggar tari Pupa Lembayung Indonesia	Utang belanja jasa tenaga ahli (5 orang penari)
33	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut		63.000.000			63.000.000	Utang Belanja Jasa Non TALI	LMK	LMK
	JUMLAH UTANG BELANJA JASA NON TALI	3.092.555.883	5.553.333.587	2.587.274.133	2.567.170.125	3.491.445.212			
D	Utang Belanja TALI								
1	Unit Pengelola Rumah Susun Penjarangan	174.107.861		174.107.861		-	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Penggunaan air yang anggarannya tidak mencukupi
2	Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	174.127.016		174.127.016		-	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Kesalahan penagihan oleh PAM
3	Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek	417.286.200		417.286.200		-	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Penggunaan air yang anggarannya tidak mencukupi
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	49.618.477		49.618.477		-	Utang Belanja TALI		Utang Belanja TALI
5	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	106.359.681		106.359.681		-	Utang Belanja TALI	PT. Telkom Indonesia, Tbk	Utang Belanja TALI
6	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakbar	74.968.042		74.968.042		-	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Utang Belanja TALI (Air)
7	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	11.730.968	38.394.518	11.730.968		38.394.518	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Utang Belanja TALI (Air)
8	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	6.461.467		6.461.467		-	Utang Belanja TALI	PT. Telkom Indonesia, Tbk	Utang Belanja telepon
9	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	130.464.098				130.464.098	Utang Belanja TALI	PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)	Utang Tali (air pam) tahun 2004-2008 yang tagihannya baru diberikan oleh pihak PALYJA 20 September 2011
10	Kelurahan Semper Timur - Jakut	2.642.879		2.642.879		-	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
11	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	16.082.555		16.082.555		-	Utang Belanja TALI		Utang TALI Air tahun 2016 di bayarkan tgl 18 April 2017 *Utang TALI Air Bulan Agustus s.d. Desember 2017 (Bim Dibayarkan)
12	Kecamatan Cakung - Jaktim	15.358.107	13.834.537	29.192.644		-	Utang Belanja TALI		Penyediaan Jasa TALI (Belanja Air Bulan September s/d Desember 2017)
13	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat		72.766.970			72.766.970	Utang Belanja TALI	PT. Telkom Indonesia, Tbk	Utang Belanja TALI
14	Sudin Penanggulangan - Jakbar		24.000			24.000	Utang Belanja TALI	PT. Telkom Indonesia, Tbk	Utang Belanja TALI (INTERNET)
15	Sudin Kesehatan - Jakpus		32.773.394			32.773.394	Utang Belanja TALI	PT. PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
16	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu		12.530.996			12.530.996	Utang Belanja TALI	PT. PLN	Utang Belanja TALI
17	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		36.000.000			36.000.000	Utang Belanja TALI	PT. PLN	Utang Belanja TALI
18	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus		506.640			506.640	Utang Belanja TALI	PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)	Utang Belanja TALI
	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus		18.313.047			18.313.047	Utang Belanja TALI	PT. PLN	Utang Belanja TALI
19	Kelurahan Sunter Agung - Jakut		5.196.460			5.196.460	Utang Belanja TALI	PT. PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
21	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut		3.071.911			3.071.911	Utang Belanja TALI	PT. PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
22	Kecamatan Makasar - Jaktim		7.874.324			7.874.324	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
23	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim		2.901.479			2.901.479	Utang Belanja TALI	Aetra PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
24	Kelurahan Pekojan - Jakbar		50.788.323			50.788.323	Utang Belanja TALI	PT. PAM	Utang Belanja TALI (AIR)
	JUMLAH UTANG BELANJA TALI	1.179.207.351	294.976.595	1.062.577.790	-	411.606.160			
E	Utang Belanja Pemeliharaan								
1	Dinas Bina Marga	65.010.000				65.010.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Arga Bhuna Cipta Consultant	Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 1,4,5 (Konsultasi)
	Dinas Bina Marga	58.719.000				58.719.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati	Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 6,7,8 (Konsultasi)
	Dinas Bina Marga	59.607.900				59.607.900	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Cinipta Triutama Jaya	Perbaikan/Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 9,10,11,12 (Konsultasi)
	Dinas Bina Marga	166.624.029				166.624.029	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Henpriz	Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Cempaka Mas)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Bina Marga	194.307.993				194.307.993	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Tamena Efando Berkarya	Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Ajinomoto)
	Dinas Bina Marga	196.035.873				196.035.873	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Philamella Berkat	Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (CINNP)
2	Sudin Bina Marga - Jarkpus	948.554.138				948.554.138	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Probingindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administrasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan)
	Sudin Bina Marga - Jarkpus	640.171.977				640.171.977	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Lampiri Djaya Abadi	Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemoyoran dan sawah besar (Jl. Tembaga2, campakasan 1, campaka baru tengah 1/2 campaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya,
	Sudin Bina Marga - Jarkpus	1.519.630.788				1.519.630.788	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Probingindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4)
	Sudin Bina Marga - Jarkpus	2.001.723.660				2.001.723.660	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Intan Sari Mank Perkasa	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4)
	Sudin Bina Marga - Jarkpus	1.378.824.875				1.378.824.875	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Arjuna Haranggaol Mandiri	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	952.677.901	864.611.088	1.817.288.989	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Marunda
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	234.385.884	149.140.826	383.526.710	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Muara Baru
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	295.266.338	690.215.374	985.481.712	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	149.932.419	611.389.764	761.322.183	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Penjaringan
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	506.398.961	581.401.908	1.084.094.972	3.705.897	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Tipar Cakung
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	308.415.085	426.250.088	699.050.145	35.615.028	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pinus Elok
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	492.152.537	591.495.729	1.083.648.266	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Komarudin
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	786.048.285	1.295.798.936	2.081.847.221	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Besar Selatan
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	182.980.991	2.452.547.692	2.635.528.683	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulo Gebang
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	192.467.479	2.043.763.569	2.236.231.048	-	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PADIMUN GOLDEN	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Muara
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		635.725.723	-	-	635.725.723	Utang Belanja Pemeliharaan	PT AULIA MULTI SARANA-PT PAHIMPU MAS (KSO)	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		156.158.256	-	-	156.158.256	Utang Belanja Pemeliharaan	PT METRO KREASI INDOTEAKNIK	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		287.234.750	-	-	287.234.750	Utang Belanja Pemeliharaan	PT METRO KREASI INDOTEAKNIK	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot
4	Dinas Sumber Daya Air	60.082.875				60.082.875	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dwi Eltis Konsultan	Penanggulungan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI Jakarta, Inlet Waduk Sunter III (PHB Layan), Inlet Waduk Tomang, Inlet Waduk Rumah Tomang Barat, Inlet Rumah Pompa Bendungan Melayu, Inlet Pompa Bimoli (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	39.013.425				39.013.425	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Daya Cipta Dianrancana	Pengerukan Waduk Pluit (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	68.259.070				68.259.070	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Jasakon Putra Utama	Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	14.795.000				14.795.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Delima Laksana Tata	Peningkatan saluran Jl. Kapuk Poglar (penyelesaian Kampung Teko) (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	25.742.072				25.742.072	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dwi Eltis Konsultan	Perbaikan kekuatan tebing dan pengerukan Kali Utan Kayu (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	932.561.891				932.561.891	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Asa Jaya Amalia	Pemeliharaan situ-situ dan waduk retensi di Provinsi DKI Jakarta (fisik)
	Dinas Sumber Daya Air	25.551.895				25.551.895	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Gihon Wahana Cipta	Pemeliharaan situ-situ dan waduk retensi di Provinsi DKI Jakarta (pengawasan)
	Dinas Sumber Daya Air	36.811.000				36.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasan pengerukan waduk Kelapa Dua Wetan & RW Dongkal
	Dinas Sumber Daya Air	36.811.000				36.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	1.617.103.500				1.617.103.500	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar
	Dinas Sumber Daya Air	36.894.000				36.894.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Pengerukan Situ Kodamar & K. IKIP
	Dinas Sumber Daya Air	36.894.000				36.894.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	1.367.292.000				1.367.292.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal
	Dinas Sumber Daya Air	1.366.470.000				1.366.470.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong
	Dinas Sumber Daya Air	36.729.000				36.729.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Abdi Nusa Kresni	Pengawasan Pengerukan situ mangga bolong
	Dinas Sumber Daya Air	36.729.000				36.729.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Andira Kaya Persada	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	36.663.000				36.663.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Pengerukan Kali Cipinang
	Dinas Sumber Daya Air	36.663.000				36.663.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	875.688.000				875.688.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan Kali IKIP
	Dinas Sumber Daya Air	1.192.524.125				1.192.524.125	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Wibawa Tata Rizky	Pelaksanaan pengerukan Kali Semongol
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Pengerukan Kali Semongol
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Dumping site

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Pengerukan Waduk Setiabudi Timur
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	17.894.250				17.894.250	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dafra Brother Cons	Pengawasan Pengerukan waduk Tomang Barat
	Dinas Sumber Daya Air	18.321.000				18.321.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Abdi Nusa Kresai	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	18.438.750				18.438.750	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sekepar Bilkon	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Selatan
	Dinas Sumber Daya Air	18.141.750				18.141.750	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	47.553.000				47.553.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Andira Karya Rusada	Pengawasan Pengerukan Kali Sodetan Sekretaris
	Dinas Sumber Daya Air	47.982.000				47.982.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	48.378.000				48.378.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Pengerukan Kali Grogol
	Dinas Sumber Daya Air	47.718.000				47.718.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Dafra Brother Cons	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	47.982.000				47.982.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Pengerukan Kali Mookervart
	Dinas Sumber Daya Air	47.982.000				47.982.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Arenco Centra	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	4.145.043.375	1.241.908.328			5.386.951.703	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Bangun Makmur Utama	Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara
	Dinas Sumber Daya Air	36.811.000				36.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Utara
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	36.894.000				36.894.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Pengerukan Kali Pademangan
	Dinas Sumber Daya Air	36.894.000				36.894.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	1.105.677.750				1.105.677.750	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan Kali Duri
	Dinas Sumber Daya Air	36.300.000				36.300.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Pengerukan Kali Duri
	Dinas Sumber Daya Air	36.003.000				36.003.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	291.398.250				291.398.250	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Tungkir Jaya	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	443.959.125				443.959.125	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Malaka Jaya Indah	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
	Dinas Sumber Daya Air	13.811.000				13.811.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	49.203.000				49.203.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Cakung Drain
	Dinas Sumber Daya Air	49.203.000				49.203.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Dumping site
	Dinas Sumber Daya Air	190.984.000				190.984.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Tri Cahaya Artha	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan waduk pluit.
	Dinas Sumber Daya Air	191.924.000				191.924.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Melia Hutama Pande	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan spill way waduk pluit
	Dinas Sumber Daya Air	192.141.000				192.141.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Kapezta Multi Mandiri	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan kali pakin
	Dinas Sumber Daya Air	145.910.000				145.910.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan waduk pluit.
	Dinas Sumber Daya Air	76.813.000				76.813.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Cahaya Erna Abadi	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan spill way waduk pluit
	Dinas Sumber Daya Air	192.141.000				192.141.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Hosindo Indah Perkasa	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan kali pakin
	Dinas Sumber Daya Air	168.850.000				168.850.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan Kali angke Budha Suci.
	Dinas Sumber Daya Air	599.279.600				599.279.600	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. MELIA HUTAMA PANDE	1.03.08.021 pengadaan Bahan Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Aliran Barat
	Dinas Sumber Daya Air	145.776.000				145.776.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. CHILETAMA INDIRAWIRASTA	Perbaikan Tutup Saluran Ji. Inpres s.d Ji. Hadiah 1
	Dinas Sumber Daya Air	138.466.000				138.466.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT.ARIARA SANGGIGI RAYA	Perbaikan Tutup Saluran Ji. Indraloka 2
	Dinas Sumber Daya Air	179.812.000				179.812.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV.PIONIR DHARMA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 9 (Pekerjaan Pengecatan Gedung Pompa Tarjungan, Pengecatan Rumah Genset Pompa Pluit)
	Dinas Sumber Daya Air	154.689.000				154.689.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV.SOLUMAS JAYA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 17 (Pekerjaan Pengecatan Pompa Daan Mogot Km. 13 dan Pekerjaan Pengecatan Pompa Jalan Batuk)
	Dinas Sumber Daya Air	137.275.000				137.275.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 2 (Pekerjaan Perbaikan Rumah (Pompa Taman Ratu
	Dinas Sumber Daya Air	154.710.000				154.710.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. MATA RADIA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 20 (Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga dan Rumah Generator Sets Pompa Depag, Rumah Jaga Wijaya Kusuma dan Rumah Pompa Kedoya).
	Dinas Sumber Daya Air	174.510.000				174.510.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Sindo Purnama Jaya	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 18 (Pekerjaan Pengecatan Gedung Pompa, Rumah Jaga, Rumah Panel, Gedung Generator Sets dan Gedung Trafo Pompa Junction)
	Dinas Sumber Daya Air	156.690.000				156.690.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. Fajar Bersinar	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 19 (Pekerjaan Pengecatan Gedung Pompa, Rumah Panel, Rumah Generator Sets dan Rumah Trafo Pompa Tomang Barat)
	Dinas Sumber Daya Air	100.213.000				100.213.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV.HENDRY PUTRA ANDALAN	Pembetonan Bor Pile Kali Baru Timur Lokasi 1 Sampung Jembatan Comesko RT 04/Rw 01
	Dinas Sumber Daya Air	95.449.000				95.449.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. SIMPANG TIGA PERMAI	Pembetonan Bor Pile Kali Baru Timur Lokasi 3 Depan Masjid RT 01
	Dinas Sumber Daya Air	109.779.000				109.779.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. KAPEZTA MULTI MANDIRI	Pembetonan Bore Pile Kali Baru Timur Lokasi 4 Depan Toko H. Wawan
	Dinas Sumber Daya Air	126.398.000				126.398.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PAHALA MILIK ABADI	Perbaikan Turap Kali Baru Timur Lokasi 1 Sampung Jembatan Comesko RT 04 RW 01
	Dinas Sumber Daya Air	120.051.000				120.051.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. BRONI BERKARYA KIAN SENSOTA	Perbaikan Turap Kali Baru Timur Lokasi 3 Depan Masjid RT 001 RW 001
	Dinas Sumber Daya Air	100.212.000				100.212.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT.BERLIAN KENCANA SEIAHTERA	Pembetonan Bor Pile Turap Saluran Ji. Jalitnegera Kaum Depan PDAM Sampung Jembatan
	Dinas Sumber Daya Air	121.078.000				121.078.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. MATUMONA	Perbaikan Turap Kali PHB IKIP
	Dinas Sumber Daya Air	196.433.000				196.433.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. SANTIKA JAYA ABADI	Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Saluran Rawa Domba
	Dinas Sumber Daya Air	197.971.000				197.971.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. CIPTA GRAHA NUSANTARA	Pekerjaan Bore Pile Kali Baru Timur Lokasi 1 Sampung Jembatan Comesko RT. 04 RW.001
	Dinas Sumber Daya Air	197.971.000				197.971.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. SANTIKA JAYA ABADI	Pekerjaan Bore Pile Kali Baru Timur Lokasi 4 Depan Toko H. Wawan
	Dinas Sumber Daya Air	197.971.000				197.971.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. NURI CITRA UTAMA	Pekerjaan Bore Pile Turap Kali Jalitnegera Kaum Depan PDAM Sampung Jembatan
	Dinas Sumber Daya Air	194.511.000				194.511.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT.CIPTA SAGITA UTAMA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 10 (Pekerjaan Pembuatan Pagar Pengaman Inlet Pompa Sunter Utara
	Dinas Sumber Daya Air	189.484.000				189.484.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. MARVIC LUMONGGA INDAH	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 15 (Pekerjaan Pengecatan Gedung Pompa Sunter Kirana dan Gedung Pompa Sunter Selatir

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Sumber Daya Air	151.630.000				151.630.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. MATA RADJA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga 14 (Pekerjaan Peningkatan Bangunan Rumah Pompa / Rumah Jaga Pompa Cawang Wika dan Aneka Elok
	Dinas Sumber Daya Air	165.057.000				165.057.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. BONA SIMBOL SEJAHTERA	Pek. Angkutan dengan Dump Truck untuk mengangkut hasil pengerukan di Saringan Perintis Kemendekaan (Sewa Dump Truck
	Dinas Sumber Daya Air	1.308.000.000				1.308.000.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. IMEMBA CONTRACTORS	Peningkatan Pompa Bidara Cina
	Dinas Sumber Daya Air	5.964.994.743				5.964.994.743	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. IMEMBA CONTRACTORS	Pengadaan Suku Cadang Pompa (Sisa Tagihan)
	Dinas Sumber Daya Air	198.973.000				198.973.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. ALFARABI NUGRAHA	Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran Al-Barkah sisi kanan
	Dinas Sumber Daya Air	179.154.000				179.154.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran Al-Barkah sisi kiri
	Dinas Sumber Daya Air	189.036.000				189.036.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. AUANI SETIA ABADI	Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Saluran PHB Kopo
	Dinas Sumber Daya Air	101.659.000				101.659.000	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. HENDRY PUTRA ANDALAN	Pelaksanaan Pekerjaan Kuras Lumpur Saluran Jl. Krendang Selatan (dari Jl. K.H. Moeh Nasyur s/d Masjid Mamb'u'l
	Dinas Sumber Daya Air	174.515.900				174.515.900	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	Pelaksanaan Pekerjaan Kuras Lumpur Saluran Jl. Krendang Selatan (dari Masjid Mamb'u'l s/d Krendang Barat
	Dinas Sumber Daya Air	197.170.000				197.170.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. HORHON INDAH	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa/Rumah Jaga 5 (Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga 1 Pompa Pluit)
	Dinas Sumber Daya Air	195.300.000				195.300.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. WABARI SESTINDO	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa/Rumah Jaga 6 (Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga 2 Pompa Pluit)
	Dinas Sumber Daya Air	197.610.000				197.610.000	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. DAYU NUSANTARA	Pekerjaan Perbaikan Bangunan Rumah Pompa/Rumah Jaga 16 (Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga 3 Pompa Pluit)
	Dinas Sumber Daya Air	1.710.237.985		1.600.999.985	109.238.000	-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. Asiana Technologies Lestari	Pembangunan dan Peningkatan sistem Polder Aliran Barat Prov.DKI Jakarta
5	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	196.585.306		196.585.306		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. KARANG UNARANG JAYA	Hutang Pihak ke III TA 2014 Pembangunan dan Peningkatan Sal.Jl. Bambu Mas Raya + Phb Sibolga (Samping SD 10 dan SMPN 202) Kel. Pondok Bambu
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	48.344.178		48.344.178		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. AKSA LESTARI SEJATI	Hutang Pihak ke III TA 2013-002. Peningkatan Saluran Jl. Bambu Mas Raya
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	119.524.356		119.524.356		-	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. JADI JAYA BERSAMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-010. Normalisasi Sal.Jl. Condet Raya, Jl. Batu Ampar I dan Jl. Budaya
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	223.214.093		223.214.093		-	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. FORTITO BARITO	Hutang Pihak ke III TA 2013-046. Pembangunan Sal. Jl. SMU 64 Cipayang dan Normalisasi Sal. Jl. Raya Cipayang dan Crossing Urindo
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	59.729.468		59.729.468		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. ARTAGUNA MANDIRI	Hutang Pihak ke III TA 2013-021. Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 3.5 Kelurahan Bambu Apus
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	226.276.875		226.276.875		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. JABAT JAYA UTAMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-070. Peningkatan Sal. Phb. Cibening Area Tinja Cakung s.d Kali Cakung Lama + Sat. Phb Pulo Halmahera s.d kali Cakung
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	50.140.140		50.140.140		-	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. MITRA PAHAE	Hutang Pihak ke III TA 2013-001 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di Kelurahan Kampung Rambutan
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	72.785.962		72.785.962		-	Utang Belanja Pemeliharaan	CV. PUTRA SIAMPUDAN	Hutang Pihak ke III TA 2013-002 Pembuatan Saluran Lokasi Jl. SPG 7 RW 09, Jl. Manunggal XVII RW 011 dan RT 001, 002, 003, 004
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	105.913.551		105.913.551		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. CIAMOSSAD IRANI PRIMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-044 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1, 3 Kel. Kebon Manis
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	395.413.978		395.413.978		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. LAMPUNG TEGAR CEMERLANG	Hutang Pihak ke III TA 2013-045 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1, 2,3,4,5,6,7,8, 11, 12, 14, 15 Kelurahan Pisangan Timu
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	148.908.882		148.908.882		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. LAMPUNG TEGAR CEMERLANG	Hutang Pihak ke III TA 2013-062 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 2,4,6,9,17,18 Kel. Penggilingan
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	35.189.722		35.189.722		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. GIHON WAHANA CIPTA	Hutang Pihak ke III TA 2013-002. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona I (Jasa Konsultansi)
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	11.539.299		11.539.299		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. KENCANA BIRU ENGINEERING	Hutang Pihak ke III TA 2013-004. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona III (Jasa Konsultansi)
	Sudin Sumber Daya Air - Jaktim	5.565.409		5.565.409		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT. PRATIWI ADHIGUNA KONSULTAN	Hutang Pihak ke III TA 2013-010. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona IV (Jasa Konsultansi)
6	Sudin Lingkungan Hidup - Jakut	33.385.928		33.385.928		-	Utang Belanja Pemeliharaan	PT SETIAKAWAN PAHALA MOTOR	Kode Kegiatan (1.03.10.012 Pemeliharaan Alat Angkut Kebersihan), Kode Rekening (5.2.2.20.05.006 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkut Darat Bermotor Truck), Jasa Pemeliharaan ATPM Mitsubishi TA 2017
7	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaktim		38.039.867			38.039.867	Utang Belanja Pemeliharaan	PT Prabu Abdi Mulia	Pemeliharaan Gedung Rumah Susun
	JUMLAH UTANG BELANJA PEMELIHARAAN	43.347.014.591	12.065.681.898	17.101.537.061	148.558.925	38.162.600.503			
F	Utang Belanja Perjalanan Dinas								
1	Biro Administrasi Sekretariat Daerah		2.037.180.799			2.037.180.799	Utang Belanja Perjalanan Dinas	PNS Pemprov DKI Jakarta	Uang harian dan transport peserta perjalanan dinas
	Jumlah Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	2.037.180.799	-	-	2.037.180.799			
G	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta								
1	Dinas Kesehatan	5.813.920.000	21.223.850.000	26.514.870.000	522.900.000	-	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov	PMI	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta
	JUMLAH UTANG BELANJA KEPADA LEMBAGA MEDIS DI LUAR PEMPROV DKI JAKARTA	5.813.920.000	21.223.850.000	26.514.870.000	522.900.000	-			
H	Utang Belanja Modal Tanah								
1	Dinas Bina Marga	157.180.380		157.180.380		-	Utang Belanja Modal Tanah	Notaris	Biaya Pembuatan Akta Pelepasan Hak
2	Dinas Kehutanan		36.495.300			36.495.300	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Mesjid Nurul Hidayah RT.006 RW.006 Kel.Cipayang Kec.Cipayang, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		17.630.048			17.630.048	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Lingkungan II RT.011/RW.003 Kel.Kamal Kec.Kalideres, Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		11.170.422			11.170.422	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Kramat RT.004/RW.02 Kel.Lubang Buaya Kec. Cipayang, Jakarta Timur

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kehutanan		11.869.930			11.869.930	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.PKP RT.010/RW.04 No.63 Kel Cipanas Kec Cipanas, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		12.744.300			12.744.300	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Pangkalan Jati VII RT.009/RW.09 Kel Cipinang Melayu, ec.Makasar, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		20.078.410			20.078.410	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Curug Indah RT.003/08 Kel Cipinang Melayu Kec Makasar, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		18.329.590			18.329.590	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman kampung Kandang Besar RT.003/RW.04 Kel Ujung Menteng, Kec Cakung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		14.318.300			14.318.300	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT.002/RW.03 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		12.569.486			12.569.486	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Jankes RT.007/RW.002 Kel Munjul Kec Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		15.367.614			15.367.614	Utang Belanja Modal Tanah	PT. IBO MAKMUR AGUNG	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Dukuh RT.013/RW.04 Kel Dukuh Kec Kramat Jati, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		12.218.600			12.218.600	Utang Belanja Modal Tanah	CV. RAMSINA MANDIRI JAYA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Raya Cilangkap RT.007/04 Kel Cilangkap Kec Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		23.040.376			23.040.376	Utang Belanja Modal Tanah	CV. RAMSINA MANDIRI JAYA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl.Musholah RT.009/RW.09 Kel Tengah Kec Kramat Jati, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Beringin Rt.04/02 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT.002 RW.01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Bambu Wulung RT.009 RW.005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Palembang Kartika No.21 Kelurahan Bambu Apus
	Dinas Kehutanan		2.377.200			2.377.200	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman jalan Mandor Hasan (Tama Indraloka) Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Dewi Sartika No.17A Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Raya Blok M 1 Komplek Green Garden Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		1.018.800			1.018.800	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Daan Mogot No. 15 RT 006 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan grogol Petamburan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		1.358.400			1.358.400	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Kampung Belakang RT.003 RW.003 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Sahabat Kampung Belakang RT.001 RW.03 Kelurahan Kamal Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		3.396.000			3.396.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Gombol Paya RT.007/13 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		9.169.200			9.169.200	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Perumahan Puri Gardenia II RT.007 RW.001 Kelurahan Pegadungan Kecamatan kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		1.698.000			1.698.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Utan Kayu Raya RT.012/05 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Beringin Rt.04/02 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT.002 RW.01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Bambu Wulung RT.009 RW.005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Palembang Kartika No.21 Kelurahan Bambu Apus
	Dinas Kehutanan		13.548.000			13.548.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman jalan Mandor Hasan (Tama Indraloka) Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Dewi Sartika No.17A Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		13.548.000			13.548.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Raya Blok M 1 Komplek Green Garden Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Daan Mogot No. 15 RT 006 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan grogol Petamburan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Kampung Belakang RT.003 RW.003 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Sahabat Kampung Belakang RT.001 RW.03 Kelurahan Kamal Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		13.548.000			13.548.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Setu Raya No.2 RT.002 RW.007 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT.005 RW.02 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Jankes RT.007 RW.002 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		9.032.000			9.032.000	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RTH Hutan Kampung Baru Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RTH Hutan Kampung Baru Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		11.206.800			11.206.800	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT. 008 RW.03 Kelurahan Setu kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.377.200			2.377.200	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Setu Raya No 2 RT.002 RW.007 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.037.600			2.037.600	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT.005 RW.02 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		1.358.400			1.358.400	Utang Belanja Modal Tanah	CV. ANISSA MULIA ABADI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jalan Jankes RT.007 RW.002 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		40.644.000			40.644.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. LANGGENG DWI PERSADA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman RT. 008 RW.03 Kelurahan Setu kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		13.548.000			13.548.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. LANGGENG DWI PERSADA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman kampung Gombol Paya RT.007 RW.013 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		13.548.000			13.548.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. LANGGENG DWI PERSADA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Perumahan Puri Gardenia II RT.007 RW.001 Kelurahan Pegadungan Kecamatan kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		4.516.000			4.516.000	Utang Belanja Modal Tanah	PT. LANGGENG DWI PERSADA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Utan Kayu Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Pangkalan Jati RT.009/09 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Poltangan Raya RT.009/05 Kelurahan Tanjung barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Setu Cipayung RT. 008 RW.03 Kelurahan Setu kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Pratama RT.002 RW.03 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Sepakat RT.004/10 Kelurahan kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Bambu Wulung 2 RT.010/05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Mandor hasan RT.005/04 Kelurahan ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Bangso Raya RT.008/03 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Cipadak III RT.005/09 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Raya Margasatwa Gg h Beden RT.010/02 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Raya Margasatwa RT.010/02 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. NIS RT.004/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Setu Raya No 2 RT.002 RW.007 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Kampung Belakang RT.003 Rw.003 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Gintung RT.006/06 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan jagakarsa Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Wika RT.008/06 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Sirsak Ujung RT.003/07 Kelurahan Ciganjur Kecamatan jagakarsa Jakarta Selatan
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Antariksa 1 RT.009/02 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				5	6				
1	2	3	4			7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Daan Mogot No.14-1 RT.006/01 Kelurahan Tanjung Duren Utara kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Gombol Paya RT.007/13 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Raya Blok M 1 Komplek Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
	Dinas Kehutanan		2.811.545			2.811.545	Utang Belanja Modal Tanah	PT. BINA MITRA WAHANA	Biaya pembebasan Tanah Sarana Umum Taman Jl. Utan Kayu Raya RT.012/05 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		11.519.100			11.519.100	Utang Belanja Modal Tanah	CV. RAMSINA MANDIRI JAYA	Biaya pembebasan Tanah Makam Kp.Rawadas RT.005/RW.03 Kel.Pondok Kopi Kec Duren Sawit, Jakarta Timur
	Dinas Kehutanan		25.484.524			25.484.524	Utang Belanja Modal Tanah	CV. RAMSINA MANDIRI JAYA	Biaya pembebasan Tanah Makam Jl.SMP Negeri 160 Ceger RT.002/005 Kel.Ceger Kec.Cipayung, Jakarta Timur
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL TANAH	157.180.380	546.660.390	157.180.380	-	546.660.390			
I	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
1	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	5.592.510.000		5.592.510.000		-	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PT. Sae Mitra Sejati	Pengadaan alat uji kendaraan bermotor
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		8.514.000	8.514.000		-	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	CV. Mutiara Karya Utama	Dispenser Merek Sharp
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		1.490.500	1.490.500		-	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	CV. Mutiara Karya Utama	Mesin Poles Merek RYU
3	Sudin Sumber Daya Air - Jakbar		12.940.400.000			12.940.400.000	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PT BIMASAKTI UNITAMA	Belanja Modal Pengadaan Pompa Mobile dan kelengkapannya
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU		57.788.500			57.788.500	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PT. MINIMAX SEJAHTERA MANDIRI	Belanja Pengaluan Hepa Filter
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.592.510.000	13.008.193.000	5.602.514.500	-	12.998.188.500			
J	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
1	Dinas Perumahan	11.393.256.107	3.856.097.493	15.249.353.600		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ABIPRAYA - NATABAMA	Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)
	Dinas Perumahan	97.580.295	60.546.905	158.127.200		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. ARKONIN	Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)
	Dinas Perumahan	12.691.811.991	11.229.594.883	23.921.406.874		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. HUTAMA KARYA (Persero)	Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)
	Dinas Perumahan	125.463.951	121.867.749	247.331.700		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years)
	Dinas Perumahan	7.478.541.910	179.342.612	7.657.884.522		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO WIKA - CAKRA	Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (Multi Years)
	Dinas Perumahan	135.225.750	10.964.250	146.190.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (Multi Years)
	Dinas Perumahan	18.991.285.676	94.344.415.594	113.335.701.270		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	TOTALINDO EKA PERSADA - ARTEFAK ARKINDO KSO	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1 - 5, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	294.536.957	1.463.193.043	1.757.730.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1 - 5, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	16.534.511.520	27.346.888.480	43.881.400.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ADHI - JAYA KONSTRUKSI - PENTA KSO	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 - 10, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	259.307.086	428.875.201	688.182.287		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 - 10, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	7.769.263.356	27.755.489.072	35.524.752.428		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11 - 14, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	104.623.330	373.764.095	478.387.425		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. PROSYS BANGUN PERSADA	Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11 - 14, Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	6.454.653.480	29.766.746.520	36.221.400.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ADHI - JAYA KONSTRUKSI - ARKONIN	Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	98.766.108	455.476.922	554.243.030		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO BENNATIN SURYA CIPTA - GIHON WAHANA CIPTA	Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Jakarta Utara
	Dinas Perumahan	7.763.129.237	69.004.527.003	76.767.656.240		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	TOTALINDO EKA PERSADA - ARTEFAK ARKINDO KSO	Pembangunan Rumah Susun Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timu dan Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
	Dinas Perumahan	126.288.945	1.122.551.055	1.248.840.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. YODYA KARYA	Pembangunan Rumah Susun Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timu dan Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
	Dinas Perumahan	7.615.036.016		7.615.036.016		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ABADI PRIMA INTIKARYA - LEOTUNGKAL - ANDALAN KSO	Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat
	Dinas Perumahan	135.799.664		135.799.664		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. VIRAMA KARYA (Persero)	Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat
	Dinas Perumahan	58.606.240		58.606.240		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok
	Dinas Perumahan	1.805.185.600		1.805.185.600		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. NUANSATAMA KARYA	Penyelesaian Pembangunan Masjid Di Rumah Susun Pulo Gebang
	Dinas Perumahan	6.619.709.779		6.619.709.779		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-CAKRA KSO	Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (Multi Years)
	Dinas Perumahan	6.380.658.878		6.380.658.878		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. HUTAMA KARYA (persero)	Pembangunan Rumah Susun Rusun BLK Pasar Rebo Tower 2 (Multi Years)
	Dinas Perumahan	3.193.901.541		3.193.901.541		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-CAKRA KSO	Pembangunan Rumah Susun Rusun Lokbin Tegal Alur (Multi Years)
	Dinas Perumahan	4.659.794.975		4.659.794.975		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (persero)	Pembangunan Rumah Susun Rusun Lokbin Rawa Buaya Towe 3,4,5 (Multi Years)
2	Dinas Kehutanan	5.535.750.091				5.535.750.091	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Odorma Tiara Handayani	Utang Daerah 10.013 / Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim
3	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	510.798.299	469.620.701	980.419.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Rembiga Indah	Kekurangan pembayaran jasa konsultansi pengawasan pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKF
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	8.545.347.470		8.545.347.470		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Wika Gedung	Kekurangan pembayaran jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKF

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		229.241.268			229.241.268	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Rosa Lisca	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMFKB Provinsi DKI Jakarta (Progress Fisik: 96,29%);
4	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	18.424.083		18.424.083		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Bayu Berlian Mandiri	Konsultasi Pengawasab-Lanjutan Pembangunan Gedung UPRPD Duren Sawit (Termin 4)
	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	662.782.000		662.782.000		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pugabot Jaya Abadi	Lanjutan Pembangunan Gedung UPRPD Duren Sawit (Termin)
5	Dinas Kesehatan	1.168.447.235	2.467.045.094	3.635.492.329		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
	Dinas Kesehatan	64.416.123	1.437.825.548	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON SIRIH
	Dinas Kesehatan	28.782.950	1.473.458.721	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON MELATI
	Dinas Kesehatan	1.165.245.533	344.765.784	1.510.011.317		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR
	Dinas Kesehatan	859.385.906	1.806.864.735	2.666.250.641		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PASAR BARU
	Dinas Kesehatan	11.837.664	1.490.404.007	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR
	Dinas Kesehatan	381.449.205	2.623.034.137	3.004.483.342		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT III
	Dinas Kesehatan	23.074.432	1.479.167.239	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KALIBARU
	Dinas Kesehatan	593.917.651	2.426.104.983	3.020.022.634		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT II
	Dinas Kesehatan	19.348.874	1.482.892.797	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KEMANGGISAN
	Dinas Kesehatan	31.547.075	1.470.694.596	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR I
	Dinas Kesehatan	120.179	1.502.121.492	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA
	Dinas Kesehatan	116.513.864	4.991.107.816	7.219.621.680		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TOMANG
	Dinas Kesehatan	1.101.804.131	400.437.540	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KALIDERES II
	Dinas Kesehatan	1.051.208.631	1.953.274.711	3.004.483.342		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MERUYA UTARA
	Dinas Kesehatan	31.547.075	1.470.694.596	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR III
	Dinas Kesehatan	1.033.902.808	468.338.863	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN RAWA BUAYA
	Dinas Kesehatan	2.821.239.595	4.398.269.065	7.219.508.660		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
	Dinas Kesehatan	60.368.221	3.385.306.473	3.445.674.694		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KECAMATAN JAGAKARSA
	Dinas Kesehatan	26.799.991	1.475.441.680	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI
	Dinas Kesehatan	69.643.924	1.432.597.747	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI SELATAN
	Dinas Kesehatan	2.234.817	1.507.776.500	1.510.011.317		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MENTENG ATAS
	Dinas Kesehatan	84.983.437	1.425.027.880	1.510.011.317		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LEBAK BULUS
	Dinas Kesehatan	972.266.087	2.047.756.547	3.020.022.634		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PULO
	Dinas Kesehatan	38.112.686	1.471.898.631	1.510.011.317		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PINANG RANTI
	Dinas Kesehatan	4.146.188	1.498.095.483	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA WETAN
	Dinas Kesehatan	1.178.728.405	336.346.666	1.515.075.071		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CEGER
	Dinas Kesehatan	6.669.953	1.495.571.718	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LUBANG BUAYA
	Dinas Kesehatan	45.427.788	1.456.813.883	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN BIDARA CINA II
	Dinas Kesehatan	1.029.516.262	472.725.409	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CILILITAN
	Dinas Kesehatan	22.473.535	1.479.768.136	1.502.241.671		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR
	Dinas Kesehatan	13.408.900	1.496.602.417	1.510.011.317		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KLENDER III
	Dinas Kesehatan	3.053.814	3.632.438.625	3.635.492.439		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JATINEGARA
	Dinas Kesehatan	121.134.608	3.514.357.831	3.635.492.439		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Nindya-LTMKSO	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN DUREN SAWIT
	Dinas Kesehatan	275.263.555	9.959.104.160	10.234.367.715		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pracetak KSO PT. Hana Huberta	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cipayung
	Dinas Kesehatan	1.059.584.558	9.174.783.157	10.234.367.715		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pracetak KSO PT. Hana Huberta	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kebayoran Lama

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kesehatan	887.391.208	9.347.801.507	10.235.192.715		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pracetak KSO PT. Hana Huberta	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kramat Jati
	Dinas Kesehatan	723.357.938	43.717.969.359	42.192.548.683	2.248.778.614	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pracetak KSO PT. Hana Huberta	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cilincing
	Dinas Kesehatan	854.709.248	10.325.560.322	11.180.269.570		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Pracetak KSO PT. Hana Huberta	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Koja
	Dinas Kesehatan		68.090.385		68.090.385	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON SIRIH
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KEBON MELATI
	Dinas Kesehatan		28.390.230		28.390.230	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR
	Dinas Kesehatan		50.086.850		50.086.850	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PASAR BARU
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR
	Dinas Kesehatan		56.549.680		56.549.680	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT III
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KELURAHAN KALIBARU
	Dinas Kesehatan		56.780.460		56.780.460	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN SEMPER BARAT II
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KEMANGGISAN
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR I
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA
	Dinas Kesehatan		96.134.456		96.134.456	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TOMANG
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KALIDERES II
	Dinas Kesehatan		56.549.680		56.549.680	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MERUYA UTARA
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR III
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN RAWA BUAYA
	Dinas Kesehatan		135.026.760		135.026.760	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
	Dinas Kesehatan		64.512.800		64.512.800	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-PEMBANGUNAN PUSKESMAS KECAMATAN JAGAKARSA
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI SELATAN
	Dinas Kesehatan		28.390.230		28.390.230	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN MENTENG ATAS
	Dinas Kesehatan		28.390.230		28.390.230	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LEBAK BULUS
	Dinas Kesehatan		56.780.460		56.780.460	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PULO
	Dinas Kesehatan		28.390.230		28.390.230	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN PINANG RANTI
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA WETAN
	Dinas Kesehatan		28.505.620		28.505.620	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CEGER
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN LUBANG BUAYA
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN BIDARA CINA II
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CILILITAN
	Dinas Kesehatan		28.274.840		28.274.840	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR
	Dinas Kesehatan		28.390.230		28.390.230	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KLENDER III
	Dinas Kesehatan		68.090.440		68.090.440	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN JATINEGARA
	Dinas Kesehatan		68.090.440		68.090.440	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Rehab Total Gedung Puskesmas-REHAB TOTAL PUSKESMAS KECAMATAN DUREN SAWIT
	Dinas Kesehatan		138.428.246		138.428.246	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cipayung

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Dinas Kesehatan		138.428.246		138.428.246	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kebayoran Lama
	Dinas Kesehatan		138.499.988		138.499.988	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kramat Jati
	Dinas Kesehatan		572.088.605		572.088.605	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cilincing
	Dinas Kesehatan		151.338.429		151.338.429	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Ciriayasa Cipta Mandiri	Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Koja
6	Dinas Pendidikan	2.194.486.981	2.487.085.245	4.681.572.226		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SDN Petamburan 07
	Dinas Pendidikan	1.852.063.762	5.000.572.162	6.852.635.924		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SMPN 93 Gunung Sahari
	Dinas Pendidikan	1.406.125.783	2.109.188.675	3.515.314.458		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SDN Pademangan Barat 10
	Dinas Pendidikan	1.948.956.901	2.923.435.350	4.872.392.251		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SDN Pademangan Barat 11/14
	Dinas Pendidikan	1.218.834.701	2.072.018.992	3.290.853.693		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SDN Lagoa 07/08
	Dinas Pendidikan	1.197.705.763	1.796.558.644	2.994.264.407		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKON-FERRI-YODYA KSO	SDN Rawa Badak Utara 11 Pagi
	Dinas Pendidikan	4.653.308.410	3.439.401.869	8.092.710.279		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ADHI-JAYA KONSTRUKSI-ARKONIN	SDN Bintaro 08
	Dinas Pendidikan	2.013.529.896	1.956.000.471	3.969.530.367		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ADHI-JAYA KONSTRUKSI-ARKONIN	SDN Kebayoran Lama Utara 13
	Dinas Pendidikan	1.968.899.331	2.044.626.213	2.044.626.228	1.968.899.316	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ADHI-JAYA KONSTRUKSI-ARKONIN	SDN Lenteng Agung 07
	Dinas Pendidikan	2.347.432.070	1.235.490.563	3.582.922.633		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO ADHI-JAYA KONSTRUKSI-ARKONIN	SDN Menteng Dalam 07
	Dinas Pendidikan	1.868.960.187	2.035.831.631	3.904.791.818		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	SMPN 89
	Dinas Pendidikan	983.000.748	1.404.286.782	2.387.287.530		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	SDN Kapuk 09/10
	Dinas Pendidikan	3.164.880.061	2.908.268.164	6.073.148.225		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	SMPN 204
	Dinas Pendidikan	4.887.179.526	4.712.637.400	9.599.816.926		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	SDN Mangga Besar 01/03/05/07
	Dinas Pendidikan	4.559.464.154	3.370.038.722	7.929.502.876		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	Sekolah Terpadu Tambora
	Dinas Pendidikan	3.018.491.689	3.207.147.419	6.225.639.108		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT NINDYA KARYA (Persero)	SMPN 22 / SDN Pinangsia 06
	Dinas Pendidikan	1.368.796.138	2.463.833.050	1.825.061.518	2.007.567.670	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMPN 192
	Dinas Pendidikan	1.594.860.059	2.136.166.115	2.241.337.428	1.489.688.746	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	PKBM 36 P Harapan
	Dinas Pendidikan	2.109.409.543	3.796.937.178	2.601.605.103	3.304.741.618	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SDN P.Panggang 03
	Dinas Pendidikan	2.201.529.446	3.962.753.004	3.449.062.799	2.715.219.651	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SDN P.Kelapa 01
	Dinas Pendidikan	2.941.417.715	5.294.551.886	3.627.748.515	4.608.221.086	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMKN 61 P.Tidung
	Dinas Pendidikan	2.387.173.287	4.296.911.918	3.739.904.817	2.944.180.388	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMPN 133 P.Pramuka
	Dinas Pendidikan	2.919.800.149	5.255.640.268	5.547.620.283	2.627.820.134	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMPN 260 P.Harapan
	Dinas Pendidikan	2.522.635.803	4.540.744.446	4.793.008.026	2.270.372.223	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMPN 285 P.Utug Jawa
	Dinas Pendidikan	2.564.884.016	4.616.791.230	4.873.279.631	2.308.395.615	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	JAYA KOSNTRUKSI-ARKONIN KSO	SMPN 288 P.Lancang
	Dinas Pendidikan		1.538.607.959		1.538.607.959	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Pembangunan Gedung Praktik Basic Safety Training (BST) SMKN 36 (standar Internasional Maritime Organization/IMO) pada Gedung eks SDN Marunda 02 (gedung lama)-Paket 1
	Dinas Pendidikan		6.369.837.517		6.369.837.517	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung SDN Pulau Untung Jawa 01 Pagi-Paket 1
	Dinas Pendidikan		2.385.765.774		2.385.765.774	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Pembangunan RKB Gedung SDN Pulau Pari 02 Pagi-Paket 1
	Dinas Pendidikan		3.747.502.206		3.747.502.206	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung Asrama Putri Siswa SMAN 69 Pulau Pramuka-Paket 1
	Dinas Pendidikan		1.811.328.780		1.811.328.780	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Pembangunan Asrama Baru SMKN 63 Jagakarsa Jakarta Selatan-Paket 3
	Dinas Pendidikan		1.897.484.794		1.897.484.794	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Rehab Total Gedung SMPN 31 Kebayoran Lama Jakarta Selatan-Paket 3
	Dinas Pendidikan		1.970.314.979		1.970.314.979	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Rehab Total Gedung SMPN 242 Jagakarsa Jakarta Selatan-Paket 3
	Dinas Pendidikan		2.238.055.732		2.238.055.732	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Rehab Total Gedung SDN Petukangan Selatan 01, 02-Paket 3
	Dinas Pendidikan		4.612.108.852		4.612.108.852	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Rehab Total Gedung SDN Pejaten Timur 01-Paket 3
	Dinas Pendidikan		3.132.570.236		3.132.570.236	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	KSO Adhi - Penta	Rehab Total Gedung SDN Pancoran 07-Paket 3
	Dinas Pendidikan		1.980.713.136		1.980.713.136	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung SMPN 59 Kemayoran Jakarta Pusat-Paket 5
	Dinas Pendidikan		4.573.360.107		4.573.360.107	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung SDN Cijantung 06-Paket 5
	Dinas Pendidikan		3.587.679.360		3.587.679.360	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung SDN Balekambang 01 Pagi-Paket 5
	Dinas Pendidikan		1.703.484.213		1.703.484.213	-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	WIKA-WG-CMP KSO	Rehab Total Gedung SDN Susukan 09 Pagi-Paket 5
	Dinas Pendidikan		1.268.827.075			1.268.827.075	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. WIKA Gedung	Rehab Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	3.546.125.344	8.200.962.400	11.747.087.744		-	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. HUTAMA KARYA (Persero)	Pembangunan Sky Hospital
8	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		3.389.152.892			3.389.152.892	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. BANGUN KARISMA PRIMA	Konstruksi pembangunan gedung A (RS.KOJA)
9	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - jaktim		265.436.726			265.436.726	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT Prabu Abdi Mulia	Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Pinus Elok
	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaktim		63.178.829			63.178.829	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	CV Riungan Jaya Abadi	Pekerjaan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Cakung Barat
10	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		246.842.062			246.842.062	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT.Hanna Huberta	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung kantor
11	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng		567.407.920			567.407.920	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PT. Wijaya Karya	Konstruksi Gedung Rumah Sakit

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	217.483.055.854	549.743.492.621	683.051.507.930	72.609.203.681	11.565.836.863			
K	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan								
1	Dinas Kehutanan	1.746.444.730			1.746.444.730	-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Masa Remaja	Utang tahun 2013 yang belum terbayar untuk kegiatan Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selata
	Dinas Kehutanan	57.655.328				57.655.328	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Odorma Tiara Handayani	Utang Daerah 10.013 / Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim
2	Dinas Bina Marga	1.376.116.000	5.766.084.000	7.142.200.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Istaka Karya - Argabudi - Dhanesmantar	Pemb. Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar-Fisik
	Dinas Bina Marga	66.605.000	174.762.500	241.367.500		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Cipta Multi Kreasi	Pemb. Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar-MK
	Dinas Bina Marga	1.310.505.546	3.050.248.354	4.360.753.900		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Nindya Karya (Persero)	Pemb. FO Pancoran-Fisik
	Dinas Bina Marga	78.210.000	157.245.000	235.455.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Cipta Multi Kreasi	Pemb. FO Pancoran-MK
	Dinas Bina Marga	1.419.860.676	55.099.000	1.474.959.676		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Multi Structure - PT. Abadi Prima	Pemb.Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA-Fisik
	Dinas Bina Marga	55.099.000	177.474.000	232.573.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Anugerah Kridapradana	Pemb.Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA-MK
	Dinas Bina Marga	4.619.006.262	4.364.182.000	8.983.188.262		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Modern -Virama KSO	Pemb. UP Kartini-Fisik
	Dinas Bina Marga	58.949.000	215.424.000	274.373.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Anugerah Kridapradana	Pemb. UP Kartini-MK
	Dinas Bina Marga	768.407.944	84.249.000	852.656.944		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Pemb UP Mampang-Kuningan-Fisik
	Dinas Bina Marga	84.249.000	356.202.000	440.451.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Perentjana Djaja	Pemb UP Mampang-Kuningan-MK
	Dinas Bina Marga	1.956.480.963	9.162.223.000	11.118.703.963		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Jaya Konstruksi - PT. Jakarta Rencana Selaras KSO	Pemb. UP Matraman-Salemba-Fisik
	Dinas Bina Marga	76.274.000	432.784.000	509.058.000		-	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Perentjana Djaja	Pemb. UP Matraman-Salemba-MK
3	Sudin Sumber Daya Air - Jakbar		2.980.810.388			2.980.810.388	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	BASUKI - YASA, KSO	Pembangunan saluran, saluran penghubung dan kelengkapannya
	Sudin Sumber Daya Air - Jakbar		3.544.498.613			3.544.498.613	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Way Mincang	Pengadaan pompa beserta kelengkapannya di Wilayah Jakarta Barat
	Sudin Sumber Daya Air - Jakbar		156.540.962			156.540.962	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Multisystem Engineering	Pembangunan Kolam Kolakan di Ring Road Cengkareng
	Sudin Sumber Daya Air - Jakbar		183.826.562			183.826.562	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	PT. Naga Raja Sakti	Pembangunan Kolam Kolakan di Jl. Dharmawanita, Jakbar
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	13.673.863.449	30.861.653.379	35.865.740.245	1.746.444.730	6.923.331.853			
L	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
1	Dinas Pendidikan		72.897.200			72.897.200	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	CV Pustaka Mulia	Buku Kurtilas Mata Pelajaran untuk siswa dan guru sebanyak 3.463 eksemplar untuk SMPN 230
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	-	72.897.200	-	-	72.897.200			

**DAFTAR UTANG BELANJA DI BLUD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
A	Utang Belanja Pegawai BLUD								
1	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	459.202.257		459.202.257		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	BPJS Tenaga Kerja & Kesehatan Bulan Desember 2017
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	96.964.732		96.964.732		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Gaji Dokter Spesialist
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	44.590.000		44.590.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honorarium Shift Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	512.000		512.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honorarium Lembur
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet		13.800.000			13.800.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Gaji Dokter Spesialist
3	Puskesmas Kec. Cakung - JAKTIM	3.800.000		3.800.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honor gadar non PNS Desember
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	14.117.648	2.079.635	16.197.283		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	
5	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	886.249.369			654.677.319	231.572.050	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	reklas utang jangka panjang Lainnya ke utang pegawai BLUD (utang jangka pendek)
6	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		117.095.776.860	107.307.019.379		9.788.757.481	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honor , Gaji , Insentif dan Remun Karyawan
7	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		16.808.000	16.808.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	By Lembur
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		63.067.200	63.067.200		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	By Lembur
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		153.113.124	135.305.431		17.807.693	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honor dewas
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		49.297.938	45.105.498		4.192.440	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honor Lainnya
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		168.091.878	152.703.180		15.388.698	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Honor Lainnya
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		29.209.327	29.209.327		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Jagut Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		25.164.028	25.164.028		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Jagut Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		105.477.645	92.302.645		13.175.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Jagut Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		27.177.662.255	25.262.985.869		1.914.676.386	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Jasa Dokter
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		31.919.750	29.634.750		2.285.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Nerus Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		396.549.250	371.981.750		24.567.500	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Nerus OK
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		54.806.000	50.001.000		4.805.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Nerus Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		191.538.000	181.138.000		10.400.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	On Call Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		281.792.000	266.692.000		15.100.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	On Call Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		59.124.524.722	55.247.759.005		3.876.765.717	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Remun
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		101.987.500	92.837.500		9.150.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift dr HD
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		321.613.000	297.238.000		24.375.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.727.028.000	1.597.468.000		129.560.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		673.875.000	623.250.000		50.625.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift Ruangan
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.212.640.000	1.123.740.000		88.900.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift UGD
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		21.949.455	20.449.455		1.500.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Transport
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		76.500.000	71.500.000		5.000.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Uang Duka
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		35.025.000	35.025.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Shift SPGDT
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		49.951.370	49.951.370		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Uang Pesangon
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		83.625.000	75.362.500		8.262.500	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	TBR Radiologi
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		31.050.000	28.175.000		2.875.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	TBR Chatlab
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		36.575.000	33.250.000		3.325.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	TBR OK
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		82.768.000	82.768.000		-	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Diklat
8	Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT		950.000			950.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Biaya piket hari sabtu bulan Desember 2018
9	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa		41.400.000			41.400.000	Utang Belanja Pegawai BLUD	Hutang Kepada Pegawai	Kekurangan Honor Dokter Spesialis Non PNS
	JUMLAH UTANG BELANJA PEGAWAI BLUD	1.505.436.006	209.477.614.937	194.029.158.159	654.677.319	16.299.215.465			
B	Utang Belanja Barang Jasa BLUD								
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	12.500.030				12.500.030	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Mega Persada Utama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	5.292.500		5.292.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Cobra Dental Indonesia	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	765.000		765.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Osadha Graha Sejahtera	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	432.960		432.960		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Enseval Putera Megatrading TBK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	734.999		734.999		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Enseval Putera Megatrading TBK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	660.000		660.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Enseval Putera Megatrading TBK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	1.870.000		1.870.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Andra Prima Jaya	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	1.805.243		1.805.243		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Merapi Utama Pharma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	2.139.998		2.139.998		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tiara Kencana	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	268.000		268.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Indofarma Global Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	800.000		800.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugrahmitra Selaras	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	288.000		288.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Rajawali Nusindo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	459.800		459.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	446.380		446.380		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	65.450.000		65.450.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Diagnost Putera Nusantara	
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	9.091.830		9.091.830		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Diagnost Putera Nusantara	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	11.059.950		11.059.950		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA OBAT-OBATANDARYANT TULE
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	21.753.575		21.753.575		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN PANGAN BULAN OKTOBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	19.348.891		19.348.891		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN PANGAN BULAN NOVEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	19.314.989		19.314.989		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN PANGAN BULAN DESEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	3.300.000		3.300.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT COBRA DENTAL	BELANJA SCALER
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	16.230.000		16.230.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT BHINEKA MENTARI DIMENSI	BELANJA TINTA
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	935.000		935.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ANDRA PRIMA JAYA	BELANJA IPUFF
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		48.832.850			48.832.850	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV Nusantara Printing	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Cetakan Khusus)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		7.700.000			7.700.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo lestari	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		5.299.998			5.299.998	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo lestari	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		2.984.850			2.984.850	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Pradipta Cakrawala Pacific	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Obat)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		12.859.000			12.859.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Wastec International	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Kesehatan Lingkungan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		10.760.750			10.760.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Cobra Dental Indonesia	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		7.256.700			7.256.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Cobra Dental Indonesia	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		2.060.000			2.060.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Osadha Graha Sejahtera	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		1.030.000			1.030.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Osadha Graha Sejahtera	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Alkes Habis Pakai Kesehatan)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		56.392.875			56.392.875	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Cahaya Perdana Utama	Belanja Barang dan Jasa BLUD (alat rumah tangga)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		23.245.200			23.245.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGA UTAMA SOLUSINDO	Belanja Barang dan Jasa BLUD (alat rumah tangga)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	257.400		257.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Enseval Putera Megatrading	Belanja obat

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	1.999.998		1.999.998		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja alkes
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	3.500.996		3.500.996		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja obat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	2.455.750		2.455.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Tata Selaras Utama	Belanja ARTK
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	410.000		410.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSI Jakarta Cempaka Putih	Biaya perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	2.928.000		2.928.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSI Jakarta Cempaka Putih	Biaya perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	470.000		470.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSI Jakarta Cempaka Putih	Biaya perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	3.570.000		3.570.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PMI	Biaya pengolahan darah bulan Desember 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	495.000		495.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Agung	Pengisian tinta
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	220.000		220.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Agung	Pengisian tinta
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	25.000.000		25.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Wahana Kendali Mutu	GKM
	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih		1.155.000			1.155.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Mahendra Jaya Bestindo	Belanja ARTK
4	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	4.620.000		4.620.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Arah Environment Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	3.300.000		3.300.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Enseval Putra Megatrading	
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	9.010.498		9.010.498		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja Bahan Obat-Obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	2.750.000		2.750.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Pendar Andhika Paramarta	Belanja Baterai Incubator
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	11.308.000		11.308.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Era Medika Jaya	Pembayaran Gas Medik Bulan Desember 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	3.339.996		3.339.996		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Dos ni Roha	Belanja Alkes Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	750.002		750.002		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Dos ni Roha	Belanja Alkes Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	1.166.998		1.166.998		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja Bahan Obat-Obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	5.700.563		5.700.563		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja Alkes Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	6.106.000		6.106.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Arundati	Belanja Makan Rapat Pleno bulan November
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	3.600.000		3.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Antarmitra Sembada	Belanja Bahan Obat-Obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	1.100.000		1.100.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	Belanja Alkes Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	19.200.000		19.200.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IIM (Kube Mawar Putih)	Belanja Makan Karyawan bulan Mei
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	6.450.000		6.450.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Arundati	Belanja Makan Rapat Pleno bulan Desember
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	2.541.000		2.541.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Enseval Putera Megatrading	Belanja Alkes Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	12.461.055		12.461.055		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Padang Kuring Boga Utama	Belanja Bahan Pangan Bulan Oktober Non PPN
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	2.137.438		2.137.438		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Padang Kuring Boga Utama	Belanja Bahan Pangan Bulan Oktober dengan PPN
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	11.962.935		11.962.935		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Padang Kuring Boga Utama	Belanja Bahan Pangan Bulan November Non PPN
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	1.834.074		1.834.074		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Padang Kuring Boga Utama	Belanja Bahan Pangan Bulan November dengan PPN
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru		42.806.555			42.806.555	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT SARANA TATA SOLUSI	Belanja jasa Cuci gedung RS
	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru		4.675.000			4.675.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT WASTEC	Belanja Jasa limbah bulan Desember 2018
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	6.072.000		6.072.000		6.072.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	(PT Inti Diagnostik Utama)	Belanja Bahan Laboratorium bulan Desember 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	2.908.500		2.908.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	(PT Pramita)	Belanja Pengolahan Darah bulan Desember 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	8.310.000		8.310.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Palang Merah Indonesia	Belanja Penggantian Pengolahan Darah Bulan Desember 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		19.500.000	-	-	19.500.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Arvirotech Engineering Konsultan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Mesin IPAL

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		900.000	-	-	900.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Provinsi DKI Jakarta Lingkungan Hidup	Belanja Pembayaran Retribusi Jasa Kebersihan Persampahan bulan Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		450.000	-	-	450.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	Belanja Biaya Pemeriksaan Laboratorium bulan Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		11.440.000	-	-	11.440.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Palang Merah Indonesia (Jakarta Utara)	Belanja Biaya Pengganti Pengolahan Darah Bulan Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		1.505.500	-	-	1.505.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Pramita Lab	Belanja biaya pemeriksaan Laboratorium
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	899.000		899.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Pembelian Alkes (Daryant Tulle - Framisetin sulfat tulle 1%)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	9.850.000		9.850.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Argon Medica	Pembelian Obat (Novorapid, Novomix)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	4.216.000		4.216.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Pembelian Alkes (Syringe)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	495.000		495.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Merapi Utama Pharma	Pembelian Obat (Vaksin Td)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	3.445.000		3.445.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Merapi Utama Pharma	Pembelian Alkes (Hogy)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	18.000.000		-	18.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Garuda Kencana Mas	Maintenance Server
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	9.468.800		-	9.468.800	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Intisumber Hasil Sempurna	Pembelian Alkes (Underpad, Nasal Kanul)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	5.725.500		5.725.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Sali Polapa Bersama	Pembelian Bahan Lab (Control Hematologi, Triglicerida)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	6.558.200		-	6.558.200	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Argon Medica	Pembelian Obat (Stesolid, Rhinofed injeksi)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	880.880		880.880		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Argon Medica	Pembelian Obat (Stesolid injeksi)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	21.318.000		21.318.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Mahkota Raja Mandiri	Pembelian Cetakan Map Rekam Medis, Form Observasi HCU
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	1.870.000		1.870.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Merapi Utama Pharma	Pembelian Obat (D5 1/4 NS)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	6.142.400		6.142.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Sali Polapa Bersama	Pembelian Bahan Lab (Uric Acid, Spesial Wash)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	503.580		503.580		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Lawsim Zecha	Pembelian OBH
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	325.000		325.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Toko Fauzy	Kain batik dan Sarung
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	119.350		119.350		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Apotek Medikita	meteran laser
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	480.000		480.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bapak Saduri	Pembelian Kabel
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	236.000		236.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	D'Lizt Scaffolding	Obat (Sukralfat)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	572.000		-		572.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Toko Nasution	Sewa Lapangan Badminton Desember
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	5.857.500		5.857.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Toko Aura Jaya	Scaffolding
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	242.200		242.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Intermedia	Snack Kegiatan ORI
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	900.000		-		900.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kios Pupuk "B" Tani	Perabot Dapur Aura Jaya
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	900.000		-		900.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kios Pupuk "B" Tani	Pembelian Paper one, warning toilet
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	850.000		-		850.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kios Pupuk "B" Tani	Pembelian Pasir Kerikil
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	850.000		-		850.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kios Pupuk "B" Tani	Tanaman, Pohon
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		502.200			502.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Permata Buana Artano	Intubating
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		2.148.880			2.148.880	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Kirana Jaya Lestari	Mouth Mirror and excavator
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		7.135.750			7.135.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Lantus
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		6.240.000			6.240.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Xylocain Jelly 2%
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		5.428.134			5.428.134	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Prolene Blu 90 cm KB-1 Ethicon
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		1.061.390			1.061.390	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Efedrin 50 mg, diamicon mr dan marcain
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		64.130.000			64.130.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MBS	Infuset, Extension Tube, Surflew
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		25.531.778			25.531.778	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Syringe 3 cc, 50 cc
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		8.142.202			8.142.202	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. APL	Benang Prolene Blue
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		1.616.175			1.616.175	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MPI	Adhesive Tape
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		17.129.853			17.129.853	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MPI	Triton L19, MM24, L18 dan M51
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		4.209.590			4.209.590	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AAM	Becton Dickinson
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		52.401.500			52.401.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.IHS	Suction Cath, Alcohol swab dan superlife nitril
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		5.166.040			5.166.040	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.IHS	Masker Oksigen
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		19.881.259			19.881.259	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Millenium Pharmacon	triton V16, S84
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		2.629.000			2.629.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Mensa Bina Sukses	cefadroxil
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		11.582.200			11.582.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Cipta Medika	ELECTROSURGERY PENCIL BIRU
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		2.156.000			2.156.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Mahkota Raja Mandiri	Cetakan Lembar Observasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		15.098.029			15.098.029	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	neurobion, sukralfat
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		149.845.657			149.845.657	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Aras Prima Sukses	Renovasi RB

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		20.000.000			20.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. IDS	ACDC Module untuk USG
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		4.950.000			4.950.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.IHS	Alat cukur, elektroda
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		12.997.600			12.997.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Langen Perdana Diamed	Sensor card
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		28.108.575			28.108.575	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MPI	Utrogestran, Misoprostol
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		2.067.417			2.067.417	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AAM	Sevodek
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		15.018.489			15.018.489	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AMPM	CPAP
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		13.425.720			13.425.720	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Fesco	Fol cath
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		30.624.000			30.624.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PPG	Micromist masker oksigen
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		21.746.340			21.746.340	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Kalista	Obat Regifel
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		7.425.000			7.425.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Midif Farma	Dispet LED
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		122.692.694			122.692.694	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Afina Sinar Cemerlang	Paket Operasi Katarak BPJS Bulan November
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		18.295.366			18.295.366	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Parit Padang Global	alkes
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		5.932.982			5.932.982	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Apotek Alam Sehat	Obat - Obatan Desember
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		3.228.335			3.228.335	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TB Jaya Abadi	Bahan Pemeliharaan Desember
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		4.373.050			4.373.050	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TB Jaya Abadi	Bahan Pemeliharaan November
	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		2.145.000			2.145.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Jaya Usaha Pratama Anuraga	Seragam Batik Security
7	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	966.000		966.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.Sapta Sari	Obat - Obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	20.222.000		20.222.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Koperasi Rajawali Sasuling	Linen
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	4.500.000	32.477.000	4.500.000	32.477.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sarana Rizki	Makan minum rapat
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	16.905.900		16.905.900		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Saba Indomedika	Reagen lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	4.620.000		4.620.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Alam Putra Sakti	Reagen lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	1.980.000		1.980.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Benang Mas Abadi	Bahan Lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	4.650.000	1.870.000	4.650.000	1.870.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.Panca Daya Tehnik Utama	Pemeliharaan lift
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	7.800.000		7.800.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Parahita Diagnostics	Jasa lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	2.400.000		2.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Micostar Karyaguna	Sewa mesin fotocopy
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	4.000.000		4.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PMI	Labu darah
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	15.777.960		15.777.960		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.Padang Kuring Boga Utama	Bahan pangan
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		10.155.000		10.155.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Mufti Alam Mandiri	Pemeliharaan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		10.000.000		10.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Astra Jaya Surya Kencana	Pemeliharaan IPAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		26.274.773		26.274.773	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Dos Ni Roha	Alat Kesehatan Pakai Habis
	Rumah Sakir Umum Daerah Jagakarsa		334.125		334.125	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Intisumber Hasil Sempurna	Alat Kesehatan Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		99.700.000		99.700.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Wahana Cipta	Jasa Konsultan
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		10.000.000		10.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Adipraya Hijau Lestari	Pengangkutan Limbah Medis B3
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		9.000.000		9.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD Pasar Minggu	Jasa Lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		2.079.000		2.079.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Berca Niaga Medica	Alat Kesehatan Pakai Habis
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	770.000		770.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV DWI PUTRI JAKARTA	BELANJA ALKES PAKAI HABIS BERUPA REAGEN AMIES
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	429.600		429.600		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEKARGUNA MEDIKA	BELANJA ALKES PAKAI HABIS BERUPA MICROLIFE DIGITAL EAR THERMOMETER FR1DL1
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	3.410.071		3.410.071		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT SAPTA SARI TAMA	BELANJA OBAT BERUPA VITACID CREAM 0.05%, VITACID CREAM 0.025% DAN VIPCOL 60 ML
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	3.049.200		3.049.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK	BELANJA ALKES PAKAI HABIS BERUPA ACCU. SAFE -T-PRO UNO 200
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	660.000		660.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK	BELANJA OBAT BERUPA INTERZINC SYRUP
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	5.758.500		5.758.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK	BELANJA OBAT BERUPA FINPRO BOX 30 TABLET
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	4.544.403		4.544.403		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ANTARMITRA SEMBADA	BELANJA OBAT BERUPA VITACID CREAM, ZAMEL DROP
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	16.720.000		16.720.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PEMERIKSAAN PATOLOGI	BIAYA PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMIK RSCM PASIEN RSUD TEBET BULAN OKTOBER - NOPEMBER 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.660.000		1.660.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RETRIBUSI AIR BERSIH	BIAYA RETRIBUSI AIR BERSIH

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	3.499.760		3.499.760		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNITED DICO CITAS	BELANJA OBAT BERUPA SERBUK INJ 1500MG @10 VIAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.266.719		1.266.719		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAJAWALI NURSINDO	BELANJA OBAT BERUPA HIDROCORTISON CREAM 2,5%
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	820.000		820.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA SARI TAMA	BELANJA OBAT VTT BI 50 MG
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.815.000		1.815.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANTARMITRA SEMBADA	BELANJA OBAT CEFIXIME DRY SYRUP
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	49.874.000		49.874.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KREASINDO	BELANJA OPERASIONAL CETAKAN SEBANYAK 41 ITEM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	2.605.502		2.605.502		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIRTA INVESTAMA	BELANJA AIR MINUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	19.086.000		19.086.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIR MAS PERKASA	BELANJA TINTA PRINTER
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.870.000		1.870.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIN SANJAYA	PENGISIAN TABUNG GAS O2
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.298.000		1.298.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIN SANJAYA	PENGISIAN TABUNG GAS O2
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	2.761.000		2.761.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIN SANJAYA	PENGISIAN TABUNG GAS O2
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.430.000		1.430.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIN SANJAYA	PENGISIAN TABUNG GAS O2
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	16.369.000	4.826.000	16.369.000		4.826.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BANDUNG SEGAR	BELANJA PANGAN PASIEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	5.500.000		5.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RENTOKIL	PENGENDALIAN HAMA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	16.410.000	30.720.000	16.410.000		30.720.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PALANG MERAH INDONESIA	BIAYA PENGOLAHAN DARAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	6.475.000	24.440.000	6.475.000		24.440.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PEMERIKSAAN PATOLOGI	BIAYA PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMIK RSCM PASIEN RSUD TEBET BULAN DESEMBER 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	14.290.100		14.290.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT WASTEC INTERNATIONAL	BIAYA PENGANGKUTAN LIMBAH MEDIS BULAN NOVEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.606.000		1.606.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT PERTAMINA RETAIL	REFILL BRIGHT GAS 12 KG 11 PCS (DESEMBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.752.000		1.752.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT PERTAMINA RETAIL	REFILL BRIGHT GAS 12 KG 11 PCS (NOVEMBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	7.887.000		7.887.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT WASTEC INTERNATIONAL	BIAYA PENGANGKUTAN LIMBAH MEDIS BULAN DESEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	8.338.000		8.338.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT SAPTA SARI TAMA	BELANJA OBAT BERUPA SUKRALFAT SUSP 500MG/5ML
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.000.000		1.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUDIN LINGKUNGAN HIDUP	PENGANGKUTAN SAMPAH NON B3
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	2.376.002		2.376.002		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIRTA INVESTAMA	BELANJA AIR MINUM BULAN DESEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1.039.500		1.039.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT INDOLAB ARTHA MEDIKA	BELANJA ALKES PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet		135.379.750	100.267.750		35.112.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ONCOPROBE UTAMA, PT	Belanja Barjas BLUD untuk bahan laboratorium
	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet		477.000	-		477.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRAMITA	Belanja Barjas BLUD untuk pasien Lab
9	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	2.880.000	28.720.000	29.115.000		2.485.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD Pasar Rebo	Jasa Layanan Pemeriksaan PA
10	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	3.438.875		3.438.875		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	Belanja barang dan jasa BLUD (Bahan Pangan (dgn Ppn 10%))
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	21.575.700		21.575.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	Belanja barang dan jasa BLUD (Bahan Pangan (tanpa Ppn 10%))
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	199.058.475		199.058.475		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GUNUNG SAHID	Belanja barang dan jasa BLUD (Pekerjaan Sipil Renovasi Ruang Operasi Tahap 2)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	192.992.800		192.992.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. STAL TEKNIKA	Belanja barang dan jasa BLUD (Instalasi VAC OT Mayor (OK MATA))
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	3.000.000		3.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Pertamina Retail	Belanja barang dan jasa BLUD (Bahan Bakar Minyak)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	216.000		216.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD Koja	Belanja barang dan jasa BLUD (Pemeriksaan laboratorium bulan November 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	6.900.000		6.900.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	dr. Juliawaty Salim	Belanja pegawai BLUD (dr sp anak pengganti) tgl 21, 22, 23,27, 28, 29 Des 2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		7.700.000			7.700.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Rizki Putra Dinamika	Belanja Pemeliharaan Pest Control dan Fumigasi periode Desember 2018 SPK No. 002/PPK/RSUDTGPRIOK/II/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		58.080.000			58.080.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pancaraya Krisnamandiri	Belanja BHP Katarak Set periode 28 November 2018 2018 SPK No. 023/PPK/RSUDTGPRIOK/II/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		61.710.000			61.710.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pancaraya Krisnamandiri	Belanja BHP Katarak Set periode 5 Desember 2018 SPK No. 023/PPK/RSUDTGPRIOK/II/2018

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		29.040.000			29.040.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pancaraya Krisnamandiri	Belanja BHP Katarak Set periode 12 Desember 2018 SPK No. 023/PPK/RSUDTGPRIOK/II/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		58.080.000			58.080.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pancaraya Krisnamandiri	Belanja BHP Katarak Set periode 26 Desember 2018 SPK No. 023/PPK/RSUDTGPRIOK/II/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		93.808.637			93.808.637	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Saba Indomedika	Belanja Bahan Laboratorium SPK No. 10.3/PPK/RSUDTGPRIOK/IX/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		153.675.500			153.675.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Saba Indomedika	Belanja Bahan Laboratorium SPK No. 12.6/PPK/RSUDTGPRIOK/XI/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		6.320.063			6.320.063	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Setia Anugrah Medika	Belanja Bahan Laboratorium periode Oktober SPK No. 080/SPK/CORNELY-K-LITE/XII/2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		6.520.065			6.520.065	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Setia Anugrah Medika	Belanja Bahan Laboratorium periode November SPK No. 080/SPK/CORNELY-K-LITE/XII/2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		9.939.930			9.939.930	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Setia Anugrah Medika	Belanja Bahan Laboratorium periode Desember SPK No. 080/SPK/CORNELY-K-LITE/XII/2017
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		1.891.626			1.891.626	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Aufa Jaya Indonesia	Belanja Jasa Sewa Mesin Fotocopy periode 27 November 2018 s.d 20 Desember 2018 PKS No. 006/PK/RSUDTGPRIOK/II/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		13.774.695			13.774.695	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Penta Valent	Belanja Bahan Obat-Obatan SP No. 1.3/PPK/RSUDTGPRIOK/X/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		13.612.500	952.875		12.659.625	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Penta Valent	Belanja Bahan Obat-Obatan SP No. 15.9/PPK/RSUDTGPRIOK/XI/2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		1.320.000			1.320.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PD Pal Jaya	Belanja Jasa Penyedotan Tinja periode 7 Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		450.000			450.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Jasa Pengangkutan Retribusi Sampah periode Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		501.000			501.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RS. Sukmul Sisma Medika	Belanja Jasa Pemeriksaan Radiologi Periode Oktober 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		209.000			209.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RS. Sukmul Sisma Medika	Belanja Jasa Pemeriksaan Radiologi Periode Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		12.360.150			12.360.150	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Wastec International	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis periode Desember 2018
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		1.440.000			1.440.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Palang Merah Indonesia	Biaya Penggantian Pengolahan Darah Bulan Desember
11	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	3.066.120		3.066.120		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Rajawali Nusindo	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	6.215.998		6.215.998		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Rajawali Nusindo	Belanja Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	1.020.000		1.020.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Merapi Utama Pharma	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	3.500.475		3.500.000	475	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Anugrah Argon Medika	Belanja Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	1.056.000		1.056.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Medtek	Belanja Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	1.038.959		1.038.959		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Mensa Bina Sukses	Belanja Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		829.061			829.061	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PD Rama (Shell)	Belanja BBM
12	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	1.305.000	1.282.500	2.587.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kantin Mba Isah	Utang Belanja Makan RB
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	1.509.200	2.710.400	4.219.600		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Jaya Bima	Air Minum
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	6.160.000	-	6.160.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Wahana Kendali Mutu	Wahana Kendali Mutu
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	450.000	-	450.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Keamanan PKM Kel. PasarBaru
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	1.867.345	-	1.867.345		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Belanja Rumah Tangga
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	2.660.000	-	2.660.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Gadar Operasi Lilin

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS		461.001			461.001	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Telekomunikasi Indonesia	Internet PKL. Gunung Sahari Utara
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS		47.990			47.990	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Telekomunikasi Indonesia	Telepon PKL. Gunung Sahari Utara
	Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS		202.500			202.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kantin Mba Isah	Makan Pasien RB
13	Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL	2.115.000		2.115.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Koperasi	Koperasi Karyawan PKM Tebet
14	Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	617.000		617.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Warung Ibu Sri	Makan pasien rumah bersalin
	Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	3.207.214		3.207.214		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Benzine Indonesia	BBM tagihan 16-31 Desember
	Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	1.782.000		1.782.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Metro Fara Insani	Belanja alkes pakai habis
	Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	330.000		330.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Palapa Gas	Belanja oksigen
15	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	21.000.000		21.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Apotik Sinar Sehat	OBAT-OBATAN
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	7.000.000		7.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Choirul Rojikin	PEMBUATAN RUANG TB
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	11.193.750		11.193.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Foto Copy RA	FOTO COPY
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	15.000.000		15.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Toko KK	PEMBUATAN KAMAR JENAZAH
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	5.718.740		5.718.740		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Dewi Angraini	KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu		26.400.000			26.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TEKNO KAYO INTERNATIONAL	Sistem Aplikasi SIKDA
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu		5.665.000			5.665.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SITTAH BAHAGIA MULIA	Alkes dan bahan LAB
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu		2.896.500			2.896.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		ATK
	Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu		2.103.500			2.103.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		
16	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	5.290.341.605	6.368.568.696	10.252.285.595	(295.006.979)	1.701.631.685	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH ARGON MEDICA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	4.994.651.625	14.825.402.276	16.000.701.516	(487.881.940)	4.307.234.325	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	3.160.909.702	10.545.067.789	10.327.568.281	(217.208.449)	3.595.617.659	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENSEVAL PUTERA MEGATRAIDING	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.836.409.349	3.628.253.765	5.673.622.150	(185.772.966)	976.813.930	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PARIT PADANG GLOBAL	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.309.724.341	6.345.013.719	8.642.640.382	(224.160.729)	236.258.407	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MERAPI UTAMA PHARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.705.140.000	12.393.965.000	11.991.770.000	682.335.000	1.425.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PMI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.621.658.418	4.121.325.849	4.242.857.461	268.667.238	1.231.459.568	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MENSA BINA SUKSES	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.425.943.850	4.133.738.676	4.949.864.724	(169.212.949)	779.030.751	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGAH MEDIKA PHARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.399.017.020	3.566.127.727	3.695.572.939	(118.313.914)	1.387.885.722	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANTAR MITRA SEMBADA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.162.564.000	1.722.952.750	2.142.219.950	339.387.800	403.909.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAMARA OVERSEAS C	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.158.903.055	7.328.798.872	6.021.344.093	(94.906.409)	2.561.264.243	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOS NI ROHA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.024.763.950	1.563.180.520	1.644.273.565	380.902.985	562.767.920	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SABA INDOMEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	698.427.874	853.966.657	1.574.233.420	(308.335.016)	286.496.127	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS MED	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	648.241.398	3.198.987.312	2.974.552.320	153.014.686	719.661.704	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANEKA GAS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	518.181.775	-	-	518.181.775	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NUSANTARA BINA SUKSES	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	512.662.216	696.793.264	779.095.817	17.569.120	412.790.543	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNITED DICO CITAS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	506.512.567	182.690.235	552.628.101	136.574.701	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGA CIPTA GLOBALINDO	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	506.039.815	2.550.069.845	2.172.973.391	108.620.806	774.515.463	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIARA KENCANA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	480.513.600	1.363.973.520	1.546.886.880	(51.024.960)	348.625.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAWADA HEALT CARE	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	404.851.240	3.086.490.319	1.703.831.656	(26.954.663)	1.814.464.566	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	355.374.216	1.163.903.973	1.180.373.073	257.076	338.648.404	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINTANG SHAFWAN	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	337.806.000	39.509.800	382.803.300	(31.208.500)	25.721.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WIDYA MITRA PERSADA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	325.883.385	2.474.094.513	2.223.631.988	40.233.735	536.112.175	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINERGI TRIDAYA MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	266.886.470	545.613.608	301.337.523	138.752.050	372.410.505	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	232.958.400	239.672.200	399.288.200	37.838.400	35.504.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SIMPONI SIGMANERA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	225.090.000	918.720.000	775.170.000	45.652.500	322.987.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRITUNGAL SINERGI GEMILANG	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	212.590.050	2.701.519.500	2.509.583.125	(189.457.975)	593.984.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA ARTHA SEMESTA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	197.786.506	294.298.513	374.930.542	7.461.484	109.692.993	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	Farmasi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	194.437.600	1.339.539.581	1.184.619.497	(62.254.616)	411.612.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ACHANTUS	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	191.248.264	1.182.852.862	660.105.395	17.120.454	696.875.277	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAJAWALI NUSINDO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	189.218.227	336.443.949	381.298.171	105.057.475	39.306.530	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GUNA ABDI WISESA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	189.200.000	1.961.605.800	1.908.445.000	70.180.000	172.180.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGUNG	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	185.454.000	969.339.250	1.038.731.650	(18.545.400)	134.607.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MADESA SEJAHTERA UTAMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	181.706.000	393.162.000	582.813.000	(7.945.000)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIRGA MANDIRI	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	173.033.515	497.403.582	467.481.967	60.480.501	142.474.629	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRADIPTA CAKRAWALA PASIFIC	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	168.176.167	744.008.621	648.280.987	37.588.543	226.315.258	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURGIKA ALKESINDO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	166.935.690	1.301.539.498	1.235.183.043	(232.564.945)	465.857.090	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR IRAWATI SETIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	165.747.600	931.560.834	660.931.736	(13.408.080)	449.784.778	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KEBAYORAN PHARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	135.746.278	164.069.883	259.610.807	35.997.354	4.208.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUTA AFIAT	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	126.125.020	237.382.605	344.497.719	(5.837.344)	24.847.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAWSIM ZECHA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	124.237.951	657.260.500	288.345.517	124.237.951	368.914.983	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRI SAPTA JAYA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	123.541.700	549.956.092	470.001.540	(4.654.630)	208.150.882	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TEMPO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	121.383.381	634.471.200	594.712.800	41.866.581	119.275.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FRISMEDE HOSLAB	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	117.552.729	594.839.786	996.376.918	(348.051.428)	64.067.025	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANARA TRISAKTI MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	115.587.500	56.870.000	159.348.750	13.108.750	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LANG-LANG GLOBAL SUKSES	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	114.288.600	265.069.200	291.647.400	(9.969.600)	97.680.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA BAKTI NIAGA PERKASA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	113.102.267	197.716.200	217.977.650	(4.056.310)	96.897.127	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIKA SOLUSINDO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	112.047.500	784.564.000	795.019.060	(15.584.460)	117.176.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TODOMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	112.000.000	31.680.000	119.680.000	24.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	87.228.575	81.112.455	123.394.755	42.601.025	2.345.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMPM HEALTHCARE	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	84.507.699	312.159.590	355.205.000	10.842.789	30.619.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTISUMBER HASIL SEMPURNA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	79.845.301	272.192.103	240.029.457	45.238.760	66.769.187	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BRATACO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	78.612.000	517.552.419	517.532.509	(7.861.200)	86.493.110	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOLAB ARTHA MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	65.250.000	-	-	65.250.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIRTA TEKNOYS	IPSR
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	62.370.000	151.643.250	218.616.750	(6.237.000)	1.633.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RIOCA MEDICA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	54.318.207	489.024.660	601.102.451	(57.759.584)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA SARITAMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	50.287.500	182.294.475	237.610.725	(5.028.750)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SARANA MAJU SEJAHTERA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	50.177.500	11.537.862.426	10.342.493.752	6.763.300	1.238.782.874	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPKARKO	Cetakan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	45.822.450	267.773.418	275.588.918	(4.582.245)	42.589.195	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BARINDO SURYA A	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	45.738.000	-	44.236.500	1.501.500	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ADIWARNA BENTALA NIAGA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	43.000.000	639.320.000	503.360.000	(52.700.000)	231.660.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PATRIOT MEDIKA NUSANTARA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	39.490.424	153.106.250	173.556.350	(3.830.850)	22.871.174	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AKURAT INTAN MADYA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	38.096.000	46.494.800	124.230.480	(45.715.200)	6.075.520	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BIOGEN SCIENTIFIC	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	36.204.000	19.305.000	74.969.400	(19.460.400)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BARKODE	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	35.000.000	-	35.000.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UTANG HARRIS & GINDO (KAP)	Akuntansi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	34.137.601	67.070.407	82.762.751	(1.583.213)	20.028.470	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUMBERMITRA AGUNG JAYA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	34.036.363	1.450.000	-	-	35.486.363	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PHARMINDO LETARI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	29.723.750	133.448.700	117.919.450	6.739.250	38.513.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR MULIA INDOMEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	29.136.250	101.181.003	115.685.625	(1.945.625)	16.577.253	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA GUNA MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	28.937.300	289.424.835	190.895.430	(2.162.480)	129.629.185	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAYA MUDA AGUNG	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	28.636.362	74.749.999	74.749.999	12.886.363	15.749.999	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UTANG U-SUN INTERNATIONAL	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	25.996.250	34.249.875	43.177.750	6.178.375	10.890.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GAUDIUM VITAE	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	22.043.250	105.942.649	97.906.489	6.866.000	23.213.410	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DISTRIVERSA BUANAMAS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	19.159.090	848.222.400	50.580.000	8.621.590	808.179.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	18.981.818	-	18.981.818	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIKA NIAGA PERKASA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	18.097.310	255.110.693	101.360.534	809.616	171.037.853	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SAN PRIMA	Farmasi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	16.650.000	868.014.463	442.510.131	6.475.000	435.679.332	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDONESIA SENTOSA ABADI (ISA)	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	13.696.680	2.887.500	-	13.696.680	2.887.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GOLDEN GLOBE MEDICA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	12.902.600	89.610.900	73.744.000	9.939.700	18.829.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIRTO BUMI ANEKA INDUSTRI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	12.430.000	57.995.850	39.027.450	12.430.000	18.968.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUBUR MEDI SENTOSA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	10.210.000	11.143.000	8.602.000	10.210.000	2.541.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA MAKMUR ABADI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	9.487.800	-	-	9.487.800	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRESIK SARANA TIRTA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	9.201.300	-	33.100.200	(23.898.900)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDALAN MEDIKA SEJAHTERA ABADI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	8.801.000	19.393.000	19.393.000	8.801.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BOROBUDUR GRAFIKA UTAMA	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	8.150.000	917.725.246	917.725.246	8.150.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MURAH SUKSES	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	6.254.545	7.755.522	7.755.522	6.254.545	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARVES MEDIKAL INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	4.911.499	13.071.249	13.071.249	4.911.499	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LANNYNO TRIMURTI REZEKI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	3.914.250	6.930.000	7.911.750	2.932.500	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEJAHTERA KARYA MULIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	3.828.000	-	-	3.828.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWI ASRI GRAHA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	3.718.920	-	-	3.718.920	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA FAJAR SELARAS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	3.675.000	124.140.500	138.578.000	(12.495.000)	1.732.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERCA NIAGA MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	13.260.000	-	13.260.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MURTI ALAM MANDIRI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.990.000	1.709.105	1.709.105	2.990.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ACE HARDWARE	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.853.562	-	2.853.562	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUMBER MANDIRI ALKESTRON	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.674.100	15.798.808	9.268.768	2.674.100	6.530.040	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIPA PUSPA LABSAINS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.950.000	-	-	1.950.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LINTAS BUANA PERKASA	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.900.000	-	-	1.900.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.760.000	5.049.000	6.985.000	(176.000)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA ANUGRAH MEDIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.540.000	-	-	1.540.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNIVERSAL STAR MEDICAL	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	900.000	-	-	900.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PANJI PRIMA DINAMIKA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	800.000	329.248.215	313.362.215	-	16.686.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DELVI PRIMATAMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	761.999.944	851.999.929	(179.999.985)	90.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NUSANTARA BINA DIAGNOSTIK	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	1.047.402.160	1.025.685.510	(3.960.000)	25.676.650	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MAHAKARYA MANDIRI.CV	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	1.228.266.928	1.082.793.079	-	145.473.849	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ERGASIA PUTRI MANDIRI	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	785.846.178	608.457.399	-	177.388.779	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERKEMBANG SELARAS DAYA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	-	-	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cakra Manunggal Perkasa Nusantara	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	372.427.440	301.247.100	-	71.180.340	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRANSMEDIC INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	-	-	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UKRIDA	Diklat
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	494.128.800	389.719.000	-	104.409.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NIAGA LESTARI	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	200.902.535	310.815.025	(138.842.990)	28.930.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MIDIF FARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	343.903.000	326.013.000	(45.070.000)	62.960.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PHARMA INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	243.568.650	170.340.200	-	73.228.450	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDITECH INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	320.553.733	248.286.703	-	72.267.030	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUNIA NUTRISI RETAILINDO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	257.378.000	105.370.800	-	152.007.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KUNTUM	Pemulasaran
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	463.552.389	411.649.989	-	51.902.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PUTRA TIK TOK	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	132.600.000	84.400.000	24.200.000	24.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUDIN LINGKUNGAN HIDUP	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	399.365.120	352.564.520	-	46.800.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAYA GEMILANG	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	251.350.000	212.575.000	-	38.775.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PUTRA OBOR ALKESINDO	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	111.359.997	123.359.995	(11.999.998)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGA PRATAMA MEDICALINDO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	106.350.750	85.599.250	-	20.751.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDEQ MANDIRI UTAMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	132.252.450	95.108.200	-	37.144.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KARINDO ALKESTRON	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	375.316.810	269.819.110	-	105.497.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMIRA JAYA MANDIRI	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	145.523.775	78.699.536	-	66.824.239	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PENTA VALENT	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	110.044.074	78.567.046	-	31.477.028	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUTA BERKAT ABADI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	109.905.634	52.272.009	-	57.633.625	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOTAL MEDIKA PERSADA	Farmasi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-			-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ESA MEDIKA MANDIRI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	115.885.000	89.850.000	-	26.035.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CENTURY UTAMA LESTARI	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-			-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRASIA VISI PRATAMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	4.550.000		-	4.550.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KUBE MAWAR PUTIH	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	11.917.620	19.625.320	(7.707.700)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	51.997.700	24.383.168	-	27.614.532	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FESCO INDONESIA,PT	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	3.951.720	8.424.320	(4.472.600)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MUKTI REJO ABADI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	5.907.500	5.907.500	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BPLHD	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	15.374.982	10.874.988	-	4.499.994	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ROHTO LABORATORIES INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		523.326.457	185.333.775	-	337.992.682	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEMKA SAKTI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		57.220.485	8.978.297	-	48.242.188	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	REKAMILENIUMINDO SELARAS	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		8.971.826	8.971.826	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tenang Jaya Sejahtera	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		9.020.000	9.020.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Setiawan Sedjati	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		6.945.000	6.945.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Pos Indonesia	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		901.713.650	896.773.650	-	4.940.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RUMAH TANGGA	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		56.021.418	3.300.000	-	52.721.418	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAGI CAPRI	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		-	4.207.500	(4.207.500)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sekarguna Medika	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		157.090.908	157.090.908	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Thosindo Elevator Utama	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		6.600.000	6.600.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Pancaraya Krisnamandiri	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		49.316.300	85.162.000	(62.388.700)	26.543.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABADINUSA USAHA SEMESTA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		8.800.000	8.800.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BPFK	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		1.914.000	1.914.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cahaya Kharisma	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		167.225.000	87.365.000	(25.085.000)	104.945.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAFIRA DWI PHARMA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		13.365.000	13.365.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Endo Global Medikatama	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		7.947.600	7.947.600	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Esa Medika Mandiri	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		22.415.000	22.415.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Astra Graphia,TBK	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		99.000.000	132.000.000	(33.000.000)	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Fresenius Medical Car Indonesia	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		237.334.401	176.743.200	-	60.591.201	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTERGASTRA NUSANTARA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		16.275.650	16.275.650	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cobra Dental	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		186.500.000	186.500.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tatanan Estetika Ekajaya	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		168.336.759	73.490.677	-	94.846.082	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LEWI TATO	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		10.200.000	10.200.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PDS Patklin	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		92.400.000	92.400.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		4.849.160	2.273.996	-	2.575.164	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OSADHA GRAHA S	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		114.692.220	104.110.520	-	10.581.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SEJAHTERA PERKASA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		1.511.298.072	488.166.822	-	1.023.131.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WEGO MEDIKA INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		9.167.400	9.167.400	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Derma Relis MedicalCare	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		186.099.120	186.099.120	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Threekem Bening Perkasa	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		45.925.000	36.740.000	-	9.185.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA SEJAHTERA	Perlengkapan
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja				-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Medik Elektro Teknik	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja				-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Utama Sarana Medika	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		41.249.998	38.999.999	-	2.249.999	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KINARYA PRIMA HUSADA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		42.910.000	5.940.000	-	36.970.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WORCKHARDT PHARMA INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		206.253.275	121.933.425	-	84.319.850	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRO HEALTH INTERNATIONAL	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		46.888.600	8.472.200	-	38.416.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERMATA BUNDA ARTANO	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		4.872.000	4.872.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Karyana Sanesia	Akuntansi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		150.120.000	150.120.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jembar Makmur Utama	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		1.362.000	1.362.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Maju Niac Motor	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		24.508.002	24.508.002	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Multipard Mandiri	IPSRs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		133.248.900	57.250.000	-	75.998.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NUGRA KARSERA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		565.215.068	565.215.068	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IPSRs	ipsrs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		134.196.876	-	-	134.196.876	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FOKUS DIAGNOSTIK	Farmasi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		125.850.000	125.850.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bunga Kayu Manis	ipsrs
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		1.992.432.224	1.992.432.224	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jalan Hijau	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		59.200.000	-	-	59.200.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ITS SCIENCE INDONESIA	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		10.461.640	10.461.640	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Unilab Perdana	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		480.000	-	-	480.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SOLOCONE	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		37.158.000	37.158.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Wira Surya Cemerlang	K3
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		9.240.316	-	-	9.240.316	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA HEALTH CARE	Farmasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		17.600.000	-	-	17.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMED KAHANASTI I	Farmasi
17	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	97.769.728	510.678.984	521.120.965	-	87.327.747	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Abadi Nusa	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	858.577.432	858.577.432	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Abhimata Manunggal	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	180.276.241	4.923.447.009	3.100.935.400	-	2.002.787.850	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Afina Sinar Cemerlang	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	80.350.997	80.350.997	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Adiwarman Bintara Niagatama	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	58.935.449	58.935.449	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Amithya Satya Laras	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	35.881.913	225.377.621	200.337.833	-	60.921.701	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMPM Health Care	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	179.928.754	1.060.338.772	973.004.508	-	267.263.018	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Aneka Gas	Pembelian Persediaan Gas Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	107.837.355	7.400.185.330	6.376.055.244	-	1.131.967.441	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Antar Mitra Sembada	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	142.276.517	223.476.100	365.752.617	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Anugerah Bintang Meditama	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	2.612.514.289	7.287.600.332	4.496.504.997	-	5.403.609.624	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Anugerah Pharmedo Lestari	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1.083.322.220	7.976.435.896	4.877.952.997	-	4.181.805.119	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Anugrah Argon Medica	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	76.520.918	223.500.823	290.561.500	-	9.460.241	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bina Artha Semesta	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.103.013	185.300.721	209.403.734	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bina Bakti	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	55.200.573	35.798.453	-	19.402.120	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bina Makmur Abadi	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	17.565.312	987.441.008	975.699.844	-	29.306.476	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bina San Prima	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	17.594.431	183.250.330	200.844.761	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Bisawi Tumbuh Selaras	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	44.852.513	623.497.118	611.925.300	-	56.424.331	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Brataco	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	46.898.478	300.654.298	347.552.776	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Citra Vita Buana	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	5.950.810	221.449.336	197.400.322	-	29.999.824	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cobra Dental	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	412.300.992	379.749.821	-	32.551.171	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Damha Laboratory Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	40.493.112	300.772.330	268.725.334	-	72.540.108	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Daya Muda Agung	Pembelian Persediaan Gas Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	196.700.335	196.700.335	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Demka Sakti	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	62.888.557	614.500.229	677.388.786	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Diagnostika Sistem Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	79.508.810	240.750.300	276.543.650	-	43.715.460	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dian Graha ElektriKa	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	304.973.020	98.000.325	402.973.345	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dian Langgeng Pratama	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	469.993.238	1.200.925.330	1.539.557.822	-	131.360.746	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dian Trikarsa	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	40.086.529	122.954.661	131.500.449	-	31.540.741	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Diastika Biotekindo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	28.120.975	294.200.991	217.230.400	-	105.091.566	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dinamis Mandiri Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	325.600.125	71.222.664	396.822.789	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Dinareka Teknologi	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	316.883.110	316.883.110	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dipa Puspa Labsains	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	33.555.621	196.560.778	211.850.335	-	18.266.064	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DistriVersa Buana	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	397.474.603	7.544.887.201	5.009.549.552	-	2.932.812.252	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Dos Ni Roha	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	16.275.942	186.700.450	202.976.392	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Duta Rizky Anugerah	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	555.950.755	7.771.160.125	6.052.311.275	-	2.274.799.605	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Enseval Putera Mega Trading	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	525.172.609	525.172.609	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Esa Medika Mandiri	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	78.886.601	78.886.601	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Fokus Diagnostic	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	1.365.182.160	1.365.182.160	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Frismed Hoslab Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	604.129.764	545.955.065	-	58.174.699	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Global Dent	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	13.126.368	550.445.700	508.000.223	-	55.571.845	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Global Selaras Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	33.138.898	521.918.445	511.876.421	-	43.180.922	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Golden Globe Medica	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	312.211.184	129.053.600	441.264.784	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Hospimedik Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	313.583.110	3.235.841.510	3.411.650.434	-	137.774.186	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS Medical System Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	256.416.594	2.708.914.945	2.155.675.900	-	809.655.639	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Indofarma Global Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	87.066.001	87.066.001	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Indomedik Niaga Perkasa	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	122.677.200	672.313.875	715.000.985	-	79.990.090	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Intergastra Nusantara	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	111.533.999	-	111.533.999	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. IntimediKa Puspa Indah	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	62.774.632	181.983.790	160.125.600	-	84.632.822	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Intisumber	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN					KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	117.610.700	117.610.700	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Istana Chemindo Jaya Sales	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	20.450.591	366.188.158	351.800.224	34.838.525		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Jantra Reka Saksanamas	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	21.953.952	126.035.740	125.700.652	22.289.040		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Kallista Prima	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	8.919.836	134.285.500	143.205.336	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Khan Amanah Sejahtera	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	167.275.827	2.370.445.701	2.080.654.810	457.066.718		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kimia Farma	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	170.801.531	504.317.574	616.231.450	58.887.655		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Madesa Sejahtera Utama	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	247.236.000	247.236.000	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Medeq Mandiri Utama	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	20.492.195	-	20.492.195	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Medika Cahaya Mandiri	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	2.439.360	2.439.360	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Medipath Science	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	87.339.351	35.600.996	122.940.347	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Medtek	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	23.382.137	-	23.382.137	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mega Andalan Kalasan	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	139.249.148	992.758.116	1.110.425.600	21.581.664		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Megah Medika Pharma	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	5.800.000	224.570.336	230.012.336	358.000		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Megah Medical Abadi	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	193.623.892	1.507.835.398	1.352.300.886	349.158.404		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mensa Bina Sukses	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	856.219.998	5.102.761.973	3.380.052.471	2.578.929.500		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Merapi Utama Karya	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	61.083.807	473.711.125	471.200.997	63.593.935		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Midif farma	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	217.002.908	1.365.944.642	1.550.800.500	32.147.050		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Millenium Pharmacon	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	134.042.829	71.044.132	205.086.961	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Mitra Fajar Selaras	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	131.995.923	100.012.700	31.983.223		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mitra Prima Lestari	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	358.260.322	91.705.543	393.260.322	56.705.543		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Mitra Samaya sejati	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	62.305.972	24.423.554	62.305.972	24.423.554		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mufti Alam Mandiri	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	83.543.521	37.407.783	46.135.738		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Multi Redjeki Kita	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	75.600.998	55.578.600	20.022.398		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Multi Sarana Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	94.596.065	75.459.065	19.137.000		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Oncoprobe	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	184.200.646	361.900.775	500.845.231	45.256.190		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Ortho Timur	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	89.633.848	-	89.633.848	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pancaraya Krisnamandiri	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	359.566.830	5.140.653.904	3.565.700.855	1.934.519.879		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Parit Padang Global	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	108.936.612	3.571.053.936	3.327.853.450	352.137.098		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Penta Valent	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	79.670.470	79.670.470	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Persada Binamedika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	15.365.401	15.365.401	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Perdagangan farmasi Mitra	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	503.409.745	6.900.255.721	4.953.950.872	2.449.714.594		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PMI DKI Jakarta	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	33.412.500	33.412.500	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Maxwel Medikalingdo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	31.317.000	19.305.000	12.012.000		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pyridam farma	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	228.539.746	2.428.136.035	1.570.025.400	1.086.650.381		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	43.220.295	285.656.535	271.300.521	57.576.309		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Rekamileniumindo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	77.096.028	459.880.682	492.365.872	44.610.838		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Saba Indomedika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	24.635.987	24.635.987	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Sagi Capri	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	52.489.723	135.304.318	125.721.446	62.072.595		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Samator Gas	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	52.711.761	47.227.950	99.939.711	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Sarana Citra Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	6.522.480	64.308.838	70.831.318	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sentra Asia Gemilang	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	17.123.766	-	17.123.766	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Setia Anugrah Medika	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	5.439.938	-	5.439.938	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Setio Harto	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1.928.598	-	1.928.598	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Solocone Industry	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	145.908.043	227.009.337	305.750.004	67.167.376		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Sumber Mitra Agung Jaya	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	115.360.263	5.335.252.835	3.367.009.983	2.083.603.115		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Sumber Mitra	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	66.830.554	80.947.196	147.777.750	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Surgika Alkesindo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	7.522.699	-	7.522.699	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Synergy Systems Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	76.512.351	223.400.552	299.912.903	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tamara Overseas Corporindo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	6.078.938	1.244.628.800	1.231.200.986	19.506.752		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tawada	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	893.572.251	3.700.226.446	4.050.379.856	543.418.841		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tempo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	89.247.004	43.672.926	122.546.300	10.373.630		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tiara Kencana	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	13.172.079	74.528.742	87.700.821	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tirta Teknosys	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	4.809.650	95.987.500	100.797.150	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Todoma	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	87.102.370	29.540.295	116.642.665	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tri Sapta Jaya	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	59.796.510	684.369.644	711.600.554	32.565.600		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. United Dico Citas	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	23.569.872	140.676.250	164.246.122	-		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Valetindo	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	735.600.228	679.800.554	55.799.674		Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Widya Mitra Persada	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	455.900.327	412.596.778		43.303.549	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Wego Medika Indonesia	Pembelian Persediaan Alkes & Obat-obatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	-			-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	355.572.492	355.572.492		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Arata Parasolusi	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	36.499.000	214.280.338	231.000.765		19.778.573	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Bhineka Mentari Dimensi	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	83.211.857	62.477.891		20.733.966	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Solocone Industry	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	4.387.691	175.600.932	122.358.900		57.629.723	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Cipta Dharmagraha Pratama	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	211.700.439	200.123.775		11.576.664	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Wynamcom Unitama Sejahtera	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	49.500.000	-	49.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Soejatna , Mulyana & Rekan	Belanja Jasa Konsultan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	50.277.070	160.422.876	181.300.225		29.399.721	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Indocare Pacific	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	116.760.219	421.900.876	500.015.725		38.645.370	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kenca Mulya	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	583.241.602	497.650.453		85.591.149	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Dataskrip	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	19.923.750	200.776.320	198.900.874		21.799.196	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Terlaksana	Biaya Cetakan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	62.076.520	62.076.520		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Ditha Kasih Mandiri	Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.494.144	732.987.631	724.621.110		32.860.665	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sumber Mutiara	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	65.355.000	1.254.300.932	1.285.200.135		34.455.797	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sumber Mitra	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	1.000.594.392	950.984.350		49.610.042	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	X-tracom	Pembelian ATK & Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	45.733.421	37.950.135		7.783.286	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Niaga Global Internusa	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	253.400.129	209.946.604		43.453.525	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Hidea Inti Daya	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	20.950.399	20.950.399		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tesna Inovind	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	36.518.984	710.300.928	687.543.125		59.276.787	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Wiraguna Bhakti	Biaya Cetakan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	276.400.932	253.860.665		22.540.267	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Murya Sumber Wijaya	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	84.800.000	38.700.546	123.500.546		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Exa Teknologi Indonesia	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	27.647.632	79.648.932	103.450.112		3.846.452	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Klip Plastik	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	132.660.000	132.660.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Lestari Sentosa	Biaya Pengadaan Seragam
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	24.024.000	24.024.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Gomda Sindaru Indonesia	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	92.587.640	92.587.640		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Bursa Selaras Bersama	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	225.673.543	197.873.450		27.800.093	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Markindo Anugerah	Biaya Cetakan
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	55.460.932	55.460.932		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Erakomp Infonusa	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	67.489.686	114.598.325	176.854.325		5.233.686	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Oasis Water International	Pembelian ART + Biaya Sewa Barang Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	147.892.357	126.332.721		21.559.636	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Pancaraya Krisna Mandiri	Pembelian Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	15.180.000	73.621.890	88.801.890		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Nana Mitra Global	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	85.267.585	85.267.585		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Penta Prima Gemilang	Pembelian ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	421.550.677	371.220.650		50.330.027	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jaya Kencana	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	72.000.333	237.677.891	95.621.379		214.056.845	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kopkar	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	79.250.887	79.250.887		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Aksa Mulia Perkasa	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	86.432.112	86.432.112		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Esco Utama	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	56.584.735	68.325.441	98.700.338		26.209.838	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Valentina	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	1.250.557.390	919.200.650		331.356.740	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Duta Kreasi Informatika	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	37.667.838	758.350.998	631.255.732		164.763.104	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cipta Dharmagraha Pratama	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	316.225.638	281.550.332		34.675.306	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Jaya Mulya	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	22.385.000	411.887.905	397.321.115		36.951.790	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Airmas Semesta Samudera	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	38.956.465	129.800.553	112.534.220		56.222.798	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Verosani Inderaperkasa	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	207.653.446	111.887.600		95.765.846	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tirtanusa Mandrasakti	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	87.500.883	87.500.883		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Ditha Kasih Mandiri	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	64.200.998	64.200.998		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Cipta Sinergy	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	197.827.665	197.827.665		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Niaga Global Internusa	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	197.006.010	113.754.338		83.251.672	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Grasia Raya Mandiri	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	4.400.000	4.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Murti Indah Sentosa	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	47.451.785	38.978.650	60.543.228		25.887.207	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mufti Alam Mandiri	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	50.388.759	39.200.774		11.187.985	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jakarta Service	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	36.333.000	-	36.333.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Ogawa Triguna Prima	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	411.390.887	219.630.114		191.760.773	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Duta Kreasi Informatika	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	78.500.230	40.774.550		37.725.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Duta Rizky Anugerah	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	45.601.985	500.337.630	392.300.774		153.638.841	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kenca Mulya	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	17.863.191	62.750.220	72.770.921		7.842.490	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Urogen Advance Solution	Pemeliharaan Alat Radiologi
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	71.398.224	42.755.841	88.553.402		25.600.663	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Unilab Perdana	Sanitasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	63.445.330	63.445.330		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Hospimedik Niaga Utama	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	95.125.008	69.000.338		26.124.670	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Rentokil	Sanitasi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
					PEMBAYARAN				KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.643.721	80.900.384	83.200.783		22.343.322	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Intergastra	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.989.500	65.006.992	71.634.240		18.362.252	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Abbot Product Indonesia	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	21.900.587	12.748.560		9.152.027	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Aplikanusa Electronik	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	37.238.960	-	37.238.960		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tirta Sumber Makmur	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	184.009.256	171.334.509		12.674.747	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sekarguna Medika	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	32.735.409	23.002.675		9.732.734	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Hexalindo Mitra Perkasa	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	66.932.000	113.005.732	113.891.226		66.046.506	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mufti Alam Mandiri	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	79.750.363	64.699.823		15.050.540	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Puja Teknik Servindo	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	91.249.543	91.249.543		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. Rajaya Putra Niaga	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	24.750.000	-		24.750.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Meta Mata Medika	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	95.600.779	-		95.600.779	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	X-Tracom	Pemeliharaan Inventaris
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	32.391.701	-		32.391.701	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Tenang Jaya Sejahtera	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	64.540.355	32.136.393	79.093.472		17.583.276	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS Medical System	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	13.043.250	-		13.043.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Diaistika Biotekindo	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	44.965.800	44.965.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Ecofiltra Gemilang	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	220.338.721	133.564.733		86.773.988	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Samhana	Sanitasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	50.125.877	-	50.125.877		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Tribudidarma	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	20.711.155	20.711.155		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Gomda Sindaru	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	36.081.614	36.081.614		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Wandira Perkasa	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	161.783.687	117.382.964		44.400.723	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Samudra Gelora Agung	Sanitasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	26.291.384	-	26.291.384		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sumber Setia Abadi	Pemeliharaan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	35.598.439	-	35.598.439		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Biogen Scientific	Persediaan Peralatan Gedung
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	42.688.800	42.688.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Indobara Bahana	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	36.390.750	-	36.390.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Prasadha Pamunah Limbah Industri	Sanitasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	225.600.948	156.300.884		69.300.064	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Anugerah Pharmindo Lestari	Pemeliharaan Alat
	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	-	425.900.883	339.699.300		86.201.583	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jalan Hilau	Sanitasi
18	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	90.423.000	383.554.075	293.037.500	-	180.939.575	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABADINUSA USAHASEMESTA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	44.344.874	103.819.464	94.887.140	-	53.277.198	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ADVANCE MEDICARE CORPORA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	88.718.950	38.351.350	114.511.550	-	12.558.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AFINA SINAR CEMERLANG, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	825.000	11.081.250	8.212.500	-	3.693.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGARINDO BOLOGIKA KOMPANY PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	60.799.125	304.088.250	193.398.875	-	171.488.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGUNG CV	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	22.020.208	156.800.550	157.206.076	-	21.614.682	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGUNG MANDIRI SENTOSA, PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	4.455.000	13.297.500	10.365.000	-	7.387.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGUNG WIJAYA EKASENTOSA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	34.064.325	109.263.250	100.874.075	-	42.453.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIRTAS, CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.536.000	19.029.000	11.110.200	-	9.454.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AKURAT INTAN MADYA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	262.805.130	270.040.470	532.845.600	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AKTIFITAS ATMOSFIR, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.205.565	8.282.595	15.321.160	-	2.167.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ALAM DEWO, CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	20.611.125	-	-	-	20.611.125	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ALMAGADA JAYA . CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	14.029.430	367.299.537	276.517.297	-	104.811.670	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMPM HEALTH CARE INDONESIA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	32.997.500	-	-	-	32.997.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMRA PUTRAGIAN,CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.149.083	20.439.536	12.670.665	-	9.917.954	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDIARTA MATRA UTAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	75.554.622	922.086.766	631.039.361	-	366.602.027	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANEKA GAS INDUSTRI, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	149.003.232	544.638.039	569.322.825	-	124.318.446	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANTAR MITRA SEMBADA (AMS), PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.788.589.302	7.328.869.073	5.311.923.674	-	3.805.534.701	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH ARGON MEDICA (AAM), PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.504.631.572	13.074.371.044	8.364.198.342	-	8.214.804.274	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH PHARMINDO LESTARI (APL), PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.691.420.534	-	-	-	1.691.420.534	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ARIANDA PUTRA PRATAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	7.852.778	36.616.714	23.519.401	-	20.950.091	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR, PT	GIZI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	390.991.800	1.685.688.566	1.660.173.116	-	416.507.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ATIKA GLOBAL MARKETING. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	53.640.947	-	53.640.947	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AYUMI ALAMINDO PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	24.712.074	-	24.712.074	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	B BRAUN MEDICAL INDONESIA. PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	12.024.164	138.251.018	138.132.818	-	12.142.364	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BALINA AGUNG PERKASA. PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.279.459	9.972.001	10.104.009	-	3.147.451	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BAMBI, PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.378.100	26.890.500	21.512.400	-	10.756.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BARKODE, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.576.650	1.980.000	990.000	-	2.566.650	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERCA NIAGA MEDIKA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	217.801.932	903.732.342	782.537.328	-	338.996.946	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SAN PRIMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.216.250	2.324.250	2.324.250	-	2.216.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SUKSES MEDIKA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.512.774	20.314.067	13.737.085	-	9.089.756	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINTANG SHAFWAN. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.692.892	31.528.618	31.528.618	-	9.692.892	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BIOGEN SCIENTIFIC. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	179.942.590	-	179.942.590	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BONA TIRTA ANUGERAH, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.982.727	54.895.654	50.121.794	-	11.756.587	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BRATACO, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	7.190.909	17.974.024	25.164.933	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BUMI INDAH SARANAMEDIS PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	309.430	-	-	-	309.430	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHYA ANINDYA CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.451.750	22.235.225	7.042.750	-	21.644.225	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA DHARMAGRAHA PRATAMA , CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	14.400.699	127.486.819	67.855.496	-	74.032.022	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.LAB	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.450.000	1.020.539.503	1.004.805.054	-	17.184.449	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	D&D BERSAUDARA, CV	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	17.909.091	91.155.063	58.159.773	-	50.904.381	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAMYAS ADI. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	38.826.705	242.493.027	256.283.327	-	25.036.405	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DATASCRIPT PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	187.337.955	466.128.756	553.861.518	-	99.605.193	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAYA MUDA AGUNG, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.811.137	-	9.811.137	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEDEDT SUPPLY, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	819.060	67.285.879	15.043.637	-	53.061.302	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DELVI PRIMATAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	915.734	27.779.891	28.695.625	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEMKA SAKTI, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	14.327.810	189.127.092	95.996.327	-	107.458.575	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEXA ARFINDO PRATAMA,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	55.160.000	314.975.420	198.857.710	-	171.277.710	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIASTIKA BIOTEKINDO. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.049.982	1.258.400	3.308.382	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIPA PUSPA LABSAINS	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	56.302.960	239.348.977	160.331.369	-	135.320.568	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DISTRIVERSA BUANA MAS (DBM), PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	616.351.014	4.173.514.865	3.241.346.474	-	1.548.519.405	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOS NI ROHA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.270.200	38.683.636	3.270.200	-	38.683.636	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUTA AFIAT. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	31.556.000	181.902.500	181.685.500	-	31.773.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWI KARYA MANDALA PT	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.676.601	17.443.948	17.403.477	-	9.717.072	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWIMITRA MULTI PRATAMA, PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	114.298.836	575.038.497	380.878.069	-	308.459.264	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	EMERALD MANDIRI, CV	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.033.125.114	3.393.129.528	2.682.905.031	-	1.743.349.611	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	17.316.839	-	-	-	17.316.839	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ESTETIKA ENTER PRISINDO,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	4.995.887	108.601.148	45.842.355	-	67.754.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.080.320	6.240.960	8.321.280	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GANDASARI EKASATYA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	7.743.750	-	5.527.500	-	2.216.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GEMILANG INDAH LESTARI PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	18.220.530	-	18.220.530	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL JAYA MEDIKA PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	32.655.000	16.301.750	23.618.750	-	25.338.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PROMEDIKA SERVICE, PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.659.500	80.215.032	34.063.563	-	48.810.969	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GOLDEN GLOBE MEDICA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.736.228	34.343.531	27.387.490	-	10.692.269	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRACIA VISI PRATAMA. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.940.000	-	5.940.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRAHA ISMAYA PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	534.600	10.054.204	8.578.129	-	2.010.675	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GUNA ABDI WISESA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	36.540.300	-	14.870.300	-	21.670.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARUM DEWA PERSADA INDONESIA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	23.172.125	20.315.625	23.172.125	-	20.315.625	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARVESTIA MULYA PT	FARMASI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	107.258.684	619.846.724	457.402.541	-	269.702.867	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	57.715.747	285.874.031	213.055.795	-	130.533.983	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.751.450	24.023.802	18.653.092	-	8.122.160	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOLAB ARTHA MEDIKA	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	10.318.992	9.114.829	19.433.821	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIK NIAGA PERKASA,PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	925.780.650	-	-	-	925.780.650	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOPRIMA BIONET. PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	18.177.727	12.975.136	18.177.727	-	12.975.136	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOSOPHA SAKTI. PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	13.873.725	43.292.115	13.873.725	-	43.292.115	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTERGASTRA NUSANTARA .PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	158.075.456	726.929.282	545.638.808	-	339.365.930	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JANTRAREKA SAKSANAMAS, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	35.153.665	141.244.640	97.054.530	-	79.343.775	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KARINDO ALKESTRON. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	50.652.288	254.150.067	232.581.930	-	72.220.425	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KEBAYORAN PHARMA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.870.375	-	-	-	6.870.375	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KENCANA TIRTA ABADI,PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	15.403.008	14.796.912	15.403.008	-	14.796.912	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KHARISMA SEJATI CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	428.397.355	2.328.993.959	1.374.130.745	-	1.383.260.569	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA (KF)	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	7.825.825	52.141.825	51.309.500	-	8.658.150	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KLIP PLASTIK. PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	302.670.044	1.022.777.111	588.562.363	-	736.884.792	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI KARYAWAN RSUD PASAR REBO	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.664.200	6.407.839	-	-	10.072.039	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KRISBUW INDONESIA. PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	159.014.515	71.826.295	213.455.148	-	17.385.662	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAWSIM ZECHA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	686.019.086	161.472.948	840.848.455	-	6.643.579	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LESINDO JAYA UTAMA. PT	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	217.771.848	624.286.206	387.884.852	-	454.173.202	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MADESA SEJAHTERA UTAMA .PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	25.266.620	-	25.266.620	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MAESTRO PERSADA CV	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.550.250	2.890.975	-	-	9.441.225	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MAHATECH CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	4.580.250	-	-	-	4.580.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MARKINDO ANUGERAH C P, PT	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	15.267.500	-	-	-	15.267.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDIHOP. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.955.000	16.597.350	6.550.350	-	13.002.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDIKA TEKNIK BAHAMATAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	52.895.647	268.591.757	160.440.395	-	161.047.009	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDIPATH SCIENCE INDONESIA,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	64.111.187	300.604.761	165.081.074	-	199.634.874	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDISTIRA UTAMA	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	482.157.497	1.093.317.764	751.062.495	-	824.412.766	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDITECH INDONESIA . PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	198.000	-	-	-	198.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGA PRATAMA MEDICALINDO, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	26.178.960	91.727.726	55.320.799	-	62.585.887	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGAH MEDIKA PHARMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	131.362.211	447.464.084	412.984.011	-	165.842.284	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MENSA BINA SUKSES (MBS) , PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	708.589.277	3.803.137.011	2.025.073.076	-	2.486.653.212	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MERAPI UTAMA PHARMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	84.703.999	878.476.707	575.081.744	-	388.098.962	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	43.143.000	276.415.625	196.039.625	-	123.519.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA BENUA INTERLINE. CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	21.810.855	-	21.810.855	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA FAJAR SELARAS. PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	15.840.000	-	15.840.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA TEKNOLOGI IMA, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.364.140	27.374.430	3.364.140	-	27.374.430	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRAPRIMA LESTARI. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	13.272.875	11.376.750	11.376.750	-	13.272.875	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MURTI INDAH SENTOSA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	42.125.002	149.922.306	101.842.596	-	90.204.712	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MURYA SUMBER WIJAYA, PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	102.459.699	2.339.365.103	1.315.550.648	-	1.126.274.154	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NIAGA SUMBER GIZI CV	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	75.268.771	252.317.718	179.245.368	-	148.341.121	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ONCOPROBE UTAMA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	787.000	-	-	-	787.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OPTIK AO	Optik
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.081.306	22.278.828	16.947.048	-	14.413.086	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ORIONTAMA JAYA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	557.070.000	3.357.000.000	1.738.225.000	-	2.175.845.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PALANG MERAH INDONESIA	LABORATORIUM

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	379.025.539	595.275.886	691.658.136	-	282.643.289	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PANCA PERSADA MEDIKA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	701.250	646.250	880.000	-	467.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PANCARAYA KRISNAMANDIRI	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.080.000	4.320.000	5.400.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PANJI PRIMA DINAMIKA,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.145.620.642	2.129.467.040	2.263.806.650	-	1.011.281.032	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PARIT PADANG GLOBAL, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	267.707.254	1.154.787.821	1.158.216.849	-	264.278.226	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PENTA VALENT. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	49.687.470	228.351.505	223.477.975	-	54.561.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PILLAR PUTRA RANGO CV	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.540.490	12.597.300	13.829.400	-	4.308.390	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PLATINUM MEDLAB INDONESIA PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	11.041.850	6.102.074	4.013.875	-	13.130.049	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA HUSADA, CV	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	63.040.000	393.015.000	428.475.000	-	27.580.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMANUSA MUKTI UTAMA	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.289.450	53.387.740	29.138.340	-	29.538.850	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMAYUDHA KENCANA , PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	558.641.841	826.648.520	1.016.231.497	-	369.058.864	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAJAWALI NUSINDO, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	30.411.875	-	30.411.875	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAMADHAN PRATAMA MANDIRI. CV	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	47.201.200	113.075.990	105.081.257	-	55.195.933	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAVINDRA PUTRA PRATAMA,PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	44.325.000	199.462.500	88.650.000	-	155.137.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RIOCA MEDICA,PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	741.750	-	-	-	741.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSJ BINAWALUYA	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	213.792.330	1.564.585.557	841.544.026	-	936.833.861	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SABA INDOMEDIKA . PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	10.365.000	48.102.204	41.449.014	-	17.018.190	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAGI CAPRI, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	1.548.958	58.285.097	13.005.828	-	46.828.227	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA SARI TAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	32.505.000	88.650.000	32.505.000	-	88.650.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SARANA CITRA MEDIKA. PT	Film Radiologi
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	4.991.192	71.050.652	21.945.800	-	54.096.044	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SATRIA KENCANA MEDIKA, CV	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	22.550.000	228.882.073	134.060.875	-	117.371.198	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SATRIO JAYA MANDIRI, CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	29.311.257	148.171.545	79.965.472	-	97.517.330	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEJAHTERA KARYA MULIA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	41.461.408	284.247.139	205.143.389	-	120.565.158	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEKARGUNA MEDIKA , PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	104.796.949	128.776.802	185.451.645	-	48.122.106	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SENTRA ASIA GEMILANG. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	47.268.593	73.627.463	63.963.749	-	56.932.307	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SENTRUM DENTALINDO. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	228.000	-	-	-	228.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SERENITY INDONESIA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	8.377.425	12.566.136	12.566.137	-	8.377.424	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR IRAWATI SETIA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	345.932.000	1.426.969.500	1.102.658.250	-	670.243.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR RODA UTAMA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	118.500.000	150.611.450	207.503.750	-	61.607.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINERGI KARYA MANDIRI, PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	21.573.470	157.534.991	54.353.285	-	124.755.176	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINERGI TRIDAYA MEDICAL PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	68.600.000	-	-	-	68.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SOS PROFESIONAL, PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	16.015.400	9.944.939	5.535.000	-	20.425.339	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SPECTRUM FILEFORCE, PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	36.750.000	-	36.750.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SPEKTRUM KREASI PRATAMA,PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	9.408.000	-	-	-	9.408.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SRIKANDI KENCANA UTAMA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	892.954.822	2.443.091.913	1.629.907.810	-	1.706.138.925	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUMBER MITRA. CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	27.669.394	3.992.751	31.662.145	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUPRATECHNIC INSTRUMENTASI PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	4.835.617	73.720.790	46.562.165	-	31.994.242	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURGIKA ALKESINDO. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.955.000	12.411.000	15.366.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TANSHIA CONSUMER PRODUCTS,PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	35.460.000	-	-	-	35.460.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAWADA HEALTHCARE	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	19.110.000	-	-	-	19.110.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TEMINDO JAYA KREATIF. PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	594.602.599	2.780.081.878	1.811.703.281	-	1.562.981.196	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TEMPO	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	145.698.791	691.112	146.389.903	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TENANG JAYA SEJAHTERA, PT	0

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	28.220.000	361.080.364	297.346.641	-	91.953.723	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TERLAKSANA JAYA. CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	3.576.400	-	3.576.400	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	THOMASONG NIRMALA. PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	960.000	8.640.000	7.680.000	-	1.920.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIARA AGUNG PRATAMA, PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	36.874.545	212.037.273	158.848.745	-	90.063.073	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIARA KENCANA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	304.069.480	778.871.522	581.827.792	-	501.113.210	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIGAN SEJAHTERA CV	Radiologi
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	40.458.775	74.769.619	44.617.326	-	70.611.068	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRI SAPTA JAYA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	270.120.206	3.119.065.995	2.655.529.513	-	733.656.688	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRINIAGA LESTARI. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	46.490.136	260.716.988	210.889.084	-	96.318.040	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNITED DICO CITAS, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.864.320	-	5.864.320	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	YORKINDO SERVISTAMA. PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	40.964.000	83.809.000	51.623.000	-	73.150.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ZIGMA MITRA ABADI PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	216.816.828	-	216.816.828	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Hutang RSU Adhyaksa	Reklasifikasi ke Hutang Pihak Ketiga
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		75.814.465	-	-	75.814.465	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIR MAS PERKASA PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		11.333.016	-	-	11.333.016	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIRINDO SENTRA MEDIKA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		9.456.000	-	-	9.456.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AKURAT SAKTI JAYA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		61.840.875	12.017.000	-	49.823.875	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ALFATH WAHANA SEJAHTERA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		137.476.451	137.476.451	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BANGUN MAJU ABADI PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		72.943.776	-	-	72.943.776	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERKEMBANG SELARAS DAYA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		10.780.000	5.390.000	-	5.390.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BESTINDO INTI PERKASA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		63.823.523	-	-	63.823.523	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BHINNEKA MENTARIDIMENSI	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		4.345.091	-	-	4.345.091	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA MAKMUR ABADI. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		15.082.320	15.082.320	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BIOTECH FARMA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		12.179.912	9.569.662	-	2.610.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHAYA TIGA BINTANG ABADI. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		163.766.477	-	-	163.766.477	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA PERSADA SUKSES PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		9.653.000	4.826.500	-	4.826.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CITRA DUA DIVA,PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		29.057.882	-	-	29.057.882	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CITRA VITA BUANA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		1.095.000	-	-	1.095.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CROWN DENTAL LABORATORY	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		24.936.200	4.895.200	-	20.041.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DERMARELIS, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		113.049.846	70.013.556	-	43.036.290	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIAN TRIKARSA. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		170.430.909	170.430.909	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DITHA KASIH MANDIRI. CV	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		99.785.671	93.012.319	-	6.773.352	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUA PUTRI JAYA CV	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		15.896.809	638.000	-	15.258.809	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWIASRI GRAHA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		3.175.937	-	-	3.175.937	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	EMS INDO APPLIANCES, PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		29.618.950	-	-	29.618.950	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENDOTECH CV	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		115.741.440	115.741.440	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FRISMED HOSLAB INDONESIA. PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		101.200.653	101.200.653	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GAPA CITRAMANDIRI PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		36.786.750	-	-	36.786.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GAYUH SETIA UTAMA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		182.424.398	182.424.398	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARMONI MITRA SUKSES. PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		368.709.810	-	-	368.709.810	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HJAU ALAMI BERSERI PT	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		31.549.323	16.844.499	-	14.704.824	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIKA SOLUSINDO, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		1.421.921.200	1.421.921.200	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTAN	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		5.880.000	-	-	5.880.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA KENCANA , PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		17.730.000	-	-	17.730.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KHALIFI BERSINAR DJAYA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		11.946.891	1.209.600	-	10.737.291	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA APOTEK PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		8.015.438	-	-	8.015.438	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA MEDIKA UTAMA, PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		19.211.677	2.744.527	-	16.467.150	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITSUBISHI JAYA ELEVATOR ANF ESCALATOR PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		4.539.955	-	-	4.539.955	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULIA TEKNIK	Pemeliharaan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		10.250.680	-	-	10.250.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTIGUNA CIPTASENTOSA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		54.679.812	-	-	54.679.812	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTIGUNA ELEKTRINDO. CV	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		167.580.000	-	-	167.580.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTIPARD MANDIRI. PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		38.298.918	5.846.875	-	32.452.043	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OSTA PRIMEDIA VENTURA PT	LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		120.785.625	79.785.000	-	41.000.625	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OXY MEDICA INDONESIA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		16.668.409	-	-	16.668.409	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERMATA BUNDA ARTANO PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		16.252.500	-	-	16.252.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA HEALTH CARE PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		3.378.550	-	-	3.378.550	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA ANUGRAH MEDIKA. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		4.358.624	4.358.624	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR MULIA INDOMEDIKA, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		152.875.448	152.875.448	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SRIAYU MULTI KREASI,PT	Alat Rumah Tangga (ART)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		8.037.590	-	-	8.037.590	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUBUR MEDI SENTOSA CV	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		2.142.000	2.142.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURYA PRIMA PERKASA, PT	0
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		22.422.400	-	-	22.422.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOSINDO ELEVATOR UTAMA PT	Pemeliharaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		34.089.826	6.607.277	-	27.482.549	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOTAL MEDIKA PERSADA PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		115.629.186	1.546.500	-	114.082.686	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRANSMEDIC	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		831.975.900	759.063.900	-	72.912.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UTAMI CATERING SERVICE PT	GIZI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		3.940.000	-	-	3.940.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	VERSACON MEDICAL. PT	FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		10.795.680	-	-	10.795.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WASTEC INTERNATIONAL. PT	Pemeliharaan
19	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.144.497.547			4.144.497.547	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Remun
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.206.869.442			2.206.869.442	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Jasa Dokter
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.359.327			3.359.327	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Jagut Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.659.028			2.659.028	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Jagut Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	6.202.645			6.202.645	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Jagut Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.304.750			2.304.750	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Nerus Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	35.316.750			35.316.750	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Nerus OK
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.906.000			3.906.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Nerus Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	13.938.000			13.938.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		On Call Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	9.292.000			9.292.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		On Call Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	9.187.500			9.187.500	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Shift dr HD
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	23.898.000			23.898.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Shift Non Medis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	113.778.000			113.778.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Shift Paramedis
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	51.450.000			51.450.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Shift Ruangan
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	100.590.000			100.590.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Shift UGD
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	20.470.588			20.470.588	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Honor dewas
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.491.900			4.491.900	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Honor Lainnya
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	29.900.000			29.900.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Honor Lainnya
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	5.472.000			5.472.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		By Lembur
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.615.200			7.615.200	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		By Lembur
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	500.000			500.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Transport
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.000.000			2.000.000	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		Uang Duka
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	9.427.000	35.803.900	45.230.900		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ADIWARNA BENTALA NIAGATAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.719.000	27.720.000	27.324.000		5.115.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGENA MEDIKA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.730.000	1.680.000	4.410.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGI PUTRA SEJAHTERA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	43.760.750	669.065.100	626.133.750		86.692.100	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGUNG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	104.221.898	409.329.635	437.594.773		75.956.760	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ALAM PUTRA SAKTI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	9.000.000	85.025.000	89.680.000		4.345.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ALPHA DENTAL LAB	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	19.548.045	76.048.225	95.596.270		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMPM HEALTHCARE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.745.917	547.351.097	430.268.718		129.828.296	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANARA TRISAKTI MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	6.600.000	645.836.620	579.222.424		73.214.196	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANEKA GAS	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	250.000	-	250.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANJANI DENTAL SUPPLIER	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	203.246.410	978.472.855	991.935.555		189.783.710	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANTAR MITRA SEMBADA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	620.522.646	2.179.032.145	2.179.649.199		619.905.592	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH ARGON MEDIKA (AAM), PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	145.135.705	42.541.950	187.677.655		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH DHARMA BAYU	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.695.858.539	12.908.832.456	12.523.912.231		4.080.778.764	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH PARMINDO LESTARI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	264.500	3.612.800	3.877.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTEK RINI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	43.500	2.839.500	2.883.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTIK RS BHAYANGKARA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	71.400.000	248.575.954	168.178.000		151.797.954	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ARJUNA SINATRIA AMARTA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	122.510.050	2.257.830.422	2.149.725.803		230.614.669	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Asuransi Pegawai Kontrak	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	86.526.540	-	86.526.540		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Asuransi Pegawai tetap	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.440.000	15.160.000	13.110.000		4.490.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AULIA SPALK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	17.256.800	152.621.590	137.552.085		32.326.305	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AZURI DENTAMED, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	263.977.675	302.693.560	566.671.235		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BAHANA KASIH CENDRAWASIH	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	13.809.000	-	13.809.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BALAI PFKJ	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.403.900	-	1.403.900		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BAYU SEJAHTERA, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	73.920.000	211.428.800	220.299.200		65.049.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERCA SCHINDLER LIFTS , PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	87.626.110	563.645.610	503.372.980		147.898.740	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA ARTHA SEMESTA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	548.711.569	2.696.226.670	2.456.869.356		788.068.883	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SAN PRIMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	15.075.443	79.811.225	80.742.326		14.144.341	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINTANG SHAFWAN, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.564.100	-	2.564.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	35.841.045	146.627.345	155.575.785		26.892.604	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BRATACO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	19.250.000	572.472.635	591.722.635		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Buyung Reza, Bakmi Golek, dll	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.755.000	15.901.050	23.227.050		429.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHAYA KHARISMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	15.752.000	87.132.100	102.884.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAKRA ANUGRAH PERKASA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	254.137.400	1.684.365.013	1.786.858.613		151.643.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CATUR DUTA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.850.000	25.795.000	29.645.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA DHARMAGRAHA PRATAMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.630.000	58.082.750	24.257.750		37.455.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA DHARMAGRAHA PRATAMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	22.000.000	-	22.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CITRA JAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	14.886.269	3.733.880	16.916.469		1.703.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	COBRA DENTAL INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	87.869.100	327.416.364	321.804.164		93.481.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CORNELINDO PERSADA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.400.000	3.190.000	6.590.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	D & D DENTIST & DENTAL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.262.693	127.002.300	97.311.087		41.953.906	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAYA MUDA AGUNG, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	741.100	-	741.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DELVI PRIMATAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	30.967.365	226.026.460	201.197.246		55.796.579	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DISTRIVERSA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.517.025.035	6.080.491.802	6.275.568.721		1.321.948.116	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOS NI ROHA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.164.497	53.145.679	45.094.473		15.215.703	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DUTA AFIAT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	22.020.350	137.199.535	94.482.300		64.737.585	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWITAMA SENTOSA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	595.000	2.669.000	2.584.000		680.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ELTHEAN LUHUR, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.086.197.403	3.721.620.108	3.715.670.436		1.092.147.075	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENSEVAL, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.640.000	5.302.880	7.942.880		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ESTU INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	28.017.000	72.171.000	84.051.000		16.137.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FARMETA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	14.318.007	133.766.534	109.076.770		39.007.771	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	59.431.680	416.303.712	346.515.840		129.219.552	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FRISMED HOSLAB	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	658.622.800	1.862.930.000	2.016.916.800		504.636.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GAUDIUM VITAE, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	104.033.490	456.267.001	422.271.828		138.028.663	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GELORA PRIMA SARANA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.475.000	760.999	3.235.999		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL DENT, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	16.595.040	45.117.765	49.266.525		12.446.280	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL INTAN ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	14.800.001	63.528.082	64.352.082		13.976.002	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PHARMA INDONESIA	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	17.500.010	-	17.500.010		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PROMEDIKA SERVICE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.513.600	29.786.460	34.926.540		7.373.520	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GOLDEN GLOBE MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	27.567.100	23.657.964	51.225.064		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRASIA RAYA MANDIRI, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	8.869.300	41.752.700	47.790.600		2.831.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HASANAH DARA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	38.639.998	75.664.003	94.640.000		19.664.001	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HEARING VISION	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.397.000	13.024.000	25.421.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HERLYK CITRA PRIMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.262.500	94.574.900	98.837.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HISACITRA NUSANTARA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	177.832.515	411.930.894	366.155.230		223.608.178	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS MEDICAL SYSTEM, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	36.190.000	90.180.000	126.370.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	44.453.980	186.696.218	163.671.443		67.478.754	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	33.016.500	35.213.640	68.230.140		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOLAB ARTHA MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	14.492.500	39.332.395	53.824.895		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIK NIAGA PERKASA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	39.501.000	82.390.000	39.501.000		82.390.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDORAYA NUSANTARA DJAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	20.148.800	147.100.308	142.553.907		24.695.201	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTERGASTRA NUSANTARA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	28.222.480	78.350.900	94.391.940		12.181.440	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTISUMBER HASIL SEMPURNA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.250.000	13.500.000	15.750.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Kompol	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.645.000	82.500.000	90.145.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Konsultan Hukum	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.750.000	15.500.000	17.250.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Petugas CS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.000.000	14.000.000	16.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Petugas Sc	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	300.000	3.000.000	3.300.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa RW	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.470.000	361.760.999	369.230.999		0	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA GAS INDONESIA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	254.063.436	1.206.227.743	1.229.310.852		230.980.327	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KARINDO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	36.642.620	184.628.759	204.739.369		16.532.010	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KEBAYORAN PHARMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	100.944.910	525.451.080	442.103.970		184.292.020	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KHALIFI BERSINAR DJAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	5.582.000	7.742.000	13.324.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIANG DENTAL, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	184.351.155	1.093.576.955	1.004.496.849		273.431.260	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	93.013.250	30.030.000	123.043.250		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI KARYA SASULING RAJAWALI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.812.500	165.508.750	156.846.250		13.475.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAMTOGU JAYA PERSADA , PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	29.808.620	59.622.517	84.556.752		4.874.385	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAWSIM ZECHA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	127.005.868	389.300.308	456.293.290		60.012.885	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIBATRI MANDIRI, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	5.089.040	40.712.320	35.623.280		10.178.080	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LIMA DISPO SELARAS, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	174.268.545	762.680.793	750.666.345		186.282.993	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LUMBUNG REJEKI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.388.000	76.574.300	59.626.050		20.336.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MADESA SEJAHTERA UTAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.336.840	-	2.336.840		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MANGGALA JAYA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	8.030.000	73.975.000	60.885.000		21.120.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDEQ MANDIRI UTAMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	52.031.265	265.478.796	299.948.561		17.561.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDIKA CAHAYA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.752.000	7.128.000	9.504.000		2.376.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDIKRON GENESUS INDONESIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	3.132.250	19.943.550	19.560.200		3.515.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDISON JAYA RAYA , PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	20.280.084	59.030.213	79.310.297		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDQUEST JAYA GLOBAL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	259.296.125	851.937.350	889.271.075		221.962.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGAH MEDIKA FARMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	414.696.391	2.273.273.686	2.509.565.028		178.405.049	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MENSA BINA SUKSES, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	562.099.157	1.769.621.120	1.915.616.724		416.103.553	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MERAPI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.066.048.302	18.480.000	1.066.048.302		18.480.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITSHUBISHI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	13.000.000	164.113.050	151.113.050		26.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MNC SKY VISION	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	57.632.284	1.136.409.424	830.068.337		363.973.371	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MPI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	5.335.000	22.880.000	22.055.000		6.160.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTI DAYA MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.178.000	20.189.400	22.367.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTI REDJEKI KITA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	36.995.310	238.522.553	232.050.904		43.466.960	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTI SARANA MEDIKA , PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	194.396.400	1.112.105.198	762.214.310		544.287.288	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NIAGA LESTARI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.390.400	5.138.300	6.528.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NIAGA SUMBER GIZI, PT	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	62.691.750	146.701.500	169.562.250		39.831.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NUSANTARA BINA DIAGNOSTIKA, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	6.830.000	40.010.000	44.105.000		2.735.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OBOR MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	305.250	1.831.500	2.136.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ORTHO TIMUR	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	874.603.971	2.864.394.993	2.808.098.658		930.900.305	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PARIT PADANG, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	367.028.692	1.010.722.655	1.195.001.970		182.749.377	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PENTA VALENT, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	8.504.100	21.309.750	23.007.600		6.806.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERSADA BINA MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	38.027.000	450.659.000	400.576.000		88.110.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PESONA MITRA JAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	16.335.000	378.050.000	211.385.000		183.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PETAN DAYA MEDICA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.801.500	10.543.500	15.345.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PILAR REJEKI OPTIMA, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	515.710.000	4.248.465.000	4.764.175.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PMI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	10.206.208	80.272.566	72.932.939		17.545.834	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRADIPTA CAKRAWALA PACIFIC	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	32.621.600	108.114.050	123.675.750		17.059.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PYRIDAM FARMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	219.090.392	949.909.147	954.141.943		214.857.597	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAJAWALI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	13.200.000	36.300.000	49.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RARO SAMPANG JAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	39.223.800	179.514.500	146.215.300		72.523.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	REKAMILENIUMINDO SELARAS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.425.000	-	1.425.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RESINDO MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.662.100	-	2.662.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RS MITRA KELAPA GADING	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	125.296.380	611.388.360	590.520.150		146.164.590	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SABA INDOMEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	52.898.117	228.189.525	219.980.841		61.106.801	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAGI CAPRI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.020.700	-	2.020.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SANG NAGA BERLIAN, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	143.013.330	886.105.429	960.539.791		68.578.968	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA SARI TAMA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	25.128.180	82.564.020	89.743.500		17.948.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SARANA MEDIKA SEJAHTERA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	308.751.190	1.422.316.368	1.364.077.033		366.990.525	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SATRIA KENCANA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	19.556.997	186.717.600	160.875.597		45.399.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEJAHTERA KARYA MULIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	22.354.147	72.569.653	63.507.800		31.416.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEKARGUNA MEDIKA , PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	27.497.800	149.900.350	134.422.030		42.976.120	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SENTRA ASIA GEMILANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.815.000	24.200.000	1.815.000		24.200.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SENTRACO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	140.706.500	577.075.049	588.490.449		129.291.100	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA ANUGRAH MEDIKA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	18.176.400	124.698.200	27.264.600		115.610.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR PROTEKSINDO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	4.752.000	-	4.752.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.856.250	15.097.500	13.241.250		3.712.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SING AJI SENTOSA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	500.000	4.000.000	4.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SKJ	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	204.512.003	1.007.880.960	1.126.661.363		85.731.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURGIKA ALKESINDO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	60.500.000	37.590.396	98.090.396		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURGIKA ALKESINDO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	376.713.810	1.021.158.600	1.022.394.890		375.477.520	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAMARA OVERSEAS, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	100.443.200	1.303.580.315	1.353.240.365		50.783.150	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAWADA HEALTH CARE, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	105.296.895	323.912.600	423.764.495		5.445.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAWADA HEALTHCARE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	7.112.500	-	7.112.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TBR	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	591.538.140	2.365.076.780	2.703.565.194		253.049.726	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TEMPO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.993.750	-	-		12.993.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TERMITECH ZIGMA MITRA ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	18.805.600	52.745.000	70.318.600		1.232.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	THOMASONG, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	196.897.078	348.730.214	438.215.351		107.411.941	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIARA KENCANA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	34.980.000	62.370.000	74.030.000		23.320.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIRTA CEMERLANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	270.921.865	1.009.147.673	1.098.139.774		181.929.765	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRI SAPTA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	6.682.500	-	6.682.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UJUNG DUNIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	67.287.031	242.474.195	258.376.324		51.384.902	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNITED DICO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1.430.000	2.035.000	3.465.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNIVERSAL STAR MULTILINK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	187.000.000	-	187.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WESTINDO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	69.740.000	638.660.000	509.740.000		198.660.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WIJAYA MITRA HUSADA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	8.250.000	89.925.000	98.175.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WYNACOM	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	25.987.500	77.962.500	25.987.500		77.962.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ZIGMA MITRA ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	59.400.000	-	59.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Pusat Pengembangan Perawat Indonesi	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	9.240.000	18.700.000	27.940.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV CEMERLANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		11.880.000	-	-	11.880.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABADI ADAM	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		73.535.000	73.535.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABBOTT INDONESIA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.447.500	1.447.500	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABDI JAYA COMPUTER	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		48.936.250	11.935.000	-	37.001.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABHIMATA MANUNGAL, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		131.677.698	131.677.698	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIRA BUANA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		85.000.001	85.000.001	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIRINDO SENTRA MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		198.112.640	-	-	198.112.640	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDEAS , CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		15.100.000	15.100.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH MANDIRI CITRAVISITAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		18.326.000	-	-	18.326.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH INTAN MEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		5.000.000	5.000.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTEK ADWIYAH	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		13.452.000	13.452.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTEK ANUGERAH NANDA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		382.000	382.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTIK BUDHI MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		35.392.500	35.392.500	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ASAKU	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.000.000	1.000.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ASOSIASI TEKNISI KEMETROLOGIAN	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		38.710.056	20.350.176	-	18.359.880	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ASRI TRISNA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		39.877.200	-	-	39.877.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Astro Niaga Jaya	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.168.316.160	1.168.316.160	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Asuransi Kesehatan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		5.450.000	5.450.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		19.845.000	19.845.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BALAI BESAR PENGENDALIAN PENYAKIT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		108.555.801	87.434.962	-	21.120.839	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BANYU MAHAPAWITRA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		8.442.500	8.442.500	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERJAYA MANDARIN OPTO- MEDIC	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		198.311.889	126.114.115	-	72.197.774	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERKEMBANG SELARAS DAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		24.571.900	24.571.900	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BHINEKA SUKSES MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.937.000	2.937.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BHINNEKA MENTARI DIMENSI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		308.500	308.500	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BIAYA ADMINISTRASI BANK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		100.980.000	-	-	100.980.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA HIJAU LESTARI / KOMISI AKREDITASI RS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		131.347.700	17.003.250	-	114.344.450	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BIOGEN SCIENTIFIC, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		525.000	525.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHAYA IRAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.185.000	1.185.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHAYA RIZKI, TOKO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		7.265.500	2.865.500	-	4.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CAHAYA TIGA BINTANG ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		45.757.525	45.757.525	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA DHARMAGRAHA PRATAMA, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		34.999.800	34.999.800	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA MANDIRI TEKNIK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		26.331.250	26.331.250	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	COMPLUS SISTEM SOLUSI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		179.846.700	179.846.700	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV CEMERLANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		4.441.250	-	-	4.441.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DANATEK INDERA INDONESIA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		9.763.650	9.763.650	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEDENT SUPPLY	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.350.000	1.350.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DELAPAN DENTAL LAB	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.590.000	-	-	1.590.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DENTINO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		10.428.000	7.128.000	-	3.300.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DERMARELIS MEDICAL CARE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		72.362.400	72.362.400	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIASTIKA BIOTEKINDO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		36.940.750	36.940.750	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIFA ANUGRAH CEMERLANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.484.905	2.484.905	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DINAMIS ARTHA SUKSES	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		18.083.800	18.083.800	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DINAS PELAYANAN PAJAK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		42.196.000	42.196.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOS NI ROHA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		26.365.625	16.918.688	-	9.446.938	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWIASRI GRAHA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		9.578.800	9.578.800	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	EASY MITRA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		46.270.000	46.270.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ELO KARSA UTAMA	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		181.500	181.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FENIXINDO GLOBAL MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		14.152.710	14.152.710		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FIXIPRIMA PERSADA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		24.860.000	24.860.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FONDACO JAYATAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		105.000.000	-		105.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Gatrico Surya Agung	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		372.749.800	77.949.800		294.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GIAT PRIMA PANGESTU, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		546.000	546.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GRAMEDIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		64.515.000	-		64.515.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Hana Ghazy Solution	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.392.200	2.392.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARAPAN FOTO COPY	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		49.665.000	47.355.000		2.310.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HEARLIFE HCC	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		30.515.100	30.515.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOSOPHA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		4.290.000	4.290.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INFILTRACO MURNI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		22.825.000	22.825.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INSAN DATA PERMATA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		154.000.000	154.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTISUKSES MITRATAMA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		11.250.000	11.250.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Keamanan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		59.228.500	59.228.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Narasumber	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		55.500.000	55.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Pemandian Jenazah	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		26.822.400	26.822.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Penanggulangan Sampah	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		38.500.000	38.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Jasa Pengendali Keamanan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.436.575	1.436.575		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JATRASINDO, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		144.476.420	144.476.420		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA ELEKTRIK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		650.000	650.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA STATIONERY	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.500.000	3.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYANI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		9.003.000	9.003.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KANTOR POS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		805.000	-		805.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KLAN INDOMEDIKA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		62.807.250	62.807.250		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KLIP PLASTIK	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.950.000	1.950.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KODAK FIESA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		537.609.198	537.609.198		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KONSULTAN / TENAGA AHLI/ NARASUMBER	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		12.835.341	-		12.835.341	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KREASI PANCA WIRATAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		33.459.800	33.459.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAGUNA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		75.240.000	75.240.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAKSANA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.436.806.375	3.436.806.375		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LESINDO JAYA UTAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		385.000	385.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LG ELECTRONICS SERVICE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.600.000	3.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LMK Mikrobiologi FKUI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		18.150.000	18.150.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Mafati Inovasi Teknologi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		61.549.785	38.049.809		23.499.977	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MAJAPAHIT CHANDRA NARAT, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		13.860.000	13.860.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MAKRO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.457.400	-		2.457.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MANDIRI, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.000.000	1.000.000		2.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGA PRATAMA MEDICALINDO,PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		192.588.000	20.988.000		171.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGAH ALKESINDO, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		248.142.400	248.142.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEKAR ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.500.000	3.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MENTAL CAPASITY DEVELOPMENT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		93.313.000	93.313.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MINIMAX SEJAHTERA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		188.439.999	153.789.999		34.650.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA FAJAR SELARAS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		6.600.000	6.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA MEDIKA UTAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		48.317.100	48.317.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRAGUNA SEJATI LESTARI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		41.685.050	12.540.000		29.145.050	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRAPRIMA LESTARI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		71.500.000	42.900.000		28.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRASAMAYA SEJATI, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.100.000	-		2.100.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULIA GEMILANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		72.600.000	72.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULYA HUSADA JAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		28.987.200	28.987.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MUTIARA GALUH, CV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		13.860.000	-		13.860.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Nugraha Karsera, Pt	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		6.823.959	6.823.959		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OSADHA GRAHA SEJAHTERA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		125.186.050	125.186.050		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PENTA PRIMA GEMILANG	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.305.000	2.305.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERCETAKAN X - PRESIVE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		25.712.500	-		25.712.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERMATA BUNDA ARTANO	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		11.632.500	11.632.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PILLAR HARMONY, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		595.004.943	595.004.943		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PKD / KEGIATAN	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		597.512.300	597.512.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIRA AUSTENITE	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.276.450	2.276.450		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MASTER WEB NETWORK (MWN)	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		15.600.000	200.000		15.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	REKADAYA MANUNGGALTAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		8.404.000	8.404.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RODA HAMMERINDO JAYA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		760.000	760.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RS HERMINA JATINEGARA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		74.200.225	74.200.225		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA MITRA SUKSES	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		84.964.700	84.964.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SARTIKA ADV	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		93.735.015	93.735.015		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEKAR LANGIT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		61.443.199	-		61.443.199	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Serenity Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		31.075.000	31.075.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA ABADI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.355.694.300	1.355.694.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SIMPONI SIGMANERA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		124.521.000	124.521.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SPBU DIRGANTARA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		443.118.253	276.812.058		166.306.195	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TATA CITRA PERKASA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		29.171.198	29.171.198		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TENANG JAYA SEJAHTERA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		2.858.208	2.858.208		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIGARAKSA SATRIA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		40.216.000	40.216.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TIMUR RAYA LESTARI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		25.606.557	25.606.557		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOKO MAKMUR BERSAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		180.000	180.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOKO SENIN INDAH	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		138.000	138.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOKO TETAP SEGAR	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		185.794.400	-		185.794.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOPAZEMERALDA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		265.058.910	213.352.926		51.705.983	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRANSMEDIC INDONESIA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		109.780.000	76.780.000		33.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		49.507.500	49.507.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRULLY FLORIST	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		17.380.000	17.380.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNILAB PERDANA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.000.000	1.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		4.290.000	-		4.290.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	U-SUN INTERNASIONAL, PT	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		28.583.500	28.583.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	VEVA INDO PRIMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		610.305.080	521.929.430		88.375.650	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WASTEC INTERNATIONAL	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		36.685.000	24.365.000		12.320.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WYNACOM UNITAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		3.575.000	3.575.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINTANG TIMUR KENCANA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		120.312.700	90.767.600		29.545.100	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ESA MEDIKA MANDIRI	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		11.796.400	11.796.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA ASA PRATAMA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		1.190.000	1.190.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PUSPITA	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TATA SELARAS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		21.603.029	21.603.029		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TUNAS RIDEAN	
	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		37.400.000	-		37.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Wahyu Mitra Sarana	
20	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	21.443.400		21.443.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. HANDAYANI PRIMA	PENGADAAN BARANG CETAKAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	775.060		775.060		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. MANGGALA JAYA MANDIRI	BELANJA ALAT TULIS KANTOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.630.640		1.630.640		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. MANGGALA JAYA MANDIRI	BELANJA ALAT TULIS KANTOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.698.500		11.698.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. PRIMADONA BERKARYA	PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	9.166.850		9.166.850		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	836.000		836.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.564.970		1.564.970		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.899.997		1.899.997		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.279.996		2.279.996		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.420.000		2.420.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	3.135.000		3.135.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.237.000		6.237.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.404.970		6.404.970		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	9.557.700		9.557.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	10.692.000		10.692.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	17.000.016		17.000.016		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	926.500		926.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.047.909		1.047.909		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.384.799		1.384.799		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.093.652		2.093.652		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.870.175		2.870.175		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	5.759.600		5.759.600		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.576.240		7.576.240		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.000.000		11.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	14.533.200		14.533.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	14.581.800		14.581.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	19.700.000		19.700.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	33.126.539		33.126.539		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.136.000		4.136.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAHMITRA SELARAS	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.683.000		1.683.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. CITRA NAYA MEDIKA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	10.929.600		10.929.600		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. CITRA NAYA MEDIKA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.672.000		1.672.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.434.500		11.434.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.486.971		11.486.971		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	21.529.529		21.529.529		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	3.140.000		3.140.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	3.140.000		3.140.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.569.999		1.569.999		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.359.999		4.359.999		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.000.000		11.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	18.095.000		18.095.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DWITAMA SENTOSA	BELANJA ALAT TULIS KANTOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN MEI)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN JUNI)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN JULI)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN AGUSTUS)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN SEPTEMBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN OKTOBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN NOVEMBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.400.000		1.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENA ENA INDONESIA	BELANJA JASA PELAKSANAAN SPRO (BULAN DESEMBER)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.838.000		2.838.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ERA MEDIKA JAYA	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS OKSIGEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.914.000		1.914.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ERA MEDIKA JAYA	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS OKSIGEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.171.720		1.171.720		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.414.050		1.414.050		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.974.400		2.974.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.062.990		7.062.990		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	14.199.196		14.199.196		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	25.351.700		25.351.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	10.220.815		10.220.815		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KARYA MEDI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	27.170.000		27.170.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KARYA MEDI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	43.392.800		43.392.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KARYA MEDI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	605.000		605.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	809.160		809.160		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.100.000		1.100.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.155.000		1.155.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.210.000		1.210.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.229.800		1.229.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.750.018		1.750.018		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.950.000		1.950.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.904.000		2.904.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.800.048		4.800.048		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	5.999.994		5.999.994		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.330.085		6.330.085		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.678.440		7.678.440		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION JAKARTA 2	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	508.000		508.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	923.900		923.900		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.785.000		2.785.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.380.000		6.380.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARA MEDIKA PERKASA	PEMINJAMAN ALAT KEDOKTERAN MATA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	9.570.000		9.570.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARA MEDIKA PERKASA	PEMINJAMAN ALAT KEDOKTERAN MATA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	12.760.000		12.760.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARA MEDIKA PERKASA	PEMINJAMAN ALAT KEDOKTERAN MATA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	12.760.000		12.760.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARA MEDIKA PERKASA	PEMINJAMAN ALAT KEDOKTERAN MATA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	15.950.000		15.950.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARA MEDIKA PERKASA	PEMINJAMAN ALAT KEDOKTERAN MATA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.425.000		7.425.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	8.712.000		8.712.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	11.748.000		11.748.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	31.992.400		31.992.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	36.639.570		36.639.570		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.499.960		1.499.960		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.679.700		1.679.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	3.291.200		3.291.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.777.938		4.777.938		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	12.939.300		12.939.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.279.080		1.279.080		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.386.000		1.386.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	5.367.450		5.367.450		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - PAJAK (NOVEMBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.461.125		6.461.125		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - PAJAK (SEPTEMBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.813.520		7.813.520		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - PAJAK (OKTOBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	18.728.300		18.728.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - NON PAJAK (SEPTEMBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	22.785.570		22.785.570		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - NON PAJAK (OKTOBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	24.555.200		24.555.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PADANG KURING BOGA UTAMA	BELANJA BAHAN DAN PANGAN - NON PAJAK (NOVEMBER 2017)
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.064.800		1.064.800		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.275.600		1.275.600		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.639.700		2.639.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.640.000		2.640.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.624.500		6.624.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.612.000		7.612.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.612.000		7.612.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	33.708.334		33.708.334		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	37.779.612		37.779.612		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL JAKARTA 3	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.647.500		4.647.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	5.929.000		5.929.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	464.240		464.240		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA ALAT KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	681.300		681.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA ALAT KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	899.400		899.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	18.663.700		18.663.700		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SABA INDOMEDIKA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	560.000		560.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SAPTA SARI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.688.000		2.688.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SAPTA SARI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	4.169.000		4.169.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SAPTA SARI TAMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	859.200		859.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SEKARGUNA MEDIKA	BELANJA ALAT KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	804.474		804.474		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	893.680		893.680		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	990.000		990.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.889.920		2.889.920		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	14.821.400		14.821.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TISA DIAMANTA KUSUMA	BELANJA ALAT TULIS KANTOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.897.000		6.897.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA	PEKERJAAN SERVICE RUTIN ELEVATOR TOSHIBA
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	420.000		420.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TRI SAPTA JAYA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.638.296			2.638.296	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. SOLUSI ARYA PRIMA	BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.069.000			3.069.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ALAM PUTRA SAKTI	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.272.500			3.272.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		5.742.677			5.742.677	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.235.000			4.235.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.821.500			2.821.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.155.039			1.155.039	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.980.000			1.980.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.799.995			4.799.995	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		791.300			791.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.079.995			2.079.995	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.747.802			4.747.802	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		559.785			559.785	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		932.976			932.976	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.558.700			1.558.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		16.012.425			16.012.425	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		21.904.917			21.904.917	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.148.234			2.148.234	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.145.923			3.145.923	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.413.982			3.413.982	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		6.694.493			6.694.493	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		5.999.855			5.999.855	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		36.759.142			36.759.142	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.870.800			4.870.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		5.305.078			5.305.078	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		7.058.698			7.058.698	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		12.593.328			12.593.328	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		17.402.000			17.402.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		38.081.947			38.081.947	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		715.000			715.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		22.783.420			22.783.420	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINA SAN PRIMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.336.000			1.336.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BRATACO	BELANJA BARANG PAKAI HABIS KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		11.151.305			11.151.305	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. COBRA DENTAL INDONESIA	BELANJA KEDOKTERAN GIGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.578.500			1.578.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. COBRA DENTAL INDONESIA	BELANJA BAHAN KEDOKTERAN GIGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.947.900			3.947.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. COBRA DENTAL INDONESIA	BELANJA BARANG HABIS PAKAI KEDOKTERAN GIGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		922.680			922.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.650.000			1.650.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		6.187.500			6.187.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		22.085.085			22.085.085	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.581.218			2.581.218	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DOS NI ROHA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		11.121.990			11.121.990	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DOS NI ROHA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.547.994			4.547.994	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DOS NI ROHA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		417.000			417.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENDO INDONESIA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		10.106.976			10.106.976	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		615.010			615.010	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		13.870.499			13.870.499	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		7.053.420			7.053.420	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.046.000			2.046.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GRACIA VISI PRATAMA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		8.064.012			8.064.012	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	BELANJA BARANG PAKAI HABIS KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		17.937.000			17.937.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	BELANJA BARANG PAKAI HABIS KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		522.005			522.005	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.722.500			2.722.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.766.400			2.766.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		20.829.600			20.829.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. JAYADI MITRA SEJAHTERA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		511.196			511.196	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.974.905			3.974.905	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		38.507.329			38.507.329	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.788.600			1.788.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.016.004			1.016.004	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.659.642			1.659.642	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		232.188			232.188	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		254.980			254.980	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.141.998			1.141.998	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.266.760			1.266.760	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.414.300			4.414.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		131.040			131.040	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		305.976			305.976	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.144.725			2.144.725	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.633.922			1.633.922	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		13.440.438			13.440.438	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		455.107			455.107	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.264.956			1.264.956	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.093.905			2.093.905	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		21.789.801			21.789.801	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.713.600			3.713.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LANGEN PERDANA DIAMED	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.059.650			3.059.650	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		785.200			785.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		8.690.000			8.690.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.537.800			1.537.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA JAKARTA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.188.000			1.188.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MACROCITRA ARDANASEJATI	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		7.782.500			7.782.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		14.874.750			14.874.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.974.950			2.974.950	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.180.680			4.180.680	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINA SUKSES	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.736.600			1.736.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINA SUKSES	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		6.241.350			6.241.350	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINA SUKSES	BELANJA ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.103.200			2.103.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINA SUKSES	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.170.280			2.170.280	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINA SUKSES	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		5.073.750			5.073.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		4.197.424			4.197.424	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		23.689.617			23.689.617	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.187.800			3.187.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.202.200			1.202.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		554.999			554.999	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		55.497.863			55.497.863	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		24.633.180			24.633.180	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.702.700			2.702.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.520.000			3.520.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		10.618.902			10.618.902	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		32.172.544			32.172.544	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		29.378.250			29.378.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		14.817.000			14.817.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		69.746.739			69.746.739	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		18.249.000			18.249.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		20.000.000			20.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		1.104.600			1.104.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		768.000			768.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.830.245			2.830.245	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		3.850.000			3.850.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. REKAVISITAMA	Pengadaan Kabel dan Speaker Mesin Antrian
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		20.295.000			20.295.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. REKAVISITAMA	PEKERJAAN UPGRADE DAN INSTALASI MESIN ANTRIAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		24.934.800			24.934.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SABA INDOMEDIKA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		10.278.400			10.278.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SABA INDOMEDIKA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		78.383.250			78.383.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SURIA BERKAT ABADI	PENGADAAN LANGSUNG KALIBRASI ALAT KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		42.317.616			42.317.616	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TAWADA HEALTHCARE	PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS KESEHATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		2.050.000			2.050.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TEMPO JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		948.600			948.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TEMPO JAKARTA 3	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		297.000			297.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		22.756.800			22.756.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TISA DIAMANDTA KUSUMA	Pengadaan ATK
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		18.983.700			18.983.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TRI SAPTA JAYA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		47.637.000			47.637.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TRI SAPTA JAYA	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		462.000			462.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. UNITED DICO CITAS	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		21.943.900			21.943.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT WASTEC	Belanja pemusnahan limbah
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		7.260.000			7.260.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT TOSHINDO	Belanja service rutin
21	Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL	76.917.500		76.917.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Meukek Bumi Lestari	Pengadaan kebutuhan peralatan kantor akreditasi Puskesmas Kelurahan Cilandak Timur
	Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL		12.174.180			12.174.180	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugrah Pharmindo Lestari	Belanja Obat-obatan
	Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL		7.304.508			7.304.508	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugrah Pharmindo Lestari	Belanja Obat-obatan
	Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL		16.788.748			16.788.748	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Anugrah Pharmindo Lestari	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai
22	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.526.918		-	2.526.918	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTEK GADI LAMBA	BIAYA PEMBELIAN OBAT - OBATAN JULI - DESEMBER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	120.961.632		-	120.961.632	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. CAHAYA ILHAM	BELANJA KEBUTUHAN SPAREPART BAHAN BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRIKAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	21.917.500		-	21.917.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. CONSTRUEREN OVERTROEVEN	BELANJA STIKER HIGH ALERT
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	13.585.000		-	13.585.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. CONSTRUEREN OVERTROEVEN	BELANJA SERAGAM VOLI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	10.725.000		-	10.725.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. CONSTRUEREN OVERTROEVEN	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (LABEL)
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	7.110.000		-	7.110.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. GLOBAL PHARMA INDONESIA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	10.387.300		-	10.387.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. GUCIMAS GAUNG GEMILANG	BELANJA SERAGAM KERJA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	15.133.500		15.133.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. JAYA MITRA ABADI	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	37.589.110		-	37.589.110	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. KUNTUM WIAJAY KUSUMA	BIAYA PELAYANAN PEMULASARAAN DAN TRANSPORTASI JENAZAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	21.433.500		-	21.433.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. MULTI SERVITAMA	BELANJA BAHAN CETAKAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	27.357.000		-	27.357.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. PILLAR PUTRA RANGO	BELANJA KEBUTUHAN CETAKAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	12.100.000		-	12.100.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. PILLAR PUTRA RANGO	BELANJA CETAKAN CLINICAL PATHWAY
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.533.300		-	2.533.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. PILLAR PUTRA RANGO	BELANJA CETAKAN FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	64.033.200		-	64.033.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. RIZKY JAYA ABADI	BELANJA SKEREM DAN TIRAI PENUTUP PORTABLE MCU
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	73.528.224		-	73.528.224	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. SOPINRO MAJU	BELANJA BARANG ELEKTRIKAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	16.109.500		-	16.109.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV. SUMBER MITRA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	27.600.000		27.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOKTER SPESIALIS	HONORARIUM TENAGA AHLI DOKTER SPESIALIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	12.650.000		12.650.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	dr. Andika Resa, Sp.Rad	HONORARIUM TENAGA AHLI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	14.950.000		14.950.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	dr. Harris Mustafa Banadjji, Sp.U	HONORARIUM TENAGA AHLI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.061.000		1.061.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Irma Susanti	PENGEMBALIAN UANG PASIEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.000.000		-	1.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IKAH	PENGEMBALIAN UANG PASIEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	7.000.000		7.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Johanes Ruhukail, SH, MH	HONORARIUM KONSULTAN HUKUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.000.000		-	1.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LINA PURWASIH	PENGEMBALIAN UANG PASIEN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	7.500.000		7.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Prof. DR. Dr. Endang Susalit, SpPD-KGEH	HONORARIUM TENAGA AHLI HEMODIALISA

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.355.000		1.355.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	14.932.070	-	-	14.932.070	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	18.720.900		18.720.900	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AEROCOM JENCO INDONESIA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART AEROCOM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	49.500.000	-	-	49.500.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AEROCOM JENCO INDONESIA	BELANJA PEMELIHARAAN PNEUMATIC TUBE SYSTEM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.178.000	-	-	2.178.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AGARINDO BIOLOGICAL LABORATORY	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	5.247.000	-	-	5.247.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA AKSESORIS INFANT WARMER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	92.565.000	-	-	92.565.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART PATIENT MONITOR KAMAR OPERASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	82.195.613	-	-	82.195.613	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART PATIENT MONITOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	12.540.000	-	-	12.540.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA PENGECEKAN ALAT FLOUROSCOPY
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	13.780.800	-	-	13.780.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART ALAT PHOTOTHERAPY RUANG PERINA
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	13.860.000	-	-	13.860.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART ALAT BABY INCUBATOR RUANG PERINA
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	22.993.809	-	-	22.993.809	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AKTIFITAS ATMOSFIR	BELANJA AIR MINERAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	17.204.505	-	-	17.204.505	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AMALIA ARRAFAH UTAMA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	75.999.000		75.999.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANARA TRISAKTI MEDIKA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	3.135.000	-	-	3.135.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANARA TRISAKTI MEDIKA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	12.792.199	133.876.602	12.792.199	-	133.876.602	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANEKA GAS INDUSTRI	BELANJA PENGISIAN TABUNG OKSIGEN CAIR
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	111.001.275	120.850.125	111.001.275	-	120.850.125	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANEKA GAS INDUSTRI PULOGADUNG WILAYAH III	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.400.000	-	-	1.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANTARMITRA SEMBADA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	140.119.929	189.562.375	140.119.929	-	189.562.375	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	147.571.129	-	-	147.571.129	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	13.197.525	-	-	13.197.525	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	198.110.000	-	-	198.110.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART MESIN STERILISASI SUHU RENDAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	74.800.000	-	-	74.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	BELANJA MAINTENANCE PM2
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	202.064.365	-	-	202.064.365	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	18.423.755	-	-	18.423.755	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	750.000		750.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ATOS	KONSUMSI SOSIALISASI HIV AIDS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	19.933.760	15.308.480	19.933.760	-	15.308.480	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	12.017.500	-	-	12.017.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	BELANJA PERBAIKAN CT SCAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	7.955.640	-	-	7.955.640	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART ECG KAMAR BERSALIN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	11.149.875	-	-	11.149.875	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART PATIENT MONITOR
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.792.627	-	-	2.792.627	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	21.489.930	65.197.440	21.489.930	-	65.197.440	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINA ARTHA SEMESTA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	18.712.300	7.602.600	18.712.300	-	7.602.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINA SUKSES MEDIKA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	5.114.260	-	-	5.114.260	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINA SAN PRIMA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	539.000	-	-	539.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINABAKTI NIAGA PERKASA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	16.243.251	-	-	16.243.251	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. CALMIC INDONESIA	BELANJA PENAMBAHAN JUMLAH PRODUK CALMIC
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	31.350.000	-	-	31.350.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. CEJETE INDUSTIRA	BELANJA PENGGANTIAN SPAREPART BATTERY GENSET
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	173.992.500	-	-	173.992.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA	BELANJA PEMELIHARAAN DAIKIN AIR COLLER CHILLER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	21.820.368	-	-	21.820.368	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DAYA MUDA AGUNG	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	48.682.500	10.336.260	48.682.500	-	10.336.260	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DEMKA SAKTI	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	24.125.200	24.125.200	24.125.200	-	24.125.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DIASTIKA BIOTEKINDO	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	12.408.550	-	-	12.408.550	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DISTRIVERSA BUANAMAS	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	56.604.800	43.560.000	56.604.800	-	43.560.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DOS NI ROHA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	704.684.348	-	-	704.684.348	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DOS NI ROHA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	9.008.500	14.170.000	9.008.500	-	14.170.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DWIASRI GRAHAD	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	240.869.899	42.479.464	240.869.899	-	42.479.464	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	73.576.338	-	-	73.576.338	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	14.784.000	198.522.775	14.784.000	-	198.522.775	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ERA MAJU SEJAHTERA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	2.006.400		2.006.400	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. FADJAR ALFA MANDIRI	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.521.225	9.502.450	1.521.225	-	9.502.450	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.408.000		1.408.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GAJAH MUNGKUR INDOTAMA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	10.980.000	-	-	10.980.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA AIR MINERAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	3.600.000	-	-	3.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA KONSUMSI PENDAMPINGAN ZONA INTEGRITAS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	11.781.000	-	-	11.781.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA KONSUMSI MCU CALEG
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	16.290.000	-	-	16.290.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	KONSUMSI SURVEI AKREDITASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		9.009.000			9.009.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA ART
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		16.625.000			16.625.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA KONSUMSI HUT RI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		900.926			900.926	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	BELANJA KONSUMSI STOCK OPNAME FARMASI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		8.525.000			8.525.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. HEARING VISION	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	30.000.000	-	-	30.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. HOSPI NIAGA UTAMA	BELANJA PENGGANTIAN SPAREPART MESIN PENGERING
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	65.340.000	-	-	65.340.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. HOTBINSON JUNIOR TAMA	BELANJA KEBUTUHAN CETAKAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.925.000	-	-	1.925.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INDOPHARMA GLOBAL MEDIKA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	38.400.000	-	-	38.400.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INDOSOPHA SAKTI	BELANJA PENGGANTIAN SPAREPART DAN MAINTENANCE ALAT VENTILATOR RUANG ICCU

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	9.570.000	26.056.250	9.570.000	-	26.056.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTERGASTRA NUSANTARA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	12.870.000	-	-	12.870.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTERGASTRA NUSANTARA	BELANJA MAINTENANCE CSSD DAN LAUNDRY
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.925.000	-	-	1.925.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTERGASTRA NUSANTARA	BELANJA OLI MESIN CUCI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	2.774.376	56.558.000	2.774.376		56.558.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	3.319.520	-	-	3.319.520	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	6.769.400	-	-	6.769.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA	BELANJA ALAT KEBERSIHAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	9.240.000	9.240.000	9.240.000	-	9.240.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KEBAYORAN PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	3.134.790	10.090.000	3.134.790	-	10.090.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	720.000	-	-	720.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. KIMIA FARMA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	19.800.000	-	-	19.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAPLASINDO PRATAMA	BELANJA MAINTENANCE UPS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	26.611.152	22.020.480	26.611.152	-	22.020.480	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. LAWSIM ZECHA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	12.276.000		12.276.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	121.752.180	-	-	121.752.180	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEDCALINDO	BELANJA KALIBRASI ALAT KEDOKTERAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	88.256.300		88.256.300	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	29.345.200		29.345.200	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINASUKSES	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	20.024.705	-	-	20.024.705	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINASUKSES	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	14.138.190	-	-	14.138.190	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MENSA BINASUKSES	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	5.118.150	499.776.640	5.118.150	-	499.776.640	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.613.600	-	-	2.613.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	3.268.848	-	-	3.268.848	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	BELANJA COMPRESSOR NEBULIZER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.402.500	19.417.420	1.402.500	-	19.417.420	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MIDIF FARMA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	37.219.008		37.219.008	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	13.133.736	-	-	13.133.736	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.914.000	-	-	1.914.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	17.600.000	-	-	17.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MITRA MEDIKA UTAMA	BELANJA KONTRAK SERVICE EEG
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	4.639.800	-	-	4.639.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MITRAPRIMA LESTARI	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	4.064.500	-	-	4.064.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR	BELANJA PENGANTIAN SPAREPART STS BELT
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	23.306.800	-	-	23.306.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. NOA JAYA	BELANJA DEKORASI HUT RSUD PASAR MINGGU
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.596.600	-	-	1.596.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	95.095.000	-	-	95.095.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PANCA PERSADA MEDIKA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	879.835	-	-	879.835	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARAGA SINAR DIGNOSTIKA	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	68.894.471	135.284.340	68.894.471	-	135.284.340	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PARIT PADANG GLOBAL	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.042.800	-	-	1.042.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	7.491.000	-	-	7.491.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PERMATA ELANG SAKTI	BELANJA PERBAIKAN PINTU KACA RUANG RADIOTERAPI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	77.001.925	-	-	77.001.925	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PERMATA ELANG SAKTI	BELANJA PERBAIKAN INSTALASI DAN PROGRAM ULANG EXHAUST BASEMENT
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.085.600	-	-	2.085.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	15.426.075	582.399	15.426.075	-	582.399	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	65.987.900	-	-	65.987.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SABA INDOMEDIKA	BIAYA TES HEMATOLOGY ANALYZER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	25.000.000	-	-	25.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SAMHANA INDAH	BELANJA PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	9.600.000	-	-	9.600.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SEJAHTERA KARYA MULIA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	450.912		450.912	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SENTRA ASIA GEMILANG	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	38.800.000	-	-	38.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SIGMA KARSA MAGNA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	32.637.000	-	-	32.637.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SINAR IRAWATI SETIA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		4.455.275			4.455.275	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	5.895.000		5.895.000	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SUMBER MITRA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	82.500.000	-	-	82.500.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	BELANJA PENAMBAHAN BACK UP INTERNET
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	9.360.540	-	-	9.360.540	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SURGIKA ALKESINDO	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	14.576.100	-	-	14.576.100	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TAMARA OVERSEAS CORPORINDO	BELANJA SUKU CADANG ALAT ELETROLIT DAN ANALISIS GAS DARAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	93.543.120	-	-	93.543.120	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TARA BINTANG PERMAI	BELANJA KEBUTUHAN SPAREPART BAHAN BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN ELECTRIKAL
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	52.464.535		52.464.535	-	-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TAWADA HEALTHCARE	BELANJA BAHAN LABORATORIUM
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		15.785.000			15.785.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TAWADA HEALTHCARE	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.230.000	-	-	1.230.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TEMPO	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	45.089.000	-	-	45.089.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TERAMED INDONESIA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	49.500	-	-	49.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	4.561.009	-	-	4.561.009	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TRANSMEDIC INDONESIA	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	56.648.900	-	-	56.648.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. UNGGUL BAYU PRATAMA	BELANJA SERVICE AC
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	73.471.640	-	-	73.471.640	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. WASTEC INTERNATIONAL	BELANJA JASA PENANGANAN/PENANGGULANGAN SAMPAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	68.115.400	-	-	68.115.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD PASAR REBO	BIAYA TAGIHAN RADIOLOGI
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	2.400.910	-	-	2.400.910	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SITI MUSFIROH	BIAYA KEGIATAN RSUD PASAR MINGGU
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	1.250.000	-	-	1.250.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SITI MUSFIROH	BIAYA PEMBELIAN AKI MOBIL PANTHER
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	-	3.360.000	-	-	3.360.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WINDA LUFTIKASARI	BIAYA KONSUMSI KEGIATAN KUNJUNGAN STIKES JAYAKARTA

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		199.146.750			199.146.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI	BELANJA TAMBAHAN INSTRUMENT DRESSING SET
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		66.000.000			66.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	PENAMBAHAN BACK UP INTERNET
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		112.296.800			112.296.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. WASTEC INTERNATIONAL	PENGLOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		5.920.200			5.920.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MUTIARA SAFETYND0	SPARE PART HYDRANT
	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		40.700.000			40.700.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	PERBAIKAN MESIN CSSD STERRAD
23	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	505.078.154				505.078.154	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		
24	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		18.664.747			18.664.747	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TIARA KENCANA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		8.076.200			8.076.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		3.823.500			3.823.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. BINA SEJAHTERA PERKASA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		2.087.250			2.087.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. PENTA VALENT	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		3.085.500			3.085.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DWIDAYA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		500.000			500.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. DUTA AFIAT	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		82.280.110			82.280.110	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		18.479.590			18.479.590	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		22.578.099			22.578.099	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. RAJAWALI NUSINDO	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		2.860.000			2.860.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. UNIRA ELCARONA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		5.294.740			5.294.740	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		1.040.188			1.040.188	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ONCOPROBE	Belanja Pembelian Obat
	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		1.513.600			1.513.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. SIERRA MANDIRI BERSAMA	Belanja Pembelian Obat
25	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas		80.000			80.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD Pasar Rebo	Pelayanan Rujukan Uji Silang (RUS) TW IV peme
	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas		540.000			540.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUD Pasar Rebo	Pemeriksaan pelayanan penunjang (Radiologi, Le
26	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		42.794.000	-		42.794.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIKA NIAGA PERKASA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		34.188.000	-		34.188.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KHALIFI BERSINAR DJAYA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.905.750	-		1.905.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TUJUH SAUDARA - FARMASI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.178.122.790	-		3.178.122.790	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. INDONESIA MEDIKAL INSTRUMENT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		111.898.550	111.898.550		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ABC LABORATORIUM	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		58.150.400	58.150.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ADIWARNA BENTALA NIAGATAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		30.936.210	23.168.082		7.768.128	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ADVANCE MEDICARE CORPORA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		31.093.480	18.065.520		13.027.960	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AGENA MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		317.387.969	286.270.022		31.117.947	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AIR GASINDO, CV	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		27.259.375	27.259.375		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMARTA MITRA SELARAS	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.631.680	6.631.680		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	AMPM	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.108.710.677	2.105.245.677		3.465.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDALAN JAYA ABADI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.580.129.938	3.580.129.938		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDALAS PRIMA SENTOSA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		14.959.966	3.060.000		11.899.966	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDIARTA MATRA UTAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		40.160.000	40.160.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANDRA PRIMA JAYA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.617.456.097	1.313.048.875		304.407.222	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANEKA GAS	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		826.880.607	716.034.600		110.846.007	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANTARMITRA SEMBADA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		9.900.000	9.900.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH MANDIRI INTERASIA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		23.100.000	23.100.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH MANORI INTERASIA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.257.670.681	5.955.795.682		1.301.874.999	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.477.310	26.477.310		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGERAH SINERGI SOLUSTAMA, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		4.315.852.139	3.109.976.776		1.205.875.363	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANUGRAH ARGON MEDICA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		620.237.536	478.907.536		141.330.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	APOTEK MK PLUIT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		855.838.300	98.885.600		756.952.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ARIANDA MITRA SEJAHTERA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		8.936.000	8.936.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ATRA WIDYA AGUNG	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		56.287.000	54.978.000		1.309.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERCA NIAGA MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		40.499.523	21.574.100		18.925.423	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BERKEMBANG SELARAS DAYA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		140.547.000	116.655.000		23.892.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA ARTHA SEMESTA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		4.759.299.524	3.776.418.010		982.881.514	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINA SAN PRIMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		21.727.365	21.727.365		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINABAKTI NIAGA, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		315.093.344	223.062.416		92.030.928	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BINTANG SHAFWAN	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		37.911.500	24.223.100		13.688.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BISAWI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		50.718.195	50.718.195		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		357.389.501	294.996.501		62.393.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BRATACO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		154.745.680	154.745.680		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BUMI INDAH SARANAMEDIS PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		5.890.500	5.890.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CIPTA MEDIKA INDONESIA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		38.820.004	9.705.001		29.115.003	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CITRA DIAN PRATAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		12.579.625	12.579.625		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	COBRA DENTAL PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		421.631.430	415.658.870		5.972.560	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DAYA MUDA AGUNG	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.949.200	1.949.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEDENT SUPPLY PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		5.762.817.203	4.387.813.575		1.375.003.628	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DELVI PRIMATAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		282.503.801	213.277.122		69.226.679	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DEMKA SAKTI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DENTAL LAB	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		39.358.000	39.358.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DERMARELIS, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		164.121.100	164.121.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DIAN LANGGENG PRATAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		235.303.971	157.826.932		77.477.039	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DISTRIVERSA BUANA MAS	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.933.024.493	3.315.656.771		617.367.722	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DOS NI ROHA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		15.870.530	10.858.000		5.012.530	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DWI ASRI GRAHA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		92.000	92.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENDO INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		5.346.880	4.414.080		932.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENDO MEDIKA NUSANTARA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.954.272.220	1.450.141.971		504.130.249	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		156.750.000	104.500.000		52.250.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FARMETA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		38.167.594	37.481.875		685.720	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FESCO INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		94.544.340	86.185.462		8.358.878	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FOKUS DIAGNOSTIC	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		251.697.600	197.366.400		54.331.200	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	FRISMED HOSLAB INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		391.339.535	352.742.536		38.596.999	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GLOBAL PHARMA INDONESIA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		39.250.000	39.250.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARMONI PRIMA MEDIKA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		11.857.497	11.857.497		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HARVES MEDIKAL INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		13.600.125	13.600.125		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HEARING VISION	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.138.000	6.138.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	HOSPI MEDIK INDONESIA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.629.898.463	1.616.208.083		13.690.380	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		157.130.503	151.782.222		5.348.281	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		100.579.644	79.795.584		20.784.060	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOMEDIKA SOLUSINDO PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		121.321.200	121.321.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INDOSOPHA, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		59.400.000	39.600.000		19.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTERGASTRA NUSANTARA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		20.649.010	20.649.010		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	INTISUMBER HASIL SEMPURNA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		30.694.985	30.694.985		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	IRMA PERTIWI PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.760.827.226	1.290.032.314		470.794.912	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JANTRA REKA SAKSANAMAS PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		32.472.000	32.472.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA ABADI MEDIKA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.027.671.924	1.027.671.924		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	JAYA FARMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		41.126.250	41.126.250		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KALLISTA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.164.716.950	1.723.145.600		441.571.350	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KARINDO ALKESTRON PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		231.507.870	175.975.140		55.532.730	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KARUNIA ABADI ANUGRAH	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		31.383.000	31.383.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KHARISMA SCIENTIFIC CV	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.227.491.569	2.519.165.514		708.326.055	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		118.833.238	117.863.062		970.176	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KIMIA FARMA APOTEK BM RSCM JAKARTA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		817.776.250	727.973.086		89.803.164	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KINOBI FARMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		75.119.850	60.110.600		15.009.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RSUD TARAKAN	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		49.359.626	49.359.626		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	LAWSIM ZECHA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		350.957.050	302.006.588		48.950.462	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MADESA SEJAHTERA UTAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		968.000	968.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MANDIRI NUGRAHA AJI TUNGGAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		27.720.000	-		27.720.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDISON JAYA RAYA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		57.204.860	27.795.460		29.409.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDITECH INDONESIA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.732.000	6.732.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEDQUEST JAYA GLOBAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		183.536.375	183.536.375		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MEGAH MEDIKA PHARMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		721.404.402	419.470.985		301.933.418	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MENSA BINA SUKSES. PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.003.431.266	2.272.213.805		731.217.461	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MERAPI UTAMA PHARMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		32.347.260	27.342.810		5.004.450	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	METRO FARA INSANI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		349.225.223	232.447.431		116.777.793	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MIDIF FARMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.288.887.860	1.467.267.659		821.620.201	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.278.724.800	1.778.968.400		499.756.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRA FAJAR SELARAS PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		347.025.525	211.101.330		135.924.195	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MITRAPRIMA LESTARI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.014.343.000	922.838.400		91.504.600	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTIDAYA MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.404.384	6.404.384		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULTIREDJEKI KITA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.500.000	-		7.500.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MULYA HUSADA JAYA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		113.272.500	99.495.000		13.777.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MUTIARA TERPADU, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.431.618.425	5.739.205.450		1.692.412.975	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NAHL MEDICA UTAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		17.077.500	17.077.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NITRA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		702.555.001	676.375.001		26.180.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NUGRA KARSERA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		596.776.125	427.015.875		169.760.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ONCOPROBE UTAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		70.438.720	70.438.720		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ORIONTAMA JAYA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		756.350.002	756.350.002		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	OSADHA GRAHA SEJAHTERA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		13.024.390.000	8.571.370.000		4.453.020.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PALANG MERAH INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		106.100.500	64.541.070		41.559.430	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PANJI PRIMA DINAMIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.341.521.301	2.912.455.601		429.065.700	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PARIT PADANG PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.162.751	6.162.751		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PELITA BIOMEDICAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		979.386.144	942.583.801		36.802.343	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PENTA VALENT PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.031.240.100	690.228.000		341.012.100	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERMATA BUNDA ARTANO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		453.585.000	412.005.000		41.580.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PETAN DAYA MEDICA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.361.342	6.361.342		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRADIPTA CAKRAWALA PACIFIC PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		167.202.054	142.002.054		25.200.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		31.680.000	26.400.000		5.280.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMA MITRA LESTARI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		531.828.000	410.278.000		121.550.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMADAYA INDOMEDIKA, PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.572.000	4.800.000		2.772.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		48.382.500	48.382.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.267.000	-		3.267.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. MANDARIN GLOBAL MECHPRO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		13.749.120	9.166.080		4.583.040	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Pillar Harmony	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		19.662.500	-		19.662.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. TRANSMEDIC INDONESIA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		17.380.000	15.972.000		1.408.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MEDEQ MANDIRI UTAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		111.674.999	81.392.439		30.282.560	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.TOTAL MEDIKA PERSADA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		153.824.000	153.824.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PUTRA SOLUSI DIAGNOSTIC	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		543.223.270	420.467.036		122.756.234	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAJAWALI NUSINDO PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		161.913.263	128.561.263		33.352.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RAVINDRA PUTRAPRATAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.016.248.750	1.016.248.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	REKAMILENIUMINDO SELARAS	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.341.500.001	1.263.500.001		78.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	REVASS UTAMA MEDIKA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		42.504.000	42.504.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RIMATANDU MOTARO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		609.785.000	519.365.000		90.420.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ROICA MEDICA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		22.411.813	22.411.813		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ROSA MANDIRI PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		100.443.000	40.183.000		60.260.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAFIRA DWI PHARMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		19.756.176	13.998.600		5.757.576	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAGI CAPRI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		553.181.061	553.181.061		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SAPTA SARI TAMA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		15.840.000	15.840.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEJAHTERA KARYA MULIA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.920.000	1.920.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SEKARGUNA MEDIKA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		689.465.278	573.218.873		116.246.405	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SENTRA ASIA GEMILANG PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		592.846.100	560.198.100		32.648.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SETIA ANUGRAH MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		257.206.180	126.481.740		130.724.440	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SIGMA ANDALAN NUSA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		27.637.500	27.637.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sinar Mulia Indomedika	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.731.320	26.731.320		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINAR RODA UTAMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		108.053.000	108.053.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.025.000	3.025.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SOLOCON INDUSTRY	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		109.686.891	92.463.861		17.223.030	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURGIKA ALKESINDO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		112.026.145	80.906.870		31.119.275	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURYA JAYA LESTARI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		100.995.400	83.967.400		17.028.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURYA MEDICAL CV	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		31.440.000	31.440.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURYA MEDICANDA LESTARI	Belanja Obat dan Alat Kesehatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		44.455.510	39.726.834		4.728.676	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SURYA PRIMA PERKASA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		11.061.900	9.517.500		1.544.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TARAFIS ANUGERAH MEDIKA PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.079.770.560	805.432.320		274.338.240	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TAWADA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.967.443.598	1.748.354.048		219.089.550	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TEMPO PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.271.000	6.776.000		495.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	THOMASONG NIRMALA PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		693.026.823	644.234.673		48.792.150	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TODOMA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.016.436.960	880.457.490		135.979.470	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRI DHARMA ABADI PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		505.376.069	456.030.430		49.345.639	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRI SAPTA JAYA (JAKARTA 2)	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		123.393.600	93.297.600		30.096.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		211.050.268	183.992.741		27.057.527	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UNITED DICO CITAS PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		14.861.200	14.861.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		46.640.000	38.940.000		7.700.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	U-SUN INTERNATIONAL PT	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.685.000	-		3.685.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	VANTAGEBIO SCIENTIFIC SOLUTION PT.	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		123.153.600	81.916.800		41.236.800	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	VERSACON MEDICAL	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		537.585.000	528.585.000		9.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	WORCHARDT PHARMA INDO	Belanja Obat dan Alat Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.115.515.445	992.326.225		123.189.220	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.DELANO GEMILANG ABADI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		37.257.000	37.257.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.SETIAWAN SEDJATI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		431.007.500	397.897.500		33.110.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ARTHA JAYA TONER	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		9.600.000	9.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	POS INDONESIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		752.943.869	729.677.835		23.266.034	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RSUD TARAKAN-RTP	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		217.924.850	217.924.850		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RSUD TARAKAN-SANITASI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		103.096.000	103.096.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RSUD TARAKAN (TU)	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		197.659.000	180.254.250		17.404.750	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.NIAGA HIJAU MANDIRI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		63.314.101	57.257.287		6.056.814	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.CALMIC INDONESIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		166.650.000	166.650.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.REMALA ABADI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		27.325.997	27.325.997		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.SUPARMA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		69.853.697	57.457.398		12.396.299	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.JAYASEGAR BERKAT MANDIRI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		22.371.000	22.371.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.AGUNG	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		261.282.890	261.282.890		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.BARINDO SURYA ARYATAMA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		97.200.000	86.400.000		10.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	DINAS KEBERSIHAN	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		80.000.000	60.000.000		20.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.SAMHANA INDAH	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		7.440.000	6.780.000		660.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.CITRA NUSA PURNAMA MEDIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		11.508.300	11.508.300		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	NEX MEDIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		55.055.000	55.055.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.GOMDA SINDARU INDONESIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		256.516.500	256.516.500		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KUNTUM WIJAYA KUSUMA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		65.725.000	65.725.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.PUTRA OBOR ALKESINDO	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		71.060.000	71.060.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.TUJUH SAUDARA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		295.593.430	248.551.380		47.042.050	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.FORTUNA ANUGERAH SEJAHTERA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.KAHAR DUTA SARANA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KORAN WARTA KOTA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		75.500.000	75.500.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PERTAMINA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.400.000	13.200.000		13.200.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.RARO SAMPANG JAYA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		16.463.150	13.598.750		2.864.400	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MITRA SOLUSI SALAMANDER	Belanja Rumah Tangga Persediaan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		15.454.992	14.167.076		1.287.916	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.INDOCARE PACIFIC	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		8.613.000	8.613.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.DELANO GEMILANG ABADI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		1.813.750	1.813.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.PRADANA ESTIARA MEDICAL	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		328.394.000	227.771.500		100.622.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.AGUNG	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		514.120.750	476.748.250		37.372.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.BETA SUKSES MANDIRI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		74.778.000	74.393.000		385.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.APIX PRINTING	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		77.910.260	77.910.260		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MARKINDO ANUGERAH CITRA PRATAMA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		52.140.000	50.215.000		1.925.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.TUJUH SAUDARA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		9.350.000	9.350.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.CITRA KREASINDO MANDIRI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		900.000	900.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.KALIMAS	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		20.427.000	18.777.000		1.650.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.GAJAH HIDUP WARNAJAMBON	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		275.625.680	275.625.680		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RSUD TARAKAN	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.RINJANI JAYA ABADI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		17.230.400	17.230.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.DATASCRIP	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		433.319.117	433.319.117		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PD.ACHANTUS	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		86.699.250	86.699.250		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.TUJUH SAMUDRA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		14.375.625	2.619.375		11.756.250	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.PANJI PRIMA DINAMIKA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		84.161.500	83.611.500		550.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.ARGAS CIPTA ADHISAKTI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		56.782.000	56.782.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.FORTUNA ANUGERAH SEJAHTERA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		229.084.900	229.084.900		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MITRALAB BUANA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		-	-		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.EXA TEKNOLOGI INDONESIA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		935.000	935.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.KHARISMA PELITA ABADI MOTOR	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		12.100.000	12.100.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.DELANO GEMILANG ABADI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.021.709	2.021.709		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ASTRA INTERNATIONAL	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		5.280.000	2.893.000		2.387.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.PUTRA JAYA SURYA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		3.179.000	3.179.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.APARINDO PRIMALESTARI	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.367.000	26.367.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.KAWAN LAMA	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		28.600.000	11.550.000		17.050.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ELJE PERDANA (Evakuasi Chair)	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		4.987.506	4.987.506		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	BUKALAPAK	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.820.750	26.820.750		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MARISI PRATAMA JAYA (playground)	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		80.543.375	80.543.375		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.WIRA UTAMA MURNI (AC)	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		185.405.000	-		185.405.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.BINTANG EMAS ELDORA (LOGO)	Belanja Rumah Tangga Persediaan
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		838.300.100	838.300.100		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.NIAGA SUMBER GIZI (SUBSIDI)	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		331.589.858	331.589.858		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.NIAGA SUMBER GIZI	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		251.154.200	251.154.200		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.LANGLANG GLOBAL SUKSES	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		218.113.500	187.583.000		30.530.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.SADIKUN NIAGAMAS RAYA	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		34.566.666	34.566.666		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.PRESINDO CENTRAL	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		248.728.700	154.994.840		93.733.860	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.TRIMITRA JAYA ANGKASA	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		19.133.400	19.133.400		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.NIAGA SUMBER GIZI (DISPO)	Belanja Gizi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		2.707.650	2.707.650		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MARKINDO ANUGERAH CITRA PRATAMA	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		163.235.628	163.235.628		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.RINJANI JAYA ABADI	Belanja IPSRS

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		328.804.880	328.804.880		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ANDALAS PRIMA SENTOSA	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		69.103.600	53.282.600		15.821.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	KOPERASI PEGAWAI RS TARAKAN	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		26.400.000	26.400.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	ANEKA GAS	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		87.852.600	43.926.300		43.926.300	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.MADIRI PUTRA TOMOK	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.600.000	6.600.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV.TUJUH SAMUDRA	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		30.580.000	8.250.000		22.330.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.MORIYAMA INDOKARYA	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		9.845.000	-		9.845.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ADIWARNA BENTALA NIAGATAMA	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		88.000.000	88.000.000		-	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.ANUGERAH INTEGRASI MANDIRI	Belanja IPSRS
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		6.490.000	-		6.490.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT.INDORAYA NUSANTARA DJAJA	Belanja IPSRS
27	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		196.000.000			196.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV Pandu Agung Karya, Pemeliharaan PKC	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		11.927.888			11.927.888	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Kembang Selaras Daya, Emergency	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		10.997.500			10.997.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Selamat Utama Mandiri, Isi ulang apar	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		6.320.000			6.320.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Karya Abadi Makmur, Papan Nama	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		18.777.911			18.777.911	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Workshop	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		1.016.818			1.016.818	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Kepesertaan GKM	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		64.000.000			64.000.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GKM	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		106.460.310			106.460.310	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	CV Citra Sarana Mulya, ART	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		8.740.000			8.740.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Air coller	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		35.504.500			35.504.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	GKM	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		3.828.000			3.828.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MY Acico Global Indonesia, Penghancur Kertas	
	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL		3.828.000			3.828.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	MY Acico Global Indonesia, Penghancur Kertas	
28	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		38.164.500			38.164.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Suria Berkat Abadi	Belanja jasa pemeliharaan-kalibrasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		62.019.362			62.019.362	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Riski Megah Sejahtera	Belanja barang-bahan pangan
	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		19.800.000			19.800.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Rentokil Indonesia	Bealanja jasa-pengendalian hama
	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		24.023.340			24.023.340	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. Saba Indomedika	Belanja barang-bahan lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		142.389.500			142.389.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Rajawali Nusindo	Belanja barang-bahan lab
	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		5.894.900			5.894.900	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT Prima Higena Sarana	Belanja jasa-pengangkutan limbah medis
29	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar		1.994.500			1.994.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RS HUSADA	Pembelian Obat
30	Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS		352.190			352.190	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PAM Lyonese	Utang Air
31	Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT		750.000			750.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Sudin Kebersihan Jakarta Utara	Biaya Retribusi Sampah bln Des 2018
	Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT		4.510.000			4.510.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	RSUK Kec. Pademangan	B. Pemeriksaan Laboratorium Des 2018
32	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan		1.108.500			1.108.500	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	Belanja Obat- Obatan
33	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa		4.158.000			4.158.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT ONCOPROBE	Bahan Laboratorium
	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa		1.389.551			1.389.551	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	SUDIN LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Sampah
	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa		18.072.000			18.072.000	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	PT LPG IJI SUMBER CAHAYA MAKMUR	Belanja Gas LPG

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	108.770.619.298	580.224.383.266	508.754.803.225	6.703.613.246	173.536.586.092			
B	Utang Belanja Modal BLUD								
1	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	65.587.500		65.587.500		-	Utang Belanja Modal BLUD	(PT Semangat Sukses Sejahtera)	Belanja Modal Perlengkapan Kantor bulan Desember 2017
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	22.374.000				22.374.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Advance Medicare Corpora	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	25.772.938				25.772.938	Utang Belanja Modal BLUD	PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1.565.200				1.565.200	Utang Belanja Modal BLUD	PT. KARYA PRATAMA	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.962.300				2.962.300	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Karya Pratama	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.497.800				7.497.800	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Karya Pratama	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	8.865.200				8.865.200	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Karya Pratama	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	16.500.000				16.500.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT. New Module International	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	6.435.000				6.435.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Sarandi Karya Nugraha	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.008.500				7.008.500	Utang Belanja Modal BLUD	PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Jakarta 1	Belanja Modal BLUD RSUK Koja
3	Runah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	57.788.500		57.788.500		-	Utang Belanja Modal BLUD	PT. MINIMAX SEJAHTERA MANDIRI	Belanja Pengajuan Hepa Filter
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	5.830.000		5.830.000		-	Utang Belanja Modal BLUD	CV KENANGA	BELANJA ALAT PENDINGIN (Freezer GEA SD 260 BY)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		80.000.000			80.000.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT . Gading Murni	Belanja Modal BLUD (Mesin Antrian)
	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		6.248.000			6.248.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT. MEGA UTAMA SOLUSINDO	Belanja Modal BLUD (alat rumah tangga)
5	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		87.462.683			87.462.683	Utang Belanja Modal BLUD	PT CORNELINDO	Pemeliharaan Gedung
6	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru		88.500.000			88.500.000	Utang Belanja Modal BLUD	PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	BELANJA MODAL MONITOR PASIEN
7	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		3.530.806			3.530.806	Utang Belanja Modal BLUD	PT Bayu berlian Mandiri	Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)
8	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng		567.407.920		567.407.920	-	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Wijaya Karya	Konstruksi Gedung Rumah Sakit
9	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		7.456.312			7.456.312	Utang Belanja Modal BLUD	PT. Dyrsa International	Belanja alat kedokteran
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL BLUD	228.186.938	840.605.721	129.206.000	567.407.920	372.178.739			
C	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD								
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	66.250				66.250	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	SPBU Ancol (Dermaga 1 Marina)	BBM Kapal
	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	43.750				43.750	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Photo Copy Masdar	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
2	Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM	552.750		552.750		-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		obat - obatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	9.926.901.980			9.926.901.980	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		Utang Belanja Pegawai dan Remunerasi
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	5.337.750			5.337.750	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	ABC Laboratorium	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	58.150.400			58.150.400	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Agena Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	8.051.120			8.051.120	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	CV. Air Gasindo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	77.582.377			77.582.377	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Amarta Mitra Selaras	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	27.259.375			27.259.375	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	AMARTA MITRA SELARAS	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.631.680			6.631.680	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	AMPM	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	741.187.947			741.187.947	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Andalan Jaya Abadi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.207.416.166			1.207.416.166	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Andalas Prima Sentosa	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	476.360.999			476.360.999	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Aneka Gas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	122.482.859			122.482.859	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Antamitra Sembada	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.600.000			6.600.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Anugerah Manori Interasia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.572.485.622			1.572.485.622	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	26.477.310			26.477.310	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Anugerah Sinergi Solustama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	636.840.080			636.840.080	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Anugrah Argon Medica	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	289.811.500			289.811.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Apotik MK Pluit	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	8.936.000			8.936.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Atra Widya Agung	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	15.785.000			15.785.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Berca Niaga Medika	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018		UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
					PEMBAYARAN				KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	16.830.000			16.830.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Bina Artha Semesta	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.814.971.022			1.814.971.022	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Bina San Prima	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	21.727.365			21.727.365	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Binabakti Niaga	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	156.390.944			156.390.944	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Bintang Shafwan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	13.828.100			13.828.100	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Bisawi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	50.718.195			50.718.195	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Boswell Mahakarya Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	129.711.500			129.711.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Brataco	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	160.636.180			160.636.180	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Bumi Indah Saranamedis	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	12.579.625			12.579.625	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Cobra Dental	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	292.458.870			292.458.870	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Daya Muda Agung	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.949.200			1.949.200	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Dedent Supply	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.257.012.481			2.257.012.481	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Delvi Primatama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	165.782.782			165.782.782	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Demka Sakti	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	26.774.000			26.774.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Dermarelis	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	156.913.900			156.913.900	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Dian Langgeng Pratama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	32.997.660			32.997.660	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Distriversa Buana Mas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.182.064.044			1.182.064.044	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Dos Ni Roha	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	10.858.000			10.858.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Dwi Asri Graha	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	638.713.394			638.713.394	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Enseval Putera Mrgatrading	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	52.250.000			52.250.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Farmeta	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	23.081.874			23.081.874	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Festo Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	23.511.466			23.511.466	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Fokus Diagnostic	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	197.366.400			197.366.400	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Frismed Hoslab Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	280.230.936			280.230.936	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Global Pharma Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	39.250.000			39.250.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Harmoni Prima Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	11.857.497			11.857.497	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Harves Medikal Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	11.880.000			11.880.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Hearng Vision	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.138.000			6.138.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Hospi Medik Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.259.160.183			1.259.160.183	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	IDS Medical Sstem Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	33.153.072			33.153.072	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Indofarma Global Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	68.163.084			68.163.084	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Indomedika Solusindo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	40.440.400			40.440.400	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Indosopha	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	19.800.000			19.800.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Intergastra Nusantara	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	20.649.010			20.649.010	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Intisumber Hasil Sempurna	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	30.694.985			30.694.985	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Irma Pertiwi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	871.165.900			871.165.900	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Jantra Reka Saksanamas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	32.472.000			32.472.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Jaya Abadi Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	983.734.228			983.734.228	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Jaya Farma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	746.912.100			746.912.100	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Karindo Alkestron	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	79.408.230			79.408.230	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Karunia Anbadi Anugrah	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	31.383.000			31.383.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	CV. Kharisma Scientific	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.032.786.488			1.032.786.488	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kimia Farma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	67.400.274			67.400.274	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kimia Farma Apotik BM RSCM Jakarta	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	432.644.943			432.644.943	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kinobi Farma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	20.853.250			20.853.250	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kopeg RSUD Tarakan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	39.779.626			39.779.626	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Lawsim Zecha	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	210.697.089			210.697.089	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Madesa Sejahtera Utama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	5.236.000			5.236.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Medquest Jaya Global	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	48.816.350			48.816.350	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Megah Medika Pharma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	118.117.020			118.117.020	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Mensa Bina Sukses	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	854.225.746			854.225.746	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Merapi Utama Pharma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	11.071.170			11.071.170	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Metro Fara Insani	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	67.655.404			67.655.404	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Midif Farma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	415.179.231			415.179.231	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Millenium Pharmacon Internationa	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.463.985.600			1.463.985.600	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Mitra Fajar Selaras	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	112.605.020			112.605.020	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Mitraprima Lestari	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	710.930.000			710.930.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Multidaya Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	38.579.384			38.579.384	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Multiredjeki Kita	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	4.295.303.100			4.295.303.100	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Nahl Medica Utama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	17.077.500			17.077.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Nitra	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	498.911.999			498.911.999	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Nugra Karsera	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	161.856.970			161.856.970	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Oncoprobe Utama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	756.350.002			756.350.002	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Osadha Graha Sejahtera	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	5.413.175.000			5.413.175.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Palang Merah Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	33.398.310			33.398.310	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Panji Prima Dinamika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	806.519.734			806.519.734	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Parit Padang	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	743.296.901			743.296.901	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Penta Valent	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	429.858.000			429.858.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Permata Bunda Artano	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	412.005.000			412.005.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Petan Daya Medica	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	5.771.005			5.771.005	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Pradipta Cakrawala Pacific	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	84.402.054			84.402.054	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Prima Alkesindo Nusantara	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	76.015.500			76.015.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Primadaya Indomedika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	4.800.000			4.800.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Primajaya Putra Mandiri	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	38.449.950			38.449.950	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Putra Solusi Diagnostic	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	147.797.636			147.797.636	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Rajawali Nusindo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	47.349.638			47.349.638	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Ravindra Putrapratama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	942.241.240			942.241.240	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Rekamileniumindo Selaras	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	785.000.000			785.000.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Revass Utama Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	39.468.000			39.468.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Rimatandu Motaro	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	287.210.000			287.210.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Rioca Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	22.411.813			22.411.813	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Rosa Mandiri	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	8.250.000			8.250.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sagi Capri	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	479.005.992			479.005.992	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sapta Sari Tama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	15.840.000			15.840.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sejahtera Karya Mulia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.920.000			1.920.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sekarguna Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	373.160.124			373.160.124	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sentra Asia Gemilang	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	323.363.700			323.363.700	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Setia Anugerah Medika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	20.438.110			20.438.110	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Sigma Andalan Nusa	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	8.387.500			8.387.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Sinar Mulia Indomedika	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	26.731.320			26.731.320	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Sinar Roda Utama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	108.053.000			108.053.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sinergi Tridaya Medical	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	42.068.840			42.068.840	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Surgika Alkesindo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	29.053.750			29.053.750	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Surya Jaya Lestari	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	100.995.400			100.995.400	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Surya Medical	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	45.467.217			45.467.217	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Surya Medicanda Lestari	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	144.476.640			144.476.640	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Tawada	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	412.556.863			412.556.863	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Tempo	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	501.948.903			501.948.903	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Todoma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	17.816.650			17.816.650	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Total Medika Persada	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	675.419.580			675.419.580	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Tri Dharma Abadi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	367.805.780			367.805.780	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Tri Sapta Jaya (Jakarta 2)	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	157.493.748			157.493.748	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Unitted Dico Citas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	10.901.200			10.901.200	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Urogen Advanced Solutions	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	9.900.000			9.900.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. U- Sun International	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	18.187.200			18.187.200	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Versacon Medical	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	410.145.000			410.145.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Worchardt Pharma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	226.227.100			226.227.100	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Langlang Global Sukses	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	331.589.858			331.589.858	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	CV. Niaga Sumber Gizi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	34.566.666			34.566.666	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT.Presindo Central	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	31.416.000			31.416.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Sadikun Niagamas Raya	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	53.097.000			53.097.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	CV. Agung	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1.000.000			1.000.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kamtibmas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	49.844.828			49.844.828	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Barindo Surya Aryatama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	50.352.500			50.352.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Beta Sukses Mandiri	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018			UTANG PER 31 DESEMBER 2018	Klasifikasi Utang Belanja	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN					
				PEMBAYARAN	KOREKSI				
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.502.500			2.502.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Gomda Sindaru Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	19.627.740			19.627.740	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Markindo Anugerah Citra P.	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	104.192.550			104.192.550	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Mitralab Buana	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	33.822.327			33.822.327	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PD. Acanthus Centralizet CO.	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	92.380.035			92.380.035	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Delano Gemilang A.	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	34.094.500			34.094.500	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Fortuna Anugerah S.	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.696.000			2.696.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Cahaya Foto Copy	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	3.000.000			3.000.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Clening Service	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.100.000			6.100.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Security	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	900.000			900.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	CV. Kalimas	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	935.000			935.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kharisma Pelita Abadi Motor	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	164.777.422			164.777.422	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	KOPEG RSUD Tarakan	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	15.612.000			15.612.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Kuntum Wijaya Kusuma	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	13.948.000			13.948.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Niaga Hijau Mandiri	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	9.350.000			9.350.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Remala Abadi	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	10.800.000			10.800.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Retribusi Sampah	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	5.500.000			5.500.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Suparna	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	225.000			225.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Transport Security	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	22.385.000			22.385.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Artha Jaya Toner	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	4.388.541			4.388.541	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Calmoic Indonesia	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	570.000			570.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Citra Media Nusa Purnama	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	18.512.450			18.512.450	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Mitra lab Buana	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	13.200.000			13.200.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Raro Sampang Jaya	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	4.356.000			4.356.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Setiawan Sejati	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.249.999			6.249.999	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Suparna	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	4.413.750			4.413.750	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Fortuna Anugerah S.	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	6.600.000			6.600.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Aneka Gas Industri	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	443.000			443.000	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Restomart Cipta Usaha	
	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	170.084.440			170.084.440	-	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	PT. Andalas Prima Sentosa	
4	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	8.703.848.843	95.778.009.599	96.645.359.737		7.836.498.705	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	Karyawan RS Cengkareng	Remunerasi dan imbalan kinerja tahun 2018
5	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		3.450.934.116			3.450.934.116	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Utang Farmasi
	JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI BLUD	63.482.808.055	99.228.943.715	96.645.912.487	54.778.296.462	11.287.542.821			

MONITORING PENYELESAIAN PEKERJAAN FISIK YANG MELEWATI TAHUN 2018

No.	Nama SKPD	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Bobot pada saat tagihan SPP-SPM		Nilai tagihan (SP2D cair)	Bobot pekerjaan s.d 31 Des 2018		Penambahan Bobot pekerjaan		Pengakuan Hutang per 31 Des 2018 (Rp)	Pengakuan nilai KDP per 31 Des 2018 (Rp)		Rencana Penyelesaian Sisa Pekerjaan di tahun 2019 (%)		Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 100%
				Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 4	10 = 8 - 5	11 = 9 - 6	12 = 9 - 7	13	14 = 6 + 11	15	16	17
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan (Pekerjaan Konstruksi)	14.218.871.000	95,027%	13.511.766.545	13.511.766.545	99,498%	14.147.492.268	4,471%	635.725.722	635.725.722	99,498%	14.147.492.268	0,50%	71.378.733	03 Februari 2019
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan (Pekerjaan Pengawasan)	180.664.420	95,027%	171.679.978	171.679.978	99,498%	179.757.485	4,471%	8.077.506	8.077.506	99,498%	179.757.485	0,50%	906.935	03 Februari 2019
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara (Pekerjaan Konstruksi)	14.718.026.000	90,020%	13.249.167.005	13.249.167.005	91,081%	13.405.325.261	1,061%	156.158.256	156.158.256	91,081%	13.405.325.261	8,92%	1.312.700.739	03 Februari 2019
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara (Pekerjaan Pengawasan)	189.503.050	90,020%	170.590.646	170.590.646	91,081%	172.601.273	1,061%	2.010.627	2.010.627	91,081%	172.601.273	8,92%	16.901.777	03 Februari 2019
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot (Pekerjaan Konstruksi)	8.195.000.000	95,540%	7.829.503.000	7.829.503.000	99,045%	8.116.737.750	3,505%	287.234.750	287.234.750	99,045%	8.116.737.750	0,95%	78.262.250	03 Februari 2019
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Daan Mogot (Pekerjaan Pengawasan)	125.862.000	95,540%	120.248.555	120.248.555	99,045%	124.660.018	3,505%	4.411.463	4.411.463	99,045%	124.660.018	0,95%	1.201.982	03 Februari 2019
7	Dinas Sumber Daya Air	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang	11.579.818.000	35,00%	4.052.936.300	4.052.936.300	35,00%	4.052.936.300	0%	-	-	35%	4.052.936.300	65%	7.526.881.700	03 Februari 2019
8	Dinas Sumber Daya Air	Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Panggang	247.005.000	35,00%	86.451.750	86.451.750	35,00%	86.451.750	0%	-	-	35%	86.451.750	65%	160.553.250	03 Februari 2019
Jumlah			49.454.749.470		39.192.343.779	39.192.343.779		40.285.962.104		1.093.618.325	1.093.618.325		40.285.962.104		9.168.787.367	

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)																		
No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Labas Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
																	Cost Method	Equity Method
																		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=(16 X 17)
																	20=(18 + 19)	
1	Bidang Perbankan																	
	PT Bank DKI	Audited 2018	50.826.199.000	1.512.471.000	689.246.000	53.027.916.000	41.605.888.000	2.835.597.000	44.441.485.000	-	4.431.159.000	1.000	1.067.026.000	3.088.245.000	8.586.431.000	99,98%	-	8.584.493.261
	Sub Total 1		50.826.199.000	1.512.471.000	689.246.000	53.027.916.000	41.605.888.000	2.835.597.000	44.441.485.000	-	4.431.159.000	1.000	1.067.026.000	3.088.245.000	8.586.431.000		-	8.584.493.261
2	Bidang Asuransi																	
	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2017	1.878.343.479	865.967.178	-	2.744.310.657	1.846.971.879	4.000.000	1.850.971.879	-	279.115.907	-	365.189.591	202.365.163	846.670.661	4,45%	13.080.000	13.080.000
	Sub Total 2		1.878.343.479	865.967.178	-	2.744.310.657	1.846.971.879	4.000.000	1.850.971.879	-	279.115.907	-	365.189.591	202.365.163	846.670.661		13.080.000	13.080.000
3	Bidang Konstruksi																	
	PT Jakarta Propertiindo (Konsolidasi)	Unaudited 2018	4.500.579.271	13.543.102.941	-	18.043.682.213	505.878.665	431.597.338	937.476.002	-	8.758.730.231	2.232.328.500	-	5.523.090.256	16.514.148.987	99,99%	-	16.513.489.079.860
	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2018	6.770.160.005	11.250.838.218	-	18.020.998.223	5.809.333.091	661.532.095	6.470.865.186	3.142.906.039	3.117.000	525.025.043	538.531.350	7.340.553.605	8.407.226.998	38,80%	-	3.262.014.864
	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2018	889.138.297	1.524.756.593	-	2.413.894.891	49.696.573	178.377.482	228.074.055	1.649.473	2.000.000.000	-	184.171.363	2.184.171.363	100,00%	-	2.184.171.363	2.184.171.363
	Sub Total 3		12.159.877.574	26.318.697.752	-	38.478.575.326	6.364.908.328	1.271.506.915	7.636.415.243	3.144.555.512	10.761.847.231	2.757.353.543	538.531.350	13.047.815.225	27.105.547.349		-	21.959.675.307
4	Bidang Jasa Lainnya																	
	PT Jakarta International Expo	Audited 2016	89.636.790	1.659.001.519	-	1.748.638.309	236.474.662	1.005.336.575	1.241.811.238	-	300.000.000	-	-	206.827.072	506.827.072	13,14%	39.375.000	39.375.000
	PDAM Jaya	Audited 2018	1.164.163.637	323.286.373	-	1.487.450.010	679.649.522	1.117.782.296	1.797.431.778	-	127.573.411	598.560.190.12	(3.826.989.22)	(1.032.268.360)	(309.961.767)	100,00%	-	935.754.598
	PD PAL Jaya	Audited 2018	1.212.205.812	235.581.707	-	1.447.787.519	9.200.112	11.832.810	21.032.922	-	822.971.783	15.195	185.475	112.582.165	935.754.598	100,00%	-	935.754.598
	PD Pasar Jaya	Audited 2018	1.162.478.157	3.163.111.648	-	4.325.589.804	111.701.378	2.851.342.171	2.963.043.548	-	1.142.011.269	6.383.572	(115.995.973)	330.147.388	1.362.546.256	100,00%	-	1.362.546.256
	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2018	475.999.600	1.330.107	10.397.000	487.726.716	74.060.230	-	74.060.230	-	400.000.000	-	6.547.701	7.118.785	413.666.496	98,75%	-	408.495.655
	Sub Total 4		3.613.504.004	5.382.311.355	10.397.000	9.006.212.359	1.111.085.903	4.986.283.812	6.097.379.715	-	2.792.556.443	604.958.957	(113.089.786)	(375.592.970)	2.908.832.645		39.375.000	2.706.796.509
5	Bidang Perdagangan																	
	PT Food Station Tjipinang	Audited 2018	643.830.688	49.732.335	1.010.553	694.573.576	186.692.797	17.459.832	204.152.629	-	347.800.000	85.500.000	-	57.120.948	490.420.948	99,98%	-	490.334.929
	PD Dharma Jaya	Audited 2018	244.990.531	40.171.020	1.001.848	286.163.389	34.061.190	22.470.683	56.531.873	-	1.949.387	591.277.19	270.727.876	(43.637.025)	229.631.515	100,00%	-	229.631.515
	Sub Total 5		888.821.219	89.903.344	2.012.401	980.736.965	220.753.987	39.930.515	260.684.502	-	349.749.387	86.091.277	270.727.876	13.483.922	720.052.463		-	719.966.444
6	Bidang Pariwisata																	
	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2018	989.040.941	3.353.653.761	18.699.587	4.361.394.290	1.230.669.573	1.005.094.075	2.235.763.648	132.968.594	400.000.000	40.404.433	2.351.881	1.549.905.733	1.992.662.048	72,00%	-	1.434.716.675
	PT Jakarta Tourindo	Audited 2018	30.616.064	469.595.860	5.824.067	506.035.991	18.773.785	45.429.319	64.203.083	-	468.604.000	465	-	(26.771.557)	441.832.908	99,35%	-	438.963.931
	PT Grahasahati Suryajaya	Audited 2016	3.831.261	288.383.493	-	292.214.754	65.906.520	220.861.318	286.767.838	-	641.112.796	-	(635.665.880)	5.446.916	8,08%	3.951.000	-	3.951.000
	PT Pakuan International	Unaudited 2017	720.868	44.238.080	-	44.958.948	11.147.820	7.439.930	18.587.750	-	50.000.000	236.600	2.039.534	(25.904.936)	26.371.198	1,94%	1.345.900	1.345.900
	Sub Total 6		1.024.209.134	4.155.871.195	24.523.654	5.204.603.983	1.326.497.677	1.278.824.642	2.605.322.320	132.968.594	1.559.716.796	40.641.498	4.391.416	861.563.360	2.466.313.069		5.296.900	1.873.680.606
7	Bidang Kawasan Industri																	
	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018	428.720.759	228.568.603	-	657.289.361	133.693.941	7.560.086	141.254.027	-	200.000.000	-	(67.574)	316.102.908	516.035.334	50,00%	-	258.017.667
	PT Kawasan Benikat Nusantara	Audited 2018	623.263.310	1.542.378.554	-	2.165.641.863	523.487.210	134.586.156	658.073.367	-	363.945.000	106.747.765	1.036.875.732	1.507.568.487	26,85%	209.692.695	-	209.692.695
	Sub Total 7		1.051.984.069	1.770.947.156	-	2.822.931.225	657.181.151	142.146.243	799.327.394	-	563.945.000	-	106.686.190	1.352.978.640	2.023.603.821		209.692.695	258.017.667
8	Bidang Angkutan Darat																	
	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	135.826	3.385.949	-	3.521.775	253.635	5.322.734	5.576.369	-	5.500.000	-	-	(7.554.594)	(2.054.594)	28,00%	-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2018	616.805.278	12.797.094.415	-	13.413.899.693	382.882.579	748.154.745	1.131.037.324	-	6.165.807.000	-	6.607.193.280	(490.137.912)	12.282.862.369	99,99%	-	12.281.866.322
	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2018	2.351.827.488	1.298.987.350	-	3.650.814.838	606.126.125	85.629.089	691.755.214	-	1.740.000.000	420.000.000	(16.453.343)	815.512.967	2.959.059.624	99,43%	-	2.942.053.533
	Sub Total 8		616.805.278	12.797.094.415	-	13.413.899.693	989.088.704	833.783.834	1.822.792.538	-	7.905.807.000	420.000.000	6.590.739.937	325.375.055	15.241.921.992		-	15.223.919.855
9	Bidang Aneka Industri																	
	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2018	1.384.227.944	139.289.226	-	1.523.517.170	192.299.843	47.053.513	239.353.356	4.123.520	16.013.181	19.015.656	-	1.245.011.457	1.280.040.294	26,25%	-	336.054.861
	PT Cernani Toka	Audited 2018	335.222.261	96.431.893	-	431.654.154	278.343.070	21.288.362	299.631.452	-	112.968.859	-	(12.648.824)	31.702.767	132.022.701	27,42%	27.059.360	27.059.360
	Sub Total 9		1.719.450.205	235.721.119	-	1.955.171.324	470.642.913	68.341.895	538.984.808	4.123.520	128.982.040	19.015.656	(12.648.824)	1.276.714.224	1.412.062.995		27.059.360	336.054.861
	Total Seluruh Bidang Industri		73.779.193.962	53.128.984.513	726.179.056	127.634.357.531	54.592.938.543	11.460.424.856	66.053.363.399	3.281.647.625	28.772.878.804	3.928.061.931	8.817.547.649	19.792.947.619	61.311.436.004	-	294.503.955	51.662.604.510

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Lab a (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI	Audited 2018	4.141.174.000	(3.113.264.000)	1.027.910.000	45.755.000	-	(273.358.000)	800.307.000
	Sub Total 1		4.141.174.000	(3.113.264.000)	1.027.910.000	45.755.000	-	(273.358.000)	800.307.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2017	2.427.762.253	(2.219.041.658)	208.720.595	-	(7.110.936)		201.609.660
	Sub Total 2		2.427.762.253	(2.219.041.658)	208.720.595	-	(7.110.936)	-	201.609.660
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2018	842.804.746	(695.450.881)	147.353.865	165.506.250	(288.266.359)	(714.027)	23.879.730
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2018	7.915.330.274	(6.456.058.177)	1.459.272.097	384.698.321	(243.429.149)	(93.264.393)	1.507.276.876
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2018	312.052.593	(120.976.459)	191.076.134	7.653.574	(47.920.019)	(14.540.846)	136.268.843
	Sub Total 3		9.070.187.613	(7.272.485.517)	1.797.702.096	557.858.145	(579.615.527)	(108.519.266)	1.667.425.449
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2016	370.083.311	(308.084.365)	61.998.946	8.909.528	(1.414.341)	(31.245.693)	38.248.440
2.	PD AM Jaya	Audited 2018	2.902.987.732	(2.615.573.562)	287.414.169	85.980.031	(115.884.285)	(57.967.454)	199.542.460
3.	PD PAL Jaya	Audited 2018	89.860.947	(59.885.278)	29.975.669	22.483.350	(623.090)	(9.102.931)	42.732.999
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2018	960.871.009	(881.922.988)	78.948.021	53.955.062	(8.967.828)	(25.201.975)	98.733.280
5.	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2018	60.019.576	(51.305.024)	8.714.551			15.481	8.730.032
	Sub Total 4		4.383.822.575	(3.916.771.216)	467.051.356	171.327.971	(126.889.543)	(123.502.571)	387.987.212
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Audited 2018	1.605.519.035	(1.581.306.057)	24.212.978	8.503.346		(2.480.911)	30.235.413
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2018	453.570.086	(437.806.989)	15.763.097	6.300.699	(916.411)	(6.603.372)	14.544.014
	Sub Total 5		2.059.089.121	(2.019.113.046)	39.976.075	14.804.046	(916.411)	(9.084.282)	44.779.427
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2018	1.317.494.670	(893.215.027)	424.279.643	9.337.158	(88.894.603)	(122.375.133)	222.347.066
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2018	104.478.290	(120.948.906)	(16.470.616)	1.646.624	(632.512)	-	(15.456.504)
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2016	49.064.662	(52.337.246)	(3.272.584)	1.551.156	(35.448.151)	(2.953.881)	(40.123.460)
4.	PT Pakuan International	Unaudited 2017	5.179.439	(11.371.674)	(6.192.235)	144	(29)	-	(6.192.120)
	Sub Total 6		1.476.217.061	(1.077.872.853)	398.344.208	12.535.081	(124.975.294)	(125.329.014)	160.574.981
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018	320.434.777	(104.770.309)	215.664.469	13.560.292	(88.904.846)	(24.091.674)	116.228.239
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2018	649.703.337	(457.961.810)	191.741.527	18.885.654	(12.270.439)	(48.572.297)	149.784.444
	Sub Total 7		970.138.114	(562.732.118)	407.405.996	32.445.946	(101.175.285)	(72.663.972)	266.012.683
	Jumlah dipindahkan		24.528.390.737	(20.181.280.408)	4.347.110.327	834.726.189	(940.682.996)	(712.457.105)	3.528.696.413

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
	Jumlah pindahan		24.528.390.737	(20.181.280.408)	4.347.110.327	834.726.189	(940.682.996)	(712.457.105)	3.528.696.413
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ralax Armada	Unaudited 2014	1.591.567	(3.740.272)	(2.148.705)	97	-	-	(2.148.608)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2018	-	(207.263.897)	(207.263.897)	78.494.569	(8.736.801)	-	(137.506.129)
3.	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2018	2.596.519.485	(2.277.705.618)	318.813.867	159.898.533	(19.621.723)	(114.772.669)	344.318.008
	Sub Total 8		2.596.519.485	(2.484.969.515)	111.549.970	238.393.102	(28.358.524)	(114.772.669)	206.811.880
9	Bidang Aneka Industri								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2018	893.006.350	(241.721.111)	651.285.239	44.655.852	(254.692.973)	(103.118.133)	338.129.985
2.	PT Cemani Toka	Audited 2018	535.926.473	(512.280.493)	23.645.980	481.900	(17.856.085)	(2.190.064)	4.081.730
	Sub Total 9		1.428.932.823	(754.001.604)	674.931.219	45.137.752	(272.549.058)	(105.308.197)	342.211.715
	Total Seluruh Bidang Industri		28.553.843.045	(23.420.251.527)	5.133.591.516	1.118.257.043	(1.241.590.577)	(932.537.971)	4.077.720.007

DATA PENERIMAAN ASET KLB/KDB
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2018

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
1	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Ramp 1 - Simpang Susun Semanggi - Cawang ke Sudirman	171.299.363.255	7434	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Ramp 2 - Grogol Ke Blok M	165.077.836.745	7164	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Stabilisator Camera Video	15.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Air Conditioner	6.500.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Alat Angkut Gondola	125.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Micro Meter Lampu	30.000.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
2	Fasilitas Pendukung Lapangan Olahraga Di Lapangan banteng Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat	Pagar Besi Sepanjang 1.029 M dan Tinggi Pagar 6 M	9.048.556.557	6174	M ²	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi
3	Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah besar Jakarta Pusat	Konstruksi hasil Penataan Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat	70.991.043.000,00	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
4	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Pulogadung	3.822.497.589,41	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Cempaka Putih	3.897.238.702,06	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Tanjung Priok	4.462.590.891,80	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	3.577.198.117,10	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Timur	3.875.910.818,78	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Sumantri	4.935.638.186,57	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	2.375.012.217,08	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Barat	2.807.463.233,24	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Bulungan	3.071.860.235,17	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Ragunan	3.006.694.679,89	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Konstruksi Track BMX Pulomas	27.056.578.000,62	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
5	Lapangan Baseball Veldrome Rawamangun - Jakarta International Baseball Arena	Lapangan Baseball Veldrome Rawamangun - Jakarta International Baseball Arena	39.362.463.328,23	1	m ²	PT. Sinar Mas Teladan
6	Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat	Perbaikan Interior Jakarta Creative Hub (Co-Working Space) Beserta Fasilitas Pendukungnya pada Gedung Jakarta UKM Center Promosi Waduk Melati	13.717.453.448	15264	m ²	PT. Singaproptindo Haryono
	Jalan Taman Fatahillah Nomor 1 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat	Pekerjaan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta (Pekerjaan di Bangunan Utama)	3.913.258.626	2704	M ²	PT. Singaproptindo Haryono
	Jalan Taman Fatahillah Nomor 1 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat	Pekerjaan di Pintu Masuk Alternatif di Bangunan Etnografi Museum Sejarah Jakarta	2.114.720.001	590	M ²	PT. Singaproptindo Haryono
7	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Kantor KPU Provinsi	1.422.830.600	1032	M ²	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	AC Split Merk Daikin 1 PK Type FTM25jv14 Kantor KPU Provinsi	275.770.000	40	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Automatic Screen Projector 72" Merk Keystone Motorize Screen Kantor KPU Provinsi	7.590.000	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Automatic Screen Projector 84" Merk Keystone Motorize Screen Kantor KPU Provinsi	8.096.000	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Filling Cabinet Merk Lion L44 - 4 Laci Kantor KPU Provinsi	9.662.400	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Kursi Kerja Merk Savelo Kingdom Kantor KPU Provinsi	23.377.200	20	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Kursi Pimpinan Merk Ichiko Felcio IS HDT Kantor KPU Provinsi	46.792.350	9	Unit	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Kursi Rapat Merk Futura , KS FTR 405 Kantor KPU Provinsi	66.893.750	125	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Kursi Tunggu Stainless Merk Chairman AC 940 Kantor KPU Provinsi	10.853.700	6	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Laptop Merk Asus X450 J Kantor KPU Provinsi	107.019.000	9	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Lemari File / Arsip Kantor KPU Provinsi	11.460.900	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Meja Kerja Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301A Kantor KPU Provinsi	12.713.800	20	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Meja Pimpinan Biro Ichiko ICK-02 Warna Standar Kantor KPU Provinsi	31.650.300	6	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Meja Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM-2400 Kantor KPU Provinsi	27.357.000	15	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 Kantor KPU Provinsi	5.123.250	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Mesin PABX Merk Panasonic KX-TES 824 BX Kantor KPU Provinsi	6.388.250	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Paket Microphone Conference Merk auderpro Kantor KPU Provinsi	98.366.400	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Paket Sound System Meeting Besar Premium Yamaha & Outle Kantor KPU Provinsi	85.387.500	1	Paket	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Portable Wireless Sound System Kantor KPU Provinsi	5.566.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Printer Laser Jet Kantor KPU Provinsi	36.621.750	3	Paket	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Projector Merk BenQ Projector Tipe MX525 Kantor KPU Provinsi	19.734.000	3	Unit	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	Sofa Merk Scorpion 2 Tipe 321 W/ Hitam + Meja Kaca Kantor KPU Provinsi	65.179.620	9	Paket	PT. Sampoerna Land
	Gedung Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta Pusat - Jalan Raya Salemba Nomor 15 Jakarta Pusat	White Board Ruang Rapat Merk Sentra Gantung Kantor KPU Provinsi	2.891.790	3	Paket	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	KPU Jakarta Pusat	1.846.404.000	200	m ²	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kursi Pimpinan Merk Chairman PC 9110 KPU Jakarta Pusat	13.434.300	6	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meja Kerja Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301A KPU Jakarta Pusat	9.535.350	15	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meja Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM-2400 KPU Jakarta Pusat	7.295.200	4	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kursi Kerja Merk Chairman DC 203 KPU Jakarta Pusat	13.775.850	15	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kursi Rapat Susun Merk Futura KS FTR 405 KPU Jakarta Pusat	53.515.000	100	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam +Meja Kaca KPU Jakarta Pusat	8.855.000	2	Set	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	White Board Ruang Rapat Merk Sentra Gantung KPU Jakarta Pusat	1.927.860	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Paket Microphone Conference Merk auderpro KPU Jakarta Pusat	15.534.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Projector Merk BenQ Projector Tipe MX525 KPU Jakarta Pusat	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Manual Screen Projector Merk Letaec KPU Jakarta Pusat	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Komputer PC Desktop i5 KPU Jakarta Pusat	60.720.000	6	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	AC Split Merk Daikin 1 PK Type FTM25jv14 KPU Jakarta Pusat	13.788.500	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Mesin PABX Merk Panasonic KX-TES 824 BX KPU Jakarta Pusat	4.490.750	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 KPU Jakarta Pusat	1.707.750	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Printer Ink Jet Epson L365 (PSC) KPU Jakarta Pusat	10.626.000	3	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Jakarta Pusat	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga - Jalan Pejambon Nomor 7 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tambah Daya Listrik KPU Jakarta Pusat	25.300.000	1	Paket	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	KPU Jakarta Barat	176.385.000	644	m²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Lemari File /Arsip Elite Tipe 438 KPU Jakarta Barat	7.640.600	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Filling Cabinet Merk Lion L44 - 4 Laci KPU Jakarta Barat	2.415.600	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Kursi Rapat (Susun) Merk Chitose Caesar N KPU Jakarta Barat	21.007.800	45	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam +Meja Kaca KPU Jakarta Barat	26.565.000	6	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Kursi Tunggu Stainless Merk Chairman AC 940 Kantor KPU Jakarta Barat	3.617.900	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	White Board Ruang Rapat Papan Tulis Sentra Gantung KPU Jakarta Barat	963.930	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Paket Microphone Conference Merk auderpro KPU Jakarta Barat	49.183.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Projector Merk BenQ Projector Tipe MX525 KPU Jakarta Barat	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Manual Screen Projector Merk Letaec KPU Jakarta Barat	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Komputer PC Desktop i5 KPU Jakarta Barat	50.600.000	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Laptop Merk Lenovo IP 500s Core i5 KPU Jakarta Barat	19.984.580	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Scanner Fujitsu Scansnap iX500 KPU Jakarta Barat	12.650.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Printer Laser Jet Pro M402D KPU Jakarta Barat	5.629.250	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Printer Ink Jet Epson L365 (PSC) KPU Jakarta Barat	14.168.000	4	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor BKKBD - Jalan Panjang - Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Jakarta Barat	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	KPU Jakarta Utara	190.048.000	288	m ²	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Filling Cabinet Merk Lion L.44 - 4 Laci KPU Jakarta Utara	4.831.200	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Lemari File / Arsip Elite Tipe 438 KPU Jakarta Utara	3.820.300	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Meja Rapat Orbitrend Tipe OSM-2400 KPU Jakarta Utara	7.295.200	4	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Kursi Rapat (Lipat) Merk Chitose Cosmo 942 KPU Jakarta Utara	52.090.500	150	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca KPU Jakarta Utara	26.565.000	6	Set	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Kursi Tunggu Stainless Merk Chairman AC 940 KPU Jakarta Utara	1.808.950	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Paket Microphone Conference Merk auderpro KPU Jakarta Utara	49.183.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Projector Merk BenQ Projector Tipe MX525 KPU Jakarta Utara	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Manual Screen Projector Merk Letaec KPU Jakarta Utara	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Komputer PC Desktop i5 KPU Jakarta Utara	50.600.000	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Scanner Fujitsu Scansnap iX500 KPU Jakarta Utara	12.650.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Printer Ink Jet Epson L365 (PSC) KPU Jakarta Utara	7.084.000	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara - Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Jakarta Utara	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	KPU Jakarta Selatan	91.905.000	1390	m ²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Filling Cabinet Merk Lion L.44 - 4 Laci KPU Jakarta Selatan	4.831.200	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Jakarta Selatan	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Kursi Kerja Merk Chairman DC 203 KPU Jakarta Selatan	4.591.950	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Kursi Pimpinan Merk Chairman PC 9110 B KPU Jakarta Selatan	13.434.300	6	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendean - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Kursi Rapat (Lipat) Merk Chitose Cosmo 942 KPU Jakarta Selatan	52.090.500	150	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Laptop Merk Lenovo IP 500s Core i5 KPU Jakarta Selatan	49.961.450	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Lemari File / Arsip Elite Tipe 438 KPU Jakarta Selatan	3.820.300	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Manual Screen Projector Merk Letaec KPU Jakarta Selatan	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Meja Kerja VIP meja 1/2 Biro MV-301 A KPU Jakarta Selatan	3.178.450	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Meja Rapat Orbitrend Tipe OSM-2400 KPU Jakarta Selatan	7.295.200	4	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Paket Microphone Conference Merk auderpro KPU Jakarta Selatan	49.183.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Printer Laser Jet Pro M402D KPU Jakarta Selatan	11.258.500	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Projector BenQ Projector Tipe MX525 KPU Jakarta Selatan	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca KPU Jakarta Selatan	8.855.000	2	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	TV LED Merk LG 32 LH510D KPU Jakarta Selatan	7.590.000	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Mampang Prapatan - Jalan Tendea - Kelurahan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan	White Board Ruang Rapat Papan Tulis Sentra Gantung KPU Jakarta Selatan	963.930	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	KPU Jakarta Timur	69.849.000	1156	m ²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Lemari File / Arsip Elite Tipe 438 KPU Jakarta Timur	7.640.600	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Filling Cabinet Merk Lion L.44 - 4 Laci KPU Jakarta Timur	2.415.600	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Meja Rapat Orbitrend Tipe OSM-2400 KPU Jakarta Timur	3.647.600	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Kerja Chairman DC 203 KPU Jakarta Timur	4.591.950	5	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Rapat Chitose Cosmo 942 KPU Jakarta Timur	52.090.500	150	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca KPU Jakarta Timur	22.137.500	5	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Tunggu Merk Chairman AC 940 KPU Jakarta Timur	1.808.950	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Paket Microphone Conference Merk auderpro KPU Jakarta Timur	49.183.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Projector Tipe MX 525 KPU Jakarta Timur	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Manual Screen Projector Merk Letaec KPU Jakarta Timur	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Komputer PC Merk Desktop i5 KPU Jakarta Timur	50.600.000	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Scanner Merk Fujitsu Scan Snap iX500 KPU Jakarta Timur	12.650.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Printer Ink Jet Merk Epson L365 (PSC) KPU Jakarta Timur	10.626.000	3	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung - Jalan Pulomas Barat VI, Kav. 14-16 Kota Adm. Jakarta Timur	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Jakarta Timur	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	KPU Kepulauan Seribu	64.677.000	1527	m ²	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Lemari File / Arsip Merk elite Tipe 438 KPU Kepulauan Seribu	3.820.300	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Filling Cabinet Merk Lion L.44 - 4 Laci KPU Kepulauan Seribu	4.831.200	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Pimpinan Merk Chairman PC9110 B KPU Kepulauan Seribu	13.434.300	6	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Meja Kerja Merk VIP Meja 1/2 Biro MV- 301 A KPU Kepulauan Seribu	3.178.450	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Meja Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM- 2400 KPU Kepulauan Seribu	3.647.600	2	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Kerja Merk Chairman DC 203 KPU Kepulauan Seribu	4.591.950	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Rapat (Susun) Merk Futura KS FTR 405 KPU Kepulauan Seribu	21.406.000	40	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sofa Ressit Minimalis Type R - 90070 + Meja Kaca KPU Kepulauan Seribu	13.282.500	3	Set	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Tunggu Stainless Merk Chairman AC 940 KPU Kepulauan Seribu	3.617.900	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	White Board Ruang Rapat Sentra Gantung KPU Kepulauan Seribu	963.930	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Portable Wireless Sound System Merk Krezt WAS-03D KPU Kepulauan Seribu	5.566.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Projector Merk BenQ Projector Tipe MX525 KPU Kepulauan Seribu	6.578.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Manual Screen Projector Letaec KPU Kepulauan Seribu	1.391.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Komputer Desktop i5 KPU Kepulauan Seribu	40.480.000	4	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Scanner Fujitsu Scansnap iX500 KPU Kepulauan Seribu	12.650.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Laptop Merk Lenovo IP500s Core i5 KPU Kepulauan Seribu	49.961.450	5	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Printer Laser Jet Merk Pro M402D KPU Kepulauan Seribu	5.629.250	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Printer Ink Epson L365 (PSC) KPU Kepulauan Seribu	10.626.000	3	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Brangkas Uang KPU Kepulauan Seribu	6.650.160	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Kamera DSLR Merk Canon EOS 700D KIT dengan lensa 18-55 MMSTM KPU Kepulauan Seribu	7.906.250	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Kantor Dinas Teknis Kab. Kepulauan Seribu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Genset Merk genset Portable Highlander HL-9000 LX KPU Kepulauan Seribu	14.168.000	1	Unit	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Bawaslu Provinsi	48.569.000	763	m²	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Kursi Ruang Rapat Merk Sentra Type SC 205 Bawaslu Provinsi	35.873.200	40	Buah	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Genset Portable SF 11500DXE Bawaslu Provinsi	33.000.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA32FH4003 Bawaslu Provinsi	13.662.000	4	Unit	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH Bawaslu Provinsi	17.077.500	3	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	AC 0,5 PK Merj Sharp Plasmacluster AH - AP5SHL 1/2 PK - Putih Bawaslu Provinsi	10.626.000	2	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Standing AC Merk Panasonic AC Standing Floor 2 PK CS-C-18 FFP Bawaslu Provinsi	17.710.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Alat Pemadam Api Ringan Merk Gunnebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2A Bawaslu Provinsi	43.832.250	7	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Mic Meja Rapat Merk Auderpro Bawaslu Provinsi	49.335.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Mesin Penghancur Kertas Merk paper Shredder Ideal 2404 Bawaslu Provinsi	14.610.750	1	Unit	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Laptop Merk Asus X450 J Bawaslu Provinsi	35.673.000	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Kitchen Set Merk Expo Tipe KA-08 Bawaslu Provinsi	1.100.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Jalan Danau Agung III Nomor 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Vertical Blind (Gorden) Cream Bawaslu Provinsi	48.727.800	45	m²	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Panwaslu Jakarta Pusat	113.508.000	8810	m²	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Meja Pimpinan Merk Ichiko Panwaslu Jakarta Pusat	21.100.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Panwaslu Jakarta Pusat	5.085.520	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Kursi Pimpinan Merk Ichiko Felcio IS HDT Panwaslu Jakarta Pusat	27.728.800	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Kursi Staf Merk Savelo Kingdom L (Oscar) SA 17 Panwaslu Jakarta Pusat	13.124.320	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Panwaslu Jakarta Pusat	26.757.500	50	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Panwaslu Jakarta Pusat	11.021.340	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Lemari Besi Brangkas Merk Ichiban HSC 60 A Panwaslu Jakarta Pusat	6.650.160	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Filling Kabinet Merk Lion L44-4 Laci Panwaslu Jakarta Pusat	12.078.000	5	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Lemari Arsip Elite Type 438 Panwaslu Jakarta Pusat	3.486.230	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Telepon / Mesin Fax Merk panasonic KX-FT 983 Panwaslu Jakarta Pusat	2.150.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA 32FH4003 Panwaslu Jakarta Pusat	3.415.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Modem & Wifi Merk Bolt Modem ZTE Hydra Panwaslu Jakarta Pusat	1.733.160	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Panwaslu Jakarta Pusat	7.235.800	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Projector Merk BenQ MX 525 Panwaslu Jakarta Pusat	6.578.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Layar / Tripood Screen Panwaslu Jakarta Pusat	759.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Dispenser erk Sharp SWD-72EHL - WH Panwaslu Jakarta Pusat	6.546.320	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Laptop / PC Merk Asus X450 J Panwaslu Jakarta Pusat	36.048.870	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Desktop / PC Desktop i5 Panwaslu Jakarta Pusat	22.295.790	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Whiteboard Papan Tulis Merk Sentra Gantung Panwaslu Jakarta Pusat	1.368.070	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Panwaslu Jakarta Barat	585.562.000	644	m ²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Meja Pimpinan Merk Ichiko Panwaslu Jakarta Barat	21.100.200	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Panwaslu Jakarta Barat	5.085.520	1	Set	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Kursi Pimpinan Merk Ichiko Felcio IS HDT Panwaslu Jakarta Barat	27.728.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Kursi Staf Merk Savelo Kingdom L (Oscar) SA 17 Panwaslu Jakarta Barat	13.124.320	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Meja Ruang Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM 2400 Panwaslu Jakarta Barat	19.145.500	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Panwaslu Jakarta Barat	40.136.250	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Panwaslu Jakarta Barat	11.021.340	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Lemari Besi (Brangkas) Merk Ichiban HSC 60 A Panwaslu Jakarta Barat	6.650.820	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Filling Cabinet Merk Lion L44 - 4 Laci Panwaslu Jakarta Barat	12.078.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Lemari Arsip Elite Type 438 Panwaslu Jakarta Barat	3.486.230	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Telepon / Mesin Fax Merk panasonic KX-FT 983 Panwaslu Jakarta Barat	2.150.500	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA 32 FH 4003 Panwaslu Jakarta Barat	3.415.500	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Modem & Wifi Merk Bolt Modem ZTE Hydra Panwaslu Jakarta Barat	3.466.320	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH Panwaslu Jakarta Barat	12.100.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Panwaslu Jakarta Barat	7.235.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Projector Merk BenQ MX525 Panwaslu Jakarta Barat	6.578.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Layar / Tripood Screen Panwaslu Jakarta Barat	759.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Dispenser erk Sharp SWD-72EHL - WH Panwaslu Jakarta Barat	6.546.320	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Genset Portable SF 11500DXE Panwaslu Jakarta Barat	14.168.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Alat Pemadam Api Ringan Merk Gunnebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2APanwaslu Jakarta Barat	6.319.940	1	Set	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Laptop / PC Merk Asus X450 J Panwaslu Jakarta Barat	36.048.870	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Desktop / PC i5 Panwaslu Jakarta Barat	22.295.790	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Rumah Dinas Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat	Whiteboard Papan Tulis Merk Sentra Gantung Panwaslu Jakarta Barat	1.368.070	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Panwaslu Jakarta Utara	288.845.000	360	m ²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Meja Pimpinan Merk Ichiko Panwaslu Jakarta Utara	21.100.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Panwaslu Jakarta Utara	5.085.520	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Kursi Pimpinan Merk Ichiko IS HDT Leather Panwaslu Jakarta Utara	27.728.800	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Kursi Staf Merk Savello Kingdom L Panwaslu Jakarta Utara	13.124.320	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Meja Ruang Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM 2400 Panwaslu Jakarta Utara	19.145.500	10	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Panwaslu Jakarta Utara	32.109.000	60	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Panwaslu Jakarta Utara	11.021.340	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Lemari Besi (Brangkas) Merk Ichiban HSC 60 A Panwaslu Jakarta Utara	6.650.820	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Filling Kabinet Merk Lion L44-4 Laci Panwaslu Jakarta Utara	12.078.000	5	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Lemari Arsip Merk Elite Tipe 438 Panwaslu Jakarta Utara	3.486.230	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Telepon / Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 Panwaslu Jakarta Utara	2.150.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA32FH4003 Panwaslu Jakarta Utara	3.415.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Modem & Wifi Merk Bolt Modem Mifi ZTE Hydra (MF 910) White Panwaslu Jakarta Utara	1.733.160	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH - AP9 SHL Putih Panwaslu Jakarta Utara	34.155.000	6	Set	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Panwaslu Jakarta Utara	7.235.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Projector Proyektor BenQ MX 525 Panwaslu Jakarta Utara	6.578.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Layar / Tripod Screen G - Lite Panwaslu Jakarta Utara	759.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Dispenser Merk Sharp SWD-72 EHL - WH Panwaslu Jakarta Utara	6.546.320	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Genset Portable Highlander HL9900 LX Panwaslu Jakarta Utara	14.168.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Alat Pemadam Ringan Gunebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2A Panwaslu Jakarta Utara	12.523.500	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Pemasangan Listrik Panwaslu Jakarta Utara	20.588.700	1	Paket	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Laptop PC Merk Asus X450 J Panwaslu Jakarta Utara	36.048.870	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Desktop PC i5 Panwaslu Jakarta Utara	22.295.790	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Kelurahan Koja - Jalan Deli Nomor 43 Jakarta Utara	Whiteboard Papan Tulis Sentra Gantung Panwaslu Jakarta Utara	1.368.070	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Panwaslu Jakarta Selatan	710.419.000	800	m²	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Meja Pimpinan Merk Ichiko Panwaslu Jakarta Selatan	21.100.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Panwaslu Jakarta Selatan	5.085.520	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Kursi Pimpinan Merk Ichiko IS HDT Leather Panwaslu Jakarta Selatan	27.728.800	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Kursi Staf Merk Savello Kingdom L Panwaslu Jakarta Selatan	13.124.320	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Meja Ruang Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM 2400 Panwaslu Jakarta Selatan	22.952.600	12	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Panwaslu Jakarta Selatan	40.136.250	75	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Panwaslu Jakarta Selatan	11.021.340	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Lemari Besi (Brangkas) Merk Ichiban HSC 60 A Panwaslu Jakarta Selatan	6.650.820	1	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Filling Kabinet Merk Lion L44-4 Laci Panwaslu Jakarta Selatan	12.078.000	5	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Lemari Arsip Merk Elite Tipe 438 Panwaslu Jakarta Selatan	3.486.230	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Telepon / Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 Panwaslu Jakarta Selatan	2.150.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA32FH4003 Panwaslu Jakarta Selatan	3.415.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Modem & Wifi Merk Bolt Modem Mifi ZTE Hydra (MF 910) White Panwaslu Jakarta Selatan	1.733.160	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH - AP9 SHL Putih Panwaslu Jakarta Selatan	6.050.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Panwaslu Jakarta Selatan	7.235.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Projector Proyektor BenQ MX 525 Panwaslu Jakarta Selatan	6.578.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Layar / Tripod Screen G - Lite Panwaslu Jakarta Selatan	759.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Dispenser Merk Sharp SWD-72 EHL - WH Panwaslu Jakarta Selatan	6.546.320	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Genset Portable Highlander HL9900 LX Panwaslu Jakarta Selatan	14.168.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Alat Pemadam Ringan Gunebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2A Panwaslu Jakarta Selatan	12.523.500	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Pemasangan Listrik Panwaslu Jakarta Selatan	23.699.060	1	Paket	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Laptop PC Merk Asus X450 J Panwaslu Jakarta Selatan	36.048.870	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Desktop PC i5 Panwaslu Jakarta Selatan	22.295.790	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Kantor Panwaslu Jakarta Selatan - Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Jakarta Selatan	Whiteboard Papan Tulis Sentra Gantung Panwaslu Jakarta Selatan	1.368.070	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Panwaslu Jakarta Timur	219.046.000	5000	m ²	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Meja Pimpinan Merk Ichiko Panswaslu Jakarta Timur	21.100.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Panswaslu Jakarta Timur	5.085.520	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Pimpinan Merk Ichiko IS HDT Leather Panswaslu Jakarta Timur	27.728.800	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Staf Merk Savello Kingdom L Panswaslu Jakarta Timur	13.124.320	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Meja Ruang Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM 2400 Panswaslu Jakarta Timur	22.974.600	12	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Panswaslu Jakarta Timur	40.136.250	75	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Panswaslu Jakarta Timur	11.021.340	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Lemari Besi (Brangkas) Merk Ichiban HSC 60 A Panswaslu Jakarta Timur	6.650.820	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Filling Kabinet Merk Lion L44-4 Laci Panswaslu Jakarta Timur	12.078.000	5	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Lemari Arsip Merk Elite Tipe 438 Panswaslu Jakarta Timur	3.486.230	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Telepon / Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 Panswaslu Jakarta Timur	2.150.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA32FH4003 Panswaslu Jakarta Timur	3.415.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Modem & Wifi Merk Bolt Modem Mifi ZTE Hydra (MF 910) White Panswaslu Jakarta Timur	1.733.160	2	Unit	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH - AP9 SHL Putih Panswaslu Jakarta Timur	62.617.500	11	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Panswaslu Jakarta Timur	7.235.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Projector Proyektor BenQ MX 525 Panswaslu Jakarta Timur	6.578.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Layar / Tripod Screen G - Lite Panswaslu Jakarta Timur	759.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Dispenser Merk Sharp SWD-72 EHL - WH Panswaslu Jakarta Timur	6.546.320	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Genset Portable Highlander HL9900 LX Panswaslu Jakarta Timur	14.168.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Alat Pemadam Ringan Gunebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2A Panswaslu Jakarta Timur	12.523.500	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Laptop PC Merk Asus X450 J Panswaslu Jakarta Timur	36.048.870	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Desktop PC i5 Panswaslu Jakarta Timur	22.295.790	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks. Gedung Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Lantai 3 - Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 Kota Adm. Jakarta Timur	Whiteboard Papan Tulis Sentra Gantung Panswaslu Jakarta Timur	1.368.070	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Panwaslu Kepulauan Seribu	89.871.000	270	m ²	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Meja Pimpinan Merk Ichiko Kab. Adm. Kepulauan Seribu	21.100.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Meja Staf Merk VIP Meja 1/2 Biro MV-301 A Kab. Adm. Kepulauan Seribu	5.085.520	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Pimpinan Merk Ichiko IS HDT Leather Kab. Adm. Kepulauan Seribu	27.728.800	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Staf Merk Savello Kingdom L Kab. Adm. Kepulauan Seribu	13.124.320	8	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Meja Ruang Rapat Merk Orbitrend Tipe OSM 2400 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	7.658.200	4	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Kursi Ruang Rapat Merk Chairman SC 309 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	16.054.500	30	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Sofa Ruang Tamu Sofa Bed Minimalis Asean 321 W/Hitam + Meja Kaca Kab. Adm. Kepulauan Seribu	11.021.340	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Lemari Besi (Brangkas) Merk Ichiban HSC 60 A Kab. Adm. Kepulauan Seribu	6.650.820	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Filling Kabinet Merk Lion L44-4 Laci Kab. Adm. Kepulauan Seribu	12.078.000	5	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Lemari Arsip Merk Elite Tipe 438 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	3.486.230	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Telepon / Mesin Fax Merk Panasonic KX-FT983 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	2.150.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Televisi Merk Samsung TV LED 32 Inch UA32FH4003 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	3.415.500	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	AC 1 PK Merk Sharp Plasmacluster 1 PK AH - AP9 SHL Putih Kab. Adm. Kepulauan Seribu	17.077.500	3	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Portable Wireless Sound System Merk TOA ZW G810CU Kab. Adm. Kepulauan Seribu	7.235.800	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Projector Proyektor BenQ MX 525 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	6.578.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Layar / Tripod Screen G - Lite Kab. Adm. Kepulauan Seribu	759.000	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Dispenser Merk Sharp SWD-72 EHL - WH Kab. Adm. Kepulauan Seribu	3.273.160	1	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Genset Portable Highlander HL9900 LX Kab. Adm. Kepulauan Seribu	14.168.000	1	Set	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Alat Pemadam Ringan Gunebo Portable Carbon Dioxide Fire CO2 EC-2A Kab. Adm. Kepulauan Seribu	12.523.500	2	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Pemasangan Listrik Kab. Adm. Kepulauan Seribu	20.588.700	1	Paket	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Laptop PC Merk Asus X450 J Kab. Adm. Kepulauan Seribu	36.048.870	3	Buah	PT. Sampoerna Land
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Desktop PC i5 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	22.295.790	3	Buah	PT. Sampoerna Land

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Eks.Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu - Gedung Teknis Kerapu - Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Whiteboard Papan Tulis Sentra Gantung Kab. Adm. Kepulauan Seribu	1.368.070	1	Buah	PT. Sampoerna Land
8	TPST Bantargebang Jalan TPA Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat	Bangunan Fasilitas Pencucian Kendaraan Angkutan Sampah dan Tempat Pengelolaan Air Pencucian Kendaraan Angkutan Sampah	2.363.210.947	400	m ²	PT. Alfindo Mercure Estate
	TPST Bantargebang Jalan TPA Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat	Bangunan Masjid	2.252.113.593	400	m ²	PT. Alfindo Mercure Estate
	TOTAL PENERIMAAN		583.567.717.492			

DATA PENGELUARAN ASET KLB/KDB
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2018

NO	SKPD PENGGUNA	LOKASI	JENIS BARANG	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/ UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
1	DINAS DPE	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Stabilisator Camera Video	Stabilisator Camera Video	15.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	DINAS DPE	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Air Conditioner	Air Conditioner	6.500.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	DINAS DPE	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Alat Angkut Gondola	Alat Angkut Gondola	125.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	DINAS DPE	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Micro Meter Lampu	Micro Meter Lampu	30.000.000.000	1	M ²	PT. Mitra Panca Persada
2	Dinas Kehutanan	Lapangan Banteng Segen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat - Revitalisasi Lapangan Banteng	Konstruksi hasil Penataan Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat	Revitalisasi Lapangan Banteng (Kapitalisasi)	70.991.043.000	1	M ²	PT. Sinar Mas Teladan
3	Dinas Bina Marga	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Ramp 1 - Simpang Susun Semanggi - Cawang ke Sudirman	Ramp 1 - Simpang Susun Semanggi - Cawang ke Sudirman	171.299.363.255	7434	M ²	PT. Mitra Panca Persada
	Dinas Bina Marga	Kelurahan senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Ramp 2 - Grogol Ke Blok M	Ramp 2 - Grogol Ke Blok M	165.077.836.745	7164	M ²	PT. Mitra Panca Persada
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Pulogadung	Gelanggang Remaja Pulogadung	3.822.497.589	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Cempaka Putih	GOR Cempaka Putih	3.897.238.702	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Tanjung Priok	Gelanggang Remaja Tanjung Priok	4.462.590.891	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan

NO	SKPD PENGGUNA	LOKASI	JENIS BARANG	PERUNTUKAN	HARGA	LUAS/ UKURAN	SATUAN	PIHAK KETIGA
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	3.577.198.117	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Timur	Gelanggang Remaja Jakarta Timur	3.875.910.818	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Sumantri	GOR Sumantri	4.935.638.186	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	2.375.012.217	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Gelanggang Remaja Jakarta Barat	Gelanggang Remaja Jakarta Barat	2.807.463.233	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Bulungan	GOR Bulungan	3.071.860.235	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	GOR Ragunan	GOR Ragunan	3.006.694.679	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Hasil Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Venue Asian Games XVIII	Konstruksi Track BMX Pulomas	Konstruksi Track BMX Pulomas	27.056.578.000	1	Set	PT. Sinar Mas Teladan
5	Museum Kesenjaraan Jakarta	Jalan Taman Fatahillah Nomor 1 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat	Pekerjaan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta (Pekerjaan di Bangunan Utama)	Pekerjaan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta dan Pembangunan Pintu Masuk Baru dari Sisi Jalan Pintu Besar Utara	3.913.258.626	1	Set	Kewajiban PT. Coca Cola Indonesia Nomor 1117/- 1.824.24 Tanggal 14-02-2018
	Museum Kesenjaraan Jakarta	Jalan Taman Fatahillah Nomor 1 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat	Pekerjaan di Pintu Masuk Alternatif di Bangunan Etnografi Museum Sejarah Jakarta	Pekerjaan Pintu Masuk Alternatif di Bangunan Etnografi	2.114.720.001	1	Set	Kewajiban PT. Singa Propertindo Haryono Nomor 4215/-1.711.513 Tanggal 28 - 11 - 2018
6	Dinas UMKM	Jalan K.H. Mas Mansyur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Perbaikan Interior Jakarta Creative Hub (Co-Working Space) Beserta Fasilitas Pendukungnya pada Gedung Jakarta UKM Center Promosi Waduk Melati	Perbaikan Interior Jakarta Creative Hub (Co - Working Space)	13.717.453.448	1	Set	Kewajiban PT. Singa Propertindo Haryono Nomor 4215/-1.711.513 Tanggal 28 - 11 - 2018
TOTAL PENGELUARAN					520.148.857.742			

**RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m ²)	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian	Dukungan Pembangunan	Pemberi CSR	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nilai BAST (Rp)	Status Kepemilikan
1	M.H. Thamrin	Jl. Kenari II	Kenari	Senen	Jakarta Pusat	1.300	5	12-09-2018	CSR	PT PENDAWA PROPERTI INDONESIA	12 Sept 2018	3686/-077.923	1.311.127.368	Dinas Pariwisata
2	Jaga Utara	Pulau Seбира RT 01 RW 03	Pulau Harapan	Kep. Seribu Utara	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	1.285	5		APBD		31-Des-18	1112/-1.795.222	1.695.542.677	Lahan Pemda
3	Arung Palakka	Pulau Kelapa Dua RT 002-003 RW 05	Pulau Kelapa	Kep. Seribu Utara	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	1.412	5		APBD		31-Des-18	1112/-1.795.222	1.673.997.276	Lahan Pemda
4	RPTRA Bunga Rampai	Jl. Bunga Rampai III No. 4	Malaka Jaya	Duren Sawit	Jakarta Timur	1.800	5		APBD		31-Des-18	1513/-1.796.32	2.517.844.427	Lahan Pemda
5	RPTRA Dahlia KDW	Jalan Dahlia RW 05	Kelapa Dua Wetan	Ciracas	Jakarta Timur	1.500	5		APBD		31-Des-18	1513/-1.796.32	2.166.376.868	Lahan Pemda
6	RPTRA Rusunami Beriman	Rusunami Bidara Cina	Bidara Cina	Jatinegara	Jakarta Timur	1.500	5		APBD		31-Des-18	1513/-1.796.32	3.386.708.666	Lahan Pemda
7	RPTRA Puspa Hati UTAKASE	Jalan Pandan RW 09	Utan Kayu Selatan	Matraman	Jakarta Timur	816	5		APBD		31-Des-18	1513/-1.796.32	1.936.162.257	Lahan Pemda
8	RPTRA Garuda	Jl. Raya Cilangkap RW 01	Cilangkap	Ciracas	Jakarta Timur	4.000	5		APBD		31-Des-18	1513/-1.796.32	2.394.935.954	Lahan Pemda
9	RPTRA Gabus Pucung	Rumah Susun Marunda Blok A, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	1.571	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.653.767.138	Lahan Pemda
10	RPTRA Sirih Kuning	Rumah Susun Marunda Blok B, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	1.446	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.541.205.507	Lahan Pemda
11	RPTRA Al-Alam	Rumah Susun Marunda Blok C, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	1.491	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.619.992.066	Lahan Pemda
12	RPTRA Sipitung	Rumah Susun Marunda Blok D, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	1.357	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.655.564.215	Lahan Pemda
13	RPTRA Pondok Gading	RW.016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	569	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.311.451.676	Lahan Pemda
14	RPTRA Kita Bersaudara	Jl. Janur Elok VII, RW. 011 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1.562	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.473.727.725	Lahan Pemda
15	RPTRA Dukuh Manis	Jl. Pure Dalem, RW. 015 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing	Semper Barat	Cilincing	Jakarta Utara	1.501	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.630.636.580	Lahan Pemda
16	RPTRA Kapuas Dua	RT. 016 RW. 01 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing	Semper Barat	Cilincing	Jakarta Utara	1.409	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.648.633.685	Lahan Pemda
17	RPTRA Mangrove	RW. 04 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	1.397	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.640.205.068	Lahan Pemda
18	RPTRA Pulo Besar	Jl. Danau Sunter 6, RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	1.660	5	31-12-2018	APBD		31-Des-18	744/-1.795.222	1.632.431.340	Lahan Pemda

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	499	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan STK	149.700.000
2	Tanah Ruang Terbuka Hijau	3533	M ²	12/12/2018	Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Kamal MuaraPenjaringan Jakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		46.370.625.000
3	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	11235	M2	02/05/2014	Pantai Indah Kapuk (PIK)	26/09/2012	24 Tahun 2012 / 080/MP/PIK/IX/2012	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sarana Olahraga (SRO) Jalan Marvar	51.737.175.000
4	HUTAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS	6728	M2	09/08/2017	Jl. Letjen S. Parman/ Jl. Tanjung Duren			1 - MILIK PEMDA DKI		204.161.160.000
5	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	34617.62	M2	09/08/2017	Jl. S. Parman / Jl. Tanjung Duren Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.050.471.678.900
6	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	789	M2	10/07/2013	Areal Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura	07/05/1995	1248/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Rencana Jalan	1.716.864.000
7	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	69.05	M2	10/09/2015	Jalan. Sultan Hasanudin Nomor 1	10/09/2015	Hibah No. B-333/C/Cpl/10/2015 dan No. 1 TAHUN	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor Pemerintahan	1.246.370.867
8	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	178	M2	11/07/2013	Areal Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura	08/05/1995	1248/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	387.328.000
9	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	13	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		99.099.000
10	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	26	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		198.198.000
11	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	33	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		251.559.000
12	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	47	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		358.281.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
13	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	50	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		381.150.000
14	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	81	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		617.463.000
15	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	82	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		625.086.000
16	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	103	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		785.169.000
17	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	106	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		808.038.000
18	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	141	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.074.843.000
19	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	247	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.882.881.000
20	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	503	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		3.834.369.000
21	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	573	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		4.367.979.000
22	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	750	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		5.717.250.000
23	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2454	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		18.706.842.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
24	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8437	M2	11/08/2017	Jalan Pusdiklat Depnaker Kelurahan Pinang Ranti/Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		64.315.251.000
25	KUBURAN	750	M2	11/09/2013	Jalan Limo	07/10/1993	3290/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SUK (TK)	1.881.000.000
26	TANAH KOSONG	273	M2	12/04/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.900.899.000
27	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	29	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		262.827.000
28	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	32	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		290.016.000
29	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	44	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		398.772.000
30	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	56	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		507.528.000
31	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	70	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		634.410.000
32	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	78	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		706.914.000
33	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	128	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		720.000.000
34	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	104	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		942.552.000
35	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	256	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.320.128.000
36	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	282	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.555.766.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
37	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	300	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.718.900.000
38	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	317	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.872.971.000
39	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	329	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.981.727.000
40	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	474	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		4.295.862.000
41	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	486	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		4.404.618.000
42	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		4.531.500.000
43	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	563	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		5.102.469.000
44	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	662	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		5.999.706.000
45	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	679	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		6.153.777.000
46	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	731	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		6.625.053.000
47	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	794	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		7.196.022.000
48	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	832	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		7.540.416.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
49	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	883	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		8.002.629.000
50	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	988	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		8.954.244.000
51	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	988	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		8.954.244.000
52	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1046	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		9.479.898.000
53	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1147	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		10.395.261.000
54	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1309	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		11.863.467.000
55	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1693	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		15.343.659.000
56	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1764	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		15.987.132.000
57	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1911	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		17.319.393.000
58	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2161	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		19.585.143.000
59	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2653	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi KRT Rajiman Kel. Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		24.044.139.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
60	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	4424	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		40.094.712.000
61	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	9	M2	13/12/2017	Jalan Kemang Raya Nomor 19 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		209.655.000
62	Tanah Jalur Hijau	212	M ²	13-08-2018	Jalan RA. Kartini/Jalan Kaimun Jaya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak BaratCilandakJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		5.292.156.000
63	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	139	M2	14/03/2017	Pulomas Selatan Kav. II/22 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.824.375.000
64	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	149	M ²	14-11-2017	Jalan MT. Haryono Kav. 5,6,7 Kebon BaruTebetJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		4.521.405.000
65	Sebagian Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	16487	M ²	14-11-2017	Jalan Taman RasunaKaret Kuningan SetiabudiJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		661.540.875.000
66	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	193	M ²	14-11-2017	Jalan Letjen, MT. Haryono Kav. 22 Tebet TimurTebetJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		5.569.015.000
67	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	594	M2	15/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.224.530.000
68	TANAH KOSONG	67	M2	15/08/2017	Jl. Jendral Sudirman Kav no 767778 Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		4.954.181.000
69	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	40	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		149.800.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
70	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/PEKREASIAN	182	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		681.590.000
71	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TEMPAT IPADAN	200	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		749.000.000
72	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/PEKREASIAN	210	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		786.450.000
73	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/PEKREASIAN	301	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.127.245.000
74	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	732	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.741.340.000
75	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2705	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		5.886.080.000
76	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/PEKREASIAN	1857	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		6.954.465.000
77	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	880	M2	16/06/2017	Jalan Matraman Raya Nomor 129 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Kota Adm. Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		18.264.400.000
78	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	16121	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		112.250.523.000
79	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	40133	M2	16/12/2013	Perumahan Kalideres Permai	16/11/1983	7386/XI/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Marga Jalan (Mji)	87.329.408.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
80	LAIN-LAIN	3932	M2	17/12/2014	Tugu Permai	17/03/1976	606/A/BKD/1976	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Fasos Fasum Balai Warga Mesjid Sekolah Tam	10.380.480.000
81	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	438	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		3.887.250.000
82	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	439	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		3.896.125.000
83	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	475	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		4.215.625.000
84	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	583	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		5.174.125.000
85	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	599	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru	14/02/2018		1 - MILIK PEMDA DKI		5.316.125.000
86	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	731	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		6.487.625.000
87	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	731	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		6.487.625.000
88	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	1197	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		10.623.375.000
89	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TAMAN WISATA/REKREASI	1922	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		17.057.750.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
90	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	3512	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru	20/12/2016		1 - MILIK PEMDA DKI		31.169.000.000
91	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	150154	M2	20/12/2016	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru			1 - MILIK PEMDA DKI		1.332.616.750.000
92	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2060	M2	21/07/2013	Apartemen Sunter Park View Jl. Laksamana Yos Sudarso Kavling	18/11/2009	2372/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Marga Jalan (Mji)	23.288.300.000
93	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	63	M2	21/11/2016	Jalan Jembatan Besi Pertokoan Season City	22/11/2016		1 - MILIK PEMDA DKI		264.600.000
94	TANAH BANGUNAN TANAMAN/ISATA/PEKREASIAN PENGAIRAN	411	M2	21/11/2016	Jalan Jembatan Besi Pertokoan Season City			1 - MILIK PEMDA DKI		1.726.200.000
95	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	3675	M2	21/11/2016	Jalan Jembatan Besi Pertokoan Season City			1 - MILIK PEMDA DKI		15.435.000.000
96	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	6170	M2	21/11/2016	Jalan Letjen S. Parman / Tanjung Duren Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		106.401.650.000
97	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	442	M2	21/12/2016	Taman Semanan Indah Blok NG Kel. Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		4.263.090.000
98	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	569	M2	21/12/2016	Taman Semanan Indah Blok NG Kel. Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		5.049.875.000
99	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2059	M2	21/12/2016	Taman Semanan Indah Blok NG Kel. Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		25.578.957.000
100	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	3084	M2	21/12/2016	Taman Semanan Indah Blok NG Kel. Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		29.745.180.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
101	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	798	M2	22/07/2013	Apartemen Sunter Park View Jl. Laksamana Yos Sudarso Kavling	19/11/2009	2372/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	9.021.390.000
102	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2655	M2	22/07/2013	Jl. Bandengan No. 80 RT 13 RW 16	06/12/1996	1600/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Rencana Jalan	9.942.975.000
103	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	143	M2	22/09/2016	Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20	12/12/2008	2820/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	3.717.285.000
104	Lahan Marga Jalan	13201	M ²	22-11-2017	Komplek Perumahan Puri Gardenia Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta BaratPegadunganKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		100.631.223.000
105	Lahan Penyempurn Hijau Umum / Taman	8743	M ²	22-11-2017	Komplek Perumahan Puri Gardenia Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta BaratPegadunganKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		66.647.889.000
106	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1782	M2	23/11/2016	JL. Pilar Komp. Perumahan Delta Kedoya Blok U V-W Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		10.023.750.000
107	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	2785	M2	23/11/2016	JL. Pilar Komp. Perumahan Delta Kedoya Blok U V-W Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		15.665.625.000
108	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1520	M2	23/12/2016	Sisi Anak Kaliangke Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		14.660.400.000
109	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13245	M2	23/12/2016	Sisi Anak Kaliangke Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		127.748.025.000
110	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13876	M2	23/12/2016	Sisi Anak Kaliangke Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		239.291.620.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
111	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	60	M2	24/10/2016	Jalan Bangka Raya	09/02/2016	94/-1.711.511	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Prasarana Jalan	906.300.000
112	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	364	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok E6	572.572.000
113	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	436	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sasana Krida Blok C1	685.828.000
114	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	480	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Hijau Umum	755.040.000
115	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	484	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Hijau Umum Blok C7	761.332.000
116	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	485	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Hijau Umum Blok B2	762.905.000
117	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	488	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok C7	767.624.000
118	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	671	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Hijau Umum Blok C1	1.055.483.000
119	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	675	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Hijau Umum Blok C4	1.061.775.000
120	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	816	M2	24/12/2013	Perumahan Bojong Indah	21/05/1977	1144/A/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok F6	1.283.568.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
132	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN TANAMAN/SATA/PEKREASI	1474	M2	28/12/2016	Casa Goya Park Residence Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		22.264.770.000
133	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	6548	M2	28/12/2016	Casa Goya Park Residence Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		98.907.540.000
134	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	20678	M2	28/12/2016	Casa Goya Park Residence Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		312.341.190.000
135	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TANAH JALAN	2413	M2	29/12/2016	Jalan Tanjung Duren Raya			1 - MILIK PEMDA DKI		56.210.835.000
136	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN TANAH JALAN	948	M2	30/11/2016	Jl. Pos Pengumben Kel. Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		9.143.460.000
137	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH LARANGAN/SALURAN	4943	M2	30/11/2016	Jl. Pos Pengumben Kel. Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		47.675.235.000
138	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	30270	M2	30/11/2016	Jl. Pos Pengumben Kel. Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		291.954.150.000
139	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	103	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	700.915.000
140	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	141	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	959.505.000
141	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	218	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	1.483.490.000
142	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA TANAH BANGUNAN	248	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	1.687.640.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
143	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	338	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2.300.090.000
144	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	339	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2.306.895.000
145	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1065	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	7.247.325.000
146	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1634	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	11.119.370.000
147	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1925	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	13.099.625.000
148	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2431	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	16.542.955.000
149	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2697	M2	31/05/2016	Komplek Permata Buana	06/10/2011	1976/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	18.353.085.000
150	Lahan Penyempurna tegangan Tinggi	710	M2	09-11-2018	Jalan jendral gatot Subroto Kav Nomor 13 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Penyempurna Tegangan Tinggi	57.176.300.000
151	Tanah Marga Jalan	1.740	M2	09-11-2018	Jalan jendral gatot Subroto Kav Nomor 13 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Marga Jalan	140.122.200.000
152	Lahan penyempurna Hijau Umum	2.152	M2	21-12-2018	Jalan Baung Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Penyempurnaan Hijau Umum	16.043.160.000
153	Tanah Marga Jalan	2.864	M2	21-12-2018	Jalan Baung Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Marga Jalan	21.351.120.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
154	Penyempurna Hijau	9.946	M2	29-12-2017	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Penyempurna Hijau Umum	37.247.770.000
155	Normalisasi Kali	3.266	M2	29-12-2017	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Rencana Kali	12.231.170.000
156	Marga Jalan	1.134	M2	29-12-2017	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Marga Jalan	4.246.830.000
157	Karya Industri	614	M2	29-12-2017	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Karya Industri	2.299.430.000
158	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	1968	M2	06/08/1995	Perumahan Taman Aries	09/05/1977	1066/A/K/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Masjid	5.756.400.000
159	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	144	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok H.5	91.428.000
160	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1124.5	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok L.4	901.849.000
161	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2001	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SUKA/SPD Blok L.4	1.604.802.000
162	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2131	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok K.5	1.709.062.000
163	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	3751.5	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok I.2	3.008.703.000
164	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	38884.9	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Tahap III	91.457.284.800

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
165	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	41190	M2	01/05/1997	Perumahan Permata Buana	12/11/1990	4510/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Tahap II	96.878.880.000
166	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	752	M2	01/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	09/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah STI	225.600.000
167	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	3295	M2	01/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	09/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan SUKA/Lapangan Olahraga	988.500.000
168	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	5025	M2	01/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	09/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan SUKA/Lapangan Olahraga	1.507.500.000
169	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1382	M2	01/08/2002	Jl Setiabudi Tengah	08/05/1996	763/1996	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah untuk jalan	8.561.490.000
170	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	55	M2	01/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	24/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Gardu Listrik Blok E5	33.770.000
171	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	352	M2	01/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	24/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Gardu Listrik Blok F14 Ext.	216.128.000
172	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	541	M2	01/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	06/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Gardu Listrik Blok B4	558.312.000
173	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	375	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T13	816.000.000
174	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	385	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T2	837.760.000
175	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	390	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T1	848.640.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
176	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	410	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T14	892.160.000
177	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	430	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T12	935.680.000
178	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	435	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T4	946.560.000
179	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	435	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T7	946.560.000
180	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	440	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T8	957.440.000
181	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	440	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T9	957.440.000
182	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	445	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T6	968.320.000
183	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	450	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T3	979.200.000
184	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1160	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T5	2.524.160.000
185	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1160	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok T10	2.524.160.000
186	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2115	M2	01/09/2003	Kelapa Gading	22/05/1992	1839/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPD Blok F2	4.602.240.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
187	TANAH UNTUK BANGUNAN JALAN	10532	M2	01/10/1992	Komplek Perumahan Puri Indah	31/05/1977	1230/A/K/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Blok I	48.499.860.000
188	TANAH	3715	M2	01/11/2004	Kelurahan Cipete Utara	06/01/1987	20033/1/1987	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah	5.843.695.000
189	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	44945	M2	02/04/1995	Cakung Timur	19/09/1990	3624/1.711.5/1990	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Jalan	13.483.500.000
190	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	1487	M2	02/05/2006	Perumahan Malaka Asri	19/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SSI (Masjid) Blok A	743.500.000
191	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	2730	M2	02/05/2006	Perumahan Malaka Asri	19/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SOR (Lap. Tenis) Blok B	1.365.000.000
192	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	2730	M2	02/05/2006	Perumahan Malaka Asri	19/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SOR (Lap. Tenis) Blok B	1.365.000.000
193	TANAH	902	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan KPM	270.600.000
194	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	1102	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan STK	354.600.000
195	TANAH	1264	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan KPM	379.200.000
196	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	637	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C.4	1.282.281.000
197	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	687	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C.11	1.382.931.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
198	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	718	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok F.3	1.445.334.000
199	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1009	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok F.7	2.031.117.000
200	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1029	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A.9	2.071.377.000
201	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1186	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B.6	2.387.418.000
202	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1272	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D.4	2.560.536.000
203	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1683	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok G.4	3.387.879.000
204	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2368	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A.11	4.766.784.000
205	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	124443	M2	02/07/1996	Perumahan Kosambi Baru	10/03/1983	1556/III/1983	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Saluran	250.503.759.000
206	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1206	M2	02/07/2007	Perumahan Carina Sayang	24/09/1980	1452/IX/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sarana Olah Raga	1.248.210.000
207	LAIN-LAIN	302	M2	02/09/1993	Jl. Cipinang Kebembem	09/04/1975	636/A/k/BKD/1975	1 - MILIK PEMDA DKI	Sarana (tanah/lahan)	67.950.000
208	LAIN-LAIN	2329	M2	02/09/1993	Pisangan Timur	09/04/1975	634/A/k/BKD/75	1 - MILIK PEMDA DKI	Sarana (tanah/lahan)	1.164.500.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
209	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	3692	M2	02/09/1993	Jl. Kampung Duku	25/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan Lapangan Basket (Barat)	1.476.800.000
210	LAIN-LAIN	6559	M2	02/09/1993	Jalan Kaplongan/Sindang	17/08/1981	6352/VIII/1981	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah	1.967.700.000
211	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	4980	M2	02/09/1993	Jl. Kampung Duku	25/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan Lapangan Tennis (Barat)	1.992.000.000
212	LAIN-LAIN	10034	M2	02/09/1993	Jl. Cipinang Kebembem	09/04/1975	636/A/k/BKD/1975	1 - MILIK PEMDA DKI	Prasarana Tanah	2.257.650.000
213	LAIN-LAIN	5048	M2	02/09/1993	Pisangan Timur	09/04/1975	634/A/k/BKD/75	1 - MILIK PEMDA DKI	Prasarana Tanah	2.524.000.000
214	LAIN-LAIN	44244	M2	02/09/1993	Jl. Kampung Duku	25/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah lahan	17.697.600.000
215	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	135	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok C2/4 ext.	82.890.000
216	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	313	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok D3 ext.	192.182.000
217	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	502	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok F8 ext.	308.228.000
218	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	640	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok E2 ext.	392.960.000
219	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG	419	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Tempat Pembuangan Sampah Blok C1	432.408.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
220	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	800	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah STI Blok F12	491.200.000
221	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	482	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU/Taman Blok A	497.424.000
222	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	495	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU/Taman Blok A	510.840.000
223	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	514	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU/Taman Blok B	530.448.000
224	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	572	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor Pemadam Kebakaran Blok C1	590.304.000
225	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1093	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok F14	671.102.000
226	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	712	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU/Taman Blok C	734.784.000
227	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1335	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah PHU Blok C6 ext.	819.690.000
228	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1725	M2	02/09/2003	Perumahan Kosambi Baru	25/10/1995	3154/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok F5	1.054.150.000
229	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1230	M2	02/09/2003	Perumahan Kebon Jeruk Baru	07/05/1977	1025/A/K/BKD/77	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor Pemerintahan Blok C1	1.269.360.000
230	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	335	M2	02/12/1997	Kompleks Perumahan Pratama Hills	27/09/1991	3847/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman	284.750.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
231	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	727	M2	02/12/1997	Kompleks Perumahan Pratama Hills	27/09/1991	3847/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman	617.950.000
232	TANAH	1116	M2	02/12/1997	Kompleks Perumahan Pratama Hills	27/09/1991	3847/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Fasos	948.600.000
233	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1310	M2	02/12/1997	Kompleks Perumahan Pratama Hills	27/09/1991	3847/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman	1.113.500.000
234	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	9811	M2	02/12/1997	Kompleks Perumahan Pratama Hills	27/09/1991	3847/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Aspal	23.075.472.000
235	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	156	M2	03/04/1995	Cakung Timur	20/09/1990	3624/1.711.5 /1990	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHT Blok E	46.800.000
236	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	495	M2	03/04/1995	Cakung Timur	20/09/1990	3624/1.711.5 /1990	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHT Blok D	148.500.000
237	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	3106	M2	03/04/1995	Cakung Timur	20/09/1990	3624/1.711.5 /1990	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Jalur Hijau	931.800.000
238	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	112	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D	56.000.000
239	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	240	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C	120.000.000
240	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	427	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok G	213.500.000
241	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	495	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor RW Blok B	247.500.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
242	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	495	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok B	247.500.000
243	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	592	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E	296.000.000
244	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1293	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok N	646.500.000
245	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1348	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D	647.000.000
246	KUBURAN	1376	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SUK (KKT/Puskesmas) Blok E	688.000.000
247	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1910	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SD Blok D	955.000.000
248	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	8970	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Jalur Hijau	4.485.000.000
249	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	51512	M2	03/05/2006	Perumahan Malaka Asri	20/05/1980	2020/V/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Jalan	25.756.000.000
250	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	595	M2	03/07/2007	Perumahan Persada Sayang	11/02/1982	01005/II/82	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Kanak-Kanak Blok B6	615.825.000
251	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	904	M2	03/07/2007	Perumahan Carina Sayang	25/09/1980	1452/IX/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Balai Warga	935.640.000
252	TANAH	2215	M2	03/07/2007	Perumahan Persada Sayang	11/02/1982	01005/II/82	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Blok C5	2.292.525.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
253	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	705	M2	03/08/1998	Meruya Selatan	03/12/1980	0401/XII/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPU	808.635.000
254	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1696	M2	03/08/1998	Meruya Selatan	03/12/1980	0401/XII/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPD	1.945.312.000
255	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	756	M2	03/08/2006	Sunter	03/11/1994	3570/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Perumahan INKOPOL	1.521.428.000
256	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2160	M2	03/08/2006	Sunter	03/11/1994	3570/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPD Perumahan INKOPOL	4.348.080.000
257	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2990	M2	03/08/2006	Sunter	23/10/1991	4222/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E	6.018.870.000
258	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	3360	M2	03/08/2006	Sunter	03/11/1994	3570/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPD Areal Perumahan INKOPOL	6.763.680.000
259	KUBURAN	3836	M2	03/08/2006	Sunter	23/10/1991	4222/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SUK Blok C	7.721.868.000
260	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	03/09/1993	Jl. Kampung Duku	26/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan Taman (Boulevard)	200.000.000
261	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2220	M2	03/09/1993	Jl. Kampung Duku	26/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan PHU (Utara)	888.000.000
262	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2660	M2	03/09/1993	Jl. Kampung Duku	26/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan Sekolah (Barat)	1.064.000.000
263	TANAH KOSONG	5400	M2	03/09/1993	Jl. Kampung Duku	26/07/1989	3233/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah/Lahan Kosong (Barat Laut)	2.160.000.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
264	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	2440	M2	03/09/1996	Semanan	05/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan STI Blok D7	961.360.000
265	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2022	M2	03/09/2002	Komplek ITC Fatmawati/Duta Mas Jl. RS Fatmawati	27/08/1996	2372/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman	10.302.090.000
266	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7814	M2	03/09/2002	Komplek ITC Fatmawati/Duta Mas Jl. RS Fatmawati	27/08/1996	2372/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	39.812.330.000
267	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	45186	M2	03/10/2012	Jalan Griya Utama	20/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Marga Jalan (Mjl)	279.927.270.000
268	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	210	M2	04/02/2004	Jl. Perintis Kemerdekaan	10/12/1998	2412/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Rencana Jalan	391.020.000
269	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	209	M2	04/03/2005	Jl. Pulo Raya Mas Selatan	12/02/2004	416/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	524.172.000
270	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	320	M2	04/03/2005	Jl. Pulo Raya Mas Selatan	12/02/2004	416/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	802.560.000
271	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	334	M2	04/03/2005	Jl. Pulo Raya Mas Selatan	12/02/2004	416/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	834.672.000
272	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	67228.71	M2	04/06/2007	Perumahan Inti Sentosa	02/12/1993	4045/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	251.771.518.950
273	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	2050	M2	04/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	05/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah Gereja	1.964.300.000
274	TANAH	6250	M2	04/07/1995	Kembangan	31/05/1977	1230/A/K/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah	28.781.250.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
275	KUBURAN	4720	M2	04/08/2006	Papanggo	02/01/1992	11/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SUK/PHT	9.501.360.000
276	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	667	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHU Blok B5	262.798.000
277	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	686	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHU Blok B7	270.284.000
278	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	737	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHU Blok B2	290.378.000
279	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	846	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHU Blok I	333.324.000
280	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1143	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Sekolah TK Blok A4	450.342.000
281	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1233	M2	04/09/1996	Semanan	06/12/1986	14373/XII/1986	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan PHU Blok A4	485.802.000
282	TANAH	0	M2	04/10/2007	Pondok Kelapa	22/07/1993	2287/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Pematangan Tanah Pengganti	106.206.494
283	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	4027	M2	04/10/2007	Pondok Kelapa	22/07/1993	2287/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah SMA	684.590.000
284	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	439	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Suka Pelayanan Umum (Spu)	2.719.605.000
285	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Suka Sarana Ibadah (Ssi)	3.097.500.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
286	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	576	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	3.568.320.000
287	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	633	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	3.921.435.000
288	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	781	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	4.838.295.000
289	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	792	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Peruntukan Suka Sarana Budaya (Ssb)	4.906.440.000
290	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	1719	M2	04/10/2012	Jalan Griya Utama	21/11/2007	3330/-1.711.534	1 - MILIK PEMDA DKI	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	10.649.205.000
291	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	52180	M2	05/06/2007	Jl Manunggal Juang Blok 05 RT 07/07	01/09/1980	3783/IX/1980	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah saluran dan tanah jalan	41.848.360.000
292	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	708	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman TK	253.500.000
293	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	285	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah kantor RW	261.060.000
294	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	311	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C	284.876.000
295	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	538	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah STK Blok C4	330.332.000
296	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	538	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok L	492.808.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
297	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	865	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah STK Blok A5	531.110.000
298	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	804	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah STK Blok B6	531.456.000
299	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1022	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah STK Blok E3	627.508.000
300	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1040	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah STK Blok D6	638.560.000
301	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	261	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A13	725.319.000
302	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	341	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A5	947.639.000
303	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	484	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok F1	1.345.036.000
304	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1546	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A	1.416.136.000
305	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	554	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B6	1.539.566.000
306	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2660	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Tanah SD Blok A12	1.633.240.000
307	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	619	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D6	1.720.201.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
308	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	859	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C4	2.387.161.000
309	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1011	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E3	2.809.569.000
310	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1489	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D14	4.137.931.000
311	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1653	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E7	4.593.687.000
312	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1820	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok DEF	5.057.780.000
313	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1925.5	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok ABF	5.350.964.500
314	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1965	M2	05/07/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	06/04/1973	935/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A12	5.460.735.000
315	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8083.9	M2	05/07/1995	Perumahan Cengkareng Elok	11/08/1984	04389/VIII/1984	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	7.404.852.400
316	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1155	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok C	1.324.785.000
317	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1230	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok N	1.410.810.000
318	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1558	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok G	1.787.026.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
319	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1620	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok N	1.858.140.000
320	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1650	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok N	1.892.550.000
321	KUBURAN	2220	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan SUK Blok N	2.546.340.000
322	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2700	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Sekolah Blok N	3.096.900.000
323	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2860	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Taman/PHU/OL Blok C	3.280.420.000
324	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	4820	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Masjid Blok B	5.528.540.000
325	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	52106	M2	05/09/2000	Pondok Kelapa	15/07/1973	1745/A/K/BKD/1973	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Jalur Hijau	59.765.582.000
326	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat	06/07/1992	2357/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah di Pulau Melintang berikut dermaganya	0
327	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat	06/07/1992	2357/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah di Pulau Bira Besar berikut dermaganya	0
328	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	134290	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat	06/07/1992	2357/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah di Pulau Panjang Besar	0
329	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat	06/07/1992	2357/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah di Pulau Putri Timur berikut dermaganya	0

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
330	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	500	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat	06/07/1992	2357/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah di Pulau Petondan Barat berikut dermaganya	0
331	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	112701	M2	05/7/1995	Perumahan Taman Kedoya Baru	-	-	1 - MILIK PEMDA DKI	Jalan	313.196.079.000
332	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	380	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok F Citra Garden II	190.000.000
333	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	408	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C Citra Garden II	204.000.000
334	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	480	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Bangunan Taman Blok J1 Citra Garden II	240.000.000
335	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	512	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Bangunan Taman Blok J8 Citra Garden II	256.000.000
336	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	601.07	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok I1 Citra Garden II	300.535.000
337	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	606	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok H2 Citra Garden II	302.910.000
338	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	609.52	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok G10 Citra Garden II	304.760.000
339	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	745	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok G5 Citra Garden II	372.500.000
340	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	750	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B Citra Garden II	375.000.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
341	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	817	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A Citra Garden II	408.500.000
342	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	840	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D Citra Garden II	420.000.000
343	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	900	M2	06/02/1995	Perumahan Citra Garden II	21/09/1989	4106/-1.711	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E Citra Garden II	450.000.000
344	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1020	M2	06/02/2002	Jalan Raya Cakung Cilincing	05/11/1996	3107/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Rencana Jalan	818.040.000
345	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	3895	M2	06/02/2002	Jl. Pulomas Jaya	06/01/1994	54/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalur Hijau Jalan	7.252.490.000
346	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	5720	M2	06/02/2002	Jl. Pulomas Jaya	06/01/1994	54/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	10.650.640.000
347	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	6582	M2	06/02/2002	Jl. Pulomas Jaya	06/01/1994	54/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Normalisasi Kali	12.255.684.000
348	TANAH UNTUK BANGUNAN JALAN	6250	M2	06/04/1988	Perum Kalibata Indah	07/04/1981	3108/IV/1981	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah	450.000.000
349	TANAH	449	M2	06/04/2005	Jl. Kali Baru Timur Gang VII no.6 RT 13/07	05/11/2003	3077/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah	515.003.000
350	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	360	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A.4	288.720.000
351	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	390	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Saluran Micro	312.780.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
352	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	527	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok B.3	422.654.000
353	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	552	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok C.8	442.704.000
354	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	602	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E.5	482.802.000
355	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	672	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalur Tegangan Tinggi	536.944.000
356	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	760	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok D.7	604.520.000
357	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	855	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok E.0	685.710.000
358	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	864	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C.8	692.928.000
359	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	905	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok D.7	725.810.000
360	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1095	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B.5	878.190.000
361	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1140	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok B.12	914.280.000
362	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1540	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok A.11	1.235.080.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
363	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1540	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B.11	1.235.080.000
364	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1988	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah Dasar Blok B.3	1.594.376.000
365	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	4680	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Pemerintahan Blok E.1	3.753.360.000
366	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	11458	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sarana Olahraga Blok B.10	9.189.316.000
367	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	55000	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kompleks Kantor Walikotamadya	47.547.864.000
368	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	89352	M2	06/05/2005	Jl Sentra Primer Timur	27/04/1993	1244/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Trace Jalan	70.848.304.000
369	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2140	M2	06/06/2007	Jalan Lingkar Luar / TB. Simatupang Tanjung Barat	01/05/1996	1138/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah SPD	4.307.820.000
370	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	2340	M2	06/07/2000	Perumahan Sunter Agung	21/06/1978	0126/A/K/BKD/1978	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor RW dan Pelayanan Masyarakat	3.680.820.000
371	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	6836	M2	06/07/2000	Perumahan Sunter Agung	21/06/1978	0126/A/K/BKD/1978	1 - MILIK PEMDA DKI	Lahan Sarana Olahraga	10.753.028.000
372	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	43	M2	06/08/1998	Pinangsia	21/12/1993	4282/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Pos kesehatan	524.385.000
373	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	400	M2	06/08/1998	Pinangsia	21/12/1993	4282/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Lokasi Kaki Lima	4.878.000.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
374	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN	7487	M2	06/08/1998	Pinangisia	21/12/1993	4282/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan Dan Saluran	91.303.965.000
375	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	813	M2	06/12/2004	Jalan Raya Pondok Kopi	15/11/2001	3481/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman	744.708.000
376	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1783	M2	06/12/2004	Jalan Raya Pondok Kopi	15/11/2001	3481/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	1.633.228.000
377	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1382	M2	07/02/2000	Perum Taman Pulo Gebang	20/09/1990	3624/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sekolah TK Blok D	103.811.000
378	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	856	M2	07/02/2000	Perum Taman Pulo Gebang	20/09/1990	3624/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Kantor RW Blok B	115.200.000
379	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	970	M2	07/02/2000	Perum Taman Pulo Gebang	20/09/1990	3624/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Sarana Karang Taruna Blok C	122.400.000
380	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	504	M2	07/02/2000	Perum Taman Pulo Gebang	20/09/1990	3624/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok B	792.792.000
381	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	583	M2	07/02/2000	Perum Taman Pulo Gebang	20/09/1990	3624/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Taman Blok C	917.059.000
382	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	4439.8	M2	07/04/2006	Perumahan Tomang Barat Baru	07/05/1977	1026/A/K/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	12.338.204.200
383	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	12394.1	M2	07/04/2006	Perumahan Tomang Barat Baru	07/05/1977	1026/A/K/BKD/1977	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah Jalan	24.949.323.300
384	TANAH BANGUNAN RUMAH PENDINGIN	26052	M2	29/08/2005	Pulau Bidadari	12/10/1994	3280/-1.711.5	1 - MILIK PEMDA DKI	Tanah (Sebagai Objek Pengaman Pariwisata)	4.168.320.000
1543	Tanah Taman Kota/Lingkungan	584	M²	26-04-2018	Jalan H. Cokong/Jalan Taman Rasuna Said Kelurahan Karet Kecamatan SetiabudiKaret Setiabudijakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		9.591.032.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1544	Tanah Jalur Hijau	721	M ²	26-04-2018	Jalan H. Cokong/Jalan Taman Rasuna Said Kelurahan Karet Kecamatan SetiabudiKaret SetiabudiJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		23.977.580.000
1545	Tanah Taman Kota/Lingkungan	266	M ²	26-04-2018	Jalan Denpasar Raya Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan SetiabudiKaret Kuningan SetiabudiJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		3.749.270.000
1546	Tanah Marga Jalan (Mjl)	5428	M ²	26-04-2018	Jalan Darmawangsa X Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran BaruCipete UtaraKebayoran BaruJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		114.329.964.000
1547	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	1454	M ²	26-04-2018	Jalan Darmawangsa X Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran BaruCipete UtaraKebayoran BaruJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		30.625.602.000
1548	Tanah Penyempurna Saluran Waduk	432	M ²	25-05-2018	Jalan Gandaria/Jalan Jatayu Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran BaruKramat PelaKebayoran BaruJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		10.063.440.000
1549	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi	418	M ²	13-08-2018	Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan SetiabudiKaret Semanggi SetiabudiJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		33.661.540.000
1550	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3076	M ²	13-08-2018	Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan SetiabudiKaret Semanggi SetiabudiJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		226.915.319.000
1552	Tanah Prasarana Jalan	193	M ²	28-09-2018	Jalan TB Simatupang Kav. 1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar MingguCilandak TimurPasar MingguJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		3.117.915.000
1553	Tanah Marga Jalan (Mjl)	202	M ²	02-02-2018	Jalan Jakarta - Bogor KM. 26,6 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		930.210.000
1554	Tanah Marga Jalan (Mjl)	13856	M ²	17-04-2018	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		32.589.312.000
1555	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	14187	M ²	17-04-2018	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		33.367.824.000
1556	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	53705	M ²	17-04-2018	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		126.314.160.000
1557	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	13588	M ²	17-04-2018	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		31.958.976.000
1558	Tanah Sarana Umum Kota (Suk)	11698	M ²	17-04-2018	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		27.513.696.000
1559	Tanah Prasarana Jalan	535	M ²	31-05-2018	Jl. Raya Tengah, GedongPasar ReboJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		1.486.765.000
1560	Penyempurna Hijau Umum (Phu)	103	M ²	31-05-2018	Jl. Raya Tengah, GedongPasar ReboJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		286.237.000
1561	Tanah Prasarana Jalan	63444	M ²	29-06-2018	Jalan Kayu Tinggi / Jalan Tambun Rengas Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		196.676.400.000
1562	Tanah Jalur Hijau (H.4)	8061	M ²	29-06-2018	Jalan Kayu Tinggi / Jalan Tambun Rengas Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		24.989.100.000
1563	Tanah Marga Jalan (Mjl)	23488	M ²	29-06-2018	Jalan Tambun Rengas Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		195.490.624.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1564	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	5218	M ²	29-06-2018	Jalan Tambun Rengas Cakung TimurCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		43.429.414.000
1565	Prasarana Pendidikan	285	M ²	30-07-2018	Jalan Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan CiracasJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		2.172.555.000
1566	Hijau Tegangan Tinggi (H.5)	3767	M ²	30-07-2018	Jalan Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan CiracasJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		28.715.841.000
1567	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3776	M ²	20-08-2018	Jl. Raya BekasiCakung BaratCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		17.365.920.000
1568	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	214	M ²	20-08-2018	Jl. Raya BekasiCakung BaratCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		5.649.600.000
1569	Tanah Penyempurna Saluran air/waduk (Psw)	1826	M ²	20-08-2018	Jl. Raya BekasiCakung BaratCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		4.820.640.000
1570	Tanah Prasarana Jalan	1283	M ²	28-09-2018	Jalan Tipar Cakung KM 06 Nomor 49 Cakung BaratCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		6.536.885.000
1571	Tanah Prasarana Jalan	1064	M ²	30-10-2018	Jl. Raya Bekasi,Ujung MentengCakungJakarta Timur			1 - MILIK PEMDA DKI		10.262.280.000
1572	Lahan Rencana Penghijauan	3071	M ²	20-04-2018	Pulau Karang Kudus PariKepulauan Seribu UtaraKab. Seribu			1 - MILIK PEMDA DKI		6.682.496.000
1573	Tanah Marga jalan (Mjl)	8910	M ²	05-09-2018	Jl. Kebon Kacang Kel. Kebon Melati Kec. Tanah AbangKebon MelatiTanah AbangJakarta Pusat			1 - MILIK PEMDA DKI		95.007.330.000
1574	Tanah Marga drainase	950	M ²	05-09-2018	Jl. Kebon Kacang Kel. Kebon Melati Kec. Tanah AbangKebon MelatiTanah AbangJakarta Pusat			1 - MILIK PEMDA DKI		10.129.850.000
1575	Tanah yang terkena rencana jalan	1941	M ²	26-10-2018	Jl. Jend. Kramat Raya No. 101 Kel. Paseban Kec. SenenPasebanSenenJakarta Pusat			1 - MILIK PEMDA DKI		56.721.843.000
1576	Tanah prasarana jalan	180,43	M ²	26-10-2018	Jl. Krekot/ Jl. Pintu Air V Kel. Pasar Baru Kec. Sawah BesarPasar BaruSawah BesarJakarta Pusat			1 - MILIK PEMDA DKI		3.744.824.650
1577	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	954	M2	12-04-2018	Perumahan Gading MediteraniaKelapa Gading BaratKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		20.094.102.000
1578	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2410	M2	12-04-2018	Perumahan Danau IndahSunter JayaTanjung PriokJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		40.222.900.000
1579	Tanah Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr)	530	M2	12-04-2018	Jalan Bisma RayaPapanggoTanjung PriokJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		9.738.750.000
1580	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	772	M2	12-04-2018	Jalan Bisma RayaPapanggoTanjung PriokJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		14.185.500.000
1581	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2778	M2	12-04-2018	Jalan Raya CasablancaKelapa Gading BaratKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		58.513.014.000
1582	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	8007	M2	03-05-2018	Perumahan Grand OrchardSukapuraCilincingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		90.519.135.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1583	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	3683	M2	03-05-2018	Perumahan Grand OrchardSukapuraCilincingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		41.636.315.000
1584	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	1114	M2	03-05-2018	Perumahan Grand OrchardSukapuraCilincingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		12.593.770.000
1585	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	20684	M2	21-05-2018	Perumahan Kirana Legacy, Jalan Rorotan RorotanCilincingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		69.808.500.000
1586	Tanah Penyempurna Hijau Umum/Taman (Phu/Pht)	48438	M2	21-05-2018	Perumahan Kirana Legacy, Jalan Rorotan RorotanCilincingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		163.478.250.000
1587	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2136	M2	10-08-2018	Perumahan Gading MediteraniaKelapa Gading BaratKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		44.990.568.000
1588	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi (Ptt)	6048	M2	10-08-2018	Perumahan Gading GrandePegangsaan DuaKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		86.746.464.000
1589	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	875	M2	10-08-2018	Perumahan Gading GrandePegangsaan DuaKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		12.550.125.000
1590	Tanah Saluran (Psw)	4630	M2	10-08-2018	Mangga Dua SquareAncolPademanganJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		154.850.350.000
1591	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6578	M2	14-11-2018	Tanah Marga Jalan (Mjl) yang terletak di Komplek Wholesale Trade Center (WTC) Mangga Dua dan yang terletak di sisi Utara areal Gedung WTC Mangga			1 - MILIK PEMDA DKI		200.353.054.000
1592	Tanah Marga Jalan (Mjl)	315	M2	29-11-2018	The Kensington CommercialsKelapa Gading TimurKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		8.298.045.000
1593	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	3977	M2	14-12-2018	Jalan Kapuk Muara No. 7Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		9.974.316.000
1594	Tanah Pasar	2179	M²	06-05-2018	Jalan Gading Putih Raya Kelapa Gading TimurKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		21.016.455.000
1595	Tanah Rencana Jalan	432	M²	23-07-2018	Jalan TB. Simatupang Nomor 7B RT 02 RW 02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta SelatanCilandak BaratCilandak Jakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		11.229.840.000
1596	Lahan Prasarana Jalan	144	M²	11-07-2018	Jalan Kemang Selatan Nomor 98 Cilandak TimurPasar MingguJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		2.988.720.000
1597	Lahan Prasarana Jalan	181	M²	31-01-2018	Jalan Kemang Timur (d/h Jalan Bangka 1)Pejaten BaratPasar MingguJakarta Selatan			1 - MILIK PEMDA DKI		2.418.703.000
1598	Tanah	19478	M²	28-11-2018	Jalan Raya Bekasi / Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta UtaraPegangsaan DuaKelapa GadingJakarta Utara			1 - MILIK PEMDA DKI		187.865.310.000
1600	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2141	M²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		12.338.583.000
1601	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	913	M²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		5.261.691.000
1602	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	859	M²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		4.950.417.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1603	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	3706	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		21.357.678.000
1604	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	159	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		916.317.000
1605	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2580	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		14.868.540.000
1606	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	3724	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		56.251.020.000
1607	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	889	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		18.725.007.000
1608	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	821	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		17.292.723.000
1609	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	91	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		524.433.000
1610	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1832	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		38.587.416.000
1611	Lahan Sisa Kewajiban Sarana Tempat Ibadah (Sti)	467	M ²	03-10-2018	Puri IndahKembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		2.691.321.000
1612	Lahan Marga Jalan	75	M ²	08-10-2018	Jalan Peta Barat / Jalan Peta Selatan KalideresKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		475.725.000
1613	Bangunan Suka Sosial Ibadah Berupa Vihara	490	M ²	09-10-2018	Komplek Perumahan Citra 6 Citra Garden CityTegal AlurKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		2.591.142.000
1614	Lahan Marga Jalan	701	M ²	31-10-2018	Jalan Letjen S. Parman Kav. 3 Tanjung Duren UtaraGrogol PetamburanJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		24.573.555.000
1615	Lahan Marga Jalan	96,30	M ²	06-11-2018	Jalan Letjen S. parman Kav. 70 SlipiPalmerahJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		3.375.796.500
1616	Lahan Marga Jalan	539	M ²	08-11-2018	Jalan Joglo RayaJogloKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		3.031.875.000
1617	Lahan Marga Jalan	735	M ²	08-11-2018	Jalan Joglo RayaJogloKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		4.134.375.000
1618	Lahan Marga Jalan	52	M ²	08-11-2018	Jalan Joglo RayaJogloKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		292.500.000
1619	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	705	M ²	09-11-2018	Jalan Kintamani Raya Nomor 2 Kawasan Daan Mogot BaruKalideresKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		10.111.815.000
1620	Lahan Marga Jalan	5	M ²	09-11-2018	Jalan Kintamani Raya Nomor 2 Kawasan Daan Mogot BaruKalideresKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		71.715.000
1621	Lahan Marga Jalan	140	M ²	10-12-2018	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2 Kembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		389.060.000

NO	NAMA ASET	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	TGL SERTIFIKAT TANAH	NO SERTIFIKAT TANAH	STATUS TANAH	PENGUNAAN	HARGA (Rp)
1622	Lahan Marga Jalan	99	M ²	10-12-2018	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2 Kembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		275.121.000
1623	Lahan Marga Jalan	229	M ²	10-12-2018	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2 Kembangan SelatanKembanganJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		636.391.000
1624	Lahan Prasarana Jalan	915	M ²	17-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratCengkareng BaratCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		4.213.575.000
1625	Lahan Prasarana Jalan	15398	M ²	17-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratCengkareng BaratCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		114.792.090.000
1626	Lahan Prasarana Jalan	348	M ²	18-12-2018	Jalan Daan Mogot KM.18 KalideresKalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		3.638.340.000
1627	Lahan Marga Jalan	290	M ²	20-12-2018	Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar TamansariJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		10.284.270.000
1628	Lahan Marga Jalan	91	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		282.100.000
1629	Lahan Marga Jalan	103	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		319.300.000
1630	Lahan Marga Jalan	91	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		282.100.000
1631	Lahan Marga Jalan	425	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		1.317.500.000
1632	Lahan Marga Jalan	1	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		3.100.000
1633	Lahan Marga Jalan	361	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		1.119.100.000
1634	Lahan Marga Jalan	45	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		139.500.000
1635	Lahan Marga Jalan	22	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		68.200.000
1636	Lahan Marga Jalan	16	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		49.600.000
1637	Lahan Marga Jalan	23	M ²	21-12-2018	Jalan Lingkar Luar BaratDuri KosambiCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		71.300.000
1638	Lahan Marga Jalan	3629	M ²	28-12-2018	Kamal Raya / Rawa BagusCengkareng TimurCengkarengJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		10.084.991.000
1639	Lahan Marga Jalan	13247	M ²	31-12-2018	Jalan Daan Mogot KM. 17 Semanan KalideresJakarta Barat			1 - MILIK PEMDA DKI		98.756.385.000
									TOTAL :	11.555.872.604.561

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
PERALATAN DAN MESIN

NO	JENIS BARANG	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	BAHAN	ASAL-USUL PEROLEHAN / ANGGARAN	HARGA (Rp)	RENOVASI (Rp)	TOTAL (Rp)	KETERANGAN
1	LAIN-LAIN	1	M2	21/11/2017	2	FASOS FASUM	2.050.000.000	0	2.050.000.000	Mesin-mesin Pengganti PT Metropolitan Kencana 2908/-1.795.12 21/11/2017
							TOTAL (Rp)	0	2.050.000.000	

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	JENIS BARANG	UKURAN	SATUAN	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	KONDISI	BERTINGKAT	BETON	TGL. DOK	NO. DOK	HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	21-03-2014		128.784.000	128.784.000
2	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	21-03-2014		103.641.000	103.641.000
3	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	21-03-2014		95.369.400	95.369.400
4	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	2	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	21-03-2014		190.738.800	190.738.800
5	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON	21-03-2014		95.369.400	95.369.400
6	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON	21-03-2014		135.484.000	135.484.000
7	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON	21-03-2014		138.316.000	138.316.000
8	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	1	UN	21/03/2014	...	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON	21-03-2014		137.627.000	137.627.000
9	LAIN-LAIN	75	M2	04/10/1992	Pulau Petondan Barat,Pulau Kelapa,Kepulauan Seribu	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	04-10-1992	2357/-1.711	109.500.000	109.500.000
10	LAIN-LAIN	350	M2	16/12/2014	Tugu Permai,Tugu Utara,Koja,Jakarta Utara	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON	16-12-2014	606/A/BKD/19 76	96.425.080	96.425.080
11	BANGUNAN GUDANG BANGUNAN GUDANG	31	M2	04/10/1992	Pulau Petondan Barat,Pulau Kelapa,Kepulauan Seribu	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	04-10-1992	2357/-1.711	45.260.000	45.260.000
12	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	151	M2	11/08/2013	Perum Citra Garden City 2 Ext Blok BI 4,Pegadungan,	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	11-08-2013	1350/-1.711.5	1.056.000.000	1.056.000.000
13	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	768.9	M2	10/06/2015	Jalan Lembah Aren Blok K-3 Rt. 002 Rw. 009,Pondok	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	10-06-2015	16/AK/BP/III/2 006	2.797.818.600	2.797.818.600
14	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	80	M2	23/01/1992	Sukapura,Sukapura,Cilincing,Jak arta Utara	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	23-01-1992	01426/III/1984	135.200.000	135.200.000
15	BANGUNAN STASIUN BANGUNAN STASIUN	7.5	M2	06/12/2017	Jalan Jatibaru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON			57.000.000	57.000.000
16	BANGUNAN STASIUN BANGUNAN STASIUN	7.5	M2	06/12/2017	Jalan Jatibaru Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	0 - BUKAN BETON			57.000.000	57.000.000
17	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 43,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.892.000	35.892.000
18	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 44,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	34.782.000	34.782.000
19	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 45,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	57.025.000	57.025.000
20	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 46,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.729.000	35.729.000

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
GEDUNG DAN BANGUNAN

21	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 47,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	23.178.000	23.178.000
22	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 48,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	23.178.000	23.178.000
23	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 49,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	22.781.000	22.781.000
24	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 50,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.708.000	35.708.000
25	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	120	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 51,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	67.234.000	67.234.000
26	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 52,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.121.000	35.121.000
27	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 53,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
28	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 54,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	22.384.000	22.384.000
29	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 55,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	22.401.000	22.401.000
30	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 56,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.664.000	35.664.000
31	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	45	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 57,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	35.664.000	35.664.000
32	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	90	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 58,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	75.772.000	75.772.000
33	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 59,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
34	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 60,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
35	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 61,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
36	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 62,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
37	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 63,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
38	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 64,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
39	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	70	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 65,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	55.584.000	55.584.000
40	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	90	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 66,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	75.135.000	75.135.000
41	RUMAH NEGARA RUMAH NEGARA	90	M2	28/05/2015	Jalan Ciputat Raya No. 67,Lebak Bulus,Cilandak,Jakarta	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	28-05-2015	Hibah No. B/1230/BAST	75.135.000	75.135.000
42	MESS/WISMA/BUNGALA MESS/WISMA/BUNGALA	162	M2	05/10/1992	Pulau Petondan Barat,Pulau Kelapa,Kepulauan Seribu	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN	05-10-1992	2357/-1.711	273.780.000	273.780.000
43	Bangunan Gedung Sarana Ibadah (Gereja)	2238	M ²	07-08-2017	Perumahan Kosambi Baru Jalan Angsoka Utama Blok D-4	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN			9.378.300.000	9.378.300.000
44	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	126	M ²	13-08-2018	Jalan Setiabudi 2 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi KaretSetiabudiJakarta Selatan	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN			48.500.000	48.500.000

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
GEDUNG DAN BANGUNAN

45	Bangunan TK Negeri Koja 02	371,28	M2	14-12-2018	Jalan Kramat JayaTugu UtaraKoja Jakarta Utara	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN			2.242.054.335	2.242.054.335
46	Bangunan Pasar	2196	M²	06-05-2018	Jalan Gading Putih Raya Kelapa Gading TimurKelapa GadingJakarta Utara	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN			11.825.363.340	11.825.363.340
47	Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	320	Unit	30-08-2018	Jalan Daan Mogot KM 14,5 KalideresCengkarengJakarta Barat	1 - BAIK	0 - TIDAK BERTINGKAT	2 - CAMPURAN			87.606.100.000	87.606.100.000
											16.189.068.280	117.911.085.955

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
JALAN , IIRIGASI, DAN JARINGAN

NO	JENIS BARANG	PANJANG	LEBAR	UKURAN	SAT	TGL PEROLEHAN	ALAMAT	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	JALAN JALAN	1	1	1	MT	24/12/2013	Jl. Taman Rasuna Said - Jl.	21.457.381.000	Bangunan Jalan Tembus Sejajar Timur Kali Cideng Selebar 18 Cm
2	LAIN-LAIN	12,898	1	12,898	M2	09/08/2017	Jl. Letjen. S. Parman Tanjung	1.317.800.000	Konstruksi Penyempurnaan Hijau Taman
3	LAIN-LAIN	204	1	204	M2	25/01/2017	Jl. Brigjen Katamso (Tai)	480.119.300	Taman dan Tanaman PT. Daksawira Perdana
4	LAIN-LAIN	68	1	68	M2	13/04/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan	261.272.435	Konstruksi Bangunan Suka Pelay Umum
5	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	34,618	1	34,618	MT	09/08/2017	Jl. Letjen S. Parman / Tanjung	9.328.700.000	1784/-1.711.534 038/PT APL/VIII/17
6	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	63	1	63	MT	07/08/2017	Jl TB Simatupang Kirana - Kel.	25.200.000	PT Lestari Kirana Persada 636/-1.711
7	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	671	1	671	MT	07/08/2017	Jl TB Simatupang Kirana - Kel.	1.403.900.000	PT Lestari Kirana Persada 636/-1.711
8	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	1,632	1	1,632	M2	09/08/2017	Dibelakang Kav 29,30,31, 32 Jl	3.943.000.000	PT Jakarta Land 653/-1.711
9	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	967	1	967	M2	07/08/2017	Jalan Jendral Sudirman Kav 22-	1.917.600.000	PT Kepland Investama 635/-1.711
10	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	198	1	198	M2	16/08/2017	MT. Haryono Kav 2 dan 3	6.171.159.000	PT Cipta Pesona Karya c
11	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	261	1	261	M2	11/09/2017	Tb. Simatupang Kelurahan	149.700.000	PT Kalma Propertindo Jaya 787/-1.711
12	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	26	1	26	M2	11/09/2017	Jl Senopati Kelurahan	124.800.000	PT Asiana Lintas Devlopment 785/-1711
13	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	728	1	728	M2	11/09/2017	Jl Iskandar Muda/ Jl Kalimaya	792.000.000	PT Sinar Pamaronda 786/-1.711
14	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	716	1	716	M2	11/09/2017	Jl Jendral Sudirman Kav.	2.912.566.000	PT Alfindo Mercu Estate 788/-1.711
15	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	15,722	1	15,722	M2	16/06/2017	Jalan Bekasi Timur Kelurahan	8.487.000.000	PT. Pilar Megah Pradigdo 16/06/2017 3245/-1.711.53
16	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	6,633	1	6,633		21/11/2017	Simpang Mall Pondok Indah	51.428.000.000	PT Metropolitan Kencana Konstruksi Terowongan (Underpa
17	JALAN PROPINSI JALAN PROPINSI KELAS I	190	1	190		24/01/2017	Jl. Brigjen Katamso	734.910.000	Marga Jalan PT. Daksawira Perdana
18	LAIN-LAIN	190	1	190	M2	24/01/2017	Jl. Brigjen Katamso	19.441.400	Kansteen PT. Daksawira Perdana
19	LAIN-LAIN	190	1	190		24/01/2017	Jl. Brigjen Katamso	22.880.000	Trotoal PT. Daksawira Perdana
20	LAIN-LAIN	283	1	283	M2	15/06/2017	Jalan Bekasi Timur	1.913.839.084	Konstruksi Bangunan Suka Rekre
21	LAIN-LAIN	116	1	116	M2	13/04/2017	Jalan Bekasi Timur	481.241.368	Konstruksi Bangunan Suka Sosia Ibadah
22	LAIN-LAIN	3,184	1	3,184	M2	25/01/2017	Jalan Bekasi Timur	326.476.000	Konstruksi Penyempurna Hijau T

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
JALAN , IRIGASI, DAN JARINGAN

23	JEMBATAN PENYEBERANGAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG	26	22	571	M2	12/07/2017	Jl. Dr. Soepomo Kecamatan Tebet	3.734.000.000	PT Danayasa Arthatama 539/-1.711
24	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI SALURAN INDUK	99	1	99	M2	12/07/2017	Jl Jendral Sudirman Kav 52-	7.982.000.000	PT Danayasa Arthatama 539/-1.711
25	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI SALURAN INDUK	239	1	239	M2	11/09/2017	Jl Jendral Sudirman Kav.	1.655.422.000	788/-1.711 PT Alfindo Mercu Estate
26	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI SALURAN SEKUNDER	114	1	114	M2	24/01/2017	Jl. Brigjen Katamso (Tai	393.649.300	Saluran PT. Daksawira Perdana
27	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	732	1	732	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	6.634.116.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
28	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	94	1	94	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	851.922.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.72
29	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	102	1	102	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	924.426.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.72
30	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	19	1	19	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	172.197.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
31	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	35	1	35	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	317.205.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
32	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	267	1	267	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	2.419.821.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
33	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	162	1	162	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	1.468.206.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.72
34	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	137	1	137	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	1.241.631.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
35	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	179	1	179	M2	13/04/2017	Jalan Raya Bekasi	1.622.277.000	PT. Makmur Karya Persada 13/04/2017 2540/-1.711.7
36	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SALURAN DRAINASE	186	1	186	M2	14/03/2017	Jalan Raya Bekasi	1.685.718.000	Marga Drainase / Tata Air PT. Makmur Karya Persada
37	Konstruksi Jalan			101	M ²	14-11-2017	Jalan Letjen, MT. Haryono Kav. 22 Tebet TimurTebetJakarta Selatan	653.224.000	
38	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)			2846,53	M ²	13-08-2018	Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan SetiabudiKaret Semanggi SetaibudiJakarta Selatan	4.156.000.000	PT Wisma Purnayudha Putra dan PT Prabu Budi Mulia q.q. PT Kencana Graha Optima
39	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)			7.932,89	M ²	17-04-2018	Jl. Basuki Rachmat, Cipinang BesarJatinegaraJakarta Timur	6.588.300.000	PT. Synthesis Karya
40	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)			1.229,60	M ²	17-04-2018	Jl. Basuki Rachmat, Cipinang BesarJatinegaraJakarta Timur	1.969.600.000	PT. Synthesis Karya
41	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)			928,90	M ²	17-04-2018	Jl. Basuki Rachmat, Cipinang BesarJatinegaraJakarta Timur	6.801.500.000	PT. Synthesis Karya
42	Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)			245,90	M ²	17-04-2018	Jl. Basuki Rachmat, Cipinang BesarJatinegaraJakarta Timur	3.000.400.000	PT. Synthesis Karya
43	Konstruksi Waduk Rorortan			152769	M ²	20-08-2018	Cakung TimurCakung TimurCakungJakarta Timur	67.648.014.000	PT. Mitra Sindo Makmur
44	Konstruksi Marga jalan			18204	M ²	05-09-2018	Jl. Kebon Kacang Kel. Kebon Melati Kec. Tanah AbangKebon MelatiTanah AbangJakarta Pusat	38.536.000.000	PT. Jakarta Realty
45	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali			7220	M ²	27-09-2018	Jalan Inspeksi Kali Sentiong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat-KemayoranJakarta Pusat	25.105.555.577	PT. Jaladri Kartika Pakci
46	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali			7350	M ²	27-09-2018	Kali Sentiong Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta UtaraTanjung PriokJakarta Utara	13.761.718.419	PT. Jaladri Kartika Pakci
							TOTAL	313.021.887.883	

DAFTAR REKLASIFIKASI ASET FASOS FASUM KE DALAM ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2018
ASET TETAP LAINNYA

NO	JENIS BARANG	KOMPONEN	TGL PEROLEHAN	BUKU / PERPUSTAKAAN		BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN		HEWAN/TERNAK DAN TUMBUHAN		SATUAN	ASAL USUL PEROLEHAN / ANGGARAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
				JUDUL	PENCIPTA	ASAL DAERAH	BAHAN	JENIS	UKURAN				
1	LAIN-LAIN	11 - PEMDA DKI JAKARTA	20/11/2017				52 - Campuran		0	BH	FASOS FASUM	339.167.000	Gardu Listrik Pulau Tidung PT. Indocater
											TOTAL :	339.167.000	

DAFTAR SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN
YANG BERATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA HPL	LUAS (M2)	PEMEGANG HAK
1	1/Cideng	13.395	Pemprov DKI Jakarta
2	1/Cikini	13.395	Pemprov DKI Jakarta
3	1/Papanggo	144.240	Pemprov DKI Jakarta
4	1/Sunter Jaya	139.145	Pemprov DKI Jakarta
5	1/Semper Barat	4.770	Pemprov DKI Jakarta
6	1/Glodok	10.480	Pemprov DKI Jakarta
7	1/Karet Kuningan	160.920	Pemprov DKI Jakarta
8	45/Kamal Muara	3.120.000	Pemprov DKI Jakarta
9	46/Kamal Muara	1.093.580	Pemprov DKI Jakarta
10	1/Penggilingan	60.319	Pemprov DKI Jakarta

NO	NAMA HPL	LUAS (M2)	PEMEGANG HAK
11	2/Penggilingan	272.569	Pemprov DKI Jakarta
12	1/Mangga Dua Selatan	134.442	Pemprov DKI Jakarta
13	2/Mangga Dua Selatan	14.790	Pemprov DKI Jakarta
14	3/Mangga Dua Selatan	907	Pemprov DKI Jakarta
15	4/Mangga Dua Selatan	333	Pemprov DKI Jakarta
16	1/Taman Sari	1.230	Pemprov DKI Jakarta
17	2/Taman Sari	2.198	Pemprov DKI Jakarta
18	1/Tangki	54.395	Pemprov DKI Jakarta
19	3/Kebon Kacang	1.262	Pemprov DKI Jakarta
20	4/Jatinegara	29.070	Pemprov DKI Jakarta
21	10/Jatinegara	151.797	Pemprov DKI Jakarta
22	11/Jatinegara	40.605	Pemprov DKI Jakarta
23	6/Ancol	124.289	Pemprov DKI Jakarta
24	1/Wijaya Kusuma	86.074	Pemprov DKI Jakarta
25	00001/Karet Tengsin	4.014	Pemprov DKI Jakarta

NO	NAMA HPL	LUAS (M2)	PEMEGANG HAK
26	1/Ancol	4.779.120	Pemprov DKI Jakarta
27	12/Ancol	536.823	Pemprov DKI Jakarta
28	1/Pluit	208.665	PT. Jakarta Propertindo
29	2/Pluit	752.000	PT. Jakarta Propertindo
30	3/Pluit	24.880	PT. Jakarta Propertindo
31	9/Pluit	2.230	PT. Jakarta Propertindo
32	16/Kapuk Muara	5.628	PT. Jakarta Propertindo
33	1/Kamal Muara	178.020	PT. Jakarta Propertindo
34	3/Penjaringan	13.590	PT. Jakarta Propertindo
35	00001/Penggilingan	371.480	PT. JIEP
36	1/Kayu Putih	88.200	PT. Pulomas Jaya
Total		12.638.855	

**DAFTAR ASET YANG TELAH BERAKHIR PERJANJIAN KERJA SAMA
DAN DISAJIKAN SEBAGAI ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DISEWAKAN PER 31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo per 31 Desember 2018 (Rp)			Masa Pinjam/Sewa		Nilai Sewa	Status Pembayaran	Piutang (Rp)	Keterangan
			Tanah	Bangunan	Total	Awal	Akhir				
1	Jalan Sunter Paradise 16 Blok L Nomor 7 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Pendidikan Karya Kasih		109.772.693,00	109.772.693,00	06/01/2002	05/01/2007	27.500.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
2	Telkomsel	PT Telekomunikasi Seluler	129.360.000,00		129.360.000,00	26/09/2003	26/09/2008	250.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
3	Jalan Tongkol Nomor 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	PT Jaya Fibrindo Karsa Pratama	28.350.000.000,00	183.000.000,00	28.533.000.000,00	31/12/2005	30/12/2008	330.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
4	Jalan Tongkol Nomor 10 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	Sukijat Hidayat	46.406.250.000,00	2.379.000.000,00	48.785.250.000,00	31/06/2006	30/06/2009	531.900.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
5	Telkomsel	PT Telkomsel	186.000.000,00		186.000.000,00	09/08/2004	09/08/2009	250.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
6	Blok A.4, Perumahan Villa Duta Mas, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Yayasan Pelita Abadi	930.000.000,00	232.960.000,00	1.162.960.000,00	18/10/2004	18/10/2009	57.500.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
7	Telkomsel	PT Telkomsel	157.300.000,00		157.300.000,00	20/12/2004	20/12/2009	250.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
8	Blok AE 8 Perumahan Citra 1 Extension, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Islam Al Huda	1.091.748.000,00	409.500.000,00	1.501.248.000,00	29/04/2008	28/09/2011	45.000.000,00	Piutang sewa	49.215.000,00	Tidak diperpanjang. Surat tagihan Nomor 1608/-076.33 tanggal 6 April 2018
9	Gedung eks walikotamadya Jakarta Selatan di Jl Trunojoyo no 1 Jakarta selatan	LKBH Peka		253.500.000,00	253.500.000,00	13/10/2006	12/10/2011	37.500.000,00	Piutang sewa	735.000,00	Tidak diperpanjang. Surat tagihan Nomor 1674/-078.7 tanggal 10 April 2018
10	Jalan Nangka Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Univ Indraprasta PGRI	1.685.250.000,00	253.500.000,00	1.938.750.000,00	22/12/2006	22/12/2011	75.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
11	Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Yayasan Golf DKI Jakarta	1.534.851.000,00		1.534.851.000,00	20/07/2007	20/07/2012	40.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
12	Gedung SMP 239 Jalan Nangka Nomor 58, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	Univ Indraprasta PGRI		5.118.120.000,00	5.118.120.000,00	01/12/2007	30/11/2012	162.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
13	Jl. Letnan Jenderal MT. Haryono Kavling 52-53 Jakarta selatan	Kop UKM Dinas UKM		456.300.000,00	456.300.000,00	14/07/2008	13/07/2013	30.000.000,00	Piutang sewa	42.420.000,00	Tidak diperpanjang. Surat tagihan Nomor 848/-076.33 tanggal 16 Januari 2018
14	Areal Pasar Ikan Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara	UD RESTU IBU	793.125.000,00		793.125.000,00	05/12/2008	05/12/2013	84.556.394,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
15	Jalan Krapu Nomor 5 (Tongkol) Pasar Ikan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	PT Rukun Gaya Baru	12.605.625.000,00	1.464.000.000,00	14.069.625.000,00	12/08/2009	10/08/2014	650.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
16	Komplek Perumahan Karyawan DKI Jakarta RT:11/002, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Nurmala Hikmah	1.420.650.000,00		1.420.650.000,00	01/06/2011	01/06/2016	56.370.929,60	Lunas	-	Tidak diperpanjang. Lahan telah dibangun RPTRA
17	Jalan Prof. Joko Sutono SH Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	PT Solusindo Kreasi Utama	509.500.000,00		509.500.000,00	14/10/2011	13/10/2016	375.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
18	Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	PT Asri Karya Indah Pesona	14.581.413.000,00	3.108.450.000,00	17.689.863.000,00	01/01/2012	31/12/2016	620.080.225,60	Lunas	-	Tidak diperpanjang
19	Tanah Kompleks Perumahan Kelapa Gading Blok HF 10, Jalan Janur Elok IX Kelapa Gading (Sarana Olahraga)	PT Wiradharma Sportindo	12.049.500.000,00		12.049.500.000,00	08/11/2012	04/06/2017	563.709.296,00	Piutang sewa	486.894.760,80	PT WS tidak dapat memanfaatkan lahan karena mendapat pertentangan dari masyarakat. PT WS tidak mendapatkan IMB karena adanya surat keberatan dari masyarakat ke Walikota Jakarta Utara. Surat tagihan Nomor 1617/-076.33 tanggal 6 April 2018
20	Jalan Danau Indah Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok	Yayasan Jema'at Sungai Yordan	11.500.000.000,00		11.500.000.000,00	05/07/2012	04/07/2017	125.000.000,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang. Lahan telah dibangun RPTRA
21	Jalan Elang Prima Blok C.1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Yayasan Pantara	4.158.336.000,00	975.520.000,00	5.133.856.000,00	08/08/2012	07/08/2017	112.741.859,20	Lunas	-	Tidak diperpanjang

No.	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo per 31 Desember 2018 (Rp)			Masa Pinjam/Sewa		Nilai Sewa	Status Pembayaran	Piutang (Rp)	Keterangan
			Tanah	Bangunan	Total	Awal	Akhir				
22	Kompleks Perumahan Mega Kebon Jeruk, Jalan Raya Joglo, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	PT Ikrar Anugerah Perkasa	1.316.000.000,00	1.152.525.000,00	2.468.525.000,00	12/09/2012	11/09/2017	385.000.000,00	Piutang sewa	404.250.000,00	Tidak diperpanjang. Surat tagihan Nomor 1611/-076.33 tanggal 6 April 2018
23	Jalan Taman Pejaten Mas Raya Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	PT Griya Berlian	54.468.400.000,00	63.256.700.000,00	117.725.100.000,00	29/11/2012	28/11/2017	3.190.000.000,00	Piutang sewa	1.391.250.000,00	Tidak diperpanjang
24	Tanah di Depan Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru	PT Figur Karya Semesta	471.900.000,00		471.900.000,00	10/12/2012	10/12/2017	507.338.366,00	Lunas	-	Tidak diperpanjang
25	JL. DANAU INDAH KEL. SUNTER JAYA KEC. TJ. PRIOK JAKARTA UTARA	GBI Jemaat Sungai Yordan	9.886.125.000,00		9.886.125.000,00	11/04/2003	11/04/2003	36.103,00	Lunas	-	Dalam kondisi tidak aktif. Pemanfaatan berdasarkan BA Serah Terima Pinjam Pakai Nomor 963/077.73 tanggal 11 April 2003
26	Jalan Sunter permai raya no 1, kotamadya jakarta utara	Yayasan Ambulance Gawat Darurat 118	16.039.835.000,00	1.297.500.000,00	17.337.335.000,00	03/01/2005	02/01/2007	-	Pinjam Pakai	-	Tidak diperpanjang dan dalam kondisi tidak aktif. Pemanfaatan berdasarkan BA Serah Terima Pinjam Pakai Nomor 01/AK/BP/II/2005 tanggal 3 Januari 2005
27	Jalan Gandaria no 23 kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran baru, Jakarta Selatan	Yayasan Warga Betawi	2.351.250.000,00		2.351.250.000,00	09/05/2005	09/05/2007	-	Pinjam Pakai	-	Tidak diperpanjang dan dalam kondisi tidak aktif. Pemanfaatan berdasarkan BA Serah Terima Pinjam Pakai Nomor 10/AK/BP/II/2005 tanggal 9 Mei 2005
28	Komplek Perumahan citra 1 extension blok AE 1 Kel. Kalideres Kec. Kalideres jakarta barat	Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh	655.677.000,00	972.471.407,00	1.628.148.407,00	07/07/2006	07/07/2008	-	Pinjam Pakai	-	Tidak diperpanjang dan dalam kondisi tidak aktif. Pemanfaatan berdasarkan BA Serah Terima Pinjam Pakai Nomor 29/AKIBPNI112006 tanggal 7 Juni 2006
29	Perumahan Citra 2 Extension Blok B6. 10, Kota Administrasi Jakarta Barat	GBI Getsemani Cabang Kalideres	1.517.082.000,00	774.400.000,00	2.291.482.000,00	17/04/2003	17/4/2008	-	-	-	Dalam kondisi tidak aktif. Dokumen PKS belum diperoleh
30	Rusun Di Rawa Bebek Jakarta Selatan	PT PLN	167.737.500,00		167.737.500,00	-	-	-	-	-	Dalam kondisi tidak aktif. Dokumen PKS belum diperoleh
31	Jalan Raya Kebayoran Nomor 12 Kebayoran Lama Jakarta Selatan	RATAX	15.660.000.000,00		15.660.000.000,00	08/11/2006	11/08/2011	-	-	-	Dalam kondisi tidak aktif. Dokumen PKS belum diperoleh
32	Jalan Rawa Kepiting Nomor 5 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Jakarta Timur	PT. Pal Jayabumi Utama	50.950.000.000,00		50.950.000.000,00	18-01-2006	18-01-2011	-	-	-	Dalam kondisi tidak aktif. Dokumen PKS belum diperoleh
33	rumah susun bidara cina, jatinegara, jakarta timur	PRIMKOVERI MABES LVRI	47.320.000,00		47.320.000,00	19/05/2005	19-05-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
34	Jl anggrek roslina blok E/30 kel. kemanggisan, kec. palmerah, Jakarta Barat	Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan 45 Jak.Barat	164.034.000,00		164.034.000,00	24/03/2006	24-03-2021	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
35	Jalan Kalibaru Timur V Nomor 9 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	885.170.000,00		885.170.000,00	06-01-2014	01/06/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
36	Jalan Kopelatif Blok A.1 Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	1.595.790.000,00		1.595.790.000,00	06-01-2014	01/06/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
37	Jl. raya bekasi km 17 klender, jakarta timur	Eks. PD. Undagi Jaya Klender	1.832.550.000,00		1.832.550.000,00	28-09-1995	28-09-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
38	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Bareskrim Polri	1.853.600.000,00		1.853.600.000,00	16-11-2016	16-11-2021	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
39	Jalan Sungai Landak No. 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Kanwil Dep, Kehakiman dan HAM DKI Jakarta (RUPBASAN)	1.911.000.000,00		1.911.000.000,00	26/02/2015	26-02-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
40	Jalan Panjang C Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.151.772.000,00		2.151.772.000,00	06-01-2014	01/06/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
41	Jalan Pulomas Barat VI Kav. 14 - 16 Kota Administrasi Jakarta Timur	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.658.800.000,00		2.658.800.000,00	06-01-2014	01/06/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
42	Jalan Raden Inten II Nomor 3 Duren Sawit Jakarta Timur	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur	6.745.780.000,00		6.745.780.000,00	29/08/2014	29-08-2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
43	Jl. industri no 9-11 jakpus	Eks. Unit Komplek Aloca	9.256.610.000,00		9.256.610.000,00	28/10/1995	28-10-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
44	Jalan KH. Agus Salim Nomor 19 Jakarta Pusat	Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI)	9.856.875.000,00		9.856.875.000,00	21/07/2005	21-07-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai

No.	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo per 31 Desember 2018 (Rp)			Masa Pinjam/Sewa		Nilai Sewa	Status Pembayaran	Piutang (Rp)	Keterangan
			Tanah	Bangunan	Total	Awal	Akhir				
45	Eks. Kec. Mampang Prapatan, Jl. Piere Tendean	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	9.931.550.000,00		9.931.550.000,00	06-01-2014	01/06/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
46	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Regional V BKN	14.929.740.000,00		14.929.740.000,00	31/12/2015	31/12-2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
47	Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kejaksaan Agung Republik Indonesia - Sesuai dengan BAST Nomor 1223/-076.36	15.212.870.000,00		15.212.870.000,00	22-07-2014	22-07-2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
48	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Kemenkumham Nomor BAST 3910/-076.25 Tgl. 01-10-2015	17.507.875.000,00		17.507.875.000,00	01-10-2015	10/01/2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
49	Jalan Taman Jatibaru Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bareskrim Polri	20.481.230.000,00		20.481.230.000,00	16-11-2016	16-11-2021	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
50	Jl. kali besar timur no 31 jakarta barat	Eks. PD. Tastra Jaya	22.583.847.000,00		22.583.847.000,00	28-09-1995	28-09-2000	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
51	Jl. lapangan tembak no 75, cibubu, ciracas jakarta timur	Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI	22.586.616.000,00		22.586.616.000,00	20/01/2014	20/01/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
52	Jl. TB Smitupang no 2, Jakarta Timur	Kodam Jaya	24.800.000.000,00		24.800.000.000,00	19/12/2014	19/12/2019	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
53	Badan Narkoba Provinsi DKI Jakarta	Badan Narkoba Provinsi DKI Jakarta	101.484.000.000,00		101.484.000.000,00	31/12/2015	31/12/2020	-	Pinjam Pakai	-	setelah dicatat di Aset tetap lalu direklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai
JUMLAH			580.049.943.500,00	82.397.219.100,00	662.447.162.600,00						